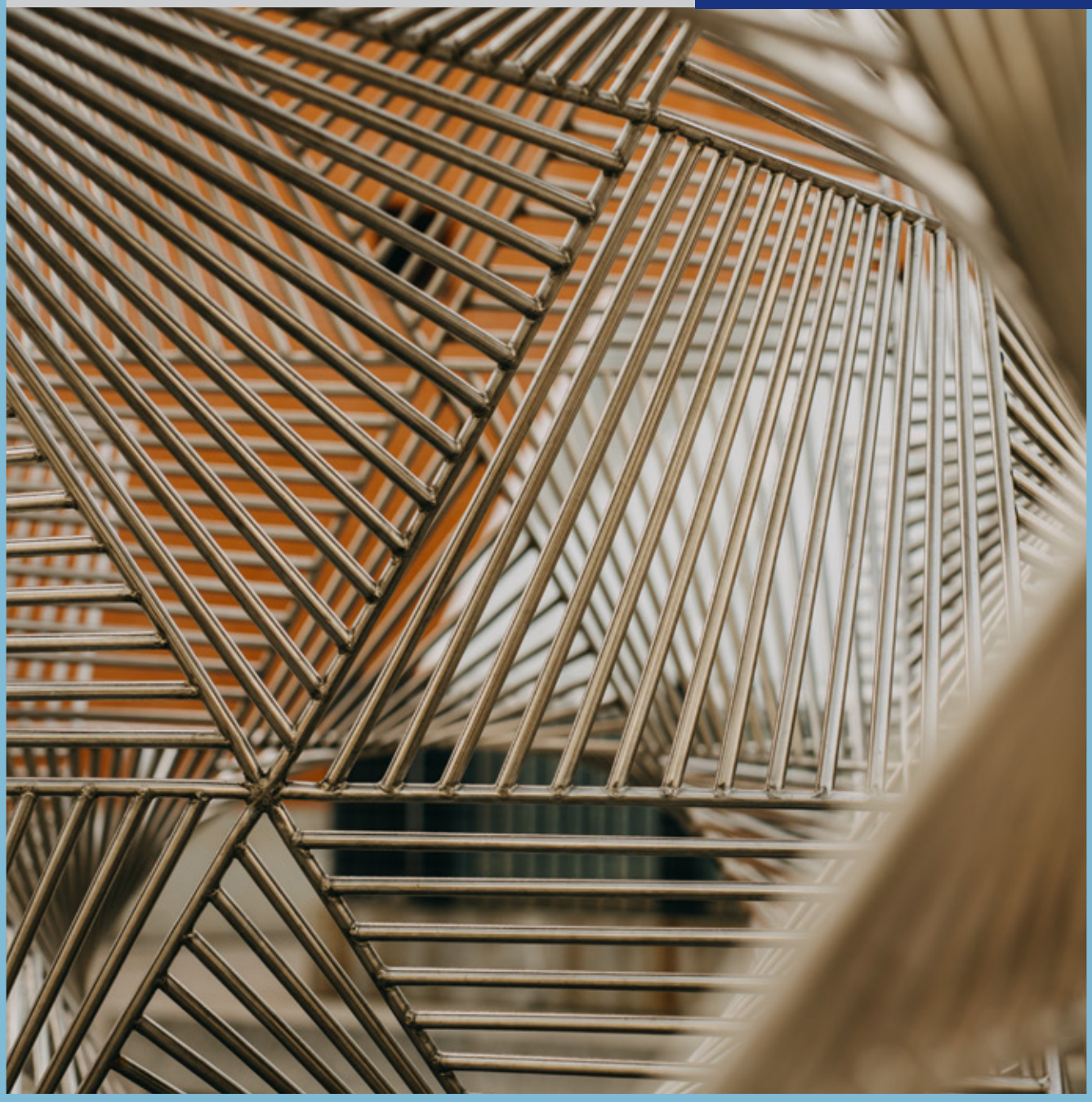
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

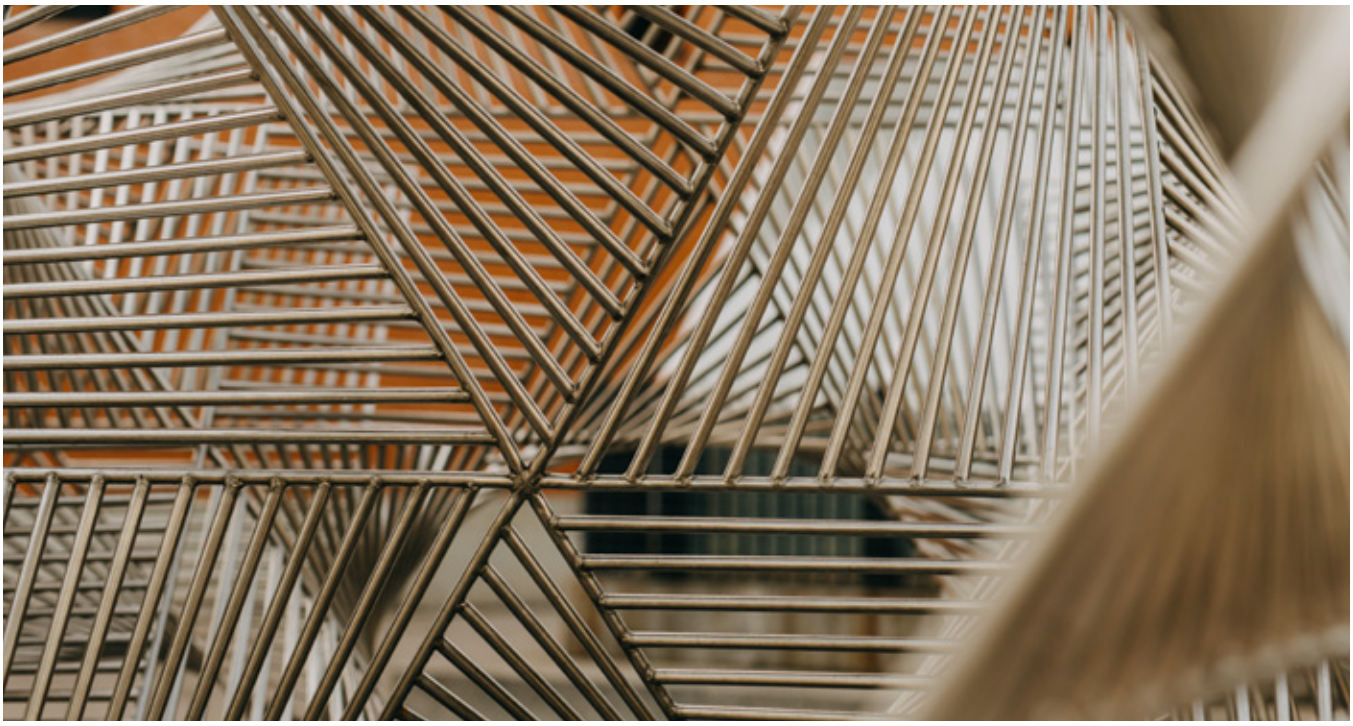
STEADFAST IN SERVICE, POISED FOR PROGRESS

2025

Annual & Sustainability Report
Laporan Tahunan & Keberlanjutan

MIZUHO





STEADFAST IN SERVICE, POISED FOR PROGRESS

Di tengah dinamika ekonomi global sepanjang tahun 2025 yang diwarnai tekanan inflasi, ketidakpastian geopolitik, serta perubahan tren industri yang berlangsung cepat, Perseroan tetap berdiri teguh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan dan Pemangku Kepentingan. Keteguhan tersebut menjadi landasan utama dalam menjaga kesinambungan usaha, sekaligus memastikan setiap langkah strategis dijalankan secara disiplin, terukur, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang. Berbekal komitmen yang konsisten atas kualitas layanan terbaik, Perseroan senantiasa memperkuat aspek kompetitifnya di tengah tantangan yang serba dinamis.

Komitmen terhadap keunggulan operasional terus diwujudkan melalui peningkatan efisiensi di berbagai lini usaha, penerapan inovasi yang relevan, serta penguatan tata kelola proses bisnis yang lebih efektif dan presisi. Perseroan meyakini bahwa kemampuan untuk bergerak lincah dan responsif menjadi kunci dalam menangkap peluang pertumbuhan baru. Oleh karena itu, optimalisasi sistem kerja, digitalisasi proses operasional, serta pemanfaatan teknologi modern terus dipercepat guna menciptakan organisasi yang semakin adaptif, produktif, dan siap menghadapi perubahan.

Di saat yang sama, Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai pilar penting dalam perjalanan menuju kemajuan berkelanjutan. Melalui peningkatan kompetensi, penguatan budaya kerja unggul, dan kolaborasi yang solid di seluruh jenjang organisasi, Perseroan membangun fondasi yang kokoh untuk mendorong kinerja jangka panjang. Dengan semangat **"Steadfast in Service, Poised for Progress"**, Perseroan optimistis dapat melangkah maju secara berkesinambungan, menghadirkan produk dan layanan terbaik, serta memberikan kontribusi positif bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

Amid global economic dynamics throughout 2025 marked by inflationary pressures, geopolitical uncertainty, and rapidly shifting industry trends, the Company remained steadfast in delivering the best service to all customers and stakeholders. This resilience served as the primary foundation for sustaining business continuity while ensuring that every strategic initiative was executed with discipline, prudence, and a long-term value creation mindset. Equipped with a consistent commitment to the best quality of service, the Company continuously strengthens its competitive aspects amidst dynamic challenges.

The commitment to operational excellence continued to be realized through improved efficiency across all business lines, the implementation of relevant innovations, and the strengthening of more effective and precise business process governance. The Company believes that the ability to move with agility and responsiveness is key to capturing new growth opportunities. Therefore, the optimization of work systems, the acceleration of operational digitalization, and the adoption of modern technologies were continuously advanced to build an organization that is increasingly adaptive, productive, and prepared for change.

At the same time, the Company places human capital development as an essential pillar in its journey toward sustainable progress. Through competency enhancement, the reinforcement of a high-performance work culture, and strong collaboration across all levels of the organization, the Company continues to build a solid foundation to drive long-term performance. In line with **"Steadfast in Service, Poised for Progress"**, the Company remains optimistic in advancing sustainably, delivering the best products and services, and creating positive contributions for all Stakeholders.

Batasan Tanggung Jawab

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang, serta lingkungan bisnis dimana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini memuat kata “Perseroan” dan “Perusahaan” yang mengacu pada PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang jasa pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Adakalanya kata “kami” digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini telah disiapkan dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bilamana terdapat perbedaan arti atau interpretasi antara keduanya, maka yang berlaku adalah naskah dalam Bahasa Indonesia dalam menentukan tujuan, maksud, dan pengertian dari Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Disclaimer

This Annual Report and Sustainability Report contains a statement of the financial condition, results of operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives of the Company, which are classified as forward statements in the implementation of applicable legislation, with the exception of historical matters. These statements have the prospect of risks, uncertainties, and can result in actual developments materially different from those reported.

Prospective statements in this Annual Report and Sustainability Report are based on various assumptions regarding current conditions and future conditions, as well as the business environment in which the Company conducts business activities. The Company does not guarantee that documents that have been confirmed as valid will result in certain results as expected.

This Annual Report and Sustainability Report contains the words “the Company” and “the Corporate” which refer to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, which runs main business activities in the fields of investment, working capital, multipurpose financing services, and/or other financing business activity with the approval of the Financial Services Authority (“OJK”). Sometimes the word “we” is used for convenience to refer to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.

The Annual Report and Sustainability Report has been prepared in 2 (two) languages, namely bahasa Indonesia and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the Bahasa Indonesia version shall prevail in determining the spirit, intent and meaning of this Annual Report and Sustainability Report.

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

KINERJA 2025 / 2025 PERFORMANCE 4

Ikhtisar Keuangan / Financial Highlights 5

Sekilas Kinerja 2025 / 2025 Performance Overview 6

Informasi Saham / Shares Information 7

Grafik Perdagangan Saham Tahun 2024 - 2025 / Share Trading Chart Year 2024 - 2025 8

Aksi Korporasi / Corporate Action 8

Penghentian Sementara Perdagangan Saham dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham / Suspension of Shares Trading and/or Delisting 8

Peristiwa Penting / Event Highlights 9

LAPORAN MANAJEMEN / MANAGEMENT REPORT 16

Laporan Dewan Komisaris / The Board of Commissioners Report 17

Laporan Direksi / The Board of Directors Report 26

PROFIL PERSEROAN / COMPANY PROFILE 36

Sekilas Perseroan / Company Overview 37

Kegiatan Usaha / Business Activities 38

Produk & Layanan / Products & Services 39

Jaringan Kantor / Office Network 40

Jejak Langkah Perseroan / Company Milestones 42

Visi, Misi dan Nilai Perseroan / Vision, Mission and Values of The Company 44

Profil Direksi / The Board of Directors Profile 45

Profil Dewan Komisaris / The Board of Commissioners Profile 52

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi / Changes in the Composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors 56

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi / Affiliation Relationship of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors 57

Struktur Organisasi / Organization Structure 58

Struktur Kepemilikan Saham / Shareholding Structure 61

Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik / Public Accountant Services and Public Accounting Firms 62

Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal / Capital Market Supporting Institutions & Professions 62

Informasi Entitas Anak / Subsidiary Information 62

Informasi Kepemilikan Saham / Share Ownership Information 63

Kronologis Pencatatan Saham / Chronology of Shares Listing 64

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya / Chronology of Other Securities Listings 65

Sumber Daya Manusia / Human Resources 66

Teknologi Informasi / Information Technology 68

Keanggotaan Pada Asosiasi / Association Membership 71

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN / MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 72

Uraian Per Segmen / Description Per Segment 73

Uraian Kinerja Keuangan Perseroan / Description of Company Financial Performance 74

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang / Ability to Pay Liabilities and Receivables Collectability 79

Struktur Modal / Capital Structure 80

Kebijakan Struktur Modal / Capital Structure Policy 80

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal / Material Commitments to Capital Goods Investment 80

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan / Material Information and Material Facts that Occured After the Date of the Accountant's Report 80

Prospek Usaha / Business Prospect 81

Unit Bisnis Korporasi & Unit Bisnis Ritel / Corporate Business Unit & Retail Business Unit 83

Target dan Realisasi Tahun Buku / Target and Realization of the Financial Year 85

Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir / Capital Goods Investment Realized at the End of Financial Year 86

Dividen / Dividend 86

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum / Realization of The Use of Funds From Public Offering 87

Informasi Material Lainnya / Other Material Information 87

Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan / Changes to Laws and Regulation with Significant Effects 87

Perubahan Kebijakan Akuntansi / Changes in Accounting Policies 87

TATA KELOLA / CORPORATE GOVERNANCE 90

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") / General Meeting of Shareholders ("GMS") 91

Pelaksanaan RUPS Tahun 2025 / The Implementation of 2025 GMS 91

Pelaksanaan RUPS Tahun 2024 / The Implementation of 2024 GMS 96

Dewan Komisaris / Board of Commissioners 100

Direksi / Board of Directors 113

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi / Procedure and Basis for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors 136

Kebijakan Mengenai Pemisahan Chairman of The Board dan CEO / Policy on the Separation of the Chairman of the Board and the CEO 138

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris / Committees Under the Board of Commissioners 138

Komite Audit / Audit Committee 138

Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee 146

Komite Pemantau Risiko / Risk Monitoring Committee 154

Komite Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi / Supporting Committee for Implementing the Duties and Responsibilities of the Board of Directors 159

Komite Manajemen Risiko / Risk Management Committee 160

Komite Pengarah Teknologi Informasi / Information Technology Steering Committee 161

Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary 162

Unit Audit Internal / Internal Audit Unit 164

Pengendalian Internal / Internal Control 167

Sistem Manajemen Risiko / Risk Management System 170

Sanksi Administratif / Administrative Sanction 178

Perkara Hukum yang Berdampak Material / Legal Cases with Material Impact 178

Kode Etik / Code of Conducts 178

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Karyawan / Long-Term Performance-Based Compensation Policy For Employees 179

Kebijakan Pengungkapan Informasi Mengenai Kepemilikan Saham / Share Ownership Disclosure Policy 180

Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistleblowing System 180

Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik / Guidelines on The Implementation of Good Corporate Governance 180

Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU,PPT dan PPPSPM) / Anti Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing and Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons (AML, PTF and PFPMDW) 183

Kebijakan Anti Korupsi / Anti-Corruption Policy 186

Penerapan Strategi *Anti-Fraud* / Implementation of Anti-Fraud Strategy 187

Pelindungan Konsumen dan Masyarakat / Customer and Public Protection 189

Rekomendasi dalam Penerapan Pedoman GCG / Recommendation on GCG Guidelines Implementation 191

TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN / SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY **194**

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan / Corporate Social and Environmental Responsibility Commitment and Policy 195

Visi, Misi dan Nilai Perseroan / Vision, Mission and Values of The Company 195

Profil Perseroan / Company Profile 195

Keselarasan dengan Tujuan Berkelanjutan / Alignment with Sustainable Development Goals 196

Penjelasan Strategi Keberlanjutan / Elaboration on Sustainability Strategy 199

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Achievements of Sustainable Finance Action Plan 200

Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Objective of Sustainable Finance Action Plan 204

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 1 (satu) Tahun / 1 (one) Year Sustainable Finance Action Plan 205

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 5 (Lima) Tahun / 5 (Five) Years Sustainable Finance Action Plan 206

Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Sustainable Finance Action Plan Preparation Process 210

Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Determinative Factors of Sustainable Finance Action Plan 211

Prioritas Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Priority of Detail of Sustainable Finance Action Plan 213

Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan / Performance Overview of Sustainability Aspect 218

Penjelasan Direksi / The Board of Directors' Remarks 220

Tata Kelola Keberlanjutan / Sustainability Governance 228

Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Follow Up of Sustainable Finance Action Plan 230

Kinerja Keberlanjutan / Sustainability Performance 231

Laporan Emisi Gas Rumah Kaca dan Intensitas Emisi GRK / Greenhouse Gas (GHG) Emissions Report and GHG Emission Intensity 236

Komitmen Perusahaan untuk Mencapai Target *Net Zero Emission* dan Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca / The Company's Commitment to Achieving Net Zero Emission Targets and Reducing Greenhouse Gas (GHG) Emissions 236

Kebijakan Mengenai Pekerja Anak dan/atau Pekerja Paksa / Policy on The Prevention of Child Labor and Forced Labor 237

Perbandingan Gaji Pokok di Level Terendah dengan Upah Miminum Kabupaten/Kota (UMK) / Comparison of Basic Salary at the Lowest Level with The Regency/City Minimum Wages (UMK) 238

Kebijakan Terkait Pelecehan Seksual dan/Atau Non-Diskriminasi / Policy on Sexual Harassment and/or Non-Discrimination 239

Kebijakan Mengenai Hak Asasi Manusia / Human Rights Policy 239

Kebijakan Mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja Serta Lingkungan Kerja Yang Aman dan Layak / Policy on Occupational Health And Safety and A Safe and Decent Work Environment 239

Pengembangan Kompetensi Karyawan / Employee Competency Development 240

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / Corporate Social and Environmental Responsibility Activity 240

Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan / Responsibility for Sustainable Finance Product Developments and/or Services 241

Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan / Service and Complaint Resolution Report 241

Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan / Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products and/or Services 244

REFERENSI KRITERIA POJK NO. 51/POJK.03/2017/ CRITERIA REFERENCE PURSUANT TO POJK NO. 51/POJK.03/2017 **246**

LEMBAR UMPAN BALIK / FEEDBACK FORM **251**

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2025 / STATEMENT LETTER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE 2025 ANNUAL REPORT **253**

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN YANG TELAH DIAUDIT / AUDITED ANNUAL FINANCIAL STATEMENT **255**

KINERJA 2025

2025 PERFORMANCE

MIZUHO



Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain
in billion Rupiah except otherwise stated

LAPORAN POSISI KEUANGAN	2023	2024	2025	STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Aset				Asset
Kas dan Setara Kas	50.36	40.66	73.05	Cash and Cash Equivalents
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	1,730.18	2,081.77	1,952.69	Net Consumer Financing Receivables
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	813.26	879.80	923.54	Net Finance Lease Receivables
Piutang Lain-Lain - Bersih	82.48	97.22	111.03	Other Receivables - Net
Biaya Dibayar Dimuka	2.61	2.95	3.07	Prepaid Expenses
Aset Pajak Tangguhan	11.66	15.76	16.04	Deferred Tax Assets
Aset Tetap - Bersih	51.81	48.32	42.04	Property And Equipment - Net
Aset Derivatif	7.95	3.77	1.75	Derivatives Assets
Aset Hak - Guna - Bersih	32.11	29.34	25.05	Right-of-Use Assets - Net
Aset Lain-Lain	11.16	10.93	5.27	Other Assets
Jumlah Aset	2,793.58	3,210.52	3,153.53	Total Assets
Liabilitas dan Ekuitas				Liabilities and Equity
Utang Bank	1,939.81	2,347.42	2,296.86	Bank Loans
Utang Usaha	0.97	4.49	0.25	Trade Payables
Liabilitas Derivatif	0.23	0	0	Derivative Liabilities
Utang Lain-Lain	46.37	58.23	53.99	Other Payables
Biaya Masih Harus Dibayar	11.90	9.36	13.22	Accrued Expenses
Utang Pajak	2.05	0.75	0.85	Taxes Payables
Liabilitas Sewa	27.30	24.62	21.47	Lease Liabilities
Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	14.47	21.66	22.88	Post-Employment Benefits Liabilities
Jumlah Liabilitas	2,043.10	2,466.53	2,409.52	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	750.48	743.99	744.01	Total Equity
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	2,793.58	3,210.52	3,153.53	Total Liabilities & Equity

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	2023	2024	2025	STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan				Income
Pembiayaan Konsumen	265.37	320.99	304.36	Consumer Financing
Sewa Pembiayaan	55.54	64.71	70.17	Finance Lease
Administrasi dan Provisi	45.41	53.01	41.32	Administration and Provision
Penalti	20.75	19.73	17.58	Penalty
Bunga	0.33	0.35	0.34	Interest
Pendapatan Lain-Lain	13.94	9.86	15.05	Other Income
Jumlah Pendapatan	401.34	468.65	448.82	Total Income

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (LANJUTAN)	2023	2024	2025	STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
Beban				Expenses
Bunga dan Keuangan	105.23	134.32	130.20	Interest and Financing Charges
Umum dan Administrasi	69.64	60.68	55.41	General and Administrative
Kepegawaian	112.20	126.18	126.90	Personnel
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	52.16	152.06	127.77	Provision For Impairment Losses
Beban Lain-Lain	0.88	0.45	0	Other Expenses
Jumlah Beban	340.11	473.69	440.28	Total Expenses
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	61.23	(5.04)	8.54	Profit (Loss) Before Income Tax
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan	(0.08)	2.88	(5.65)	Income Tax (Expense) Benefit
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	61.15	(2.16)	2.89	Net (Loss) Profit For The Year
Penghasilan Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(0.56)	(4.33)	(2.88)	Total Other Comprehensive Income (Loss)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	60.59	(6.49)	0.01	Total Comprehensive (Loss) Income For The Year
Laba (Rugi) Per Saham (Dalam Rupiah Penuh)	10.75	(0.38)	0.51	Basic Earning Per Share (In Full Rupiah)

RASIO KEUANGAN	2023	2024	2025	FINANCIAL RATIOS
Rasio Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Terhadap Total Aset	2.19%	(0.16%)	0.28%	Profit (Loss) Before Income Tax To Total Assets Ratio
Rasio Laba (Rugi) Bersih Terhadap Ekuitas	8,15%	(0.28%)	0.39%	Net Profit (Loss) To Equity Ratio
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan	15.24%	(0.46%)	0.64%	Profit (Loss) On Revenue Ratio
Rasio Lancar	138.45%	138.94%	145.14%	Current Ratio
NPF Neto	0.19%	0.42%	1.59%	NPF Net
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	85.38%	101.56%	98.55%	Operating Expenses to Operating Income
Net Interest Margin	8.98%	8.64%	8.14%	Net Interest Margin
Total Kewajiban terhadap Ekuitas	2,72x	3.32x	3.24x	Total Liabilities to Equity
Total Kewajiban terhadap Total Aset	0.73x	0.77x	0.76x	Total Liabilities to Total Assets
Rasio Piutang terhadap Ekuitas	3.39x	3.98x	3.87x	Accounts Receivable to Equity Ratio
Rasio *Gearing*	2.59x	3.14x	3.09x	Gearing Ratio

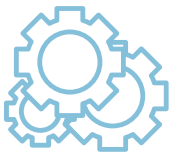
Sekilas Kinerja 2025
2025 Performance Overview

Jumlah Pendapatan
Total Income

Rp
448.82
Miliar / Billion

Jumlah Aset
Total Assets

Rp
3,153.53
Miliar / Billion

NPF Neto NPF Net	Rasio *Gearing* Gearing Ratio
 **1.59%**	 **3.09x**

Informasi Saham
Shares Information

Data Saham Perkuartal Tahun 2025
2025 Quarterly Shares Information

Bursa Efek / Stock Exchange : PT Bursa Efek Indonesia (IDX)

	Harga Saham / Share Price (Rp)			Volume Perdagangan di Pasar Reguler Trading Volume in Reguler Market (Lembar / Shares)	Jumlah Saham yang Beredar Number of Outstanding Shares (Lembar / Shares)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Dalam Miliar Rupiah / In Billion Rupiah)
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
Kuartal I 1st Quarter	97	68	81	116,988	5,687,353,997	460.67
Kuartal II 2nd Quarter	101	69	73	285,982	5,687,353,997	415.18
Kuartal III 3rd Quarter	120	68	89	2,642,609	5,687,353,997	506.17
Kuartal IV 4th Quarter	101	79	89	706,147	5,687,353,997	506.17

Data Saham Perkuartal Tahun 2024
2024 Quarterly Shares Information

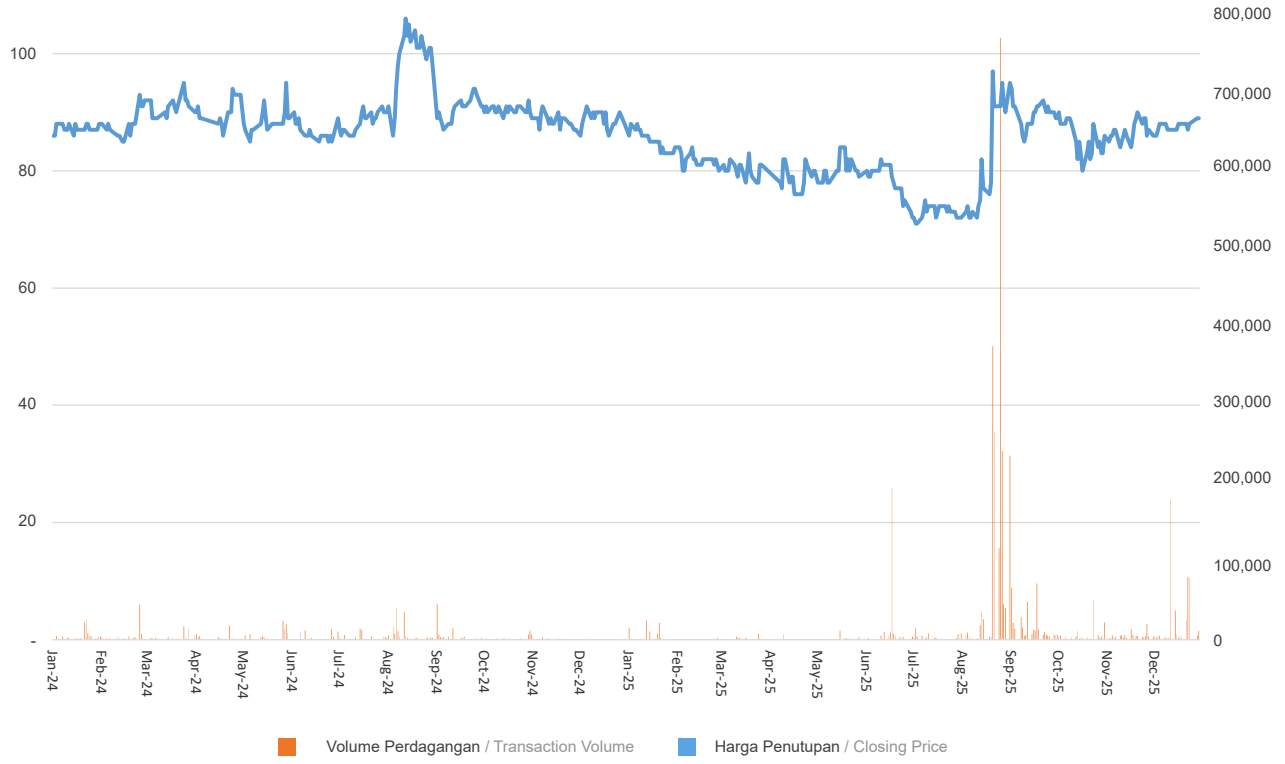
Bursa Efek / Stock Exchange : PT Bursa Efek Indonesia (IDX)

	Harga Saham / Share Price (Rp)			Volume Perdagangan di Pasar Reguler Trading Volume in Reguler Market (Lembar / Shares)	Jumlah Saham yang Beredar Number of Outstanding Shares (Lembar / Shares)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Dalam Miliar Rupiah / In Billion Rupiah)
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
Kuartal I 1st Quarter	100	84	91	235,602	5,687,353,997	517.55
Kuartal II 2nd Quarter	105	80	86	193,789	5,687,353,997	489.11
Kuartal III 3rd Quarter	110	84	91	316,184	5,687,353,997	517.55
Kuartal IV 4th Quarter	99	85	88	64,128	5,687,353,997	500.48

Total jumlah saham Perseroan yang beredar di Bursa Efek Indonesia sepanjang 2025 adalah sebesar 5.687.353.997 lembar saham. Total kapitalisasi pasar Perseroan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp506,17 miliar dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp500,48 miliar.

The total number of the Company's shares outstanding on the Indonesia Stock Exchange throughout 2025 amounted to 5,687,353,997 shares. Meanwhile, the Company's market capitalization as of December 31, 2025 increased to Rp506.17 billion, compared to Rp500.48 billion as of December 31, 2024.

Grafik Perdagangan Saham Tahun 2024 - 2025
Share Trading Chart Year 2024 - 2025



Aksi Korporasi
Corporate Action

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melaksanakan aksi korporasi, seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal.

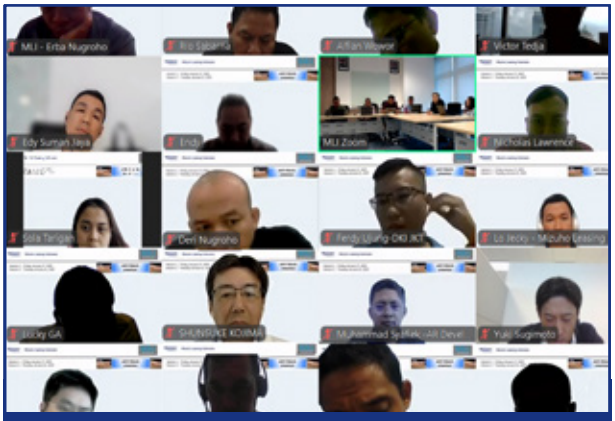
Throughout 2025, the Company did not conduct any corporate actions, such as stock split, reverse stock, stock dividend, stock bonus, changes in the nominal value of shares, issuance of convertible securities as well as additions and reductions to capital.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham
Suspension of Shares Trading and / or Delisting

Sepanjang tahun 2025, tidak ada penghentian sementara perdagangan saham dan/atau penghapusan pencatatan saham.

Throughout 2025, there was no suspension of shares trading and/or delisting.

Peristiwa Penting
Event Highlights



Training Anti Fraud

17 Jan 2025, 21 Jan 2025 and 14 Oct 2025

Sehubungan dengan peningkatan pengendalian internal dan penerapan strategi anti *fraud*, Perseroan bekerjasama dengan KPMG telah melakukan pelatihan yang diikuti oleh Direktur, Deputi Direktur, Kepala Divisi, Kepala Departemen dan Kepala Wilayah pada tanggal 17 Januari 2025 dan 21 Januari 2025 yang diikuti oleh Kepala Cabang, *Section Head* Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Selanjutnya, pada tanggal 14 Oktober 2025, telah dilakukan uji pemahaman yang diikuti oleh karyawan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat.

Training Anti *Fraud* yang dilaksanakan Perseroan ini merupakan wujud komitmen manajemen Perseroan dalam mengurangi risiko terjadinya *fraud* dengan secara aktif melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran anti *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Program edukasi ini merupakan implementasi dari penerapan Kebijakan Strategi Anti *Fraud* Perseroan yang dilakukan setiap tahun.

In relation to strengthening internal controls and implementing the Company's anti-fraud strategy, the Company, in collaboration with KPMG, conducted training sessions attended by Directors, Deputy Directors, Division Heads, Department Heads, and Area Heads on January 17, 2025, and by Branch Heads as well as Section Heads of Branch Offices and Head Office on January 21, 2025. Furthermore, on October 14, 2025, a comprehension assessment was conducted and attended by employees at both Branch Offices and Head Office.

The Company's Anti Fraud training demonstrates the Company's management commitment to reducing the fraud risk by actively providing education to raise anti fraud awareness effectively and sustainably. This educational program is an implementation of the Company's Anti Fraud Strategy Policy which will be conducted every year.



Top Agent & Agregator Vietnam Trip 2025

19 – 24 Feb 2025

Pada tanggal 19–24 Februari 2025, Perseroan menyelenggarakan kegiatan *reward tour* bertajuk *Top Agent & Agregator Vietnam Trip* 2025 dengan destinasi Saigon dan Da Nang. Kegiatan ini diikuti oleh 25 agen dan *agregator.* Program ini bertujuan untuk mempererat hubungan para agen dengan Perseroan guna meningkatkan kontribusi dan daya saing terhadap kompetitor.

Selama kegiatan, para peserta mengunjungi berbagai destinasi wisata unggulan serta mengikuti rangkaian aktivitas kebersamaan yang dirancang untuk mempererat hubungan dan memperkuat sinergi.

From February 19-24, 2025, the Company organized a reward tour titled Top Agent & Aggregator Vietnam Trip 2025, with destinations in Saigon and Da Nang. The program was attended by 25 agents and aggregators. This initiative was intended to strengthen engagement between the agents and the Company, while also encouraging greater contribution and improving competitiveness against competitors.

During the program, participants visited various prominent tourist destinations and took part in a series of activities designed to strengthen relationships and foster stronger synergy.



Amazing China 2025

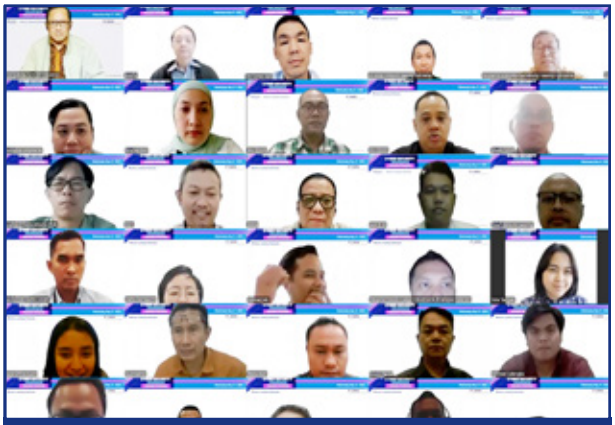
18 – 25 Apr 2025

Pada tanggal 18–25 April 2025, Perseroan menyelenggarakan kegiatan *reward tour* bertajuk *Amazing China* 2025 dengan destinasi Chengdu, Chongqing, dan Wulong. Kegiatan ini diikuti oleh 54 pemilik *showroom.* Program ini bertujuan untuk mempererat hubungan para pemilik *showroom* dengan Perseroan guna meningkatkan kontribusi dan daya saing terhadap kompetitor.

Selama kegiatan, para peserta mengunjungi berbagai destinasi wisata unggulan serta mengikuti rangkaian aktivitas kebersamaan yang dirancang untuk mempererat hubungan dan membangun sinergi yang lebih kuat.

From April 18-25, 2025, the Company organized a reward tour titled Amazing China 2025, with destinations in Chengdu, Chongqing, and Wulong. The program was attended by 54 showroom owners. This initiative aimed to strengthen the relationship between showroom owners and the Company, in order to enhance their contribution and competitiveness against competitors.

During the program, participants visited various leading tourist destinations and took part in a series of group activities designed to foster closer relationships and build stronger synergy.



Training refreshment Cyber Security Awareness

21 May 2025

Training refreshment Cyber Security Awareness adalah program untuk memperbarui pemahaman karyawan terhadap ancaman siber yang terus berkembang, seperti *phishing, malware,* dan kebocoran data.

Pelaksanaan secara berkala membantu memperkuat budaya keamanan informasi, mengurangi risiko insiden akibat *human error,* serta menjaga kelangsungan operasional dan reputasi Perseroan secara aman dan andal.

Program ini diselenggarakan secara *online* yang dihadiri oleh Kepala Departemen dan Kepala Cabang Perseroan.

The Cyber Security Awareness Refreshment Training is a program designed to update employees' understanding of continuously evolving cyber threats, such as phishing, malware, and data breaches.

Its periodic implementation helps strengthen the culture of information security, reduce the risk of incidents caused by human error, and safeguard the continuity of operations and the Company's reputation in a secure and reliable manner.

The program was conducted online and attended by the Company's Department Heads and Branch Heads.



Training Credit Analyst

22 May 2025

Training Credit Analyst adalah program untuk memastikan kualitas Analisis Kredit tetap akurat, objektif, dan selaras dengan kebijakan serta dinamika risiko yang terus berkembang. Melalui pelatihan ini, Analis Kredit mendapatkan pembaruan terkait kebijakan perkreditan, metodologi analisis, penilaian kelayakan usaha, serta identifikasi risiko dan *early warning signs* atas potensi kredit bermasalah.

Dalam program ini, Analis Kredit dibekali pemahaman untuk meningkatkan ketajaman dalam membaca laporan keuangan, memahami kondisi industri dan ekonomi, serta memperkuat prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pelaksanaan secara berkala, kualitas portofolio kredit dapat lebih terjaga, risiko pembiayaan bermasalah diminimalkan, dan kinerja bisnis Perseroan tetap sehat dan berkelanjutan. Program ini diselenggarakan secara *online* yang dihadiri oleh *Deputy* Direktur, Kepala Cabang dan Analis Kredit Perseroan.

The Credit Analyst Training is a program designed to ensure that the quality of Credit Analysis remains accurate, objective, and aligned with company policies as well as evolving risk dynamics. Through this training, Credit Analysts receive updates on credit policies, analytical methodologies, business feasibility assessments, and the identification of risks and early warning signs of potential non-performing loans.

In this program, Credit Analyst were equipped with an understanding to enhance analysts' ability to interpret financial statements, understand industry and economic conditions, and reinforce the prudential principles applied in decision-making processes. Through its periodic implementation, the quality of the credit portfolio can be better maintained, the risk of problematic financing minimized, and the Company's business performance sustained in a healthy and sustainable manner. The program was conducted online and attended by the Deputy Director, Branch Heads, and the Company's Credit Analysts.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")
Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")

23 Jun 2025

Pada tanggal 23 Juni 2025, Perseroan menyelenggarakan RUPST yang bertempat di Catur Dharma Hall 1, Menara Astra lantai 5, Jakarta. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, para Pemegang Saham dan para undangan.

Sebagai wujud transparansi dan keterbukaan informasi, ringkasan risalah RUPST telah dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

On June 23, 2025, the Company held its AGMS at Catur Dharma Hall 1, Menara Astra, 5th floor, Jakarta. The AGMS was attended by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Shareholders and invitees.

As a form of transparency and information disclosure, the summary of minutes of the AGMS were published on the e-RUPS provider's website, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website.



Training APU, PPT
Training AML, PTF

3 Jul 2025

Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, memperkuat budaya kepatuhan, serta melindungi Perseroan dari risiko hukum, finansial, dan reputasi. Dengan demikian, operasional dapat berjalan secara aman, transparan, dan sesuai regulasi. Program ini diselenggarakan secara *online* yang dihadiri oleh Kepala Divisi, Kepala Departemen, Kepala Operasional Cabang serta *Credit Analyst* Perseroan.

Dalam pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai prinsip mengenal nasabah (CDD/EDD), identifikasi transaksi mencurigakan, serta tata cara pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

This program aims to enhance awareness of money laundering and terrorism financing risks, strengthen the culture of compliance, and protect the Company from legal, financial, and reputational risks. Accordingly, operations can be carried out in a secure, transparent, and regulatory-compliant manner The program was conducted online and attended by Division Heads, Department Heads, Branch Operational Heads, and the Company's Credit Analysts.

Through this training, participants are equipped with an understanding of customer due diligence principles (CDD/EDD), identification of suspicious transactions, and reporting procedures in accordance with applicable regulations.



Refreshment Training Program Kepala Wilayah & Kepala Cabang
Area & Branch Heads Refreshment Training Program

14 – 15 Oct 2025

Training refreshment bagi Kepala Cabang dan Kepala Wilayah adalah program regular Perseroan yang merupakan langkah strategis untuk memastikan keselarasan antara kebijakan Perseroan dan implementasi di lapangan. Melalui program ini, para pimpinan mendapatkan pembaruan terkait strategi bisnis, target kinerja, perubahan regulasi, serta penguatan aspek manajemen risiko dan kepatuhan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, kemampuan *coaching*, serta efektivitas pengelolaan tim agar produktivitas dan kualitas layanan tetap terjaga. Kegiatan ini sekaligus menjadi forum *sharing knowledge* antar Kantor Cabang, sehingga solusi atas berbagai tantangan operasional dapat ditemukan secara kolaboratif.

Program ini diselenggarakan secara *offline* yang dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur, Deputi Direktur, Kepala Divisi, Kepala Departemen, Kepala Wilayah, dan Kepala Cabang Perseroan.

The refreshment training program for Branch Heads and Area Managers is a regular corporate initiative and serves as a strategic step to ensure alignment between company policies and their implementation in the field. Through this program, leaders receive updates on business strategies, performance targets, regulatory changes, as well as reinforcement of risk management and compliance aspects.

This program aims to enhance leadership capacity, coaching skills, and team management effectiveness to ensure that productivity and service quality are consistently maintained. It also serves as a knowledge-sharing forum among Branch Offices, enabling collaborative solutions to various operational challenges.

The program was conducted offline and attended by the President Director, Directors, Deputy Directors, Division Heads, Department Heads, Area Heads, and Branch Heads of the Company.



Literasi Keuangan
Financial Literacy

22 Oct 2025

Pada tanggal 22 Oktober 2025, Perseroan menyelenggarakan program Literasi Keuangan bagi 135 siswa dan guru di SMK Negeri 54, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan bukan sekadar pemenuhan kewajiban terhadap POJK No. 3 Tahun 2023, melainkan inisiatif Perseroan dalam dukungan Perseroan dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Melalui program literasi keuangan ini, siswa/siswi belajar mengatur anggaran, mengelola keuangan secara bijak dan bertanggung jawab serta memahami karakteristik produk pembiayaan dan risiko yang akan dihadapi termasuk hak dan kewajiban konsumen.

Program ini dihadiri oleh Direktur, Kepala Divisi, dan Kepala Departemen Perseroan.

On October 22, 2025, the Company conducted Financial Literacy program for 135 students and teachers at SMK Negeri 54, Jakarta. This activity was not merely a fulfillment of obligations under POJK No. 3 of 2023, but also an initiative of the Company's support in increasing public understanding of financial products and services.

Through this financial literacy program, students learn to organize budget, manage their finances wisely and responsibly, as well as understanding the characteristics of financing products and the risks involved, including consumers' rights and obligations.

The program was attended by the Company's Director, Division Heads, and Department Heads.



Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility Activity

22 Oct 2025

Selain melaksanakan program Literasi Keuangan, Perseroan juga merealisasikan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan memberikan bantuan sarana pendukung proses belajar mengajar yang diserahkan langsung kepada Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 54, Jakarta, Ibu Titi Setyaningsih. Perseroan berharap kontribusi ini dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan potensi sumber daya manusia unggul di kalangan generasi muda Indonesia.

During this activity, the Company also realized Corporate Social and Environmental Responsibility Activity by providing support facilities for the teaching and learning process, which were handed over directly to the Vice Principal of SMK Negeri 54, Jakarta, Mrs. Titi Setyaningsih. The Company hopes this contribution will be a catalyst in improving the quality of education and developing the potential of superior human resources among Indonesia's younger generation.



Moto GP Sepang 2025

24 – 27 Oct 2025

Pada tanggal 24–27 Oktober 2025, Perseroan menyelenggarakan kegiatan *reward tour* bertajuk Moto GP Sepang 2025 dengan destinasi Sepang, Malaysia yang diikuti oleh 22 pemilik *showroom.* Program ini bertujuan untuk mempererat hubungan para pemilik *showroom* dengan Perseroan guna meningkatkan kontribusi dan daya saing terhadap kompetitor.

Dalam kegiatan ini, para peserta berkesempatan menyaksikan secara langsung ajang balap internasional Moto GP serta mengikuti rangkaian aktivitas kebersamaan yang dirancang untuk mempererat hubungan dan memperkuat sinergi.

On October 24-27, 2025, the Company organized a reward tour titled Moto GP Sepang 2025, with Sepang, Malaysia as the destination. The program was attended by 22 showroom owners.This initiative aimed to strengthen the relationship between showroom owners and the Company, in order to enhance their contribution and competitiveness against competitors.

During the program, participants had the opportunity to watch the international Moto GP race live and take part in a series of group activities designed to foster closer relationships and strengthen synergy.



Magical Winter Japan 2025

11 – 18 Dec 2025

Pada tanggal 11–18 Desember 2025, Perseroan menyelenggarakan kegiatan *reward tour* bertajuk *Magical Winter* Japan 2025 dengan destinasi Hokkaido dan Tokyo. Kegiatan ini diikuti oleh 19 pemilik *showroom* sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kerja sama yang telah terjalin dengan Perseroan.

Selama kegiatan, para peserta mengunjungi berbagai destinasi wisata unggulan serta mengikuti rangkaian aktivitas kebersamaan yang bertujuan mempererat hubungan dan membangun sinergi yang lebih solid.

On December 11–18, 2025, the Company organized a reward tour titled Magical Winter Japan 2025 with destinations to Hokkaido and Tokyo. The program was attended by 19 showroom owners as a form of appreciation for their contribution and ongoing partnership with the Company.

During the program, participants visited various prominent tourist destinations and engaged in a series of activities aimed at strengthening relationships and building stronger synergy.



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")
Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS")

23 Dec 2025

Pada tanggal 23 Desember 2025, Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang bertempat di Catur Dharma Hall 1, Menara Astra lantai 5, Jakarta. RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, para Pemegang Saham dan para undangan.

Sebagai wujud transparansi dan keterbukaan informasi, ringkasan risalah RUPSLB telah dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web Perseroan.

On December 23, 2025, the Company held an EGMS at Catur Dharma Hall 1, Menara Astra, 5th floor, Jakarta. The EGMS was attended by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Shareholders and invitees.

As a form of transparency and information disclosure, the summary of minutes of the EGMS were published on the e-RUPS provider's website, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website.



Public Expose Tahunan
Annual Public Expose

23 Dec 2025

Pada tanggal 23 Desember 2025, Perseroan menyelenggarakan acara *Public Expose* Tahunan yang bertempat di Catur Dharma Hall 1, Menara Astra lantai 5, Jakarta.

Paparan dalam *Public Expose* Tahunan tersebut disampaikan oleh anggota Direksi Perseroan, yang memaparkan pencapaian kinerja, strategi usaha, serta prospek dan rencana pengembangan ke depan.

On December 23, 2025, the Company held its Annual Public Expose at Catur Dharma Hall 1, Menara Astra, 5th floor, Jakarta.

The presentation at the Annual Public Expose was delivered by members of the Company's Board of Directors, covering performance achievements, business strategies, as well as future prospects and development plans.

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

MIZUHO



Laporan Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Report



Yasuo Imaizumi

Komisaris Utama
President Commissioner

"Berbagai dinamika yang terjadi baik secara global maupun di Indonesia pada tahun 2025 berdampak pada Perseroan dan industri. Namun demikian, Perseroan tetap tangguh dengan menunjukkan peningkatan Laba Bersih Tahun Berjalan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan secara konsisten senantiasa meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("GCG") sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung operasional Perseroan yang sehat dan berdaya saing.

Various dynamics occurring both globally and in Indonesia in 2025 impacted the Company and the industry. Nevertheless, the Company remained resilient, demonstrating an increase in Net Profit For the Year compared to the previous year. In carrying out its business activities, the Company always consistently enhancing the implementation of Good Corporate Governance ("GCG") in accordance with applicable laws and regulations to support healthy and competitive Company operations."

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas dan tanggung jawab pengawasan Perseroan sejalan dengan arahan Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2025. Kami juga menyampaikan penilaian kinerja Direksi yang mencakup antara lain, kinerja pengelolaan Perseroan, pengawasan terhadap perumusan dan implementasi strategi Perseroan, pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi serta pandangan atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("GCG").

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

The Board of Commissioners submitted a report on the duties and responsibilities of the Company's supervision in line with the direction of the General Meeting of Shareholders and the Articles of Association realized through various activities in 2025. We also submitted an assessment of the performance of the Board of Directors which includes, performance of the Company's management, supervision of the formulation and implementation of the Company's strategy, view of business prospects prepared by the Board of Directors and the view of the implementation of Good Corporate Governance ("GCG").

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Pada tahun 2025, perekonomian global masih diliputi ketidakpastian di tengah dinamika geopolitik dunia, mulai dari konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan, memanasnya kondisi Timur Tengah, hingga penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat ("AS") yang berujung pada perang tarif antara AS dan Tiongkok. Hal tersebut terus membayangi perlambatan ekonomi serta disrupsi rantai pasok global yang mendorong lonjakan harga komoditas.

Pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara besar seperti Inggris, kawasan Eropa, dan Tiongkok secara bersamaan mengalami perlambatan. Secara umum, laju inflasi global menunjukkan peningkatan, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Sementara itu, inflasi di Inggris cenderung stabil, sedangkan Tiongkok masih berada dalam kondisi deflasi meskipun mulai menunjukkan sedikit perbaikan. The Fed merespon kenaikan inflasi dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 3,50%-3,75%. Keputusan menahan suku bunga juga dilakukan oleh sejumlah bank sentral dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian masing-masing negara yang juga mengalami inflasi.

Meskipun ekonomi global menunjukkan resiliensi yang melampaui ekspektasi, berbagai kerentanan fundamental belum sepenuhnya hilang. Daya tahan ini didukung oleh kebijakan makro ekonomi yang suportif, membaiknya kondisi finansial berkat optimisme terhadap teknologi baru, serta lonjakan investasi dan perdagangan berbasis kecerdasan buatan (AI). Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam menjaga permintaan global di tengah tingginya ketidakpastian kebijakan dan hambatan perdagangan yang kian meningkat.

Di tengah disrupsi global yang terjadi, Indonesia memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang moderat. Dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,03% (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali pertambangan dan penggalian yang terkontraksi sebesar 0,66%. Lapangan usaha jasa lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93%. Pada Desember 2025 terjadi inflasi sebesar 2,92% (y-o-y) dengan Indeks Harga Konsumen ("IHK") sebesar 109,92. Inflasi y-o-y tertinggi di tingkat provinsi terjadi di Provinsi Aceh sebesar 6,71% dengan IHK sebesar 114,40 dan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1,23% dengan IHK sebesar 108,60.

Pemerintah terus memperkuat posisi ekonomi di tataran global dengan bergabung ke BRICS dan menurunkan tarif resiprokal dengan AS dari 32% menjadi 19%. Meskipun volume ekspor Indonesia ke AS tidak sebesar ekspor ke Tiongkok, kebijakan tarif akan membuat produk ekspor Indonesia di AS menjadi kurang kompetitif sehingga dalam jangka panjang akan menurunkan volume ekspor Indonesia.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang 50 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terjadi di kuartal IV tahun 2025 juga memberikan tekanan pada kinerja ekonomi Indonesia. *Center of Economic and Law Studies (Celios)* memperkirakan kerugian imbas banjir

Board of Directors Performance Assessment

In 2025, the global economy remained shrouded in uncertainty amidst geopolitical dynamics, ranging from the protracted Russia-Ukraine conflict, escalating Middle East conditions, and the imposition of import tariffs by the United States (US), which has led to a tariff war between the US and China. This continues to overshadow the economic slowdown and disruption of the global supply chain, driving up commodity prices.

Economic growth in several major countries, such as the UK, the European region, and China, is simultaneously slowing. Overall, global inflation is increasing, particularly in the US and Europe. Meanwhile, inflation in the UK is stable, while China remains in deflation, although it is showing some improvement. The Fed responded to rising inflation by cutting its benchmark interest rate by 25bps to 3.50%-3.75%. Several central banks have also decided to hold interest rates, taking into account the economic conditions of each country, which is also experiencing inflation.

Although the global economy has demonstrated resilience beyond expectations, fundamental vulnerabilities have not been completely eliminated. This resilience is supported by supportive macroeconomic policies, improving financial conditions driven by optimism about new technologies, and a surge in artificial intelligence (AI)-based investment and trade. These factors play a crucial role in maintaining global demand amid heightened policy uncertainty and rising trade barriers.

Admist current global disruptions, Indonesia demonstrated moderate economic growth. According to data from the Central Bureau of Statistics (BPS), the Indonesian economy grew by 5.11% in 2025, higher than the 5.03% (c-to-c) growth achieved in 2024. Growth occurred across almost all business sectors, except for mining and quarrying, which contracted by 0.66%. The other services sector saw the highest growth at 9.93%. In December 2025, inflation stood at 2.92% (y-o-y) with a Consumer Price Index (CPI) of 109.92. The highest y-o-y inflation at the provincial level occurred in Aceh at 6.71% with CPI of 114.40 while the lowest was in North Sulawesi at 1.23% with CPI of 108.60.

The Government continues to strengthen its global economic position by joining BRICS and reducing reciprocal tariffs with the U.S. from 32% to 19%. Although Indonesia's export volume to the U.S. is not as large as its exports to China, tariff policies will make Indonesian export products in the US less competitive, thereby reducing Indonesia's export volume in the long run.

Flash floods and landslides that struck 50 districts/cities in Aceh, North Sumatra, and West Sumatra in Q4 2025, also pressured Indonesia's economic performance. The Center of Economic and Law Studies (Celios) estimated losses from these disasters at IDR 68.67 trillion. However, the Government responded

dan tanah longsor di tiga wilayah tersebut mencapai Rp 68,67 triliun. Akan tetapi, Pemerintah secara tanggap menanggulangi bencana tersebut dengan penguatan infrastruktur, perbaikan tata ruang, penataan ulang praktik pemanfaatan lahan di hulu, dan memberikan skema stimulus untuk masyarakat terdampak bencana dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit bagi masyarakat terdampak bencana.

swiftly through infrastructure reinforcement, spatial planning improvements, restructuring upstream land use practices, and providing a stimulus scheme for disaster-affected communities by issuing a credit relaxation policy for disaster-affected communities.

Dari sisi penjualan kendaraan bermotor, terdapat penurunan permintaan kendaraan baru sepanjang tahun 2025. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil nasional sepanjang 2025 mencapai 803.687 unit secara *wholesales*. Angka ini turun 7,20% dibandingkan 2024 yang mencapai 865.723 unit. Penjualan dari dealer langsung ke konsumen akhir (ritel) sepanjang 2025 tercatat 833.692 unit atau turun 6,30% dibandingkan 2024 yang mencapai 889.680 unit.

In terms of motor vehicle sales, there was a decline in demand for new vehicles throughout 2025. The Association of Indonesian Automotive Industries (Gaikindo) recorded national car sales throughout 2025 reaching 803,687 units in wholesale. This figure is down 7.20% compared to 2024, which reached 865,723 units. Sales from dealers directly to end consumers (retail) throughout 2025 were recorded at 833,692 units, a 6.30% decrease compared to 2024, which reached 889,680 units.

Dominasi manufaktur Jepang masih belum tergoyahkan di pasar nasional sepanjang 2025, baik secara *wholesales* maupun ritel. Di segmen merek Tiongkok, satu produsen berhasil tampil menonjol dengan angka penjualan tertinggi. Tahun ini juga menandai pencapaian baru bagi industri otomotif Asia Tenggara, dengan hadirnya satu merek dari kawasan tersebut dalam daftar penjualan skala besar *(wholesales)*.

Japanese manufacturing dominance remained unwavering in the national market throughout 2025, both at wholesale and retail levels. In the Chinese brand segment, one manufacturer emerged with record sales figures. This year also marked a new milestone for the Southeast Asian automotive industry, with the presence of a brand from the region on the wholesale list.

Dampak dari dinamika industri pada tahun 2025 turut dirasakan Perseroan. Hal ini ditunjukkan dari belum tercapainya target penyaluran pembiayaan Unit Bisnis Ritel dan Unit Bisnis Korporasi. Pada Unit Bisnis Ritel, peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) industri keuangan pun telah mendorong Perseroan untuk lebih selektif menyalurkan pembiayaan baru. Sejalan dengan kondisi Unit Bisnis Ritel, ketidakpastian kondisi global dan domestik mendorong pelanggan korporasi untuk lebih berhati-hati dalam berinvestasi, dimana pelanggan korporasi membuat kebijakan menunda jadwal pencairan investasi dan modal kerja, sehingga turut berkontribusi terhadap kinerja Unit Bisnis Korporasi di tahun 2025. Perseroan senantiasa berusaha meningkatkan pertumbuhan portofolio pembiayaan Unit Bisnis Ritel dan Unit Bisnis Korporasi yang berkualitas berdasarkan prinsip kehati-hatian serta mengembangkan produk-produk dan strategi pemasaran berbasis risiko yang sesuai kebutuhan konsumen.

The Company also felt the impact of industry dynamics in 2025. This is reflected from the financing disbursement targets for both the Retail Business Unit and the Corporate Business Unit that have not yet been achieved. In the Retail Business Unit, the increase in Non-Performing Financing (NPF) in the financial industry has also encouraged the Company to be more selective in disbursing new financing. In line with the condition of the Retail Business Unit, uncertain global and domestic conditions are encouraging corporate customers to be more cautious in investing, where corporate customers are implementing policies to postpone investment and working capital disbursement schedules, thereby contributing to the performance of Corporate Business Units in 2025. The Company continuously strives to increase the growth of the quality financing portfolio of the Retail Business Unit and Corporate Business Unit based on the principle of prudence while developing risk-based products and marketing strategies that suit the needs of consumers.

Perseroan telah mengimplementasikan strategi-strategi dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan bisnis Perseroan terutama dengan melakukan pengendalian secara penuh terhadap rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (“BOPO”) serta memperkuat pengendalian internal dalam kegiatan usahanya. Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia, Perseroan juga telah melakukan otomatisasi menggunakan *Robotic Process Automation* (RPA) terhadap proses bisnis yang masih dilakukan secara manual dengan frekuensi yang berulang dan digitalisasi proses kerja yang masih dilakukan secara manual. Perseroan juga senantiasa melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* dalam setiap aktivitas bisnis guna mencapai efisiensi dalam operasional bisnis, menjaga kepercayaan dan reputasi Perseroan dengan layanan yang andal dan transparan, serta senantiasa meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

The Company has implemented strategies to optimize the Company’s business growth, especially by fully controlling the Operating Expenses to Operating Income (“BOPO”) ratio and strengthening internal controls in its business activities. To increase efficiency and reduce human error, the Company has also automated using Robotic Process Automation (RPA) for business processes that are still carried out manually with repetitive frequencies and digitized work processes that are still carried out manually. The Company also continuously conducted self-assessments in every business activity to achieve efficiency in business operations, maintain the Company’s trust and reputation with reliable and transparent services, and always enhancing the compliance to the regulations.

Unit Bisnis Ritel berfokus melakukan perluasan kerjasama dengan rekanan dealer baik dengan rekanan dealer baru maupun yang saat ini sudah berjalan, berkonsentrasi pada produk yang memberikan kualitas pembiayaan baik dengan menawarkan *market retail price* yang kompetitif, senantiasa melakukan pengendalian internal dalam setiap proses bisnis dan melakukan penyesuaian kebijakan sebagai tindakan preventif dalam mengantisipasi kondisi ketidakpastian ekonomi yang masih akan berlangsung dengan mengutamakan aspek manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian, serta senantiasa melakukan pengendalian biaya operasional dalam rangka peningkatan efisiensi operasional dan produktivitas kerja.

The Retail Business Unit focuses on expanding cooperation with dealer partners, both with new and existing dealer partners, concentrating on products that provide good financing quality by offering competitive market retail prices, continuously carrying out internal control in every business process and making policy adjustments as a preventive measure in anticipating conditions of economic uncertainty that will continue by prioritizing risk management aspects and the principle of prudence, as well as continuously controlling operational costs in order to increase operational efficiency and work productivity.

Unit Bisnis Korporasi telah memperluas pembiayaan pada sektor lain seperti industri penyedia peralatan berbasis teknologi informasi, memanfaatkan kerjasama dengan Bank Mizuho Indonesia dan Marubeni Indonesia dalam memperluas jaringan untuk menyediakan pembiayaan bagi pelanggan korporasi baru, melakukan kunjungan ulang kepada pelanggan korporasi yang telah menyelesaikan kontraknya agar Unit Bisnis Korporasi mendapatkan pembiayaan kembali dari pelanggan tersebut, memperluas cakupan pembiayaan pelanggan korporasi baru melalui kerjasama dengan pemasok peralatan telekomunikasi dan alat berat serta menjajaki kolaborasi dengan perusahaan pembiayaan lain untuk membuka peluang pendanaan bagi berbagai kebutuhan pelanggan korporasi.

The Corporate Business Unit has expanded financing to other sectors such as the information technology equipment provider industry, utilizing collaborations with Bank Mizuho Indonesia and Marubeni Indonesia in expanding its network to provide financing for new corporate customers, conducting repeat visits to corporate customers who have completed their contracts so that the Corporate Business Unit can obtain refinancing from these customers, expanding the scope of financing for new corporate customers through collaborations with telecommunications equipment and heavy equipment suppliers and exploring collaborations with other financing companies to open up funding opportunities for various corporate customer needs.

Jumlah Aset Perseroan pada tahun 2025 mencapai Rp 3.153,53 miliar, atau mengalami penurunan sebesar 1,78% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Jumlah Liabilitas pada tahun 2025 mencapai Rp 2.409,52 miliar, atau mengalami penurunan sebesar 2,31% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Jumlah Ekuitas pada tahun 2025 mencapai Rp 744,01 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 0,003% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya.

The Company's Total Assets in 2025 reached IDR 3,153.53 billion, a decrease of 1.78% compared to the previous year. Total Liabilities in 2025 reached IDR 2,409.52 billion, a 2.31% decrease compared to the previous year. Meanwhile, Total Equity in 2025 reached IDR 744.01 billion, a 0.003% increase compared to the previous year.

Pada sisi profitabilitas, Jumlah Pendapatan Perseroan selama tahun 2025 tercatat sebesar Rp448,82 miliar, menurun sebesar 4,23%, dan Jumlah Beban Perseroan sebesar Rp440,28 miliar atau menurun sebesar 7,05%. Per 31 Desember 2025, Perseroan mencatatkan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp2,89 miliar yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dari segi kualitas aset, meskipun terjadi peningkatan rasio NPF-neto dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,42%, Perseroan masih dapat menjaga kualitas piutang pembiayaan sesuai ketentuan OJK yang berlaku dengan mencatatkan Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah Neto ("NPF-neto") sebesar 1,59% di tahun 2025.

In terms of profitability, the Company's Total Income in 2025 was recorded at IDR 448.82 billion, a 4.23% decrease, and the Company's Total Expenses were IDR 440.28 billion, a 7.05% decrease. As of December 31, 2025, the Company recorded a Net Profit for the Year of IDR 2.89 billion, which increase from the previous year. In terms of asset quality, despite an increase in the NPF-net ratio compared to the previous year of 0.42%, the Company is still able to maintain the quality of financing receivables in accordance with applicable OJK regulations by recording a Net Non-Performing Financing Receivables Ratio ("NPF-net") of 1.59% in 2025.

Target dan Realisasi

Dari sisi neraca, pada tahun 2025 Perseroan mencatatkan Jumlah Aset sebesar Rp3.153,53 miliar, lebih kecil dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp3.254,19 miliar. Dari sisi Jumlah Pendapatan Perseroan selama tahun 2025 tercatat sebesar Rp448,82 miliar, lebih kecil dari target pendapatan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp463,51 miliar. Realisasi Profitabilitas Perseroan selama tahun 2025 yang tercatat dalam Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp2,89 miliar, melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp1,88 miliar. Realisasi rasio BOPO pada tahun 2025 adalah sebesar 98,55%, lebih kecil dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 99,62%.

Targets and Realization

From a balance sheet perspective, in 2025, the Company recorded Total Assets of IDR 3,153.53 billion, less than the previously set target of IDR 3,254.19 billion. In terms of Total Income, the Company recorded IDR 448.82 billion in 2025, falling short of the set income target of IDR 463.51 billion. The Company's realized profitability for 2025, as recorded in Net Profit for the Year, was IDR 2.89 billion, exceeding the previously set target of IDR 1.88 billion. The BOPO ratio in 2025 was 98.55%, lower than the previously set target of 99.62%.

Berdasarkan aspek kuantitatif, Dewan Komisaris menilai Direksi belum berhasil mencapai target bisnis yang telah dicanangkan dalam Perubahan Rencana Bisnis Tahun 2025. Tahun 2025 masih membawa tantangan bagi perekonomian global dan Indonesia. Meskipun tensi konflik Rusia-Ukraina mungkin telah mereda, fragmentasi geopolitik dan persaingan kekuatan besar global diperkirakan tetap menjadi perhatian. Penurunan daya beli masyarakat juga menyebabkan terjadinya penurunan kinerja di berbagai sektor industri termasuk di sektor otomotif. Dengan memperhatikan kondisi perekonomian saat ini, kinerja tersebut perlu menjadi perhatian bagi Direksi agar dapat mengupayakan perbaikan kinerja bisnis yang dikelola secara *prudent* sehingga mendorong pertumbuhan Perseroan yang sehat dan berkelanjutan, terus melakukan pengendalian secara penuh terhadap rasio BOPO dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan bisnis Perseroan, serta memastikan pemenuhan ketentuan penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pada tahun 2026.

From a quantitative perspective, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has not succeeded in achieving the business targets set out in the 2025 Revised Business Plan. 2025 still presents challenges for the global and Indonesian economies. Although tensions in the Russia-Ukraine conflict may have subsided, geopolitical fragmentation and global power rivalry are expected to remain concerns. Declining purchasing power has also led to a decline in performance across various industrial sectors, including the automotive sector. Given the current economic conditions, this performance requires the Board of Directors' attention to strive for improvements in business performance managed prudently to encourage healthy and sustainable Company growth. Furthermore, the Board must maintain full control over the BOPO ratio to optimize business growth and ensure compliance with provisions regarding the allocation of funds for human resources education and training in 2026.

Berdasarkan aspek kualitatif, Perseroan telah melaksanakan bisnisnya sesuai dengan Perubahan Rencana Bisnis. Namun demikian, Perseroan perlu terus melakukan pengkinian kebijakan pembiayaan sesuai dengan kondisi terkini untuk mengatasi tantangan perekonomian dan senantiasa meningkatkan efisiensi proses kerja untuk memastikan tercapainya target kinerja kualitas piutang pembiayaan dan profitabilitas tahun 2026. Tata Kelola Perusahaan telah dijalankan dengan cukup baik dengan upaya perbaikan penerapan Tata Kelola yang senantiasa dilakukan oleh Perseroan di semua lini fungsi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Perseroan, serta memastikan pelaksanaannya dilakukan dengan iktikad baik dan prinsip kehati-hatian.

Qualitatively, the Company has conducted its business in accordance with the Revised Business Plan. Nevertheless, the Company needs to continues to update its financing policy in line with current conditions to address economic challenges and continuously improve work process efficiency to ensure the achievement of its 2026 financing receivables quality and profitability performance targets. Corporate Governance has been implemented quite well, with the Company consistently improving its implementation across all functional lines in accordance with applicable laws and regulations. The Board of Commissioners actively monitor the implementation of internal control policies and procedures in the Company's financial reporting process, ensuring that they are implemented in good faith and with prudence.

Penilaian atas Kinerja Komite

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris telah membentuk beberapa Komite yang berada di bawahnya yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko.

Committees Performance Assessment

To support the effective implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities, the Board of Commissioners has established several committees under its purview which are the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee.

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit secara independen telah melakukan tinjauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal untuk pemeriksaan Laporan Keuangan tahunan. Komite Audit juga telah senantiasa melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan berkala Perseroan. Selanjutnya, Komite Audit juga telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan Direksi terhadap hasil pemeriksaan Unit Audit Internal, serta melakukan pemantauan terhadap sistem pelaporan pelanggaran *(whistleblowing system)*. Pada tahun 2025, Komite Audit juga melakukan proses kaji ulang Piagam Komite Audit untuk dilakukan pembaharuan pada tahun 2026.

Throughout 2025, the Audit Committee independently reviewed and evaluated and recommended the appointment of an external auditor to audit the annual Financial Statements. The Audit Committee also continuously reviewed the Company's periodic Financial Statements. Furthermore, the Audit Committee monitored the Board of Directors' follow-up actions on the Internal Audit Unit's audit findings and monitored the whistleblowing system. In 2025, the Audit Committee also reviewed the Audit Committee Charter for renewal in 2026.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah secara independen melakukan penilaian kinerja, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah berperan aktif dalam memberikan rekomendasi pengangkatan calon anggota Direksi dan

The Nomination and Remuneration Committee independently assessed the performance of the Board of Commissioners and provided recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policies, and remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Nomination and Remuneration Committee has also played an active role in

pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan yang diadakan pada tanggal 23 Juni 2025, memberikan rekomendasi pengangkatan calon Direktur Utama dan Komisaris Independen sehubungan dengan pergantian Direktur Utama dan Komisaris Independen serta pengangkatan anggota Direksi lainnya pada RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2025. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah memberikan rekomendasi untuk program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan juga termasuk karyawan Perseroan pada tahun 2026 sesuai dengan bidang dan tanggung jawab serta sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ("SKKNI"). Pada tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi juga melakukan proses kaji ulang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dilakukan pembaharuan pada tahun 2026.

providing recommendations for the appointment of prospective Board of Directors member and the reappointment of the Board of Commissioners and Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") held on June 23, 2025, provided recommendations for the appointment of prospective candidates for President Director and Independent Commissioner in connection with the change of the President Director and Independent Commissioner, as well as the appointment of other members of the Board of Directors at the Extraordinary GMS held on December 23, 2025. Furthermore, the Nomination and Remuneration Committee has also provided recommendations for the capability development program for members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and also including the Company's employees in 2026 in accordance with their fields and responsibilities and in accordance with the Indonesian National Work Competency Standards ("SKKNI"). In 2025, the Nomination and Remuneration Committee also reviewed the Nomination and Remuneration Committee Charter for renewal in 2026.

Disamping itu, Komite Pemantau Risiko telah secara independen melakukan pemantauan dan penelaahan atas profil risiko Perseroan dan penerapan kepatuhan Perseroan, melakukan evaluasi laporan hasil penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan Perseroan, melakukan pembaruan Pedoman Manajemen Risiko, melakukan perubahan Piagam Komite Pemantau Risiko, melakukan pembahasan terkait hasil pemeriksaan audit OJK dan sanksi administratif serta upaya tindak lanjut sehubungan dengan perbaikan kepatuhan Perseroan serta pengkajian terhadap proyeksi NPF di tahun 2026.

In addition, the Risk Monitoring Committee independently monitored and reviewed the Company's risk profile and compliance implementation, evaluated the Company's self-assessment report on its soundness level, updated the Risk Management Guidelines, amended the Risk Monitoring Committee Charter, and discussed the results of the OJK audit, administrative sanctions, and follow-up measures related to the Company's compliance improvement, as well as reviewed the NPF projections in 2026.

Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite yang berada di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik serta telah menyelenggarakan rapat untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan konstruktif.

The Board of Commissioners assesses that all committees under the Board of Commissioners have adequately carried out their duties and responsibilities and have held meetings to provide timely and constructive input to the Board of Commissioners.

Prospek Usaha 2026

Serangan AS dan Israel terhadap Iran yang terjadi pada awal tahun 2026 menjadi ujian ketahanan perekonomian global. Berdasarkan data OECD *economic outlook* pada bulan Maret 2026, proyeksi Pertumbuhan Domestik Bruto ("PDB") global diproyeksikan sebesar 2,90%, sementara Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan April 2026 memproyeksikan pertumbuhan global 2026 sebesar 3,10%. Pertumbuhan yang didukung oleh momentum yang kuat dalam investasi dan produksi terkait teknologi, tingkat tarif yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, serta dampak lanjutan *(carry-over)* dari hasil yang kuat pada tahun 2025. Di sisi lain, penghentian pengangkutan melalui Selat Hormuz serta penutupan dan kerusakan beberapa infrastruktur energi telah memicu lonjakan harga energi dan mengganggu pasokan energi global serta komoditas penting lainnya, seperti pupuk. Hal ini meningkatkan biaya, menekan permintaan, dan menambah tekanan inflasi.

Business Prospects 2026

The US and Israel attacks on Iran that occurred in early 2026 tested the resilience of the global economy. According to OECD economic outlook data on March 2026, global Gross Domestic Product ("GDP") growth projected at 2.90%, while the International Monetary Fund (IMF) on April 2026 projects global growth of 3.10% in 2026. Growth is supported by strong momentum in technology-related investment and production, lower tariff rates than previously assumed, and carry-over from robust outcomes in 2025. On the other side, the halt in shipments through the Strait of Hormuz and the closure and damage of some energy infrastructure has generated a surge in energy prices and disrupted the global supply of energy and other important commodities, such as fertilisers. This is raising costs, weighing on demand and adding to inflationary pressures.

Importir energi, terutama negara-negara dengan cadangan minyak rendah, akan menjadi yang paling rentan terhadap harga minyak tinggi yang berkepanjangan. Di antara negara-negara berkembang, sebagian besar negara tersebut berada di Asia. Seiring konflik yang terus berlanjut tanpa penyelesaian, risiko kekurangan minyak secara fisik yang mendorong kenaikan harga akan meningkat secara substansial.

Energy importers, especially those with low oil reserves, would be among the most vulnerable to sustained high oil prices. Among emerging markets, most of these are in Asia. However, as the conflict continues unresolved, the risks of physical oil shortages that push up prices will increase substantially.

Pada bulan Maret 2026, OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2026 dan 2027 di tengah meningkatnya risiko global utamanya di Timur Tengah. Ekonomi Indonesia diperkirakan hanya tumbuh 4,80% pada 2026 dan 5,00% pada 2027. Sebelumnya, dalam laporan Desember 2025, OECD memperkirakan ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5,00% pada 2026 dan 5,1% pada 2027. OECD juga merevisi proyeksi inflasi utama *(head inflation)* Indonesia menjadi lebih tinggi, yakni 3,40% di 2026 atau naik 0,30% dari proyeksi periode sebelumnya yang hanya sebesar 3,10%.

In March 2026,the OECD has lowered Indonesia's economic growth forecasts for 2026 and 2027 amid rising global risks, particularly in the Middle East. The Indonesian economy is projected to grow by only 4.80% in 2026 and 5.00% in 2027. Previously, in its December 2025 report, the OECD estimated that Indonesia's economy could grow by 5.00% in 2026 and 5.10% in 2027. The OECD also revised its projection for Indonesia's headline inflation higher, to 3.40% in 2026, an increase of 0.30% from the previous projection of 3.10%.

Pada bulan Februari 2026, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 sebesar 4,90%-5,70%. Belum terdapat koreksi atas poyeksi ini mengingat ekskalasi kondisi Timur Tengah yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Mempertimbangkan target industri dan kondisi perekonomian, pada awal Maret 2026, OJK memproyeksikan piutang pembiayaan dari industri perusahaan pembiayaan dapat tumbuh sebesar 6,00%-8,00% (yoy) pada 2026.

In February 2026, Bank Indonesia estimated Indonesia's economic growth in 2026 at 4.90%-5.70%. There has been no correction to this projection, given the escalating situation in the Middle East, which will impact Indonesia's economic growth. Taking into account industry targets and economic conditions, in early March 2026, OJK projected that financing receivables of the financing company industry could grow by 6.00%-8.00% (yoy) in 2026.

Perseroan telah menyusun Perubahan Rencana Bisnis secara adaptif dan konservatif dengan memperhatikan kondisi iklim perekonomian Indonesia.

The Company has prepared an adaptive and conservative Business Plan Revision, taking into account Indonesia's economic climate.

Dewan Komisaris menilai bahwa Perubahan Rencana Bisnis yang disusun Direksi telah cukup konservatif dan realistis dengan memberikan perhatian khusus pada pemantauan portofolio pembiayaan secara cermat terutama bagi sektor yang terdampak kondisi geopolitik. Dewan Komisaris percaya bahwa strategi yang ditetapkan Direksi mampu mendorong Perseroan untuk dapat tumbuh dengan senantiasa memastikan tercapainya target kinerja kualitas piutang pembiayaan di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik.

The Board of Commissioners assesses that the Business Plan Revision prepared by the Board of Directors has been sufficiently conservative and realistic with paying special attention to closely monitoring the financing portfolio, particularly for sectors impacted by geopolitical conditions. The Board of Commissioners believes that the strategy established by the Board of Directors is capable of driving the Company's quality growth by consistently ensuring the achievement of financing receivables quality performance targets amidst geopolitical uncertainty.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan telah menerapkan GCG sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan sistem pengendalian internal harus senantiasa menjadi fokus utama Direksi dalam menjalankan fungsi kepengurusannya.

Implementation of Good Corporate Governance

The Board of Commissioners assesses that the Company has implemented GCG in accordance with applicable laws and regulations. The implementation of comprehensive risk management and an internal control system must always be the primary focus of the Board of Directors in carrying out its management function.

Tugas pengawasan Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi prinsip-prinsip GCG. Selain itu Rapat Komite di bawah Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris, serta Rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan konstruktif.

The Board of Commissioners' supervisory duties have been carried out effectively and in accordance with GCG principles. Furthermore, Committee Meetings under the Board of Commissioners, Board of Commissioners Meetings, and Joint Meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners have been conducted effectively and constructively.

Berdasarkan ketentuan OJK, Perseroan telah menjalankan penilaian mandiri terhadap faktor GCG dimana Perseroan berhasil mencatatkan peringkat 1 (sangat baik). Hal ini mengindikasikan telah diterapkannya GCG dengan sangat baik dan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pengembangan kebijakan yang terus diperbaharui, hingga evaluasi dan pemantauan tata kelola yang baik, menjadi cerminan komitmen Direksi untuk dapat menerapkan prinsip dan praktik GCG di seluruh kegiatan operasional dan jenjang organisasi Perseroan.

Based on the OJK regulation, the Company has conducted a self-assessment of GCG factor, in which the Company achieved 1st rank (excellent). This indicates that GCG has been implemented very effectively and continues to improve over time. Such continuous development of updated policies, as well as the evaluation and monitoring of good governance practices, reflects the Board of Directors' commitment to implementing the principles and practices of GCG across all operational activities and organizational levels of the Company.

Pandangan atas Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sebagai bagian dalam penerapan GCG, Perseroan sudah memiliki kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran ("WBS") yaitu sistem penyampaian informasi terkait terjadinya penyimpangan pada proses bisnis Perseroan. Penyimpangan yang dimaksud bisa berupa *fraud* ataupun *non-fraud* yang terjadi di unit-unit kerja Perseroan, baik di Kantor Pusat ataupun di Kantor Cabang.

Sistem pelaporan ini memungkinkan pelapor tidak hanya dari karyawan internal namun juga dari pihak eksternal atau *intermediary* dan masyarakat umum yang memiliki kepentingan dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Identitas pelapor bersifat rahasia dan laporan dapat disampaikan oleh pelapor tanpa mencantumkan identitasnya (anonim).

Perseroan juga memberikan himbauan dalam perjanjian kerja sama dengan pihak yang bekerja sama dengan Perseroan untuk dapat melaporkan melalui WBS apabila diketahui adanya indikasi dan/atau bukti pelanggaran yang berpotensi dapat mengarah pada tindakan yang tergolong *fraud.*

Fungsi sistem pelaporan ini diawasi dan dikelola oleh Unit Audit Internal. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan pemantauan atas proses dan penyelesaian dari setiap pengaduan atau pelaporan yang ada. Dengan mekanisme dan sistem yang telah diterapkan Perseroan, pelaksanaan WBS diharapkan senantiasa mendukung pelaksanaan tugas pengawasan aktif dari Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2025, laporan yang masuk melalui WBS telah dikelola dan ditindaklanjuti secara konsisten sesuai dengan ketentuan serta kebijakan internal yang berlaku, sebagai wujud komitmen Perseroan terhadap penerapan GCG.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 23 Juni 2025, RUPS Tahunan menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Selanjutnya, berdasarkan RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2025, RUPS Luar Biasa menyetujui melakukan pergantian Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Implementation of Good Corporate Governance

As part of its GCG implementation, the Company has a Whistleblowing System ("WBS") policy, which provides information regarding irregularities in the Company's business processes. These irregularities can be fraudulent or non-fraudulent, occurring in the Company's work units, both at the Head Office and at Branch Offices.

This reporting system allows whistleblowers not only from internal employees but also from external parties, intermediaries, and the general public with interests in the Company, whether directly or indirectly. The identity of the whistleblower is confidential, and reports can be submitted anonymously.

The Company also encourages parties collaborating with the Company to report through WBS on any indications and/or evidence of violations that could potentially lead to fraudulent activity.

The function of this reporting system is monitored and managed by the Internal Audit Unit. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors the process and resolution of each complaint or report. With the mechanisms and systems implemented by the Company, the implementation of the WBS is expected to continuously support the Board of Commissioners' active monitoring duties.

Throughout 2025, reports received through the WBS were consistently managed and followed up in accordance with applicable internal regulations and policies, demonstrating the Company's commitment to implementing GCG.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Based on the Annual GMS held on June 23, 2025, the Annual GMS approved the reappointment of all members of the Company's Board of Commissioners effective as of the closing of the Meeting.

Furthermore, based on the Extraordinary GMS held on December 23, 2025, the Extraordinary GMS approved the change in the Independent Commissioner of the Company effective as of the closing of the Meeting.

As of the publication of this Annual Report, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Komisaris Utama / President Commissioner	: Yasuo Imaizumi
Komisaris / Commissioner	: Bhindawati Gunawan
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: Dani Hamdani

Frekuensi dan Metode Pemberian Saran Kepada Direksi

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan saran yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk di antaranya pengawasan atas penerapan strategi Perseroan, melalui berbagai forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris; dan
2. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.

Di tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali dan juga mengadakan 8 (delapan) kali rapat gabungan bersama dengan Direksi.

Apresiasi

Akhir kata, perkenankan saya, mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemegang Saham atas dukungan dan kepercayaannya, serta jajaran manajemen atas kerja keras, komitmen dan dedikasinya. Kami berharap, ditengah tantangan ekonomi global, Perseroan dapat terus meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Jakarta, April 2026
Atas nama Dewan Komisaris
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Frequency and Method of Advice Submission to the Board of Directors

Throughout 2025, the Board of Commissioners provided direction and advice related to the Board of Commisioner duties and responsibilities, including monitoring of the implementation of the Company's strategy, through various forums, including:

1. Board of Commissioners Meetings; and
2. Joint Board of Commissioners Meetings with the Board of Directors.

In 2025, the Board of Commissioners held 7 (seven) Board of Commissioners Meetings and 8 (eight) joint meetings with the Board of Directors.

Appreciation

Finally, on behalf of the Board of Commissioners, allow me to express my deepest gratitude to the Shareholders for their support and trust, and to the management for their hard work, commitment, and dedication. We hope that, amidst global economic challenges, the Company can continue to improve its performance in the coming year.

Jakarta, April 2026
On behalf of the Board of Commissioners of
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk



Yasuo Imaizumi
Komisaris Utama / President Commissioner

Laporan Direksi

The Board of Directors Report



Takeshi Kurioka

Direktur Utama
President Director

"Perseroan terus berusaha meningkatkan kinerja bisnisnya dengan prinsip kehati-hatian sehingga pada akhir tahun 2025, Perseroan mampu menunjukkan pertumbuhan yang cukup moderat di tengah ketidakpastian global dan lingkungan bisnis yang tidak terprediksi pada tahun 2025. Kendati demikian, Direksi percaya dengan mengembangkan budaya perusahaan yang proaktif dengan penerapan pendekatan "berbasis nol" akan mendorong inovasi dan efisiensi seraya meningkatkan pengendalian internal untuk menciptakan pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan.

The Company continues to strive to improve its business performance with a prudent approach, so that by the end of 2025, the Company were able to performed moderate growth despite global uncertainty and unpredictable business environment in 2025. Nevertheless, the Board of Directors believes that developing a proactive corporate culture with a "zero-based" approach will encourage innovation and efficiency while improving internal controls to create sustainable growth for the Company."

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Pertemuan tahunan *World Economic Forum* (WEF) 2025 di Davos, Swiss, yang mempertemukan 3.000 pemimpin dari berbagai negara, mengusung tema *"Collaboration for the Intelligent Age"* menggarisbawahi urgensi adaptasi cepat dan sinergi global dalam menghadapi transformasi teknologi, khususnya integrasi kecerdasan buatan (AI) sebagai katalisator perubahan lintas industri. Kolaborasi internasional merupakan elemen krusial untuk mengoptimalkan potensi perdagangan dan investasi global.

Hubungan perdagangan global sedang mengalami rekonfigurasi masif akibat peningkatan ketegangan geopolitik, proteksionisme, dan restrukturisasi rantai pasok. Tarif impor resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat ("AS") pada pertengahan tahun 2025 memicu terjadinya perang dagang yang berdampak pada

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

The 2025 World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos, Switzerland, which brought together 3,000 leaders from various countries, carried the theme "Collaboration for the Intelligent Age" emphasized the urgency of rapid adaptation and global synergy in the face of technological transformation, particularly the integration of artificial intelligence (AI) as a catalyst for change across industries. International collaboration is crucial for optimizing the potential of global trade and investment.

Global trade relations are undergoing a massive reconfiguration due to rising geopolitical tensions, protectionism, and supply chain restructuring. The reciprocal import tariffs imposed by the United States ("US") in mid-2025 triggered a trade war that impacted global economic stability. The impact of global

stabilitas ekonomi global. Dampak dari ketidakstabilan ekonomi global menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pada negara-negara di dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) di 24 negara anggota OECD pada kuartal keempat (Q4) 2025 menunjukkan dinamika yang beragam. Dibandingkan dengan kuartal ketiga (Q3) 2025, 10 negara berhasil mencatat akselerasi pertumbuhan dan dua negara cenderung stabil, namun tujuh negara mengalami perlambatan serta lima negara lainnya terkontraksi. Tren ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kawasan OECD secara keseluruhan sedikit melambat ke angka 0,30%, sedikit turun dari kuartal sebelumnya yaitu 0,40%.

economic instability has shown varied economic growth across countries worldwide. Gross Domestic Product (GDP) in the 24 OECD member countries in the fourth quarter (Q4) of 2025 showed mixed dynamics. Compared to third quarter (Q3) 2025, 10 countries recorded accelerated growth, and two remained stable. However, seven countries experienced a slowdown, and five others contracted. This trend caused overall economic growth in the OECD region to slow slightly to 0.30%, down slightly from 0.40% in the previous quarter.

Optimisme terhadap teknologi baru dan dukungan kebijakan makro ekonomi telah membantu menjaga daya beli dan permintaan global di tengah ketidakpastian pasar. Melalui peningkatan investasi di sektor AI dan dialog antarnegara yang efektif, hambatan perdagangan serta fluktuasi kebijakan dapat diredam, meskipun tingkat pemulihannya masih bervariasi di setiap negara.

Optimism about new technologies and supportive macroeconomic policies have helped maintain global purchasing power and demand amid market uncertainty. Through increased investment in AI and effective international dialogue, trade barriers and policy fluctuations can be mitigated, although the pace of recovery varies across countries.

Dampak dari ketidakpastian global dan perang dagang menyebabkan nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2025 terombang-ambing dan sempat menyentuh angka Rp17.261 per dolar AS dimana Rupiah sempat stabil di pertengahan tahun sebelum perlahan terus melemah sejak akhir kuartal dua hingga saat ini.

The impact of global uncertainty and the trade war caused the Rupiah exchange rate to fluctuate throughout 2025, reaching IDR 17,261 per US dollar where the Rupiah stabilized in the middle of the year before gradually weakening from the end of the second quarter onwards.

Berdasarkan rilis data BPS, ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai pertumbuhan 5,11%, melampaui capaian tahun 2024 yang sebesar 5,03%. Pertumbuhan ini tersebar merata di hampir seluruh lapangan usaha, di mana sektor jasa lainnya mencatatkan performa paling impresif dengan kenaikan 9,93%. Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian menjadi satu-satunya yang mengalami kontraksi sebesar 0,66%. Dari aspek stabilitas harga, inflasi tahunan per Desember 2025 terjaga di level 2,92% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada pada posisi 109,92.

Based on released data from the BPS, the Indonesian economy achieved the growrth by 5.11% in 2025, surpassing the 5.03% achieved in 2024. This growth is evenly distributed across almost all business sectors, with the other services sector recording the most impressive performance with a 9.93% increase. Meanwhile, the mining and quarrying sector was the only sector to experience a contraction of 0.66%. In terms of price stability, annual inflation as of December 2025 is maintained at 2.92%, with the Consumer's Price Index (CPI) at 109.92.

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia ("BI") telah beberapa kali melakukan koreksi suku bunga kebijakan BI (BI-*Rate*) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya hingga pada akhir tahun 2025 yaitu sebesar 4,75%.

Throughout 2025, Central Bank of Indonesia ("BI") has made several adjustments to the BI policy interest rate (BI-Rate) to guide inflation expectations in line with its target of 4.75% by the end of 2025.

Industri pembiayaan pun tidak luput dari faktor makro ekonomi global dan domestik. Kinerja industri perusahaan pembiayaan sepanjang 2025 tercatat mengalami tekanan. Secara tahunan, jumlah aset industri mengalami kontraksi 0,01%, sementara pertumbuhan piutang pembiayaan meningkat 0,61%. Pertumbuhan piutang pembiayaan sempat menunjukkan perbaikan pada Oktober 2025 di angka 0,68% dan tumbuh menjadi 1,08% pada November 2025. Namun, tren tersebut kembali melemah pada Desember 2025. Tekanan kinerja juga datang dari meningkatnya pembiayaan bermasalah dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio piutang bermasalah ("NPF") industri pembiayaan tercatat meningkat menjadi 0,77% secara neto. Selama tahun 2025 juga terdapat kenaikan rasio BOPO industri. Pada November 2025, BOPO industri masih berada di kisaran 80,85%, namun meningkat menjadi 82,86% pada Desember, atau naik sekitar 2,48% hanya dalam satu bulan. Kondisi perusahaan pembiayaan tersebut dikhawatirkan dapat memicu risiko sistemik bagi sektor perbankan.

The financing industry is also not immune to global and domestic macroeconomic factors. The performance of the financing industry throughout 2025 was recorded as under pressure. On an annual basis, total industry assets contracted by 0.01%, while financing receivables increased to 0.61%. Financing receivables growth showed improvement in October 2025 at 0.68% and grew to 1.08% in November 2025. However, this trend weakened again in December 2025. Performance pressure also came from increasing non-performing financing compared to last year. The financing industry's non-performing financing ("NPF") ratio was recorded increasing to 0.77% net. During 2025 there was also an increase in the ratio of industry's BOPO. In November 2025, the industry's BOPO remained at around 80.85%, but increased to 82.86% in December, representing a 2.48% increase in just one month. The situation in these financing companies is feared to trigger systemic risk for the banking sector.

Hal ini disebabkan oleh ketergantungan struktural yang tinggi, di mana sekitar 85,00% pendanaan industri pembiayaan bersumber dari sektor perbankan.

Dalam acara *talkshow* yang digelar Infobank secara daring pada awal Februari 2026, OJK menekankan urgensi penguatan ekosistem perusahaan pembiayaan melalui beberapa langkah strategis. Hal ini mencakup penerapan fidusia yang patuh pada ketentuan, perlindungan asuransi atas objek pembiayaan dan kredit, serta optimalisasi manajemen penagihan dan pengelolaan aset bermasalah. Selain itu, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dipandang sebagai infrastruktur krusial untuk menjaga kualitas pembiayaan, terutama dalam melakukan penilaian profil risiko debitur sejak tahap awal penyaluran pembiayaan.

Selama tahun 2025, Industri otomotif Indonesia juga mencatatkan penurunan volume penjualan. Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan *wholesales* hanya menyentuh angka 803.687 unit, lebih rendah dari angka 865.723 unit di tahun 2024. Sejalan dengan itu, penjualan ritel juga mengalami pelemahan sebesar 6,30%, dengan total penjualan sebanyak 833.692 unit sepanjang tahun tersebut.

Menyikapi dinamika industri yang ada, Perseroan telah melakukan beberapa hal strategis selama tahun 2025, diantaranya yaitu menerapkan strategi adaptif dan konservatif dengan mengedepankan budaya risiko, prinsip kehati-hatian serta pelindungan konsumen, melakukan intensifikasi usaha melalui jaringan kantor Perseroan yang sudah ada, mengembangkan sistem *Robot Process Automation* ("RPA") untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan senantiasa mengacu pada pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) serta memperkuat pertahanan dari serangan siber dimana pada tahun 2025 Perseroan telah meningkatkan sertifikasi ISO 27001:2013 menjadi ISO 27001:2022. Selain itu Direksi juga melaksanakan rapat diskusi secara intensif dan berkala pada setiap direktorat guna memaksimalkan profitabilitas seraya mengelola pengendalian biaya, melakukan upaya penanganan debitur bermasalah hingga melakukan evaluasi untuk mempertimbangkan kebutuhan dilakukannya penghapusbukuan dengan tetap melakukan upaya *recovery*, hingga menindaklanjuti seluruh hasil temuan Audit OJK yang menjadi komitmen Perseroan pada tahun 2025.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi

Dalam mengemban fungsi kepengurusan Perseroan, Direksi memiliki peran strategis terkait perumusan dan implementasi strategi Perseroan. Direksi secara konsisten melakukan kajian atas pelaksanaan strategi bisnis dengan senantiasa mempertimbangkan dinamika yang ada. Selain itu, Direksi juga melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi strategi Perseroan guna mengawal kinerja yang optimal dalam jangka panjang.

Strategi Perseroan dirancang dengan tetap mempertimbangkan berbagai dinamika baik global, domestik, hingga industri, guna memastikan perumusan strategi yang relevan dengan perkembangan ekosistem bisnis perusahaan pembiayaan. Direksi mengedepankan aspek manajemen risiko yang terukur

This is due to high structural dependency, with approximately 85.00% of the financing industry's funding coming from the banking sector.

In a talk show held online by Infobank in early February 2026, OJK emphasized the urgency of strengthening the financing company ecosystem through several strategic measures. These include implementation of fiduciary that comply with the regulations, insurance protection for financing objects and loans, and optimizing collection management and managing non-performing assets. Furthermore, the Financial Information Services System (SLIK) is seen as crucial infrastructure for maintaining financing quality, particularly in assessing borrowers' risk profiles from the initial financing disbursement stage.

During 2025, the Indonesian automotive industry also recorded a decline in sales volume. According to data from the Association of Indonesian Automotive Industries (Gaikindo), wholesale sales only reached 803,687 units, lower than the 865,723 units in 2024. Similarly, retail sales also weakened by 6.30%, with total sales reaching 833,692 units throughout the year.

In response to the industry dynamics, the Company has undertaken several strategic measures during 2025, including implementing adaptive and conservative strategies by prioritizing risk culture, prudence principles and consumer protection, intensifying business through the Company's existing office network, developing a Robot Process Automation ("RPA") system to improve work efficiency while consistently adhering to Information Security Management System (ISMS) guidelines and strengthening its defenses against cyberattacks where in 2025, the Company upgraded its ISO 27001:2013 certification to ISO 27001:2022. In addition, the Board of Directors was conducting intensive and regular discussion meetings in each directorate to maximize profitability and manage cost control, making efforts to handle problematic debtors to conducting evaluations to consider the need for write-offs while continuing to make recovery efforts, and followed up on all OJK Audit findings which are the Company's commitments in 2025.

The Role of the Board of Directors in Strategy Formulation

In carrying out the Company's management function, the Board of Directors plays a strategic role in the formulation and implementation of the Company's strategy. The Board of Directors consistently reviews the implementation of business strategies while always taking into account existing dynamics. Furthermore, the Board of Directors periodically evaluates the implementation of the Company's strategy to ensure optimal long-term performance.

The Company's strategy is designed by considering various global, domestic, and industry dynamics, to ensure strategy formulation is relevant to the development of the financing company business ecosystem. The Board of Directors prioritizes measurable risk management aspects to address every

untuk dapat menjawab setiap tantangan seraya beradaptasi dengan dinamika industri. Perseroan menetapkan rencana bisnis secara konservatif, realistis, dan adaptif guna menciptakan nilai tambah bagi para Pemangku Kepentingan.

Proses yang Dilakukan Direksi dalam Implementasi Strategi

Terkait implementasi strategi bisnis Perseroan, Direksi secara berkala memperhatikan berbagai variabel kunci yang mencerminkan kinerja bisnis Perseroan. Mulai dari evaluasi pencapaian target, laporan keuangan berkala, rasio-rasio keuangan, hingga hasil rapat koordinasi dengan setiap unit bisnis dan fungsi pendukung lainnya. Direksi senantiasa menjalin komunikasi yang baik dan mengawal rantai koordinasi antar unit bisnis dan fungsi pendukung guna memastikan implementasi strategi telah berjalan dengan efektif.

Kinerja Perseroan 2025

Dari sisi kinerja keuangan, Jumlah Aset Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.153,53 miliar, menurun 1,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan juga terjadi pada Jumlah Liabilitas sebesar 2,31% menjadi Rp2.409,52 miliar. Sebaliknya, Jumlah Ekuitas Perseroan menunjukkan pertumbuhan tipis sebesar 0,003% ke angka Rp744,01 miliar.

Meskipun Pendapatan mengalami penurunan 4,23% menjadi Rp448,82 miliar, Perseroan berhasil menekan Beban sebesar 7,05% sehingga menjadi Rp440,28 miliar. Pengurangan beban ini mendorong kenaikan Laba Bersih Tahun Berjalan menjadi Rp2,89 miliar. Sehubungan dengan kualitas aset, rasio NPF-neto tercatat sebesar 1,59%, yang menunjukkan adanya penurunan kualitas dibandingkan tahun 2024 meskipun masih berada dalam koridor ketentuan OJK yang berlaku. Pada tahun 2025, jaringan usaha Perseroan didukung oleh 31 Kantor Cabang di beberapa kota besar yang tersebar di pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Sumatera dan Sulawesi.

Target dan Realisasi

Tinjauan terhadap neraca tahun 2025 menunjukkan bahwa Perseroan membukukan Jumlah Aset sebesar Rp3.153,53 miliar atau sebesar 96,91% dari target yang ditetapkan yakni Rp3.254,19 miliar. Dari aspek operasional, pendapatan tercatat sebesar Rp448,82 miliar, sedikit di bawah target sasaran sebesar Rp463,51 miliar. Meskipun demikian, Perseroan berhasil melampaui target profitabilitas dengan pencapaian Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp2,89 miliar, jauh di atas target awal Rp1,88 miliar. Capaian ini didukung oleh efisiensi operasional, di mana rasio BOPO tercatat sebesar 98,55%, sedikit lebih rendah dari target sebelumnya 99,62%.

Kendala yang Dihadapi Perseroan di Tahun 2025

Dinamika industri 2025 turut berdampak langsung pada Perseroan. Hal ini ditunjukkan dari belum tercapainya target penyaluran pembiayaan Unit Bisnis Ritel dan Unit Bisnis Korporasi. Pada Unit Bisnis Ritel, Perseroan menerapkan prinsip selektifitas yang lebih ketat sebagai respons atas meningkatnya angka NPF di industri keuangan. Sementara itu, pada Unit Bisnis Korporasi, ketidakpastian ekosistem bisnis memicu sikap konservatif dari pelanggan korporasi, yang berdampak pada penundaan pencairan investasi dan modal kerja. Menghadapi

challenge while adapting to industry dynamics. The Company establishes a conservative, realistic, and adaptive business plan to create added value to Stakeholders.

The Board of Directors' Process in Strategy Implementation

Regarding the implementation of the Company's business strategy, the Board of Directors regularly monitors various key variables that reflect the Company's business performance. These include evaluation to the target achievement, periodic financial reports, financial ratios, and the results of coordination meetings with each business unit and other supporting functions. The Board of Directors always establish good communication and oversee the chain of coordination between business units and supporting function to ensure that strategy implementation is running effectively.

Company Performance 2025

In terms of financial performance, the Company's Total Assets in 2025 were recorded at IDR 3,153.53 billion, a 1.78% decrease compared to the previous year. Total Liabilities also decreased by 2.31% to IDR 2,409.52 billion. Conversely, the Company's Total Equity showed a slight increase of 0.003% to IDR 744.01 billion.

Although Income decreased by 4.23% to IDR 448.82 billion, the Company managed to reduce Expenses by 7.05% to IDR 440.28 billion. This reduction in expenses increased the Net Profit For The Year, amounted IDR 2.89 billion. Regarding asset quality, the net NPF ratio was recorded at 1.59%, indicating a decline in quality compared to 2024, although it remains still within the applicable OJK regulations. In 2025, the Company's business network was supported by 31 Branch Offices in several major cities across Java, Kalimantan, Bali, Sumatra, and Sulawesi.

Targets and Realization

A review of the 2025 balance sheet shows that the Company recorded Total Assets of IDR 3,153.53 billion or 96.91% of the set target of IDR 3,254.19 billion. From an operational perspective, income was recorded at IDR 448.82 billion, slightly below the target of IDR 463.51 billion. Nevertheless, the Company managed to exceed its profitability target with a Net Profit For The Year of IDR 2.89 billion, well above the initial target of IDR 1.88 billion. This achievement was supported by operational efficiency, where the BOPO ratio was recorded at 98.55%, slightly lower than the target set of 99.62%.

Challenges Faced by the Company in 2025

The dynamics of the industry in 2025 also have a direct impact to the Company. This is reflected from the financing disbursement targets for both the Retail Business Unit and the Corporate Business Unit that have not yet been achieved. In the Retail Business Unit, the Company has implemented stricter selectivity principles in response to the rising NPF rates within the financial industry. Meanwhile, in the Corporate Business Unit, uncertainty in the business ecosystem has triggered a conservative stance among corporate clients, resulting in delays in the disbursement

kondisi ini, Perseroan senantiasa berusaha meningkatkan pertumbuhan portofolio pembiayaan yang berkualitas berdasarkan prinsip kehati-hatian serta mengembangkan produk-produk dan strategi pemasaran yang tepat sasaran serta berbasis risiko.

Prospek Usaha Tahun 2026

Eskalasi konflik di Timur Tengah yang terjadi sejak awal tahun 2026 telah memicu lonjakan harga energi dan pupuk. Fenomena ini memicu inflasi global, krisis energi, melemahkan permintaan pasar, serta menghambat potensi pertumbuhan yang seharusnya didorong oleh akselerasi produksi teknologi serta kebijakan moneter dan fiskal yang suportif.

Berdasarkan data OECD pada bulan Maret 2026, OECD memproyeksikan *outlook* pertumbuhan PDB global 2026 yaitu sebesar 2,90% dan berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan April 2026, proyeksi pertumbuhan global 2026 sebesar 3,10%. Proyeksi ini bergantung pada asumsi teknis bahwa tingkat gangguan pasar energi saat ini akan mereda seiring waktu, dengan harga minyak, gas, dan pupuk menurun secara bertahap mulai pertengahan tahun 2026 dan seterusnya.

Meskipun terdapat proyeksi kenaikan inflasi, bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada level moderat. Langkah BI dalam menentukan suku bunga acuan ke depan dipandang tetap berimbang, dengan fokus utama memitigasi risiko volatilitas nilai tukar serta menjaga stabilitas ekspektasi inflasi.

Di sisi lain, pada bulan Maret 2026, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 sebesar 4,80%. Angka ini menunjukkan tren perlambatan dan berada di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) 2026 yaitu sebesar 5,40%.

Pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global sekaligus memastikan belanja negara lebih produktif dan tepat sasaran, salah satunya adalah dengan fokus pada efisiensi APBN 2026 melalui serangkaian kebijakan terintegrasi yang diperkirakan mampu menghemat hingga Rp 204,4 triliun. Sumber penghematan terbesar berasal dari pengelolaan prioritas belanja kementerian dan lembaga. Secara keseluruhan, kombinasi *refocusing* anggaran, efisiensi program sosial, serta penghematan subsidi energi senantiasa menjadi penopang utama penguatan fiskal di tahun 2026.

Pada Rapat Dewan Komisaris OJK yang diadakan pada awal bulan Maret 2026, OJK menyampaikan dengan mempertimbangkan target industri dan kondisi perekonomian, proyeksi pertumbuhan piutang pembiayaan tahun 2026 diperkirakan dapat mencapai 6,00%-8,00% (yoy). Dari sisi penjualan mobil, pada tahun 2026, Gaikindo memproyeksikan penjualan mobil sepanjang 2026 yaitu sebesar 850.000 unit. Pencabutan insentif tarif bea masuk nol persen untuk impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai oleh Kementerian

of investments and working capital. In facing these conditions, the Company continuously strives to enhance the growth of high-quality financing portfolios based on prudence principles, while developing targeted and risk-based products and marketing strategies.

Business Prospects 2026

The escalation of conflict in the Middle East that has occurred since the beginning of 2026 has triggered a surge in energy and fertilizer prices. This phenomenon has fueled global inflation, energy crisis, weakened market demand, as well as hampered potential growth that should have been driven by accelerated technological production and supportive monetary and fiscal policies.

Based on OECD data in March 2026, OECD projected the 2026 global GDP growth outlook is at 2.90% and on April 2026, the International Monetary Fund (IMF) projected global growth of 3.10% for 2026. This projection relies on the technical assumption that the current level of energy market disruption will subside over time, with oil, gas, and fertilizer prices gradually declining from mid-2026 onward.

Despite projections of rising inflation, the central bank is expected to maintain interest rates at a moderate level. BI’s approach to setting its benchmark interest rate going forward is seen as balanced, with a primary focus on mitigating the risk of exchange rate volatility and maintaining stable inflation expectations.

On the other hand, on March 2026, the OECD projected the Indonesia’s economic growth in 2026 amounted 4.80%. This figure indicates a slowing trend and is below the 2026 State Budget (“APBN”) target of 5.40%.

The Government is also undertaking various efforts to maintain fiscal resilience amid global uncertainty while ensuring more productive and targeted state spending. One of these efforts is by focusing on the efficiency of the 2026 APBN through a series of integrated policies estimated to save up to IDR 204.4 trillion. The largest source of savings comes from priority management of the ministry and agency spending. Overall, the combination of budget refocusing, social program efficiency, and energy subsidy savings will be the main pillars of fiscal strengthening in 2026.

At the OJK Board of Commissioners Meeting held in early March 2026, OJK stated that taking into account industry targets and economic conditions, growth projections of financing receivables in 2026 could reach 6.00%-8.00% (yoy). In term of car sales, Gaikindo projects that car sales throughout 2026 will be 850,000 units. The Ministry of Finance’s revocation of the zero percent import duty incentive for imports of battery-based electric motor vehicles, effective January 1, 2026, will result in higher prices for electric vehicles (EVs).

Keuangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 akan berdampak pada naiknya harga mobil listrik (EV), meskipun harga mobil listrik akan cenderung naik, konsumen akan tetap beralih ke mobil listrik dan *hybrid* mengingat harga bahan bakar minyak akan melonjak sehubungan dengan eskalasi kondisi di Timur Tengah.

Although EV prices will likely rise, consumers will continue to shift to electric and hybrid vehicles given the expected surge in fuel prices due to the escalating conditions in the Middle East.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global maupun domestik, Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan yang mengedepankan pengembangan produk-produk dan strategi pemasaran yang tepat sasaran serta melanjutkan upaya penanganan debitur bermasalah dengan menerapkan strategi konservatif. Khususnya pada Unit Bisnis Ritel, Perseroan akan melakukan sentralisasi *Credit Analyst* guna meningkatkan aspek independensi, peningkatan kompetensi, standarisasi analisa kredit, serta penyetaraan beban kerja.

Amidst global and domestic economic uncertainty, the Company consistently strives to improve the quality of its financing portfolio by prioritizing the development of targeted products and marketing strategies, as well as continuing efforts to manage problematic debtors by implementing conservative strategies. Particularly within the Retail Business Unit, the Company will centralize Credit Analysts to improve independence, competency, standardize credit analysis, as well as equalize workloads.

Untuk Unit Bisnis Korporasi, Perseroan akan meningkatkan *pipeline* bisnis melalui akuisisi kredit dan melanjutkan kolaborasi dengan Marubeni Indonesia & Bank Mizuho Indonesia.

For the Corporate Business Unit, the Company will enhance its business pipeline through credit acquisitions and continued collaboration with Marubeni Indonesia and Bank Mizuho Indonesia.

Dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan mengupayakan pengendalian secara penuh terhadap rasio BOPO dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan bisnis Perseroan. Dari sisi pendanaan, Perseroan melakukan penelaahan strategi pendanaan dengan mengoptimalkan sumber pendanaan dengan suku bunga kompetitif yang didukung oleh komitmen Pemegang Saham Pengendali sekaligus salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan yaitu Mizuho Leasing Co., Ltd. dalam menyediakan *Corporate Guarantee,* menjaga ketersediaan likuiditas dan pengelolaan arus kas yang memadai serta mengelola rasio kesesuaian antara jangka waktu pendanaan dan jangka waktu pembiayaan *(matching ratio)* seraya mempertimbangkan aspek profitabilitas. Selain itu, Perseroan juga melakukan pemantauan secara ketat dengan pendekatan realistis terhadap dampak tren suku bunga dan kondisi pasar serta memantau dan melaporkan ke manajemen secara berkala atas proyeksi rasio keuangan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap batas rasio sesuai ketentuan OJK.

In carrying out its operations, the Company strives to fully control the BOPO ratio to optimize business growth. From a funding perspective, the Company is reviewing its funding strategy by optimizing funding sources at competitive interest rates which is supported by the commitment of the Controlling and one of the Company's Main Shareholder namely Mizuho Leasing Co., Ltd., to provide a Corporate Guarantee, maintain adequate liquidity and cash flow management, and manage the ratio between the funding period and the financing period (matching ratio) as well as taking profitability into account. Furthermore, the Company closely monitors the impact of interest rate trends and market conditions with a realistic approach as well as periodically monitor and report it to the management of the financial ratio projection to ensure the compliance with the ratio limits stipulated by OJK regulation.

Perseroan juga akan melakukan pengembangan bisnis melalui perluasan jaringan usaha guna meningkatkan profitabilitas dan mencapai efisiensi operasional yang optimal. Hal tersebut tentunya juga didukung oleh pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan kunci dalam mewujudkan peningkatan produktifitas dan capaian kinerja Perseroan yang lebih baik.

The Company will also pursue business development through business network expansion to increase profitability and achieve optimal operational efficiency. This will be supported by human resource development, which plays a key role in achieving increased productivity and improved performance of the Company.

Pengembangan bisnis Perseroan juga tentunya melibatkan proses penyesuaian kebijakan pembiayaan secara terstruktur yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas portofolio piutang pembiayaan. Adapun proses tersebut tentunya senantiasa dilakukan dalam koridor hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan pemenuhan aspek kepatuhan yang diharapkan mampu mendukung tercapainya target kinerja kualitas piutang pembiayaan dan profitabilitas tahun 2026.

The Company's business development also involves a structured process of adjusting financing policies, which is expected to improve the quality of its financing receivables portfolio. This process is consistently conducted within the legal framework, based on applicable laws and regulations, to enhance compliance, which is expected to support the achievement of the financing receivables quality and profitability performance targets for 2026.

Direksi senantiasa memastikan proses mitigasi risiko bisnis dijalankan secara optimal melalui mekanisme manajemen risiko terintegrasi yang mampu memantau secara cermat perkembangan Beban Penyisihan Piutang Ragu-Ragu. Sejalan dengan hal tersebut, Direksi melakukan pelaporan secara berkala kepada Dewan Komisaris dalam rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris.

The Board of Directors consistently ensures that business risk mitigation processes are optimally implemented through an integrated risk management mechanism that closely monitors the development of the Allowance for Doubtful Accounts. In line with this, the Board of Directors reports periodically to the Board of Commissioners at the joint meetings of Board of Directors and Board of Commissioners.

Evaluasi terhadap proses bisnis Perseroan juga dilakukan terkait pengembangan otomatisasi melalui RPA. Hal ini difokuskan pada proses bisnis yang masih dilakukan secara manual dengan frekuensi berulang agar dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Secara paralel, Perseroan juga terus melakukan kajian atas pengembangan sistem inti Perseroan yang lebih terintegrasi.

The Company's business processes are also being evaluated in relation to automation development through RPA. This focuses on business processes that are still performed manually and repeatedly, ensuring they run faster and more efficiently. In parallel, the Company is also continuing to review the development to its core systems to create a more integrated system.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perseroan memiliki komitmen penuh untuk terus meningkatkan penerapan GCG dalam setiap proses bisnis maupun seluruh aspek pengelolaan Perseroan sehingga dapat menciptakan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Implementation of Good Corporate Governance

The Company is fully committed to continuously improving the implementation of GCG in every business process and all aspects of Company management, thereby creating added value to all stakeholders.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi prinsip-prinsip GCG. Anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen, memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu Rapat Direksi, serta rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris terselenggara secara efektif.

The Board of Directors has carried out its duties and responsibilities effectively and in accordance with GCG principles. Members of the Board of Directors are capable of acting and making decisions independently, possessing competence and integrity commensurate with the Company's size and complexity, and have complied with applicable regulations. Furthermore, Board of Directors Meetings, as well as joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners, were held effectively.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menjalankan penilaian mandiri terhadap faktor GCG yang merupakan bagian dari penilaian Tingkat Kesehatan perusahaan berdasarkan ketentuan OJK. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, faktor GCG mencerminkan hasil sangat baik (Peringkat 1). Hal ini menggambarkan capaian Perseroan terkait implementasi GCG yang konsisten dari tahun ke tahun dan terus ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Throughout 2025, the Company conducted a self-assessment of its GCG factor as part of the corporate Soundness Level assessment based on OJK regulation. Based on the results of this assessment, the GCG factors reflected an excellent result (Rank 1). This demonstrates the Company's consistent GCG implementation and will always be improved year-over-year according to the applicable provisions.

Secara berkala, Perseroan terus melakukan evaluasi dan langkah perbaikan untuk meningkatkan penerapan GCG. Perseroan juga secara berkala memantau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin terpenuhinya aspek kepatuhan Perseroan.

The Company periodically evaluates and takes corrective measures to enhance its GCG implementation. The Company also regularly monitors changes in established laws and regulations to ensure its compliance with applicable laws and regulations.

Penilaian atas Kinerja Komite

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi kepengurusan Perseroan, maka Direksi telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Committee Performance Assessment

In order to support the effectiveness implementation of the Company's management function, the Board of Directors has established Risk Management Committee and the Information Technology Steering Committee.

Sepanjang tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah melakukan pembahasan mengenai Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan; Laporan tentang Pelaksanaan Undang-

Throughout 2025, the Risk Management Committee discussed the Company Soundness Level Assessment Report; the Report on the Implementation of the Anti-Money Laundering,

Undang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; Hasil pemeriksaan dan *Exit Meeting* OJK terkait Pemeriksaan OJK; dan pembaruan Pedoman Manajemen Risiko.

Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons; audit results and OJK Exit Meeting regarding the OJK Audit; as well as the update of the Risk Management Charter.

Sementara, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan pembahasan mengenai pengembangan proyek IT 2025, diantaranya pengembangan RPA, peningkatan sertifikasi ISO 27001:2013 menjadi ISO 27001:2022, serta pembahasan atas tindak lanjut pengembangan sistem inti *(i-Financing)* dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan regulasi terkait.

Meanwhile, the Information Technology Steering Committee discussed the development of the 2025 IT project, including the development of RPA and the upgrade of ISO 27001:2013 certification to ISO 27001:2022, as well as the follow-up to the development of the core system (i-Financing) in order to comply with the relevant regulatory provisions.

Direksi senantiasa mengapresiasi kinerja seluruh komite yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta komunikasi yang telah terjalin melalui rapat formil guna menyampaikan rekomendasi kepada Direksi secara komprehensif dan konstruktif.

The Board of Directors always appreciates the performance of all committees who have carried out their duties and responsibilities well, as well as the communication that has been established through formal meetings to convey recommendations to the Board of Directors in a comprehensive and constructive manner.

Perubahan Komposisi Direksi

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan yang diadakan pada tanggal 23 Juni 2025, RUPS Tahunan menyetujui untuk mengangkat Kenjiro Sawada selaku Direktur Perseroan menggantikan Shunsuke Kojima selaku Direktur Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir sejak ditutupnya Rapat. RUPS Tahunan juga menyetujui untuk mengangkat kembali Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama Perseroan, Andi Harjono selaku Direktur Perseroan dan Yudi Gustiawan selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Changes to the Composition of the Board of Directors

Based on the Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") held on June 23, 2025, the Annual GMS approved the appointment of Kenjiro Sawada as Director of the Company, replacing Shunsuke Kojima as Director of the Company, whose term of office has expired as of the closing of the Meeting. The Annual GMS also approved the reappointment of Konosuke Mizuta as President Director of the Company, Andi Harjono as Director of the Company, and Yudi Gustiawan as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting.

Selanjutnya, berdasarkan RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2025, RUPS Luar Biasa menyetujui menerima pengunduran diri Konosuke Mizuta dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan mengangkat Takeshi Kurioka selaku Direktur Utama Perseroan, dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang, yaitu pada tanggal 5 Maret 2026. RUPS Luar Biasa juga menyetujui untuk mengangkat Fransisca Yuliana Gunawan dan Ryuji Tarumi selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Furthermore, based on the Extraordinary GMS held on December 23, 2025, the Extraordinary GMS approved the acceptance of Konosuke Mizuta's resignation from his position as President Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, and the appointment of Takeshi Kurioka as President Director of the Company. This appointment is effective as of the date of issuance of the Limited Stay Permit from the authorized agency, namely March 5, 2026. The Extraordinary GMS also approved the appointment of Fransisca Yuliana Gunawan and Ryuji Tarumi as Directors of the Company, effective as of the closing of the Meeting.

Hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

As of the publication of this Annual Report, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

Direktur Utama / President Director : Takeshi Kurioka
Direktur / Director : Andi Harjono
Direktur / Director : Kenjiro Sawada
Direktur / Director : Yudi Gustiawan
Direktur / Director : Fransisca Yuliana Gunawan
Direktur / Director : Ryuji Tarumi

Frekuensi Rapat Direksi dan Metode Pengambilan Keputusan Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk pengambilan keputusan yang sah dan mengikat, Direksi dapat mengadakan Rapat Direksi atau dengan cara menandatangani persetujuan

Frequency of Board of Directors Meetings and Methods of Board of Directors Decision-Making

In accordance with the Company's Articles of Association, to make valid and binding decisions, the Board of Directors may convene a Board of Directors Meeting or sign a written approval

tertulis dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil secara tertulis mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi juga diadakan secara berkala untuk memberikan arahan dan saran atas penerapan strategi Perseroan.

Di tahun 2025, Direksi telah melaksanakan Rapat Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dan 8 (delapan) kali rapat gabungan bersama dengan Dewan Komisaris.

Apresiasi

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Dewan Komisaris atas pengarahan yang selalu diberikan, serta kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan yang diberikan kepada Perseroan. Kami percaya dengan dukungan yang positif dan terus-menerus dari seluruh pihak, Perseroan akan dapat terus meningkatkan capaian kinerja dan menunjukkan pertumbuhan yang bersinambungan serta berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi nasional di masa yang akan datang.

Jakarta, April 2026
Atas nama Direksi
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the proposals concerned and all members of the Board of Directors give their approval of the proposal submitted in writing and sign the approval. Decisions made in writing have the same force as decisions legally made at a Board of Directors Meeting.

Joint Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors are also held periodically to provide direction and advice on the implementation of the Company's strategy.

In 2025, the Board of Directors held 12 (twelve) Board of Directors Meetings and 8 (eight) joint meetings with the Board of Commissioners.

Appreciation

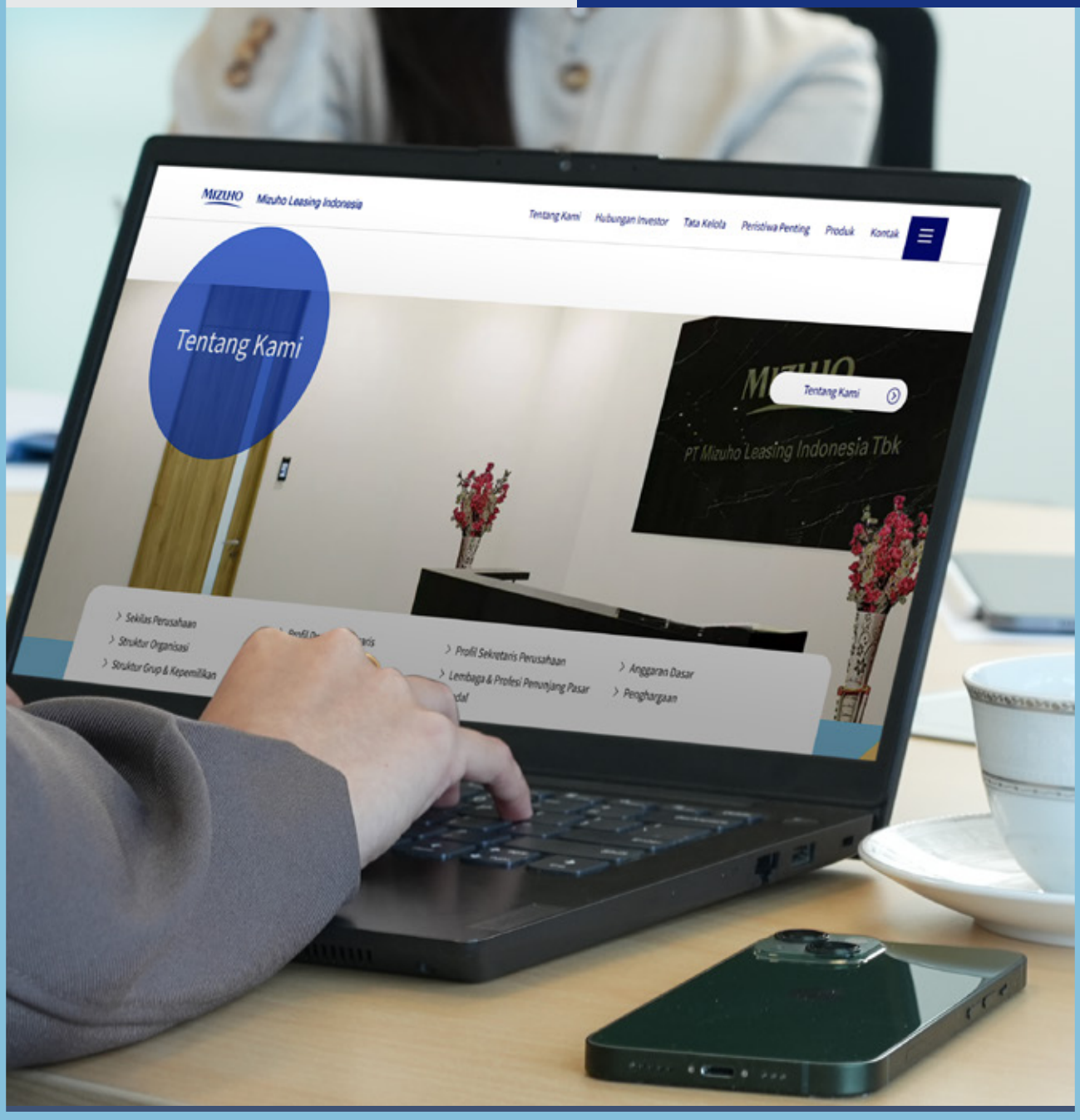
We would like to take this opportunity to express our gratitude to the entire Board of Commissioners for their continued guidance, and to our shareholders and stakeholders for their trust in the Company. We believe that with the positive and ongoing support of all parties, the Company will be able to continue improving its performance, demonstrating sustainable growth, and contributing to the development of the national economy in the future.

Jakarta, April 2026
On behalf of the Board of Directors of
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Takeshi Kurioka
Direktur Utama / President Director



PROFIL PERSEROAN
COMPANY PROFILE



Sekilas Perseroan
Company Overview

Mizuho Leasing Indonesia

Nama Perseroan / Company's Name	PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Tanggal Pendirian / Date of Establishment	21 Juli / July 1993
Alamat Kantor Pusat / Head Office Address	Menara Astra Lantai 32 / Menara Astra 32nd Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220
Nomor Telepon / Phone Number	021- 50851848
Faksimili / Fax	021- 50851849
Alamat Surel / Email Address	investor@mizuho-ls.co.id cs@mizuho-ls.co.id
Situs Web / Website	www.mizuho-ls.co.id
Bidang Usaha / Line of Business	Perusahaan Pembiayaan / Financing Company
Pencatatan Saham / Stock Listing	25 Juni 2008-Bursa Efek Indonesia 25 June 2008-Indonesia Stock Exchange

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("Perseroan") didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance berdasarkan akta No. 43 tanggal 21 Juli 1993 dari Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 tanggal 29 Oktober 1993 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994, Tambahan No. 8832.

Perseroan telah melakukan perubahan nama beberapa kali, terakhir dari PT Verena Multi Finance Tbk menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 8 tanggal 19 September 2022 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan, masing-masing dengan surat Nomor AHU-0068946.AH.01.02. Tahun 2022 Tanggal 24 September 2022 dan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Perseroan dengan nama sebelumnya yaitu PT Maxima Perdana Finance memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("the Company") was established under the name PT Maxima Perdana Finance based on deed No. 43 dated July 21, 1993 from Sri Nanning, S.H., Notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia under the Decree No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 dated October 29, 1993 and was reported in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 88 November 4, 1994, Supplement No. 8832.

The Company has changed its name several times, most recently from PT Verena Multi Finance Tbk became PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk based on the deed of Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Verena Multi Finance Tbk No. 8 dated 19 September 2022 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. This change has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as well as the Financial Services Authority, in letter Number AHU-0068946.AH.01.02. Year 2022 dated September 24, 2022 and Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the OJK No. KEP-806/NB.11/2022 dated December 12, 2022, respectively.

The Company, under its previous name PT Maxima Perdana Finance, obtained business license for financial institution from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia with

No.994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993. Perseroan mulai beroperasi pada tanggal 21 Juni 2003, dengan izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 Jo. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Decree No.994/KMK.017/1993 dated December 30, 1993. The Company started operating on June 21, 2003, with a business license based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 dated 4 May 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 dated 9 December 2010 Jo. Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the OJK No.KEP-806/NB.11/2022 dated 12 December 2022.

Perseroan pertama kali mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 dengan jumlah saham sebanyak 460.000 lembar saham, kemudian pada tahun 2017 melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dengan jumlah saham sebanyak 1.583.160.556 lembar saham dan pada tanggal 28 Desember 2018, Perseroan telah memperoleh surat pernyataan efektif dari OJK untuk melaksanakan Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD ("PMHMETD II") sebanyak 3.102.193.089 lembar saham dan pada bulan Januari 2019 Perseroan telah menerbitkan sebanyak 3.102.193.089 saham. Sampai dengan akhir tahun 2025 jumlah saham beredar Perseroan yang beredar adalah sebesar 5.687.353.997 saham.

The Company first listed its shares on the Indonesia Stock Exchange in 2008 with a total of 460,000 shares, then in 2017 the Company conducted a Limited Public Offering I ("PUT I") in accordance of issuing pre-emptive rights ("HMETD") with a total of 1,583,160,556 shares. On December 28, 2018, the Company obtained effective statement from the OJK to conduct a Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II ("PMHMETD II") of 3,102,193,089 shares and in January 2019 the Company has issued 3,102,193,089 shares. Therefore, by the end of 2025 the number of outstanding shares of the Company is 5,687,353,997 shares.

Mizuho Leasing Co.,Ltd merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang merupakan bagian dari Mizuho Financial Group, salah satu lembaga keuangan ternama di Jepang. Kepemilikan saham Mizuho Leasing Co.,Ltd per 31 Desember 2025 yaitu sebesar 67,44%.

Mizuho Leasing Co.,Ltd is the Controlling Shareholders of the Company which is part of the Mizuho Financial Group, one of the leading financial institution in Japan. The share ownership of Mizuho Leasing Co.,Ltd as of December 31, 2025 is 67.44%.

Pada tahun 2019, Perseroan juga melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT IBJ Verena Finance menggabungkan diri ke dalam Perseroan dan Perseroan menjadi *surviving entity*. Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan yaitu melakukan pembiayaan dibidang Ritel dan Korporasi.

In 2019, the Company merged with an associated entity, PT IBJ Verena Finance, where PT IBJ Verena Finance merged into the Company and the Company turned into a surviving entity. Currently, the Company's main business activity is financing in the Retail and Corporate sectors.

Kegiatan Usaha
Business Activities

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana tersebut dalam Akta No.34 tanggal 23 Desember 2025 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0049522 tanggal 21 Januari 2026 sebagaimana dicetak oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2026. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan utama Perseroan meliputi usaha pembiayaan:

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment to the Company's Articles of Association is as stated on Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution Deed No. 34 dated December 23, 2025 from Fathiah Helmi, SH Notary in Jakarta which Receipt of Notification of Amendments to the Company's Articles of Association has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia with Number: AHU-AH.01.03-0049522 dated January 21, 2026 as printed by Fathiah Helmi, SH., Notary in Jakarta on February 19, 2026. Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company comprises of financing activities:

1. Kegiatan Usaha Utama
   - Pembiayaan Investasi
   - Pembiayaan Modal Kerja
   - Pembiayaan Multiguna dan/atau
   - Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK

1. Main Business Activities
   - Investment Financing
   - Working Capital Financing
   - Multipurpose Financing and/or
   - Other Financing Business Activities Based on OJK Approval

2. Selain kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung:
   - sewa operasi
   - kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau
   - kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Perseroan memiliki 2 pilar bisnis, sebagai berikut:
1. Unit Bisnis Ritel
2. Unit Bisnis Korporasi

2. In addition to the above main business activities, the Company can carry out supporting business activities:
   - operating leases
   - fee-based activities as long as the Company does not violate the laws and regulations in the financial services sector and/or
   - other business activities with the Financial Services Authority approval

The Company has two business pillars, as follows:
1. Retail Bussiness Unit
2. Corporate Bussiness Unit

Produk & Layanan
Products & Services

Pembiayaan Ritel
- **Pembiayaan Investasi**
  Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur ritel dengan menjaminkan BPKB mobil untuk aktivitas usaha/ investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi.

- **Pembiayaan Modal Kerja**
  Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur ritel dengan menjaminkan BPKB mobil untuk memenuhi kebutuhan produktif yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha.

- **Pembiayaan Multiguna**
  Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur ritel dengan menjaminkan BPKB mobil untuk berbagai keperluan konsumtif dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif.

Pembiayaan Korporasi
- **Pembiayaan Investasi**
  Perseroan memberikan jasa pembiayaan investasi baik skema sewa pembiayaan langsung atau jual & sewa balik dengan pembelian aset seperti kendaraan, mesin, alat berat, peralatan IT, peralatan medis, dan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan klien korporasi dari produsen/ distributor/*dealer* dan menyewa guna usahakannya kepada klien.

  Kelebihan dari pembiayaan investasi adalah memungkinkan para klien untuk mempercepat penyusutan aktiva tetap.

- **Pembiayaan Modal Kerja**
  Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada klien korporasi dalam memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek dan mengatur arus kas agar lebih baik.

- **Kegaiatan Usaha Pembiayaan Lain berdasarkan persetujuan OJK**

Retail Financing
- **Investment Financing**
  A financing facility granted to retail debtors by pledging a vehicle ownership certificate (BPKB) as collateral, intended for business or investment activities, including rehabilitation, modernization, expansion, or relocation of business/investment premises.

- **Working Capital Financing**
  A financing facility granted to retail debtors by pledging a vehicle ownership certificate (BPKB) as collateral to fulfill productive needs that are utilized within one business cycle.

- **Multipurpose Financing**
  A financing facility granted to retail debtors by pledging a vehicle ownership certificate (BPKB) as collateral for various consumptive purposes and not for business or productive activities.

Corporate Financing
- **Investment Financing**
  The Company provides investment financing through direct lease or sale & lease back scheme by purchasing assets such as vehicle, machinery, heavy equipment, IT equipment, medical equipment, and others that are needed by corporate client from manufacturers/distributors/dealers and lease them to client.

  The advantage of the investment financing enables the client to accelerate the depreciation of fixed assets.

- **Working Capital Financing**
  Financing facilities are provided to the corporate client to meet short-term working capital needs and better manage cash flows.

- **Other Financing Business Activities based on OJK Approval**

Jaringan Kantor
Office Network

Kantor Pusat
Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220
Telp. : 021- 50851848
Faksimili: 021- 50851849
Alamat Surel : investor@mizuho-ls.co.id, cs@mizuho-ls.co.id
Situs Web : www.mizuho-ls.co.id

Head Office
Menara Astra 32nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta 10220
Telp. : 021- 50851848
Faximile : 021- 50851849
Email : investor@mizuho-ls.co.id, cs@mizuho-ls.co.id
Website : www.mizuho-ls.co.id

Kantor Cabang
Hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, Perseroan memiliki 31 Kantor Cabang.

Branch Offices
As of the issuance of this Annual Report, the Company has 31 Branch Offices.

No.	Lokasi Location	Alamat Address	Kontak Contact
1.	Bandung	Jl. Karawitan No. 27A RT 001 / RW 010 Kel. Turangga, Kec. Lengkong Bandung	Telp. : 022-87354632 Fax. : 022-87327705
2.	Bekasi	Ruko Grand Mall Jl Jenderal Sudirman Kav. A-16 Kel. Harapan Mulya, Kec Medan Satria Bekasi - Jawa Barat	Telp. : 021-38317173
3.	Bogor	Jl. Soleh Iskandar No. 89B Kel. Kadung Badak, Kec. Tanah Sareal Bogor - Jawa Barat	Telp. : 0251-8203275 Fax. : 0251-8203515
4.	Cikarang	Komp Ruko CBD Blok E1 Jl. Niaga Raya Kav. AA3, Jababeka Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan - Kab. Bekasi Bekasi - Jawa Barat	Telp. : 021-29082848
5.	Jakarta Barat	Jl. Raya Kedoya, No. 37, RT 008 / RW 007 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat	Telp. : 021-22282023
6.	Jakarta Pusat	Jl. Pintu Air 2 No. 24A, RT 004 / RW 004 Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat	Telp. : 021-3524243
7.	Jakarta Selatan	Komp. Rajawali Center No. B24 Jl. Raya Pasar Minggu, Gang Gaya, RT 007 / RW 001 Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan	Telp. : 021-38820075
8.	Jakarta Timur	Jl. Raden Inten II No. 53D RT 004 / RW 004, Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur	Telp. : 021-22322110
9.	Jakarta Utara	Ruko Grand Orchard Square Blok F9 Jl. Terusan Kelapa Hybrida Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara	Telp. : 021-38865175
10.	Kabupaten Lamongan	Komp. Ruko Permata Kav. No.27 Jl. Panglima Sudirman, Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan - Jawa Timur	Telp. : 0322-3104062
11	Kota Balikpapan	Komp. Balikpapan Permai Blok F-2 No. 21 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan - Kalimantan Timur	Telp. : 0542-5463009
12	Kota Bandar Lampung	Jl. Pangeran Antasari No. 162A Kel. Tanjung Baru, Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung - Lampung	Telp. : 0721-5606551
13.	Kota Banjarmasin	Jl. Pangeran Hidayatullah RT 017 / RW 001 Kel. Banua Anyar, Kec. Banjarmasin Timur Banjarmasin - Kalimantan Selatan	Telp. : 0511-6742011
14.	Kota Cimahi	Jl Kota Mas Raya No. 11 Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi - Jawa Barat	Telp. : 022-63190014

No.	Lokasi Location	Alamat Address	Kontak Contact
15.	Kota Denpasar	Jl. Gatot Subroto Barat No. 510D Ds. Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Denpasar - Bali	Telp. : 0361-2100822
16.	Kota Depok	Jl. Dewi Sartika No. 33B RT 001 / RW 001 Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok - Jawa Barat	Telp. : 021-38750030 Fax. : 021-38750022
17.	Kota Jambi	Jl. Hayam Wuruk No.47 C Kel. Talang Jauh, Kec. Jelutung Kota Jambi, Provinsi Jambi	Telp. : 0741-3620887 Fax. : 0741-3619493
18.	Kota Kediri	Jl. Urip Sumoharjo No. 167 Kel. Ngronggo, Kec. Kediri Kota Kediri - Jawa Tengah	Telp. : 0354-2809990 Fax. : 0354-2809700
19.	Kota Pontianak	Jl. A. Yani, Sentra Bisnis Komplek Ruko Mega Mall Blok H No. 9, Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Pontianak - Kalimantan Barat	Telp. : 0561-8242133
20.	Kota Samarinda	Jl. Abdul Wahab Syahrani, No. 28 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu Samarinda - Kalimantan Timur	Telp. : 0541-2526384
21.	Kota Semarang	Jl. Candi Prambanan Raya Ruko F Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan Kota Semarang - Jawa Tengah	Telp. : 024-35320092
22.	Kota Surakarta	Jl. Dewi Sartika No 23 RT 001 / RW 006 Kel. Danukusuman, Kec. Serengan Kota Surakarta - Jawa Tengah	Telp. : 0271-6008033
23.	Kota Yogyakarta	Jl. Raya Magelang No 43, Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta - DIY	Telp. : 0274-5059074
24.	Makassar	Jl. Gunung Latimojong Komp. Ruko Metro Square Blok C No. 38 Kel. Lariangbangi, Kec. Makassar Makassar - Sulawesi Selatan	Telp. : 0411-3634355 Fax. : 0411-335562
25.	Malang	Jl. Letjen S. Parman No. 56 - B3 Kel. Purwanto, Kec. Blimbing Malang - Jawa Timur	Telp. : 0341-479107
26.	Medan	Ruko Premiere 9 Jl. Sultan Iskandar Muda No. 83-83 A Kel. Babura, Kec. Medan Baru Medan - Sumatera Utara	Telp. : 061-4562555 Fax. : 061-4568550
27.	Palembang	Komp. Graha Dempo Mas Blok F5 Jl. Mayor H.M. Rasyad Nawawi No. 549, RT 008 / RW 002, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II Palembang - Sumatera Selatan	Telp. : 0711-359292 Fax. : 0711-366828
28.	Pekanbaru	Jl. Arifin Achmad No. 75 A-B, RT 001 / RW 015 Kel. Tengkareng Tengah, Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru - Riau	Telp. : 0761-8415689 Fax. : 0761-8417664
29.	Surabaya	Jl. Baratajaya XIX No. 54 B RT 009 / RW 005 Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng Surabaya - Jawa Timur	Telp. : 031-99453772
30.	Tangerang	Ruko Great Western Resort Blok AA2 No. 22 Jl. M.H Thamrin KM.7, RT 001 / RW 004 Kel. Penunggangan Utara, Kec. Pinang Tangerang - Banten	Telp. : 021-38951041
31.	Tangerang	Ruko Mendrisio 1 Blok E No. 09 Kel. Medang, Kec. Pagedangan Kab. Tangerang - Banten	Telp. : 021-59599028

Jejak Langkah Perseroan
Company Milestones

1993

Perseroan didirikan pertama kali sebagai PT Maxima Perdana Finance.

The Company was first established as PT Maxima Perdana Finance.

2003

Perseroan berubah nama menjadi PT Verena Oto Finance dengan fokus pada pembiayaan mobil.

The Company changed its name to PT Verena Oto Finance and focused on car financing.

2008

Perseroan mengadakan Penawaran Umum Perdana, dengan kepemilikan Bank Panin sebesar 42,87%.

The Company connducted an Initial Public Offering, with Bank Panin ownership of 42.87%.

2010

Perseroan berubah nama menjadi PT Verena Multi Finance Tbk.

The Company changed its name to PT Verena Multi Finance Tbk.

2011

- Perseroan menerbitkan Obligasi Verena Multi Finance I Tahun 2011 sejumlah Rp300 miliar dalam 3 (tiga) seri.
- Perseroan menerbitkan Medium Term Notes (“MTN”) sejumlah Rp200 miliar.

- The Company issued 2011 Verena Multi Finance Bond I Year 2011 the amount of Rp300 billion in 3 (three) series.
- The Company issued Rp200 billion Medium Term Notes (MTN).

2012

- Perseroan melunasi Obligasi Verena Multi Finance I tahun 2011 seri A sebesar Rp65 miliar.
- Perseroan mendapatkan izin untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I senilai Rp1 triliun.
- Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp300 miliar dalam 3 (tiga) seri.

- The Company paid off Verena Multi Finance Bond I Year 2011 series A amounting to Rp65 billion.
- The Company obtained a permit to issue Shelf Registration Bonds I worth Rp1 trillion.
- The Company issued Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds I Year 2012 amounting to Rp300 billion in 3 (three) series.

2013

- Perseroan melunasi Obligasi Verena Multi Finance I tahun 2011 seri B sebesar Rp135 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 seri A sebesar Rp50 miliar.
- Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 sebesar Rp153 miliar dalam 2 (dua) seri.

- The Company paid off Verena Multi Finance Bond I Year 2011 series B amounting to Rp135 billion and Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds 1 Year 2012 series A in the amount of Rp50 billion.
- The Company issued 2013 Verena Multi Finance Phase II Shelf Registration Bonds 1 Year 2013 amounting to Rp153 billion in 2 (two) series.

2014

- Perseroan melunasi Obligasi Verena Multi Finance I tahun 2011 seri C sebesar Rp300 miliar dan MTN Verena Multi Finance I tahun 2011 sebesar Rp200 miliar.
- Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 sebesar Rp135 miliar dalam 2 (dua) seri.

- The Company paid off Verena Multi Finance Bond I Year 2011 series C in the amount of Rp300 billion and MTN Verena Multi Finance I Year 2011 in the amount of Rp200 billion.
- The Company issued Verena Multi Finance Phase III Shelf Registration Bonds I Year 2014 in the amount of Rp135 billion in 2 (two) series.

2015

Perseroan melunasi Obligasi Verena Multi Finance I tahun 2011 seri B sebesar Rp135 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 seri B sebesar Rp227 miliar serta Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 seri A sebesar Rp3 miliar.

The Company paid off Verena Multi Finance Bond I Year 2011 series B in the amount of Rp135 billion and Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds I Year 2012 series B in the amount of Rp227 billion and Verena Multi Finance Phase III Shelf Registration Bonds I Year 2014 series A in the amount of Rp3 billion.

2016

Perseroan melunasi Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 seri C sebesar Rp23 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 seri A sebesar Rp113 miliar.

The Company paid off Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds I Year 2012 series C amounting to Rp23 billion and Verena Multi Finance Phase II Shelf Registration Bonds I Year 2013 series A amounting to Rp113 billion.

2017

- Perseroan melunasi Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 seri B sebesar Rp40 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 seri B sebesar Rp132 miliar.
- Perseroan memperoleh izin dan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dengan dana yang diperoleh untuk penambahan modal senilai Rp177,3 miliar.
- Penerbitan MTN II Verena Multi Finance Tahun 2017 sebesar Rp100 miliar.

- The Company paid off Verena Multi Finance Phase II Shelf Registration Bonds I Year 2013 series B in the amount of Rp40 billion and Verena Multi Finance Phase III Shelf Registration Bonds I Year 2014 series B in the amount of Rp132 billion.
- The Company obtained a license and carried out a Limited Public Offering I ("PUT I") to issue Pre-emptive Rights ("Rights") with funds obtained for additional capital of Rp177.3 billion.
- Issuance of MTN II Verena Multi Finance Year 2017 amounting to Rp100 billion.

2018

- Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melaksanakan aksi korporasi Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II ("PMHMETD II").
- Susunan pemegang saham Perseroan, pada tanggal 5 Oktober 2018 mengalami perubahan dimana IBJ Leasing Co.,Ltd. (sekarang Mizuho Leasing Co.,Ltd) membeli seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH dengan mekanisme pasar modal melalui Bursa Efek Indonesia.

- The Company obtained an effective statement from the Financial Services Authority ("OJK") to carry out corporate actions of Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II ("PMHMETD II").
- The composition of the Company's shareholders changed on October 5, 2018 in which IBJ Leasing Co.,Ltd. (now Mizuho Leasing Co.,Ltd) bought all shares owned by DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH through a capital market mechanism via the Indonesia Stock Exchange.

2019

- Perseroan melaksanakan PMHMETD II dengan dana yang diperoleh untuk penambahan modal senilai Rp434,3 miliar.
- Mizuho Leasing Co.,Ltd (d/h IBJ Leasing Co.,Ltd) menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebesar 67,44%.
- Penggabungan usaha dengan entitas asosiasi PT IBJ Verena Finance (IBJV), dimana Perseroan menjadi *surviving entity*.
- Perseroan melunasi MTN II Verena Multi Finance Tahun 2017 sebesar Rp100 miliar.

- The Company carried out PMHMETD II with total funding obtained for additional capital of Rp434.3 billion.
- Mizuho Leasing Co.,Ltd (formerly IBJ Leasing Co.,Ltd) became the Controlling Shareholder of the Company with an ownership of 67.44%.
- Merger with associate entity PT IBJ Verena Finance (IBJV), whereas the Company becomes the surviving entity.
- The Company paid off MTN II Verena Multi Finance Year 2017 in the amount of Rp100 billion.

2022

Perseroan berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk dengan alamat Kantor Pusat baru di Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220.

The Company changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk with a new Head Office address at Menara Astra 32nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta 10220.

Visi Misi, dan Nilai Perseroan
Vision, Mission and Values of The Company

Visi
Vision

“Menciptakan Dunia yang Berkelanjutan”

“Be a Creator of a Sustainable World”

Misi
Mission

“Menghubungkan Kebutuhan untuk Menciptakan Masa Depan”

“Connect Needs to Create the Future”

Nilai-Nilai Perseroan
Company’s Values

CHALLENGE **CREATE** **CHANGE**

COLLABORATE

Melalui kolaborasi, kami akan menghadapi tantangan, membuat perubahan, dan mempercepat penciptaan

Through collaboration, we will take on challenges, enact change and accelerate creation

Profil Direksi
The Board of Directors Profile



TAKESHI KURIOKA

Direktur Utama
President Director

Warga Negara Jepang, 57 tahun, berdomisili sementara di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2025, beliau diangkat sebagai Direktur Utama untuk periode 2025-2027. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Kobe University, Jepang, pada tahun 1991.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 57.

A Japanese citizen, 57 years old, currently residing temporarily in the Province of DKI Jakarta, Indonesia. Pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on December 23, 2025, he was appointed as President Director for the 2025–2027 term. He obtained a Bachelor's degree in Economics from Kobe University, Japan, in 1991.

The disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 57.

Riwayat Pekerjaan
Career History

Dec 2025 - to date	President Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Dec 2025 - to date	Chairman of Information Technology Steering Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Dec 2025 - to date	Chairman of Risk Management Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Apr 2025 – Dec 2025	Senior Deputy General Manager International Business Administration Dept. Mizuho Leasing Co., Ltd.
2024 – Mar 2025	Senior Officer Infrastructure Project Division Marubeni Corporation, Japan
2022 – 2024	President Aguas Nuevas S.A., Chile
2022 – 2024	General Manager Aguas de Marubeni SpA, Chile
2018 – 2022	President of The Board AGS - Administracao e Gestao de Sistemas de Salubridade S.A., Portugal
2016 – 2018	General Manager Environment Infrastructure Dept. Marubeni Corporation, Japan
2015 – 2016	Deputy General Manager Environment Infrastructure Dept. Marubeni Corporation, Japan
2011 – 2015	Executive Director (Board Member) Osmoflo Pty Ltd., Australia
2008 – 2011	General Manager Environment Infrastructure EPC Team Environment Infrastructure Dept. Marubeni Corporation, Japan
2007 – 2008	Manager Environment Infrastructure EPC Team Environment Infrastructure Dept. Marubeni Corporation, Japan
2002 – 2007	Project Manager Shuweihat Water Transmission Marubeni Corporation, Abu Dhabi Office, U.A.E.
1991 – 2002	Industrial Plant Dept. Infrastructure Projects Dept. Marubeni Corporation, Japan



YUDI GUSTIAWAN

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, berdomisili di Provinsi Banten, Indonesia. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2025, beliau diangkat kembali sebagai Direktur untuk periode 2025-2027. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi INABA, Bandung, Indonesia, pada tahun 1996 dan memperoleh gelar Sarjana Statistik dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, pada tahun 1999, serta memperoleh gelar Magister Management dari Bina Nusantara Business School, Jakarta, Indonesia pada tahun 2015. Beliau merupakan Direktur yang membawahi Unit Bisnis Ritel.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 57.

An Indonesian citizen, 52 years old, domiciled in the Province of Banten, Indonesia. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 23 June 2025, he was reappointed as Director for the 2025-2027 period. He obtained a Bachelor of Accounting degree from the INABA College of Economics, Bandung, Indonesia, in 1996; obtained a Bachelor of Statistics from Padjadjaran University, Bandung, Indonesia, in 1999; and obtained a Master degree in Management from Bina Nusantara Business School, Jakarta, Indonesia in 2015. He is the Director in charge of the Retail Business Unit.

The disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 57.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2022 – to date	Member of Information Technology Steering Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2021 – to date	Member of Risk Management Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2019 – to date	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2018 – 2019	Vice President Director PT Jtrust Olympindo Multifinance
2016 – 2018	President Director PT Olympindo Multifinance (now PT Jtrust Olympindo Multifinance)
2015 – 2016	Operations Director PT Radana Bhaskara Finance Tbk
2012 – 2014	Director of Strategic Support PT HD Finance Tbk (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2011 – 2012	Deputy Director of Strategic Support PT HD Finance Tbk (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2009 – 2011	Head of Business Support Division PT HD Finance Tbk (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2005 – 2009	Head of Operation Division PT HD Finance (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2002 – 2005	Accounting Manager PT Arta Boga Cemerlang
2001 – 2002	Regional Internal Auditor for Java Area II PT. Alfa Retailindo Tbk
1999 – 2001	PPIC (Production Planning & Inventory Control) PT. Ateja Tritunggal Corporation Padalarang



ANDI HARJONO

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2025, beliau diangkat kembali sebagai Direktur untuk periode 2025-2027. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, pada tahun 1992 dan memperoleh gelar Master of International Management dari Thunderbird School of Global Management, Arizona, Amerika Serikat pada tahun 1994. Beliau merupakan Direktur yang membawahi fungsi *Digital Transformation Promotion, Infrastructure Control and Development* serta Sumber Daya Manusia.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 57.

An Indonesian citizen, 56 years old, domiciled in the Province of DKI Jakarta, Indonesia. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 23 June 2025, he was reappointed as Director for the 2025-2027 period. Obtained a Bachelor of Industrial Engineering degree from Trisakti University, Jakarta, Indonesia, in 1992 and a Master of International Management degree from Thunderbird School of Global Management, Arizona, United States in 1994. He is the Director in charge of Digital Transformation Promotion, Infrastructure Control & Development and Human Resources.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 57.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2022 – to date	Vice Chairman of Information Technology Steering Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2021 – to date	Member of Risk Management Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2019 – to date	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2016 – 2019	President Director PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2007 – 2016	Director PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2002 – 2007	Vice President PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari Flour Mills
2001 – 2002	Financial & Operational Advisor for Sekar Group PT Tri Panji Anugrah
1999 – 2001	Manager PT Tunas Sepadan Investama
1998 – 1999	Manager Carbonless Paper Export Marketing Division PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills
1995 – 1998	Finance & Accounting Manager PT Bentala Mahaya
1993	Finance Officer PT Astra Graphia Tbk



KENJIRO SAWADA

Direktur
Director

Warga Negara Jepang, 47 tahun, berdomisili sementara di di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2025, beliau diangkat sebagai Direktur untuk periode 2025-2027. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Kwansei Gakuin University, Hyogo, Jepang, pada tahun 2001. Beliau merupakan Direktur yang membawahi fungsi Akunting, *Tax* dan *Finance*.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 57.

Japanese citizen, 47 years old, domiciled temporarily in the Province of DKI Jakarta, Indonesia. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 23 June 2025, he was appointed as Director for the 2025-2027 period. He obtained a Bachelor of Economics degree from Kwansei Gakuin University, Hyogo, Japan in 2001. He is the Director in charge of the Accounting, Tax and Finance.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 57.

Riwayat Pekerjaan
Career History

Jun 2025 – to date	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Jun 2025 – to date	Member Information Technology Steering Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Jun 2025 – to date	Member Risk Management Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Jun 2023 – June 2025	Risk Management Division (Risk Management Expert) PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2021 – May 2023	International Business Administration Department (Deputy General Manager) Mizuho Leasing Co., Ltd.
2019 – 2021	Global Business Division (Senior Vice President) Orix Corporation
2013 – 2019	Executive Director Orix Asia Capital (HK)
2012 – 2013	Alternative Investment & Development Division (Vice President) Orix Corporation
2008 – 2012	Alternative Investment & Development Division (Manager) Orix Corporation
2005 – 2008	Alternative Investment & Development Division (Associate) Orix Corporation
2002 – 2005	Kagoshima Branch Orix Corporation Associate

FRANSISCA YULIANA GUNAWAN

Direktur
Director



Warga Negara Indonesia, 43 tahun, berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2025, beliau diangkat sebagai Direktur untuk periode 2025-2027. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen Keuangan dari Universitas Tarumanagara, Indonesia, pada tahun 2006. Beliau merupakan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Perencanaan Strategis Korporasi.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 57.

An Indonesian citizen, 43 years old, domiciled in the Province of DKI Jakarta, Indonesia. In accordance with the resolution of the Extraordinary GMS on 23 December 2025, she was appointed as Director for the 2025-2027 period. She obtained a Bachelor of Economics Financial Management degree from Tarumanagara University, Indonesia, in 2006. She is the Director in charge of Compliance, Risk Management and Corporate Strategic Planning function.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 57.

Riwayat Pekerjaan
Career History

Dec 2025 – to date	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Dec 2025 – to date	Member of Information Technology Steering Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Dec 2025 – to date	Member of Risk Management Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Dec 2021 – to date	Corporate Secretary PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Nov 2016 – to date	Investor Relation PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Jul 2024 – Dec 2025	Deputy Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Dec 2021 – Jun 2024	Corporate Strategic Planning Division Head PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
Feb 2021 – Nov 2021	Corporate Strategic Planning Department Head PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2013 – 2015	Section Head of Corporate Secretary PT Bank Victoria International Tbk
2011 – 2012	Corporate Finance PT Victoria Securities Indonesia
2007 – 2011	Corporate Finance Assistant Manager PT Kresna Graha Sekurindo Tbk



RYUJI TARUMI

Direktur
Director

Warga Negara Jepang, 47 tahun, berdomisili sementara di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2025, beliau diangkat sebagai Direktur untuk periode 2025-2027. Memperoleh gelar Bachelor of Engineering major in Industrial Engineering dari Kansai University, Jepang, pada tahun 2003. Beliau merupakan Direktur yang membawahi Unit Bisnis Korporasi.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 57.

A Japanese citizen, 47 years old, currently residing temporarily in the Province of DKI Jakarta, Indonesia. In accordance with the resolution of the Extraordinary GMS on 23 December 2025, he was appointed as Director for the 2025-2027 period. He obtained a Bachelor of Engineering major in Industrial Engineering from Kansai University, Japan in 2003. He is the Director in charge of the Corporate Business Unit.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 57.

Riwayat Pekerjaan
Career History

Dec 2025 – to date	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Dec 2025 – to date	Member of Information Technology Steering Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Dec 2025 – to date	Member of Risk Management Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Nov 2024 – Dec 2025	Information Technology Business Process Expert Retail Business Unit (RBU), Corporate Business Unit (CBU), and Information Technology (IT) PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2023 – Oct 2024	Deputy General Manager with Specialization in IT Application for Business International Business Administration Department Mizuho Leasing Co., Ltd.
2022 – 2023	Deputy General Manager International Business Promotion Department Mizuho Leasing Co., Ltd.
2020 – 2022	Senior Manager International Business Promotion Department Mizuho Leasing Co., Ltd.
2016 – 2020	Assistant Vice President & Team Head Business Development Division Japanese Marketing Team & IT Project Team PNB - Mizuho Leasing and Finance Corporation
2016	Manager International Business Department Mizuho Leasing Co., Ltd.
2015 – 2016	Senior Manager Business Development Division Mizuho Leasing (China) Ltd.
2015	Manager International Business Department Mizuho Leasing Co., Ltd.
2014 – 2015	Manager Takamatsu Branch Mizuho Leasing Co.,Ltd
2009 – 2014	Assistant Manager Takamatsu Branch Mizuho Leasing Co., Ltd
2007 – 2009	Assistant Manager Information Equipment Sales Department Mizuho Leasing Co., Ltd.
2006	Associate Information Equipment Sales Department Mizuho Leasing Co., Ltd
2003 – 2006	Associate IT Service Division Mitsubishi Research Institute DCS Co.,Ltd.


MIZUHO

Profil Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Profile



YASUO IMAIZUMI

Komisaris Utama
President Commissioner

Warga Negara Jepang, 60 tahun, berdomisili di Tokyo, Jepang. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2025, beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Utama untuk periode 2025-2027, Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Sophia University, pada tahun 1990 serta memperoleh gelar Magister of Law dari University of Pennsylvania Carey Law School pada tahun 1997.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 57.

A Japanese citizen, 60 years old, domiciled in Tokyo, Japan. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 23 June 2025, he was reappointed as President Commissioner for the 2025-2027 period. Obtained a Bachelor of Laws degree from Sophia University in 1990 and obtained a Masters of Laws degree from the University of Pennsylvania Carey Law School in 1997.

The disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 57.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2024 (March) – to date	President Commissioner PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2024 (March) – to date	Member of the Nomination and Remuneration Commitee PT Mizuho LeasingIndonesia Tbk
2022 – to date	Director of Overseas Subsidiaries International Business Administration Department Mizuho Leasing Co.,Ltd
2019 – to date	Relationship Manager International Business Development Department Mizuho Leasing Co.,Ltd
2018 – to date	Senior Deputy General Manager in International Business Administration Department Mizuho Leasing Co., Ltd
2013 – 2018	Deputy General Manager Legal Department Mizuho Bank Co., Ltd
2012 – 2013	Deputy General Manager Legal Department Mizuho Corporate Bank, Co., Ltd.
2010 - 2012	Deputy General Manager Americas Corporate Finance Div.#2 Mizuho Corporate Bank, Co., Ltd.
2008 – 2010	Senior Vice President Credit Engineering Department Mizuho Corporate Bank, Co., Ltd.
2008	Senior Vice President Corporate Banking Department. No.14 Mizuho Corporate Bank, Co., Ltd.
2002 - 2008	Senior Vice President Corporate Banking Department. No.2 Mizuho Corporate Bank, Co., Ltd.
1990 - 2002	Senior Vice President at Legal Department & Vice President at International Business Department Industrial Bank of Japan Co., Ltd.



BHINDAWATI GUNAWAN

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, 64 tahun, berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2025, beliau diangkat kembali sebagai Komisaris untuk periode 2025-2027. Beliau merupakan lulusan jurusan Ekonomi Bisnis dari University of San Fransisco pada tahun 1983.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 57.

An Indonesian citizen, 64 years old, domiciled in the Province of DKI Jakarta, Indonesia. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 23 June 2025, she was reappointed as Commissioner for the 2025-2027 period. She is a graduate of Business Economics from the University of San Fransisco in 1983.

The disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 57.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2024 – to date	Commissioner PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2024 – to date	President Commissioner PT Clipan Finance Indonesia Tbk
2016 – to date	Executive Management/ Bancassurance Strategic Advisor PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
2010 – 2024	Vice President Director PT Panin Financial Tbk
2008 – 2016	Executive Vice President PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
1992 – 2008	Director PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
1986 – 1992	Deputy General Manager PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
1985 – 1986	Assistant Account Officer Bank of America NT & SA
1984 – 1985	Management Trainee Bank of America NT & SA



DANI HAMDANI

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, berdomisili di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2025, beliau diangkat sebagai Komisaris Independen untuk periode 2025-2027. Memperoleh gelar Sarjana Kimia dari Institut Teknologi Bandung dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM pada tahun 2018.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 57.

An Indonesian citizen, 57 years old, domiciled in the Province of West Java, Indonesia. In accordance with the resolution of the Extraordinary GMS on 23 December 2025, he was appointed as Independent Commissioner for the 2025-2027 period. He obtained his Bachelor of Chemistry from Bandung Institute of Technology in 1993 and obtained his Master of Management from PPM School of Management in 1989.

The disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 57.

Riwayat Pekerjaan
Career History

Dec 2025 – to date	Independent Commissioner PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Dec 2025 – to date	Chairman of the Audit Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Dec 2025 – to date	Chairman of the Nomination and Remuneration Commitee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Dec 2025 – to date	Chairman of the Risk Monitoring Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Jun 2017 – to date	Member of the Nomination and Remuneration Commitee PT Asuransi Jiwa Nasional
2023 – 2025	Director*) Nusantara Finance Cakrawala
2018 – 2023	Independent Audit Committee PT Asuransi Samsung Tugu
2016 – 2017	Editor-in-chief GATRA News
2013 – 2016	Marketing Director GATRA Magazine

*) Beliau mengundurkan diri pada Desember 2024 dan pengunduran diri diterima secara resmi pada Desember 2025.
He resigned in December 2024 and his resignation was formally accepted in December 2025.



Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Changes in the Composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan yang diadakan pada tanggal 23 Juni 2025, RUPS Tahunan menyetujui untuk mengangkat Kenjiro Sawada selaku Direktur Perseroan menggantikan Shunsuke Kojima selaku Direktur Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir sejak ditutupnya Rapat. RUPS Tahunan juga menyetujui untuk mengangkat kembali Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama Perseroan, Andi Harjono selaku Direktur Perseroan dan Yudi Gustiawan selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Selanjutnya, berdasarkan RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2025, RUPS Luar Biasa menyetujui untuk menerima pengunduran diri Konosuke Mizuta dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan; Menyetujui melakukan pergantian Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat; Serta mengangkat:

- Dani Hamdani selaku Komisaris Independen Perseroan
- Takeshi Kurioka selaku Direktur Utama Perseroan*
- Fransisca Yuliana Gunawan selaku Direktur Perseroan
- Ryuji Tarumi selaku Direktur Perseroan

terhitung sejak ditutupnya Rapat.

*) Bahwa pengangkatan Takeshi Kurioka sebagai Direktur Utama berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang, yaitu pada tanggal 5 Maret 2026.

Hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Based on the Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") held on 23 June 2025, the Annual GMS approved the appointment of Kenjiro Sawada as Director of the Company, replacing Shunsuke Kojima, whose term of office had ended upon the closing of the Meeting. The Annual GMS also approved the reappointment of Konosuke Mizuta as President Director of the Company, Andi Harjono as Director of the Company and Yudi Gustiawan as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting.

Furthermore, based on the Extraordinary GMS held on 23 December 2025, the Extraordinary GMS approved the resignation of Konosuke Mizuta from his position as President Director of the Company; Approved the change in the Independent Commissioner of the Company effective as of the closing of the Meeting; And appoint:

- Dani Hamdani as Independent Commissioner of the Company
- Takeshi Kurioka as President Director of the Company*
- Fransisca Yuliana Gunawan as Director of the Company
- Ryuji Tarumi as Director of the Company

effective as of the closing of the Meeting.

*) That the appointment of Takeshi Kurioka as President Director is effective from the date of issuance of the limited stay permit from the authorized institution, namely on March 5, 2026.

As of the issuance date of this Annual Report, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is as follows:

Komisaris Utama / President Commissioner	:	Yasuo Imaizumi
Komisaris / Commissioner	:	Bhindawati Gunawan
Komisaris Independen / Independent Commissioner	:	Dani Hamdani
Direktur Utama / President Director	:	Takeshi Kurioka
Direktur / Director	:	Andi Harjono
Direktur / Director	:	Kenjiro Sawada
Direktur / Director	:	Yudi Gustiawan
Direktur / Director	:	Fransisca Yuliana Gunawan
Direktur / Director	:	Ryuji Tarumi

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
Affiliation Relationship of Members of The Board of Commissioners and The Board of Directors

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with								Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris / Board of Commissioners																
Yasuo Imaizumi*		√		√	√		√			√		√		√		√
Bhindawati Gunawan**		√		√		√		√		√		√	√			√
Dani Hamdani		√		√		√		√		√		√		√		√
Mohammad Syahrial***		√		√		√		√		√		√		√		√
Direksi / Board of Directors																
Takeshi Kurioka		√		√		√		√		√		√		√		√
Andi Harjono		√		√		√		√		√		√		√		√
Yudi Gustiawan		√		√		√		√		√		√		√		√
Kenjiro Sawada		√		√		√		√		√		√		√		√
Fransisca Yuliana Gunawan		√		√		√		√		√		√		√		√
Ryuji Tarumi		√		√		√		√		√		√		√		√
Konosuke Mizuta****		√		√		√		√		√		√		√		√
Shunsuke Kojima*****		√		√		√		√		√		√		√		√

*) Beliau memiliki hubungan afiliasi yang bersifat keuangan dengan Mizuho Leasing Co., Ltd selaku Pemegang Saham Pengendali dan salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan.
Saat ini Beliau menjabat sebagai *Senior Deputy General Manager in International Business Administration Department, Relationship Manager International Business Development Department, Director of Overseas Subsidiaries International Business Administration Department* di Mizuho Leasing Co., Ltd.
He has a financial affiliation with Mizuho Leasing Co., Ltd as the Controlling Shareholder and one of the Main Shareholders of the Company.
He currently serves as Senior Deputy General Manager in International Business Administration Department, Relationship Manager International Business Development Department, Director of Overseas Subsidiaries International Business Administration Department at Mizuho Leasing Co., Ltd.

**) Beliau memiliki hubungan afiliasi yaitu hubungan keluarga dengan Penerima Manfaat Akhir (UBO) PT Bank Pan Indonesia Tbk yang merupakan salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan.
She has affiliation which is family relation with the Ultimate Beneficiary (UBO) of PT Bank Pan Indonesia Tbk which is one of the Company's Main Shareholders.

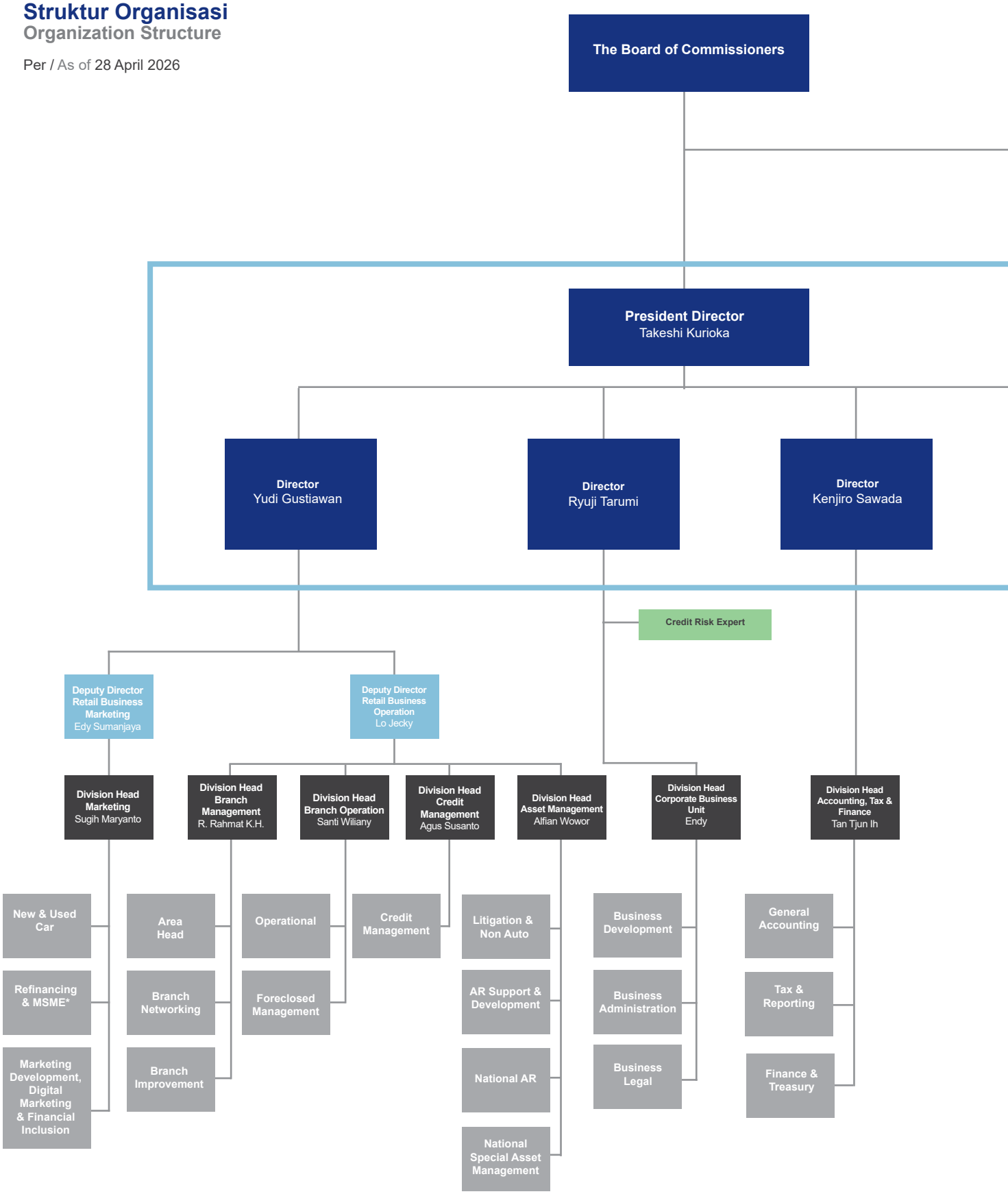
***) Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2025, RUPS menyetujui pemberhentian Mohammad Syahrial selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Perseroan.
Based on the Extraordinary GMS held on 23 December 2025, the GMS approved the dismissal of Mohammad Syahrial from his position as Independent Commissioner, effective as of the closing of the Company's Extraordinary GMS.

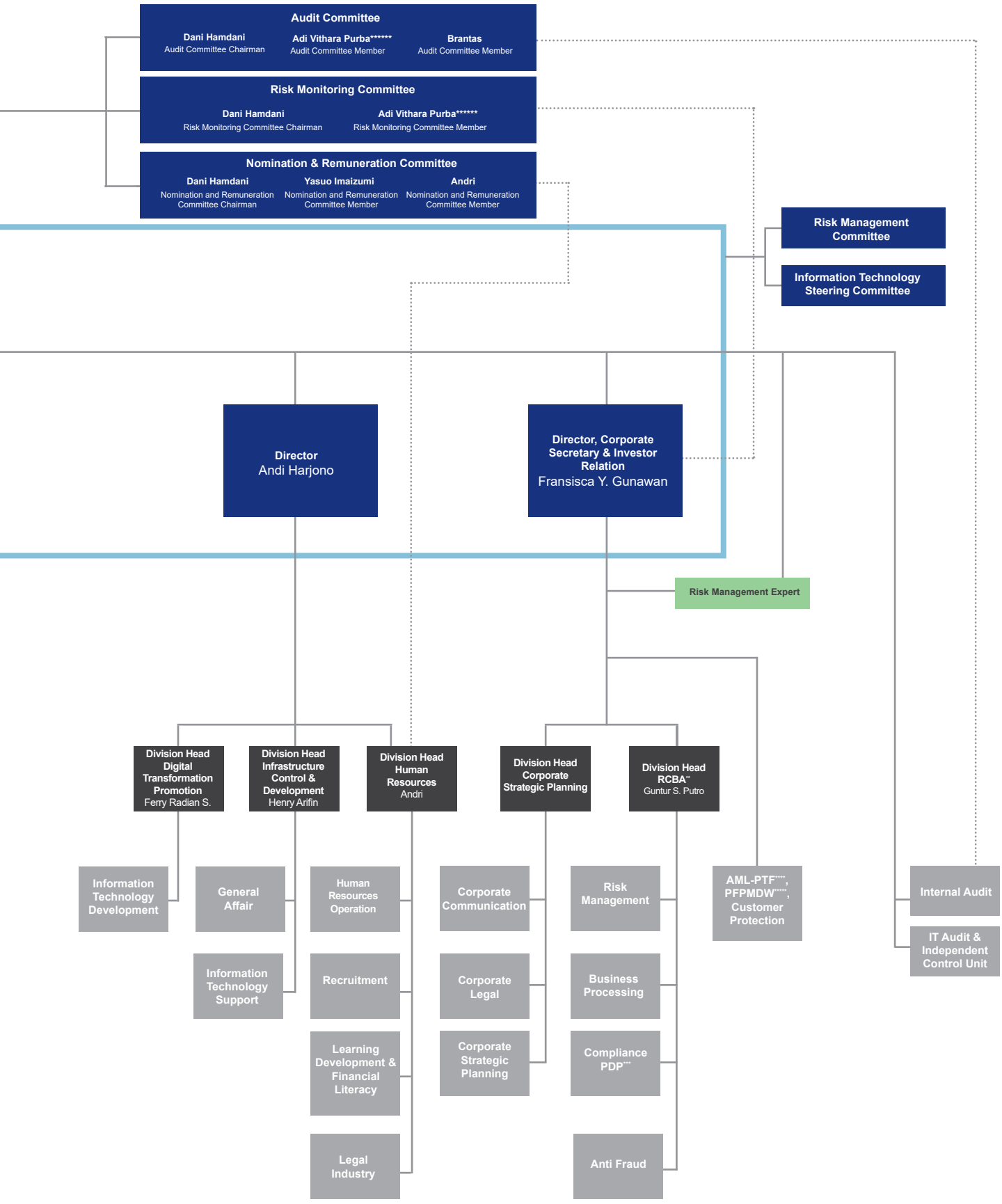
****) Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2025, RUPS menyetujui pengunduran diri Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Perseroan.
Based on the Extraordinary GMS held on 23 December 2025, the GMS approved the resignation of Konosuke Mizuta from his position as President Director, effective as of the closing of the Company's Extraordinary GMS.

*****) Masa jabatan selaku Direktur Perseroan telah berakhir pada tanggal 23 Juni 2025.
The term of office as Director of the Company ended on 23 June 2025.

Struktur Organisasi
Organization Structure

Per / As of 28 April 2026



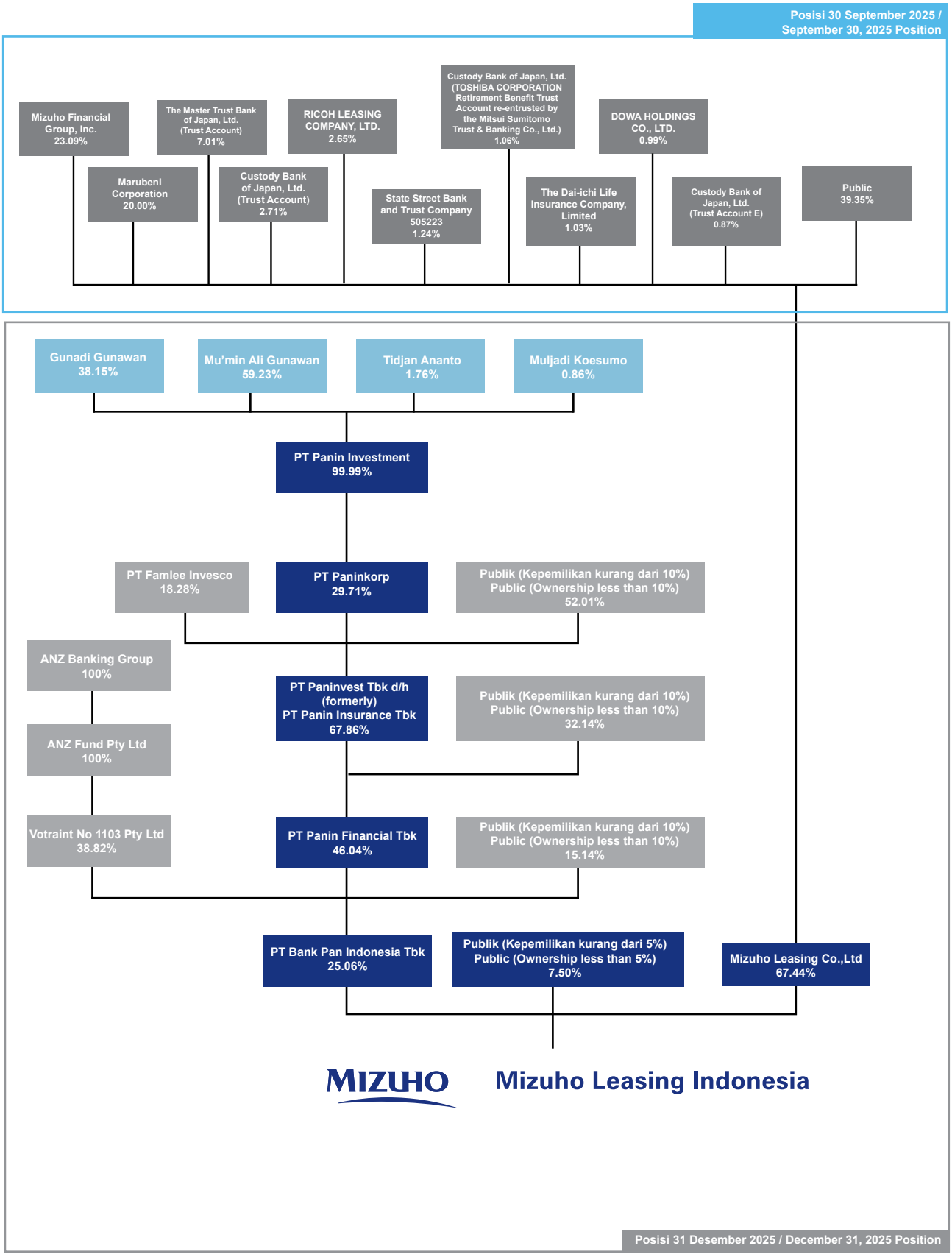


*)**MSME** : *Micro, Small and Medium Enterprises*
)RCBA** : *Risk Management, Compliance, Business Process & Anti Fraud*
***)**PDP** : *Personal Data Protection*
****)**AML-PTF** : *Anti Money Laundering – Prevention of Terrorism Financing*
*****)**PFPMDW** : *Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons*

******) Anggota Komite Audit yang efektif menjabat sejak tanggal 19 Januari 2026 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.001/BOC-MLI/I/26 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Audit.
Member of the Audit Committee who have effectively served since January 19, 2026 based on the Resolution of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.001/BOC-MLI/I/26 concerning the Determination of the Composition of the Members of the Audit Committee.



Struktur Kepemilikan Saham
Shareholding Structure



Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Public Accountant Services and Public Accounting Firms

Periode Period	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Alamat Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm Address	Jasa yang Diberikan Services Provided	Biaya Jasa Service Fee
2025	Liana Ramon Xenia & Rekan Bagian dari Deloitte Southeast Asia Limited ("DSEAL") Liana Ramon Xenia & Partners Member of Deloitte Southeast Asia Limited ("DSEAL")	Bayu M. Dayat, CPA	The Plaza Office Tower, Lantai 32, Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat 10350 - Indonesia Telp. : +6221-50818000 Fax. : +6221-29928300	Audit Laporan Keuangan Posisi Desember 2025 Audit Financial Report Position December 2025	Rp1,898,100,000
				Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPKK) Report on Implementing the Prudence Principle	Rp61,050,000

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Institutions and Professions

Notaris / Notary
Fathiah Helmi, SH
Graha Irama Lt.6 – Blok C
Jl. H.R Rasuna Said Kav 1–2 Blok X–1
Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
Telp. : +6221-52907304

Biro Administrasi Efek / Share Registrar
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47–48.
Jakarta Selatan 12930 - Indonesia
Telp. : +6221-2525666
Fax. : +6221-2525028
Email : rsrbae@registra.co.id
Website : www.registra.co.id

Kustodian / Custodian
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
Telp. : +62 21 515 2855
Fax. : +62 21 5299 1199
Website : www.ksei.co.id

Informasi Entitas Anak
Subsidiary Information

Per 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak.

As of December 31, 2025, the Company does not have any Subsidiaries.

Informasi Kepemilikan Saham
Share Ownership Information

Komposisi Pemegang Saham Dengan Kepemilikan >5%

Komposisi pemegang saham dengan kepemilikan >5% per 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Shareholders Composition with Ownership >5%

Shareholders composition with ownership >5% as of January 1, 2025 to December 31, 2025 is as follows:

Nama Pemegang Saham Shareholders Name	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage
Mizuho Leasing Co., Ltd	3,835,346,804	67.44%
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1,425,455,604	25.06%
Total	**5,260,802,408**	**92.50%**

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Per 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, tidak ada kepemilikan saham Perseroan oleh Dewan Komisaris maupun Direksi yang menjabat pada saat Laporan Tahunan ini diterbitkan.

Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership

As of January 1, 2025 to December 31, 2025, there was no ownership of the Company's shares by the Board of Commissioners and Board of Directors who served at the time this Annual Report was published.

Komposisi Pemegang Saham Dengan Kepemilikan <5%

Komposisi pemegang saham dengan kepemilikan <5% per 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Shareholders Composition with Ownership <5%

Shareholders composition with ownership of <5% as of January 1, 2025 to December 31, 2025 is as follows:

Nama Pemegang Saham Shareholders Name	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage
Masyarakat Public	426,551,589	7.50%

Daftar Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi

Shareholders List Based on Classification

Pemegang Saham Lokal Local Shareholders	Jumlah Pemegang Efek Number of Securities Holders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage
Individu Individual	1,501	108,741,359	1.91%
Institusi Institution	8	1,732,615,144	30.46%
Sub Total	**1,509**	**1,841,356,503**	**32.38%**
Pemegang Saham Asing **Foreign Shareholders**	**Jumlah Pemegang Efek** **Number of Securities Holders**	**Jumlah Saham** **Number of Shares**	**Persentase** **Percentage**
Individu Individual	1	23,000	0.00%
Institusi Institution	5	3,845,974,494	67.62%
Sub Total	**6**	**3,845,997,494**	**67.62%**
TOTAL	**1,515**	**5,687,353,997**	**100.00%**

Kronologis Pencatatan Saham
Chronology of Shares Listing

Perseroan melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 25 Juni 2008 sejumlah 1.002.000.000 lembar saham melalui Penawaran Umum Perdana atas 460.000.000 lembar saham Perseroan kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp100,- per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp100,-. Penawaran Umum Perdana tersebut juga disertai dengan penerbitan 46.000.000 Waran Seri I. Berikut ini adalah kronologis pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hingga akhir tahun buku.

The Company listed its initial shares on the Indonesia Stock Exchange on June 25, 2008 totaling 1,002,000,000 shares through an Initial Public Offering of 460,000,000 shares of the Company to the public with a nominal value of Rp100.- per share and an offer price of Rp100.-. The Initial Public Offering was also accompanied by the issuance of 46,000,000 Series I Warrants. The following is a chronology of the listing of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange until the end of the fiscal year.

Tanggal Date	Aksi Korporasi Corporate Actions	Nominal Nominal	Harga Pelaksanaan Exercised Price	Saham Tambahan Additional Shares	Jumlah Saham Number of Shares
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Before Initial Public Offering	Rp100	-	Rp100	542,000,000
25 Jun 2008	Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering	Rp100	Rp100	460,000,000	1,002,000,000
4 Sep 2009	Konversi Waran Warrant Conversion	Rp100	Rp110	20	1,002,000,020
24 Jun 2010	Konversi Waran Warrant Conversion	Rp100	Rp110	332	1,002,000,352
18 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	18,590	1,002,018,942
19 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	101,958	1,002,120,900
22 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	872,367	1,002,993,267
23 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	4,702,146	1,007,695,413
24 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	213,918,728	1,221,614,141
26 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	467,477,166	1,689,091,307
29 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	896,069,601	2,585,160,908
15 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	283	2,585,161,191
16 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	2,491	2,585,163,682
18 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	2,522,210,381	5,107,374,063
21 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	20	5,107,374,083
24 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	579,979,914	5,687,353,997

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Listings

Per 31 Desember 2025, seluruh obligasi dan *medium term notes* yang pernah diterbitkan dan dicatatkan oleh Perseroan telah lunas sesuai jatuh temponya. Selanjutnya, selama tahun 2025 Perseroan tidak menerbitkan dan mencatatkan efek lainnya sehingga tidak ada efek lainnya yang belum jatuh tempo dan belum lunas.

As of December 31, 2025, all bonds and medium-term notes previously issued and listed by the Company have been fully paid at their maturity dates. Furthermore, during 2025, the Company did not issue or list any other securities, thus there is no remaining outstanding securities that has not yet been fully paid.



Sumber Daya Manusia
Human Resources

Kunci sukses Perseroan untuk terus bertumbuh dan menciptakan nilai jangka panjang secara maksimal dan optimal terletak pada kemampuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta-talenta yang berkompeten yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Perseroan.

The key factors toward the Company's success in maintaining its growth and creating maximum and optimum long-term values were based on the ability to attract, develop, and retain competent personnels with high loyalty to the Company.

Karena itu, Perseroan menyadari rekrutmen, pengembangan Sumber Daya Manusia ("SDM") dan kesempatan berkarir sangatlah penting dan memiliki peran penting dengan pertumbuhan dan kesuksesan Perseroan secara berkesinambungan.

Therefore, the Company realized that recruitment, Human Resource ("HR") development and career opportunities are essential and played a major role to the Company's sustainable development and success.

Untuk itu, penerapan budaya perusahaan dalam bentuk penanaman nilai-nilai dan prinsip serta pelaksanaannya akan membawa manfaat tidak hanya terhadap Perseroan tetapi juga bagi individu karyawan. Perseroan secara terencana dan berkesinambungan melakukan pengembangan SDM dan potensi-potensinya, yaitu:

For such objectives, the implementation of corporate culture by instilling values and principles, would bring benefits not only for the Company but also to them as individuals. The Company had planned and continuously developed HR and their potentials, namely:

Perencanaan SDM
- Rekrutmen
- Pelatihan dan pengembangan potensi karyawan
- Kaderisasi dan *talent pool management*
- Penilaian pekerjaan, penghargaan, dan sanksi

HR Planning
- Recruitment
- Training and developing employee potential
- Regeneration and talent pool management
- Job assessments, rewarding and sanctioning

Komposisi dan Jenjang Karyawan
Pada 2025, jumlah karyawan Perseroan berkurang dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 751 karyawan dari 767 karyawan. Detail dari struktur karyawan pada 2023, 2024 dan 2025 tersaji dalam tabel di bawah ini:

Employee Composition and Level
In 2025, the Company's total employees decreased compared to the previous year, reaching 751 employees from 767 employees. The details of the employee structure in 2023, 2024 and 2025 are presented in the table below:

Komposisi Menurut Jabatan
Composition Based on Positions

Jabatan	2023 Jumlah Total	2023 Persentase Percentage	2024 Jumlah Total	2024 Persentase Percentage	2025 Jumlah Total	2025 Persentase Percentage	Position
Deputy Director	2	0.28%	3	0.39%	2	0.27%	Deputy Director
General Manager	11	1.55%	10	1.30%	10	1.33%	General Manager
Manager	58	8.16%	61	7.95%	57	7.59%	Manager
Supervisor	166	23.35%	179	23.34%	185	24.63%	Supervisor
Officer	431	60.62%	467	60.89%	451	60.05%	Officer
Staff	43	6.04%	47	6.13%	46	6.13%	Staff
Jumlah	**711**	**100.00%**	**767**	**100.00%**	**751**	**100.00%**	**Total**

Komposisi Menurut Jenjang Pendidikan
Composition Based on Academic Backgrounds

Pendidikan	2023 Jumlah Total	2023 Persentase Percentage	2024 Jumlah Total	2024 Persentase Percentage	2025 Jumlah Total	2025 Persentase Percentage	Academic Backgrounds
S2	5	0.70%	7	0.91%	7	0.93%	Master
S1	453	63.72%	494	64.41%	473	62.98%	Bachelor
DIPLOMA	93	13.08%	98	12.78%	92	12.25%	Diploma
SMU/SMK/SMEA/STM	158	22.22%	163	21.25%	175	23.31%	High School/ Vocational School/ Economic Vocational School/ Technical High School
SD & SMP	2	0.28%	5	0.65%	4	0.53%	Elementary School Junior & High School
Jumlah	**711**	**100.00%**	**767**	**100.00%**	**751**	**100.00%**	**Total**

Komposisi Menurut Jenjang Usia
Composition Based on Ages

Usia	2023 Jumlah Total	2023 Persentase Percentage	2024 Jumlah Total	2024 Persentase Percentage	2025 Jumlah Total	2025 Persentase Percentage	Ages
18 - 25	70	9.85%	51	6.65%	38	5.06%	18 - 25
26 - 35	294	41.35%	311	40.55%	311	41.41%	26 - 35
36 - 45	269	37.83%	284	37.03%	261	34.76%	36 - 45
> 45	78	10.97%	121	15.77%	141	18.77%	> 45
Jumlah	**711**	**100.00%**	**767**	**100.00%**	**751**	**100.00%**	**Total**

Komposisi Menurut Status Kepegawaian
Composition Based on Employment Status

Status Kepegawaian	2023 Jumlah Total	2023 Persentase Percentage	2024 Jumlah Total	2024 Persentase Percentage	2025 Jumlah Total	2025 Persentase Percentage	Employment Status
Pegawai Tetap	563	79.18%	631	82.27%	636	84.69%	Permanent Employee
Pegawai Kontrak	148	20.82%	136	17.73%	115	15.31%	Contract Employee
Jumlah	**711**	**100.00%**	**767**	**100.00%**	**751**	**100.00%**	**Total**

Komposisi Menurut Jenis Kelamin
Composition Base on Gender

Jenis Kelamin	2023 Jumlah Total	2023 Persentase Percentage	2024 Jumlah Total	2024 Persentase Percentage	2025 Jumlah Total	2025 Persentase Percentage	Gender
Laki-laki	565	79.47%	614	80.05%	595	79.23%	Male
Perempuan	146	20.53%	153	19.95%	156	20.77%	Female
Jumlah	**711**	**100.00%**	**767**	**100.00%**	**751**	**100.00%**	**Total**

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Perseroan senantiasa mengembangkan materi dan sarana pelatihan untuk semua pekerja. Beberapa metode yang digunakan dalam penyampaian materi-materi pelatihan, yaitu melalui *video learning*, *video conference,* dan *e-learning*. Pengembangan SDM tidak hanya dilakukan melalui pelatihan tatap muka, baik secara langsung maupun virtual, namun juga melalui on *job training, tutoring, rotasi, coaching, counseling, dan mentoring*. Materi-materi yang disiapkan tidak hanya berorientasi pada industri pembiayaan saja, namun juga materi *soft skills* seperti kepemimpinan, pengembangan kepribadian, dan komunikasi. Media *e-learning* menjadi salah satu solusi dan strategi yang ditempuh untuk pembelajaran yang berkelanjutan.

Perseroan senantiasa menyelenggarakan kegiatan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing ("TKA") kepada Tenaga Kerja Lokal lainnya guna proses didalam Alih Pengetahuan (*Transfer Knowledge*).

Berikut adalah program pelatihan yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2025:

Employee Development Trainings

The Company continues to develop training materials and tools for all employees. Several methods are used in the delivery of training materials, namely through video learning, video conferencing, e-learning. HR development is not only done through face-to-face training, offline and virtual, but also through on-job training, tutoring, rotation, coaching, counseling, and mentoring. The materials prepared are not only oriented towards the financing industry, but also soft skills materials such as leadership, personality development, and communication. e-learning media is one of the solutions and strategies adopted for continuous learning.

The Company always organizes knowledge transfer activities for Foreign Workers ("TKA") to other local workers for the process of Transfer Knowledge.

These were the training programs that had been carried out throughout the year of 2025:

No.	Klasifikasi Training Training Classification	Program	Peserta Participant
1	*Induction Training Programs*	11	126
2	*Technical Training Programs*	24	292
3	*Seminar & Certification Training Program (SPPI & APPI)*	37	198
4	*Soft Skill*	5	175
5	*OJK Compliance Traning Program*	7	575
6	*Sustainable Finance Action Plan Training Program*	2	136
7	*Individual Development Planning Training Program*	93	367
8	*Management Development Training Program*	1	5
9	*Sustainable Corporate Culture Training Program*	19	1,340
	Total	**199**	**3,214**

Teknologi Informasi
Information Technology

Dukungan Teknologi Informasi

Perseroan percaya bahwa inovasi teknologi adalah kunci utama untuk menghadirkan pengalaman layanan pembiayaan yang lebih personal dan efisien bagi seluruh mitra bisnis Perseroan.

Sepanjang tahun ini, pengembangan sistem internal dilakukan secara intensif untuk menyederhanakan alur kerja kompleks menjadi proses digital yang lebih intuitif dan terintegrasi. Dengan memadukan keunggulan finansial dan keahlian teknologi, Perseroan optimis dapat terus memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pertumbuhan bisnis Perseroan.

Pengembangan Teknologi Informasi

Pengembangan Teknologi Informasi di Perseroan bukan sekadar upaya modernisasi, melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan solusi pembiayaan yang lebih cerdas dan responsif terhadap perubahan zaman. Fokus pengembangan tahun ini berpusat pada optimalisasi dan penguatan digital untuk mempercepat proses bisnis di seluruh lini organisasi. Sinergi antara keunggulan finansial yang kompetitif dan penerapan teknologi yang tepat guna menjadi kunci bagi Perseroan untuk tetap menjadi mitra pembiayaan yang inovatif, andal, dan terpercaya.

Information Technology Support

The Company believes that technological innovation is the key to delivering a more personalized and efficient financing service experience for all of its business partners.

Throughout the year, internal system development has been carried out intensively to simplify complex workflows into more intuitive and integrated digital processes. By combining financial excellence with technological expertise, the Company remains confident in its ability to continuously deliver sustainable added value to support business growth.

Information Technology Development

Information Technology development within the Company is not merely a modernization effort, but a tangible commitment to delivering smarter and more responsive financing solutions in line with evolving times. This year's development focus centered on digital optimization and reinforcement to accelerate business processes across all organizational lines. The synergy between competitive financial strength and appropriate technology implementation remains key for the Company to maintain its position as an innovative, reliable, and trusted financing partner.

Pengembangan 2025

Selama tahun 2025, Perseroan telah mengembangkan dan melakukan implementasi peningkatan dalam sistem informasi dengan memfokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektifitas. Berikut beberapa pengembangan yang telah dilakukan:

1. Otomatisasi aktivitas/proses kerja dengan memanfaatkan *Robot Process Automation* (RPA)
   - Proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh fungsi Akunting untuk kas/bank dan *Operational Expense* (OPEX).
   - Proses pengiriman email yang dilakukan oleh fungsi Unit Bisnis Korporasi untuk pengingat jatuh tempo, BPKB, dan asuransi.
   - Proses input pengajuan pembayaran untuk tagihan listrik, air, dan telepon yang digunakan oleh fungsi *General Affair.*
   - Proses pendaftaran dan menonaktifkan aset pembiayaan dari RAPINDO yang dilakukan oleh fungsi *Credit Analyst.*
2. Digitalisasi terhadap proses-proses yang masih berjalan secara manual
   - Digitalisasi terhadap proses permohonan dan alur persetujuan terhadap proses pengajuan keringanan dari kewajiban konsumen yang harus dibayarkan pada proses pelunasan dipercepat *(Early Termination)*. Termasuk proses pembagian dari nilai keringanan yang telah disetujui secara otomatis dalam proses pelunasan.
   - Digitalisasi terhadap proses permohonan *back-to-current* terhadap kontrak dalam proses penarikan aset maupun aset yang telah ditarik.
3. *Continuous Improvement/Continuous Development (CI/CD)*
   - Penyederhanaan dari laporan PEFINDO dan melakukan peningkatan sistem PEFINDO sehingga menjadi lebih cepat dan efisien.
   - Pengembangan untuk meningkatkan pendapatan lainnya diluar dari produk pembiayaan.
   - Pengembangan terhadap media penerimaan fasilitas pembayaran konsumen yang terkoneksi dengan *Virtual Account BCA.*
   - Pengembangan untuk penambahan informasi *buy-back guarantee* dari *showroom* untuk transaksi pembiayaan tertentu sebagai salah satu mitigasi risiko.
4. Sistem Otomatisasi
   - Otomatisasi terhadap *checking* RAPINDO. Pengembangan dari proses manual yang dilakukan dalam melakukan verifikasi dari RAPINDO.
5. *Compliance*
   - Perseroan telah melakukan peningkatan sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013 menjadi ISO 27001:2022 pada Juni 2025.
   - Penyesuaian POJK 46/2024 – Kolektibilitas Restrukturisasi.

Pengembangan ke Depan

Perseroan akan terus fokus pada pengembangan dan peningkatan peranan teknologi informasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Beberapa inisiatif yang akan Perseroan lakukan antara lain:

1. Digitalisasi proses-proses yang bersifat manual
   - Pengembangan untuk proses pengajuan pelunasan terhadap *account-account write-off,* negosiasi denda, dan penyesuaian *user interface*.

2025 Developments

Throughout 2025, the Company developed and implemented enhancements to its information systems with a focus on improving efficiency and effectiveness. The key developments include:

1. Work Process Automation through Robot Process Automation (RPA)
   - Reconciliation processes performed by the Accounting function for cash/bank and Operational Expenses (OPEX).
   - Automated email delivery by the Corporate Business Unit for due date reminders, vehicle ownership certificates (BPKB), and insurance notifications.
   - Payment submission input for electricity, water, and telephone bills through the General Affairs function.
   - Registration and deactivation of financing assets from RAPINDO conducted by the Credit Analyst function.
2. Digitalization of previously manual processes
   - Digitalization of application and approval workflows for consumer obligation relief requests in accelerated settlement (Early Termination), including automatic distribution of approved relief values within the settlement process.
   - Digitalization of back-to-current requests for contracts undergoing asset repossession or already repossessed assets.
3. Continuous Improvement/Continuous Development (CI/CD)
   - Simplification of PEFINDO reports and system enhancement of PEFINDO checks to improve speed and efficiency.
   - Development initiatives to increase non-financing income streams.
   - Enhancement of consumer payment facility channels integrated with BCA Virtual Account.
   - Addition of buy-back guarantee information from showrooms for specific financing transactions as part of risk mitigation.
4. Automation System
   - Automation of RAPINDO checking, transforming manual verification processes into automated systems.
5. Compliance
   - The Upgrade of the Company has Information Security Management System (ISMS) certification from ISO 27001:2013 to ISO 27001:2022 in June 2025.
   - Adjustment to POJK 46/2024 Restructuring Collectibility Regulation.

Future Development

The Company will continue to focus on enhancing the role of information technology to support business growth. Planned initiatives include:

1. Digitalization of Manual Processes
   - Development of settlement submission processes for write off accounts, penalty negotiations, and user interface adjustments.

- Digitalisasi untuk proses pengajuan pelunasan *account write-off,* dimana saat ini masih dijalankan secara manual. Diharapkan dengan pengembangan ini dapat mengurangi pekerjaan manual, kesalahan perhitungan serta dapat meningkatkan *service level.*
- Digitalisasi untuk proses pengajuan restrukturisasi dan analisa konsumen. Dimana saat ini proses masih dilakukan secara manual menggunakan kertas kerja. Diharapkan dengan perubahan menjadikan proses lebih tercatat dan mengurangi potensi kesalahan manusia.

2. *Continuous Improvement / Continuous Development (CI/CD)*
   - Pengembangan *mobile collection* yaitu dengan menambahkan kronologis penagihan dan melakukan pengembangan *web monitoring* untuk kronologis penagihan yang digunakan oleh *Supervisor*. Pengembangan *mobile collection* untuk penambahan informasi histori kronologi penagihan untuk membantu *Field Collection* dalam penagihan. Perseroan juga mengembangkan *web monitoring* untuk melihat kronologis penagihan untuk tujuan pemantauan kinerja serta *coaching* dan *counseling.*
   - Proses *break* asuransi pada saat ini masih dilakukan secara satu per satu.
     Pengembangan akan dilakukan untuk merubah proses ini menjadi sistem *batch*/kelompok, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses dan dapat meningkatkan tingkat pelayanan kepada cabang dan konsumen.
   - *Lock Sistem Payment Guarantee* (OVD).
     Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan mitigasi risiko terhadap pembiayaan konsumen yang berasal dari beberapa *showroom* yang memiliki jaminan pembayaran *(Payment Guarantee/PG)* yang belum diselesaikan dari konsumen yang berasal dari beberapa *showroom* tersebut. Dengan sistem ini, diharapkan semua *showroom* dapat menyelesaikan kewajiban terhadap Perseroan terlebih dahulu, sehingga dapat melanjutkan proses pembiayaan baru.
   - Persetujuan permintaan pemeriksaan PEFINDO dan Dukcapil via *Link*.
     Persetujuan pada saat ini masih dilakukan secara form persetujuan manual. Diharapkan dengan pengembangan ini, konsen dapat dilakukan melalui digital sehingga dapat mempercepat proses dan mengurangi dokumen manual.

3. Otomatisasi
   - Otomatisasi WA *Bussiness* untuk kebutuhan Marketing dalam penawaran produk *refinancing.* Dengan WA *Business Official* untuk tujuan pemasaran (marketing) diharapkan dapat meningkatkan *disburse,* otomatisasi, dan *service level.*
   - Otomatisasi hasil PEFINDO
     Hasil dari *grading* PEFINDO, kolektibilitas, dan baki debet terinput otomatis ke Sistem Inti untuk meminimalkan pekerjaan manual dan juga resiko kesalahan penginputan manual.
   - Penggunaan *Robot Process Automation (RPA)*
     - RPA untuk proses rekonsiliasi *payment point* yang diproses pada Sistem Inti.
     - RPA untuk otomatisasi pendaftaran dan rekonsiliasi *fixed asset.*
     - RPA untuk penginputan data calon karyawan.

- Digitalization of write off account settlement which is currently carried out manually. This development is expected to reduce manual work, calculation errors, and improve service levels.

- Digitalization of restructuring application and consumer analysis, Currently, the process is still done manually using paperwork it is hoped that the changes will improve the process recordability and the potential for human error.

2. Continuous Improvement / Continuous Development (CI/CD)
   - Development of the mobile collection system by adding detailed collection chronology features and enhancing web-based monitoring of collection activities used by Supervisors. The mobile collection enhancement includes additional historical collection chronology information to assist Field Collection officers in their collection activities. The Company has also developed web monitoring to review collection chronologies for performance monitoring, as well as coaching and counseling purposes.
   - Currently, the insurance break process is carried out individually on a one-by-one basis.
     The planned development will convert this process into a batch/group system, which is expected to accelerate processing time and improve service levels to branches and customers.

   - Lock System Payment Guarantee (OVD).
     This enhancement aims to strengthen risk mitigation for consumer financing originating from several showrooms that have outstanding Payment Guarantee (PG) obligations which have not yet been settled by customers associated with those showrooms. With this system, it is expected that all showrooms will fulfill their obligations to the Company first, thereby enabling them to proceed with new financing applications.
   - Approval requests for PEFINDO and Dukcapil checks via link.
     At present, consent is still obtained through manual approval forms. With this development, consent is expected to be provided digitally, thereby accelerating the process and reducing manual documentation.

3. Automation
   - Automation of WhatsApp Business to support Marketing activities in offering refinancing products. Through the use of WhatsApp Business Official for marketing purposes, the Company expects to increase disbursement, automation, and overall service levels.
   - Automation of PEFINDO results.
     The results of PEFINDO grading, collectibility status, and outstanding balances (baki debet) are automatically integrated into the Core System to minimize manual work and reduce the risk of manual input errors.
   - Utilization of Robot Process Automation (RPA)
     - RPA for payment point reconciliation processes within the Core System.
     - RPA for fixed asset registration and reconciliation automation.
     - RPA for candidate employee data entry.

- RPA untuk penginputan data sanksi karyawan ke dalam Sistem HR.
- RPA untuk fungsi-fungsi lainnya.

4. Evaluasi
   - Evaluasi integrasi DOME ke *iFinancing (*iFIN)
     Perseroan akan melakukan evaluasi terhadap aplikasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan Unit Bisnis Korporasi saat ini yaitu DOME, yang merupakan aplikasi terpisah dan tidak terintegrasi dengan sistem iFIN dimana penggunaannya hanya sebatas pencatatan *account*. Integrasi ini memungkinkan Perseroan untuk menyatukan database konsumen antara Unit Bisnis Korporasi dan Unit Bisnis Ritel dan memungkinkan penyatuan beberapa fungsi.

5. Pengembangan Bisnis
   - Pengadaan 8 lisensi *Televerification*
     Dengan sentralisasi dan pengembangan fungsi *Credit Analyst*, Perseroan membutuhkan tambahan lisensi *telephony.*

6. *Compliance*
   - ISO 27001:2022
     Perseroan sudah memperbaharui sistem keamanan informasi dari ISO 27001:2013 ke ISO 27001:2022 pada tahun 2025, untuk melihat kelayakan dan konsistensi Perseroan dalam mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi di bulan Mei 2026 dan Perseroan akan melaksanakan *1st surveillance audit* untuk ISO 27001:2022.

7. *Continuous Improvement*
   - Penambahan *bandwith* dari lokasi *Data Center* ke *Disaster Recovery Center* untuk mengurangi jeda *(delay)* dan mendukung performa kestabilan dalam komunikasi data sehubungan dengan peningkatan aliran data dan *backup.*
   - Seiring perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan sistem komputasi yang efisien, aman dan mudah dikelola semakin meningkat. Peningkatan teknologi *virtual* ke *platform* yang lebih modern dan efisien untuk memperkuat keamanan, meningkatkan kinerja sistem dan memastikan kompatibilitas dengan infrastruktur TI terbaru.

- RPA for inputting employee sanction data into the HR System.
- RPA for other supporting functions.

4. Evaluation
   - Evaluation of DOME Integration into iFIN
     The Company will conduct an evaluation of the application currently used to support the Corporate Business Unit's activities, namely DOME, which operates as a standalone application and is not integrated with the iFinancing (iFIN) system, as its usage is currently limited to account recording. This integration initiative will enable the Company to unify the consumer database between the Corporate Business Unit and the Retail Business Unit, as well as allow the consolidation of several functions.

5. Business Development
   - Procurement of 8 Televerification Licenses
     In line with the centralization and enhancement of the Credit Analyst function, the Company requires additional telephony licenses.

6. Compliance
   - ISO 27001:2022
     The Company has upgraded its Information Security Management System from ISO 27001:2013 to ISO 27001:2022 in 2025. To ensure the adequacy and consistency of its information security management implementation, the Company will conduct an evaluation in May 2026 and carry out the 1st surveillance audit for ISO 27001:2022.

7. Continuous Improvement
   - Bandwidth enhancement from the Data Center to the Disaster Recovery Center to reduce delay and support stable data communication performance in response to increasing data traffic and backup requirements.
   - In line with advancements in information technology, the need for efficient, secure, and easily managed computing systems continues to grow. The Company is upgrading its virtualization technology to a more modern and efficient platform to strengthen security, improve system performance, and ensure compatibility with the latest IT infrastructure.

Keanggotaan Pada Asosiasi
Association Membership

No.	Nama Asosiasi Association Name	Keterangan Description
1.	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Association of Indonesian Financing Companies (APPI)	Sebagai anggota No. 1191/JKT/05 As member No. 1191/JKT/05
2.	PT. Rapi Utama Indonesia (RAPINDO)	Sebagai anggota No.041/Rapindo-1/12/2025 As member No.041/Rapindo-1/12/2025
3.	Indonesia *Corporate Secretary Association* (ICSA)	Sebagai anggota No.28417 As member No.28417
4.	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Alternative Institution for Dispute Resolution in the Financial Service Sector (LAPS SJK)	Sebagai anggota No. K/157/IX/2023 As member No. K/157/IX/2023

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION
AND ANALYSIS



Uraian Per Segmen
Description Per Segment

Ruang lingkup kegiatan utama Perseroan meliputi:
1. Kegiatan Usaha Utama
   - Pembiayaan Investasi
   - Pembiayaan Modal Kerja
   - Pembiayaan Multiguna dan/atau
   - Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK
2. Selain kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung:
   - sewa operasi
   - kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau
   - kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK

Perseroan memiliki 2 pilar bisnis, sebagai berikut:
1. Unit Bisnis Ritel
2. Unit Bisnis Korporasi

Izin usaha sebagai lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 yang kemudian telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 Jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 Jo. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Perseroan turut merasakan dampak ketidakpastian ekonomi global dan nasional yang tercermin dari sedikit penurunan jumlah piutang pembiayaan dan volume piutang pembiayaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah piutang ini disebabkan oleh menurunnya jumlah piutang pembiayaan konsumen sedangkan piutang sewa pembiayaan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

The scope of the Company's main activities includes:
1. Main Business Activities
   - Investment Financing
   - Working Capital Financing
   - Multipurpose Financing and/or
   - Other Financing Business Activities Based on OJK Approval
2. In addition to the above main business activities, the Company can carry out supporting business activities:
   - operating leases
   - fee-based activities as long as the Company does not violate the laws and regulations in the financial services sector and/or
   - other business activities with the OJK approval

The Company has 2 business pillars, as follows:
1. Retail Business Unit
2. Corporate Business Unit

The business license as a financial institution owned by the Company is as stated in the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.994/KMK.017/1993 dated December 30, 1993 which has subsequently been amended by the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.Kep-161/KM.6/2004 dated 4 May 2004 Jo. Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.Kep-654/KM.10/2010 dated 9 December 2010 Jo. Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the OJK No.KEP-806/NB.11/2022 dated December 12, 2022.

The Company was also affected by global and domestic economic uncertainties, as reflected in a slight decline in the total financing receivables and financing receivables volume compared to the previous year. The decrease in total receivables was primarily driven by a decline in consumer financing receivables, while finance lease receivables recorded a slight increase compared to the previous year.

Total Piutang Pembiayaan / Total Financing Receivables

Keterangan	2023	2024	2025	Description
Piutang Pembiayaan (Dalam Miliar Rupiah)	2,615.29	3,094.02	3,050.23	Financing Receivables (In Billion Rupiah)
Volume (Dalam Unit)	18,327	19,596	19,138	Volume (In Units)
Pendapatan Pembiayaan (Dalam Miliar Rupiah)	320.91	385.70	374.53	Financing Income (In Billion Rupiah)

Pembiayaan Konsumen / Consumer Financing

Keterangan	2023	2024	2025	Description
Piutang Pembiayaan Konsumen (Dalam Miliar Rupiah)	1,764.76	2,137.77	2,052.23	Consumer Financing Receivables (In Billion Rupiah)
Volume (Dalam Unit)	18,069	19,245	18,740	Volume (In Units)
Pendapatan Pembiayaan Konsumen (Dalam Miliar Rupiah)	265.37	320.99	304.36	Consumer Financing Income (In Billion Rupiah)

Sewa Pembiayaan / Finance Lease

Keterangan	2023	2024	2025	Description
Puitang Sewa Pembiayaan (Dalam Miliar Rupiah)	850.53	956.25	998.00	Finance Lease Receivables (In Billion Rupiah)
Volume (Dalam Unit)	258	351	398	Volume (In Units)
Pendapatan Sewa Pembiayaan (Dalam Miliar Rupiah)	55.54	64.71	70.17	Finance Lease Income (In Billion Rupiah)

Uraian Kinerja Keuangan Perseroan
Description of Company Financial Performance

Aset

Per 31 Desember 2025, Perseroan mencatat Jumlah Aset sebesar Rp3.153,53 miliar, turun sebesar 1,78% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.210,52 miliar. Penurunan aset terutama disebabkan oleh menurunnya piutang pembiayaan konsumen, demikian juga dengan aset derivatif. Di sisi lain, kas dan setara kas mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024.

Piutang pembiayaan konsumen - bersih turun sebesar 6,20% dari Rp2.081,77 miliar turun menjadi Rp1,952.69 miliar sejalan dengan penurunan piutang pembiayaan konsumen baru Unit Bisnis Ritel di tahun 2025. Piutang sewa pembiayaan – bersih mencatat kenaikan sebesar 4,97%, dari Rp879,80 miliar menjadi Rp923,54 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan pencairan pembiayaan baru oleh Unit Bisnis Korporasi pada tahun 2025 yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kas dan setara kas naik sebesar 79,66% dari Rp40,66 miliar menjadi Rp73,05 miliar. Aset derivatif turun sebesar 53,58% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp3,77 miliar menjadi Rp1,75 milliar per 31 Desember 2025.

Rincian dan komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Asset

As of December 31, 2025, the Company recorded Total Assets of Rp3,153.53 billion, a decrease of 1.78% compared to the previous year as of December 31, 2024 of Rp3,210.52 billion. The decrease in assets was mainly due to a decreased in consumer financing receivables, as well as derivative assets. On the other hand, cash and cash equivalents increased compared to 2024.

Consumer financing receivables - net decreased by 6.20% from Rp2,081.77 billion to Rp1,952.69 billion in line with the decreasing in new consumer financing receivables of Retail Business Unit in 2025. Finance lease receivables - net increased by 4.97%, from Rp879.80 billion to Rp923.54 billion. This increase was in line with higher new financing disbursements by the Corporate Business Unit in 2025 compared to the previous year. Cash and cash equivalents increased by 79.66% from Rp40.66 billion to Rp73.05 billion. Derivative assets decreased by 53.58% compared to the previous year as of December 31, 2024, which was Rp3.77 billion become Rp1.75 billion as of December 31, 2025

Details and composition of the Company's assets as at 31 December 2025 and 2024 are as follows:

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Aset	2024	2025	Perubahan Changes	Assets
Kas dan Setara Kas	40.66	73.05	79.66%	Cash and Cash Equivalent
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	2,081.77	1,952.69	(6.20%)	Consumer Financing Receivables - Net
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	879.80	923.54	4.97%	Finance Lease Receivables - Net
Piutang Lain-Lain - Bersih	97.22	111.03	14.20%	Other Receivables - Net
Biaya Dibayar Di Muka	2.95	3.07	4.07%	Prepaid Expenses
Aset Pajak Tangguhan	15.76	16.04	1.78%	Deferred Tax Assets
Aset Tetap - Bersih	48.32	42.04	(13.00%)	Property and Equipment - Net
Aset Derivatif	3.77	1.75	(53.58%)	Derivative Assets
Aset Hak Guna - Bersih	29.34	25.05	(14.62%)	Right-Of-Use Assets - Net
Aset Lain-Lain	10.93	5.27	(51.78%)	Other Assets
Jumlah Aset	**3,210.52**	**3,153.53**	**(1.78%)**	**Total Assets**

Liabilitas dan Ekuitas

Per 31 Desember 2025, Perseroan mencatat Jumlah Liabilitas sebesar Rp2.409,52 miliar, turun sebesar 2,31% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.466,53 miliar. Penurunan liabilitas terutama disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar 2,15% dari Rp2.347,42 miliar menjadi Rp2.296,86 miliar sejalan dengan penurunan piutang pembiayaan. Di sisi lain, utang lain-lain turun sebesar 7,28% dari Rp58,23 miliar menjadi Rp53,99 miliar. Jumlah Ekuitas sebesar Rp744,01 miliar juga mengalami kenaikan sebesar 0,003% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp743,99 miliar. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sehubungan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan tahun 2025.

Liability and Equity

As of December 31, 2025, the Company recorded Total Liabilities of Rp2,409.52 billion, a decrease of 2.31% compared to the previous year as of December 31, 2024 of Rp2,466.53 billion. The decrease in liabilities was due to the 2.15% decrease in bank loan from Rp2,347.42 billion to Rp2,296.86 billion which in line with decreasing in financing receivables. On the other hand, other payables decrease by 7.28% from Rp58,23 billion to Rp53,99 billion. Total Equity, which is Rp744.01 billion as of December 31, 2025 also increasing by 0.003% compared to the previous year as of December 31, 2024, which was Rp743.99 billion. The increasing equity was mainly due to a increasing of retained earning in connection with Net Pofit For The year 2025.

Rincian Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Details of the Company's Total Liabilities as of December 31, 2025 and 2024 as follows:

Liabilitas dan Ekuitas	2024	2025	Perubahan Changes	Liabilities and Equity
Utang Bank	2,347.42	2,296.86	(2.15%)	Bank Loans
Utang Usaha	4.49	0.25	(94.43%)	Trade Payables
Utang Lain-Lain	58.23	53.99	(7.28%)	Other Payables
Biaya Masih Harus Dibayar	9.36	13.22	41.24%	Accrued Expenses
Utang Pajak	0.75	0.85	13.33%	Taxes Payable
Liabilitas Sewa	24.62	21.47	(12.79%)	Lease Liabilities
Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	21.66	22.88	5.63%	Post-Employment Benefits Liabilities
Jumlah Liabilitas	2,466.53	2,409.52	(2.31%)	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	743.99	744.01	0.003%	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**3,210.52**	**3,153.53**	(1.78%)	**Total Liabilities and Equity**

Pendapatan

Pendapatan Perseroan berasal dari pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, administrasi, penalti, bunga, dan pendapatan lain-lain.

Per 31 Desember 2025, Perseroan mencatat Jumlah Pendapatan sebesar Rp448,82 miliar, turun sebesar 4,23% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp468,65 miliar. Penurunan pendapatan terutama disebabkan penurunan pendapatan pembiayaan konsumen sebesar 5,18% dari Rp320,99 miliar menjadi Rp304,36 miliar sejalan dengan penurunan piutang pembiayaan konsumen. Selain itu pendapatan sewa pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 8,44% dari Rp64,71 miliar menjadi Rp70,17 miliar sejalan dengan kenaikan piutang sewa pembiayaan. Pendapatan administrasi juga mengalami penurunan sebesar 22,05% dari Rp53,01 miliar menjadi Rp41,32 miliar karena pendapatan administrasi dari pembiayaan baru di tahun 2025.

Income

The Company's income is derived from consumer financing, finance leases, administration, penalty, interest income and other income.

As of December 31, 2025, the Company recorded Total Income of Rp448.82 billion, an decrease of 4.23% compared to the previous year as of December 31, 2024 of Rp468.65 billion. The decrease in Income was mainly due to decreased of consumer financing Income decrease by 5.18% from Rp320.99 billion to Rp304.36 billion inline with the decrease in consumer financing receivables. In addition, finance lease Income increase by 8.44% from Rp64.71 billion to Rp70.17 billion inline with the increase in finance lease receivables. Administration income also decrease by 22.05% from Rp53.01 billion to Rp41.32 billion due to administration income from new financing in 2025.

Beban

Beban Perseroan berasal dari penyisihan kerugian penurunan nilai, bunga dan keuangan, kepegawaian, umum dan administrasi, dan beban lain-lain.

Per 31 Desember 2025, Perseroan mencatat Jumlah Beban Rp440,28 miliar turun sebesar 7,05% dibandingkan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp473,69 miliar. Penurunan Jumlah Beban terutama disebabkan oleh beban penyisihan kerugian penurunan nilai turun sebesar 15,97% menjadi Rp127,77 miliar dari Rp152,06 miliar. Penurunan beban bunga dan keuangan sebesar 3,07% menjadi Rp130,20 miliar dari Rp134,32 miliar terutama karena penurunan utang bank di tahun 2025.

Beban kepegawaian sedikit mengalami kenaikan, sebesar 0,57% menjadi Rp126,90 miliar dari Rp126,18 miliar. Sementara beban umum dan administrasi mengalami penurunan sebesar 8,68% di tahun 2025.

Expenses

The Company's expenses come from provision for impairment losses, interest and financing charge, personnel, general and administration, and other expense.

As of December 31, 2025, the Company recorded Total Expenses of Rp440.28 billion, an decrease of 7.05% compared to December 31, 2024, which was Rp473.69 billion. The decrease in Total Expenses was mainly due to provision for impairment losses, which decrease 15.97% become Rp127.77 billion from Rp152.06 billion. The decrease of interest and financial charges, which decrease 3.07% become Rp130.20 billion from Rp134.32 billion due to increasing bank loan in 2025.

Personnel expense slightly increased. Which increase 0.57% become Rp126.90 billion from Rp126.18 billion. Meanwhile general & administration expense decreased by 8.68% in 2025.



Laba Bersih Tahun Berjalan

Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan yang terutama disebabkan oleh penurunan Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai sebesar 15,97% dan peningkatan Pendapatan Sewa Pembiayaan sebesar 8,44%.

Net Profit For The Year

The Company's Net Profit For The Current Year ended December 31, 2025, increased, primarily due to a decrease in the Provision for Impairment Losses Expense of 15.97% and an increase in Finance Lease Income of 8.44%.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain
Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

	2024	2025	Perubahan Changes	
Pendapatan				Income
Pembiayaan Konsumen	320.99	304.36	(5.18%)	Consumer Financing
Sewa Pembiayaan	64.71	70.17	8.44%	Finance Lease
Administrasi dan Provisi	53.01	41.32	(22.05%)	Administration and Provision
Penalti	19.73	17.58	(10.90%)	Penalty
Bunga	0.35	0.34	(2.86%)	Interest
Pendapatan Lain-Lain	9.86	15.05	52.64%	Other Income
Jumlah Pendapatan	**468.65**	**448.82**	**(4.23%)**	**Total Income**
Beban				Expenses
Bunga dan Keuangan	134.32	130.20	(3.07%)	Interest and Financing Charges
Umum dan Administrasi	60.68	55.41	(8.68%)	General and Administrative
Kepegawaian	126.18	126.90	0.57%	Personnel
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	152.06	127.77	(15.97%)	Provision For Impairment Losses
Beban Lain-Lain	0.45	0	(100.00%)	Other Expenses
Jumlah Beban	**473.69**	**440.28**	**(7.05%)**	**Total Expenses**
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(5.04)	8.54	269.44%	Profit (Loss) Before Income Tax
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan	2.88	(5.65)	(296.18%)	Income Tax (Expense) Benefit
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(2.16)	2.89	233.80%	Net Profit (Loss) For The Year
Penghasilan Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(4.33)	(2.88)	33.49%	Total Oher Comprehensive Income (Loss)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(6.49)	0.01	100.15%	Total Comprehensive (Loss) Income For The Year
Laba (Rugi) Per Saham (Dalam Rupiah Penuh)	(0.38)	0.51	234.21%	Basic Earning Per Share (In Full Rupiah)



Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp91,75 miliar naik 122,62% dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp405,56 miliar.

Kenaikan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh menurunnya pembayaran pembiayaan konsumen.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp3,84 miliar turun 45,50% dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7,05 miliar.

Penurunan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi terutama disebabkan penurunan perolehan aset tetap dan aset hak-guna.

Arus Kas Bersih Yang (Digunakan Untuk) Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp55,52 miliar naik 113,78% dibandingkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp402,91 miliar.

Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama karena pembayaran utang bank lebih besar daripada penerimaan utang bank, sejalan dengan penurunan piutang pembiayaan.

Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities

Net cash flows provided by operating activities for the year ended December 31, 2025 was Rp91.75 billion, an increase of 122.62% compared to net cash flows used in operating activities for the year ended December 31, 2024 of Rp405.56 billion.

The increase in net cash flows provided by operating activities was mainly due to the decreased disbursement of new consumer financing.

Net Cash Flows Used in Investing Activities

Net cash flows used in investing activities for the year ended December 31, 2025 was Rp3.84 billion, decrease of 45.50% compared to net cash flows used in investing activities for the year ended December 31, 2024 of Rp7.05 billion.

The decrease in net cash flows used in investing activities was mainly due to a decline in acquisition of fixed asset and right-of-use asset.

Net Cash Flows (Used In) Provided by Financing Activities

Net cash flows used in financing activities for the year ended December 31, 2025 was Rp55,52 billion, an increase of 113,78% compared to net cash flows provided by financing activities for the year ended December 31, 2024 of Rp402,91 billion.

The increase in net cash flows used in by financing activities was mainly due to payment of bank loan is bigger than receipt from bank loans, in line with the decrease in financing receivables.

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Arus Kas	2024	2025	Perubahan Changes	Cash Flows
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(405.56)	91.75	122.62%	Net Cash Flows Provided By (Used In) Operating Activities
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(7.05)	(3.84)	45.50%	Cash Flows Used In Investing Activities
Arus Kas Bersih Yang (Digunakan Untuk) Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	402.91	(55.52)	(113.78%)	Net Cash Flows (Used In) Provided by Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(9.70)	32.39	433.77%	Net Increase (Decrease) In Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	50.36	40.66	(19.27%)	Cash and Cash Equivalents At Beginning Of The Year
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	40.66	73.05	79.66%	Cash and Cash Equivalents At End Of The Year

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay Liabilities and Receivables Collectability

Perseroan selalu memantau proyeksi arus kas dan ketersediaan dana untuk melunasi utang jangka pendek dan jangka panjang. Selama tahun 2025, Perseroan tidak memiliki tunggakan pembayaran pokok, bunga, ataupun pelanggaran lainnya berkaitan dengan utang bank. Perseroan berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai dan agunan yang diterima dari *customer* telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

The Company always monitors cash flow projections and the availability of funds to pay off short-term and long-term debt. During 2025, the Company did not have arrears in payment of principal, interest, or other violations relating to bank loans. The Company believes that the allowance for impairment losses and collateral received from costumers are adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

Rincian umur piutang pembiayaan tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The details of the aging of financing receivables in 2025 and 2024 were as follows:

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Umur	2024		2025		Age
	Jumlah Amount	Persentase Percentage	Jumlah Amount	Persentase Percentage	
Belum Jatuh Tempo	3,570.91	92.81%	3,330.77	89.04%	Not Yet Due
1-30 Hari	86.42	2.25%	91.07	2.43%	1-30 Days
31-60 Hari	41.29	1.07%	46.76	1.25%	31-60 Days
61-90 Hari	20.38	0.53%	22.38	0.60%	61-90 Days
Lebih Dari 90 Hari	128.47	3.34%	249.85	6.68%	90 Days Up
Jumlah	**3,847.47**	**100.00%**	**3,740.83**	**100.00%**	**Total**

Rasio Keuangan Yang Relevan Lainnya

Perseroan secara konsisten menjalankan aktivitas bisnis pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan taat kepada peraturan OJK serta perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mampu memenuhi rasio-rasio keuangan yang diatur oleh regulator.

Other Relevant Financial Ratios

The Company consistently runs financing business activities in accordance with the principle of prudence and comply to the OJK regulations and applicable laws. The Company is able to meet financial ratios set by the regulator.

Perbandingan kinerja rasio keuangan utama Perseroan dibandingkan dengan kinerja industri pembiayaan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The comparison of the performance of the Company's main financial ratios compared to the performance of the industry in 2025 is as follows:

Rasio	Industri Industry	Perseroan The Company	Ratio
Financing Asset Ratio (FAR)	86.01%	91.21%	Financing Asset Ratio (FAR)
Rasio *Gearing*	2.18x	3.09x	Gearing Ratio
Rasio Modal Sendiri – Modal Disetor (MSMD)	320.23%	130.82%	Paid-up Capital - Equity Ratio
NPF- Net	0.77%	1.59%	NPF- Net
Rasio Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Terhadap Total Aset	4.17%	0.28%	Profit (Loss) Before Income Tax To Total Assets Ratio
Rasio Laba (Rugi) Bersih Terhadap Ekuitas	10.71%	0.39%	Net Profit (Loss) To Equity Ratio
Beban Operasional – Pendapatan Operasional (BOPO)	82.86%	98.55%	Operating Expense to Operating Income Ratio

Struktur Modal
Capital Structure

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tahun 2025 sebesar Rp568,74 miliar, tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024.

The Company's issued and paid-up capital in 2025 amounted to Rp568.74 billion, did not increase compared to 2024.

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Keterangan	2024	2025	Perubahan Changes	Description
Utang Bank	2,347.42	2,296.86	(2.15%)	Bank Loans
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	568.74	568.74	-	Issued and Fully Paid
Tambahan Modal Disetor	97.58	97.58	-	Additional Paid-in Capital
Komponen Ekuitas Lain	(3.87)	(6.74)	(74.16%)	Other Equity Components
Saldo Laba	81.54	84.44	3.56%	Retained Earnings

Kebijakan Struktur Modal
Capital Structure Policy

Manajemen Perseroan merancang struktur modal yang optimal dalam proses perencanaan modal dan memantau kebutuhan permodalan secara rutin. Struktur modal yang optimal akan senantiasa dipertahankan untuk memastikan tingkat permodalan yang kuat dan pada saat bersamaan tetap menyediakan ruang yang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

The Company's management designs an optimal capital structure in the capital planning process and regularly monitors capital requirements. The optimal capital structure will always be maintained to ensure a strong capital level while at the same time providing adequate space to support business growth.

Dalam mengelola struktur modal, Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, di antaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Modal Inti minimum Rp200 miliar;
- Rasio Modal Inti terhadap Modal Disetor minimum 50%; dan
- Rasio *Gearing*, yaitu rasio seluruh pinjaman terhadap ekuitas dikurangi pinjaman subordinasi dan penyertaan sebesar maksimal 10 kali.

In managing capital structure, the Company refers to the applicable Financial Services Authority Regulation, which regulates the following:

- Minimum Core Capital of Rp200 billion;
- Minimum Core Capital to Paid-up Capital Ratio of 50%; and
- Gearing Ratio, the ratio of all loans to equity minus subordinated loans and investments, a maximum of 10 times.

Perseroan telah memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana telah ditetapkan oleh regulasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

The Company has fulfilled the capital requirements as stipulated by the regulation, which are as follows:

Keterangan	2024	2025	Description
Modal Inti	Rp743.99 miliar / billion	Rp744.01 miliar / billion	Core Capital
Rasio Modal Inti terhadap Modal Disetor	131.50%	130.82%	Core Capital to Paid-up Capital Ratio
Rasio *Gearing*	3.14x	3.09x	*Gearing ratio*

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments to Capital Goods Investment

Pada tahun 2025, Perseroan tidak mempunyai ikatan material terkait investasi barang modal.

In 2025, the Company has no material commitments related to capital goods investment.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Material Facts That Occured After The Date of The Accountant's Report

- Pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman baru dari Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., Singapore sebesar JPY1.000.000 ribu yang akan tersedia sampai dengan tanggal 31 Maret 2027.

- On March 31, 2026, the Company received a new loan facility from Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., Singapore amounting to JPY1,000,000 thousand which has term period up to March 31, 2027.

- Pada tanggal 21 April 2026, Perusahaan menyetujui untuk memperpanjang Fasilitas dengan PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebesar IDR 750,000,000 ribu yang akan tersedia sampai dengan tanggal 30 April 2027.

- On April 21, 2026, the Company agreed to extend the Facility Letter with PT Bank SMBC Indonesia Tbk amounting to IDR 750,000,000 thousand which has term period up to April 30, 2027.

Prospek Usaha
Business Prospect

Eskalasi konflik di Timur Tengah yang terjadi sejak awal tahun 2026 telah memicu lonjakan harga energi dan pupuk. Fenomena ini memicu inflasi global, krisis energi, melemahkan permintaan pasar, serta menghambat potensi pertumbuhan yang seharusnya didorong oleh akselerasi produksi teknologi serta kebijakan moneter dan fiskal yang suportif.

The escalation of conflict in the Middle East that has occurred since the beginning of 2026 has triggered a surge in energy and fertilizer prices. This phenomenon has fueled global inflation, energy crisis, weakened market demand, as well as hampered potential growth that should have been driven by accelerated technological production and supportive monetary and fiscal policies.

Berdasarkan data OECD pada bulan Maret 2026, OECD memproyeksikan *outlook* pertumbuhan PDB global 2026 yaitu sebesar 2,90% dan berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan April 2026, proyeksi pertumbuhan global 2026 sebesar 3,10%. Proyeksi ini bergantung pada asumsi teknis bahwa tingkat gangguan pasar energi saat ini akan mereda seiring waktu, dengan harga minyak, gas, dan pupuk menurun secara bertahap mulai pertengahan tahun 2026 dan seterusnya.

Based on OECD data in March 2026, OECD projected the 2026 global GDP growth outlook is at 2.90% and on April 2026, the International Monetary Fund (IMF) projected global growth of 3.10% for 2026. This projection relies on the technical assumption that the current level of energy market disruption will subside over time, with oil, gas, and fertilizer prices gradually declining from mid-2026 onward.

Meskipun terdapat proyeksi kenaikan inflasi, bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada level moderat. Langkah BI dalam menentukan suku bunga acuan ke depan dipandang tetap berimbang, dengan fokus utama memitigasi risiko volatilitas nilai tukar serta menjaga stabilitas ekspektasi inflasi.

Despite projections of rising inflation, the central bank is expected to maintain interest rates at a moderate level. BI's approach to setting its benchmark interest rate going forward is seen as balanced, with a primary focus on mitigating the risk of exchange rate volatility and maintaining stable inflation expectations.

Di sisi lain, pada bulan Maret 2026, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 sebesar 4,80%. Angka ini menunjukkan tren perlambatan dan berada di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") 2026 yaitu sebesar 5,40%.

On the other hand, on March 2026, the OECD projected the Indonesia's economic growth in 2026 amounted 4.80%. This figure indicates a slowing trend and is below the 2026 State Budget ("APBN") target of 5.40%.

Pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global sekaligus memastikan belanja negara lebih produktif dan tepat sasaran, salah satunya adalah dengan fokus pada efisiensi APBN 2026 melalui serangkaian kebijakan terintegrasi yang diperkirakan mampu menghemat hingga Rp 204,4 triliun. Sumber penghematan terbesar berasal dari pengelolaan prioritas belanja kementerian dan lembaga. Secara keseluruhan, kombinasi *refocusing* anggaran, efisiensi program sosial, serta penghematan subsidi energi senantiasa menjadi penopang utama penguatan fiskal di tahun 2026.

The Government is also undertaking various efforts to maintain fiscal resilience amid global uncertainty while ensuring more productive and targeted state spending. One of these efforts is by focusing on the efficiency of the 2026 APBN through a series of integrated policies estimated to save up to IDR 204.4 trillion. The largest source of savings comes from priority management of the ministry and agency spending. Overall, the combination of budget refocusing, social program efficiency, and energy subsidy savings will be the main pillars of fiscal strengthening in 2026.

Pada Rapat Dewan Komisaris OJK yang diadakan pada awal bulan Maret 2026, OJK menyampaikan dengan mempertimbangkan target industri dan kondisi perekonomian, proyeksi pertumbuhan piutang pembiayaan tahun 2026 diperkirakan dapat mencapai 6,00%-8,00% (yoy). Dari sisi penjualan mobil, pada tahun 2026, Gaikindo memproyeksikan penjualan mobil sepanjang 2026 yaitu sebesar 850.000 unit. Pencabutan insentif tarif bea masuk nol persen untuk impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai oleh Kementerian Keuangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 akan berdampak pada naiknya harga mobil listrik (EV), meskipun harga mobil listrik akan cenderung naik, konsumen akan tetap

At the OJK Board of Commissioners Meeting held in early March 2026, OJK stated that taking into account industry targets and economic conditions, growth projections of financing receivables in 2026 could reach 6.00%-8.00% (yoy). In term of car sales, Gaikindo projects that car sales throughout 2026 will be 850,000 units. The Ministry of Finance's revocation of the zero percent import duty incentive for imports of battery-based electric motor vehicles, effective January 1, 2026, will result in higher prices for electric vehicles (EVs). Although EV prices will likely rise, consumers will continue to shift to electric and hybrid vehicles given the expected surge in fuel prices due to the escalating conditions in the Middle East.

beralih ke mobil listrik dan *hybrid* mengingat harga bahan bakar minyak akan melonjak sehubungan dengan eskalasi kondisi di Timur Tengah.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global maupun domestik, Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan yang mengedepankan pengembangan produk-produk dan strategi pemasaran yang tepat sasaran serta melanjutkan upaya penanganan debitur bermasalah dengan menerapkan strategi konservatif. Khususnya pada Unit Bisnis Ritel, Perseroan akan melakukan sentralisasi *Credit Analyst* guna meningkatkan aspek independensi, peningkatan kompetensi, standarisasi analisa kredit, serta penyetaraan beban kerja.

Amidst global and domestic economic uncertainty, the Company consistently strives to improve the quality of its financing portfolio by prioritizing the development of targeted products and marketing strategies, as well as continuing efforts to manage problematic debtors by implementing conservative strategies. Particularly within the Retail Business Unit, the Company will centralize Credit Analysts to improve independence, competency, standardize credit analysis, as well as equalize workloads.

Untuk Unit Bisnis Korporasi, Perseroan akan meningkatkan *pipeline* bisnis melalui akuisisi kredit dan melanjutkan kolaborasi dengan Marubeni Indonesia & Bank Mizuho Indonesia.

For the Corporate Business Unit, the Company will enhance its business pipeline through credit acquisitions and continued collaboration with Marubeni Indonesia and Bank Mizuho Indonesia.

Dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan mengupayakan pengendalian secara penuh terhadap rasio BOPO dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan bisnis Perseroan. Dari sisi pendanaan, Perseroan melakukan penelaahan strategi pendanaan dengan mengoptimalkan sumber pendanaan dengan suku bunga kompetitif yang didukung oleh komitmen Pemegang Saham Pengendali sekaligus salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan yaitu Mizuho Leasing Co., Ltd. dalam menyediakan *Corporate Guarantee,* menjaga ketersediaan likuiditas dan pengelolaan arus kas yang memadai serta mengelola rasio kesesuaian antara jangka waktu pendanaan dan jangka waktu pembiayaan *(matching ratio)* seraya mempertimbangkan aspek profitabilitas. Selain itu, Perseroan juga melakukan pemantauan secara ketat dengan pendekatan realistis terhadap dampak tren suku bunga dan kondisi pasar serta memantau dan melaporkan ke manajemen secara berkala atas proyeksi rasio keuangan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap batas rasio sesuai ketentuan OJK.

In carrying out its operations, the Company strives to fully control the BOPO ratio to optimize business growth. From a funding perspective, the Company is reviewing its funding strategy by optimizing funding sources at competitive interest rates which is supported by the commitment of the Controlling and one of the Company's Main Shareholder namely Mizuho Leasing Co., Ltd., to provide a Corporate Guarantee, maintain adequate liquidity and cash flow management, and manage the ratio between the funding period and the financing period (matching ratio) as well as taking profitability into account. Furthermore, the Company closely monitors the impact of interest rate trends and market conditions with a realistic approach as well as periodically monitor and report it to the management of the financial ratio projection to ensure the compliance with the ratio limits stipulated by OJK regulation.

Perseroan juga akan melakukan pengembangan bisnis melalui perluasan jaringan usaha guna meningkatkan profitabilitas dan mencapai efisiensi operasional yang optimal. Hal tersebut tentunya juga didukung oleh pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan kunci dalam mewujudkan peningkatan produktifitas dan capaian kinerja Perseroan yang lebih baik.

The Company will also pursue business development through business network expansion to increase profitability and achieve optimal operational efficiency. This will be supported by human resource development, which plays a key role in achieving increased productivity and improved performance of the Company.

Pengembangan bisnis Perseroan juga tentunya melibatkan proses penyesuaian kebijakan pembiayaan secara terstruktur yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas portofolio piutang pembiayaan. Adapun proses tersebut tentunya senantiasa dilakukan dalam koridor hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan pemenuhan aspek kepatuhan yang diharapkan mampu mendukung tercapainya target kinerja kualitas piutang pembiayaan dan profitabilitas tahun 2026.

The Company's business development also involves a structured process of adjusting financing policies, which is expected to improve the quality of its financing receivables portfolio. This process is consistently conducted within the legal framework, based on applicable laws and regulations, to enhance compliance, which is expected to support the achievement of the financing receivables quality and profitability performance targets for 2026.

Direksi senantiasa memastikan proses mitigasi risiko bisnis dijalankan secara optimal melalui mekanisme manajemen risiko terintegrasi yang mampu memantau secara cermat perkembangan Beban Penyisihan Piutang Ragu-Ragu. Sejalan

The Board of Directors consistently ensures that business risk mitigation processes are optimally implemented through an integrated risk management mechanism that closely monitors the development of the Allowance for Doubtful Accounts. In line

dengan hal tersebut, Direksi melakukan pelaporan secara berkala kepada Dewan Komisaris dalam rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris.

Evaluasi terhadap proses bisnis Perseroan juga dilakukan terkait pengembangan otomatisasi melalui RPA. Hal ini difokuskan pada proses bisnis yang masih dilakukan secara manual dengan frekuensi berulang agar dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Secara paralel, Perseroan juga terus melakukan kajian atas pengembangan sistem inti Perseroan yang lebih terintegrasi.

with this, the Board of Directors reports periodically to the Board of Commissioners at the joint meetings of Board of Directors and Board of Commissioners.

The Company's business processes are also being evaluated in relation to automation development through RPA. This focuses on business processes that are still performed manually and repeatedly, ensuring they run faster and more efficiently. In parallel, the Company is also continuing to review the development to its core systems to create a more integrated system.

Unit Bisnis Korporasi & Unit Bisnis Ritel
Corporate Business Unit & Retail Business Unit

Kegiatan pemasaran memegang peranan penting, baik untuk memperluas kegiatan usaha maupun untuk mempertahankan pangsa pasar dalam industri pembiayaan. Langkah-langkah pemasaran yang dilakukan Perseroan diklasifikasikan berdasarkan 2 (dua) pilar bisnis yaitu Unit Bisnis Ritel dan Unit Bisnis Korporasi.

Marketing activities play an important role, both to expand business activities and to maintain market share in the financing industry. The marketing steps taken by the Company are classified based on 2 (two) business pillars, namely the Retail Business Unit and the Corporate Business Unit.

Unit Bisnis Korporasi

Langkah dan strategi Unit Bisnis Korporasi pada tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan domestik, peraturan pemerintah, dan sektor industri yang konsisten melakukan pengembangan usaha. Ada beberapa strategi umum yang dipertimbangkan oleh Unit Bisnis Korporasi:

1. **Diversifikasi Portofolio**
   Unit Bisnis Korporasi dapat mengurangi risiko dengan mendiversifikasi portofolio mereka. Ini dapat dilakukan dengan menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan seperti sewa guna usaha *(finance lease)* baik secara pembiayaan langsung *(direct lease)* atau pembiayaan *sale and lease back,* pembiayaan pembelian secara angsuran dan pembiayaan modal usaha.
2. **Analisis Risiko yang Lebih Baik**
   Melakukan analisa data keuangan dari pelanggan korporasi yang lebih baik sehingga dapat membantu Perseroan mengidentifikasi risiko dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih informasional dalam memberikan pinjaman.
3. **Fokus pada Layanan**
   Memperkuat hubungan dengan klien dan memberikan layanan yang unggul dapat membantu perusahaan pembiayaan mempertahankan basis klien yang loyal dan meningkatkan retensi klien. Ini termasuk menyediakan layanan pelanggan yang responsif, proses aplikasi yang mudah, dan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
4. **Fleksibilitas dan Responsivitas**
   Di tengah perubahan cepat dalam kondisi ekonomi dan pasar, penting bagi Unit Bisnis Korporasi untuk tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Ini mungkin melibatkan penyesuaian cepat terhadap strategi bisnis, kebijakan pinjaman, atau produk dan layanan yang ditawarkan.
5. **Kemitraan Strategis**
   Membangun kemitraan strategis dengan lembaga keuangan lainnya, menjalin kerjasama dengan berbagai

Corporate Business Unit

The steps and strategies of Corporate Business Unit in 2025 are greatly influenced by global and domestic economic conditions, government regulations, and the industrial sector which consistently carries out business development. There are several general strategies considered by Corporate Business Units:

1. **Portfolio Diversification**
   Corporate business units can reduce their risk by diversifying their portfolios. This can be done by offering various types of financing products such as finance lease, both direct financing and sale and leaseback financing, installment financing, and business capital financing.
2. **A Better Risk Analysis**
   Conducting a more thorough financial data analysis of corporate clients to help the Company better identify risks and make more informed decisions when providing loans.
3. **Focus on Service**
   Strengthening relationships with client and delivering excellent service can help financing companies maintain a loyal client base and enhance client retention. This includes providing responsive client service, easy application processes, and financing solutions tailored to client needs.
4. **Flexibility and Responsiveness**
   Amid rapid changes in economic conditions and markets, it's crucial for Corporate Business Units to remain flexible and responsive to change. This may involve quickly adjusting business strategies, loan policies, or the products and services offered.
5. **Strategic Partnerships**
   Building strategic partnerships with other financial institutions, collaborating with various suppliers for heavy

penyedia *(supplier)* untuk peralatan berat, peralatan informasi teknologi, dan penyedia mesin-mesin, atau bahkan dengan bisnis-bisnis di sektor lain dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan inovasi.

6. **Peningkatan Kepatuhan Regulasi**
   Perseroan perlu memastikan bahwa dalam pelaksanaan operasional selalu mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku. Ini termasuk peraturan terkait privasi data, perlindungan konsumen, dan peraturan yang berkaitan dengan produk pembiayaan.

Unit Bisnis Ritel

Langkah pemasaran untuk segmen Unit Bisnis Ritel adalah dengan terus meningkatkan jalinan kerja sama dengan *dealer,* mitra strategis pembiayaan dalam rangka perluasan layanan usaha. Langkah pemasaran lainnya adalah menjalin hubungan baik dengan konsumen dengan berbagai metode peningkatan pelayanan yang bertujuan agar konsumen merasakan banyak keuntungan dan kemudahan yang dapat diperoleh melalui pembiayaan di Perseroan.

Adapun strategi pemasaran yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Fokus Kepada Portofolio Dengan Tingkat Pengembalian yang Wajar Sesuai Dengan Tingkat Risiko yang Ditentukan**
   Perseroan memfokuskan aktivitas pembiayaannya pada produk yang memiliki tingkat pengembalian yang wajar sesuai dengan tingkat risiko yang telah ditentukan oleh Perseroan, namun dengan tetap memperhatikan kualitas dari produk tersebut.
2. **Komitmen untuk Produktifitas dan Efisiensi**
   Penyempurnaan sistem dan prosedur secara terus menerus untuk meningkatkan produktifitas, mendukung aktifitas keuangan dan meningkatkan efisiensi.
3. **Hubungan yang Kuat dan Erat**
   Perseroan sangat menyadari bahwa hubungan yang kuat dan erat dengan konsumen dan rekan usaha merupakan salah satu kunci kesuksesan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menjaga hubungan baik serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan baik bagi konsumen maupun rekan usaha.
4. **Perluasan Layanan Usaha**
   Dalam upaya untuk menjangkau dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan rekan usaha, Perseroan terus mengembangkan layanan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan keuangan konsumen dan rekan usaha.
5. **Pengembangan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia**
   Perseroan sangat memahami bahwa teknologi informasi dan sumber daya manusia memegang peranan penting untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk mengembangkan teknologi informasi dan sumber daya manusianya secara berkesinambungan.

equipment, information technology, and machinery, or even with businesses in other sectors can open up new opportunities for growth and innovation.

6. **Regulatory Compliance Enhancement**
   The Company need to ensure that in their operational execution, they consistently adhere to all applicable rules and regulations. This encompasses regulations concerning data privacy, consumer protection, and those related to financing products.

Retail Business Unit

Marketing initiatives for the Retail Business Unit segment focus on continuously strengthening cooperation with dealers and strategic financing partners to expand business services. Another marketing approach involves building strong relationships with consumers through various service enhancement methods, ensuring that customers experience the benefits and convenience offered through financing by the Company.

The marketing strategies implemented include the following:

1. **Focus on Portfolio with Reasonable Returns in Accordance with Determined Risk Levels**

   The Company focuses its financing activities on product that provide reasonable returns in line with the risk levels determined by the Company, while maintaining product quality.

2. **Commitment to Productivity and Efficiency**
   Continuous improvement of systems and procedures to increase productivity, support financial activities and improve efficiency.
3. **Strong and Close Relationships**
   The Company recognizes that strong and close relationships with customers and business partners are key to its success. Therefore, the Company consistently strives to maintain good relationships and enhance trust and satisfaction among both customers and business partners.

4. **Business Service Expansion**
   In its efforts to reach and provide the best services to customers and business partners, the Company continues to develop its business services to effectively and appropriately meet their financial needs.

5. **Development of Information Technology and Human Resources**
   The Company understands that information technology and human resources play a crucial role in supporting its growth. Therefore, the Company continuously endeavors to develop its information technology and human resources on an ongoing basis.

Pangsa pasar Perseroan terhadap industri pembiayaan secara nasional selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

The Company's market share in the national financing industry over the past three (3) years is as follows:

Keterangan	2023	2024	2025	Description
Total Aset				Total Asset
Industri Pembiayaan (Triliun)	Rp552.89	Rp588.94	Rp588.88	Financing Industry (Trillion)
Perseroan (Triliun)	Rp2.79	Rp3.21	Rp3.15	The Company (Trillion)
Pangsa Pasar*	0.50%	0.55%	0.35%	Market Share*
Total Piutang Pembiayaan - Bersih				Total Financing Receivables - Net
Industri Pembiayaan (Triliun)	Rp470.86	Rp476.00	Rp475.66	Financing Industry (Trillion)
Perseroan (Triliun)	Rp2.54	Rp3.09	Rp2.88	The Company (Trillion)
Pangsa Pasar*	0.54%	0.65%	0.61%	Market Share*

* Sumber: Statistik Lembaga Pembiayaan periode Desember 2025 dan diolah oleh Perseroan (Tanpa jenis Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah)
Source: Multifinance Statistic for December 2025 and prepared by the Company (Excluding Sharia Financing)

Target dan Realisasi Tahun Buku
Target and Realization of the Financial Year

Di tengah perlambatan ekonomi global, meningkatnya tensi geopolitik, risiko inflasi, dan perubahan iklim, ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tumbuh 5,11%, lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2024 yang tumbuh 5,03%. Seperti halnya industri pembiayaan, pertumbuhan Perseroan tidak sesuai dengan yang diproyeksikan sebelumnya. Pencapaian target dan proyeksi kinerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

Amid global economic slowdown, rising geopolitical tension, inflation risk, and climate change, Indonesia's economy in 2025 grew by 5.11%, higher than the achievement in 2024, which grew by 5.03%. Like the financing industry, the Company's growth did not match what was previously projected. Target achievement and projections of the Company's performance are as follows:

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025 2025 Realization	Description
Piutang Pembiayaan - Bersih	3,019.72	2,876.23	Financing Receivables - Net
Jumlah Aset	3,254.19	3,153.53	Total Assets
Jumlah Liabilitas	2,509.66	2,409.52	Total Liabilities
Modal Ditempatkan & Disetor	568.74	568.74	Paid-Up Capital
Tambahan Modal Disetor	97.59	97.59	Additional Paid-Up Capital
Jumlah Ekuitas	744.54	744.01	Total Equity
Pendapatan	463.51	448.82	Income
Beban	461.03	440.28	Expenses
Laba Bersih Tahun Berjalan	1.88	2.89	Net Profit For The Year
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	1.88	0.01	Total Comprehensive Income For The Year

Target 2026

Manajemen Perseroan telah menyusun rencana untuk tahun 2026 dengan mempertimbangkan perkembangan industri otomotif, kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian baik dari segi makro maupun mikro.

2026 Targets

The Company's management has drawn up a plan for 2026 by considering the development of the automotive industry, current economic conditions and economic projections both in macro and micro terms.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Keterangan	Target 2026	Description
Piutang Pembiayaan - Bersih	3,039.28	Financing Receivables - Net
Jumlah Aset	3,182.31	Total Assets
Jumlah Liabilitas	2,436.01	Total Liabilities
Modal Ditempatkan & Disetor	568.74	Paid-Up Capital
Tambahan Modal Disetor	97.59	Additional Paid-Up Capital
Jumlah Ekuitas	746.29	Total Equity
Pendapatan	450.73	Income
Beban	447.50	Expenses
Laba Bersih Tahun Berjalan	2.07	Net Profit For The Year
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	2.07	Total Comprehensive Income For The Year

Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir
Capital Goods Investment Realized at the End of Financial Year

Investasi barang modal yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun 2025 dilakukan untuk menunjang kegiatan operasional. Investasi barang modal tersebut berupa bangunan, prasarana, kendaraan, peralatan, perabotan kantor, dan komputer. Adapun nilainya mencapai sebesar Rp4,29 miliar.

Capital goods investments made by the Company throughout 2025 were carried out to support operational activities. The investment in capital goods is in the form of buildings, infrastructure, vehicles, equipment, office furniture, and computers. The value reached Rp4.29 billion.

Dividen
Dividend

Memperhatikan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha maka Perseroan tidak membagikan dividen selama 2 tahun terakhir. Hal ini telah disetujui masing-masing dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 20 Juni 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 23 Juni 2025.

In regard to funding requirements needed for investment and working capital in the context of business development, the Company has not distributed dividends for the past 2 years. This has been approved in the Annual General Meeting of Shareholders held on June 20, 2024, and the Annual General Meeting of Shareholders held on June 23, 2025, respectively.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dalam tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dengan tetap memperhatikan keuntungan dan/atau kondisi keuangan Perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kebutuhan dana yang akan diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan memiliki kebijakan dividen kas atas laba bersih Perseroan mulai tahun buku 2018 setelah ketentuan-ketentuan diatas terpenuhi yaitu minimal 20% dari laba bersih setelah pajak.

The Company has a policy to pay dividends in cash to all Shareholders of the Company at least once in 1 (one) year. By taking into account the profit and/or financial condition of the Company in the relevant fiscal year and by taking into account the funding requirements that will be needed for investment in the context of business development as long as it does not conflict with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, without prejudice to the right of the Company's GMS to determine others in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. The Company has a cash dividend policy on the Company's net income starting in the fiscal year 2018 after the provisions of the above conditions are met, namely at least 20% of net profit after tax.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of The Use of Funds from Public Offering

Pada tahun 2025, Perseroan tidak melakukan penawaran umum dan sudah tidak ada kewajiban penyampaian realisasi pengunaan dana.

In 2025, the Company does not do a public offering and there is no obligation to submit the realization of the use of funds.

Informasi Material Lainnya
Other Material Information

Informasi material terkait transaksi afiliasi sepanjang tahun 2025 telah dipaparkan di dalam Laporan Keuangan 31 Desember 2025 *(Audited)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Material information related to affiliated transactions throughout 2025 had been presented in the Financial Statements of 31 December, 2025 (Audited) which was an integral part of this Annual Report.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat informasi material lainnya terkait dengan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Throughout 2025, there was no other material information related to investments, expansions, divestments, business mergers/ consolidations, acquisitions, debt/capital restructuring, Material transactions and transactions containing conflicts of interest.

Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan
Changes to Laws and Regulation with Significant Effects

Sepanjang tahun 2025, tidak ada perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

Throughout 2025, there was no change of regulation with significant effects toward the financial report.

Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

Mulai tanggal 1 Januari 2025, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”).

Beginning January 1, 2025, references to the individual PSAKs and ISAKs have been changed as published by Financial Accounting Standards Board of Institute of Indonesia Chartered Accountants (“DSAK - IAI”).

Dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan sejumlah amendemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025.

In the current year, the Company has applied a number of amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2025.

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar, interpretasi dan amandemen atas PSAK yang relevan bagi Perseroan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

At the date of authorization of the financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAKs relevant to the Company were issued but not effective, with early application permitted:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

- Amandemen PSAK 109 Instrumen Keuangan dan Amandemen PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan.
- Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia.

Effective for periods beginning on or after January 1, 2026

- Amendment to PSAK 109 Financial Instruments Keuangan dan Amendment to PSAK 107 Financial Instruments: Disclosures on Classification and Measurement of Financial Instruments.
- Annual Improvement 2024 SAK Indonesia.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027

- PSAK 118 Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

Manajemen tidak memperkirakan bahwa penerapan amandemen dan standar baru yang tercantum di atas akan berdampak material pada laporan keuangan Perseroan pada periode mendatang, kecuali seperti yang dijelaskan berikut ini.
PSAK 118 menggantikan PSAK 201, dengan banyak persyaratan dalam PSAK 201 yang tidak berubah dan dilanjutkan serta melengkapinya dengan persyaratan-persyaratan baru. Selain itu, beberapa paragraf dari PSAK 201 telah dipindahkan ke PSAK 208 dan PSAK 107. Serta, terdapat perubahan minor pada PSAK 207 dan PSAK 233 Laba per Saham.

Effective for periods beginning on or after January 1, 2027

- PSAK 118 Presentation and Disclosures in Financial Statements.

Management does not expect that the adoption of the amendments and new standards listed above will have a material impact on the financial statements of the Company in future periods, except if indicated as folows.
PSAK 118 replaces PSAK 201, carrying forward many of the requirements in PSAK 201 unchanged and complementing them with new requirements. In addition, some paragraphs from PSAK 201 have been moved to PSAK 208 and PSAK 107. Furthermore, there are minor amendments to PSAK 207 and PSAK 233 Earnings per Share.



PSAK 118 memperkenalkan persyaratan baru untuk:

- Menyajikan kategori-kategori tertentu dan subtotal yang ditentukan dalam laporan laba rugi;
- Memberikan pengungkapan tentang Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen (UKTM) dalam catatan laporan keuangan; dan
- Perbaikan agregasi and disagregasi.

Entitas diwajibkan untuk menerapkan PSAK 118 untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diizinkan. Amandemen PSAK 207 dan PSAK 233, serta amandemen PSAK 208 dan PSAK 107, berlaku ketika entitas menerapkan PSAK 118. PSAK 118 memerlukan penerapan retrospektif dengan ketentuan transisi.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

PSAK 118 introduces new requirements to:

- Present certain categories and specified subtotals in the statement of profit or loss;
- Provide disclosures on Management-Defined Performance Measures (MDPM) in the notes to the financial statements; and
- Improve the aggregation and disaggregation of financial information.

Entities are required to apply PSAK 118 for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2027, with early adoption permitted. Amendments to PSAK 207 and PSAK 233, as well as amendments to PSAK 208 and PSAK 107, become effective when an entity applies PSAK 118. PSAK 118 requires retrospective application in accordance with its transitional provisions.

As of the date of issuance of the financial statements, management has not yet determined or been able to reasonably estimate the impact of the adoption of these standards, amendments, and interpretations on the Company's financial statements.



TATA KELOLA
CORPORATE GOVERNANCE



Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")
General Meeting of Shareholders ("GMS")

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT") menguraikan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sebagai Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Peraturan mengenai RUPS juga terdapat di dalam UUPT Bab VI mengenai RUPS Pasal 75 sampai dengan Pasal 91.

Article 1 point 4 of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in conjunction with Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law ("UUPT") describes the General Meeting of Shareholders ("GMS") as a Company Organ that has authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the UUPT and/or the Articles of Association the Company. Regulations regarding the GMS are also contained in the UUPT Chapter VI regarding GMS Article 75 to Article 91.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2025
The Implementation of 2025 GMS

Pada tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan 2 (dua) kali RUPS dan seluruh keputusan pada RUPS tahun 2025 telah direalisasikan. Pelaksanaan RUPS tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

In 2025, the Company held 2 (two) GMS, and all resolutions made during the 2025 GMS have been implemented. The implementation of the 2025 GMS is described as follows:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

RUPST tanggal 23 Juni 2025 diselenggarakan di Catur Dharma Hall 1, Menara Astra, Lantai 5 – Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 pada pukul 14.07 – 14.56 WIB. RUPST telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 5.261.679.908 saham atau 92,515% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Hasil RUPST tanggal 23 Juni 2025, pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Ke-1 :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari Jaringan Deloitte), sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00048/2.1460/AU.1/09/1626-3/1/III/2025 tertanggal 17 Maret 2025 (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh lima) dengan "pendapat wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan *(acquit et de charge)* atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

Mata Acara Rapat Ke-2 :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), karena Perseroan mengalami kerugian di tahun buku 2024

Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")

The AGMS on 23 June 2025 was held at Catur Dharma Hall 1, Menara Astra, 5th Floor – Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 at 02.07 PM – 02.56 PM. The AGMS met the quorum because it was attended by Shareholders representing 5,261,679,908 shares or 92.515% of all shares with valid voting rights that had been issued by the Company.

The results of the AGMS on 23 June 2025, basically approved to the following matters:

First Meeting Agenda:

1. Well receive and approve the Company's Annual Report for the fiscal year of 2024 (two thousand twenty four), including the Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company;
2. Approve the ratification of the Financial Report for the fiscal year of 2024 (two thousand twenty four) which was audited by Public Accountant Bayu M Dayat and Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Partners (part of Deloitte Network) as contained in its report Number 00048/2.1460/AU.1/09/1626-3/1/III/2025 dated 17 March 2025 (seventeen March two thousand twenty five) with "opinion of present fairly in all material respects", thus releasing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of responsibility and any dependents (acquit et de charge) for the actions of management and supervision taken during the fiscal year of 2024 (two thousand twenty four), as long as all of their actions were reflected in the Financial Report for the fiscal year of 2024 (two thousand twenty four) except for embezzlement, fraud and other criminal acts.

Second Meeting Agenda:

Approve to not distribute dividends for the fiscal year of 2024 (two thousand twenty four), because the Company experienced a loss in the 2024 (two thousand twenty four) financial year.

Mata Acara Rapat Ke-3 :

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik ("AP") Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari Jaringan Deloitte), masing-masing sebagai AP dan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan AP dan KAP tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan KAP pengganti dalam hal AP dan KAP yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan AP dan KAP tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Third Meeting Agenda:

1. Approve to appoint Public Accountant ("AP") Bayu M Dayat and Public Accounting Firm ("KAP") Liana Ramon Xenia & Partners (part of Deloitte Network), respectively as the AP and KAP to audit the Financial Report of the Company for the fiscal year of 2025 (two thousand twenty five).
2. Approve to provide proxy and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements, with respect to the appointment of the pertinent AP and KAP.
3. Approve to authorize the Board of Commissioners to appoint other AP and KAP in the event of the appointed AP and KAP for any reason unable to perform their duties, provided that in appointing the AP and the KAP, the Board of Commissioners must observe the Recommendations from the Company's Audit Committee and meet the criteria as stipulated in POJK No. 9 Year 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Mata Acara Rapat Ke-4 :

1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu Mizuho Leasing Company Limited dengan kepemilikan saham sebesar 67,44% (enam puluh tujuh koma empat empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Fourth Meeting Agenda:

1. Approve to authorize the Controlling Shareholders of the Company, namely Mizuho Leasing Company Limited with a stake of 67.44% (sixty seven point forty four percent) of shares issued by the Company, to determine the amount of honorarium, bonuses and allowances for all members of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year of 2025 (two thousand twenty five) with regard to the recommendation of the Company's Nomination & Remuneration Committee.

2. Approve to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary, bonuses and allowances for all members of the Company's Board of Directors for the fiscal year of 2025 (two thousand twenty five) with regard to the recommendation of the Company's Nomination & Remuneration Committee

Mata Acara Rapat Ke-5 :

Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. - Menyetujui untuk mengangkat:
   - Tuan Kenjiro Sawada sebagai Direktur yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-118/PL.02/2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Kenjiro Sawada Selaku Calon Direktur Keuangan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk tanggal 5 Juni 2025 (lima Juni dua ribu dua puluh lima).

   - Menyetujui untuk mengangkat kembali:
     - Tuan Yasuo Imaizumi sebagai Komisaris Utama
     - Nyonya Bhindawati Gunawan sebagai Komisaris
     - Tuan Mohammad Syahrial sebagai Komisaris Independen

Fifth Meeting Agenda:

Approve the appointment of the members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors of the Company as follows:

1. - Approve to appoint:
   - Mr Kenjiro Sawada as Director, who has obtained approval from the Financial Services Authority in accordance with the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number: KEP-118/PL.02/2025 concerning The Results of the Fit and Proper Assessment of Mr Kenjiro Sawada as a Candidate for Finance Director of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk dated June 5, 2025 (fifth June two thousand twenty five).

   - Approve to re-appoint:
     - Mr Yasuo Imaizumi as President Commissioner
     - Mrs Bhindawati Gunawan as Commissioner
     - Mr Mohammad Syahrial as Independent Commissioner

- Tuan Konosuke Mizuta sebagai Direktur Utama
- Tuan Andi Harjono sebagai Direktur
- Tuan Yudi Gustiawan sebagai Direktur

terhitung sejak ditutupnya Rapat.

2. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

   DEWAN KOMISARIS
   - Tuan Yasuo Imaizumi sebagai Komisaris Utama
   - Nyonya Bhindawati Gunawan sebagai Komisaris
   - Tuan Mohammad Syahrial sebagai Komisaris Independen

   DIREKSI
   - Tuan Konosuke Mizuta sebagai Direktur Utama
   - Tuan Andi Harjono sebagai Direktur
   - Tuan Yudi Gustiawan sebagai Direktur
   - Tuan Kenjiro Sawada sebagai Direktur

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Rapat Ke-6

1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan dari Bank dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. Penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Rapat ini adalah dalam rangka untuk mendukung modal kerja Perseroan, merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana ditentukan dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
2. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tersebut diatas berlaku untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada angka 1 (satu) diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, serta memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mr Konosuke Mizuta as President Director
- Mr Andi Harjono as Director
- Mr Yudi Gustiawan as Director

effective as of the close of the Meeting.

2. Thus, effective from the close of this Meeting until the close of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2027 (two thousand twenty seven) financial year, which will be held in the year of 2028 (two thousand twenty eight), and taking into account capital market regulations without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, thus the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company is as follows:

   BOARD OF COMMISSIONERS
   - Mr Yasuo Imaizumi as President Commissioner
   - Mrs Bhindawati Gunawan as Commissioner
   - Mr Mohammad Syahrial as Independent Commissioner

   BOARD OF DIRECTORS
   - Mr Konosuke Mizuta as President Director
   - Mr Andi Harjono as Director
   - Mr Yudi Gustiawan as Director
   - Mr Kenjiro Sawada as Director

3. Approve granting power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to declare the appointment of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company in a separate deed before a Notary and to administer the notifications as well as the registration to the competent authority, and to take all necessary actions in connection therewith.

Sixth Meeting Agenda

1. Approve to pledge more than 50% (fifty percent) or all of the net assets of the Company in order to obtain loans that will be received directly by the Company from the Bank by considering the terms and conditions of the Capital Market and prevailing laws and regulations especially Capital Market regulations. The pledge of the Company's assets as referred to in this Meeting Agenda is in order to support the Company's working capital, is an exception to Material Transactions as stipulated in POJK No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities and are not Affiliated Transactions or Conflict of Interest Transactions in Certain Transactions as stipulated in POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.
2. Granting of the approval as referred to in number 1 (one) above applies for the fiscal year of 2025 (two thousand twenty five).
3. Approve to authorize the Board of Directors to carry out any and all actions needed in connection with the said action in number 1 (one) above, with regard to the approval of the Company's Board of Commissioners, with regard to the terms and conditions of the Capital Market provisions and the prevailing laws and regulations.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

Pada tahun 2025 Perseroan mengadakan 1 (satu) kali RUPSLB yaitu tanggal 23 Desember 2025.

RUPSLB tanggal 23 Desember 2025 diselenggarakan di Catur Dharma Hall 1, Menara Astra, Lantai 5 - Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 pada pukul 14.07 – 14.41 WIB. Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 5.262.704.808 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 92,5334% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Hasil RUPSLB tanggal 23 Desember 2025, pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama :
Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Mohammad Syahrial dari jabatannya selaku KOMISARIS INDEPENDEN Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat Tuan Dani Hamdani selaku KOMISARIS INDEPENDEN Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-360/PL.02/2025 tanggal 10-12-2025, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Tuan Mohammad Syahrial selaku Komisaris Independen Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.

2. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Tuan Konosuke Mizuta dari jabatannya selaku DIREKTUR UTAMA Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan mengangkat Tuan Takeshi Kurioka selaku DIREKTUR UTAMA Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP302/PL.02/2025 tanggal 21-10-2025. Dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Tuan Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.

3. Menyetujui untuk mengangkat :
   - Nyonya Fransisca Yuliana Gunawan selaku DIREKTUR Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-273/PL.02/2025 tanggal 30-09-2025 terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan

Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS")

In 2025, the Company held 1 (one) EGMS, on December 23, 2025.

The EGMS - 23 December 2025 was held at Catur Dharma Hall 1, Menara Astra, 5th Floor - Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 at 02.07 PM – 02.41 PM . The meeting was attended by Shareholders representing 5,262,704,808 shares, which have valid voting rights or equivalent to approximately 92.5334% of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

The results of the EGMS on 23 December 2025 in principle agreed on the following matters:

First Meeting Agenda:
Approving the changes to the Company's management as follows

1. Approve to honorably dismiss Mr. Mohammad Syahrial from his position as INDEPENDENT COMMISSIONER of the Company as of the closing of the Meeting, with gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his term as Independent Commissioner of the Company and appoint Mr. Dani Hamdani as INDEPENDENT COMMISSIONER of the Company, which has obtained approval from the OJK in accordance withthe Decree of the OJK Board of Commissioners Number: KEP-360/PL.02/2025 dated 10-12-2025, with a term of office for the remaining term of office of Mr. Mohammad Syahrial as Independent Commissioner of the Company he replaced, namely until the closing of the Annual GMS for the financial year 2027 which will be held in 2028.

2. Approve to accept the resignation of Mr. Konosuke Mizuta from his position as the PRESIDENT DIRECTOR of the Company effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as the President Director of the Company and appointed Mr. Takeshi Kurioka as the PRESIDENT DIRECTOR of the Company, which has obtained approval from the OJK in accordance with the Decree of the OJK Board of Commissioners Number: KEP302/PL.02/2025 dated 21-10-2025. Where the appointment is effective as of the date of issuance of the Limited Stay Permit from the authorized agency, with the term of office for the remaining term of office of Mr. Konosuke Mizuta as the President Director of the Company he replaces, namely until the closing of the Annual GMS for the financial year 2027 which will be held in 2028.

3. Approve to appoint:
   - Mrs. Fransisca Yuliana Gunawan as the DIRECTOR of the Company, who has obtained approval from the OJK in accordance with the Decree of the OJK Board of Commissioners Number: KEP-273/PL.02/2025 dated 30-09-2025 as of the closing of the Meeting, with a term of office until the closing of the Annual General

tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.
- Tuan Ryuji Tarumi selaku DIREKTUR Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-301/PL.02/2025 tanggal 20-10-2025 terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.

4. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
- Tuan Yasuo Imaizumi sebagai Komisaris Utama
- Nyonya Bhindawati Gunawan sebagai Komisaris
- Tuan Dani Hamdani sebagai Komisaris Independen

DIREKSI
- Tuan Takeshi Kurioka sebagai Direktur Utama*)
- Tuan Andi Harjono sebagai Direktur
- Tuan Yudi Gustiawan sebagai Direktur
- Tuan Kenjiro Sawada sebagai Direktur
- Nyonya Fransisca Yuliana Gunawan sebagai Direktur
- Tuan Ryuji Tarumi sebagai Direktur

*) Bahwa Pengangkatan Tuan Takeshi Kurioka sebagai Direktur Utama berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.

5. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Perubahan Pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menyetujui perubahan AD Perseroan diantaranya sebagai berikut :
   - Merubah Pasal 3 ayat 3 AD Perseroan sesuai dengan POJK 46/2024;
   - Merubah Pasal 11 ayat 3 huruf b (i) & huruf c AD Perseroan sesuai dengan POJK e-RUPS;
   - Merubah Pasal 12 ayat 13 angka (12), ayat 16 & ayat 17 AD Perseroan sesuai dengan POJK e-RUPS;
   - Merubah Pasal 15 ayat 2 AD Perseroan sesuai dengan POJK 48/2024;
   - Merubah Pasal 17 ayat 3 AD Perseroan sesuai dengan POJK 48/2024;
   - Merubah Pasal 18 ayat 1 AD Perseroan sesuai dengan POJK 48/2024;

Meeting of Shareholders for the financial year 2027 which will be held in 2028.
- Mr. Ryuji Tarumi as the DIRECTOR of the Company, who has obtained approval from the OJK in accordance with the Decree of the OJK Board of Commissioners Number: KEP-301/PL.02/2025 dated 20-10-2025 as of the closing of the Meeting, with a term of office until the closing of the Annual GMS for the financial year 2027 which will be held in 2028.

4. Thus, starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual GMS for the financial year 2027 which will be held in 2028, with due regard to regulations in the Capital Market sector and without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company will be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS
- Mr. Yasuo Imaizumi as President Commissioner
- Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner
- Mr. Dani Hamdani as Independent Commissioner

BOARD OF DIRECTORS
- Mr. Takeshi Kurioka as President Director *)
- Mr. Andi Harjono as Director
- Mr. Yudi Gustiawan as Director
- Mr. Kenjiro Sawada as Director
- Mrs. Fransisca Yuliana Gunawan as Director
- Mr. Ryuji Tarumi as Director

*) That the appointment of Mr. Takeshi Kurioka as President Director is effective from the date of issuance of the Limited Stay Permit from the authorized institution

5. Approve to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare changes to the Management of the Company in a separate deed before a Notary and to administer the notification as well as the registration to the authorized institution, as well as to take all necessary actions in connection therewith.

Second Meeting Agenda:

1. Approving changes to the AoA of the Company including the following:
   - To change the Article 3 paragraph 3 of the AoA of the Company accordingly to POJK 46/2024;
   - To change the Article 11 paragraph 3 letter b (i) & letter c of the AoA of the Company accordingly to POJK eRUPS;
   - To change the Article 12 paragraph 13 number (12), paragraph 16 & 17 of the AoA of the Company accordingly to POJK e-RUPS;
   - To change the Article 15 paragraph 2 of the AoA of the Company accordingly to POJK 48/2024;
   - To change the Article 17 paragraph 3 of the AoA of the Company accordingly to POJK 48/2024;
   - To change the Article 18 paragraph 1 of the AoA of the Company accordingly to POJK 48/2024;

- Merubah Pasal 20 ayat 3 AD Perseroan sesuai dengan POJK 48/2024;
- Merubah Pasal 12 ayat 13 angka (6) & (7) AD Perseroan terkait dengan penyesuaian rujukan pasal;
- Merubah Pasal 17 ayat 5 AD Perseroan terkait dengan penyesuaian rujukan pasal;
- Merubah Pasal 22 ayat 10 AD Perseroan terkait dengan penyesuaian rujukan pasal.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam AD Perseroan termasuk penyesuaian rujukan pasal dalam AD Perseroan sebagaimana terlampir dalam Minuta Berita Acara Rapat.

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan melakukan penyesuaian dan/atau perubahan AD Perseroan tersebut terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

- To change the Article 20 paragraph 3 of the AoA of the Company accordingly to POJK 48/2024;
- To change the Article 12 paragraph 13 number (6) & (7) of the AoA of the Company related to the adjustment of article references;
- To change the Article 17 paragraph 5 of the AoA of the Company related to the adjustment of article references;
- To change the Article 22 paragraph 10 of AoA of the Company related to the adjustment of article references.

2. Approve to rearrange all provisions in the AoA of the Company including the adjustment of article references in the Company's AoA, as attached in the Minutes of the Meeting.

3. Approve to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare and make the pertinent adjustments and/or changes to the pertinent AoA of the Company in accordance with the applicable regulations and provisions in a separate deed before a Notary and to administer the notification as well as the registration to the authorized institution, as well as to take all necessary actions in connection therewith.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2024
The Implementation of 2024 GMS

Pada tahun 2024, Perseroan telah melaksanakan 3 (tiga) kali RUPS dan seluruh keputusan pada RUPS tahun 2024 telah direalisasikan. Pelaksanaan RUPS tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

In 2024, the Company held 3 (three) GMS, and all resolutions made during the 2024 GMS have been implemented. The implementation of the 2024 GMS is described as follows:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

RUPST tanggal 20 Juni 2024 diselenggarakan di Catur Dharma Hall 3, Menara Astra, Lantai 5 – Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 pada pukul 09.41 – 10.25 WIB. RUPST telah memenuhi korum karena dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 5.264.496.608 saham atau 92,565% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Hasil RUPST tanggal 20 Juni 2024, pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Anggota Jaringan Deloitte Asia Pacific bagian Jaringan Deloitte), sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00052/2.1265/AU.1/09/1626-2/1/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 dengan "pendapat wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de*

Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")

The AGMS on 20 June 2024 was held at Catur Dharma Hall 3, Menara Astra, 5th Floor – Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 at 09.41 – 10.25 WIB. The AGMS met the quorum because it was attended by Shareholders representing 5,264,496,608 shares or 92.565% of all shares with valid voting rights that had been issued by the Company.

The results of the AGMS on 20 June 2024, basically approved to the following matters:

First Meeting Agenda:

1. Well receive and approve the Company's Annual Report for the fiscal year of 2023, including the Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company;
2. Approve the ratification of the Financial Report for the fiscal year of 2023 which was audited by Public Accountant Bayu M Dayat and Public Accounting Firm Imelda & Partners (Member of Deloitte Asia Pacific Network part Deloitte Network) as contained in its report No.00052/2.1265/AU.1/09/1626-2/1/III/2024 dated 13 March 2024 with "opinion of present fairly in all material respects", thus releasing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of responsibility and any dependents (acquit et de charge) for the actions of management and

charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

supervision taken during the fiscal year of 2023, as long as all of their actions were reflected in the Financial Report for the fiscal year of 2023 except for embezzlement, fraud and other criminal acts.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp 61.149.828.459,- (enam puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) digunakan untuk:

1. Sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
2. Sisanya sebesar Rp 60.849.828.459,- (enam puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.

Dengan demikian untuk tahun buku 2023 Perseroan tidak membagikan dividen.

Second Meeting Agenda:

To determine the use of the Company's net profit for the Fiscal Year of 2023 amounted to Rp 61,149,828,459.- (sixty one billion one hundred forty-nine million eight hundred twenty-eight thousand four hundred fifty-nine Rupiah) for:

1. The amount of Rp 300,000,000.- (three hundred million Rupiah) determined as a reserve, in accordance with the provisions of Article 23 of the Articles of Association of the Company and Article 70 of the Law Number: 40 of 2007 regarding Limited Liabilities Companies ("UUPT");
2. the remaining amount of Rp 60,849,828,459.- (sixty billion eight hundred forty-nine million eight hundred twenty-eight thousand four hundred fifty-nine Rupiah) determined as retained earnings.

Thus, for the fiscal year of 2023 the Company does not distribute dividend.

Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik ("AP") Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Imelda & Rekan (dengan nama KAP tersebut atau dengan nama lainnya sebagaimana mungkin diubah di masa depan, ataupun para penerus dan penggantinya yang juga merupakan afiliasi dari Deloitte Southeast Asia Limited yang merupakan anggota dari Deloitte Asia Pasific Limited dan Jaringan Deloitte), masing-masing sebagai AP dan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan AP dan KAP tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan KAP pengganti dalam hal AP dan KAP yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan AP dan KAP tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Third Meeting Agenda:

1. Approve to appoint Public Accountant ("AP") Bayu M Dayat and Public Accountant Firm ("KAP") Imelda & Partners (bearing such KAP name or such other name as such entity may have in the future, or the successor and replacement which is an affiliate of Deloitte Southeast Asia Limited that is a member of Deloitte Asia Pacific Limited and of the Deloitte Network), respectively as the AP and KAP to audit the Financial Report of the Company for the fiscal year of 2024.
2. Approve to provide proxy and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements, with respect to the appointment of the pertinent AP and KAP.
3. Approve to authorize the Board of Commissioners to appoint other AP and KAP in the event of the appointed AP and KAP for any reason unable to perform their duties, provided that in appointing the AP and the KAP, the Board of Commissioners must observe the Recommendations from the Company's Audit Committee and meet the criteria as stipulated in POJK No. 9 Year 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu Mizuho Leasing Company Limited dengan kepemilikan saham sebesar 67,44% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Fourth Meeting Agenda:

1. Approve to authorize the Controlling Shareholders of the Company, namely Mizuho Leasing Company Limited with a stake of 67.44% of shares issued by the Company, to determine the amount of honorarium, bonuses and allowances for all members of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year of 2024 with regard to the recommendation of the Company's Nomination & Remuneration Committee.

2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atau Masyarakat (melalui penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum) atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. Penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Rapat ini, merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
2. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas berlaku untuk tahun buku 2024.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada angka 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, serta memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

Pada tahun 2024 Perseroan mengadakan 2 kali RUPSLB yaitu tanggal 21 Maret 2024 dan 7 November 2024 .

RUPSLB tanggal 21 Maret 2024 diselenggarakan di Catur Dharma 1, Menara Astra, Lantai 5 - Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 pada pukul 10.05 – 10.22 WIB. Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 5.260.805.908 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 92,5001% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Hasil RUPSLB tanggal 21 Maret 2024, pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki dari jabatannya selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas

2. Approve to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary, bonuses and allowances for all members of the Company's Board of Directors for the fiscal year of 2024 with regard to the recommendation of the Company's Nomination & Remuneration Committee.

Fifth Meeting Agenda:

1. Approve to pledge more than 50% (fifty percent) or all of the net assets of the Company in order to obtain a loan facility that will be received by the Company from a bank, a venture capital company, a finance company, or an infrastructure financing company both domestically or overseas or Public through the issuance of securities other than equity type securities through a public offering on loans received directly by the Company or Controlled Company with regard to the terms and condition of the prevailing laws and regulations, especially Capital Market regulations. The guarantee for the Company's assets as referred to in this Meeting Agenda, is an exception to Material Transactions as specified in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities and are not Affiliated Transactions or Conflict of Interest Transactions in Certain Transactions as stipulated in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.
2. Granting of the approval as referred to in number 1 above, for the fiscal year of 2024.
3. Approve to authorize the Board of Directors to carry out any and all actions needed in connection with the said action in number 1 above, with regard to the approval of the Company's Board of Commissioners, with regard to the terms and conditions of the Capital Market provisions and the prevailing laws and regulations.

Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS")

In 2024, the Company held twice EGMS, on March 21, 2024 and November 7, 2024.

The EGMS - 21 March 2024 was held at Catur Dharma 1, Menara Astra, 5th Floor - Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 at 10.05 – 10.22 WIB. The meeting was attended by Shareholders representing 5,260,805,908 shares, which have valid voting rights or equivalent to approximately 92.5001% of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

The results of the EGMS on 21 March 2024 in principle agreed on the following matters:

First Meeting Agenda:

1. Approved to accept the resignation of Mr. Takeshi Sasaki from his position as President Commissioner as of the closing of the Meeting, with gratitude for the contribution

sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.

2. Menyetujui untuk mengangkat:
   - Bapak YASUO IMAIZUMI selaku KOMISARIS UTAMA Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

   - Ibu BHINDAWATI GUNAWAN selaku KOMISARIS Perseroan, terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Ibu Roosniati Salihin selaku Komisaris Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

   Untuk memenuhi Pasal 18 ayat 5. dan 8. Anggaran Dasar Perseroan, calon Komisaris Utama dan Komisaris telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2024.

   Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

   DEWAN KOMISARIS
   - Bapak Yasuo Imaizumi selaku Komisaris Utama
   - Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris*)
   - Bapak Mohammad Syahrial selaku Komisaris Independen

   *) Bahwa pengangkatan Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Dewan Komisaris dalam suatu akta Notaris tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

RUPSLB tanggal 7 November 2024 diselenggarakan di Function Hall C, Wisma 46, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 pada pukul 09.36 – 09.52 WIB. Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 5.262.922.125 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan

of energy and thoughts given while serving as President Commissioner of the Company.

2. Approved to appoint:
   - Mr. YASUO IMAIZUMI as the PRESIDENT COMMISSIONER of the Company, as of the closing of the Meeting, with a term of office for the remaining term of office of Mr. Takeshi Sasaki as the President Commissioner of the Company who he replaced, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year which will be held in 2025.
   - Mrs. BHINDAWATI GUNAWAN as COMMISSIONER of the Company, as of the receipt of approval from the OJK for the fit & proper test and in compliance with applicable laws and regulations, with a term of office for the remaining term of office of Mrs. Roosniati Salihin as Commissioner of the Company, who she replaced namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year which will be held in 2025.

   To comply with Article 18 paragraphs 5. and 8. of the Company's Article of Association, the candidates for President Commissioner and Commissioner have signed a Statement Letter dated 26 February 2024.

   Thus, starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year which will be held in 2025, taking into account regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the members the Board of Commissioners are as follows:

   BOARD OF COMMISSIONERS
   - Mr.Yasuo Imaizumi as President Commissioner
   - Mrs.Bhindawati Gunawan as Commissioner*)
   - Mr.Mohammad Syahrial as Independent Commissioner

   *) That the appointment of Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner of the Company is effective as of the receipt of approval from the OJK for the fit and proper test and in compliance with applicable laws and regulations.

3. Approve to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare the change the Company's Board of Commissioners in a separate Notarial deed before a Notary and to administer the notification as well as registration to the competent authority, and to undertake all necessary actions in connection therewith.

The EGMS - 7 November 2024 was held at Function Hall C, Wisma 46 , 3rd FloorJl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 at 09.36 – 09.52 WIB. The meeting was attended by Shareholders representing 5.262.922.125 shares, which have valid voting rights or equivalent to approximately 92.54% of the

kurang lebih 92,54% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Hasil RUPSLB tanggal 7 November 2024 pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Perubahan Anggota Direksi Perseroan yaitu menerima pengunduran diri Ibu Ade Rafida S. dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30 Agustus 2024 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada Perseroan. Adapun pembebasan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et decharge*) akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang membahas mengenai persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

   Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

   DIREKSI
   - Bapak Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama
   - Bapak Andi Harjono selaku Direktur
   - Bapak Shunsuke Kojima selaku Direktur
   - Bapak Yudi Gustiawan selaku Direktur

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dalam suatu akta Notaris tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

The results of the EGMS on 7 November 2024 in principle agreed on the following matters:

First Meeting Agenda:

1. Approving the Changes of the Company's Member of the Board of Directors, namely to accept the resignation of Mrs. Ade Rafida S. from her position as Director of the Company's effective as of August 30, 2024 with gratitude for the contribution of energy and thoughts given to the Company. The release from responsibility and all dependents (acquit et decharge) will be decided at the Annual General Meeting of Shareholders which will discuss the approval of the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as the ratification of the Company's Financial Statements for the financial year of 2024.

   Thus, starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year which will be held in 2025, taking into account regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the members of the Board of Directors of the Company are as follows:

   BOARD OF DIRECTORS
   - Mr.Konosuke Mizuta as President Director
   - Mr.Andi Harjono as Director
   - Mr.Shunsuke Kojima as Director
   - Mr.Yudi Gustiawan as Director

2. Approve to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare the change of Member of the Board of Directors in a separate Notarial deed before the Notary and to administer the notification as well as registration to the competent authority, and to undertake all necessary actions in connection therewith.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan baik secara khusus maupun umum sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris juga berwenang memberi nasihat kepada Direksi dalam segala hal terkait pengelolaan Perseroan. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk dan diberhentikan melalui RUPS. Masa jabatan setiap anggota Dewan Komisaris berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatan dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatannya.

The Board of Commissioners is the Company's organ that has the duty and authority to supervise both specifically and generally in accordance with the Articles of Association of the Company. The Board of Commissioners is also authorized to advise the Board of Directors in all matters related to the management of the Company. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed through the GMS. The term of office of each member of the Board of Commissioners ends at the closing of the third Annual GMS after the date of appointment by taking into account the Capital Market regulation, without prejudice to the right of the GMS to dismiss any member of the Board of Commissioners at any time before the end of his/her term of office.

Komposisi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Composition

Nama Name	Jabatan Position	Uji Kemampuan & Kepatutan Fit & Proper Test
Yasuo Imaizumi	Komisaris Utama President Commissioner	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-48/PL.02/2024 7 Feb 2024
Dani Hamdani	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-360/PL.02/2025 10 Dec 2025
Bhindawati Gunawan	Komisaris Commissioner	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-239/PL.02/2024 30 May 2024
Mohammad Syahrial*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-358/NB.11/2019 27 Jun 2019

*) Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2025, RUPS menyetujui pemberhentian Mohammad Syahrial selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
Based on the GMS on December 23 2025, the GMS approved the dismissal of Mohammad Syahrial as Independent Commissioner effective from the closing of the Extraordinary GMS.

Piagam Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Piagam yang dikaji ulang secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali atau dilakukan pengkinian disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Piagam tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris, maka Perseroan telah menyusun Piagam Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 011/BOC-MLI/LEGAL/XII/22 tanggal 23 Desember 2022.

Hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, Perseroan telah melakukan penyesuaian Piagam Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 006/BOC-MLI/III/26 tanggal 17 Maret 2026 yang dapat diakses melalui *website* Perseroan. Adapun penyesuaian ini ditujukan untuk penyelarasan dengan Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dasar penyusunan Piagam Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnnya;
3. Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.06/2025 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
4. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

Board of Commissioners Charter

The Board of Commissioners has Charter which will be reviewed periodically every 2 (two) years or updated in accordance with the applicable laws and regulations. That Charter is binding for each members of the Board of Commissioners.

To support the implementation of the Board of Commissioners duties, the Company has established the Board of Commissioners Charter pursuant to the Board of Commissioners' Decree Number 011/BOC-MLI/LEGAL/XII/2022 dated 23 December 2022.

As of the issuance of this Annual Report, the Company has updated the Board of Commissioners Charter based on the Board of Commissioners' Decree Number 006/BOC-MLI/III/26 dated 17 March 2026, which can be accessed through the Company's website. The adjustment was made to align with OJK Regulation Number 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.

The basis for the preparation of the Board of Commissioners Charter are as follows:

1. The Company's Article of Association;
2. Financial Services Authority ("OJK") Regulation Number 48 Year 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institution, and Other Financial Services Institutions;
3. OJK Circular Letter Number 28/SEOJK.06/2025 concerning the Report on the Implementation of Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions;
4. OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;

5. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
7. Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
10. Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

Struktur dan Keanggotaan Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari:
   - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
   - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;

   dengan memperhatikan ketentuan bahwa paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan warga negara Indonesia dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia serta memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

b. Bagi anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki:
   a. izin menetap; dan
   b. izin bekerja,

   dari instansi berwenang.
c. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
d. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang maka jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
e. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
   1) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
   2) cakap melakukan perbuatan hukum
   3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      a) tidak pernah dinyatakan pailit
      b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
      c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

5. OJK Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company;
6. OJK Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of Audit Committee;
7. OJK Regulation Number 8/POJK.04/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies;
8. OJK Regulation Number 29/POJK.04/2016 concerning Annual Report of Issuers or Public Companies;
9. OJK Circular Letter Number 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies; and
10. OJK Regulation Number 4 Year 2024 concerning Reports of Ownership or any Changes in Ownership of Public Company Share and Reports on Activities of Pledging Public Company Shares.

Structure and Membership of the Board of Commissioners

a. The Board of Commissioners is at least 2 (two) people, consisting of:
   - 1 (one) President Commissioner;
   - 1 (one) Commissioner or more(s);

   taking into account the provision that at least 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners are Indonesian citizens, and at least 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners are domiciled in the territory of the Republic of Indonesian as well as taking into account the regulations applicable in the Capital Market sector.
b. For members of the Board of Commissioners who are foreign nationals who are domiciled in the territory of the Republic of Indonesia, they are required to have:
   a. residence permit; and
   b. work permit,

   from the authorized agency.
c. In case the Board of Commissioners consists of 2 (two) members of the Board of Commissioners, 1 (one) of them is an Independent Commissioner.
d. In the event that the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) people, the number of Independent Commissioners must be at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners.
e. Those who can be appointed as members of the Board of Commissioners are individuals who meet the requirements when appointed during their tenure:
   1) having good character, morals and integrity
   2) capable to take legal act
   3) within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:
      a) never been declared bankrupt
      b) never been a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt
      c) never been convicted of committing a crime that caused losses to state finances and / or related to the financial sector; and

d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
   i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
   ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
   iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK

4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

f. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam butir (e), anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
g. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
h. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
i. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
   1) sebagai anggota direksi dan/atau pejabat eksekutif pada:
      a) perusahaan dan/atau lembaga lain jika telah menjabat sebagai anggota dewan komisaris pada 2 (dua) perusahaan dan/atau lembaga lain; atau
      b) lebih dari 1 (satu) perusahaan dan/atau lembaga lain jika telah menjabat sebagai anggota dewan komisaris pada 1 (satu) perusahaan dan/atau lembaga lain;
   2) sebagai anggota dewan komisaris pada lebih dari 2 (dua) perusahaan dan/atau lembaga lain.
   3) pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris.
j. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
k. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada butir (j) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lainnya.
l. Tidak termasuk rangkap jabatan jika:
   1. anggota Dewan Komisaris nonindependen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham

d) never been a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners who during the term of office:
   i. ever not holding the Annual GMS;
   ii. his accountability as a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never given accountability as a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners to the GMS; and
   iii. has caused a company that obtained a license, approval, or registration from OJK to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to OJK

4) having commitment to comply with laws and regulations; and
5) having knowledge and/or expertise in the fields required by the Company.

f. In addition to meet the requirements as listed in point (e), members of the Board of Commissioners shall follow the provisions of other laws and regulations.
g. Any proposed appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Commisioners to the General Meeting of Shareholders must take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.
h. Each member of the Board of Commissioners must meet the requirements to pass the fit and proper test in accordance with OJK Regulations regarding the fit and proper test.
i. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions:
   1) as a member of the board of directors and/or an executive officer at:
      a) another company and/or institution if they already serve as a member of the board of commissioners at 2 (two) other companies and/or institutions; or
      b) more than 1 (one) other company and/or institution if they already serve as a member of the board of commissioners at 1 (one) other company and/or institution;
   2) as a member of the board of commissioners at more than 2 (two) other companies and/or institutions.
   3) in other positions that may result in a conflict of interest in the performance of duties as a member of the Board of Commissioners.
j. Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as committee members in no more than 5 (five) committees in the Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.
k. Concurrent positions as a member of the committee as referred to in point (j) can only be carried out as long as they do not conflict with other laws and regulations.
l. Not including concurrent positions if:
   1. non-independent members of the Board of Commissioners carry out functional duties from

Perusahaan yang berbentuk badan hukum menjadi anggota dewan komisaris pada perusahaan anak dalam kelompok usahanya;

2. anggota Dewan Komisaris merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh asosiasi;

3. anggota Dewan Komisaris merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi dewan komisaris pada lembaga berdasarkan penunjukan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau

4. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba,

sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Dewan Komisaris.

m. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada butir (l), wajib membuat pernyataan untuk:
   1. menjaga integritas;
   2. tidak mempunyai benturan kepentingan; dan
   3. menghindari tindakan yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau menyebabkan Perusahaan melanggar prinsip kehati-hatian,

   selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

n. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

o. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

p. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
   1) Meninggal dunia;
   2) Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
   3) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

q. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam butir (a), maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi

shareholders of the Company incorporated in the form of legal entities as members of the board of commissioners at subsidiary companies within their business group;

2. members of the Board of Commissioners are administrators of the association who carry out functional duties as members of the board of commissioners in subsidiary companies controlled by the association;

3. members of the Board of Commissioner are administrators of the association who carry out functional duties as members of the board of commissioners at the institution based on the appointment of the Financial Services Authority; and/or

4. members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions,

as long as the concurrent position does not result in the person concerned neglecting the implementation of duties and authorities as a member of the Board of Commissioners.

m. Candidates for members of the Board of Commissioners who hold the positions referred to in point (l) are required to make a statement to:
   1. maintain integrity;
   2. do not have a conflict of interest; and
   3. avoid actions that could harm the Company and/or cause the Company to violate the principle of prudent,

   during his/her tenure as a member of the Board of Commissioners.

n. Members of the Board of Commissioners are appointed for a period commencing as of the date determined by the GMS which appointed them and ending at the closing of the 3rd (third) Annual GMS which was held after the date of the GMS that appointed the members of the Board of Commissioners at the end of 1 (one) term of office as referred to provisions 1 (one) term of office for a member of the Board of Commissioners is 3 (three) years, taking into account the laws and regulations in the Capital Market, however, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Commissioners at any time before his term of office ends, taking into account the applicable laws and regulations and the provisions of the Company's Articles of Association.

o. After their term of office end, the member of the Board of Commissioners may be re-appointed in accordance with a resolution of the GMS.

p. The term of office of a member of the Board of Commissioners automatically ends, if the member of the Board of Commissioners:
   1) Pass away;
   2) Be placed under interdiction based on a court decision; or
   3) No longer fulfills the requirements of the prevailing laws by taking into account the regulations in the capital market.

q. If the position of a member of the Board of Commissioners is vacant, resulting in less than 2 (two) members of the Board of Commissioners as referred to in point (a), the GMS must be held within 90 (ninety) calendar days after the vacancy occurs, for filling the vacancies with due observance of the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.

lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

r. Komisaris Independen wajib memiliki persyaratan, sebagai berikut:
   i. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
   ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan atau perusahaan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir.
   iii. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
   iv. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham Perseroan.
   v. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
   vi. memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
   vii. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.
   viii. memiliki kewarganegaraan Indonesia.
   ix. berdomisili di Indonesia.
   x. dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi.
b. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
c. Mengawasi kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan oleh Direksi untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
d. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
e. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal.
f. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas

r. Independent Commissioners must have the following requirements:
   i. is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period.
   ii. has never served as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the Sharia Supervisory Board (DPS), and/or Executive Officer at the Company or another company affiliated with the Company within the last 6 (six) month.
   iii. does not own shares either directly or indirectly of the Company.
   iv. does not have affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the shareholder of the Company.
   v. does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.
   vi. understand the laws and regulations in the financing field and other relevant laws and regulations.
   vii. have sufficient knowledge of the financial condition of the Company where the said Independent Commissioner serves.
   viii. have Indonesian citizenship.
   ix. domiciled in Indonesia.
   x. in the event that an Independent Commissioner serves on the Audit Committee, the relevant Independent Commissioner can only be reappointed to the Audit Committee for the next 1 (one) term of office of the Audit Committee.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners

a. The Board of Commissioners is in charge of supervising and responsible for supervising management policies and providing advice to the Board of Directors.
b. Under certain conditions, the Board of Commissioners is required to hold an annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in the laws and regulations and the articles of association.
c. Supervising management policies and the conduct of management in general as carried out by the Board of Directors for the benefit of the Company as well as in accordance with the purposes and objectives of the Company.
d. Prepare a report on the activities of the Board of Commissioners which is part of the implementation report of Good Corporate Governance.
e. Directing, monitoring and evaluating the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance, risk management, compliance and internal audit.
f. Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Company internal audit work unit, external auditors, the results of supervision

Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.

g. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk:
   1) Komite Audit
   2) Komite Pemantau Risiko
   3) Komite Remunerasi Dan Nominasi

h. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

i. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:

   1) pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

   2) kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

j. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

k. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (j), apabila dapat membuktikan:
   1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   2) telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
   3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

l. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

m. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.

n. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk

by the Financial Services Authority, and/or the results of supervision by other authorities and institutions.

g. In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities the Board of Commissioners is required to form:
   1) Audit Committee
   2) Risk Monitoring Committee
   3) Remuneration and Nomination Committee

h. The Board of Commissioners is required to evaluate the performance of the committees that assist in carrying out their duties and responsibilities at the end of each financial year.

i. The Board of Commissioners along with the Board of Directors must prepare:
   1) charter that is binding each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
   2) code of ethic that applicable for all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, employees/worker, as well as supporting organs owned by the Company, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

j. Each member of the Board of Commissioners is fully and jointly responsible for the Company's losses caused by mistakes or negligence of members of the Board of Commissioners in performing their duties.

k. Members of the Board of Commissioners cannot be accounted for losses to the Company's as referred to in point (j), if they can prove:

   1) the loss is not due to his fault or negligence;

   2) performed management in good faith, full of responsibility, and prudence for the benefit and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
   3) do not have a conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in losses; and
   4) has taken action to prevent the arise and continuation of the loss.

l. The Board of Commissioners at any time during office hours of the Company has the right to enter building and yards or other places used or controlled by the Company and has the right to examine all books, letters and other evidence, examine and match the condition of cash and others and has the right to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.

m. The Board of Commissioners are entitled to request an explanation from the Board of Directors regarding all matters that are asked and each member of the Board of Directors is obliged to provide an explanation regarding all matters that are asked by the Board of Commissioners and members of the Board of Commissioners are entitled to obtain information from the Board of Directors regarding the Company in a complete and timely manner.

n. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed or if for any reason the Company does not have a single member of the Board of Directors, the Board of

sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perusahaan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

o. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perusahaan berlaku pula baginya.

p. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

q. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
   i. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan pembiayaan; dan/atau.
   ii. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

r. Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan debitur, penerima dana, konsumen, pasangan usaha, nasabah penyimpan, kreditur, pemberi dana, investor dana ventura, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

s. Komisaris Independen wajib menjabat sebagai Ketua Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keterbukaan Informasi

Dalam rangka pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:

a. Kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.

b. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

c. Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham Perusahaan dan/atau pegawai Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris menjabat.

d. Hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham Perusahaan, dan/atau pegawai Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris menjabat sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal.

e. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perseroan.

f. Jabatan mereka di perusahaan lain.

g. Informasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Commissioners are temporarily obliged to manage the Company. In such case the Board of Commissioners are entitled to grant temporary powers to one or more members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners.

o. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities given to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners in the Company's Articles of Association shall also apply to him.

p. At any time the Board of Commissioners based on a decision of the Board of Commissioners' Meeting may temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors from his position (their position) by stating the reasons, taking into account the provisions of The Company's Articles of Association and/or the prevailing laws and regulations.

q. The Board of Commissioners is required to report to OJK no later than 10 (ten) working days after the discovery of:
   i. violation of laws and regulations in the field of finance and financing; and/or
   ii. circumstances or estimates of conditions that may endanger the continuity of the Company's business.

r. The Independent Commissioner has the main task of carrying out a supervisory function to voice the interests of debtors, fund recipients, consumers, business partners, depositors, creditors, fund providers, venture fund investors, and/or other stakeholders.

s. Independent Commissioners are required to serve as Chairman of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee.

Information Disclosure

In order to fulfill the implementation of governance, members of the Board of Commisioners are required to disclose:

a. Ownership of voting rights over shares and any changes in ownership of voting rights over shares whether directly or indirectly in the Company in accordance with the provisions of regulations in the Capital Market sector.

b. Its share ownership which reaches 5% (five percent) in other companies, domiciled inside and outside the country.

c. Financial relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or shareholders of the Company and/or employees of the Company where the members of the Board of Commissioners serve.

d. Family relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or shareholders of the Company and/or employees of the Company where the member of the Board of Commissioners serves up to the second degree, both horizontally and vertically.

e. Remuneration and facilities received from the Company.

f. Their position in another company.

g. Other Information in accordance to the prevailing provision and regulation applicable to the Company.

Nilai-Nilai dan Etika Kerja

a. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
b. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.
c. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perseroan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.
d. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
e. Anggota Dewan Komisaris dilarang mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi.
f. Anggota Dewan Komisaris dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Anggota Dewan Komisaris dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya, keluarga, dan/atau pihak lain dengan melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.
h. Dewan Komisaris wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.
i. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

a. Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

   Prosedur penilaian dilakukan dengan penilaian mandiri oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
   Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagaimana berikut:
   1. Kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris;
   2. Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
   3. Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan Komite;
   4. Kehadiran dalam rapat Komite; dan
   5. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Values and Work Ethics

a. Members of the Board of Commissioners must have high integrity, ability, knowledge, experience according to their field of work and be able to communicate well.
b. Members of the Board of Commissioners are prohibited from conducting transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company where the said member of the Board of Commissioners serves.
c. Members of the Board of Commissioners are prohibited from using their positions in the Company where the said member of the Board of Commissioners serve for personal, family, and/or other party' interests that may harm or reduce the profits of the Company where the said member of the Board of Commissioners serve.
d. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and/or receiving personal benefits either directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.
e. Members of the Board of Commissioners are prohibited from interfering with the Company's operational activities which are the responsibility of the Board of Directors.
f. Members of the Board of Commissioners are prohibited from offering or giving anything, either directly or indirectly, to another party, to influence decision-making related to the Company's business activities, in violation of statutory provisions.
g. Members of the Board of Commissioners are prohibited from accepting anything for their personal interests, their families' interests, and/or other parties' interests in violation of the provisions of laws and regulations, either directly or indirectly, from anyone, which may influence decision-making related to the Company's business activities.
h. The Board of Commissioners is obliged to ensure effective, appropriate and fast decision-making and can act independently in carrying out its duties.
i. Any member of the Board of Commissioners is required to carry out his duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.

Evaluation of The Board of Commissioners Performance

a. Procedures for the Implementation of the Board of Commissioners Performance Evaluation
   The assessment procedure is carried out by using self-assessment method by the Board of Commissioners with due observance of recommendation from the Nomination and Remuneration Committee.
b. Board of Commissioners Performance Assessment Criteria
   Assessment of the performance of the Board of Commissioners includes the following matters:
   1. Attendance at internal Board of Commissioners meetings;
   2. Attendance at Board of Commissioners meetings with the Board of Directors;
   3. Attendance at Board of Commissioners meetings with Committees;
   4. Attendance at Committee meetings; and
   5. Implementation of the principles of Good Corporate Governance.

c. Pihak yang melakukan penilaian
Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
b. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
c. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
d. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b) dan butir (c) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
e. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
f. Jumlah Rapat dan kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b), butir (c) dan butir (e) wajib diungkapkan dalam laporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
g. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dan butir (e) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
h. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir (g) bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
i. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir (g), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
j. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
k. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

c. The party conducting the assessment
The parties involved in evaluating the performance of the Board of Commissioners are the Board of Commissioners with due observance of recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

Board of Commissioners Meetings

a. The Board of Commissioners Meeting may be held at any time when it is considered necessary by one or more member (s) of the Board of Commissioners or at a written request of the Board of Directors or on a request of 1 (one) or more of shareholder collectively representing 1/10 (one tenth) part or more of total number of shares issued by the Company with valid voting.
b. Meeting of the Board of Commissioners is held periodically at least 1 (one) time in 2 (two) months.
c. Members of the Board of Commissioners must attend the meetings of the Board of Commissioners at least 75% (seventy five percent) of the total number of meetings of the Board of Commissioners in a period of 1 (one) year.
d. The Board of Commissioners meeting as referred to point (a), point (b) and point (c) may be held if attended by the majority of all members of the Board of Commissioners.
e. The Board of Commissioners is required to hold the Board of Commissioners Meeting with Board of Directors periodically at least 1 (one) time in 3 (three) months.
f. The number of Meetings and the presence of members of the Board of Commissioners at the meeting as referred to point (a), point (b), point (c) and point (e) must be disclosed in the report in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.
g. The Board of Commissioners must schedule a meeting as referred to point (b) and point (e) for the following year before the end of the financial year.
h. At the scheduled meeting as referred to point (g), the meeting materials are submitted to the participants at least 5 (five) days before the meeting is held.
i. In the event of an out-of-schedule meeting that has been prepared as referred to in point (g), the meeting materials are submitted to the meeting participants no later than before the meeting is held.
j. Summons for the Board of Commissioners Meeting shall be conducted by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent due to any reason, which does not need to be proven to the third party, then one member of the Board of Commissioners has the rights and authority to summon the Board of Commissioners Meeting.
k. Summons for the Board of Commissioners Meeting must be sent by any means in written form, which invitation must be sent to the members of the Board of Commissioners no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held or in a shorter time in urgent circumstances, namely no later than 1 (one) calendar day before the Meeting is held, excluding the date of invitation and the date of the Meeting, the urgency is determined by the President Commissioner. If all members of the Board of Commissioners are present at the Meeting, prior summons is not required.

l. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

m. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dan hasil keputusan Rapat disetujui oleh semua anggota Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

n. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.

o. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

p. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilnya.

q. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam satu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

r. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

s. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

t. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (a), butir (b) dan butir (c) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

u. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (e) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

v. Perbedaan pendapat *(dissenting opinions)* yang terjadi dalam keputusan Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan

l. Summons shall mention the agenda, date, time and place of the Meeting.

m. The Board of Commissioners Meeting shall be held in the Company's domicile or at the place of business activity or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at other places within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Commissioners are present or represented and the resolutions of the Meeting are approved by all members of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners Meeting may be held at another place as determined by the Board of Commissioners and the Meeting has the right to make a legal and binding resolution.

n. The Board of Commissioners Meeting shall be chaired by the President Commissioner, if the President Commissioner is absent or indisposed, of which the matter should not be proved to the third party, the Meeting shall be chaired by a person elected among members of the Board of Commissioners who are present.

o. A member of the Board of Commissioners may be represented at the Meeting only by another member of the Board of Commissioners based on power of attorney.

p. Each member of the Board of Commissioners has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners who is represented by him/her.

q. Any member of the Board of Commissioners who personally in any way either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is one of the parties must state the nature of interest in a Board of Commissioners Meeting and is not entitled to participate in the voting on matters relating to the transaction or contract, unless the Board of Commissioners' Meeting determined otherwise.

r. Voting regarding individuals is carried out by closed ballot without a signature, while voting on other matters is carried out verbally unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise without any objections from those present.

s. Decision making of the Board of Commissioners meeting must be made based on deliberation and consensus. In the event that deliberation and consensus does not occur than the decision is made based on the majority of votes.

t. The results of the meeting as referred to in point (a), point (b) and point (c) must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Commissioners who present, and submitted to all members of the Board of Commissioners.

u. The results of the meeting as referred to point (e) must be stated in the minutes of the meeting, signed by the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who present, and submitted to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

v. Dissenting opinions that occur in the decisions of the Board of Commissioners Meeting must be clearly stated in the minutes of the Board of Commissioners Meeting along with

Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat *(dissenting opinions)* tersebut.

w. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.

x. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir (t) dan butir (u), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

y. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir (t) dan butir (u) wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

z. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

aa. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

the reasons for the dissenting opinions.

w. Members of the Board of Commissioners of the Company who are either present or not present at the meeting of the Board of Commissioners are entitled to receive a copy of the minutes of the Board of Commissioners Meeting.

x. In the event that a member of the Board of Commissioners does not sign the results of the meeting as referred to in point (t) and point (u), the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.

y. The minutes stated in point (t) and point (u) must be documented by the Company.

z. The Board of Commissioners can also take legal and binding resolution without holding a meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board Commissioners have been notified in writing of the proposals concerned and all members of the Board of Commissioners give their approval of the proposal submitted in writing and sign the approval. The resolution made in this way have the same strength as resolutions made legally at a meeting of the Board of Commissioners.

aa. Meetings of the Board of Commisioners may also be conducted through teleconferencing media, video conference, or other means of electronic media that allow all participants in the Board of Commisioners Meeting to see and/or hear each other directly and participate in the Board of Commisioners Meeting, with provision of the minutes of the Meeting which use conference calls or similar communication equipment will be made in writing and circulated among all members of the Board of Commisioners meeting participated in the meeting, to be signed. Resolutions made in this way have the same power as resolutions taken legally at a meeting of the Board of Commisioners.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025

Frequency of Board of Commissioners Meeting Year 2025

Nama Name	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting		Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Joint Board of Commissioners Meeting with Board of Directors	
	Kehadiran Attendance	Rasio Kehadiran Attendance Ratio	Kehadiran Attendance	Rasio Kehadiran Attendance Ratio
Yasuo Imaizumi	7/7	100.00%	8/8	100.00%
Bhindawati Gunawan	6/7	86.00%	6/8	75.00%
Mohammad Syahrial*	6/7	86.00%	7/8	87.50%
Dani Hamdani*	-	-	-	-

*) Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2025, RUPS menyetujui pemberhentian Mohammad Syahrial selaku Komisaris Independen dan menyetujui pengangkatan Dani Hamdani selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Perseroan
Based on the Extraordinary GMS held on 23 December 2025, the GMS approved the dismissal of Mohammad Syahrial from his position as Independent Commissioner and approved the appointment of Dani Hamdani as Independent Commissioner, effective as of the closing of the Company's Extraordinary GMS.

Pelatihan Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, maka sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan-pelatihan, antara lain:

Board of Commissioners Trainings

In order to expand their knowledge and competence, throughout 2025, the Board of Commissioners had participated in several trainings, including:

Nama Name	Pelatihan Dewan Komisaris The Board of Commissioners Trainings		
	Pelatihan Trainings	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Yasuo Imaizumi	*Strengthening Multifinance Resilience Amidst Economic Slowdown And Regulatory Shifts*	12 Dec 2025	APPI
Bhindawati Gunawan	Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 Dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru	4 Feb 2025	APPI
	Peran GRC Dalam Meningkatkan Kepercayaannya Investor Dan Stabilitas Sektor Keuangan	25 Feb 2025	OJK
	Meneropong Masa Depan Pasar Emas Indonesia : Peran Strategis *Bullion Bank*	17 Apr 2025	OJK
	Agentic Ai In Finance A New Era Of Autonomous Decision Making	3 Jul 2025	OJK
	Mid-Year Market Capital Review 2025 : Evaluasi Kinerja Pasar Dan Strategi Investasi Ke Depan	7 Aug 2025	OJK
	Tren Modus Dan Skema Pencucian Uang Terbaru : Strategi Identifikasi, Mitigasi Dan Penegakan Hukum	18 Sep 2025	OJK
Mohammad Syahrial*	Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 Dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru	4 Feb 2025	APPI

*) Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2025, RUPS menyetujui pemberhentian Mohammad Syahrial selaku Komisaris Independen dan menyetujui pengangkatan Dani Hamdani selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Perseroan
Based on the Extraordinary GMS held on 23 December 2025, the GMS approved the dismissal of Mohammad Syahrial from his position as Independent Commissioner and approved the appointment of Dani Hamdani as Independent Commissioner, effective as of the closing of the Company's Extraordinary GMS.

Penilaian Kinerja Komite-Komite yang Berada di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja masing-masing komite di bawah Dewan Komisaris yang diselenggarakan setiap tahun berdasarkan laporan yang di buat secara mandiri oleh masing-masing komite. Hasil penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Performance Assessment of Committees Under The Board of Commissioners

The Board of Commissioners conducts an annual performance assessment of each committee under the Board of Commissioners based on reports prepared independently by each committee. The results of the performance assessment of the committees under the Board of Commissioners are presented by the Board of Commissioners in the Company's Annual Report.



Direksi
Board of Directors

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

The Board of Directors is an organ of the Company that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the interests of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court, in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company.

Komposisi Direksi

Board of Directors Composition

Nama Name	Jabatan Position	Uji Kemampuan & Kepatutan Fit & Proper Test
Takeshi Kurioka	Direktur Utama President Director	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-302/PL.02/2025 21 Oct 2025
Kenjiro Sawada	Direktur Director	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-118/PL.02/2025 05 Jun 2025
Andi Harjono	Direktur Director	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-355/NB.11/2019 27 Jun 2019
Yudi Gustiawan	Direktur Director	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-653/NB.11/2019 5 Nov 2019
Fransisca Yuliana Gunawan	Direktur Director	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-273/PL.02/2025 30 Sep 2025
Ryuji Tarumi	Direktur Director	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-301/PL.02/2025 20 Oct 2025
Konosuke Mizuta*)	Direktur Utama President Director	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-354/NB.11/2019 27 Jun 2019
Shunsuke Kojima**)	Direktur Director	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-363/NB.11/2019 27 Jun 2019

*) Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2025, RUPS menyetujui pengunduran diri Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Perseroan.
Based on the Extraordinary GMS held on 23 December 2025, the GMS approved the resignation of Konosuke Mizuta from his position as President Director, effective as of the closing of the Company's Extraordinary GMS.

**) Masa jabatan selaku Direktur Perseroan telah berakhir pada tanggal 23 Juni 2025.
The term of office as Director of the Company ended on 23 June 2025.

Piagam Direksi

Direksi memiliki Piagam yang dikaji ulang secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali atau dilakukan pengkinian disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Piagam tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dari Direksi, maka Perseroan telah menyusun Piagam Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor DIR-003/TK-CORSEC/SKD/XII/22 tanggal 23 Desember 2022.

Hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, Perseroan telah melakukan penyesuaian Piagam Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor DIR-001/SKD-MLI/IV/26 tanggal 27 April 2026 yang dapat diakses melalui *website* Perseroan. Adapun penyesuaian ini ditujukan untuk penyelarasan dengan Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Board of Directors Charter

The Board of Directors has Charter which will be reviewed periodically every 2 (two) years or updated in accordance with the applicable laws and regulations. That Charter is binding for each members of the Board of Directors.

To support the implementation of the Board of Directors duties, the Company has established the Board of Directors Charter pursuant to the Board of Directors Decree Number DIR-003/TK-CORSEC/SKD/XII/22 dated 23 December 2022.

As of the issuance of this Annual Report, the Company has updated the Board of Directors Charter based on the Board of Directors Decree Number DIR-001/SKD-MLI/IV/26 dated 27 April 2026, which can be accessed through the Company's website. The adjustment was made to align with OJK Regulation Number 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.

Dasar penyusunan Piagam Direksi sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
3. Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.06/2025 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
4. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Peraturan OJK Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuagan Lainnya;
7. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
8. Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015 Tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
10. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
11. Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

Struktur dan Keanggotaan Direksi

a. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
   - 1 (satu) orang Direktur Utama;
   - 2 (dua) orang Direktur atau lebih;

   Dengan memperhatikan ketentuan bahwa paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi merupakan warga negara Indonesia dan seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia serta memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
b. Bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki:
   - izin menetap; dan
   - izin bekerja,

   dari instansi berwenang.
c. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak boleh dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pembiayaan, fungsi pemasaran, dan fungsi keuangan dan akuntansi.

The basis for the preparation of the Board of Directors Charter are as follows:

1. The Company's Article of Association;
2. Financial Services Authority ("OJK") Regulation Number 48 Year 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institution, and Other Financial Services Institutions;
3. OJK Circular Letter Number 28/SEOJK.06/2025 concerning the Report on the Implementation of Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institution;
4. OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
5. OJK Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company;
6. OJK Regulation Number 42 Year 2024 concening the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions;
7. OJK Regulation Number 4/POJK.05/2021 concerning Implementation of Risk Management in the use of Information Technology by Non Bank Financial Services Institusion;
8. OJK Regulation Number 8/POJK.04/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies;
9. OJK Regulation Number 29/POJK.04/2016 concerning Annual Report of Issuers or Public Companies;
10. OJK Circular Letter Number 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies; and
11. OJK Regulation Number 4 Year 2024 concerning Reports of Ownership or any Changes in Ownership of Public Company Share and Reports on Activities of Pledging Public Company Shares.

Board of Directors Structure and Membership

a. Board of Directors is at least 3 (three) people who is consisting of:
   - 1 (one) President Director;
   - 2 (two) Directors or more

   Taking into account the provision that at least 50% (fifty percent) of members of the Board of Directors are Indonesian citizens and all members of the Board of Directors must be domiciled in the territory of the Republic of Indonesia as well as taking into account the regulations applicable in the Capital Market sector.
b. For members of the Board of Directors with foreign citizenship, it is mandatory to have:
   - residence permit; and
   - work permit,

   from the authorized agency.
c. The member of the Board of Directors who is responsible for the compliance function can not concurrently held by the member of the Board of Directors who is responsible for the financing function, marketing function, and finance and accounting function.

d. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
   1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
   2. cakap melakukan perbuatan hukum
   3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      a. tidak pernah dinyatakan pailit
      b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
      c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
      d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
         i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
         ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
         iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK
   4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
   5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
e. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam butir (d), anggota Direksi wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
f. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/ atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
g. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
h. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan :
   1. sebagai anggota Direksi dan/atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain;
   2. sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) perusahaan dan/atau lembaga lain;
   3. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi.

d. Those who can be appointed as members of the Board of Directors are individuals who meet the requirements when appointed during their tenure:
   1. having good character, morals and integrity
   2. capable to take legal acts
   3. within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:
      a. never been declared bankrupt
      b. never been a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt
      c. never been convicted of committing a crime that caused losses to state finances and / or related to the financial sector; and
      d. never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who during the term of office:
         i. ever not holding the annual GMS;
         ii. his accountability as a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never given accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS; and
         iii. has caused a company that obtained a license, approval, or registration from OJK to fail in fulfiling its obligation to submit an annual report and/or financial report to OJK
   4. having commitment to comply with laws and regulations; and
   5. having knowledge and/or expertise in the fields required by the Company
e. In addition to meet the requirements as listed in point (d), members of the Board of Directors shall follow the provisions of other laws and regulations.
f. Any proposed appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders must take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.
g. Each member of the Board of Directors must meet the requirements to pass the fit and proper test in accordance with OJK Regulations regarding the fit and proper test.
h. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions:
   1. as members of the Board of Directors and /or executive officers in other companies and/or institutions;
   2. as a member of the Board of Commissioners in at more than 2 (two) other companies and/or institutios;
   3. in other positions that may give rise to a conflict of interest in carrying out duties as a member of the Board of Directors.

i. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

j. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal anggota Direksi:

1. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Perusahaan pada perusahaan anak, yang menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada perusahaan anak yang dikendalikan oleh Perusahaan;
2. merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh asosiasi;
3. merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi dewan komisaris pada Keuangan; dan/atau;
4. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba,

sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi.

k. Pelaksanaan tugas anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada:
   a. butir (j) angka (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris; dan/atau
   b. butir (j) angka (4) dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

l. Terhadap anggota Direksi yang akan menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada butir (j) angka (1) dan/atau butir (j) angka (4), wajib membuat pernyataan untuk:
   1. menjaga integritas;
   2. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
   3. menghindari tindakan yang dapat merugikan Perseroan dan/atau menyebabkan Perseroan melanggar prinsip kehati-hatian,

   selama menjabat sebagai anggota Direksi.

m. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat mereka pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar.

n. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

o. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:

i. Members of the Board of Directors may hold concurrent positions as a member of the Committee in at most 5 (five) committees in the Issuer or Public Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.

j. Excluding concurrent in the case of members of the Board of Directors:
   1. responsible for supervising the Company participation in subsidiary companies, carrying out functional duties as a member of the board of commissioners in subsidiary companies controlled by the Company;
   2. is an association administrator who carries out functional duties as a member of the board of commissioners in a subsidiary company controlled by the association;
   3 is an association administrator who carries out functional duties as a board of commissioners at an institution based on the appointment of the Financial Services Authority; and/or
   4. occupying a position in a non-profit organization or institution,

   as long as the concurrent position does not result in the person concerned neglecting the implementation of duties and authorities as a member of the Board of Directors.

k. Implementation of the duties of members of the Board of Directors as referred to in:
   a. point (j) number (1) must obtain approval from the Board of Commissioners; and/or
   b. point (j) number (4) is reported to the Board of Commissioners.

l. Members of the Board of Directors who will occupy the positions as referred to in point (j) number (1) and/or point (j) number (4) are required to make a statement to:
   1. maintain integrity;
   2. avoid all forms of conflict of interest; and
   3. avoid actions that could harm the Company and/or cause the Company to violate the principle of prudence,

   during his/her tenure as a member of the Board of Directors.

m. Members of the Board of Directors are appointed for a period commencing as of the date determined by the GMS which appointed them and ending at the closing of the 3rd (third) Annual GMS which was held after the date of the GMS that appointed them at the end of 1 (one) term of office as referred to provisions 1 (one) term of office of members of the Board of Directors is 3 (three) years, taking into account of laws and regulations in the Capital Market, however, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Directors at any time before his term of office ends, taking into account the the applicable laws and regulations and the provisions of the Company's Articles of Association.

n. After their term of office end, the member of the Board of Directors may be reappointed in accordance with a resolution of the GMS.

o. The term of office of a member of the Board of Directors automatically ends, if the member of the Board of Directors:

1. Meninggal dunia;
2. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

p. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan yang berlaku, Anggota Direksi memiliki Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang sebagai berikut :

a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

b. Anggota Direksi Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan internal Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

c. Direksi wajib memastikan agar Perseroan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

d. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris secara akurat, relevan dan tepat waktu.

e. Membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ Perseroan.

f. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.

g. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direksi wajib membentuk komite manajemen risiko dan komite pengarah teknologi informasi.

h. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

i. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:

   1. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

1. Pass away;
2. Be placed under interdiction based on a court resolution; or
3. No longer fulfills the requirements of the prevailing laws by taking into account the regulations in the capital market.

p. If the position of a member of the Board of Directors is vacant due to any reason that causes the number of members of the Board of Directors to be less than 3 (three) people, then at the latest 90 (ninety) calendar days after the vacancy, a GMS must be held for filling the vacancy, taking into account the prevailing laws and regulations in the Capital Market.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors

Referring to the Company's Articles of Association and the provisions of the applicable laws and regulations, members of the Board of Directors have the following Duties, Responsibilities and Authorities:

a. The Board of Directors is in charge of running and being responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company as stipulated in the Articles of Association.

b. Members of the Company's Board of Directors are required to comply to the laws and regulations, the Company's Articles of Association and the Company's internal regulations. In carrying out the duties and responsibilities for the management, the Board of Directors is required to hold an annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association.

c. Board of Directors is required to ensure that the Company's pay attention to the interests of all parties, especially the interests of Debtors, creditors, and/or other Stakeholders in good faith and with the principle of prudence in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS.

d. The Board of Directors is obliged to ensure that information regarding the Company is provided to the Board of Commissioners in an accurate, relevant and timely manner.

e. Assist and provide facilities and/or resources for the smooth implementation of the duties and authorities of the Company organs.

f. The Board of Directors is required to follow up on audit findings or examinations and recommendations from the Company internal audit work unit, external auditors, OJK supervision results, and/or supervision results from other authorities and institutions.

g. In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities the Board of Directors required to form a risk management committee and an information technology steering committee.

h. In case of forming a committee, the Board of Directors is required to evaluate the performance of the committee at the end of each fiscal year.

i. The Board of Directors along with the Board of Commissioners must prepare:

   1. The Charter that is binding each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, in accordance with the provision of the applicable laws and regulations.

2. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

j. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

k. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir (j), apabila dapat membuktikan:
   1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

l. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam butir (m) di bawah ini.

m. Direksi mewakili Perseroan sebagaimana yang terdapat pada butir (l), akan tetapi dengan pembatasan untuk:
   1. menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perusahaan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau
   2. mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perusahaan yang telah dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau
   3. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
   4. memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah;
   5. memperoleh atau melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain;
   6. memberikan jaminan perusahaan *(corporate guarantee)* untuk kepentingan pihak lain;
   7. menerima pinjaman uang dari siapapun;
   8. memberikan pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

   harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan

2. Code of ethic that applicable for all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees/worker, as well as supporting organs owned by the Company, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

j. Each member of the Board of Directors is fully and jointly responsible for the Company's losses caused by mistakes or negligence of members of the Board of Directors in performing their duties.

k. Members of the Board of Directors cannot be accounted for losses to the Company as referred to in point (j), if they can prove:
   1. the loss is not due to his fault or negligence;
   2. performed the management in good faith, full of responsibility, and prudence for the benefit and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
   3. do not have any conflict of interest, either directly or indirectly, over management action that result in losses; and
   4. has taken action to prevent the arise and continuation of the loss.

l. The Board of Directors legally and directly represent the Company both inside and outside the court on all matters and in all events, binding the Company with other parties and other parties with the Company and performing all actions, both regarding management and ownership, with the restrictions as specified in the point (m) below.

m. The Board of Directors represent the Company as referred to in point (l), but with limitation for:
   1. deleting or removal the Company's receivables from the books exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; or
   2. transferring or releasing the Company's right to collect the Company's written-off receivables, exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; or
   3. selling or transferring or relinquishing the rights, or pledge/guarantee the Company's assets, either in one transaction or in several independent or related transactions, in the exceeding amount of as determined from time to time by the Board of Commissioners;
   4. obtaining by any means immovable property, including land rights;
   5. obtaining or releasing equity participation in other companies;
   6. providing a corporate guarantee for the benefit of another party;
   7. receiving the loan from anyone;
   8. providing the loan to anyone except in the context of carrying out the Company's business activities.

   shall obtain a prior written approval from or the relevant deed is also signed by the Board of Commissioners, such approval can be given to take one action or more than one action and from time to time it can be reviewed, taking into

dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal.
Ketentuan pada butir (m) ini tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam butir (n) dibawah ini.

n. Perbuatan hukum untuk (1) mengalihkan atau melepaskan hak atau (2) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perusahaan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perusahaan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

o. Perbuatan hukum:
   1. untuk melakukan Transaksi Material, tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   2. untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

p. 1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
   2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

q. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

r. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

s. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
   1. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
   2. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

t. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana butir (s) diatas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
   1. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
   2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi

account the regulations in the Capital Market sector.
The provisions in point (m) do not reduce what is specified in point (n) below.

n. Legal acts to (1) transfer or to relinquish rights or (2) guarantee the debt of all or most of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether they are related to each other or not and the transaction as referred to is a transfer of the Company's net assets that occurs within a period of 1 (one) fiscal year, shall obtain approval of the GMS with the prevailing terms and conditions.

o. Legal Acts:
   1. to perform Material Transaction, subject to OJK Regulations regulating Material Transactions and changes in the business activity by taking into account the provision of the applicable laws and regulations;
   2. to conduct Affiliated and Conflicts of Interest Transactions subject to OJK Regulations regulating Affiliated and Conflicts of interest Transactions by taking into account the provision of the applicable laws and regulations.

p. 1. The President Director has the rights and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company;
   2. In the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason whatsoever, which does not need to be proven to the third party, then 2 (two) other members of the Board of Directors has the rights and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.

q. Distribution of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the GMS, in the event that the GMS does not determine, then distribution of duties and authorities of each member of the Directors is determined based on the resolution of Meeting of the Board of Directors.

r. If something is occurred where the Company's interests conflict with the personal interests of a member of the Board of Directors, then the Company will be represented by another member of the Board of Directors who has no conflict of interest and in the event that the Company has conflict of interest with the interests of all members of the Board of Directors, then in this case the Company will be represented by the Board of Commissioners or someone who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that there is no member of the Board of Commissioners, the GMS appoints one or more persons to represent the Company in performing the tasks as mentioned above.

s. The member of the Board of Directors is not authorized to represent the Company if:
   1. there is a case in the court between the Company and the relevant member of the Board of Directors; and
   2. The relevant member of the Board of Directors concerned has a conflict of interests with the Company's interest.

t. In the event that there is a conditions as referred to point (s) above, those entitled to represent the Company are:
   1. other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;
   2. the Board of Commissioners in case all members of

mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

3. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

u. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

v. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.

w. Larangan sebagaimana dimaksud pada butir (v) tidak berlaku untuk penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional dengan ketentuan:
   1. untuk proyek bersifat khusus;
   2. berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas;
   3. dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus dalam angka 1;
   4. dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Perseroan; dan
   5. dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Perseroan.

the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or

3. other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.

u. Members of the Board of Directors are prohibited grant general power to attorney party resulting in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.

v. The Board of Directors is prohibited from using individual advisors and/or professional services as experts or consultants.

w. The prohibition as referred to in point (v) does not apply to the use of individual advisors and/or professional services provided that:
   1. for special projects;
   2. based on a clear employment contract;
   3. carried out by an Independent Party who has certain technical knowledge with adequate skill qualification standards to work on special projects as referred to in number 1;
   4. carried out by parties who do not hold structural positions in the Company; and
   5. implemented by parties who do not have the authority to make operational decisions for the Company.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Takeshi Kurioka	Direktur Utama President Director	1. Bertanggung jawab dalam pengelolaan Perseroan dengan memastikan fungsi audit internal sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai, Anggaran Dasar Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Responsible for managing the Company by ensuring that the internal audit function is aligned with the Company's vision, mission, values, and Articles of Association, while complying with prevailing laws and regulations and adhering to the principles of Good Corporate Governance. 2. Bersama dengan anggota Direksi lain, bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Together with other members of the Board of Directors, responsible for the implementation of sustainable finance. 3. Memastikan pelaporan Perseroan kepada otoritas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. To ensure that the Company's reporting to the authorities is submitted in a complete and timely manner. 4. Mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam angka (5) di bawah ini; To legally represent the Company and act on its behalf, both in and out of court, in all matters and under all circumstances; to bind the Company with other parties and vice versa; and to carry out all actions, whether related to management or ownership, subject to the limitations as stipulated in point (5) below; 5. Mewakili Perseroan sebagaimana yang terdapat pada angka (4), akan tetapi dengan pembatasan untuk : To represent the Company as referred to in point (4), subject to the following limitations: a. Menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau To write off or remove the Company's receivables from the books in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners; or b. Mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau To assign or waive the Company's rights to collect receivables that have been written off, in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners; or c. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; To sell, transfer, dispose of, or encumber the Company's assets, whether in a single transaction or in multiple separate or related transactions, in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners;

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
		d. Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah; To acquire immovable property by any means, including land rights; e. Memperoleh atau melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain; To acquire or dispose of equity participation in other companies; f. Memberikan jaminan perusahaan *(corporate guarantee)* untuk kepentingan pihak lain; To provide a corporate guarantee for the benefit of other parties; g. Menerima pinjaman uang dari siapapun; To obtain loans from any party; h. Memberikan pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan; To provide loans to any party, except in the ordinary course of the Company's business; Harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal. Ketentuan pada angka (5) ini tidak mengurangi apa yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Shall obtain a prior written approval from or the relevant deed is also signed by the Board of Commissioners, such approval can be given to take one action or more than one action and from time to time it can be reviewed, taking into account the regulations in the Capital Market sector. The provisions under point (5) shall not prejudice the applicable laws and regulations. 6. Bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jointly and severally responsible for the Company's losses caused by the mistakes or negligence of members of the Board of Directors in performing their duties.
Konosuke Mizuta*	Direktur Utama President Director	1. Bertanggung jawab dalam pengelolaan Perseroan dengan memastikan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, legal korporasi, *corporate strategic planning*, *business processing,* sekretaris perusahaan dan hubungan investor sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai, Anggaran Dasar Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Responsible for the management of the Company by ensuring the functions of risk management, compliance, internal audit, anti-money laundering implementation, Prevention of Financing Terrorism and Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons, consumer protection, personal data protection, corporate legal, corporate strategic planning, business processing, corporate secretary, and investor relations are aligned with the Company's vision, mission, values, Articles of Association, in compliance with applicable laws and regulations, and the application of the principles of Good Corporate Governance. 2. Bersama dengan anggota Direksi lain, bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Together with other members of the Board of Directors, responsible for the implementation of sustainable finance. 3. Memastikan pelaporan Perseroan kepada otoritas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. To ensure that the Company's reporting to the authorities is submitted in a complete and timely manner. 4. Mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam angka (5) di bawah ini; To legally represent the Company and act on its behalf, both inside and outside of court, in all matters and under all circumstances; to bind the Company with other parties and vice versa; and to carry out all actions, whether related to management or ownership, subject to the limitations as stipulated in point (5) below; 5. Mewakili Perseroan sebagaimana yang terdapat pada angka (4), akan tetapi dengan pembatasan untuk : To represent the Company as referred to in point (4), subject to the following limitations: a. Menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau To write off or remove the Company's receivables from the books in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners; or b. Mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau To assign or waive the Company's rights to collect receivables that have been written off, in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners; or c. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; To sell, transfer, dispose of, or encumber the Company's assets, whether in a single

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
		transaction or in multiple separate or related transactions, in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners; d. Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah; To acquire immovable property by any means, including land rights; e. Memperoleh atau melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain; To acquire or dispose of equity participation in other companies; f. Memberikan jaminan perusahaan *(corporate guarantee)* untuk kepentingan pihak lain; To provide a corporate guarantee for the benefit of other parties; g. Menerima pinjaman uang dari siapapun; To obtain loans from any party; h. Memberikan pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan; To provide loans to any party, except in the ordinary course of the Company's business; Harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal. Ketentuan pada angka (5) ini tidak mengurangi apa yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Shall obtain a prior written approval from or the relevant deed is also signed by the Board of Commissioners, such approval can be given to take one action or more than one action and from time to time it can be reviewed, taking into account the regulations in the Capital Market sector. The provisions under point (5) shall not prejudice the applicable laws and regulations. 6. Bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jointly and severally responsible for the Company's losses caused by the mistakes or negligence of members of the Board of Directors in performing their duties.
Andi Harjono	Direktur Director	1. Bertanggung jawab dalam implementasi strategi Perseroan khususnya dalam bidang *Digital Tansformation Promotion, Infrastructure Control and Development* serta Sumber Daya Manusia; Responsible for the implementation of the Company's strategy, particularly in the areas of Digital Transformation Promotion, Infrastructure Control and Development, as well as Human Resources; 2. Memastikan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan organisasi Perseroan sejalan dengan arah bisnis Perseroan; To ensure that the development of human capital quality and organizational development are aligned with the Company's business direction; 3. Mendukung program keuangan berkelanjutan melalui pelaksanaan program literasi keuangan; To support sustainable finance programs through the implementation of financial literacy initiatives; 4. Memastikan pelaporan Perseroan kepada otoritas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; To ensure that the Company's reporting to the authorities is submitted in a complete and timely manner; 5. Bersama-sama dengan Direktur lain mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam angka (6) di bawah ini; Jointly with other Directors, to legally represent the Company and act on its behalf, both in and out of court, in all matters and under all circumstances; to bind the Company with other parties and vice versa; and to carry out all actions, whether related to management or ownership, subject to the limitations as stipulated in point (6) below; 6. Mewakili Perseroan sebagaimana yang terdapat pada angka (5), akan tetapi dengan pembatasan untuk : To represent the Company as referred to in point (5), subject to the following limitations: a. Menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau To write off or remove the Company's receivables from the books in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners; or b. Mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau To assign or waive the Company's rights to collect receivables that have been written off, in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners; or c. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; To sell, transfer, dispose of, or encumber the Company's assets, whether in a single transaction or in multiple separate or related transactions, in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners;

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
		d. Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah; To acquire immovable property by any means, including land rights; e. Memperoleh atau melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain; To acquire or dispose of equity participation in other companies; f. Memberikan jaminan perusahaan *(corporate guarantee)* untuk kepentingan pihak lain; To provide a corporate guarantee for the benefit of other parties; g. Menerima pinjaman uang dari siapapun; To obtain loans from any party; h. Memberikan pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan; To provide loans to any party, except in the ordinary course of the Company's business; Harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal. Ketentuan pada angka (6) ini tidak mengurangi apa yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Shall obtain a prior written approval from or the relevant deed is also signed by the Board of Commissioners, such approval can be given to take one action or more than one action and from time to time it can be reviewed, taking into account the regulations in the Capital Market sector. The provisions under point (6) shall not prejudice the applicable laws and regulations; 7. Bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jointly and severally responsible for the Company's losses caused by the mistakes or negligence of members of the Board of Directors in performing their duties.
Yudi Gustiawan	Direktur Director	1. Bertanggung jawab dalam merumuskan strategi pengembangan bisnis dan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis khususnya pada Unit. Bisnis Ritel termasuk menjalankan fungsi pemasaran dan penyaluran pembiayaan; Responsible for formulating business development strategies and achieving targets set out in the business plan, particularly within the Retail Business Unit, including carrying out marketing functions and financing disbursement; 2. Memastikan proses analisa kredit dan operasional dalam Unit Bisnis Ritel telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; To ensure that credit analysis and operational processes within the Retail Business Unit are conducted in accordance with applicable policies and regulations; 3. Memastikan pelaksanaan mekanisme penindaklanjutan pengaduan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; To ensure the implementation of consumer complaint handling mechanisms in accordance with prevailing laws and regulations; 4. Bertanggung jawab dalam manajemen aset, fungsi penagihan hingga penyelesaian perkara litigasi Perseroan khususnya terkait dengan konsumen Unit Bisnis Ritel; Responsible for asset management, collection functions, and the resolution of the Company's litigation cases, particularly those related to Retail Business Unit customers; 5. Mendukung program keuangan berkelanjutan melalui pengembangan produk keuangan berkelanjutan dan pelaksanaan program inklusi keuangan; To support sustainable finance programs through the development of sustainable financial products and the implementation of financial inclusion programs; 6. Memastikan pelaporan Perseroan kepada otoritas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; To ensure that the Company's reporting to the authorities is submitted in a complete and timely manner; 7. Bersama-sama dengan Direktur lain mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam angka (8) di bawah ini; Jointly with other Directors, to legally represent the Company and act on its behalf, both in and out of court, in all matters and under all circumstances; to bind the Company with other parties and vice versa; and to carry out all actions, whether related to management or ownership, subject to the limitations as stipulated in point (8) below; 8. Mewakili Perseroan sebagaimana yang terdapat pada angka (7), akan tetapi dengan pembatasan untuk : To represent the Company as referred to in point (7), subject to the following limitations: a. Menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau To write off or remove the Company's receivables from the books in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners; or b. Mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau To assign or waive the Company's rights to collect receivables that have been written off, in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners; or c. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
		yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; To sell, transfer, dispose of, or encumber the Company's assets, whether in a single transaction or in multiple separate or related transactions, in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners; d. Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah; To acquire immovable property by any means, including land rights; e. Memperoleh atau melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain; To acquire or dispose of equity participation in other companies; f. Memberikan jaminan perusahaan *(corporate guarantee)* untuk kepentingan pihak lain; To provide a corporate guarantee for the benefit of other parties; g. Menerima pinjaman uang dari siapapun; To obtain loans from any party; h. Memberikan pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan; To provide loans to any party, except in the ordinary course of the Company's business; Harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal. Ketentuan pada angka (8) ini tidak mengurangi apa yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Shall obtain a prior written approval from or the relevant deed is also signed by the Board of Commissioners, such approval can be given to take one action or more than one action and from time to time it can be reviewed, taking into account the regulations in the Capital Market sector. The provisions under point (8) shall not prejudice the applicable laws and regulations; 9. Bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jointly and severally responsible for the Company's losses caused by the mistakes or negligence of members of the Board of Directors in performing their duties.
Kenjiro Sawada	Direktur Director	1. Mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Perseroan, termasuk penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta peraturan yang ditetapkan, serta memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; To direct and supervise all of the Company's financial activities, including the preparation of financial statements in accordance with financial accounting standards and applicable regulations, as well as ensuring compliance with prevailing tax obligations; 2. Berperan sebagai mitra bagi seluruh organ Perseroan atas laporan dan analisa kinerja keuangan Perseroan; To act as a partner to all Company organs in relation to reports and analyses of the Company's financial performance; 3. Berperan untuk mengatur mekanisme bagaimana mengelola dan memastikan ketersediaan dana untuk mengelola akun piutang atau pengadaan dana dengan menggunakan instrumen keuangan konvensional atau terstruktur; To establish mechanisms for managing and ensuring the availability of funds for receivables management or fundraising through conventional or structured financial instruments; 4. Mengembangkan dan menerapkan strategi, kebijakan dan rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang Perseroan; To develop and implement the Company's short-term and long-term financial strategies, policies, and plans; 5. Bersama dengan anggota Direksi lain, bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan berkelanjutan; Together with other members of the Board of Directors, responsible for the implementation of sustainable finance; 6. Memastikan pelaporan Perseroan kepada otoritas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; To ensure that the Company's reporting to the authorities is submitted in a complete and timely manner; 7. Bersama-sama dengan Direktur lain mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam angka (7) di bawah ini; Jointly with other Directors, to legally represent the Company and act on its behalf, both in and out of court, in all matters and under all circumstances; to bind the Company with other parties and vice versa; and to carry out all actions, whether related to management or ownership, subject to the limitations as stipulated in point (7) below; 8. Mewakili Perseroan sebagaimana yang terdapat pada angka (6), akan tetapi dengan pembatasan untuk : To represent the Company as referred to in point (6), subject to the following limitations: a. Menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau To write off or remove the Company's receivables from the books in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners; or b. Mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
		oleh Dewan Komisaris; atau To assign or waive the Company's rights to collect receivables that have been written off, in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners; or c. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; To sell, transfer, dispose of, or encumber the Company's assets, whether in a single transaction or in multiple separate or related transactions, in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners; d. Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah; To acquire immovable property by any means, including land rights; e. Memperoleh atau melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain; To acquire or dispose of equity participation in other companies; f. Memberikan jaminan perusahaan *(corporate guarantee)* untuk kepentingan pihak lain; To provide a corporate guarantee for the benefit of other parties; g. Menerima pinjaman uang dari siapapun; To obtain loans from any party; h. Memberikan pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan; To provide loans to any party, except in the ordinary course of the Company's business; Harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal. Ketentuan pada angka (7) ini tidak mengurangi apa yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Shall obtain a prior written approval from or the relevant deed is also signed by the Board of Commissioners, such approval can be given to take one action or more than one action and from time to time it can be reviewed, taking into account the regulations in the Capital Market sector. The provisions under point (7) shall not prejudice the applicable laws and regulations; 8. Bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jointly and severally responsible for the Company's losses caused by the mistakes or negligence of members of the Board of Directors in performing their duties.
Shunsuke Kojima**	Direktur Director	1. Mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Perseroan, termasuk penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta peraturan yang ditetapkan, serta memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; To direct and supervise all of the Company's financial activities, including the preparation of financial statements in accordance with financial accounting standards and applicable regulations, as well as ensuring compliance with prevailing tax obligations; 2. Berperan sebagai mitra bagi seluruh organ Perseroan atas laporan dan analisa kinerja keuangan Perseroan; To act as a partner to all Company organs in relation to reports and analyses of the Company's financial performance; 3. Berperan untuk mengatur mekanisme bagaimana mengelola dan memastikan ketersediaan dana untuk mengelola akun piutang atau pengadaan dana dengan menggunakan instrumen keuangan konvensional atau terstruktur; To establish mechanisms for managing and ensuring the availability of funds for receivables management or fundraising through conventional or structured financial instruments; 4. Mengembangkan dan menerapkan strategi, kebijakan dan rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang Perseroan; To develop and implement the Company's short-term and long-term financial strategies, policies, and plans; 5. Bersama dengan anggota Direksi lain, bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan berkelanjutan; Together with other members of the Board of Directors, responsible for the implementation of sustainable finance; 6. Memastikan pelaporan Perusahaan kepada otoritas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; To ensure that the Company's reporting to the authorities is submitted in a complete and timely manner; 7. Bersama-sama dengan Direktur lain mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam angka (7) di bawah ini; Jointly with other Directors, to legally represent the Company and act on its behalf, both in and out of court, in all matters and under all circumstances; to bind the Company with other parties and vice versa; and to carry out all actions, whether related to management or ownership, subject to the limitations as stipulated in point (7) below; 8. Mewakili Perseroan sebagaimana yang terdapat pada angka (6), akan tetapi dengan pembatasan untuk : To represent the Company as referred to in point (6), subject to the following limitations:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
		a. Menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau To write off or remove the Company's receivables from the books in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners; or b. Mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau To assign or waive the Company's rights to collect receivables that have been written off, in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners; or c. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; To sell, transfer, dispose of, or encumber the Company's assets, whether in a single transaction or in multiple separate or related transactions, in an amount exceeding the limit determined from time to time by the Board of Commissioners; d. Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah; To acquire immovable property by any means, including land rights; e. Memperoleh atau melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain; To acquire or dispose of equity participation in other companies; f. Memberikan jaminan perusahaan *(corporate guarantee)* untuk kepentingan pihak lain; To provide a corporate guarantee for the benefit of other parties; g. Menerima pinjaman uang dari siapapun; To obtain loans from any party. h. Memberikan pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan; To provide loans to any party, except in the ordinary course of the Company's business; Harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal. Ketentuan pada angka (7) ini tidak mengurangi apa yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Shall obtain a prior written approval from or the relevant deed is also signed by the Board of Commissioners, such approval can be given to take one action or more than one action and from time to time it can be reviewed, taking into account the regulations in the Capital Market sector. The provisions under point (7) shall not prejudice the applicable laws and regulations; 8. Bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jointly and severally responsible for the Company's losses caused by the mistakes or negligence of members of the Board of Directors in performing their duties.
Fransisca Yuliana Gunawan	Direktur Director	1. Bertanggung jawab dalam pengelolaan Perseroan dengan memastikan fungsi manajemenrisiko, kepatuhan, penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, legal korporasi, corporate strategic planning, business processing, sekretaris perusahaan dan hubungan investor sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai, Anggaran Dasar Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; Responsible for managing the Company by ensuring the implementation of risk management, compliance, anti-money laundering measures, Prevention of Financing Terrorism and Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons, consumer protection, personal data protection, corporate legal affairs, corporate strategic planning, business processes, corporate secretary functions, and investor relations in alignment with the Company's vision, mission, values, and Articles of Association, while adhering to applicable laws and regulations and the principles of Good Corporate Governance; 2. Bersama dengan anggota Direksi lain, bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan berkelanjutan; Together with other members of the Board of Directors, responsible for the implementation of sustainable finance; 3. Memastikan pelaporan Perseroan kepada otoritas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; Ensures that the Company's reports to authorities are submitted completely and in a timely manner; 4. Bersama-sama dengan Direktur lain mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam angka (5) di bawah ini; Jointly with other Directors, legally represents the Company both inside and outside the court in all matters and circumstances, binds the Company with other parties and vice versa, and undertakes all actions relating to management and ownership, subject to the limitations set out in point (5) below; 5. Mewakili Perseroan sebagaimana yang terdapat pada angka (4), akan tetapi dengan pembatasan untuk :

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
		Represents the Company as referred to in point (4), but with the following limitations: a. Menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau Writing off or removing the Company's receivables from the books exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; or b. Mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau Transferring or relinquishing the Company's rights to collect receivables that have been written off, exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; or c. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; Selling, transferring, relinquishing rights, or pledging/encumbering the Company's assets, whether in a single transaction or multiple related or unrelated transactions, exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; d. Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah; Acquiring immovable property by any means, including land rights; e. Memperoleh atau melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain; Acquiring or disposing of equity participation in other companies; f. Memberikan jaminan perusahaan *(corporate guarantee)* untuk kepentingan pihak lain; Providing corporate guarantees for the benefit of other parties; g. Menerima pinjaman uang dari siapapun; Obtaining loans from any party; h. Memberikan pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan; Granting loans to any party except in the ordinary course of the Company's business; Harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal. Ketentuan pada angka (5) ini tidak mengurangi apa yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Shall obtain a prior written approval from or the relevant deed is also signed by the Board of Commissioners, such approval can be given to take one action or more than one action and from time to time it can be reviewed, taking into account the regulations in the Capital Market sector. The provisions in point (5) do not prejudice the applicable laws and regulations; 6. Bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Shall be jointly and severally liable for any losses of the Company arising from errors or negligence of the Board of Directors in performing their duties, in accordance with applicable laws and regulations.
Ryuji Tarumi	Direktur Director	1. Bertanggung jawab dalam merumuskan strategi pengembangan bisnis dan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis khususnya pada Unit Bisnis Korporasi termasuk menjalankan fungsi pemasaran dan penyaluran pembiayaan; Responsible for formulating business development strategies and achieving targets set out in the business plan, particularly within the Corporate Business Unit, including carrying out marketing functions and financing distribution; 2. Memastikan proses analisa kredit dan operasional dalam Unit Bisnis Korporasi telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; Ensures that credit analysis and operational processes within the Corporate Business Unit are carried out in accordance with applicable policies and regulations; 3. Memastikan pelaksanaan mekanisme penindaklanjutan pengaduan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Ensures the implementation of consumer complaint handling mechanisms in accordance with applicable laws and regulations; 4. Bertanggung jawab dalam manajemen aset, fungsi penagihan hingga penyelesaian perkara litigasi Perseroan khususnya terkait dengan konsumen Unit Bisnis Korporasi; Responsible for asset management, collection functions, and the resolution of the Company's litigation cases, particularly those related to Corporate Business Unit customers; 5. Mendukung program keuangan berkelanjutan melalui pengembangan produk keuangan berkelanjutan; Supports sustainable finance programs through the development of sustainable financial products; 6. Memastikan pelaporan Perseroan kepada otoritas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; Ensures that the Company's reports to authorities are submitted completely and in a timely manner; 7. Bersama-sama dengan Direktur lain mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam angka (8) di bawah ini; Jointly with other Directors, legally represents the Company both inside and outside the court in all matters and circumstances, binds the Company with other parties and vice

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
		versa, and undertakes all actions relating to management and ownership, subject to the limitations set out in point (8) below; 8. Mewakili Perseroan sebagaimana yang terdapat pada angka (7), akan tetapi dengan pembatasan untuk : Represents the Company as referred to in point (7), but with the following limitations: a. Menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau Writing off or removing the Company's receivables from the books exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; or b. Mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau Transferring or relinquishing the Company's rights to collect receivables that have been written off, exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; or c. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; Selling, transferring, relinquishing rights, or pledging/encumbering the Company's assets, whether in a single transaction or multiple related or unrelated transactions, exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; d. Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah; Acquiring immovable property by any means, including land rights; e. Memperoleh atau melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain; Acquiring or disposing of equity participation in other companies; f. Memberikan jaminan perusahaan *(corporate guarantee)* untuk kepentingan pihak lain; Providing corporate guarantees for the benefit of other parties; g. Menerima pinjaman uang dari siapapun; Obtaining loans from any party; h. Memberikan pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan; Granting loans to any party except in the ordinary course of the Company's business; Harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal. Ketentuan pada angka (8) ini tidak mengurangi apa yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Shall obtain a prior written approval from or the relevant deed is also signed by the Board of Commissioners, such approval can be given to take one action or more than one action and from time to time it can be reviewed, taking into account the regulations in the Capital Market sector. The provisions in point (8) do not prejudice the applicable laws and regulations; 9. Bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Shall be jointly and severally liable for any losses of the Company arising from errors or negligence of the Board of Directors in performing their duties, in accordance with applicable laws and regulations.

*) Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2025, RUPS menyetujui pengunduran diri Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Perseroan.
Based on the Extraordinary GMS held on 23 December 2025, the GMS approved the resignation of Konosuke Mizuta as President Director, effective as of the closing of the Company's Extraordinary GMS.

**) Masa jabatan selaku Direktur Perseroan telah berakhir pada tanggal 23 Juni 2025.
The term of office as Director of the Company ended on 23 June 2025.

Keterbukaan Informasi

Dalam rangka pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Direksi wajib mengungkapkan :

a. Kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.
b. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
c. Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham Perseroan dan/atau pegawai Perseroan tempat anggota Direksi menjabat.
d. Hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham

Information Disclosure

In order to fulfill the implementation of governance, members of the Board of Directors are required to disclose:

a. Ownership of voting rights over shares and any changes in ownership of voting rights over shares whether directly or indirectly in the Company in accordance with the provisions of regulations in the Capital Market sector.
b. Its share ownership which reaches 5% (five percent) in other companies, domiciled inside and outside the country.
c. Financial relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or shareholders of the Company and/or employees of the Company where the members of the Board of Directors serve.
d. Family relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors,

Perseroan dan/atau pegawai Perusahaan tempat anggota Direksi menjabat sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal.

e. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perseroan.
f. Jabatan mereka di perusahaan lain.
g. Informasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Nilai-Nilai dan Etika Kerja

a. Anggota Direksi wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
b. Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.
c. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Perseroan maupun anak perusahaannya.
d. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
e. Anggota Direksi dilarang memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan selain yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
f. Anggota Direksi dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Anggota Direksi dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya, keluarga, dan/atau pihak lain dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
h. Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Rapat Direksi

a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
b. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
c. Anggota Direksi wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.
d. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada butir (a) butir (b) dan butir (c) dapat dilangsungkan, sah dan berhak

and/or shareholders of the Company and/or employees of the Company where the members of the Board of Directors serve up to the second degree, both horizontally and vertically.

e. Remuneration and facilities received from the Company.
f. Their position in another company.
g. Other Information in accordance to the prevailing provision and regulation applicable to the Company.

Values and Work Ethics

a. Members of the Board of Directors must have high integrity, ability, knowledge, experience according to their field of work and be able to communicate well.
b. Members of the Board of Directors are prohibited from conducting transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company where the said member of the Board of Directors serves.
c. Members of the Board of Directors are prohibited from using their positions in the Company for personal, family, and/or other party' interests that may harm or reduce the profits and reputation of the Company and its subsidiaries.
d. Members of the Board of Directors are prohibited from taking and/or receiving personal benefits either directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.
e. Members of the Board of Directors are prohibited fulfilling shareholder requests related to the operational activities of the Company other than those determined based on the resolution of the GMS.
f. Members of the Board of Directors are prohibited from offering or giving anything, either directly or indirectly, to another party, to influence decision-making related to the Company's business activities, in violation of statutory provisions.
g. Members of the Board of Directors are prohibited from accepting anything for their personal interests, their families' interests, and/or other parties' interests in violation of the provisions of laws and regulations, either directly or indirectly, from anyone, which may influence decision-making related to the Company's business activities.
h. Any member of the Board of Directors is required to carry out his duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.

The Board of Directors Meetings

a. The Board of Directors' Meeting may be held at any time when it is considered necessary by one or more member(s) of the Board of Directors or at a written request of the Board of Commissioners or on a written request of 1 (one) or more of shareholder collectively representing 1/10 (one tenth) part or more of total number of shares issued by the Company with valid voting rights.
b. Meeting of the Board of Directors is held periodically at least 1 (one) time in every month.
c. Members of the Board of Directors must attend the meeting of the Board of Directors at least 50% (fifty percent) of the total number of meetings of the Board of Directors in a period of 1 (one) year.
d. The meeting of the Board of Directors as referred to in point (a), point (b) and point (c) can be held, is valid and has the

mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

e. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

f. Jumlah Rapat dan kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b), butir (c) dan butir (e) wajib diungkapkan dalam laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dan butir (e) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

h. Bahan rapat yang sudah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir (g) harus dibagikan kepada peserta rapat minimal 5 (lima) hari sebelum rapat dilaksanakan.

i. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir (g), bahan rapat harus dibagikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

j. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, maka pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

k. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

l. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili dan hasil keputusan Rapat disetujui oleh semua anggota Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

m. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.

n. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

o. 1. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

right to make binding resolution if it is attended by more than ½ (half) of the total members of the Board of Directors who are present or represented at the Meeting.

e. The Board of Directors is required to hold the Board of Directors meeting with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time in 3 (three) months.

f. The number of Meetings and the presence of members of the Board of Directors at the meeting as referred to point (a), point (b), point (c) and point (e) must be disclosed in the report in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

g. The Board of Directors must schedule a meeting as referred to point (b) and point (e) for the following year before the end of the financial year.

h. Meeting materials that have been scheduled as referred to point (g) must be distributed to meeting participants at least 5 (five) days before the meeting is held.

i. In the event of an out-of-schedule meeting that has been prepared as referred to in point (g) meeting materials must be distributed to participants no later than before the meeting is held.

j. Summons for the Board of Directors' Meeting shall be conducted by the President Director. In the event that the President Director is absent due to any reason, which does not need to be proven to the third party, then one of the members of the Board of Directors has the rights and authority to summon the Board of Directors' Meeting. Summons for the Board of Directors' Meeting must be submitted by any means in written form to each member of the Board of Directors no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held, excluding the date of the Invitation and the date of the Meeting. If all members of the Board of Directors are present or represented, the prior summons is not required and the Board of Directors' Meeting has the right to make legal and binding resolution.

k. Summons shall mention the agenda, date, time and place of the Meeting.

l. The Board of Directors' Meeting shall be held in the Company's domicile or at the place of business activity or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at another place within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Directors are present or represented and the resolution of the Meeting are approved by all members of the Board of Directors, the Board of Directors' Meeting may be held at another place as determined by the Board of Directors and the meeting has the right to make a legal and binding resolution.

m. The Board of Directors' Meeting shall be chaired by a President Director. In case the President Director is absent or indisposed, of which the matter should not be proved to the third party, then the meeting shall be chaired by a person elected among members of the Board of Directors who are present.

n. A member of the Board of Directors may be represented at the meeting only by another member of the Board of Directors based on power of attorney.

o. 1. Each member of the Board of Directors who is present has the rights to cast 1 (one) vote and additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Directors who is represented by him/her.

2. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

p. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari ½ (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.

q. Hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (a), butir (b) dan butir (c) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

r. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

s. Perbedaan pendapat *(dissenting opinions)* yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi, maka yang bersangkutan wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* tersebut.

t. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.

u. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir (q) dan butir (r), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

v. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (q) dan butir (r) wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

w. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.

x. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

y. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat

2. Any member of the Board of Directors who personally in any way either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is one of the parties must state the nature of the interest in a Board of Directors' Meeting and is not entitled to participate in the voting on matters relating to the pertinent transaction or contract, unless the Board of Directors' Meeting determined otherwise.

p. Decision making in the Board of Directors meeting is based on deliberation and consensus. In the event that deliberation and consensus does not occur, the decision is made based on the majority of votes which is approved by more than ½ (half) of the members of the Board of Directors who are present.

q. The results of the Board of Directors meeting as referred to in point (a), point (b) and point (c) must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors who present and submitted to all members of the Board of Directors.

r. The results of the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who present and conveyed to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

s. Dissenting opinions that occur in the decision of the Board of Directors, must be clearly stated in the minutes of the Board of Directors' meeting along with the reasons for the dissenting opinion.

t. Members of the Board of Directors of the Company who are either present or not present at the meeting of the Board of Directors are entitled to receive a copy of the minutes of the Board of Directors Meeting.

u. In the event that a member of the Board of Directors does not sign the results of the meeting as referred to in point (q) and point (r), the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.

v. The minutes stated in point (q) and point (r) must be documented by the Company.

w. Minutes of Board of Directors' Meeting are valid evidence regarding the decisions taken at the relevant Directors' Meeting, either for members of the Board of Directors or for the third party.

x. The Board of Directors may also take valid and binding decisions without holding a Board of Directors meeting, with provision of all members of the Board of Directors have been notified in writing about the proposals concerned and all members of the Board of Directors give their approval regarding the proposals submitted in writing and sign the approval. Decisions taken in this way have the same legal force as decisions taken legally at a meeting of the Board of Directors.

y. Meetings of the Board of Directors may also be conducted through teleconferencing media, video conference, or other means of electronic media that allow all participants in the Board of Directors' Meeting to see and/or hear each other directly and participate in the Board of Directors Meeting,

Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

z. Direksi wajib menyetujui kebijakan dan keputusan strategis Perseroan melalui keputusan rapat Direksi atau melalui keputusan Direksi secara sirkuler dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Piagam Direksi. Kebijakan dan keputusan strategis adalah keputusan Direksi yang dapat mempengaruhi keuangan Perseroan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi dan/atau pihak ketiga.

aa. Direksi wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.

with provision of the minutes of the Meeting which use conference calls or similar communication equipment will be made in writing and circulated among all members of the Board of Directors' meeting participated in the meeting, to be signed. Resolutions made in this way have the same power as resolutions taken legally at a meeting of the Board of Directors.

z. The Board of Directors is required to approve the Company's strategic policies and decisions through a decision of the Board of Directors meeting or through a circular decision of the Board of Directors in accordance with the procedures set out in the Board of Director's Charter. Strategic policies and decisions are decisions of the Board of Directors that can significantly affect the Company's finances and/or have a sustainable impact on the budget, human resources, organizational structure and/or third parties.

aa. The Board of Directors is obliged to ensure effective, appropriate and fast decision-making and to be able to act independently, without having any interests that could interfere with its ability to carry out its duties independently and objectively.

Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2025

Frequency of Board of Directors Meeting Year 2025

Nama Name	Rapat Direksi Board of Directors Meeting		Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Joint Board of Directors Meeting with Board of Commissioners	
	Kehadiran Attendance	Rasio Kehadiran Attendance Ratio	Kehadiran Attendance	Rasio Kehadiran Attendance Ratio
Takeshi Kurioka*)	-	-	-	-
Konosuke Mizuta*)	12/12	100.00%	8/8	100.00%
Kenjiro Sawada**)	6/12	50.00%	3/8	37.50%
Shunsuke Kojima**)	6/12	50.00%	4/8	50.00%
Andi Harjono	12/12	100.00%	8/8	100.00%
Yudi Gustiawan	11/12	92.00%	8/8	100.00%
Fransisca Yuliana Gunawan***)	-	-	-	-
Ryuji Tarumi***)	-	-	-	-

*) Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2025, RUPS menyetujui pengunduran diri Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Perseroan dan mengangkat Takeshi Kurioka sebagai Direktur Utama berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang yaitu pada tanggal 5 Maret 2026.
Based on the Extraordinary GMS held on 23 December 2025, the GMS approved the resignation of Konosuke Mizuta from his position as President Director effective as of the closing of the Company's Extraordinary GMS and appointed Takeshi Kurioka as President Director effective from the date of issuance of the Limited Stay Permit from the authorized institution, namely on March 5, 2026.

**) Berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2025, masa jabatan Shunsuke Kojima selaku Direktur Perseroan telah berakhir pada tanggal 23 Juni 2025 dan RUPS Tahunan menyetujui pengangkatan Kenjiro Sawada selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan.
Based on the Annual GMS held on 23 June 2025, the term of office of Shunsuke Kojima as Director of the Company ended on 23 June 2025 and the Annual GMS approved the appointment of Kenjiro Sawada as Director of the Company effective as of the closing of the Company's Annual GMS.

***) Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2025, RUPS menyetujui pengangkatan Fransisca Yuliana Gunawan dan Ryuji Tarumi selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Perseroan.
Based on the Extraordinary GMS held on 23 December 2025, the GMS approved the appointment of Fransisca Yuliana Gunawan and Ryuji Tarumi as Director effective as of the closing of the Company's Extraordinary GMS.

Evaluasi Kinerja Direksi

a. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi
Proses penilaian Direksi dilakukan secara kolektif dan individual dengan mempertimbangkan beberapa indikator dan kriteria penilaian *Key Performance Indicators* ("KPI") yang disepakati oleh anggota Direksi Perusahaan. Sistem penilaian dilakukan bersama seluruh anggota Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. Kriteria Penilaian Kinerja Direksi
Penilaian terhadap kinerja Direksi mencakup hal-hal sebagaimana berikut:
   1) Kontribusi dalam Pelaksanaan Visi dan Misi Perusahaan;
   2) Tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi, rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan Rapat Komite;
   3) Terlaksananya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan;
   4) Terlaksananya pencapaian Rencana Bisnis Tahunan; dan
   5) Terlaksananya pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi audit internal, auditor eksternal, atau pengawasan OJK.

c. Pihak yang melakukan penilaian
Direksi akan melakukan evaluasi kinerja Direksi secara mandiri untuk kemudian disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Evaluation of The Board of Directors Performance

a. Procedures for the Implementation of the Board of Directors Performance Assesment
The Board of Directors assessment process is carried out collectively and individually by taking into account several indicators and assessment criteria for Key Performance Indicators ("KPI") agreed upon by members of the Company's Board of Directors. The assessment system is carried out with all members of the Board of Directors to be submitted to the Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

b. The Board of Directors Performance Assessment Criteria
Assessment of the performance of the Board of Directors includes the following matters:
   1) Contribution in Implementation of the Company's Vision and Mission;
   2) Level of attendance at Board of Directors Meetings and joint meetings with the Board of Commissioners;
   3) Implementation of Good Corporate Governance in every business activity of the Company;
   4) Achievement of the Annual Business Plan; and
   5) Implementation of supervision on the followup of internal audit recommendations, external auditors or supervision of the OJK.

c. The party conducting the assessment
The Board of Directors will evaluate its performance independently to be further submitted to the Nomination and Remuneration Committee for assessment purpose. The assessment results by the Nomination and Remuneration Committee will be submitted to the Board of Commissioners.



Pelatihan Direksi

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, maka sepanjang tahun 2025, Direksi telah mengikuti pelatihan-pelatihan, antara lain:

Board of Directors Trainings

In order to expand their knowledge and competence, throughout 2025, the Board of Directors had participated in several trainings, including:

Pelatihan Direksi The Board of Directors Trainings			
Nama Name	Pelatihan Trainings	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Takeshi Kurioka*)	Sertifikasi Manajemen Risiko - Direksi Risk Management Certification - Board of Directors	26 Aug 2025	LSPPI
	Sertifikasi Ahli Pembiayaan Financing Expert Certification	30 Sep 2025	LSPPI
Konosuke Mizuta*)	*Online Seminar Economic Outlook 2026*	2 Sep 2025	APPI
Andi Harjono	Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru OJK Policy Direction for 2025 and the New Government's Economic Growth Strategy	4 Feb 2025	APPI
	Understanding The Latest Cyber Attack Techniques & Challenges of Defense Strategies and Security Solutions In Finance Companies	21 May 2025	Sarana Mutu Edukasi Indonesia ("SMEI")
	Online Seminar Economic Outlook 2026	2 Sep 2025	APPI
Yudi Gustiawan	Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru OJK Policy Direction for 2025 and the New Government's Economic Growth Strategy	4 Feb 2025	APPI
	Online Seminar Economic Outlook 2026	2 Sep 2025	APPI
Kenjiro Sawada**)	*Financial Statement Analysis*	13-14 Feb 2025	Eltasa Prima Konsulta
	Online Seminar Economic Outlook 2026	2 Sep 2025	APPI
	Seminar National Resilience And Turnaround: Indonesia's Economic Direction	28 Oct 2025	APPI
Shunsuke Kojima**)	*Sharing Session : Anti Fraud Strategy Participants (Session I)*	17 Jan 2025	KPMG
Fransisca Yuliana Gunawan***)	Sertifikasi Manajemen Risiko Satu Tingkat Dibawah Direksi Risk Management Certification One Level Below Directors	12 Feb 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia ("LSPPI")
	Pendalaman POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Comprehensive Review of POJK No. 14/POJK.04/2022 concerning the Submission of Periodic Financial Reports by Issuers or Public Companies	18 Feb 2025	ICSA
	Corporate Reputation in the Digital Era: Strategies to Build Investor Trust	26 Feb 2025	ICSA
	Langkah Awal dalam Membangun Inisiatif ESG: Panduan Praktis untuk Perusahaan Initial Steps in Establishing ESG Initiatives: A Practical Guide for Corporations.	26 Mar 2025	ICSA
	Peran *Corporate Secretary* dalam Mendorong Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (GRK) yang Baik. The Role of the Corporate Secretary in Promoting Good Governance, Risk Management, and Compliance (GRC).	17 Apr 2025	ICSA
	Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-E on Information Disclosure Obligations.	22 Apr 2025	ICSA
	Communication Evaluation: *Measuring the Impact of Communications to Stakeholders.*	24 Apr 2025	ICSA
	"Advancing Corporate Environmental Initiatives through Natural Climate Solutions"	25 Apr 2025	ICSA
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka. Financial Services Authority Regulation Number 29 of 2023 concerning the Repurchase of Shares Issued by Public Companies.	15 May 2025	ICSA
	Kesiapan Perusahaan dalam Menghadapi Volatilitas Pasar Global: Perspektif *Investor Relations* dan *Corporate Secretary.* Corporate Readiness to Face Global Market Volatility: An Investor Relations and Corporate Secretary Perspective.	20 May 2025	ICSA
	Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.	17 Jun 2025	ICSA

Pelatihan Direksi The Board of Directors Trainings			
Nama Name	Pelatihan Trainings	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
	Comprehensive Review of Financial Services Authority Regulation No. 14/2019 regarding Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/2015 on Capital Increases of Public Companies through the Granting of Pre-Emptive Rights.		
	Digital Governance: Automating Compliance and Disclosure with AI Tools	19 Jun 2025	ICSA
	Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka. Comprehensive Review of Financial Services Authority Regulation No. 4 Year 2024 concerning Reports on Share Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies and Reports on the Pledging of Shares of Public Companies.	29 Jul 2025	ICSA
	Sertifikasi Ahli Pembiayaan Financing Expert Certification	31 Jul 2025	LSPPI
	Finance for Non Finance Memahami Angka Untuk Komunikasi yang Efektif	5 Aug 2025	ICSA
	Sertifikasi Manajemen Risiko - Direksi Risk Management Certification - Board of Directors	26 Aug 2025	LSPPI
	A Risk-Based Approach to ESG: Building Resilient, Responsible Businesses	29 Aug 2025	ICSA
	Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Comprehensive Review of Financial Services Authority Regulation No. 17 Year 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.	1 Sep 2025	ICSA
	Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik. Comprehensive Review of OJK Regulation No. 14 Year 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders.	30 Sep 2025	ICSA
	From Policy to Impact: Best Practice in ESG Journey	1 Oct 2025	ICSA
	Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal. Comprehensive Review of Financial Services Authority Regulation No. 9 Year 2025 concerning the Dematerialization of Equity Securities and the Management of Unclaimed Assets in the Capital Market.	14 Oct 2025	ICSA
	Empowering Communities, Strengthening Sustainability.	21 Oct 2025	ICSA
	Integrasi *Cyber Security* dalam *Good Corporate Governance* (GCG): Peran Penting *Corporate Secretary.* Integrating Cyber Security into Good Corporate Governance (GCG): The Strategic Role of the Corporate Secretary.	29 Oct 2025	ICSA
	Media Handling 4.0: Peran *Corporate Secretary* dalam Era AI dan Reputasi Digital. Media Handling 4.0: Strengthening the Role of the Corporate Secretary in the Age of Artificial Intelligence and Digital Reputation Management.	20 Nov 2025	ICSA
	Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Comprehensive Review of Financial Services Authority Regulation No. 42 Year 2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.	2 Dec 2025	ICSA
	Pendalaman Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Comprehensive Review of Regulation No. I-A concerning the Listing of Shares and Equity Securities Other than Shares Issued by Listed Companies.	9 Dec 2025	ICSA
Ryuji Tarumi***)	Sertifikasi Ahli Pembiayaan Financing Expert Certification	30 Sep 2025	LSPPI

*) Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2025, RUPS menyetujui pengunduran diri Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Perseroan dan mengangkat Takeshi Kurioka sebagai Direktur Utama berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang yaitu pada tanggal 5 Maret 2026.
Based on the Extraordinary GMS held on 23 December 2025, the GMS approved the resignation of Konosuke Mizuta from his position as President Director effective as of the closing of the Company's Extraordinary GMS and appointed Takeshi Kurioka as President Director effective from the date of issuance of the Limited Stay Permit from the authorized institution, namely on March 5, 2026.

**) Berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2025, masa jabatan Shunsuke Kojima selaku Direktur Perseroan telah berakhir pada tanggal 23 Juni 2025 dan RUPS Tahunan menyetujui pengangkatan Kenjiro Sawada selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan.
Based on the Annual GMS held on 23 June 2025, the term of office of Shunsuke Kojima as Director of the Company ended on 23 June 2025 and the Annual GMS approved the appointment of Kenjiro Sawada as Director of the Company effective as of the closing of the Company's Annual GMS.

***) Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2025, RUPS menyetujui pengangkatan Fransisca Yuliana Gunawan dan Ryuji Tarumi selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Perseroan.
Based on the Extraordinary GMS held on 23 December 2025, the GMS approved the appointment of Fransisca Yuliana Gunawan and Ryuji Tarumi as Director effective as of the closing of the Company's Extraordinary GMS.

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Procedure and Basis for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur dan dasar penetapan remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menelaah remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industri pembiayaan.
2. Dengan memperhitungkan kinerja Perseroan dan penilaian secara mandiri yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan dan menyiapkan rekomendasi.
3. Rekomendasi disampaikan kepada Komisaris Utama untuk dibahas lebih lanjut dan disetujui oleh Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Keputusan RUPST yaitu RUPST menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Procedure and Basis for Determination of the Board of Commissioners Remuneration

The procedure and basis for determining the remuneration of the Board of Commissioners are as follows:

1. Reviewed industry-standard remuneration practices based on comparable business activities and the Company's scale in the financing sector.
2. Taking into account the Company's performance and the Board of Commissioners' own assessment, the Nomination and Remuneration Committee then discussed and prepared recommendations.
3. The recommendation is submitted to the President Commissioner for further discussion and approval by the Controlling Shareholders based on the Resolution of the AGMS, namely the AGMS agrees to grant authority to the Controlling Shareholders to determine the amount of honorarium, bonuses and allowances for all members of the Company's Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sudah termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura.

The Board of Commissioners Remuneration Structure

Remuneration for all members of the Board of Commissioners includes other benefit in kind.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners Remuneration Structure		
Jumlah Dewan Komisaris Total Board of Commissioners	Remunerasi*) Remuneration*)	Fasilitas lain dalam bentuk Natura**) Benefit in Kind**)
3	Rp800,374,720	Rp36,474,156

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura.
Includes salaries and other fixed income: benefits, stock-based compensation, bonus and other remuneration in form of benefit in kind.

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.
Housing, transportation, health insurance, etc.

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam satu tahun Remuneration Amount Per Person in one year	Jumlah Dewan Komisaris Total Board of Commissioners
Di atas Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) Above Rp2,000,000,000 (two billion Rupiah)	0
Di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) Above Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah)	0
Di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) s.d Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) Above Rp500,000,000 (five hundred million Rupiah) to Rp 1,000,000,000 (one billion Rupiah)	1
Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) ke bawah Below Rp500,000,000 (five hundred million Rupiah)	2

Remunerasi yang diperoleh oleh Dewan Komisaris sudah meliputi fasilitas lain dalam bentuk natura, terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang mendapatkan remunerasi dengan nilai di bawah Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) dalam satu tahun dan terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang mendapatkan remunerasi dengan nilai di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dalam satu tahun.

The remuneration received by the Board of Commissioners includes other benefit in kind, there are 2 (two) members of the Board of Commissioners who receive remuneration with a value below Rp500,000,000 (five hundred million Rupiah) in one year and there are 1 (one) member of the Board of Commissioners who receive remuneration with a value above Rp500,000,000 (five hundred million Rupiah) up to Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) in one year.

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Direksi

Prosedur dan dasar penetapan remunerasi Direksi adalah sebagai berikut:

- Menelaah remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industri pembiayaan.
- Dengan memperhitungkan kinerja Perseroan dan penilaian secara mandiri yang dilakukan oleh Direksi, selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan dan menyiapkan rekomendasi.
- Rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas lebih lanjut dan disetujui berdasarkan Keputusan RUPST yaitu RUPST menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Procedure and Basis for Determination of the Board of Directors Remuneration

The procedure and basis for determining the remuneration of the Board of Directors are as follows:

- Review the prevailing remuneration in the industry in accordance with the business activities of similar companies and the business scale of the Company in the financing industry.
- Taking into account the Company's performance and the independent assessment conducted by the Board of Directors, the Nomination and Remuneration Committee then conducts discussions and prepares recommendations.
- The recommendations were submitted to the Board of Commissioners for further discussion and approval based on the Resolution of the AGMS, namely, the AGMS approved granting the Company's Board of Commissioners the authority to determine the salaries, bonuses, and allowances for all members of the Company's Board of Directors, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Struktur Remunerasi Direksi

Remunerasi bagi seluruh anggota Direksi sudah termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura.

The Board of Directors Remuneration Structure

Remuneration for all members of the Board of Directors includes other facilities in kind.

Struktur Remunerasi Direksi Board of Directors Remuneration Structure		
Total Direksi Number of the Board of Directors	Remunerasi*) Remuneration*)	Fasilitas lain dalam bentuk Natura**) Benefit in Kind**)
5***)	Rp7,921,794,228	Rp856,951,947

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura.
Includes salaries and other fixed income: benefits, stock-based compensation, bonus and other remuneration in form of benefit in kind.

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.
Housing, transportation, health insurance, etc.

***) Berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2025, masa jabatan Shunsuke Kojima selaku Direktur Perseroan telah berakhir pada tanggal 23 Juni 2025 dan RUPS Tahunan menyetujui pengangkatan Kenjiro Sawada selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan.
Based on the Annual GMS held on 23 June 2025, the term of office of Shunsuke Kojima as Director of the Company ended on 23 June 2025 and the Annual GMS approved the appointment of Kenjiro Sawada as Director of the Company effective as of the closing of the Company's Annual GMS.

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam satu tahun Remuneration Amount Per Person in one year	Jumlah Direksi Total Board of Directors
Di atas Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) Above Rp2,000,000,000 (two billion Rupiah)	2
Di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) Above Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah)	0
Di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) s.d Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) Above Rp500,000,000 (five hundred million Rupiah) to Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah)	1
Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) ke bawah Below Rp500,000,000 (five hundred million Rupiah)	2

Remunerasi yang diperoleh oleh anggota Direksi sudah meliputi fasilitas lain dalam bentuk natura, ada 2 (dua) orang anggota Direksi yang mendapatkan remunerasi dengan nilai di atas Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dalam satu tahun, 1 (satu) orang anggota Direksi yang mendapatkan remunerasi dengan nilai di antara Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) sampai Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dan 2 (dua) orang anggota Direksi yang mendapatkan remunerasi dengan nilai dibawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), salah satu anggota Direksi ini adalah Direksi yang periode jabatannya telah berakhir pada RUPS yang dilaksanakan pada 23 Juni 2025 dan Direksi baru yang diangkat pada RUPS yang sama.

The remuneration received by members of the Board of Directors includes other facilities in kind. Two (2) members of the Board of Directors receive remuneration worth more than Rp2,000,000,000 (two billion Rupiah) per year, one (1) member of the Board of Directors receives remuneration worth between Rp500,000,000 (five hundred million Rupiah) and Rp1,000,000,000 (one billion rupiah), and two (2) members of the Board of Directors receive remuneration worth below Rp500,000,000 (five hundred million Rupiah). One of these members of the Board of Directors is a Director whose term of office ended at the GMS held on June 23, 2025, and a new Director appointed at the same GMS.

Kebijakan Mengenai Pemisahan *Chairman of The Board* dan CEO
Policy on the Separation of the Chairman of the Board and the CEO

Selama periode pelaporan, tidak terdapat pemisahaan fungsi *Chairman of the Board* dan CEO. Kedua fungsi tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab dari Direktur Utama. Sedangkan, Dewan Komisaris Perseroan menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan atas segala tindakan implementasi strategi yang dilakukan Direksi Perseroan.

During the reporting period, there was no separation of the functions of the Chairman of the Board and the CEO. Both functions were the responsibility of the President Director. Meanwhile, the Company's Board of Commissioners performed oversight and monitoring over all strategic implementation actions taken by the Company's Board of Directors.

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committees under the Board of Commissioners

Dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung yaitu :
1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Komite Pemantau Risiko

In supporting the effective implementation of duties and responsibilities, the Board of Commissioners is supported by supporting organs, namely:
1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. Risk Monitoring Committee

Sepanjang 2025, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik, sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Throughout 2025, the Committees under the Board of Commissioners have performed their work well, in accordance with their respective functions and duties.

Komite Audit
Audit Committee

Komite Audit adalah komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

The Audit Committee is a committee tasked with assisting the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system and the implementation of the duties of internal auditors and external auditors by monitoring and evaluating the planning and implementation of audits in order to assess the adequacy of internal controls including the financial reporting process.

Komite Audit juga melakukan pemantauan terhadap sistem pelaporan pelanggaran *(whistleblowing system)*.

Audit Committee also monitors whistleblowing system.

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit
Anggota Komite Audit wajib :
1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Pihak Independen wajib memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang audit, akuntansi dan/atau dan keuangan. dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-

Audit Committee Member's Requirements
Members of the Audit Committee are required to :
1. Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and be able to communicate well.
2. Must understand financial reports, company business especially those related to the services or business activities of Issuers or Public Companies, audit processes, risk management, and laws and regulations in the Capital Market sector as well as other relevant laws and regulations.
3. Shall comply with the Audit Committee code of ethics established by the Company.
4. Willing to improve competency continuously through education and training.
5. Independent Parties must have an educational background and expertise in the fields of audit, accounting, and/or finance, as evidenced at a minimum by the possession of a competency certificate to support the execution of the committee's functions and responsibilities.
6. Not working in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Service Office or other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal

asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh saham tersebut.
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

services and/or other consulting services to the Company concerned within the past 6 (six) month.
7. Not working or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of The Company within the past 6 (six) months, except for the Independent Commissioner.
8. Does not own shares directly or indirectly in the Company.
9. In the event that a member of the Audit Committee acquires shares of the Company, either directly or indirectly as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after the shares were acquired.
10. Does not have affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Main Shareholders of the Companies.
11. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of the Company.

Susunan, Profil dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Audit maka susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

Composition, Profile and Work Experience of Audit Committee Members

In accordance with the Board of Commissioners' Decree No. 003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 concerning the Determination of the Composition of the Audit Committee Members, the composition of the Audit Committee is as follows:

MOHAMMAD SYAHRIAL

Ketua Komite Audit / Chairman of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, berdomisili di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Juli 2019, Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen terhitung sejak tanggal efektifnya penggabungan usaha yaitu tanggal 23 Juli 2019 untuk periode 2019-2021. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Independen untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Corporate Finance dari Universitas Florida Atlantic, Florida, Amerika Serikat, pada tahun 1988 dan memperoleh gelar Master of Corporate Finance Investment dari Universitas Golden Gate, San Fransisco, Amerika Serikat, pada tahun 1989.

Indonesian Citizen, 58 years old, domiciled in Jakarta. In accordance with the decision of the Extraordinary GMS on 17 July 2019, he was appointed as Independent Commissioner as of the effective date of the business merger, namely 23 July 2019 for the 2019-2021 period. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as Independent Commissioner for the 2022-2024 period. Obtained his Bachelor of Corporate Finance from Florida Atlantic University, Florida, USA, in 1988 and obtained his Master of Corporate Finance Investment from Golden Gate University, San Francisco, USA, in 1989.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2021 – Dec 2025	*Chairman of the Nomination and Remuneration Committee* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2021 – Dec 2025	*Chairman of the Audit Committee* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2020 – Dec 2025	*Chairman of the Risk Monitoring Committee* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2019 – Dec 2025	*Independent Commissioner* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2016 – to date	*Chief Executive Officer* Moya Holdings Asia Limited
2011 – to date	*President Director* PT Tamaris Hidro
2008 – to date	*Managing Partner* PT Nura Kapital
2010 – 2019	*Independent Commissioner* PT IBJ Verena Finance*
2008 – 2011	*Commissioner* PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
2004 – 2008	*President Director* PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
2003 – 2004	*Commissioner* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2002 - 2003	*Commissioner* PT Bank Niaga Tbk
2002	*Commissioner* PT Bank Permata Tbk
1999 – 2004	*Deputy Chairman AMK* (2002 – 2004) *Senior Vice President* (2001 – 2002) *Vice President* (2000 – 2001) *Assistant Vice President* (1999 – 2000) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
1997 – 1999	*Vice President Research* PT Pentasena Artha Sentosa
1996 – 1997	*Vice President Research* PT Amsteel Securities Indonesia
1992 – 1996	*Head Research* IBJ Indonesia Bank
1990 - 1992	*Analyst* PT Sun Hung Kai
1988	*Credit Officer* Bank of America, San Fransisco (USA)

*) Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019, efektif sejak tanggal 23 Juli 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (d/h PT Verena Multi Finance Tbk) melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk menjadi *surviving entity.*
Based on the Deed of Decision of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 23 dated July 17 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., and Deed of Circular IBJV Shareholders Decree No. 24 on the date and from the same Notary and has been recorded in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.10-0008953 dated 23 July 2019, effective from 23 July 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (formerly PT Verena Multi Finance Tbk) entered into a merger with an associated entity, namely PT IBJ Verena Finance where PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk becomes a surviving entity.

GREGORY O.K. ONGKO

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Memperoleh gelar sarjana B.SB.A. *Accounting dari Creighton University*, Amerika pada tahun 1982, memperoleh gelar master M.B.A Business Management dari Creighton University, Amerika pada tahun 1984, dan memperoleh gelar master M.B.A *Management Information System* dari University of Dallas, Amerika pada tahun 1986.

Indonesian citizen, 65 years old. He obtained a B.SB.A. degree in Accounting at Creighton University, USA in 1982. He obtained an M.B.A Business master's degree in Management at Creighton University, USA in 1984, and obtained an M.B.A master's degree in Management Information System at University of Dallas, USA in 1986.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2021 – Jan 2026	*Member of the Risk Monitoring Committee* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2020 – Jan 2026	*Member of the Audit Committee* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2012 – to date	Co-Founder Vickery Christian Academy Yayasan Pendidikan Vickery
2011	VP, Finance Accounting, HRD GA *PT Kabelindo Murni Tbk*
2002 – 2010	*Co-Founder* Morning Star Academy Yayasan Bintang Pagi PT Trivium Konsultan Pendidikan
2003 – 2006	*Property Consultant, Franchise Owner* Paddy's Property
2002 – 2004	*Co-Owner* Eurocafe Restaurant Food Outlet
1999 – 2001	*Division Head - Investor Relations* PT Tunas Sepadan Investama
1999	*General manager/Division Head* Asia Plup & Paper Company
1998	*Operation Director* PT Hexa Prakarsa Utama
1986 – 1998	*General Manager – Marketing Division* Bentala Sanggrahan Group
1995 – 1996	*Marketing Director* Rainbow Hills Development
1994 – 1995	*Administration & Resources Manager* Mega Guna Group, Holding Company
1988 – 1994	*Market Development Representative* IBM Indonesia
1988	*Internal Auditor* Arco Indonesia Incorporated
1987 – 1988	*Financial Officer* Robert S. Allan and Associates, Inc
1985 – 1987	*Auditor* Hawthorne Suites

BRANTAS

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari STEI Indonesia, pada tahun 2007.

Indonesian citizen, 41 years old. Obtained his Bachelor of Accounting degree from STEI Indonesia, in 2007.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2023 – to date	*Member of the Audit Committee* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Aug 2024 – to date	*Head of Investigation Audit* PT Bank Syariah Indonesia Tbk
2021 – Jul 2024	*Investigation Auditor Manager* PT Bank Syariah Indonesia Tbk
2017 – 2021	*Investigation Auditor Manager* PT Bank Syariah Mandiri
2013 – 2016	*General Auditor* PT Bank Syariah Mandiri
2012 – 2013	*Supervisor Internal Auditor* PT Graha Kerindo Utama
2011 – 2012	*Audit Manager* Apotek Roxy Group
2010	*Credit Marketing Officer* PT Summit Oto Finance
2007 – 2010	*Senior Independent Control Unit* PT Summit Oto Finance
2007	*Junior Auditor* *Public Accountant Firm* Dolly Bambang Sudarmadji & Dadang

Pada tanggal 23 Desember 2025 telah terjadi pergantian susunan anggota Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 015/BOC-MLI/XII/25 tertanggal 23 Desember 2025 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Audit, maka susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

On 23 December 2025, there was a change in the composition of members of the Audit Committee pursuant to the Board of Commissioners' Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 015/BOC-MLI/XII/25 dated 23 December 2025 concerning the Determination of the Composition of the Members of the Audit Committee. Accordingly, the composition of the Audit Committee is as follows:

DANI HAMDANI

Ketua Komite Audit / Chairman of the Audit Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.

His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

GREGORY O.K. ONGKO

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee

Profil beliau tersedia di halaman sebelumnya.

His profile is available in the previous page.

BRANTAS

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee

Profil beliau tersedia di halaman sebelumnya.

His profile is available in the previous page.

Pada tanggal 19 Januari 2026 telah terjadi pergantian susunan anggota Komite Audit Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 001/BOC-MLI/I/26 tertanggal 19 Januari 2026 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Audit, maka susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

On 19 January 2026, there was a change in the composition of the Company's Audit Committee pursuant to the Board of Commissioners' Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 001/BOC-MLI/I/26 dated January 19, 2026 concerning the Determination of the Composition of the Members of the Audit Committee. Accordingly, the composition of the Audit Committee is as follows:

DANI HAMDANI

Ketua Komite Audit / Chairman of the Audit Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.

His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

BRANTAS

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee

Profil beliau tersedia di halaman sebelumnya.

His profile is available in the previous page.

ADI VITHARA PURBA

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia, pada tahun 2004, dan memperoleh gelar Magister Management dari Universitas Indonesia, pada tahun 2007.

Indonesian citizen, 45 years old. Earned a Bachelor of Engineering degree from Universitas Indonesia in 2004, and a Master of Management degree from Universitas Indonesia in 2007.

Riwayat Pekerjaan
Career History

Jan 2026 – to date	*Member of the Audit Committee* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Jan 2026 – to date	*Member of the Risk Monitoring Committee* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Oct 2013 – to date	*Founder & Director* PT Mulia Investasi
Oct 2013 – to date	*Chief Financial Officer* PT Cipta Media Graha
May 2024 – to date	*Audit Committee Member* PT Sarana Menara Nusantara Tbk
Dec 2021 – to date	*Audit Committee Member* PT Tamaris Hidro
Jul 2019 – to date	*Commissioner* PT Primautama Multi Daya
Sep 2011 – Oct 2012	*Head of Risk Management and Compliance* PT GMT Aset Manajemen
Jan 2009 – Aug 2011	*Corporate Finance Research Analyst* PT Nura Kapital
Jan 2008 – Dec 2008	*Research Analyst* PT Semesta Indovest

Periode dan Masa Jabatan Anggota Komite Audit

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun.
2. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dan maksimal adalah 2 (dua) periode.

Independensi Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta bekerja berdasarkan Piagam Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Independensi anggota Komite Audit Perseroan dapat dilihat dari data hubungan keuangan, keluarga, kepengurusan dan kepemilikan pada perusahaan pembiayaan lainnya dari tiap-tiap anggota Komite Audit, dimana tiap-tiap anggota tidak memiliki hubungan afiliasi.

Period and Term of Office of the Audit Committee Members

1. The term of office for members of the Board of Commissioners is 3 (three) years.
2. The term of office of members of Audit Committee may not be longer than the term of office of Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected only for the next 1 (one) period and a maximum of 2 (two) terms.

Audit Committee Independence

The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities and works based on the Audit Committee Charter been approved by the Board of Commissioners. The independence of members of the Company's Audit Committee is proven with the data of family relations, finance, management, and share in other financing companies that shows that all members of the Committee have no affiliation.

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dani Hamdani*		√		√		√		√
Mohammad Syahrial*		√		√		√		√
Adi Vithara Purba**		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko**		√		√		√		√
Brantas		√		√		√		√

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dani Hamdani*		√		√		√		√
Mohammad Syahrial*		√		√		√		√
Adi Vithara Purba**		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko**		√		√		√		√
Brantas		√		√		√		√

Nama Name	Kepengurusan dan Kepemilikan di Perusahaan Pembiayaan lain Management and Ownership in Other Financing Companies					
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Board of Commissioners Member		Sebagai Anggota Direksi As a Board of Directors Member		Sebagai Pemegang Saham As a Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dani Hamdani*		√		√		√
Mohammad Syahrial*		√		√		√
Adi Vithara Purba**		√		√		√
Gregory O.K. Ongko**		√		√		√
Brantas		√		√		√

*) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 015/BOC-MLI/XII/25 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Audit, telah dilakukan pergantian Ketua Komite Audit yang berlaku efektif sejak 23 Desember 2025.
Based on the Resolution of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 015/BOC-MLI/XII/25 regarding the Determination of the Composition of the Audit Committee, the Audit Committee Chairman has been changed which is effective from 23 December 2025.

**) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 001/BOC-MLI/I/26 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Audit, telah dilakukan pergantian Anggota Komite Audit yang berlaku efektif sejak tanggal 19 Januari 2026.
Based on the Resolution of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 001/BOC-MLI/I/26 regarding the Determination of the Composition of the Audit Committee, the Audit Committee Member has been changed which is effective from January 19, 2026.

Piagam Komite Audit

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dari Komite Audit, maka Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 009/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 tanggal 26 September 2022.

Hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, Perseroan telah melakukan penyesuaian Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007/BOC-MLI/III/26 tanggal 17 Maret 2026 yang dapat diakses melalui *website* Perseroan. Adapun penyesuaian ini ditujukan untuk penyelarasan dengan Peraturan OJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/POJK.05/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Audit

1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:
   a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
   b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
   c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
   d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
   e. Komite Audit wajib menyusun laporan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan AP dan/atau KAP.

Audit Committee Charter

To support the implementation of the Audit Committee's duties, the Company has established an Audit Committee Charter pursuant to the Board of Commissioners' Decree No. 009/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 dated 26 September 2022.

As of the issuance of this Annual Report, the Company has updated the Audit Committee Charter based on the Board of Commissioners' Decree No. 007/BOC-MLI/III/26 dated 17 March 2026, which can be accessed through the Company's website. The adjustment was made to align with OJK Regulation No. 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.

Legal Basis

1. Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
2. Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee.
3. Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 9/POJK.05/2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
4. Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.
5. Articles of Association of the Company.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Audit Committee

1. The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.
2. In carrying out its functions, the Audit Committee has duties and responsibilities that at least include:
   a. Reviewing the financial information that will be issued by the Company to the public and/or the authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the financial information of the Company.
   b. Reviewing compliance with laws and regulations related to the activities of the Company.
   c. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the accountant on the services provided.
   d. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant in accordance with applicable laws and regulations.
   e. The Audit Committee shall prepare an evaluation report on the implementation of audit services for AP and/or KAP annual historical financial information.

f. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
j. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :
   a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan.
   b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

   c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
   d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pendidikan dan/atau Pelatihan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Komite Audit pada tahun 2025, Komite Audit Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan atas peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas hasil audit.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun 2025 tertuang dalam rapat-rapat berkala dan telah dipaparkan didalam pembahasan mengenai Rapat Komite Audit.

Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit harus dihadiri oleh mayoritas anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Perseroan wajib memastikan komite untuk menuangkan hasil rapat komite dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

f. Reviewing the implementation of the audit by the internal auditor and supervising the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditor.
g. Reviewing complaints related to the accounting and financial reporting processes of the Company.
h. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company.
i. Maintain the confidentiality of documents, data and information of the Company.
j. The Audit Committee is required to prepare an annual report on the implementation of the Audit Committee's activities in accordance with applicable laws and regulations.

3. In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authorities:
   a. Access documents, data, and information of the Companies regarding employees, funds, assets, and necessary Company resources.
   b. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the functions of internal audit, risk management, and accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
   c. Involve independent parties other than members of the Audit Committee as needed to assist in carrying out their duties (if needed).
   d. Carry out other powers given by the Board of Commissioners.

Education and/or Training

To improve the knowledge and quality of Audit Committee members in 2025, the Company's Audit Committee continues to keep abreast of applicable regulations. This is done to continuously improve the quality of audit results.

Implementation of Audit Committee Activities

The implementation of Audit Committee activities in 2025 is contained in regular meetings and has been described in the discussion of Audit Committee Meetings.

Audit Committee Meeting

1. The Audit Committee holds regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months.
2. Audit Committee meetings must be attended by a majority of Committee members, including one (1) Independent Commissioner and one (1) Independent Party.
3. Audit Committee meeting decisions are taken based on deliberation for consensus.
4. In the event that consensus cannot be reached, decisions shall be made based on a majority vote.

5. The Company's shall ensure that the committee records the results of the committee meeting in the minutes of the meeting and properly documents them.

6. Perseroan wajib memastikan komite untuk mencantumkan perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Anggota komite yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat komite berhak menerima salinan risalah rapat komite.
8. Jumlah rapat komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota komite harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola yang Baik dan laporan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. The Company's shall ensure that any dissenting opinions arising during the committee meeting are clearly stated in the minutes of the meeting, including the reasons for such dissenting opinions.
7. Committee members, whether present or absent at the committee meeting, are entitled to receive a copy of the minutes of the committee meeting.
8. The number of committee meetings that have been held and the attendance record of each committee member must be disclosed in the Good Corporate Governance implementation report and other reports in accordance with the provisions of laws and regulations.

Frekuensi Rapat Komite Audit

Audit Comittee Meeting Frequency

Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings			
Nama Name	Kehadiran Attendance	Frekuensi Frequency	Rasio Kehadiran Attendance Ratio
Dani Hamdani*	-	-	-
Mohammad Syahrial*	6	6	100%
Adi Vithara Purba**	-	-	-
Gregory O.K. Ongko**	5	6	83%
Brantas	6	6	100%

*) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 015/BOC-MLI/XII/25 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Audit, telah dilakukan pergantian Ketua Komite Audit yang berlaku efektif sejak 23 Desember 2025.
Based on the Resolution of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 015/BOC-MLI/XII/25 regarding the Determination of the Composition of the Audit Committee, the Audit Committee Chairman has been changed which is effective from 23 December 2025.

**) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 001/BOC-MLI/I/26 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Audit, telah dilakukan pergantian Anggota Komite Audit yang berlaku efektif sejak tanggal 19 Januari 2026.
Based on the Resolution of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 001/BOC-MLI/I/26 regarding the Determination of the Composition of the Audit Committee, the Audit Committee Member has been changed which is effective from January 19, 2026.

Uraian Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings Description		
No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	12 Mar 2025	Pemaparan dan Pembahasan hasil pemeriksaan Audit Eksternal – Deloitte untuk tahun pemeriksaan 2024 Presentation and discussion of the results of the External Audit examination by Deloitte for the 2024 audit year
2.	18 Mar 2025	• Laporan keuangan per-akhir Februari 2025 Financial statements as of the end of February 2025 • Hasil pemeriksaan Audit per Maret 2025 Audit examination results as of March 2025
3.	20 May 2025	• Hasil evaluasi penggunaan AP dan KAP Deloitte tahun 2024 – Laporan Keuangan Tahunan. Evaluation results of the engagement of the Public Accountant (PA) and Public Accounting Firm (PAF) Deloitte for 2024 – Annual Financial Statements • Rekomendasi penggunaan AP dan KAP tahun 2025 – Laporan Keuangan Tahunan Recommendation for the engagement of the Public Accountant (PA) and Public Accounting Firm (PAF) for 2025 – Annual Financial Statements
4.	20 Jun 2025	• Laporan keuangan per-akhir April 2025 Financial statements as of the end of April 2025 • Hasil pemeriksaan Audit per Juni 2025 Audit examination results as of June 2025
5.	21 Oct 2025	• Laporan keuangan per-akhir September 2025 Financial statements as of the end of September 2025 • Hasil pemeriksaan Audit per Oktober 2025 Audit examination results as of October 2025
6.	10 Dec 2025	• Pemaparan dan Pembahasan persiapan pemeriksaan Audit Eksternal – Deloitte untuk tahun pemeriksaan 2025 Presentation and discussion on the preparation for the External Audit examination by Deloitte for the 2025 audit year

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Persyaratan Keanggotaan

1. Komite Nominasi dan Remunerasi, wajib beranggotakan paling sedikit:
   a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua;
   b. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
   c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia.
2. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, wajib :
   a. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik;
   b. Memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia; dan
   c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Setiap anggota Komite Nominasi & Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
6. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Susunan, Profil dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 011/BOC-MLI/XI/24 tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi maka susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut :

The Nomination and Remuneration Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting to carry out the functions and duties of the Board of Commissioners regarding the Nomination and Remuneration of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

Member's Requirements

1. The Nomination and Remuneration Committee must consist of at least:
   a. 1 (one) Independent Commissioner who serves as chairperson;
   b. 1 (one) member of the Board of Commissioners; and
   c. 1 (one) Executive Officer in charge of human resource management.
2. Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the Remuneration and Nomination Committee.
3. In the event that more than three (3) members are appointed to the Remuneration and Nomination Committee, there shall be at least two (2) Independent Commissioners.
4. Members of the Nomination and Remuneration Committee, must:
   a. Have good integrity, character and morals;
   b. Have good knowledge in the field of Human Resource management; and
   c. Have adequate knowledge of laws and regulations in the field of manpower and other relevant laws and regulations.
5. Each member of the Nomination & Remuneration Committee is prohibited from taking personal benefits, either directly or indirectly, from the Company's activities other than legitimate income.
6. Members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed and dismissed based on the decision of the Board of Commissioners meeting.

Composition, Profile and Work Experience of Nomination and Remuneration Committee Members

In accordance with the Resolution of the Board of Commissioners Number 011/BOC-MLI/XI/24 dated 20 November 2024 concerning Determination of Composition of Members of the Nomination and Remuneration Committee, the composition of members of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

MOHAMMAD SYAHRIAL

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Komite Audit.
His profile is available in Audit Committee Profile.

YASUO IMAIZUMI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

ANDRI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga negara Indonesia, 39 tahun, memperoleh gelar sarjana Ekonomi dari Trisakti School of Management (d/h STIE Trisakti) pada tahun 2006.

Indonesian citizen,39 years old, obtained a bachelor's degree in Economic from Trisakti School of Management (formerly STIE Trisakti) in 2006.

Riwayat Pekerjaan
Career History

Nov 2024 – to date	*Head of Human Resources Division* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2019 – Nov 2024	*Head of Finance Treasury Department* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2016 – 2019	*Head of Operational Departement* PT Verena Multi Finanace Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2009 - 2016	*Section Head of Operational Department* PT Verena Multi Finanace Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2007 – 2009	*Credit Analyst Staff* PT Swadharma Indotama Finance (now PT Shinhan Indo Finance)

Pada tanggal 23 Desember 2025, telah terjadi perubahan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 016/BOC-MLI/XII/25 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, maka susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut :

On 23 December 2025, there was a change in the composition of the Nomination and Remuneration Committee members in accordance with the Resolution of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 016/BOC-MLI/XII/25 concerning the Determination of the Composition of the Nomination and Remuneration Committee Members. Accordingly, the composition of the Nomination and Remuneration Committee members is as follows:

DANI HAMDANI

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

YASUO IMAIZUMI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

ANDRI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profil Beliau tesedia di bagian sebelumnya.

His profile is presented on the previous section.

Periode Masa Jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
2. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
3. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Period and Term of Office of The Nomination dan Remuneration Committee

1. Members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed for a specific term and may be reappointed.
2. The term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee shall not exceed the term of the Board of Commissioners as stipulated in the articles of association.
3. The replacement of members of the Nomination and Remuneration Committee who are not from the Board of Commissioners must be carried out no later than 60 (sixty) days from the time such members are no longer able to perform their functions.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta bekerja berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dapat dilihat dari data hubungan keuangan, keluarga, kepengurusan dan kepemilikan pada perusahaan pembiayaan lainnya dari tiap-tiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimana tiap-tiap anggota tidak memiliki hubungan afiliasi.

Nomination and Remuneration Committee Independence

Nomination and Remuneration Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities and works based on the Nomination and Remuneration Committee Charter which has been approved by the Board of Commissioners. The independence of members of the Company's Nomination and Remuneration Committee is proven with the data of family relations, finance, management, and share in other financing companies that shows that all members of the Committee have no affiliation.

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dani Hamdani*		√		√		√		√
Mohammad Syahrial*		√		√		√		√
Yasuo Imaizumi**		√		√	√		√	
Andri		√		√		√		√

*) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 016/BOC-MLI/XII/25 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, telah dilakukan pergantian Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang berlaku efektif sejak 23 Desember 2025.
Based on the Resolution of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 016/BOC-MLI/XII/25 concerning the Determination of the Composition of the Member of the Nomination and Remuneration Committee, the Nomination and Remuneration Committee Chairman has been changed which is effective from 23 December 2025.

**) Beliau memiliki hubungan afiliasi yang bersifat keuangan dengan Mizuho Leasing Co., Ltd., selaku Pemegang Saham Pengendali dan salah satu Pemegang Saham Utama. Saat ini Beliau menjabat sebagai *Senior Deputy General Manager in International Business Administration Department, Relationship Manager International Business Development Department, Director of Overseas Subsidiaries International and Business Administration Department* di Mizuho Leasing Co., Ltd.
He has a financial affiliation with Mizuho Leasing Co., Ltd., as the Controlling Shareholder and one of the Major Shareholders. Currently, he holds positions as Senior Deputy General Manager in the International Business Administration Department, Relationship Manager in the International Business Development Department, and Director of Overseas Subsidiaries in the International and Business Administration Department at Mizuho Leasing Co., Ltd.

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dani Hamdani*		√		√		√		√
Mohammad Syahrial*		√		√		√		√
Yasuo Imaizumi		√		√		√		√
Andri		√		√		√		√

*) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 016/BOC-MLI/XII/25 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, telah dilakukan pergantian Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang berlaku efektif sejak 23 Desember 2025.
Based on the Resolution of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 016/BOC-MLI/XII/25 concerning the Determination of the Composition of the Member of the Nomination and Remuneration Committee, the Nomination and Remuneration Committee Chairman has been changed which is effective from 23 December 2025.

Nama Name	Kepengurusan dan Kepemilikan di Perusahaan Pembiayaan lain Management and Ownership in Other Financing Companies					
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Board of Commissioners Member		Sebagai Anggota Direksi As a Board of Directors Member		Sebagai Pemegang Saham As a Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dani Hamdani*		√		√		√
Mohammad Syahrial*		√		√		√
Yasuo Imaizumi		√		√		√
Andri		√		√		√

*) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 016/BOC-MLI/XII/25 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, telah dilakukan pergantian Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang berlaku efektif sejak 23 Desember 2025.
Based on the Resolution of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 016/BOC-MLI/XII/25 concerning the Determination of the Composition of the Member of the Nomination and Remuneration Committee, the Nomination and Remuneration Committee Chairman has been changed which is effective from 23 December 2025.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dari Komite Nominasi dan Remunerasi, maka Perseroan telah menyusun Piagam Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 tanggal 26 September 2022.

Hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, Perseroan telah melakukan penyesuaian Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/BOC-MLI/III/26 tanggal 17 Maret 2026 yang dapat diakses melalui *website* Perseroan. Adapun penyesuaian ini ditujukan untuk penyelarasan dengan Peraturan OJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dasar Hukum

1. POJK nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas,Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam mekanisme pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   3.1 Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi, paling sedikit:
      a. mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
      b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      c. mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
      d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit dan anggota

Nomination and Remuneration Committee Charter

In supporting the implementation of the duties of the Nomination and Remuneration Committee, the Company has prepared the Nomination and Remuneration Guidelines based on the Decree of the Board of Commissioners Number 007/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 dated September 26, 2022.

As of the issuance of this Annual Report, the Company has updated the Nomination and Remuneration Committee Charter based on the Board of Commissioners' Decree Number 005/BOC-MLI/III/26 dated 17 March 2026, which can be accessed through the Company's website. The adjustment was made to align with OJK Regulation No. 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.

Legal Basis

1. OJK Regulation No. 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
2. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.
3. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
4. OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning the Website of Issuers or Public Companies.
5. Articles of Association of the Company.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Nomination dan Remuneration Committee

1. The Nomination and Remuneration Committee must act independently in carrying out its duties.
2. In carrying out its duties, this committee is responsible to the Board of Commissioners.
3. In carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee has the following detailed duties and responsibilities:
   3.1 Develop and provide recommendations related to nomination policies, at a minimum:
      a. regarding the system and procedures for the selection and/or replacement of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
      b. providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
      c. identifying and providing recommendations regarding candidates for members of the Board of Directors and/or candidates for members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
      d. providing recommendations to the Board of Commissioners regarding Independent Parties who will become members of the audit committee

komite pemantau risiko;

e. menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan

f. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3.2 Terkait dengan fungsi Remunerasi, sebagai berikut:

a. melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi.
b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   i. Struktur Remunerasi;
   ii. Kebijakan atas Remunerasi; dan
   iii. Besaran atas Remunerasi.

Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang di terima tiap – tiap anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.

4. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;

c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

5. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

a. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi;
b. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

c. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

d. Menyusun besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

6. Struktur Remunerasi dapat berupa:
   a. Gaji;
   b. Honorarium;

and members of the risk monitoring committee;

e. developing mechanisms and conducting performance assessments of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; and
f. providing recommendations to the Board of Commissioners regarding competency development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

3.2 Regarding the functions of the Remuneration, as follows:

a. conducting evaluations and recommendations related to remuneration policies.
b. providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
   i. Remuneration Structure;
   ii. Remuneration Policy; and
   iii. Remuneration Amount.

Assist the Board of Commissioners in assessing performance in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

4. In carrying out the Nomination function, the Nomination and Remuneration Committee is required to carry out the following procedures:

a. Formulate the composition and process of nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
b. Formulate policies and criteria needed in the nomination process for prospective members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
c. Assist in the evaluation of the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
d. Formulate capacity development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
e. Review and propose candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

5. In carrying out the Remuneration function, the Nomination and Remuneration Committee is required to carry out the following procedures:

a. Conduct evaluations and recommendations regarding remuneration policies;
b. Formulate Remuneration structure for members Directors and/or members of the Board of Commissioners;
c. Formulate policies on remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
d. Formulate the amount of remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

6. Remuneration structures may include:
   a. Wages;
   b. Honorarium;

c. Insentif; dan/atau
d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

7. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
   a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
   b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
   c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
   d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
8. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
9. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pegawai Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan sebagaimana Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang yang diberikan kepada Dewan Komisaris paling lambat setiap akhir tahun.
11. Laporan sebagaimana angka 10 merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Guna menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi akan mendapatkan wewenang sebagai berikut:
    a. Komite Nominasi dan Remunerasi memperoleh kewenangan terhadap akses dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan dari Perseroan dengan tetap menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan/atau informasi Perseroan tersebut.
    b. Melakukan komunikasi dengan unit kerja dan pihakpihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.
    c. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pendidikan dan/atau Pelatihan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan atas peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja yang dihasilkan.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2025 tertuang dalam rapat-rapat berkala dan telah

c. Incentive; and/or
d. Fixed and/or variable allowances.

7. The preparation of the structure, policy, and amount of Remuneration must take into account:
   a. The remuneration applicable to the industry is in accordance with the business activities of the Issuer or similar Public Company and the business scale of the Issuer or Public Company in its industry;
   b. The duties, responsibilities, and authorities of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners are related to the achievement of the objectives and performance of the Issuer or Public Company;
   c. Performance targets or performance of each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners; and
   d. Balance between fixed and variable benefits.
8. The structure, policy, and amount of Remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners must be evaluated by the Nomination and Remuneration Committee at least once a year.
9. Conduct evaluations and make recommendations related to the remuneration policy for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Company Employees in accordance with the laws and regulations.
10. The Nomination and Remuneration Committee shall report on the implementation of the duties, responsibilities, and procedures of Nomination and Remuneration carried out in accordance with the Duties, Responsibilities, and Authorities assigned to the Board of Commissioners no later than the end of each year.
11. The report referred to in point 10 is part of the Board of Commissioners' task implementation report and is presented at the General Meeting of Shareholders.
12. In order to carry out its duties and responsibilities, the Nomination and Remuneration Committee shall have the following authorities:
    a. The Nomination and Remuneration Committee shall have the authority to access documents, data, and/or information required from the Company while maintaining the confidentiality of such documents, data, and/or information of the Company.
    b. Communicate with work units and other parties within the Company to obtain information or documents related to the implementation of the Nomination and Remuneration Committee's duties.
    c. Exercise other authorities granted by the Company's Board of Commissioners.

Education and /or Training

To improve the knowledge and quality of the Nomination and Remuneration Committee members in 2025, the Company's Nomination and Remuneration Committee continues to follow the development of applicable regulations. This is done to continuously improve the performance quality result.

The Implementation of Nomination dan Remuneration Committee Activities

The implementation of the Nomination and Remuneration Committee activities in 2025 is contained in periodic meetings

dipaparkan didalam pembahasan mengenai Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang pejabat di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
3. Keputusan rapat komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (3), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka pengambilan keputusan akan diadakan dalam rapat selanjutnya yang diselenggarakan paling lambat 30 hari kemudian yang dihadiri oleh anggota komite Nominasi dan Remunerasi, Komisaris Independen dan Pejabat dibawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia (SDM).
6. Komite wajib memastikan untuk mencantumkan perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite sebagaimana dimaksud secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
8. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
9. Anggota komite yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat komite berhak menerima salinan risalah rapat komite.
10. Jumlah rapat komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota komite harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola yang Baik dan laporan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

and has been described in the discussion of the Nomination dan Remuneration Committee Meeting.

Nomination and Remuneration Committee Meeting

1. Nomination and Remuneration Committee meetings are held periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months.
2. Attended by a majority of the members of the Nomination and Remuneration Committee, including 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) executive under the Board of Directors responsible for human resources.
3. Committee meeting decisions are first made based on deliberation to reach consensus.
4. In the event that consensus cannot be reached as referred to in number (3), decisions shall be made based on a majority vote.
5. If a decision made by voting results in a tie, the decision will be made at the next meeting held no later than 30 days later, attended by members of the Nomination and Remuneration Committee, Independent Commissioners, and Officers under the Board of Directors in charge of Human Resources (HR).
6. The Committee must ensure that any differences of opinion that arise during committee meetings are clearly stated in the minutes of the meeting, along with the reasons for these differences of opinion.
7. The results of the Nomination and Remuneration Committee meeting must be recorded in the meeting minutes and properly documented.
8. Minutes of the Nomination and Remuneration Committee meetings must be submitted in writing to the Board of Commissioners.
9. Committee members who are present or absent at committee meetings are entitled to receive a copy of the committee meeting minutes.
10. The number of committee meetings held and the attendance of each committee member must be included in the Good Governance implementation report and other reports in accordance with the provisions of laws and regulations.

Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Comittee Meeting Frequency

Nama Name	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Meetings		
	Kehadiran Attendance	Frekuensi Frequency	Rasio Kehadiran Attendance Ratio
Dani Hamdani*	-	-	-
Mohammad Syahrial*	4	4	100%
Yasuo Imaizumi	4	4	100%
Andri	4	4	100%

*) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 016/BOC-MLI/XII/25 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, telah dilakukan pergantian Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang berlaku efektif sejak 23 Desember 2025.
Based on the Resolution of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 016/BOC-MLI/XII/25 concerning the Determination of the Composition of the Member of the Nomination and Remuneration Committee, the Nomination and Remuneration Committee Chairman has been changed which is effective from 23 December 2025.

Uraian Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Meetings Description		
No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	08 May 2025	1. Rekomendasi bonus untuk Anggota Dewan Komisaris. Bonus recommendation for members of the Board of Commissioners. 2. Rekomendasi bonus untuk Anggota Direksi. Bonus recommendation for members of the Board of Directors. 3. *Point refreshment* Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. Point refreshment for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners. 4. Program pengembangan kemampuan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2025. Capacity building program for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners in 2025. 5. Lainnya. Others.
2	15 Jul 2025	1. Dasar Penetapan Nilai dan Struktur : Basis for Determining Values and Structure: i. Honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan; Honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and; ii. Upah dan tunjangan anggota Direksi. Salary and allowances of members of the Board of Directors. 2. Penetapan Rekomendasi nilai : Establishment of Score Recommendation: i. Honorarium untuk anggota Dewan Komisaris dan; Honorarium for members of the Board of Commissioners and; ii. Upah untuk anggota Direksi. Salary for members of the Board of Directors. 3. *Poin refreshment* Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. Point refreshment for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. 4. Lainnya. Others.
3	06 Nov 2025	1. *Poin refreshment* anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Point refreshment for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. 2. Program pengembangan kemampuan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2026. Development Program for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2026. 3. Lainnya. Others.
4	11 Dec 2025	1. Program pengembangan kemampuan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Karyawan pada tahun 2026. Competency Development Program for Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Employees in 2026. 2. Kewajiban pelatihan atau seminar bagi Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Karyawan pada tahun 2026. Mandatory training or seminar requirements for Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Employees in 2026. 3. Remunerasi Komisaris dan Direktur yang dianggkat pada RUPSLB Desember 2025. Remuneration of Commissioners and Directors appointed at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) in December 2025. 4. Rencana tugas komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2026. Work plan of the Nomination and Remuneration Committee in 2026. 5. Lainnya. Others.

Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait penerapan Manajemen Risiko.

Persyaratan Keanggotaan

Berpatokan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris, persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

1. Beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua.
   b. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.
2. Keahlian Pihak Independen dibuktikan dengan:
   a. Memiliki sertifikat kompetensi untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite, dan/atau
   b. Memiliki sertifikat manajemen risiko.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib:
   a. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik;
   b. Memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang keuangan dan/atau manajemen risiko.
4. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memenuhi syarat:
   a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan sesama anggota Komite Pemantau Risiko, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham.
   b. Memiliki pengalaman terkait keuangan dan/atau Manajemen Risiko.
6. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

Susunan, Profil dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 004/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Pemantau Risiko yang berlaku efektif sejak 1 April 2023, maka susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

MOHAMMAD SYAHRIAL

Ketua Komite Pemantau Risiko
Chairman of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Komite Audit.
His profile is available in Audit Committee Profile.

GREGORY O.K. ONGKO

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Komite Audit.
His profile is available in the Audit Committee Profile.

The Risk Monitoring Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting the functions and duties of the Board of Commissioners regarding the implementation of Risk Management.

Membership Requirements

Based on the Charter of the Risk Monitoring Committee as stipulated by the Board of Commissioners, the membership requirements of the Risk Monitoring Committee are as follows:

1. The Risk Monitoring Committee shall consist of at least:
   a. 1 (one) Independent Commissioner who serves as the chairman.
   b. 1 (one) independent party with expertise in finance and/or risk management who serves as a member.
2. The expertise of the Independent Party shall be evidenced by:
   a. Possession of a competency certificate to support the implementation of the committee's duties and responsibilities, and/or
   b. Possession of a risk management certification.
3. Members of the Risk Monitoring Committee are required to:
   a. Have integrity, good character, and high moral standards;
   b. Possess adequate knowledge in the field of finance and/or risk management.
4. Each member of the Risk Monitoring Committee is prohibited from obtaining personal benefits, either directly or indirectly, from the Company's activities other than legitimate remuneration.
5. Members of the Risk Monitoring Committee must meet the following requirements:
   a. Have no affiliation with other members of the Risk Monitoring Committee, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Shareholders.
   b. Have relevant experience in finance and/or risk management.
6. Members of the Board of Directors are prohibited from serving as members of the Risk Monitoring Committee.

Composition, Profile and Work Experience of Risk Monitoring Committee Members

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 004/BOC-MLI/LEGAL/III/23 concerning the determination of members of the Risk Monitoring Committee which is effective from April 1, 2023, then the composition of the members of the Risk Monitoring Committee is as follows:

Pada tanggal 23 Desember 2025 telah terjadi perubahan susunan anggota Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 017/BOC-MLI/XII/25 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko yang berlaku efektif sejak 23 Desember 2025, maka susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

On December 23, 2025 there has been a change in the composition of the members of the Risk Monitoring Committee in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 017/BOC-MLI/XII/25 concerning the Determination of the Composition of the Members of the Risk Monitoring Committee which is effective from December 23, 2025, then the composition of the members of the Risk Monitoring Committee is as follows:

DANI HAMDANI

Ketua Komite Pemantau Risiko
Chairman of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

GREGORY O.K. ONGKO

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Komite Audit.
His profile is available in the Audit Committee Profile.

Pada tanggal 19 Januari 2026 telah terjadi perubahan susunan anggota Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 002/BOC-MLI/I/26 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko yang berlaku efektif sejak 19 Januari 2026, maka susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

On January 19, 2026 there has been a change in the composition of the members of the Risk Monitoring Committee in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 002/BOC-MLI/I/26 concerning the Determination of the Composition of the Members of the Risk Monitoring Committee which is effective from January 19, 2026, then the composition of the members of the Risk Monitoring Committee is as follows:

DANI HAMDANI

Ketua Komite Pemantau Risiko
Chairman of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

ADI VITHARA PURBA

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Komite Audit.
His profile is available in the Audit Committee Profile.

Periode dan Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

1. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diangkat kembali.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta bekerja berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Independensi anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan, dapat dilihat dari data hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan pada perusahaan pembiayaan lainnya dari tiap-tiap anggota Komite Pemantau Risiko dimana tiap-tiap anggota tidak memiliki hubungan afiliasi.

Period and Term of Office of The Risk Monitoring Committee Member

1. Members of the Risk Monitoring Committee are appointed and dismissed based on resolutions of the Board of Commissioners' meeting.
2. Members of the Risk Monitoring Committee are appointed for a specific term and may be reappointed.
3. The term of office of members of the Risk Monitoring Committee shall not exceed the term of the Board of Commissioners and they may be reappointed.

Risk Monitoring Committee Independence

The Risk Monitoring Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities, and operates based on the Risk Monitoring Committee Charter approved by the Board of Commissioners. The independence of the Company's Risk Monitoring Committee members can be seen from data on family, financial, managerial, and shareholding relationships in other financing companies, where each member does not have any affiliated relationships.

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dani Hamdani*		√		√		√		√
Mohammad Syahrial*		√		√		√		√
Adi Vithara Purba**		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko**		√		√		√		√

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dani Hamdani*		√		√		√		√
Mohammad Syahrial*		√		√		√		√
Adi Vithara Purba**		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko**		√		√		√		√

Nama Name	Kepengurusan dan Kepemilikan di Perusahaan Pembiayaan lain Management and Ownership in Other Financing Companies					
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Board of Commissioners Member		Sebagai Anggota Direksi As a Board of Directors Member		Sebagai Pemegang Saham As a Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dani Hamdani*		√		√		√
Mohammad Syahrial*		√		√		√
Adi Vithara Purba**		√		√		√
Gregory O.K. Ongko**		√		√		√

*) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 017/BOC-MLI/XII/25 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko, telah dilakukan pergantian Ketua Komite Pemantau Risiko yang berlaku efektif sejak 23 Desember 2025.
Based on the Resolution of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 017/BOC-MLI/XII/25 regarding the Determination of the Composition of, the Risk Monitoring Committee Chairman has been changed which is effective from 23 December 2025.

**) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 002/BOC-MLI/I/26 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko, telah dilakukan pergantian Anggota Komite Pemantau Risiko yang berlaku efektif sejak tanggal 19 Januari 2026.
Based on the Resolution of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 002/BOC-MLI/I/26 regarding the Determination of the Composition of the Risk Monitoring Committee Member has been changed which is effective from January 19, 2026.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dari Komite Pemantau Risiko, maka Perseroan telah menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 014/BOC-MLI/LEGAL/XII/25 tanggal 15 Desember 2025 yang dapat diakses melalui *website* Perseroan.

Dasar Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnnya.

Risk Monitoring Committee Charter

In supporting the implementation of the Risk Monitoring Committee's tasks, the Company had drafted the Risk Monitoring Committee Charter based on the Board of Commissioners' Decree Number 014/BOC-MLI/LEGAL/XII/25 dated December 15, 2025, which could be accessed through the Company's website.

Legal Basis

- Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.

- Peraturan OJK Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- Peraturan OJK Nomor 28/ POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Surat Edaran OJK Nomor 11/ SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- Anggaran Dasar Perseroan.

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2025 telah ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK (PADK) Nomor 48/PADK.06/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan melakukan pengkajian terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko pada tahun 2026.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam mekanisme pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan.
   b. Melakukan evaluasi Pedoman Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi.
   c. Melakukan evaluasi Laporan hasil penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan Perusahaan.
   d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan unit kerja manajemen risiko.
4. Dalam mekanisme pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko memiliki kewenangan sebagai berikut:
   a. Mengakses dokumen, data, informasi, dan sumber daya Perusahaan yang relevan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap manajemen risiko.
   b. Melakukan komunikasi langsung dengan unit kerja manajemen risiko, unit audit internal, eksternal, maupun pihak lain yang dianggap relevan.
   c. Melakukan kewenangan lain yang secara sah diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup pengawasan manajemen risiko.

Pendidikan dan/atau Pelatihan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2025, Komite Pemantau Risiko Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan atas peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja yang dihasilkan.

- OJK Regulation Number 42 of 2024 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
- OJK Regulation Number 28/POJK.05/2020 concerning the Assessment of the Soundness Level of Non-Bank Financial Services Institutions.
- OJK Circular Letter Number 7/SEOJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Companies and Sharia Financing Companies.
- OJK Circular Letter Number 11/SEOJK.05/2020 concerning the Assessment of the Soundness Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies.
- Articles of Association of the Company.

Furthermore, on December 30, 2025, the Financial Services Authority Board of Commissioners Regulation (PADK) Number 48/PADK.06/2025 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions was enacted. In relation to this, the Company will review the Risk Monitoring Committee Charter in 2026.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Risk Monitoring Committee

1. The Risk Monitoring Committee is required to act independently in carrying out its duties.
2. In carrying out its duties, this committee is responsible to the Board of Commissioners.
3. In the mechanism of carrying out its duties, the Risk Monitoring Committee has detailed duties and responsibilities as follows:
   a. Evaluate the conformity between risk management policies and the implementation of Company policies.
   b. Evaluating the Risk Management Guidelines prepared by the Board of Directors.
   c. Evaluating the self-assessment report on the Company's soundness level.
   d. Conduct monitoring and evaluation of the implementation of the duties of the risk management committee and the risk management work unit.
4. In the course of performing its duties, the Risk Monitoring Committee shall have the following authorities:
   a. To access documents, data, information, and Company resources that are relevant to the execution of its oversight function over risk management.
   b. To establish direct communication with the risk management work unit, internal and external audit functions, as well as other parties deemed relevant.
   c. To exercise any other authorities lawfully granted by the Board of Commissioners within the scope of risk management oversight.

Education and/or Training

To improve the knowledge and quality of members of the Risk Monitoring Committee in 2025, the Company's Risk Monitoring Committe continues to follow developments in applicable regulations. This is done to continuously improve the quality of the resulting performance.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko pada tahun 2025 tertuang dalam rapat-rapat berkala dan telah dipaparkan di dalam pembahasan mengenai Rapat Komite Pemantau Risiko.

Rapat Komite Pemantau Risiko

1. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko harus dihadiri oleh mayoritas anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
3. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko harus terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko harus dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
6. Perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau Risiko harus dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
7. Anggota komite yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat komite berhak menerima salinan risalah rapat komite.

Implementation of Risk Management Committee Activities

The implementation of the Risk Monitoring Committee activities in 2025 is contained in regular meetings and has been described in the discussion of the Risk Monitoring Committee Meeting.

Risk Monitoring Committee Meeting

1. Risk Monitoring Committee meetings are held periodically at least 4 (four) times a year.
2. Risk Monitoring Committee meetings must be attended by a majority of committee members including 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) Independent Party.
3. Risk Monitoring Committee meeting decisions are made based on deliberation and consensus.
4. In the event that a decision based on deliberation and consensus is not reached, the decision is made based on the majority vote.
5. The results of the Risk Monitoring Committee meeting must be stated in the minutes of the meeting and properly documented.
6. Dissenting opinions that occur in the Risk Monitoring Committee meeting must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference of opinion.
7. Committee members who are present or absent from committee meetings are entitled to receive a copy of the minutes of the committee meeting.

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Comittee Meeting Frequency

Nama Name	Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Meetings		
	Kehadiran Attendance	Frekuensi Frequency	Rasio Kehadiran Attendance Ratio
Dani Hamdani*	1	4	25%
Mohammad Syahrial*	3	4	75%
Adi Vithara Purba**	-	-	-
Gregory O.K. Ongko**	4	4	100%

*) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 017/BOC-MLI/XII/25 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko, telah dilakukan pergantian Ketua Komite Pemantau Risiko yang berlaku efektif sejak 23 Desember 2025.
Based on the Resolution of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 017/BOC-MLI/XII/25 regarding the Determination of the Composition of, the Risk Monitoring Committee Chairman has been changed which is effective from 23 December 2025.

**) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Nomor 002/BOC-MLI/I/26 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko, telah dilakukan pergantian Anggota Komite Pemantau Risiko yang berlaku efektif sejak tanggal 19 Januari 2026.
Based on the Resolution of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Number 002/BOC-MLI/I/26 regarding the Determination of the Composition of the the Risk Monitoring Committee Member has been changed which is effective from January 19, 2026.

No.	Uraian Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Meetings Description	
	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	11 Mar 2025	• Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan. Company Soundness Level Assessment Report. • Pembaharuan Pedoman Manajemen Risiko. Update of Risk Management Guidelines.
2.	14 May 2025	Penjelasan mengenai Peraturan OJK Baru atau Pembaharuan tahun 2024. Explanation of New or Updated OJK Regulations for 2024.

Uraian Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Meetings Description		
No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
3.	08 Oct 2025	• Amandemen Piagam Komite Pemantau Risiko. Amendment to the Risk Monitoring Committee Charter. • Update terkait Pemeriksaan OJK. Update on OJK Inspections. • Ringkasan sanksi administratif dari OJK terkait pelanggaran kepatuhan Perseroan. Summary of administrative sanctions from the OJK related to Company compliance violations.
4.	24 Dec 2025	• Perubahan Piagam Komite Pemantau Risiko. Amendment to the Risk Monitoring Committee Charter. • Update terkait Pemeriksaan OJK (Sanksi Administratif & Tindak Lanjut Pemeriksaan). Updates regarding OJK Audits (Administrative Sanctions & Audit Follow-Up). • Risiko Peningkatan Rasio NPF (Net) untuk Proyeksi di tahun 2026. Risk of an Increase in the Net Non-Performing Loan (NPF) Ratio for Projections in 2026.

Komite Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Supporting Committees for Implementing the Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung oleh organ pendukung yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.

In supporting the effective implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors is supported by supporting organs, namely the Risk Management Committee and Information Technology Steering Committee.

Penilaian Kinerja Komite dan Unit Kerja yang Berada di Bawah Direksi

Direksi melakukan penilaian terhadap kinerja masing-masing komite di bawah Direksi yang diselenggarakan setiap tahun berdasarkan laporan yang di buat secara mandiri oleh masing-masing komite. Hasil penilaian kinerja komite di bawah Direksi tersebut disampaikan oleh Direksi dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Performance Assessment of Committees and Work Units Under the Board of Directors

The Board of Directors conducts an annual performance assessment of each committee under the Board of Directors based on reports prepared independently by each committee. The results of the performance assessment of the committees under the Board of Directors are presented by the Board of Directors in the Company's Annual Report.



Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee

Sebagai implementasi dari POJK Nomor 42 tahun 2024 tertanggal 24 Desember 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 4 Maret 2024 Nomor DIR- 001/SKD-MLI/III/24 terkait Komite Manajemen Risiko Perseroan dengan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua
Direktur Utama

Anggota Tetap
- Seluruh anggota Direksi selain Direktur Utama

- *Risk Management Expert*
- Kepala Divisi Manajemen Risiko & *Compliance*
- Kepala Departemen Manajemen Risiko
- Kepala Departemen Audit Internal & *Independent Control Unit*

Anggota Tidak Tetap
- Deputi Direktur terkait
- Kepala Divisi terkait
- Kepala Departemen terkait yang ditunjuk oleh Direktur, *Deputy* Direktur, Senior *Manager* atau Kepala Divisi untuk topik – topik tertentu.

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi :
1. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, termasuk tingkat risiko yang diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance)*, kerangka manajemen risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. Melakukan perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko, antara lain menyempurnakan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perseroan yang mempengaruhi kecukupan pendanaan, profil risiko Perseroan, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi;
3. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti penyaluran pembiayaan yang dilakukan, pengambilan posisi risiko, atau pengambilan eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan; dan
4. Menerima laporan profil risiko yang disusun dan disampaikan oleh fungsi manajemen risiko.

Selanjutnya, pada tahun 2021 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor DIR-0014/SKD/VIII/2021 tertanggal 1 September 2021 Perseroan telah menetapkan pemberlakuan Pedoman Manajemen Risiko yang akan menjadi panduan bagi penanggung jawab penerapan Manajemen Risiko di Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

As an implementation of POJK Number 42 Year 2024 dated December 24, 2024 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions, in accordance with the Decree of the Board of Directors dated March 4, 2024 Number DIR-001/SKD-MLI/III/24 concerning the Company's Risk Management Committee with the following membership:

Chairman
President Director

Permanent Member
- All members of the Board of Directors other than the President Director
- Risk Management Expert
- Head of Risk Management & Compliance Division
- Head of Risk Management Department
- Head of Internal Audit & Independent Control Unit Department

Non-Permanent Member
- Related Deputy Director
- Head of related Divisions
- Head of the relevant Department appointed by the Director, Deputy Director, Senior Manager or Head of Division for certain topics.

The authority and responsibility of the Risk Management Committee is to provide recommendations to the President Director regarding risk management, which at least includes:
1. Develop policies, strategies, and guidelines for the implementation of risk management, including the level of risk appetite and risk tolerance, risk management framework and contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions;
2. Make improvements or adjustments to the implementation of risk management based on the results of the evaluation of the implementation of risk management, including improving the risk management process periodically or incidentally as a result of a change in the Company's external and internal conditions that affect the adequacy of funding, the Company's risk profile, and ineffective implementation risk management based on evaluation results;
3. Determine matters related to business decisions that deviate from normal procedures, such as disbursing financing, taking risk positions, or taking risk exposures that exceed the predetermined limit; and
4. Receive risk profile reports compiled and submitted by the risk management function.

Furthermore, in 2021 through the Decree of the Board of Directors Number DIR-0014/SKD/VIII/2021 dated September 1, 2021 the Company has determined the Implementation of Risk Management Charter which will serve as a guide for those in charge of implementing Risk Management at the Company in carrying out their duties and responsibilities.

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2025 telah ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK (PADK) Nomor 48/PADK.06/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan akan melakukan pengkajian terhadap Pedoman Manajemen Risiko pada tahun 2026.

Furthermore, on December 30, 2025, Regulation of the Members of the OJK Board of Commissioners (PADK) Number 48/PADK.06/2025 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions was stipulated. In connection with this, the Company will review the Risk Management Charter in 2026.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Pelaksanaan kegiatan Komite Manajemen Risiko pada tahun 2025 tertuang dalam rapat secara berkala sebanyak 4 kali dalam setahun dengan rincian sebagai berikut:

Risk Management Committee Meetings

The Risk Management Committee's activities in 2025 will be outlined in four regular meetings annually, as follows:

Uraian Rapat Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee Meetings Description

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	10 Feb 2025	Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan. Company Soundness Level Report.
2.	14 May 2025	Penjelasan mengenai Peraturan OJK Baru atau Pembaharuan tahun 2024. Explanation of New or Updated OJK Regulations for 2024.
3.	03 Sep 2025	Laporan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Report on the Implementation of the Anti Money Laundering, Prevention of Financing Terrorism and Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons.
4.	24 Dec 2025	Diskusi terkait konfirmasi hasil pemeriksaan dan *exit meeting* OJK *update* terkait pemeriksaan OJK. Discussion regarding confirmation of audit results and OJK Exit Meeting Update regarding OJK Audits.

Komite Pengarah Teknologi Informasi
Information Technology Steering Committee

Sebagai implementasi dari POJK NO.4/POJK.05/2021 tertanggal 9 Maret 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, maka pada tahun 2022 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor DIR-001/SKD-LEGAL/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, telah dibentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Direksi Nomor DIR-004/SKD-MLI/VII/24 tanggal 3 Juli 2024, kebijakan terkait Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan telah diperbarui sebagai berikut :

As an implementation of OJK Regulation No. 4/POJK.05/2021 dated March 9, 2021, concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions, an Information Technology Steering Committee was established in 2022 through Board of Directors Decree No. DIR-001/SKD-LEGAL/II/2022 dated February 10, 2022. Furthermore, through Board of Directors Decree No. DIR-004/SKD-MLI/VII/24 dated July 3, 2024, the Company's Information Technology Steering Committee policy was updated as follows:

Struktur dan Keanggotaan

Ketua
Direktur Utama

Wakil Ketua
Direktur IT & HR

Anggota
- Direksi
- Seluruh Deputi Direktur
- *Risk Management Expert*
- Seluruh Kepala Divisi
- Kepala Departemen Teknologi Informasi
- Kepala Departemen Manajemen Risiko
- Kepala Departemen Audit Internal & *Independent Control Unit*

Structure and Membership

Chairman
President Director

Vice Chairman
IT & HR Director

Members
- Board of Directors
- All Deputy Directors
- Risk Management Expert
- All Division Heads
- Head of the Information Technology Department
- Head of the Risk Management Department
- Head of the Internal Audit & Independent Control Unit Department

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait Teknologi Informasi, yang paling sedikit meliputi :

1. Rencana pengembangan Teknologi Informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan;
2. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi;
3. Memastikan kesesuaian proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan Teknologi Informasi;
4. Memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan proyek Teknologi Informasi yang disetujui;
5. Memastikan kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perseroan;
6. Memastikan efektivitas mitigasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Perseroan pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Perseroan;
7. Melakukan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi;
8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
9. Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya Teknologi Informasi yang dimiliki Perseroan.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pada tahun 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan 4 (empat) kali rapat komite yang dihadiri oleh ketua dan seluruh anggota komite sebagai berikut :

The authority and responsibilities of the Information Technology Steering Committee are to provide recommendations to the Board of Directors regarding Information Technology, which at a minimum include:

1. The Information Technology development plan aligned with the Company's business activities;
2. The formulation of Information Technology policies and procedures;
3. Ensuring that approved Information Technology projects are aligned with the Information Technology development plan;
4. Ensuring that the implementation of Information Technology projects is consistent with the approved Information Technology projects;
5. Ensuring that Information Technology is aligned with the needs of the management information system and the Company's business activities;
6. Ensuring the effectiveness of risk mitigation over the Company's investments in the Information Technology sector so that such investments contribute to the achievement of the Company's business objectives;
7. Monitoring the performance of Information Technology and initiatives to improve Information Technology performance;
8. Undertaking efforts to resolve various Information Technology-related issues that cannot be effectively, efficiently, and timely resolved by the user and Information Technology provider work units; and
9. Ensuring the adequacy and allocation of the Company's Information Technology resources.

Information Technology Steering Committee Meetings

In 2025, the Information Technology Steering Committee has conducted 4 (four) committee meetings which were attended by the chairman and all committee members as follows:

Uraian Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi
Information Technology Steering Committee Meeting Description

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	28 Apr 2025	*1. Projects/Enhancements 2025* *2. RPA Progress for Accounting* *3. Upgrade ISO 27001:2022*
2.	14 May 2025	*Progress of Accounting RPA Project: Bank & Cash Reconciliation, OPEX Reconciliation*
3.	10 Nov 2025	*POJK 46 – Collectibility Restructure Timeline*
4.	29 Dec 2025	*IT Report EOY 2025*

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi atas permasalahan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal, dan kegiatan lain yang merupakan agenda kegiatan resmi dari Perseroan.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan surat penunjukan No. DIR-001/TK-CORSEC/SKD/ XII/21 tertanggal 1 Desember 2021, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Fransisca Yuliana Gunawan.

Corporate Secretary is an individual in charge of a work unit that carries out the function of Corporate Secretary. The Corporate Secretary is appointed and dismissed based on the decision of the Board of Directors. The Corporate Secretary is responsible for the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors on issues related to Good Corporate Governance and compliance with the provisions of applicable laws and regulations, particularly Capital Market regulations, and other activities that constitute the official agenda of the Company.

Corporate Secretary Profile

In accordance to letter of appointment No. DIR-001/TK-CORSEC/SKD/ XII/21 dated December 1, 2021, Corporate Secretary is held by Fransisca Yuliana Gunawan.

FRANSISCA YULIANA GUNAWAN

Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Profil beliau tersedia di bagian Profil Direksi.
Her profile is available in the Board of Director Profile.

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Merujuk pada Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi dan tugas, di antaranya:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
    - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs *website* Perseroan.
    - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu.
    - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS.
    - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
    - Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
5. Memelihara dan menjamin komunikasi yang intensif dengan para investor.

Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan, di antaranya:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 23 Juni 2025.
2. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 Desember 2025.
3. Menyelenggarakan Paparan Publik Tahunan pada tanggal 23 Desember 2025.
4. *Review* dan melakukan sosialisasi peraturan baru yang diterbitkan oleh regulator di tahun 2025 (OJK dan BEI) serta melakukan pengkajian kebijakan dan ketentuan Perseroan dalam penerapan peraturan tersebut.
5. Memantau dan memperbaharui *website* Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan dan keterbukaan informasi kepada publik.
6. Menyiapkan dan melaporkan laporan berkala Perseroan, baik melalui surat elektronik maupun laporan elektronik, kepada regulator (OJK dan BEI), investor, serta kepada para pihak terkait.
7. Penyampaian keterbukaan informasi kepada publik yang disampaikan melalui surat elektronik, laporan elektronik dan situs web Perseroan.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2025, dapat dilihat pada bagian pelatihan Direksi.

Functions and Duties of the Corporate Secretary

Referring to the OJK Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, the Corporate Secretary has functions and duties, including:

1. Keeping abreast of Capital Market developments, especially the prevailing laws and regulations in the Capital Market.
2. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the provisions of laws and regulations in the Capital Market.
3. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in the implementation of corporate governance which includes:
    - Information disclosure to the public, including the availability of information on the Company's website.
    - Timely submission of reports to OJK.
    - Organization and documentation of the GMS.
    - Organization and documentation of Board of Directors and/or Board of Commissioners meetings.
    - Implementation of orientation program for the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.
4. As a liaison between the Company and shareholders, OJK, and other Stakeholders.
5. Maintain and ensure intensive communication with investors.

Activities of the Corporate Secretary in 2025

Throughout 2025, the Corporate Secretary has carried out several activities, including:

1. Implementation of Annual General Meeting of Shareholders on June 23,2025.
2. Implementation of Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 23, 2025.
3. Held the Annual Public Expose on December 23, 2025.
4. Reviewed and socialized new regulations issued by regulators in 2025 (OJK and IDX) as well as conduct review of the Company's policies and provisions in the application of these regulations.
5. Monitored and updated the Company's website in accordance with regulatory requirements and information disclosure to the public.
6. Prepared and reported the Company's periodic reports, both by email and electronic reports to regulators (OJK and IDX), investor and to related parties.
7. Submission of information disclosure to the public submitted by email or electronic reports and the Company's website.

Training of Corporate Secretary

The training attended by the Corporate Secretary throughout 2025 can be seen in the Board of Directors training section.

Unit Audit Internal
Internal Audit Unit

Unit Audit Internal merupakan unit kerja yang melakukan kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

The Internal Audit Unit is a work unit that provides independent and objective assurance and consulting services, with the goal of enhancing value and improving company operations through a systematic approach, evaluating and enhancing the effectiveness of risk management, control, and corporate governance processes.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

The Head of the Internal Audit Unit reports to the President Director.

Profil Kepala Unit Audit Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 028/HRD/SKD/VII/2024 tertanggal 1 Juli 2024, Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh :

Head of Internal Audit Unit Profile

In accordance with the Board of Directors' Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 028/HRD/SKD/VII/2024 dated 1 July 2024, the Head of the Internal Audit Unit is held by:

NICHOLAS JOSHUA LAWRENCE

Kepala Unit Audit Internal / Head of Internal Audit

Warga negara Indonesia, 28 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta tahun 2019.

Indonesian citizen, 28 years old, domiciled in Jakarta. Obtained a bachelor's degree in Accounting from the Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Jakarta in 2019.

Riwayat Pekerjaan
Career History

Jul 2024 – to date	*Internal Audit Department Head* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Jan 2024 – Jun 2024	*Internal Audit Regular Supervisor* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2022 – 2023	*Coordinator Internal Audit* PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2021 – 2022	*Internal Audit Officer* PT Verena Multi Finance Tbk *(now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)*
2020 – 2021	*Independent Control Unit (ICU) Officer* PT Verena Multi Finance Tbk *(now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)*

Pelatihan Unit Audit Internal

Sepanjang tahun 2025, guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Audit Internal telah mengikuti pelatihan/seminar/*workshop* sebagai berikut:

Internal Audit Unit Training

Throughout 2025, in order to improve knowledge and understanding in order to assist the implementation of duties and responsibilities, Internal Audit has participated in the following training/seminars/workshops:

Pelatihan Unit Audit Internal
Internal Audit Unit Trainings

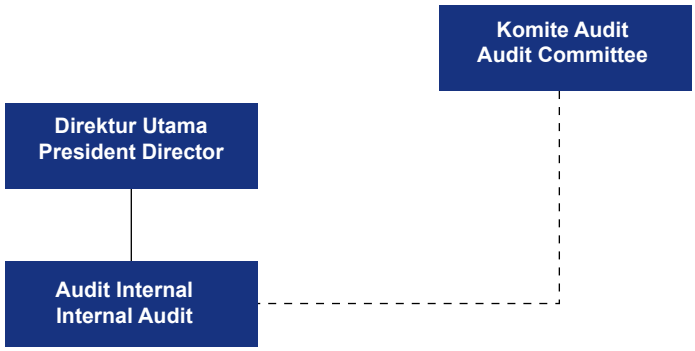
Pelatihan Trainings	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Anti Fraud Strategy	21 Jan 2025	*Learning and Development Department*
Instructions for Using "SIPELAKU"	24 Feb 2025	OJK
Inovatif *Credit Scoring*	21 Apr 2025	OJK
Cybersecurity Awareness	21 May 2025	SMEI
ISO/ IEC 27001 : 2022	20 May 2025	PT Lemti Unindo Inovasi
The Future of Cybersecurity	5 Jun 2025	OJK
APU, PPT dan PPPSPM AML, PTF and PFPMDW	3 Jul 2025	SMEI
Qualified Internal Auditor - Intermediate Level	14 - 19 Jul 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Internal Audit Unit Structure and Position

The Structure and Position of the Internal Audit Unit Company are as follows:



Piagam Unit Audit Internal

Sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal yang hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004/BOC-MLI/III/26 tanggal 17 Maret 2026 yang dapat diakses melalui *website* Perseroan.

Adapun penyesuaian ini ditujukan untuk penyelarasan dengan Peraturan OJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.04/2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/POJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
4. *Internasional Professional Practices Framework* (IPPF) sebagai standar Internasional untuk Praktik Professional Audit Internal yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).
5. Kode etik Perseroan yang berlaku.

Internal Audit Charter Unit

In accordance with the provisions of OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter, the Company has an Internal Audit Charter which as of the publication of this Annual Report, has been updated based on the Decree of the Board of Commissioners Number 004/BOC-MLI/III/26 dated March 17, 2026, which can be accessed through the Company's website.

The adjustment was made to align the Charter with OJK Regulation No. 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.

Legal Basis

1. Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 56/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.
2. Regulation of the Otoritas Jasa Keuangan, Republic of Indonesia Number 48/POJK.04/2024 Good Corporate Governance (GCG) for Finance Companies, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Institutions.
3. Regulation of the Otoritas Jasa Keuangan, Republic of Indonesia Number 4/POJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Service Institutions.
4. International Professional Practices Framework (IPPF) as an International standard for the Professional Practice of Internal Auditing issued by The Institute of Internal Auditors (IIA).
5. Applicable Company's code of ethics.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Unit ini memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengembangkan rencana kerja Audit tahunan dengan menggunakan metode perencanaan berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko dan pengendalian yang diidentifikasi oleh Manajemen dan disetujui oleh Direktur Utama.
2. Merealisasikan perencanaan audit tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas khusus yang diminta oleh Manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Melakukan analisis dan penilaian atas proses keuangan, akuntansi, operasional, dan aktivitas lainnya, termasuk penggunaan sistem dan informasi yang menjadi bagian dari proses tersebut.
4. Menjaga staf audit sehingga senantiasa professional, memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang memadai.
5. Melaksanakan jasa konsultasi, selain dari jasa *assurance* audit internal untuk membantu manajemen dalam upaya mencapai tujuan Perseroan.
6. Mengevaluasi perubahan proses, jasa, operasi, dan pengendalian, termasuk aspek yang memanfaatkan teknologi informasi, agar selaras dengan standar praktik profesional dan ketentuan regulator.
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat Manajemen.
8. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
9. Memantau, menganalisis, dan melaporkan proses tindak lanjut perbaikan hasil pemeriksaan telah dilakukan secara efektif & efisien.
10. Melakukan investigasi terhadap dugaan *fraud* yang terjadi di dalam Perseroan, termasuk bila berkaitan dengan pemanfaatan sistem dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan operasional dan koordinasi dengan unit kerja lain dilakukan sesuai kebutuhan investigasi.

Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal

Selama tahun 2025, Unit Audit Internal telah melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap unit Departmen/ Divisi yang ada di Kantor Pusat, Kantor Cabang, serta Audit IT yang berhubungan dengan teknologi sistem informasi;
2. Melakukan uji *test* dan evaluasi atas sistem pengendalian internal untuk memastikan efektivitas tata kelola perusahaan sesuai dengan SOP, kebijakan, dan Peraturan Perusahaan yang berlaku;
3. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap efektivitas sistem dan prosedur sehubungan dengan risiko Perseroan;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa;
5. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan, menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang telah dilaksanakan;

Duties and Responsibilities the Internal Audit Unit

This unit has the following duties and responsibilities:

1. Prepare and develop a flexible annual Audit work plan using suitable risk-based planning methods, including risks and controls identified by Management and approved by the President Director.
2. Carry out the approved annual audit plan, including special tasks requested by the Management and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
3. Conduct analysis and assessments of financial, accounting, operational, and other activities, including the use of systems and information that form part of those activities.
4. Maintain audit staff so that they are always professional, have adequate knowledge, expertise and experience.
5. Provide consulting services, apart from internal audit assurance services to assist management in achieving company goals.
6. Evaluate changes in processes, services, operations, and controls, including those involving the use of Information Technology, to ensure alignment with professional practice standards and regulatory requirements.
7. Provide suggestions for improvement and objective information about the activities examined at all levels of management.
8. Make a report on the results of the examination and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
9. Monitors, analyses, and reports on the follow-up process for improvement of audit results that has been carried out effectively & efficiently.
10. Conducting investigations into suspected fraud within the Company, including matters involving systems and technology used in operations, and coordinating with relevant units as necessary during the investigation process.

Implementation of Internal Audit Unit Duties

Throughout 2025, the Internal Audit Unit carried out the following tasks:

1. To conduct examinations/audits of Departments/Divisions at the Head Office, Branch Office, as well as IT audits related to information system technology;
2. To perform testing and evaluation of the internal control system to ensure the effectiveness of corporate governance in accordance with applicable SOPs, policies, and Company Regulations;
3. To conduct analysis and evaluation of the effectiveness of systems and procedures in relation to the Company's risks;
4. To provide recommendations for improvement and objective information regarding the activities examined;
5. To prepare Audit Reports and submit such reports to the President Director and the Board of Commissioners and/or the Audit Committee;
6. To monitor, analyze, and report on the implementation of recommended corrective actions, and to develop programs to evaluate the quality of internal audit activities that have been carried out;

7. Bekerja sama dengan Komite Audit; dan
8. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal Perseroan yang ditugaskan Direktur Utama.

7. To collaborate with the Audit Committee; and
8. To carry out special assignments within the scope of the Company's internal control as assigned by the President Director.

Pengendalian Internal
Internal Control

Uraian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal bagi Perseroan adalah suatu mekanisme yang diterapkan oleh Perseroan yang meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, metode, dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan Perseroan agar melakukan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Perseroan, Anggaran Dasar, aturan internal Perseroan serta peraturan perundang-undangan.

Dalam mengerjakan tugas pengurusan Perseroan, Direksi dibantu oleh Komite di bawah Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian internal telah dilaksanakan dalam setiap fungsi.

Dewan Komisaris turut berperan dalam pengawasan pelaksanaan pengendalian internal dalam seluruh jenjang oraganisasi. Tugas pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Pengendalian internal diterapkan oleh Perseroan untuk menjamin tercapainya, sebagai berikut:
1. Keandalan pelaporan keuangan.
2. Efektivitas dan efisiensi operasi.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut dicapai oleh Perseroan dengan tujuan, sebagai berikut:
- Kepatuhan
  Menjamin bahwa semua kegiatan usaha Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Informasi
  Menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Operasional
  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Perseroan dari risiko kerugian.

Pengendalian internal yang dilakukan Perseroan meliputi lingkungan pengendalian, pengukuran risiko, aktivitas pengendalian, teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Lingkungan Pengendalian Internal

Perseroan senantiasa menciptakan lingkungan pengendalian yang mendukung pelaksanaan pengendalian internal dengan cara membuat susunan organisasi yang mencerminkan pengendalian internal yang baik dengan cara pemisahan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi. Perseroan juga memastikan seluruh karyawan Perseroan menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai Perseroan.

Description of the Internal Control System

The internal control system for the Company is a mechanism implemented by the Company which includes a clear division of tasks and responsibilities, methods and measures to maintain and direct the Company to carry out activities in accordance with the Company's Vision and Mission, Articles of Association, the Company's internal regulations and laws and regulations.

In carrying out the Company's management duties, the Board of Directors assisted by the Committee under Board of Directors namely Risk Management Committee are responsible for the implementation of internal control that has been implemented in each function.

The Board of Commissioners also plays a role in supervising the implementation of internal control at all levels of the organization. The supervisory duties of the Board of Commissioners are assisted by the Committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee.

Internal control is implemented by the Company to ensure the achievement of the following:
1. Reliability of financial reporting.
2. Effectiveness and efficiency of operations.
3. Compliance with applicable laws and regulations.

This is achieved by the Company with the following objectives:

- Compliance
  Ensures that all of the Company's business activities have been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations, both provisions determined by the government and internal policies and procedures established by the Company.
- Information
  Providing correct, complete, timely, and relevant reports required in order to make informed and accountable decisions.
- Operational
  Improve effectiveness and efficiency in using assets and other resources in order to protect the Company from the risk of loss.

Internal controls implemented by the Company's internal controls include the control environment, risk measurement, control activities, information and communication technology, and monitoring.

Internal Control Environment

The Company always creates a control environment that supports the implementation of internal control by creating an organizational structure that reflects good internal control by separating the duties and responsibilities of each function. The Company also ensures that all employees of the Company uphold the ethics and values of the Company.

Pengkajian dan Pengelolaan Risiko Usaha

Perseroan senantiasa mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan timbul dari pelaksanaan kegiatan usahanya. Berdasarkan Model 3 Lini *(3 Lines Model),* Lini pertama memainkan peran penting dalam manajemen risiko operasional. Mereka bertanggung jawab untuk:

- mengidentifikasi dan memitigasi risiko
- menerapkan kebijakan dan prosedur yang berlaku
- melaporkan setiap masalah yang dihadapi kepada manajemen.

Selain itu, mereka memastikan kontrol internal yang efektif dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan etika).

Lini pertama berfungsi sebagai fondasi yang menjaga operasi organisasi berjalan lancar dan membantu mencapai tujuannya.

Lini kedua berfungsi sebagai pengawas dan penasihat dalam manajemen risiko. Mereka bertanggung jawab untuk :

- Memantau dan mengawasi risiko yang dikelola oleh lini pertama, serta memberikan saran dan panduan untuk membantu lini pertama melaksanakan tugasnya.
- Melakukan analisis dan pengujian terhadap efektivitas kontrol yang ada, melaporkan temuan dan rekomendasi kepada manajemen.
- Selain itu, mereka juga dapat terlibat dalam pengembangan kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko dan kepatuhan.

Dengan demikian, Lini kedua memastikan bahwa risiko dikelola secara efektif dan mendukung lini pertama dalam mencapai tujuan organisasi.

Lini ketiga berfungsi sebagai pihak independen yang berfokus untuk memberikan asurans dan nasihat kepada badan pengawas. Bertanggung jawab untuk :

- Mempertahankan akuntabilitas utama kepada badan pengatur dan independen dari tanggung jawab manajemen.
- Mengkomunikasikan penilaian dan saran yang independen dan obyektif kepada manajemen dan badan pengatur mengenai kecukupan dan efektivitas tata kelola dan manajemen risiko (termasuk pengendalian internal) untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan untuk mendorong serta memfasilitasi perbaikan yang berkesinambungan.

Perseroan juga memiliki fungsi manajemen risiko, yang dalam aktivitasnya didukung oleh Komite Manajemen Risiko yang berada di bawah Direksi, dimana tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko telah diungkapkan pada halaman 160.

Aktivitas Pengendalian Internal

Merupakan kegiatan pengendalian yang dilakukan Perseroan pada seluruh jenjang organisasi. Salah satu parameter ektivitas aktivitas pengendalian adalah berdasarkan ketepatan dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko.

Business Risk Assessment and Management

The Company always identifies and manages risks that will arise from the implementation of its business activities. Based on the 3 Lines Model, the first line plays an important role in operational risk management. They are responsible for:

- identifying and mitigating risks
- implementing applicable policies and procedures
- reporting any problems encountered to management.

In addition, they ensure effective internal control and compliance with applicable regulations (Ensuring compliance with laws, regulations, and ethics).

The first line serves as the foundation that keeps the organization's operations running smoothly and helps achieve its goals.

The second line serves as a supervisor and advisor in risk management. They are responsible for:

- Monitoring and supervising the risks managed by the first line, and providing advice and guidance to help the first line carry out its duties.
- Conducting analysis and testing of the effectiveness of existing controls, reporting findings and recommendations to management.
- In addition, they can also be involved in developing policies related to risk management and compliance.

Thus, the second line ensures that risks are managed effectively and supports the first line in achieving the organization's objectives.

The third line functions as an independent party that focuses on providing assurance and advice to the regulatory body. Responsible for:

- Maintaining primary accountability to the regulatory body and independent of management responsibilities.
- Communicating independent and objective assessments and recommendations to management and the regulatory body regarding the adequacy and effectiveness of governance and risk management (including internal control) to support the achievement of the organization's objectives and to encourage and facilitate continuous improvement.

The Company also has a risk management function, which in its activities is supported by the Risk Management Committee under the Board of Directors, where the duties and authorities of the Risk Management Committee have been disclosed on page 160.

Internal Control Activity

These are control activities carried out by the Company at all levels of the organization. One parameter for the effectiveness of these control activities is the accuracy of identifying and measuring risks.

Aktivitas pengendalian internal yang dilakukan Perseroan antara lain:

- Melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara masing-masing fungsi.
- Memastikan penerapan tata kelola yang baik dalam melaksakan kegiatan operasional.
- Menerapkan kebijakan *document information control* untuk memitigasi risiko penyalahgunaan informasi, menghindari kebocoran informasi debitur dari akses yang tidak sah serta menghindari penggunaan informasi secara ilegal.
- Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan telah melakukan pengkinian terhadap sertifikat ISO 27001:2013 menjadi ISO 27001:2022.

Sistem Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam penerapan pengendalian internal terutama dalam hal menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Sebagai langkah penerapan pengendalian internal, Perseroan telah memiliki kebijakan tentang:

- Pengelolaan *password*
- Akses Data Center
- Pembatasan akses *flashdisk* melalui *port USB*
- Pengelolaan pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak

Perseroan secara berkala juga sudah melaksanakan *awareness* tentang serangan siber untuk meningkatkan pemahaman akan keamanan dalam penggunaan jaringan internet bagi seluruh karyawan Perseroan.

Pemantauan

Penerapan pengendalian internal senantiasa dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap lingkungan pengendalian internal, pengkajian dan pengelolaan risiko usaha serta implementasi dari aktivitas pengendalian internal.

Unit Audit Internal bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan penerapan pengendalian internal, sedangkan pemeriksaan juga dilakukan oleh pihak independen seperti Kantor Akuntan Publik untuk menilai kecukupan pengendalian internal Perseroan.

Peran aktif Direksi, Dewan Komisaris, Komite yang berada di bawah Direksi serta Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris pun tak luput dalam upaya pemantauan pelaksanaan pengendalian internal.

Mekanisme Pelaporan kepada Direksi dengan Tembusan kepada Komite Audit

Dalam hal terjadi penyimpangan kualitas sistem pengendalian internal, Unit Audit Internal akan melaporkan hasil temuannya kepada Direksi dengan tembusan kepada Komite Audit secara tepat waktu. Perseroan juga membentuk *Independent Control Unit* yang ditempatkan pada setiap Kantor Cabang Perseroan untuk memonitoring terjadinya penyimpangan dalam pengendalian internal.

The internal control activities carried out by the Company include:

- Conducting a clear separation of duties and responsibilities between each function.
- Ensuring the implementation of good governance in carrying out operational activities.
- Implementing document information control policies to mitigate the risk of information misuse, avoiding leakage of debtor information from unauthorized access and avoiding illegal use of information.
- Implementing an Information Security Management System (ISMS) and has updated the ISO 27001:2013 Certification to ISO 27001:2022.

Information and Communication System

Information and communication system is very much needed in the implementation of internal control, especially in terms of implementing Good Corporate Governance.

As a step in implementing internal control, the Company has policies on:

- Password management
- Data access to the Data Center
- Restriction of flash disk access via USB port
- Management of hardware and software updates

The Company has also periodically implemented awareness of cyber attacks to improve understanding of security in the use of internet networks for all employees of the Company.

Monitoring

The implementation of internal control is always carried out continuously. This is done by assessing the internal control environment, reviewing and managing business risks, and implementing internal control activities.

The Internal Audit Unit is responsible for supervising the implementation of internal control, while examinations are also carried out by independent parties such as Public Accounting Firms to assess the adequacy of the Company's internal control.

The active role of the Board of Directors, Board of Commissioners, Committees under the Board of Directors, and Committees under the Board of Commissioners is also inseparable from efforts to monitor the implementation of internal control.

Reporting Mechanism to the Board of Directors with a Copy to the Audit Committee

In the event of deviations in the quality of the internal control system, the Internal Audit Unit will report its findings to the Board of Directors with a copy to the Audit Committee in a timely manner. The Company also forms an Independent Control Unit which is placed in each of the Company's Branch Offices to monitor deviations in internal control.

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

Manajemen risiko merupakan aspek yang penting dalam memastikan kelangsungan usaha. Terkait hal itu, Perseroan terus meningkatkan kebijakan manajemen risiko dalam identifikasi, pemantauan, pengendalian, dan pengelolaan risiko. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko adalah untuk menjaga dan melindungi Perseroan melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitas usaha, serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Perseroan senantiasa berusaha membentuk dan mengembangkan budaya risiko yang kuat, penerapan praktik GCG dan kepatuhan terhadap regulasi, yang tentunya harus didukung infrastruktur yang memadai serta proses bisnis yang terstruktur dan sehat.

Pelaksanaan Manajemen Risiko Perseroan merujuk kepada Peraturan OJK Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 48/PADK.06/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Penerapan Manajemen Risiko di Perseroan meliputi:
1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kecukupan kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Risiko Kepatuhan
Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan.

Perseroan mempunyai komitmen yang kuat untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mitigasi Risiko Kepatuhan
1. Perseroan memastikan tidak ada perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang dari atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Perseroan memastikan tidak ada perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum

Risk management is an important aspect in ensuring business continuity. In this regard, the Company continues to improve its risk management policies in identifying, monitoring, controlling and managing risks. The main purpose of implementing risk management is to maintain and protect the Company through managing the risk of losses that may arise from business activities, as well as maintaining the risk level in accordance with the predetermined provisions.

The Company strives to establish and develop a strong risk culture, GCG practices and compliance with regulations, which must be supported by adequate infrastructure and healthy business processes.

The Implementation of the Company's Risk Management refers to OJK Regulation Number 42 of 2024 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions and the Regulation of the Members of the Board of Commissioners (PADK) Number 48/PADK.06/2025 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
Risk Management Implementation at the Company are as follow:
1. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Adequacy of risk management policies and procedures as well as risk limit setting.
3. Adequacy of risk identification, measurement, control, and monitoring processes, as well as risk management information system.
4. Comprehensive internal control system.

Compliance Risk
Compliance Risk is the risk that the Company does not comply with and/or does not implement what is regulated by the laws and regulations applicable to the Company.

The Company has a strong commitment to comply with the laws and regulations and always takes preventive measures to prevent the violation of the applicable laws and regulations.

Compliance Risk Mitigation
1. The Company ensures that there is no behavior or activity of the Company that deviates from and/or violates the prevailing laws and regulations
2. The Company ensures that there is no behavior or activity that deviates or violates the generally applicable standards

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Kelemahan aspek yuridis tersebut disebabkan antara lain oleh:

1. Kelemahan perjanjian akibat tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian dan pengikatan jaminan secara sempurna.
2. Ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Perseroan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Adanya tuntutan hukum.

Mitigasi Risiko Hukum

1. Secara periodik Perseroan melakukan evaluasi *Legal document* untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
2. Perseroan sudah memiliki Departemen Litigasi untuk menangani kasus-kasus hukum.

Risiko Strategis

Risiko strategis adalah potensi kegagalan dalam mencapai tujuan Perseroan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya terhadap perubahan eksternal.

Mitigasi Risiko Strategis

1. Pengelolaan risiko strategis dimulai dengan pembuatan rencana bisnis untuk mengoptimalkan potensi pendapatan Perseroan.
2. Perseroan memastikan bahwa struktur organisasi, infrastruktur, kondisi keuangan, permodalan, SDM dan kompetensi manajerial, serta sistem dan pengendalian yang ada telah sesuai dan memadai untuk mendukung implementasi strategi dan rencana bisnis Perseroan. Secara berkala dilakukan analisis pencapaian target-target yang telah ditetapkan untuk dapat ditentukan tindak lanjutnya.
3. Setiap divisi/departemen memiliki rencana bisnis yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
4. Melakukan evaluasi atas strategi pembiayaan dan pemasaran, operasi, teknologi informasi, dan peningkatan kompetensi karyawan

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena kekurangan dan kegagalan proses internal, *human errors*, kegagalan sistem ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada operasional Perseroan.

Penanganan risiko operasional dalam Perseroan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:

- Pengidentifikasian risiko
- Pengukuran risiko
- Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan.

Legal Risk

Legal risk is the risk that arises as a result of lawsuits and/or the weakness of the juridical aspect.

The weakness of the juridical aspect is caused by the following:

1. Weaknesses in the agreement due to not fulfilling the legal requirements of an agreement and binding collateral perfectly.
2. The absence and/or changes in laws and regulations that cause a transaction that has been carried out by the Company to be against the law.
3. A Lawsuit.

Legal Risk Mitigation

1. The Company periodically evaluates Legal documents to ensure compliance with applicable regulations.
2. The Company has formed a Litigation Department to handle legal cases.

Strategic Risk

Strategic risk is the potential failure to achieve the Company's objectives due to inadequacy or failure in planning, determining and implementing strategies, making appropriate business decisions, and/or being less responsive to external changes.

Strategic Risk Mitigation

1. Strategic risk management begins with drawing up a business plan to optimize the Company's income potential.
2. The Company ensures that the organizational structure, infrastructure, financial condition, capital, HR and managerial competence, as well as the existing systems and controls are adequate to support the implementation of the Company's strategies and business plans. The Company also periodically carries out an analysis of the targets to determine the follow-up actions.
3. Each division/department has a business plan composed by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.
4. Evaluate the strategy of financing and marketing, operations, information technology, and improve employee competence

Operational Risk

Operational risk is the risk caused by shortcomings and failures of internal processes, human errors, system failures or problems that could bring impact to the Company's operations.

The operational risks in the Company are handled through 3 (three) steps as follows:

- Risk identification
- Risk measurement
- Risk management, supervision and control

The three steps above are inseparable unified processes.

Mitigasi Risiko Operasional

1. Pengertian yang jelas oleh semua lini yang terkait terhadap risiko yang melekat pada setiap tahapan proses kegiatan operasional yang berhubungan terutama dengan persetujuan dan pencairan pembiayaan, pelayanan konsumen, pencatatan pembukuan dan penyusunan laporan.
2. Pembagian tugas yang jelas dan terpisah antara pelaksana dan kontrol. Sebagai pelaksana, aktivitas yang dikerjakan berdasarkan *Standard Operating Procedures* ("SOP") baku Perseroan, sedangkan fungsi kontrol memastikan aktivitas sudah memenuhi persyaratan yang digariskan oleh SOP.
3. Langkah mitigasi yang komprehensif sebagai upaya penerapan strategi *anti-fraud* melalui penguatan sistem pengendalian internal, termasuk penerapan prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab, otorisasi berlapis, serta audit internal yang dilakukan secara berkala dan berbasis risiko. Perseroan juga mengembangkan mekanisme *whistleblowing system* yang aman dan independen untuk mendorong pelaporan pelanggaran, disertai dengan perlindungan bagi pelapor.
4. Perseroan menerapkan *Four Eyes Principle* yang merupakan prinsip utama dalam pengambilan keputusan dalam pemberian pembiayaan dimana setiap pemberian kredit/pembiayaan minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pejabat yang masing-masing berasal dari unit bisnis dan unit *credit analyst* yang saling independen satu sama lain.
5. Perseroan menggunakan Sistem Teknologi Informasi yang handal agar kelangsungan dan kelancaran pengoperasian sistem dapat terjamin. Perseroan sudah menerapkan sistem *online* dan *real time* sehingga dengan demikian pihak manajemen dapat memonitor seluruh aktivitas operasional secara langsung, dan dengan cepat dapat mengambil keputusan strategis dan tepat untuk memitigasi kemungkinan risiko yang terjadi akibat kelalaian, tidak berfungsinya sistem, maupun penyimpangan dari pelaksanaan SOP dan/atau kebijakan Perseroan.
6. Perseroan menerapkan *Risk Control Self Assessment* (RCSA), suatu konsep manajemen risiko yang dibentuk berdasarkan SOP yang berlaku dalam Perseroan, untuk menelaah dan mengukur besarnya potensi risiko-risiko yang berlangsung selama proses internal untuk menghasilkan status risiko operasional, dan dilaporkan secara periodik.
7. Perseroan secara bersinambungan mengembangkan kompetensi dan pengetahuan karyawan melalui berbagai program pelatihan yang diselenggarakan oleh Departemen *Learning and Development*, dalam rangka meminimalkan potensi kesalahan operasional yang bersumber dari faktor manusia, meningkatkan efektivitas sistem operasional, serta mengurangi risiko kerugian finansial yang mungkin timbul.
8. Memastikan bahwa semua lini yang terkait telah memahami risiko pada setiap tahap kegiatan operasional terutama yang berhubungan dengan persetujuan dan pencairan kredit, pelayanan konsumen, pembukuan, dan penyusunan laporan.
9. Proses pencatatan transaksi keuangan (*accounting*) dilakukan melalui sistem *built in control* yang berjenjang dan terintegrasi.

Operational Risk Mitigation

1. A clear understanding by all lines concerned regarding the risk inherent in each stage of the processes of operational activities relating primarily to the approval and disbursement of financing, customer service, book keeping and reporting.
2. A clear and segregated division of duties between execution and control functions is implemented. As the executing function, activities are carried out in accordance with the Company's established Standard Operating Procedures ("SOP"), while the control function ensures that such activities comply with the requirements set forth in the SOP.
3. Comprehensive mitigation measures are undertaken as part of the implementation of the Company's anti-fraud strategy through the strengthening of the internal control system, including the application of segregation of duties and responsibilities, multi-level authorization, and periodic risk-based internal audits. The Company also develops a secure and independent whistleblowing system to encourage the reporting of violations, accompanied by protection for whistleblowers.
4. The Company applies the Four Eyes Principle as a key principle in decision-making for financing approvals, whereby each credit/financing approval is conducted by at least two (2) authorized officers representing the business unit and the credit analyst unit, who operate independently from one another.
5. The Company utilizes a reliable Information Technology system to ensure the continuity and smooth operation of its systems. The Company has implemented an online and real-time system, enabling management to directly monitor all operational activities and to promptly make strategic and appropriate decisions to mitigate potential risks arising from negligence, system failures, or deviations from the implementation of the Company's SOPs and/or policies.
6. The Company implements a Risk Control Self Assessment (RCSA), a concept of risk management, which was established based on applicable SOP in the Company, to examine and measure the extent of potential risks occurring throughout the internal processes in order to generate operational risk status, and is reported periodically.
7. The Company continuously develops employee competencies and knowledge through various training programs organized by the Learning and Development Department, in order to minimize the potential for human error in operations, enhance the effectiveness of operational systems, and reduce the risk of potential financial losses.
8. Ensure that all related lines understand the risks that may occur at every stage of operational activities, especially those related to credit approval and disbursement, customer service, bookkeeping, and reporting.
9. The process of recording financial transactions (accounting) is carried out through a tiered and integrated built-in control system.

10. Membuat *back-up* melalui *Disaster Recovery Center* ("DRC") atas data-data operasional untuk menghindari terganggunya kegiatan operasional jika seluruh data hilang akibat gangguan sistem, kebakaran, banjir, huru-hara, atau gempa bumi.

10. Make backups through the Disaster Recovery Center ("DRC") of operational data to avoid disruption of operational activities if all data is lost due to system disruption, fire, flood, riot or earthquake.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko ekuitas. Manajemen risiko pada risiko pasar dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Perseroan.

Market Risk

Market risk is risk in the position of assets, liabilities, equity, and/or administrative accounts including derivative transactions due to overall changes in market conditions. Market risk includes, among others, interest rate risk, exchange rate risk and equity risk. Market risk management is carried out to minimize the possibility of negative impacts due to changes in market conditions on the Company's assets and capital.

Mitigasi Risiko Pasar

1. Perseroan menerapkan *natural hedging* untuk antisipasi risiko konversi mata uang sepenuhnya, sehingga terlindungi dari volatilitas nilai tukar yang dilakukan dengan memperoleh pinjaman dan pembiayaan dengan mata uang yang sama. *Natural hedging* adalah menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran sehingga tidak terjadi lonjakan keperluan kas. Salah satu cara untuk mengimbangi *long exposure* terus menerus yang sudah diantisipasi terhadap mata uang tertentu adalah mendapatkan utang berdenominasi mata uang tersebut.
2. Perseroan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap cross currency* untuk meminimalisir risiko nilai tukar. Melalui *swap cross currency*, Perseroan setuju untuk mempertukarkan pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dengan pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang spesifik pada tanggal dimulainya transaksi, di mana kontrak tersebut memenuhi kriteria dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.
3. Perseroan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap* suku bunga untuk meminimalisir risiko suku bunga. Kontrak *swap* suku bunga mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, dimana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

Market Risk Mitigation

1. The Company applies natural hedging to anticipate risk of currency conversion, with the purpose that it is protected from exchange rate volatility by obtaining loans and financing in the same currency. Natural hedging is balancing income and expenses so there is no spike in cash needs. One way to offset the anticipated continuous long exposure to a particular currency is to acquire debt denominated in that currency.
2. The Company uses derivative instruments called cross currency swaps to minimize exchange rate risk. Through cross currency swaps, the Company agreed to exchange loans in foreign currency with loans in Rupiah using a specific exchange rate on the transaction date, in which the contract meets the criteria and is effective as a cash flow hedging instrument.
3. The Company uses derivative instruments called interest rate swaps to minimize interest rate risk. Interest rate swap contracts exchange a floating interest rate with a fixed rate, in which the contract is intended and effective as a cash flow hedging instrument.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko kerugian pada akun aset ataupun liabilitas Perseroan akibat perubahan suku bunga. Perseroan mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap* suku bunga. Melalui *swap* suku bunga, Perseroan setuju untuk mempertukarkan selisih antara suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang yang dihitung sesuai dengan nilai nosional yang telah disepakati. Nilai wajar dari *swap* suku bunga pada akhir periode pelaporan ditentukan dengan mendiskonto nilai arus kas di masa yang akan datang dengan menggunakan kurva pada akhir periode pelaporan dan risiko kredit yang melekat pada kontrak. Nilai rata-rata suku bunga ditentukan dari nilai saldo pada akhir periode pelaporan. Kontrak *swap* suku bunga mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, dimana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

Interest Risk

Interest risk is the risk of loss in the Company's financial assets or liabilities due to changes in interest rates. The Company manages interest rate risk using derivative instruments, which is interest rate swaps. Through an interest rate swap, the Company agrees to exchange the difference between a fixed interest rate and a floating interest rate calculated according to the agreed notional value. The fair value of interest rate swaps at the end of the reporting period is determined by discounting the value of future cash flows using a curve at the end of the reporting period and credit risk attached to the contract. The average value of the interest rate is determined from the balance value at the end of the reporting period. An interest rate swap contract exchanges a floating interest rate with a fixed rate, which is designated and effective as a cash flow hedge instrument.

Risiko Mata Uang

Perseroan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam

Currency Risk

The Company is exposed to the effects of fluctuations in foreign exchange rates mainly due to transactions of denominated

mata uang asing seperti penyaluran piutang pembiayaan dan penerimaan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Perseroan mengelola eksposur mata uang asing dengan mencocokan sebanyak mungkin penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing mata uang.

Risiko nilai tukar terhadap mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas di masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi dikarenakan adanya perubahan nilai tukar terhadap mata uang asing. Eksposur risiko Perseroan terhadap nilai tukar berasal dari kas di bank, piutang sewa pembiayaan, aset lain-lain, utang bank, biaya masih harus dibayar dan utang lain-lain.

Pada risiko ini, Perseroan mengelola risiko dengan menyesuaikan kondisi mata uang piutang sewa pembiayaan dengan mata uang pendanaan pinjaman yang ditetapkan oleh bank. Perseroan mengelola risiko nilai tukar dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap cross currency.* Melalui *swap cross currency*, Perseroan setuju untuk mempertukarkan pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dengan pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang spesifik pada tanggal dimulainya transaksi, di mana kontrak tersebut memenuhi kriteria dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabillitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Manajemen risiko pada risiko likuiditas dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Perseroan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Mitigasi Risiko Likuiditas

1. Mempererat hubungan dengan sumber dana, yaitu bank-bank dalam negeri dan asing, serta menjaga kredibilitasnya sehingga dapat memperoleh dana yang lebih besar dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif.
2. Bekerja sama dengan beberapa bank nasional, bank pemerintah, dan bank asing untuk memperoleh berbagai fasilitas pinjaman termasuk pinjaman dalam skema *demand loan* dan *term loan.*
3. Menerapkan manajemen aset dan liabilitas dalam hal pemantauan arus kas dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana menganggur agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan dana.
4. Menagih pinjaman secara efektif untuk meminimalkan tunggakan dan menjaga perputaran kas yang sesuai dengan rencana operasional.
5. Menerapkan jadwal pembayaran yang optimal kepada vendor sehingga arus kas tidak terganggu.
6. Menganalisis dan memantau pengeluaran dana untuk kegiatan operasional dan belanja modal.
7. Melakukan efisiensi biaya di setiap bagian tanpa mengurangi efektivitas kegiatan operasional.

foreign currencies such as distribution of finance lease receivables and receipt of loans denominated in foreign currencies. The Company manages foreign currency exposure by matching receipts and payments in each individual currency, as much as possible.

Exchange rate risk against foreign currencies is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in the exchange rate of foreign currencies. The Company's risk exposure to the exchange rate comes from cash in banks, finance lease receivables, other assets, bank loans, accrued expenses and other payables.

At this risk, the Company manages risk by adjusting the condition of the finance lease receivables with the loan funding currency specified by the bank. The Company manages exchange rate risk by using a derivative instrument, namely cross currency swap. Through cross currency swaps, the Company agrees to exchange loans received in foreign currencies for loans in Rupiah using a specific exchange rate at the date of commencement of the transaction, where the contract meets the criteria and is effective as a cash flow hedge instrument.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk due to the Company's inability to meet its maturing liabilities from cash flow funding sources and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting the Company's activities and financial condition.

Risk Management on liquidity risk is carried out to minimize the possibility of the Company's inability to obtain cash flow funding sources.

Liquidity Risk Mitigation

1. Strengthen relationships with sources of funds, namely onshore and offshore banks, as well as maintaining their credibility to obtain larger funds with more competitive interest rates.
2. Cooperate with national banks, state banks, and foreign banks to obtain loan facilities including demand loans and term loans scheme.
3. Implement asset and liability management in terms of monitoring cash flow by optimizing the use of idle funds so that there is no excess or shortage of funds.
4. Collect loans effectively to minimize overdue and maintain cash flow in accordance with operational plans.
5. Implement optimal payment schedules to vendors so that cash flow is not disrupted.
6. Analyze and monitor the expenditure of funds for operational activities and capital expenditures.
7. Carry out cost efficiency in each section without reducing the effectiveness of operational activities.

8. Menyediakan metode pembayaran:
   - Tunai melalui kasir di setiap Kantor Cabang
   - *Payment point virtual account*
   - Transfer
   - *Autodebet*
   - *Post-dated Cheque* (Cek / Bilyet Giro)
9. Merencanakan dan mengatur pemasukan dana dari angsuran konsumen dan pencairan dana bank dan pengeluaran dana ke *dealer*/*showroom*/vendor/*supplier*, pembayaran kewajiban ke bank.
10. Perseroan mengelola risiko likuiditas untuk memastikan bahwa Perseroan akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan usaha, selain memaksimalkan keuntungan para Pemegang Saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur antara lain risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Risiko kredit terdapat pada seluruh aktivitas Perseroan yang kinerjanya bergantung pada kinerja debitur, kinerja pihak lawan (*counterparty*), dan/atau penerbit (*issuer*). Secara langsung, Perseroan menghadapi risiko seandainya debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara debitur dengan Perseroan.

Mitigasi Risiko Kredit

1. Perseroan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yang ketat antara lain survei calon konsumen, verifikasi data konsumen dan persyaratan uang muka yang berlaku. Prinsip 5C dan 1P *(Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral* dan *Purpose)* sudah merupakan standar dalam setiap analisis kelayakan konsumen. Juga pemilihan dan analisis *dealer/showroom*/ vendor merupakan kesatuan dari analisis persetujuan proses pembiayaan.
2. Analisis calon *customer* dan pemantauan *customer* secara menyeluruh. Perseroan menggunakan jasa survei eksternal untuk validasi informasi calon *customer* dan survei yang telah dilakukan oleh *Credit Marketing Officer* (“CMO”) tanpa mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan persetujuan pembiayaan. Perseroan pun melakukan pemantauan karakteristik pembayaran angsuran dari *customer*, status jaminan, dan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan *customer* sehingga *customer* yang akan bermasalah dapat diantisipasi lebih awal.
3. Untuk pembiayaan Ritel dan Korporasi, proses pembiayaan yang dijalankan ketat, mulai dari survei calon *customer*, verifikasi data *customer*, hingga pemberian uang muka sesuai ketentuan yang berlaku, agar risiko yang mungkin timbul dapat dikendalikan dengan baik.

8. Providing payment methods:
   - Cash payments through tellers at each Branch Office
   - Payment point virtual account
   - Transfer
   - Autodebet
   - Post-dated Cheque (Check/Giro Bill)
9. Plan and manage the inflow of funds from customer installments and disbursement of bank funds and disbursement of funds to dealers/showrooms/vendors, payment of obligations to banks of the Company.
10. The Company manages liquidity risk to ensure that it will be able to continues as a going concern, in addition to maximizing Shareholder returns through optimizing debt and equity balances.

Credit Risk

Credit risk is the risk due to the failure of other parties to fulfill their obligations to the Company, including credit risk due to debtor failure, such as credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk.

Credit risk exists in all of the Company’s activities whose performance depends on the performance of the debtor, the counterparty, and/or the issuer. The Company directly faces the risk if debtors are unable to fulfill their obligations in repaying the credit in accordance with the agreement.

Credit Risk Mitigation

1. The Company prioritizes the aspect prudence of in giving a strict credit process, including surveys of prospective customers, verification of consumer data and applicable down payment requirements. The Principles 5C and 1P (Character, Capacity, Capital, Economic Conditions, Collateral and Purpose) has become the standard in every consumer feasibility analysis. Also, dealer/ showroom/ vendor selection and analysis is an integral part of the financing approval process analysis.
2. Analysis of potential customer and thorough customer monitoring. The Company uses external survey services to validate prospective customer information and surveys carried out Credit Marketing Officer (“CMO”) without reducing the speed in making financing approval decisions. The Company also monitors the characteristics of installment payments from customer, collateral status, and conditions that can affect customer’ sources of income so that problematic customer can be anticipated early.
3. For the Retail and Corporate, the financing process is very strict, starting from surveys of potential customers, verification of customers data, to providing advances according to applicable regulations, so that risks that may arise can be properly controlled.

4. Perseroan juga melakukan analisa terhadap *dealer/showroom/*vendor. Setiap *dealer/showroom/*vendor yang menjadi rekanan Perseroan dibuatkan perjanjian kerja samanya.
5. Melaksanakan strategi penagihan yang efektif dan efisien dengan mewajibkan *customer* untuk melakukan pembayaran angsuran melalui metode pembayaran yang telah ditetapkan, serta mengingatkan *customer* atas tagihan yang akan jatuh tempo melalui aplikasi WhatsApp dan *Short Message Service* ("SMS"). Perseroan melakukan penagihan (*desk collection, field collection, remedial*) jika *customer* melanggar kontrak pembiayaan dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, untuk mengantisipasi dan mencegah piutang yang tidak tertagih yang dapat menurunkan *margin* usaha.
6. Memperkuat pengawasan internal dengan mendayagunakan tim Audit Internal dan *Independent Control Unit* untuk memantau seluruh aktivitas di Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Setiap penyimpangan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai peraturan perusahaan dan dicegah dengan menyesuaikan SOP.
7. Menganalisis dan memantau calon *customer* secara menyeluruh, baik dengan tim survei internal maupun eksternal, melakukan validasi informasi dari calon *customer* dan survei yang telah dilakukan tanpa mempengaruhi proses persetujuan kredit, serta karakteristik pembayaran angsuran oleh *customer*, status jaminan dan kondisi-kondisi lainnya yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan *customer* sehingga masalah dideteksi lebih dini.
8. Untuk pembiayaan korporasi, Perseroan menerapkan kebijakan hanya akan bertransaksi dengan rekanan yang memiliki kelayakan kredit dan mendapatkan jaminan yang memadai sebagai sarana mengurangi risiko kerugian atau tunggakan. Selain itu, Perseroan meminimalkan risiko kredit melalui optimalisasi struktur manajemen kredit, antara lain dengan menggunakan sistem pemeringkatan *(rating)* dalam menilai kelayakan nasabah korporasi.
9. Perseroan juga menerapkan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari

4. The Company also conducts analysis on dealers/showrooms/vendors. Each dealer/showroom/vendor partnering with the Company has a cooperation agreement.
5. The Company implements effective and efficient collection strategies by requiring customers to make installment payments through designated payment methods, as well as reminding customers of upcoming due payments via WhatsApp and Short Message Service ("SMS"). The Company conducts collection activities (desk collection, field collection, and remedial) in cases where customers breach financing agreements and demonstrate a lack of good faith in fulfilling their obligations, in order to anticipate and prevent uncollectible receivables that may adversely affect profit margins.
6. Strengthen internal control by utilizing the Internal Audit team and Independent Control Unit to monitor all activities at the Head Office and Branch Offices. Every violation is followed up and sanctioned according to the Company's regulations and prevented by complying with the SOPs.
7. Analyze and monitor prospective customers thoroughly, both with internal and external survey teams, validate information from prospective customers and surveys carried out without affecting the credit approval process, as well as the characteristics of installment payments by customers, collateral status and other conditions that may affect sources of customers income so that problems are detected early.
8. For corporate financing, the Company implements a policy of only transacting with partners that have credit worthiness and obtain adequate collateral as a means of reducing the risk of loss or arrears. In addition, the Company minimizes credit risk by optimizing the credit management structure, including by using a rating system to assess the creditworthiness of corporate customers.
9. The Company also implements the Anti Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing and Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons program as regulated in Financial Services Authority Regulation Number 8 of 2023 concerning Implementation of Anti Money Laundering, Prevention of Financing Terrorism and Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons.

Reputational Risk

Reputational risk is the risk due to a decrease in the level of stakeholder trust originating from negative perceptions of the

persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko reputasi timbul karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perseroan yang kurang efektif.

Mitigasi risiko reputasi:
1. Perseroan memiliki fungsi pengaduan konsumen dengan standar maksimal penyelesaian keluhan 10 hari kerja.

2. Perseroan mempunyai unit yang bertugas melakukan monitoring pemberitaan terkait Perseroan di media.

Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Perseroan senantiasa berupaya untuk menerapkan sistem manajamen risiko yang efektif guna memastikan kegiatan bisnis Perseroan dapat berjalan secara efektif. Perseroan memandang pengelolaan risiko sangatlah penting, dimana tugas utama dari satuan kerja Manajemen Risiko adalah melakukan analisa untuk mengindentifikasi risiko-risiko yang dihadapi Perseroan, merumuskan tingkat risiko serta kebijakan pengelolaan risiko untuk menjaga risiko Perseroan tetap terkendali.

Untuk itu Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Perseroan melakukan penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan Perseroan berdasarkan POJK No.28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan SEOJK No.11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Salah satu faktor dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan adalah penilaian Faktor Profil Risiko. Penilaian Profil Risiko ini di klasifikasikan berdasarkan 8 (delapan) tipe risiko yang kemudian dilaporkan kepada regulator setiap tahunnya. Penilaian ini mencakup penilaian Risiko Inheren dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.
2. Perseroan membentuk Komite Manajemen Risiko sebagai bentuk implementasi dari pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan manajemen risiko di Perseroan. Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk memastikan penerapan manajemen risiko dilakukan secara konsisten dan efektif di Perseroan.

3. Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab mengevaluasi pengelolaan risiko serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Company. Reputation risk arises due to negative media coverage and/or rumors about the Company, as well as the Company's ineffective communication strategy

Reputational risk mitigation:
1. The Company has customer complaints function with a maximum standard of complaint resolution of 10 working days.
2. The Company has a unit tasked with monitoring news related to the Company in the media.

Effectiveness of Risk Management System

The Company consistently strives to implement an effective risk management system to ensure that its business activities are conducted efficiently. The Company considers risk management is very importan, whereby the primary responsibility of the Risk Management unit is to perform analyses to identify risks faced by the Company, determine the level of risk, and formulate risk management policies to ensure that the Company's risks remain under control.

To that end, the Company does the following:
1. The Company conducts its own soundness assessment based on OJK Regulation No.28/POJK.05/2020 concerning Soundness Level Assessment of the Non-Bank Financial Services Institutions and OJK Circular letter No.11/SEOJK.05/2020 concerning Soundness Level Assessment of the Financing Companies and Sharia Financing Companies. One of the factors used in the Company's Soundness Assessment is the assessment of the Risk Profile Factor. This Risk Profile Assessment is classified based on 8 (eight) types of risk which are then reported to the regulator every year. This assessment includes an assessment of Inherent Risk and an assessment of the Quality of Risk Management Implementation.
2. The Company established a Risk Management Committee as a form of implementation of the active supervision of the Board of Directors on the implementation of risk management in the Company. The Risk Management Committee was formed to ensure the implementation of risk management is carried out consistently and effectively in the Company.
3. The Risk Monitoring Committee has duties and responsibilities to evaluate risk management and provide recommendations to the Board of Commissioners.

Sanksi Administratif
Administrative Sanction

Sepanjang periode pelaporan, Perseroan menerima sejumlah sanksi administratif terkait aspek kepatuhan, antara lain pelaporan SLIK berupa peringatan tertulis dan denda dengan total Rp650.000 untuk periode November 2023, Maret 2024, Mei 2024, Agustus 2024, Februari 2025, dan Mei 2025; Selain itu, terkait Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta, Perseroan dikenakan denda sebesar Rp0 untuk periode Oktober dan November 2024; Perseroan juga menerima peringatan tertulis atas Layanan Pengaduan Konsumen untuk periode November dan Desember 2024; Peringatan tertulis atas Laporan Bulanan, Program APU, PPT, dan PPPSPM; Pendaftaran Jaminan Fidusia per Juni 2025; Dan aktivitas usaha perusahaan pembiayaan untuk periode data hingga Juni 2025.

During the reporting period, the Company received several administrative sanctions related to compliance aspects, including SLIK reporting in the form of written warnings and fines totaling Rp650,000 for the periods of November 2023, March 2024, May 2024, August 2024, February 2025, and May 2025; In addition, in relation to the Immediate Blocking Report, the Company was subject to a fine of Rp0 for the periods of October and November 2024; The Company also received written warnings in connection with Consumer Complaint Services for the periods of November and December 2024; written warnings related to Monthly Reports, AML, PTF,and PFPMDW programs; Fiduciary Registration as of June 2025; And financing company business activities for data periods up to June 2025.

Perseroan telah menindaklanjuti seluruh sanksi yang dikenakan dengan melakukan langkah-langkah perbaikan dan pemenuhan kewajiban sesuai arahan OJK. Manajemen juga telah melakukan evaluasi internal serta penguatan aspek kepatuhan guna memastikan peningkatan kualitas tata kelola perusahaan dan meminimalkan potensi terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)*.

The Company has followed up on all imposed sanctions by undertaking corrective actions and fulfilling its obligations in accordance with OJK's directives. Management has also conducted internal evaluations and strengthened compliance aspects to ensure improvements in corporate governance quality and to minimize the risk of similar violations occurring in the future. The Company remains committed to complying with all applicable laws and regulations and to upholding the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Diluar sanksi administratif yang telah disampaikan diatas, Perseroan tidak mendapat sanksi lainnya dari Regulator. Selain itu, tidak terdapat sanksi administratif yang bersifat material dan berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Beyond the administrative sanctions outlined above, the Company has not received any other sanctions from the Regulator. Furthermore, there are no material administrative sanctions that impact the Company's business continuity.

Perkara Hukum yang Berdampak Material
Legal Cases with Material Impact

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Tahunan ini, Perseroan tidak menghadapi perkara hukum yang berdampak material.

As of the issuance date of this Annual Report, the Company has not faced any legal cases with any material impact.

Kode Etik
Code of Conducts

Kode etik dan budaya Perseroan merupakan bagian dari prioritas utama bagi insan Perseroan dalam menjaga tanggung jawab dan profesionalisme kerja serta kepercayaan dari konsumen. Pelaksanaan kode etik merupakan bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kode etik menjadi pedoman dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Perseroan dan etika bisnis yang antara lain mengatur tentang, sebagai berikut:

The Company's code of conduct and culture are top priority for the Company's employees in maintaining work responsibilities and professionalism to gain the trust of the consumers. The code of conduct is part of the implementation of Good Corporate Governance. The code of conduct serves as a guideline for actions that adhere to the Company's values and business ethics, which regulates the following:

Nepotisme
Karyawan Perseroan dilarang untuk melibatkan diri dalam suatu transaksi apabila memiliki hubungan saudara/keluarga dengan rekan usaha, konsumen atau karyawan lain yang terlibat dalam transaksi tersebut. Jika karyawan memiliki hubungan saudara/keluarga dengan karyawan lain, maka karyawan tersebut wajib untuk melaporkan hal tersebut kepada Divisi HR untuk menghindari benturan kepentingan.

Nepotism
The Company's employees are prohibited from engaging in a transaction if they have a family relationship with business partners, customers or other employees involved in the transaction. If the employee has a family relationship with another employee, the employee is required to report the matter to the HR Division to avoid conflicts of interest.

Usaha Pribadi
Karyawan dilarang untuk terlibat dalam usaha pribadi di lingkungan kantor karena mengganggu aktivitas kerja dan dapat

Personal Business
Employees are prohibited from engaging in personal business in the office environment because it interferes with work activities

menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

Kerahasiaan

Karyawan wajib untuk menjaga dan merahasiakan seluruh informasi milik Perseroan, termasuk rencana dan strategi Perseroan, informasi mengenai pemasaran, keuangan, kegiatan operasional dan informasi strategis lainnya, sejak bergabung sebagai karyawan hingga tidak lagi bekerja sebagai karyawan Perseroan.

Persaingan yang Sehat

Perseroan selalu mendukung persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan seluruh kegiatan usahanya. Seluruh kegiatan usaha dan kegiatan karyawan harus berdasarkan persaingan yang sehat yang berlandaskan etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Seluruh karyawan wajib untuk mengupayakan agar hal tersebut dilaksanakan dan diwujudkan karena akan berdampak terhadap reputasi dan pertumbuhan Perseroan. Ketentuan mengenai kode etik memuat tentang:

1. Saluran komunikasi
2. Tanggung jawab karyawan utama
3. Perlindungan terhadap harta milik Perseroan
4. Hubungan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra usaha
5. Interaksi dengan Pemerintah
6. Menerapkan kode etik pada setiap aktivitas pekerja
7. Budaya anti korupsi
8. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik

Ketentuan mengenai penerapan kode etik ini berlaku bagi seluruh jajaran Direksi dan karyawan. Guna mendukung penerapan Kode Etik, Perseroan telah melakukan sosialisasi Peraturan Perusahaan beserta Etika Bisnis dan Etika Perilaku kepada seluruh karyawan Perseroan dan bagi karyawan baru di sosialisasikan pada saat *training* orientasi karyawan baru.

Seluruh karyawan wajib mematuhi semua isi dan ketentuan dari Peraturan Perusahaan beserta Etika Bisnis dan Etika Perilaku tersebut, dan apabila ada Pelanggaran yang dilakukan maka akan menerima sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan apabila diperlukan bila pelanggaran itu menyangkut hal yang masuk kategori tindakan melawan hukum akan diserahkan/dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Kebijakan Mengenai Kewajiban Direksi/Komisaris Untuk Mencegah Adanya Konflik Kepentingan

Perseroan memiliki kebijakan terkait konflik kepentingan yang tertuang dalam masing-masing Piagam Direksi, Piagam Dewan Komisaris, dan Kode Etik. Sebagai bentuk komitmen Direksi dan Dewan Komisaris untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, maka Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan telah menandatangani Pakta Integritas yang didokumentasikan oleh Perseroan.

and can lead to abuse of authority and office facilities for personal gain.

Confidentiality

Employees are obliged to maintain and keep confidential all information belonging to the Company, including the Company's plans and strategies, information regarding marketing, finance, operational activities, and other strategic information, from joining as an employee until no longer working as an employee of the Company.

Fair Competition

The Company always supports fair business competition in carrying out all its business activities. All business activities and employee activities must be based on fair competition based on ethics and morals prevailing in society. All employees are obliged to strive for this to be implemented and realized because it will have an impact on the Company's reputation and growth. The provisions of the code of ethics contain:

1. Communication channels
2. Key employee Responsibilities
3. Protection of Company property
4. Relationship with suppliers, customers, and business partners
5. Interaction with the Government
6. Applying the code of ethics to every worker activity
7. Anti-corruption culture
8. Sanctions for violations of the code of ethics

Provisions regarding the implementation of this code of ethics apply to all levels of the Board of Directors and employees. To support the implementation of the Code of Ethics, the Company has socialized the Company Regulations along with the Business Ethics and Code of Conduct to all employees of the Company, and new employees are socialized during the new employee orientation training.

All employees are required to comply with all contents and provisions of the Company's Regulations along with the Business Ethics and Code of Conduct, and if there is a violation committed, they will receive sanctions following the applicable rules and if necessary, if the violation involves matters that fall into the category of illegal acts, it will be submitted/reported to the competent authorities.

Policy Regarding The Obligations of Directors/Commissioners to Prevent Conflicts of Interest

The Company has policies related to conflicts of interest as stipulated in the respective Board of Directors Charter, Board of Commissioners Charter, and Code of Conduct. As a commitment of the Board of Directors and the Board of Commissioners in preventing conflicts of interest, the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees have signed an Integrity Pact, which is documented by the Company.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Karyawan

Long-Term Performance-Based Compensation Policy For Employees

Perseroan telah memiliki kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang sebagai bentuk penghargaan untuk karyawan dengan masa kerja 5 (lima) tahun dan kelipatan 5 (lima) tahun berturut-turut.

The Company has a policy of providing long-term as a form of appreciation for employees with 5 (five) years of service and multiples of 5 (five) years consecutively.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Mengenai Kepemilikan Saham
Share Ownership Disclosure Policy

Perseroan telah memiliki kebijakan mengenai pengungkapan informasi mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang termuat dalam Piagam Direksi dan Dewan Komisaris. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada halaman 63.

The Company has a policy regarding the disclosure of information of share ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, which is contained in the Board of Directors and Board of Commissioners Charter. Disclosure of share ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners can be seen on page 63.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

Untuk merealisasikan upaya penegakan prinsip GCG dan menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab, pada tanggal 29 Agustus 2017, Perseroan menyediakan media komunikasi untuk pelaporan fraud dengan nama *Whistleblowing System* (WBS) dan diterbitkan pedoman terkait WBS melalui Kebijakan Nomor P-IA-002/IX/22 tertanggal 26 September 2022 dan Surat Keputusan Direksi dengan Nomor DIR-001/TK-CORSEC/SKD/IX/22 tertanggal 26 September 2022 tentang Mekanisme Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System.*

In order to realize the enforcement of Good Corporate Governance (GCG) principles and to create a clean and accountable working environment, on 29 August 2017 the Company established a communication channel for reporting fraud known as the Whistleblowing System (WBS). Guidelines related to the WBS were subsequently issued through Policy No. P-IA-002/IX/22 dated 26 September 2022 and the Board of Directors' Decree No. DIR-001/TK-CORSEC/SKD/IX/22 dated 26 September 2022 concerning the Whistleblowing System Reporting Mechanism.

WBS merupakan bagian dari pengendalian internal Perseroan untuk mengurangi risiko terhadap adanya pelanggaran dan sebagai salah satu media pelaporan dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran etika dan hukum di Perseroan. Informasi yang disampaikan dalam WBS akan dijamin kerahasiaan baik berupa identitas pelapor maupun informasi yang dilaporkan. Untuk itu akses terhadap WBS dibatasi dan hanya bisa diakses oleh penanggung jawab yaitu Kepala Unit Audit Internal, *Senior General Manager Risk, Compliance, Internal Audit & Independent Control Unit* dan Direktur Utama Perseroan.

The WBS forms part of the Company's internal control system to mitigate the risk of violations and serves as one of the reporting channels to prevent and detect potential ethical and legal violations within the Company. Information submitted through the WBS is guaranteed confidentiality, both with respect to the identity of the whistleblower and the information reported. Accordingly, access to the WBS is restricted and may only be accessed by the responsible parties, namely the Head of the Internal Audit Unit, the Senior General Manager of Risk, Compliance, Internal Audit & Independent Control Unit, and the President Director of the Company.

Media / sarana untuk penyampaian informasi yang disediakan adalah:

- *Mailbox* : Menara Astra Lt.32
Jl. Jendral Sudirman
Kaveling 5-6
Jakarta 10220
- Alamat Surel : whistle@mizuho-ls.co.id
- *Mobile Phone (WhatsApp)* : 08111262003

The media / channels provided for the submission of information are as follows:

- Mailbox : Menara Astra 32nd Floor
Jl. Jendral Sudirman
Kaveling 5-6
Jakarta 10220
- Email : whistle@mizuho-ls.co.id
- Mobile Phone (WhatsApp) : 08111262003

Pada tahun 2025, jumlah pengaduan yang masuk dan diproses sebagai berikut:

In 2025, the number of complaints received and processed is as follows:

Parameter Parameters	Jumlah Pengaduan Total Complaints	Status Pemeriksaan Examination Status				
		Diproses Processed	Tidak Diproses Not Processed	Tahap Investigasi Investigation Stage	Laporan Tidak Terbukti Not Proven Report	Laporan Terbukti Proven Report
Pengaduan Yang Masuk Reports Received	5	5	0	0	2	5*

*) Terdapat 2 laporan *whistleblower* yang dilaporkan pada tahun buku 2024 dan baru selesai diinvestigasi ditahun 2025 dengan status laporan terbukti.
There were 2 whistleblower reports submitted in the 2024 financial year, which were completed and investigated in 2025, with the reports confirmed as proven.

Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Guidelines on The Implementation of Good Corporate Governance

Sepanjang tahun 2025, Perseroan secara konsisten menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("*Good Corporate Governance*/GCG") sebagai bagian integral dari praktik usaha dan budaya perusahaan. Penerapan GCG tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, khususnya sebagaimana diatur dalam

Throughout 2025, the Company consistently implemented and upheld the principles of Good Corporate Governance ("GCG") as an integral part of its business practices and corporate culture. The implementation of GCG was carried out in accordance with regulations set by the Financial Services Authority (OJK), particularly as stipulated in OJK Regulation

Peraturan OJK nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pada tahun 2026, Perseroan telah menetapkan Kebijakan pelaksanaan Tata Kelola dengan nomor P-RCA-001/II/26 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perseroan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran *(fairness)* di seluruh jenjang organisasi. Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif menjalankan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan serta pengawasan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, didukung oleh komite-komite dan fungsi pendukung lainnya yang memadai.

Perseroan juga secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan, prosedur, serta sistem pengendalian internal guna memastikan efektivitas penerapan GCG. Dengan komitmen tersebut, Perseroan berupaya menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan serta mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

OJK menerbitkan Peraturan No. 28/SEOJK.06/2025 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang diundangkan pada tanggal 19 November 2025 mencabut seluruhnya peraturan No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan sebagian Peraturan No.11/SEOJK.05/2020 romawi IV tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Perseroan telah melaporkan Transparansi Penerapan Tata Kelola yang Baik mengikuti peraturan yang berlaku untuk periode tahun 2025 pada tanggal 13 Februari 2026, yang meliputi aspek penilaian :

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang pemegang saham dan RUPS;
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
5. Penerapan manajemen risiko;
6. Penerapan strategi *anti-fraud;*
7. Penerapan fungsi kepatuhan;
8. Penerapan fungsi audit internal dan audit eksternal;
9. Penanganan benturan kepentingan;
10. Penerapan kebijakan remunerasi;
11. Keterbukaan informasi;
12. Etika Bisnis;
13. Kebijakan Pembiayaan;
14. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
15. Rencana bisnis.

No. 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions, as well as other applicable laws and regulations.

In 2026, the Company has established a Corporate Governance Policy under reference number P-RCA-001/II/26 concerning Good Corporate Governance. The Company adheres to the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness across all levels of the organization. The Board of Directors and the Board of Commissioners actively perform their management and supervisory roles in accordance with applicable regulations, supported by committees and other adequate supporting functions.

The Company also continuously evaluates and enhances its policies, procedures, and internal control systems to ensure the effectiveness of GCG implementation. Through this commitment, the Company strives to maintain the trust of its stakeholders and support healthy and sustainable business growth.

Transparency Implementation of Good Corporate Governance

OJK issued Regulation No. 28/SEOJK.06/2025 concerning the Report on the Implementation of Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions, which was enacted on 19 November 2025, fully revoking Regulation No. 15/SEOJK.05/2016 concerning the Report on the Implementation of Good Corporate Governance for Financing Companies and partially revoking Regulation No. 11/SEOJK.05/2020, Chapter IV, concerning the Soundness Level Assessment of Financing Companies and Sharia Financing Companies.

The Company has submitted the Transparency Report on the Implementation of Good Corporate Governance in accordance with the applicable regulations for the 2025 period on 13 February 2026, which covers the following assessment aspects:

1. Implementation of the duties and authorities of shareholders and the GMS;
2. Implementation of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors;
3. Implementation of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners;
4. Completeness and implementation of committee duties;
5. Implementation of risk management;
6. Implementation of anti-fraud strategies;
7. Implementation of the compliance function;
8. Implementation of internal and external audit functions;
9. Handling of conflicts of interest;
10. Implementation of remuneration policies;
11. Information disclosure;
12. Business ethics;
13. Financing policies;
14. Implementation of sustainable finance, including environmental and social responsibility; and
15. Business plan.

Berdasarkan penyusunan Laporan Penerapan Transparansi Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disusun sesuai dengan ketentuan OJK, tidak terdapat temuan atau aspek material yang memerlukan rencana tindak *(action plan)* atas kekurangan dalam penerapan tata kelola.

Hasil tersebut mencerminkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan telah berjalan secara memadai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, Perseroan tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan guna memastikan praktik tata kelola senantiasa relevan, efektif, dan selaras dengan perkembangan regulasi serta dinamika usaha.

Based on the preparation of the Transparency Report on the Implementation of Good Corporate Governance, which was compiled in accordance with the provisions of the OJK, there were no findings or material aspects requiring an action plan to address deficiencies in governance implementation.

These results reflect that the implementation of GCG principles within the Company has been adequate and in compliance with applicable laws and regulations. Nevertheless, the Company remains committed to continuously evaluating and improving its governance practices to ensure they remain relevant, effective, and aligned with regulatory developments and business dynamics.

Tingkat Kesehatan Perusahaan Faktor Tata Kelola

Perseroan telah melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Perusahaan untuk tahun 2025 sebagaimana diwajibkan oleh OJK berdasarkan peraturan nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Dalam implementasi penilaian, Perseroan merujuk pada peraturan nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan peraturan nomor 28/SEOJK.06/2025 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Soundness Level the Company GCG Factor

The Company has conducted a self-assessment of its soundness level for 2025 as required by OJK based on Regulation No. 28/POJK.05/2020 concerning the Soundness Level Assessment of Non-Bank Financial Institutions. In implementing the assessment, the Company referred to Regulation No. 11/SEOJK.05/2020 concerning the Soundness Level Assessment of Financing Companies and Sharia Financing Companies and Regulation No. 28/SEOJK.06/2025 concerning the Report on the Implementation of Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.

Penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Perusahaan untuk Faktor Tata Kelola posisi 31 Desember 2025 dengan menggunakan *Risk Based Non-Bank Rating* (RBNBR) berhasil mendapatkan Peringkat 1 (Sangat Baik).

The Company's self-assessment of its soundness level for the Governance Factor as of 31 December 2025, using the Risk-Based Non-Bank Rating (RBNBR), achieved a Rating of 1 (Excellent).

Hasil Penilaian Sendiri Untuk Tata Kelola Perusahaan / Self Assessment on Corporate Governance Result

Peringkat / Rank	Keterangan / Description
1 Sangat Baik / Excellent	Hasil penilaian Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah Peringkat 1 yang mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola dengan hasil penilaian sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola yang Baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Perseroan. Perseroan secara konsisten mematuhi ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan seluruh kegiatan operasional dijalankan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. The assessment result for the Good Corporate Governance Factor is Rating 1, which reflects that the Company's management has implemented governance practices with a very good assessment outcome. This is demonstrated by the highly adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are any weaknesses in the implementation of these principles, such weaknesses are generally not significant and can be promptly addressed by the Company's management. The Company consistently complies with regulatory requirements and applicable laws and regulations, and ensures that all operational activities are carried out in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

Dari aspek GCG, Pelaksanaan Tata Kelola dinilai pada peringkat 1 yang mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan secara umum dengan sangat baik.

From GCG perspective, the implementation of Governance is rated at Rank 1, reflecting that the Company's management has, in general, implemented Corporate Governance very well.

Penetapan peringkat faktor Tata Kelola Perusahaan dilakukan berdasarkan analisis atas :

a. Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perseroan;

The determination of the GCG factor rating is based on an analysis of:

a. The implementation of Good Corporate Governance principles within the Company;

b. Kecukupan Tata Kelola atas struktur *(governance structure),* proses *(governance process),* dan hasil penerapan tata kelola *(governance outcome)* pada Perseroan; dan
c. Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

b. The adequacy of governance in terms of structure (governance structure), process (governance process), and outcomes (governance outcome) within the Company; and
c. Other information related to corporate governance based on relevant data and information.

Analisis Faktor Penerapan GCG

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan GCG yang mengacu pada ketentuan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menilai bahwa aspek struktur, proses, dan hasil penerapan GCG telah berjalan secara memadai dan efektif.

Dari aspek struktur, Perseroan telah memiliki organ tata kelola yang lengkap, meliputi Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, serta unit kerja dan fungsi pendukung sesuai ketentuan regulasi. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga telah memenuhi persyaratan *fit and proper test* serta memiliki pengalaman yang relevan. Pembagian tugas dan tanggung jawab telah ditetapkan secara jelas, tanpa adanya rangkap jabatan yang melanggar ketentuan. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan independen. Selain itu, fungsi pengendalian internal yang mencakup Manajemen Risiko, Kepatuhan, Audit Internal, dan *Independent Control Unit* telah dibentuk dan beroperasi secara efektif.

Dari aspek proses, Perseroan telah melaksanakan rapat secara berkala dan terdokumentasi dengan baik. Implementasi kebijakan dan SOP berjalan efektif dan konsisten. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara terstruktur, disertai pemantauan serta tindak lanjut atas temuan audit internal maupun eksternal. Kewajiban pelaporan kepada regulator juga telah dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Dari aspek hasil, penerapan GCG yang konsisten telah mendukung proses pengambilan keputusan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian *(aspect of prudence)*, sehingga mampu menjaga tingkat kesehatan dan keberlanjutan usaha Perseroan. Selain itu, tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengelolaan dan pengawasan Perseroan.

GCG Implementation Factor Analysis

Based on the evaluation of the implementation of GCG, which refers to the provisions of the OJK and applicable laws and regulations, the Company concludes that the aspects of structure, process, and outcome of GCG implementation have been adequate and effective.

From the structure aspect, the Company has established a complete governance structure, including the Board of Directors, Board of Commissioners, committees, as well as supporting units and functions in accordance with regulatory requirements. All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners have met the fit and proper test requirements and possess relevant experience. The division of duties and responsibilities has been clearly defined, with no concurrent positions that violate regulations. Decision-making processes are conducted objectively and independently. In addition, internal control functions, including Risk Management, Compliance, Internal Audit, and the Independent Control Unit, have been established and are operating effectively.

From the process aspect, the Company has conducted meetings on a regular basis with proper documentation. The implementation of policies and SOPs has been effective and consistent. Risk management has been implemented in a structured manner, accompanied by monitoring and follow-up on findings from both internal and external audits. Reporting obligations to regulators have also been carried out in a timely manner and in accordance with applicable requirements.

From the outcome aspect, the consistent implementation of GCG has supported decision-making processes based on the aspect of prudence, thereby maintaining the Company's soundness and business sustainability. Furthermore, there are no conflicts of interest that could affect objectivity in the management and supervision of the Company.

Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU,PPT dan PPPSPM)

Anti Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing and Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons (AML, PTF and PFPMDW)

Perseroan telah memiliki fungsi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM. Pejabat yang melaksanakan program-program tersebut dibantu oleh Kepala Kantor Cabang dalam penerapan program APU, PPT dan PPPSPM di Kantor Cabang. Pejabat Program APU,PPT dan PPPSPM ditetapkan bagian dari struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Sesuai dengan POJK nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, tugas dari penanggung jawab penerapan program APU, PPT dan PPPSPM adalah:

The Company has established a function responsible for the implementation of AML, PTF, and PFPMDW programs. The officials responsible for these programs are supported by Branch Heads in implementing AML, PTF, and PFPMDW programs at Branch Offices. The AML, PTF, and PFPMDW Program officer is part of the organizational structure and reports to the Board of Directors.

In accordance with OJK Regulation No. 8 of 2023 concerning the Implementation of AML, PTF, and PFPMDW Programs in the Financial Services Sector, the duties of the person in charge of implementing AML, PTF, and PFPMDW programs include:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang ("TPPU"), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("TPPT"), dan/atau PPPSPM terkait dengan debiturnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi *(delivery channels)*, sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. Menyusun, melakukan pengkinian, serta mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1, untuk dimintakan pertimbangan Direksi;
3. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh debitur;
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam angka 2, telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, volume transaksi Perseroan, dan/atau modus TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM;
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan debitur telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
6. Memantau rekening debitur dan pelaksanaan transaksi debitur;
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi debitur untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
8. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
9. Memastikan pengkinian data dan profil debitur serta data dan profil transaksi debitur;
10. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur Perseroan serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK;
11. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off;*
12. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait;
13. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
14. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
15. Menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;

1. Periodically analyzing the risk assessment of Money Laundering Crime ("MLC"), Terrorism Funding Crime ("TFC"), and/or PFPMDW related to debtors, countries or geographic areas, products, services, transactions, or distribution channels, at least once a year;
2. Preparing , updating, and proposing policies and procedures for implementing the AML, PTF, and PFPMDW programs that have been prepared to manage and mitigate risks based on the risk assessment as referred to in number 1, to request consideration from the Board of Directors;
3. To ensure the existence of a system capable of effectively identifying, analyzing, monitoring, and reporting on the profile, characteristics, or transaction behavior patterns of debtors;
4. Ensuring that the policies and procedures referred to in point 2 are aligned with changes and developments, including products, services, and technology in the financial services sector, business activities, scale, complexity, characteristics, transaction volume of the Company, and/or methods of MLC, TFC, and/or PFPMDW;
5. Ensuring that debtor-related forms have accommodated the data required for the implementation of AML, PTF, and PFPMDW programs;
6. Monitoring debtor accounts and the execution of debtor transactions;
7. Evaluating the results of monitoring and analysis of debtor transactions to determine whether there are suspicious financial transactions, cash transactions, and/or cross-border fund transfers;
8. Maintaining proper administration of monitoring and evaluation results;
9. Ensuring the regular updating of debtor data and profiles, as well as debtor transaction data and profiles;
10. Ensuring that business activities with high risk related to MLC, TFC, and/or PFPMDW are effectively identified in accordance with the Company's policies and procedures and OJK regulations;
11. Ensuring the existence of effective communication mechanisms from each relevant work unit to the designated unit or officer responsible for AML, PTF, and PFPMDW programs, while maintaining confidentiality and adhering to anti–tipping-off provisions;
12. Supervising the implementation of AML, PTF, and PFPMDW programs across relevant work units;
13. Ensuring the identification of high-risk areas related to AML, PTF, and PFPMDW implementation based on applicable laws and reliable information sources;
14. Receiving, analyzing, and preparing reports on suspicious financial transactions and/or cash transactions submitted by work units;
15. Preparing reports on suspicious financial transactions, cash transactions, and/or cross-border fund transfer transactions;

16. Memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris ("DTTOT") dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ("DPPSPM") telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPPSPM;
17. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai Perseroan;
18. Memastikan seluruh kegiatan untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terlaksana dengan baik; dan
19. Melakukan tugas lain untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

Sepanjang tahun 2025, beberapa langkah dan kebijakan dalam implementasi APU, PPT, dan PPPSPM, yaitu :

1. Pelaporan penyaluran pembiayaan setiap triwulan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui sistem SIPESAT;
2. Melakukan pelaporan rencana dan realisasi pengkinian data debitur sesuai dengan ketentuan POJK menggunakan sistem pelaporan APOLO;
3. Menindaklanjuti permintaan dari Mabes Polri dan OJK terkait DTTOT untuk memastikan apakah ada debitur Perseroan yang masuk dalam DTTOT;
4. Menindaklanjuti permintaan dari PPATK terkait dengan PPPSPM untuk memastikan apakah ada debitur Perseroan yang tercantum dalam daftar PPPSPM;
5. Melakukan pengayaan pada daftar *watchlist* pada aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) setiap triwulan;
6. Penanggung jawab Fungsi APU, PPT dan PPPSPM melaksanakan training *external* materi Bimbingan Teknis Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM terhadap Perusahaan Pembiayaan termasuk Sosialisasi Tata Cara Registrasi Pelaporan melalui web goAML, yang diadakan oleh PPATK pada tanggal 10 Juni 2025;
7. Penanggung jawab fungsi APU, PPT dan PPPSPM telah mengikuti materi Sosialisasi Implementasi aplikasi SIPESAT versi 3.0, yang diadakan oleh PPATK pada tanggal 24 Juni 2025;
8. Mengadakan pelatihan dan sosialisasi internal pada tanggal 3 Juli 2025 berkerja sama dengan PT Sarana Mutu Edukasi Indonesia dengan materi Pemahaman dasar dan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Pelatihan dan sosialisasi ini diikuti oleh karyawan Kantor Pusat maupun Kantor Cabang;
9. Pelatihan dan sosialisasi yang diikuti oleh karyawan Kantor Pusat maupun Kantor Cabang dengan materi Tren Modus dan Skema Pencucian Uang Terbaru (Strategi Identifikasi, Mitigasi, dan Penegakan Hukum), yang diadakan oleh OJK & PPATK pada tanggal 18 September 2025;
10. Menyusun Individual *Risk Assessment* dan telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan;

16. Periodically monitoring and ensuring follow-up actions related to the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations ("LSTTO") and the Proliferation Financing List ("PFL") are in accordance with applicable laws and regulations on the prevention and eradication of TFC and PFPMDW;
17. Monitoring, analyzing, and recommending training needs related to the implementation of AML, PTF, and PFPMDW programs for the Company's officers and/or employees;
18. Ensuring that all activities related to the implementation of AML, PTF, and PFPMDW programs are properly carried out; and
19. Performing other duties related to the implementation of AML, PTF, and PFPMDW programs.

Throughout 2025, several measures and policies in the implementation of AML, PTF, and PFPMDW programs include:

1. Quarterly reporting of financing disbursement to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) through the SIPESAT system;
2. Reporting the plan and realization of debtor data updates in accordance with POJK provisions using the APOLO reporting system;
3. Following up on requests from the Indonesian National Police Headquarters and OJK regarding LSTTO to verify whether any of the Company's debtors are included in the list LSTTO;
4. Following up on requests from PPATK regarding PFPMDW to ensure whether any of the Company's debtors are listed in the proliferation financing list;
5. Enhancing the watchlist in the application Terrorism Financing Information System (SIPENDAR) on a quarterly basis;
6. The officer responsible for the AML, PTF, and CPF MDW function participated in external technical training on the implementation of AML, PTF, and PFPMDW programs for financing companies, including the socialization of reporting registration procedures through the goAML web system, conducted by PPATK on 10 June 2025;
7. The officer responsible for the AML, PTF, and PFPMDW function participated in the socialization of the implementation of the SIPESAT version 3.0 application conducted by PPATK on 24 June 2025;
8. Conducted internal training and socialization on 3 July 2025 in collaboration with PT Sarana Mutu Edukasi Indonesia on the basic understanding and implementation of AML, PTF, and PFPMDW programs. This training and socialization were attended by employees from both the Head Office and Branch Offices;
9. Training and socialization attended by employees at both the Head Office and Branch Offices, covering the topic Latest Trends in Money Laundering Modes and Schemes (Strategies for Identification, Mitigation, and Law Enforcement), organized by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) on September 18, 2025;
10. Prepared an Individual Risk Assessment and submitted it to OJK in accordance with applicable regulations;

11. Melakukan pengisian terhadap *self-Assessment* terkait APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan ketentuan;
12. Melakukan evaluasi hasil penilaian OJK terkait dengan APU, PPT, dan PPPSPM.

11. Completed the self-assessment related to AML, PTF, and PFPMDW in accordance with applicable provisions;
12. Conducted an evaluation of OJK's assessment results related to AML, PTF, and PFPMDW.

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

Korupsi merupakan tindak pidana dan kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* yang sangat merugikan keuangan negara. Oleh sebab itu, Perseroan mendukung penuh ketegasan Pemerintah untuk memberantas korupsi di segala lini. Kebijakan antikorupsi merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk memperkuat dukungan antikorupsi, Perseroan telah mengatur larangan korupsi dalam Kode Etik Perseroan, yang di dalamnya antara lain mengatur kebijakan tentang hadiah dan sumbangan (donasi) yang tidak dibenarkan. Untuk itu, seluruh pengurus dan karyawan Perseroan tidak dibenarkan secara hukum dan etika usaha menerima dan memberi hadiah, sumbangan dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, dan fasilitas lainnya (gratifikasi) yang diterima di dalam maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat (1).

Corruption is a criminal offense and an extraordinary crime that significantly harms state finances. Therefore, the Company fully supports the Government's firm stance in eradicating corruption at all levels. The Company's anti-corruption policy refers to Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption. To strengthen its anti-corruption commitment, the Company has stipulated a prohibition on corruption within its Code of Conduct, which, among others, regulates policies on gifts and donations that are not permitted. Accordingly, all members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Company are legally and ethically prohibited from giving or receiving gifts, donations in the form of money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, accommodation facilities, tours, medical treatment, and other facilities (gratification), whether received domestically or abroad, and whether conducted through electronic means or otherwise, in accordance with Article 12B paragraph (1) of Law No. 20 of 2001.

Sejalan dengan dukungan terhadap antikorupsi, Perseroan juga memiliki kebijakan terkait anti suap yang tertuang didalam kebijakan nomor P-RCA 009/VI/23 tanggal 30 Juni 2023 tentang Anti Penyuapan dan Korupsi dan juga Perseroan telah melakukan implementasi terhadap POJK 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi lembaga jasa keuangan yang tertuang didalam kebijakan nomor P-RCA 014/XII/24 tanggal 27 Januari 2025 tentang *Anti-Fraud*.

In line with its anti-corruption commitment, the Company also has an anti-bribery policy as stipulated in Policy No. P-RCA 009/VI/23 dated 30 June 2023 concerning Anti-Bribery and Corruption. The Company has also implemented the provisions of POJK No. 12 of 2024 regarding the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions, as set forth in Policy No. P-RCA 014/XII/24 dated 27 January 2025 concerning Anti-Fraud.

Dalam hal ini, Perseroan mendefinisikan gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima, baik dengan atau tanpa mengharapkan imbal balik, oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap) serta pihak eksternal termasuk namun tidak terbatas pada konsultan, *advisor, outsourced,* vendor atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan.

In this context, the Company defines gratification as any form of benefit received, whether or not in expectation of a return, by members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Company (whether permanent, contract, or temporary employees), as well as external parties including but not limited to consultants, advisors, outsourced personnel, vendors, or other parties working for and on behalf of the Company.

Sementara korupsi dalam konteks negara didefinisikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi dalam konteks lebih luas atau umum sesuai dengan POJK 12 Tahun 2024 diartikan sebagai perbuatan dengan maksud menguntungkan suatu pihak, baik secara sendiri maupun bersama dengan pihak lain, secara melawan hukum dengan menyalahgunakan pengaruhnya dalam suatu transaksi bisnis, atau penyalahgunaan posisi atau kewenangan yang dapat menguntungkan atau merugikan konsumen, Perusahaan, dan/atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Didalam kebijakan tersebut tertuang prinsip, komitmen, program - program Perseroan yang berkaitan dengan antikorupsi dan strategi *Anti-Fraud* serta sanksi tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan Perseroan.

Meanwhile, corruption in the state context is defined as any person who unlawfully commits an act of enriching themselves, another person, or a corporation, which may harm state finances or the national economy. A broader or general definition of corruption in accordance with POJK No. 12 of 2024 refers to any act intended to benefit a party, either individually or jointly with others, carried out unlawfully by abusing influence in a business transaction, or abusing a position or authority that may benefit or harm consumers, the Company, and/or other parties, either directly or indirectly. The aforementioned policies set forth the principles, commitments, and programs of the Company related to anti-corruption and anti-fraud strategies, as well as strict sanctions for parties who violate the Company's provisions.

Pelatihan Anti Korupsi kepada karyawan Perseroan dilaksanakan Perseroan sebagai bagian dari Penerapan Strategi Anti *Fraud* Perseroan yang di selenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Anti-Corruption Training for the Company's employees is carried out by the Company as part of the Implementation of the Company's Anti-Fraud Strategy which is held at least once a year.

Penerapan Strategi *Anti-Fraud*
Implementation of Anti-Fraud Strategy

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) serta memperkuat sistem pengendalian internal, sepanjang tahun 2025 Perseroan telah menerapkan strategi pengendalian fraud sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Dalam aspek pencegahan, Perseroan telah menetapkan Kebijakan Penerapan Strategi *Anti-Fraud* Nomor P-RCA-014/XII/24 yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melakukan upaya pencegahan, deteksi, serta penanganan terhadap potensi terjadinya *fraud*.

Sehubungan dengan peningkatan pengendalian internal dan penerapan strategi anti-*fraud*, Perseroan bekerjasama dengan KPMG telah melakukan pelatihan yang diikuti oleh Direktur, Deputi Direktur, Kepala Divisi, Kepala Departemen dan Kepala Wilayah pada tanggal 17 Januari 2025 dan 21 Januari 2025 yang diikuti oleh Kepala Cabang, *Section Head* Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Selanjutnya, pada tanggal 14 Oktober 2025, telah dilakukan uji pemahaman yang diikuti oleh karyawan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat.

Perseroan mendifinisikan *fraud* sebagaimana dijelaskan didalam POJK 12 Tahun 2024 sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, atau memanipulasi Perseroan, pelanggan, atau pihak lain, yang terjadi dilingkungan Perseroan, menggunakan sarana Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan, pelanggan atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perseroan melakukan penyesuaikan terhadap kategori jenis-jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* sesuai dengan POJK 12 Tahun 2024, yaitu :

1. Korupsi
2. Penyalahgunaan aset
3. Kecurangan Laporan Keuangan
4. Penipuan
5. Pembocoran informasi rahasia
6. Tindakan lain yang dapat disamakan dengan *fraud*

Dalam memastikan pengendalian *fraud* dan manajemen risiko yang kuat, Perseroan telah melakukan beberapa upaya pengendalian anti *fraud*, seperti :

1. Pengawasan Aktif Manajemen
   Pengawasan yang dilakukan oleh manajemen secara aktif akan meningkatkan kualitas pengendalian internal dan meminimalisir potensi terjadinya *fraud.* Manajemen senantiasa membangun budaya *anti-fraud* kepada seluruh jenjang organisasi dibuktikan dengan penandatanganan Deklarasi *anti-fraud* oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh jajaran organisasi. Selain itu pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan dengan berbagai cara seperti pelaksanaan edukasi dan *training* untuk meningkatkan kesadaran dan pengendalian *fraud.*

As part of the Company's commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG) and strengthening its internal control system, throughout 2025 the Company has implemented a fraud control strategy in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions.

In the prevention aspect, the Company has established the Anti-Fraud Strategy Implementation Policy Number P-RCA-014/XII/24, which serves as a guideline for all work units in carrying out prevention, detection, and handling efforts related to potential fraud.

In relation to strengthening internal controls and implementing the Company's anti-fraud strategy, the Company, in collaboration with KPMG, conducted training sessions attended by Directors, Deputy Directors, Division Heads, Department Heads, and Area Heads on January 17, 2025, and by Branch Heads as well as Section Heads of Branch Offices and Head Office on January 21, 2025. Furthermore, on October 14, 2025, a comprehension assessment was conducted and attended by employees at both Branch Offices and Head Office.

The Company defines fraud, as stated in POJK 12 of 2024, as a deliberate act of deviation or omission intended to deceive or manipulate the Company, customers, or other parties, occurring within the Company's environment, using the Company's resources, resulting in financial loss to the Company, customers, or other parties, and/or financial gain to the perpetrator either directly or indirectly.

The Company has aligned its fraud categories with those outlined in POJK 12 of 2024, which include:

1. Corruption
2. Misappropriation of assets
3. Financial Statement fraud
4. Scammig
5. Leakage of confidential information
6. Other actions that can be equated with fraud

To ensure strong fraud control and risk management, the Company has undertaken several initiatives to anti fraud control, including:

1. Active Management Supervision
   Active supervision by management improves the quality of internal controls and minimizes potential fraud risks. Management continuously promotes an anti-fraud culture across all organizational levels, demonstrated by the signing of the anti-fraud Declaration by the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the signing of the Integrity Pact by all members of the organization. Additionally, Human Resources quality is enhanced through training and educational programs to raise fraud awareness and control.

2. Pembentukan struktur organisasi dan pertanggungjawaban.
   Perseroan menyesuaikan fungsi Penerapan Strategi *Anti-Fraud* dimana sebelumnya berada dibawah Internal Audit menjadi berada dibawah Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Proses Bisnis yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama, dan pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Pengendalian dan Pemantauan
   Perseroan melakukan pengendalian dan pemantauan *fraud* untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian yang ada. Langkah-langkah dalam pengendalian dan pemantauan adalah sebagai berikut :
   a. Penetapan kebijakan dan prosedur
   b. Pengendalian dan pemantauan melalui metode *control self assessment*
   c. Kaji ulang oleh manajemen maupun internal audit
   d. Pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas operasional
   e. Pengendalian sistem informasi
   f. Pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan

Perseroan juga menyusun strategi *anti-fraud* dengan memperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha baik internal Perseroan maupun eksternal Perseroan (konsumen, mitra bisnis maupun pihak lain yang terlibat) serta kompleksitas usaha Perseroan. Berikut adalah Strategi *anti-fraud* yang diterapkan oleh Perseroan :

1. Pencegahan
   A. Anti-Fraud Awareness
      a. Deklarasi *anti-fraud*
      b. Pakta integritas
      c. Penerapan model 3 lini
      d. Pemisahan tugas dan tanggungjawab
      e. Edukasi dan *awareness*
   B. Identifikasi Kerawanan
      a. Control self-assessment
      b. Review berkala kebijakan sistem dan prosedur
   C. *Know Our People*
      a. Sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif
      b. Sistem seleksi dengan kualifikasi yang tepat dilakukan secara objektif dan transparan
      c. Wawancara kepada karyawan secara berkala melalui program *Know Our Employee*
2. Deteksi
   A. Whistleblowing system
   B. Surprise audit
   C. Surveillance audit
   D. Departemen Independent Control Unit
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
   A. Standar investigasi Perseroan
   B. Mekanisme pelaporan kejadian *fraud* kepada pihak internal Perseroan
   C. Kewajiban pelaporan Perseroan kepada pihak Regulator
   D. Penerapan kebijakan sanksi
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
   A. Pemantauan terhadap tindak lanjut kejadian *fraud*
   B. Memelihara data kejadian *fraud*
   C. Mekanisme tindak lanjut untuk menghindari kejadian *fraud*

2. The formation of the Company's organizational structure and accountability.
   The Company has aligned its anti-fraud Strategy function, moving it from under Internal Audit to Risk Management, Compliance, and Business Process, which now reports directly to the President Director and also reports to the Board of Commissioners.

3. Control and Monitoring
   Fraud control and monitoring are conducted to ensure the effectiveness of the existing control systems. Key step of controlling and monitoring include:
   a. Establishment of policies and procedures
   b. Monitoring through the control self-assessment method
   c. Reviews by management and internal audit
   d. Segregation of duties in operational activities
   e. Information system controls
   f. Follow-up monitoring of audit findings

The Company also develops its anti-fraud Strategy by considering all parties involved in its business activities, both internal and external (customers, business partners, and others), and the complexity of its operations. The anti fraud strategy implemented by the Company strategy includes:

1. Prevention
   A. Anti-Fraud Awareness
      a. Anti-fraud declaration
      b. Integrity pact
      c. Implementation of the three lines model
      d. Segregation of duties and responsibilities
      e. Education and awareness
   B. Vulnerability Identification
      a. Control self-assessment
      b. Periodic policy, system, and procedure reviews
   C. Know Our People
      a. Effective recruitment systems and procedures
      b. Objective and transparent selection processes with appropriate qualifications
      c. Periodic employee interviews through the Know Our Employee program
2. Detection
   A. Whistleblowing system
   B. Surprise audits
   C. Surveillance audits
   D. Independent Control Units Department
3. Investigation, Reporting, and Sanction
   A. The Company investigation standards
   B. Fraud incident reporting mechanisms to internal parties of the Company
   C. Company's mandatory reporting to Regulators
   D. Sanction policy implementation
4. Monitoring, Evaluation, and Follow-Up
   A. Monitoring of follow-up actions on fraud incidents
   B. Maintaining fraud incident data
   C. Follow-up mechanisms to prevent fraud from recurring

Pelindungan Konsumen dan Masyarakat
Customer and Public Protection

Berdasarkan POJK nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk memperkuat kewenangan OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan untuk meningkatkan sistem pelindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan.

Based on OJK Regulation No. 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector, which is part of the implementation of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, aimed at strengthening OJK's authority in regulating and supervising consumer and public protection in the financial services sector to enhance a reliable consumer protection system, improve consumer and public empowerment, and increase awareness among financial service providers.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan senantiasa mengimplementasikan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat yang diamanahkan oleh OJK, yaitu :

a. edukasi yang memadai;
b. keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;
c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
d. pelindungan aset, privasi, dan data konsumen;
e. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;
f. penegakan kepatuhan; dan
g. persaingan yang sehat.

Throughout 2025, the Company has consistently implemented the consumer and public protection principles mandated by OJK, namely:

a. adequate education;
b. disclosure and transparency of product and/or service information;
c. fair treatment and responsible business conduct;
d. protection of consumer assets, privacy, and data;
e. effective and efficient complaint handling and dispute resolution;
f. compliance enforcement; and
g. fair competition.

Sebagai wujud transparansi, Perseroan memastikan informasi produk dan layanan disampaikan secara jelas, akurat, dan mudah dipahami, termasuk manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban konsumen. Dalam menerapkan prinsip perlakuan yang adil, Perseroan memberikan layanan tanpa diskriminasi serta memastikan proses pemasaran dilakukan secara bertanggung jawab.

As part of its commitment to transparency, the Company ensures that product and service information is delivered clearly, accurately, and in an easily understandable manner, including benefits, risks, costs, as well as the rights and obligations of consumers. In applying the principle of fair treatment, the Company provides services without discrimination and ensures that marketing processes are conducted responsibly.

Perseroan didukung oleh sistem operasional dan teknologi informasi yang memadai guna menjamin kualitas dan kesinambungan layanan. Perseroan juga menerapkan kebijakan perlindungan data pribadi serta pengamanan sistem untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi konsumen.

The Company is supported by adequate operational systems and information technology to ensure service quality and continuity. The Company also implements personal data protection policies and system security measures to safeguard the confidentiality and security of consumer information.

Sesuai dengan POJK 22 tahun 2023 pasal 91 bahwa pegawai fungsi Pelindungan Konsumen dan masyarakat diwajibkan mengikuti pelatihan terkait pelindungan konsumen minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Demikian juga untuk pegawai Perseroan diluar dari fungsi Pelindungan Konsumen juga diwajibkan mengkuti pelatihan pelindungan konsumen paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerja dan pada pasal 89. Fungsi Pelindungan Konsumen bertugas memberikan sosialisasi kepada seluruh Pegawai Perseroan mengenai pelindungan konsumen.

In accordance with OJK Regulation No. 22 of 2023 Article 91, employees in the Consumer and public Protection function are required to attend consumer protection training at least once a year. Likewise, employees outside the Consumer Protection function are required to attend consumer protection training at least once during their employment period. Under Article 89, the Consumer Protection function is responsible for providing socialization to all Company employees regarding consumer protection.

Perseroan telah melaksanakan pelatihan pelindungan konsumen dan sosialisasi pelindungan konsumen pada tahun 2025 sebagai berikut :

The Company has conducted consumer protection training and socialization activities in 2025 as follows:

No	Tema Sosialisasi Socialization Theme	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	*Mandatory* Training Panduan Pemenuhan POJK No.22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Mandatory Training on Guidelines for Compliance with OJK Regulation No. 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector;	10 – 11 Dec 2025	Diorama Sukses Bersinergi
2	*Mandatory Training* Tentang Pelindungan Konsumen yang diikuti oleh setiap karyawan baru. Mandatory Training on Consumer Protection attended by all new employees.		Internal Perusahaan

Pengaduan Konsumen dan Masyarakat

Sesuai dengan POJK 22 tahun 2023 pasal 79 bahwa Perseroan wajib menyusun dan menyampaikan laporan Layanan Pengaduan secara semesteran kepada OJK melalui sistem Sipeduli paling lambat pada tanggal 10 Juli untuk laporan semester pertama dan 10 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Sepanjang 2025 Perseroan telah melaksanakan kewajiban laporan Layanan Pengaduan secara tepat waktu, dimana laporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan Perseroan dapat dilihat pada halaman 239.

Customer Complaints and Public

In accordance with Article 79 of the POJK No. 22 of 2023, the Company is required to compile and submit a semi-annual Complaint Service Report to the OJK via the Sipeduli system, no later than July 10 for the first semester and January 10 for the second semester. This reporting obligation represents a change from the previous quarterly reporting requirement.

Throughout 2025, the Company has fulfilled its obligation to report on the Complaint Service in a timely manner, with the Company's complaint handling and service reports available on page 239.

Pelindungan Data Pribadi ("PDP")

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ("UU PDP") yang menjadi landasan hukum dalam penguatan tata kelola dan pelindungan data pribadi di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU PDP, Perseroan diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan, proses bisnis, serta sistem operasional yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi.

Dalam rangka mendukung implementasi ketentuan tersebut, Perseroan telah melakukan langkah awal dengan menyusun rancangan Kebijakan Pelindungan Data Pribadi sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan keamanan informasi dan menjaga kerahasiaan data. Selain itu, Perseroan secara berkelanjutan melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui program sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan kompetensi guna mendukung penerapan ketentuan UU PDP secara optimal. Adapun sosialisasi yang telah diikuti sebagai berikut :

Personal Data Protection ("PDP")

On October 17, 2022, the Indonesian Government enacted Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection ("PDP Law"), which serves as the legal basis for strengthening personal data governance and protection in Indonesia. Pursuant to Article 74 of the PDP Law, the Company is granted a 2 (two) year transition period from the date of enactment to adjust policies, business processes, and operational systems related to personal data management.

To support the implementation of this provision, the Company has taken initial steps by drafting a Personal Data Protection Policy as part of its efforts to strengthen information security management and maintain data confidentiality. Furthermore, the Company continuously develops human resource capacity through outreach programs, training, and competency development to support the optimal implementation of the PDP Law. The outreach programs attended are as follows:

No	Tema Sosialisasi Socialization Theme	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Peran dan Tanggung Jawab Internal Audit atas Implementasi Perlindungan Data Pribadi Role and Responsibility of Internal Audit for the Implementation of Personal Data Protection	5 Mar 2025	APPI

Selanjutnya, Perseroan akan terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap kebijakan serta mekanisme internal dengan mempertimbangkan penerbitan peraturan pelaksanaan oleh Pemerintah, sehingga implementasi pelindungan data pribadi di lingkungan Perseroan dapat dilakukan secara komprehensif, selaras dengan ketentuan yang berlaku, serta mendukung praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Perseroan juga telah mencamtumkan klausula PDP dalam perjanjian pembiayaan dan pihak lainnya yang bekerjasama dengan Perseroan.

Furthermore, the Company will continue to make adjustments and enhancements to its policies and internal mechanisms by considering the issuance of implementing regulations by the Government, so that the implementation of personal data protection within the Company can be carried out comprehensively, in line with applicable regulations, and in support of Good Corporate Governance practices.

The Company has also included a PDP clause in financing agreements and other parties collaborating with the Company.

Fungsi Pelindungan Data Pribadi

Sesuai pasal 53 UU PDP, selaku pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi. Pada

Personal Data Protection Function

In accordance with Article 53 of the UU PDP, the Company, as both a personal data controller and processor, is required to appoint an officer responsible for implementing the personal

tanggal 27 September 2024 Perseroan telah menunjuk petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dari Divisi Managemen Risiko, Kepatuhan, APU, PPT dan PPPSPM, Pelindungan Konsumen dan *Business Process*.
Petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi memberikan sosialisasi PDP kepada seluruh pegawai Perseroan secara daring, yang diharapkan dengan sosialisasi ini maka seluruh pegawai Perseroan memahami pelaksanaan PDP di Perseroan.

data protection function. On 27 September 2024, the Company appointed a Data Protection Officer from the Risk Management, Compliance, AML, PTF, and PFPMDW, Consumer Protection, and Business Process Division.
The officer responsible for the Personal Data Protection function provided online PDP socialization to all employees of the Company, with the aim of ensuring that all employees understand the PDP implementation within the Company.

Pedoman PDP

Sebagai bentuk implementasi UU PDP, Perseroan telah menyusun Kebijakan Pelindungan Data Pribadi sebagai pedoman dalam pelaksanaan PDP di lingkungan Perseroan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi privasi debitur dengan menerapkan aturan dan prosedur yang efektif, sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang ditetapkan dalam UU PDP.

PDP Guidelines

As part of its commitment to implementing the UU PDP, the Company has developed a Personal Data Protection Policy to serve as a guideline for PDP implementation throughout the organization. This policy is designed to safeguard debtor privacy by establishing effective rules and procedures aligned with the data protection principles outlined in the UU PDP.

Rekomendasi dalam Penerapan Pedoman GCG
Recommendation on GCG Guidelines Implementation

Berikut ini adalah status rekomendasi dalam Penerapan Pedoman GCG Perusahaan Terbuka sesuai Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

The following is the recommendation status in the Implementation of GCG Guidelines for Public Company in accordance with OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Corporate Governance Guidelines for Public Company.

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan / Description :
A. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Public Company Relations With Shareholders In Ensuring Shareholders Rights		
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Increased the Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Implementation	Perusahaan memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan Pemegang Saham. The Company has methods or technical procedures for polling (voting), either open or closed that promoted the independence and the interests of shareholders.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
	Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan. All members of both the Board of Directors and the Board of Commissioners attended the Annual GMS.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perseroan paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Minutes of meeting of the GMS were available in the website of the Company for at least one (1) year.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan dengan Pemegang Saham atau Investor Improved the Quality of Company Communications with Shareholders or investors	Perseroan memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor. The Company has a policy of communication with Shareholders or Investors.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
	Perseroan mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan Pemegang Saham atau Investor dalam situs web. The Company revealed its communication policy with Shareholders or Investors in website.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan / Description :
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris The Functions and Roles of The Board of Commissioners		
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Strengthened the Membership and Compositions of the Board of Commissioners	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perseroan. Determination of the number of members of the Board of Commissioners considered the condition of the Company.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of the Board of Commissioners by considering the diversity of competence, knowledge and experience required.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Improved the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the Board of Commissioners' performance.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Company's Annual Report.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of the Board of Commissioners members if they are involved in financial crime.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function formulated a succession policy in the nomination process of the Board of Directors members.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
C. Fungsi dan Peran Direksi Board of Directors Functions and Roles		
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Strengthened Membership and Composition of the Board of Directors	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Determination of the number of Board of Directors members by considering the condition of the Company and decision making effectivenes.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of the Board of Directors members considering the diversity of skills, knowledge and experience required.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Member of the Board of Directors in charge in accounting or financial has expertise and / or knowledge in the field of accounting.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan / Description :
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Improved the Quality of Duties and Responsibilities of Board of Directors	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan. Policy assessment (self-assessment) to assess the performance of the Board of Directors expressed through the Annual Report of the Company.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors had policies related to the resignation of the Board of Directors members if they were involved in financial crimes.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan Stakeholders Participation		
Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Increased Aspects of Corporate Governance through Stakeholder Participation	Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. The Company has a policy to prevent insider trading.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Perseroan memiliki kebijakan antikorupsi dan anti-*fraud*. The Company has a policy of anti-corruption and anti-fraud.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Perseroan memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*. The Company has a policy regarding the selection and capacity building of the suppliers or vendors.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Perseroan memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Company has a policy on the fulfillment of the rights of creditors.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Perseroan memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. The Company has a policy of whistleblowing systems.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Perseroan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Company has a policy of long-term incentives for Board of Directors and employees.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
E. Keterbukaan Informasi Information Disclosure		
Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Enhancing the Implementation of Information Disclosure	Perseroan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The Company utilized the use of information technology more widely besides website as a media of information disclosure.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Laporan Tahunan Perseroan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Annual Report had disclosed the ultimate beneficiary owners in the ownership of Company shares at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owner in the Company's ownership through the Main Shareholder and Controlling.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED

TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY



Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Corporate Social and Environmental Responsibility Commitment and Policy

Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya dengan selalu mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan operasional kantor, Perseroan senantiasa berusaha melindungi dampak keuangan, lingkungan dan sosial dengan bantuan kebijakan yang relevan. Perseroan memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB"), yang secara khusus memandu berbagai langkah perlindungan lingkungan dan sosial serta memastikan bahwa para pemangku kepentingan dapat benar-benar merasakan manfaat berkelanjutan dari operasi dan bisnis Perseroan.

The Company is committed to always running its business by always considering economic, social and environmental aspects. Therefore, in carrying out office operational activities, the Company always tries to protect the financial, environmental and social impacts with the support of relevant policies. The Company has a Sustainable Finance Action Plan ("SFAP"), which specifically guides various environmental and social protection measures and ensures that stakeholders can truly feel the sustainable benefits of the Company's operations and business.

Selain itu, Direksi telah melakukan peninjauan yang komprehensif atas penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025 ini yang diharapkan menjadi acuan atas komitmen Perseroan terhadap Keberlanjutan. Direksi senantiasa optimis, bahwa ke depan Perseroan dapat mencapai kemajuan dan pertumbuhan terkait implementasi keberlanjutan.

In addition, the Board of Directors has conducted a comprehensive review of the preparation of this 2025 Sustainability Report which is expected to be a reference for the Company's commitment to Sustainability. The Board of Directors is always optimistic that in the future the Company can achieve progress and growth related to the implementation of sustainability.

Visi, Misi dan Nilai Perseroan
Vision, Mission and Values of The Company

Visi
Vision

"Menciptakan Dunia yang Berkelanjutan"
"Be a Creator of a Sustainable World"

Misi
Mission

"Menghubungkan Kebutuhan untuk Menciptakan Masa Depan"
"Connect Needs to Create the Future"

Nilai-Nilai Perseroan
Company's Values

CHALLENGE **CREATE** **CHANGE**

COLLABORATE

Melalui kolaborasi, kami akan menghadapi tantangan, membuat perubahan, dan mempercepat penciptaan
Through collaboration, we will face challenges, enact change and accelerate creation

Profil Perseroan
Company Profile

Data profil Perseroan dapat ditemukan pada halaman 36.

The Company profile data can be found on page 36.

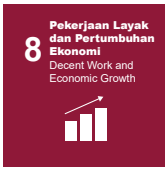
Keselarasan dengan Tujuan Berkelanjutan
Alignment with Sustainable Development Goals

Perseroan berkomitmen untuk mengintegrasikan program-program keberlanjutan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan tidak hanya memberikan keuntungan bagi Perseroan, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi para Pemangku Kepentingan.

The Company is committed to aligning its sustainability initiatives with the Sustainable Development Goals (SDGs). This approach ensures that the implementation of sustainability principles not only creates added value for the Company but also generates sustainable positive impacts for all Stakeholders.



TPB SDG	Penjelasan Explanation	Implementasi Implementation
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Good Health and Well Being	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.	Dalam rangka menciptakan kehidupan yang sehat bagi karyawan Perseroan, maka digelar acara *mini-soccer,* badminton, dan tenis meja secara rutin. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya kampanye hidup sehat dengan rutin berolahraga. In an effort to promote a healthy lifestyle for the Company's employees, regular mini soccer, badminton and table tennis events are held. This initiative is part of an ongoing campaign to encourage healthy living through regular physical activity.
4 Pendidikan Berkualitas Quality Education	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.	Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, Perseroan berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam hal literasi keuangan. Melalui berbagai program edukatif yang ditujukan bagi pelajar maupun masyarakat umum, Perseroan secara berkelanjutan mendorong peningkatan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab. Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih paham finansial dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. As part of its social responsibility, the Company is committed to supporting the improvement of education quality in Indonesia, particularly in financial literacy. Through various educational programs aimed at students and the general public, the Company continuously promotes a better understanding of smart and responsible financial management. This initiative aims to build a financially literate society that is prepared to face future economic challenges.

TPB SDG	Penjelasan Explanation	Implementasi Implementation
	Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan kaum perempuan. Achieve gender equality and empower all women.	Perseroan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, profesional, dan setara. Perseroan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa diskriminasi berbasis *gender*. Perseroan senantiasa membuka kesempatan bagi perempuan dalam peran-peran strategis, sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang tangguh dan berkelanjutan. The Company is committed to fostering a fair, professional, and inclusive work environment. It ensures that every individual has equal opportunities to grow, regardless of gender discrimination. The Company continuously opens opportunities for women to occupy strategic roles, as part of its efforts to build a resilient and sustainable organization.
	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.	Sebagai bagian dari upaya mendukung energi terjangkau dan bersih, Perseroan senantiasa mendukung perkembangan portofolio kredit berkelanjutan dengan menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan yang bergerak di bidang energi baru dan terbarukan. In support of affordable and clean energy, the Company consistently promotes the development of a sustainable credit portfolio by providing financing to companies engaged in new and renewable energy.
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.	Perseroan berkomitmen untuk berperan aktif dalam pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("UMKM"), yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Melalui pemberian kredit yang mudah diakses dan bersaing, Perseroan mendukung UMKM dalam mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. The Company is actively committed to supporting the development of the Micro, Small, and Medium Enterprises ("MSME") sector, which forms the backbone of Indonesia's economy. By offering competitive and accessible credit, the Company supports MSMEs in expanding their businesses, creating jobs, and driving inclusive economic growth.
	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan sektor industri, inovasi teknologi, dan infrastruktur yang andal. Promoting sustainable economic development through the strengthening of the industrial sector, technological innovation, and reliable infrastructure.	Selaras dengan tujuan mewujudkan industri, inovasi, dan infrastruktur, kemajuan teknologi memegang peranan kunci dalam memberikan solusi bagi tantangan teknologi dan lingkungan secara lebih efisien. Dalam hal ini, Perseroan mengimplementasikan *Robotic Process Automation* (RPA) yang menjadikan pekerjaan administratif berjalan lebih efisien dan mengurangi potensi *human error*. Aligned with the goal of fostering industry, innovation, and infrastructure, technological advancements play a key role in delivering efficient solutions to technological and environmental challenges. In this regard, the Company has implemented Robotic Process Automation (RPA) to increase the efficiency of administrative processes and reduce the potential for human error.
	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Reduce inequality within and among countries.	Guna mengurangi ketimpangan, Perseroan senantiasa mengedepankan semangat non-diskriminatif guna mendorong inklusi ekonomi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin ras atau etnis. To reduce inequality, the Company consistently promotes a non-discriminatory spirit to encourage economic inclusion for all, regardless of gender, race, or ethnicity.
	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Make cities and human setilements inclusive, safe, resilient and sustainable.	Dalam semangat mewujudkan komunitas yang berkelanjutan, Perseroan senantiasa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelatihan tanggap bencana kebakaran dan gempa bumi. Hal ini dilakukan guna menciptakan masyarakat yang tangguh dan tanggap bencana. In the spirit of creating a sustainable community, the Company actively participates in various disaster drill activities for fire and earthquake emergencies. These initiatives aim to build a resilient and disaster-aware society.
	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Ensure sustainable consumption and production patterns.	Guna mendukung pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Perseroan menyalurkan pembiayaan atas mesin pengolahan limbah padat maupun cair, seperti minyak oli bekas pakai yang dapat digunakan kembali pada proses produksi. Hal ini tentunya termasuk dalam upaya efisiensi energi berdasarkan asas manfaat limbah. To support responsible consumption and production patterns, the Company provides financing for solid and liquid waste processing machines, such as used oil recycling systems that allow the reuse of materials in production processes. This effort contributes to energy efficiency through waste utilization principles.

TPB SDG	Penjelasan Explanation	Implementasi Implementation
16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Peace, Justice and Strong Institutions	Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Promoting a just, peaceful, and inclusive society.	Sebagai bentuk partisipasi untuk mewujudkan perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat, Perseroan menggelar acara buka puasa bersama yang diperuntukan bagi seluruh karyawan. Acara ini digelar untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. As a form of contribution to peace, justice, and strong institutions, the Company organizes communal iftar (breaking of fast) events for all employees. This event is held to promote interfaith harmony.



Penjelasan Strategi Keberlanjutan
Elaboration on Sustainability Strategy

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan kondisi sosial dan lingkungan yang dialami secara global saat ini telah merubah paradigma pembangunan bangsa-bangsa yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, namun juga perlu memperhatikan aspek sosial, pemerataan kesejahteraan serta kelangsungan lingkungan hidup yang menjadi dambaan manusia.

Sejalan dengan hal itu, Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Lembaga Jasa Keuangan sebagai salah satu sektor yang berkontribusi dalam pembangunan nasional perlu juga berpartisipasi dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Pengembangan sistem perekonomian yang selaras tersebut membutuhkan dukungan pendanaan dari lembaga jasa keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan sebagai institusi yang melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan juga telah menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia tahun 2015 – 2019 pada bulan Desember 2014.

Sebagai kelanjutan, di tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025) sebagai panduan untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia yang berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain. Selanjutnya melalui Siaran Pers tanggal 5 Oktober 2021 Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengumumkan pembentukan *Task Force* Keuangan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan (SJK).

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("Perseroan") sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan dan sekaligus Perusahaan Publik menyadari pentingnya masalah pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip *triple bottom line (profit-people-planet)* dalam kegiatan usahanya, dimana antara kepentingan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, ketiganya perlu berjalan dengan selaras untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan, Perseroan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk periode jangka panjang, yaitu tahun 2020 hingga 2024 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, kami juga telah menyampaikan Laporan Keberlanjutan untuk tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 yang telah diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia, serta dipublikasikan di situs web Perseroan.

Executive Summary

The global development of social and environmental conditions today has shifted the development paradigm of nations. This paradigm now emphasizes not only economic growth, but also the need to address social aspects, ensure equitable distribution of welfare, and promote environmental sustainability principles that align with human desires.

In this context, Indonesia has committed to developing a national economic system that prioritizes harmony between economic, social, and environmental aspects. As a key sector in national development, Financial Services Institutions also need to actively participate in the implementation of sustainable finance. The realization of a harmonized economic system requires the support of funding from these institutions.

In this regard, the Financial Services Authority, as the institution responsible for regulating and supervising the financial services sector, has issued OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. The Financial Services Authority also had previously published the Sustainable Finance Roadmap for Indonesia 2015–2019 in December 2014.

As a follow-up, in 2021, the Financial Services Authority issued the Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021-2025) as a guideline to accelerate the implementation of environmental, social, and governance (ESG) principles in Indonesia, which focuses on creating a comprehensive sustainable finance ecosystem by involving all relevant parties and fostering cooperation with other stakeholders. Furthermore, in a press release dated October 5, 2021, the Financial Services Authority also announced the formation of the Sustainable Finance Task Force in the Financial Services Sector (FSS).

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("Company"), as both a Financial Services Institution and a Public Company, recognizes the importance of sustainable financial management by applying the triple bottom line principle (profit, people, planet) in its business activities, in which the Company understands that the interests of economic, social, and environmental aspects must be pursued in harmony to generate long-term value for all stakeholders.

As part of the commitment to sustainability, the Company has prepared a Sustainable Finance Action Plan for along term period, from 2020 to 2024, which has been submitted to the Financial Services Authority. In addition, the Company has prepared Sustainability Reports for the years 2020, 2021, 2022, 2023, and 2024 which has been submitted to the Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange, as well as published on the Company's website.

Dengan disusunnya Rencana Aksi Keuangan Berlanjutan, Perseroan berharap dapat menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjaga kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar. Kami percaya bahwa langkah ini akan mendukung perkembangan yang harmonis antara Perseroan dan komunitas dimana kami beroperasi.

By preparing the Sustainable Finance Action Plan, the Company hopes to create long-term sustainable value and promoting inclusive economic growth, as well as contribute to the welfare of the community and maintain concern for the surrounding environment. We believe that this step will support harmonious development between the Company and the communities in where we operate.

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Achievements of Sustainable Finance Action Plan

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan di tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

The achievements of the Sustainable Finance Action Plan for the years 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 and 2025 by the Company are as follows:

Rencana Aktivitas Activity Plan	Indikator Pencapaian Achievement Indicator	Realisasi Waktu Pelaksanaan Actual Implementation Time	Pencapaian Actual Achievement
Seminar konsep dasar Keuangan Berkelanjutan kepada sebagian besar pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) dan karyawan di tingkat manajerial/ pengambil keputusan. Seminar on the basic concepts of Sustainable Finance to most of the management (Board of Commissioners and Directors) and employees at the managerial/decision-making level.	80% dari Dewan Komisaris, Direksi, *Deputy Directors* dan Kepala Divisi telah mengikuti seminar Keuangan Berkelanjutan. 80% of the Board of Commissioners, Board of Directors, Deputy Directors and Division Heads have attended the Sustainable Finance seminar.	Triwulan III 2020 Quarter III 2020	100% dari Dewan Komisaris, Direksi, *Deputy Director* dan Kepala Divisi telah mengikuti seminar Keuangan Berkelanjutan. 100% of the Board of Commissioners, Board of Directors, Deputy Directors and Division Heads have attended the Sustainable Finance seminar.
Pelaksanaan edukasi internal kepada karyawan kunci di Kantor Pusat bekerja sama dengan pihak eksternal. Implementation of internal education for key employees at the Head Office in collaboration with external parties.	75% dari Kepala Departemen dan Kepala Seksi telah mengikuti *training* Keuangan Berkelanjutan. 75% of Department Heads and Section Heads have attended Sustainable Finance training.	Triwulan IV 2020 Quarter IV 2020	100% dari Kepala Departemen dan Kepala Seksi telah mengikuti *training* Keuangan Berkelanjutan (hanya dilakukan oleh pihak internal). 100% of Department Heads and Section Heads have attended in Sustainable Finance training (only carried out by internal parties).
Melakukan program pelatihan terkait Keuangan Berkelanjutan kepada Kantor Cabang. Conduct training programs related to Sustainable Finance for Branch Offices.	Sebanyak 50% dari Kantor Cabang telah mengikuti pelatihan Keuangan Berkelanjutan. 50% of the Branch Offices have attended Sustainable Finance training.	Triwulan III 2021 Quarter III 2021	Pelatihan *awareness* Keuangan Berkelanjutan telah dilakukan kepada 18 orang kepala cabang (100% dari Kantor Cabang) pada bulan September 2021 melalui media *Zoom*. Sustainable Finance awareness training was conducted for 18 branch heads (100% of Branch Offices) in September 2021 via Zoom media.
Peningkatan kapasitas manajemen risiko analis kredit untuk sektor usaha yang memiliki risiko sosial dan lingkungan hidup yang tinggi bagi anggota Komite Kredit. Increasing the risk management capacity of credit analysts for business sectors that have high social and environmental risks for members of the Credit Committee.	Sebanyak 50% dari anggota Komite Kredit telah mengikuti *training* terkait manajemen risiko sosial dan lingkungan. As many as 50% of the members of the Credit Committee have attended training related to social and environmental risk management.	Triwulan IV 2022 Quarter IV 2022	Telah dilakukan *training* analisa kredit terkait manajemen risiko sosial dan lingkungan terhadap 31 (tiga puluh satu) orang dari Unit Bisnis Korporasi dan Unit Bisnis Ritel, termasuk Kantor Cabang pada bulan November 2022 melalui media *Zoom*.

Rencana Aktivitas Activity Plan	Indikator Pencapaian Achievement Indicator	Realisasi Waktu Pelaksanaan Actual Implementation Time	Pencapaian Actual Achievement
			Credit analysis training has been carried out related to social and environmental risk management for 31 (thirty one) people from the Corporate Business Unit and Retail Business Unit, including Branches Office in November 2022 via Zoom media.
• Penyusunan Pedoman Perseroan Keuangan Berkelanjutan yang mendukung praktek ramah lingkungan dalam kegiatan operasional Perseroan. Preparation of Guidelines for Sustainable Finance Companies that support environmentally friendly practices in the Company operations. • Penyusunan SOP Keuangan Berkelanjutan. Preparation the SOP of Sustainable Finance.	• Disusunnya pedoman internal terkait praktek ramah lingkungan dalam kegiatan operasional Perseroan. Developed internal guidelines related to environmentally friendly practices in the Company's operational activities. • *Standard Operasional Procedure* (SOP) Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi. The Standard Operating Procedure (SOP) for Sustainable Finance has been approved by the Board of Directors.	Triwulan III 2023 Quarter III 2023	Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan yang telah disahkan oleh Direksi. Kebijakan dan prosedur tersebut terdiri dari : • Kebijakan Keuangan Berkelanjutan • Strategi Keuangan Berkelanjutan • SOP Keuangan Berkelanjutan dalam proses pembiayaan The Company has Sustainable Finance policy and procedure that have been approved by the Board of Directors. The policy and procedures consist of : • Sustainable Finance Policy • Sustainable Finance Strategy • SOP Sustainable Finance in the financing process
Inisiasi portofolio produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Initiation of portofolio od sustainable Finance product and/or services.	Peluncuran produk pembiayaan berkelanjutan. Launching of the sustainable finance product.	Triwulan III 2023 Quarter III 2023	Perseroan saat ini telah memiliki portofolio yang dapat dikelompokkan ke dalam pembiayaan keuangan berkelanjutan. The Company currently has a portfolio that can be classified into financing of sustainable finance. Pembiayaan dalam kategori keuangan berkelanjutan telah dimasukkan dalam laporan bulanan. The financing in the sustainable finance category has been included in the monthly report.
Refreshment Program Keuangan Berkelanjutan kepada anggota Komite Kredit. Sustainable Finance Refreshment to Credit Committee members.	Sebanyak 50% dari anggota Komite Kredit telah mengikuti *refreshment* program. 50% of Credit Committee member have attended the refreshment program.	Triwulan IV 2023 Quarter IV 2023	Telah dilakukan *training* kepada 63 peserta yang terdiri dari Unit Bisnis Ritel dan Unit Bisnis Korporasi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Training has been conducted for 63 participants from of Retail Business Units and Corporate Business Units at the Head Ofiice and Branch Offices. Materi training antara lain : • *Refreshment* tentang *sustainable finance* • Pengenalan analisa risiko ESG pada pengambilan keputusan pembiayaan • Kategori kegiatan Usaha Berkelanjutan • Taksonomi hijau Training materials include : • Refreshment on sustainable finance • Introduction of ESG risk analysis in financing decision-making.

Rencana Aktivitas Activity Plan	Indikator Pencapaian Achievement Indicator	Realisasi Waktu Pelaksanaan Actual Implementation Time	Pencapaian Actual Achievement
			• Sustainable Finance Business Category • Green Taxonomy
Pelatihan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan kepada *Credit Marketing Officer* di Kantor Cabang. Training in sustainable finance products and/or services to Credit Marketing Officer in Branch Offices.	80% dari total *Credit Marketing Officer* telah mengikuti pelatihan produk dan/jasa keuangan berkelanjutan di Kantor Cabang. 80% of total Credit Marketing Officers have attended the training on sustainable finance product and/or services in Branch Offices.	Triwulan IV 2023 Quarter IV 2023	Telah dilakukannya *training* kepada 82 peserta dengan posisi *Credit Marketing Officer* di Kantor Cabang. Training was conducted for 82 participants with the position of Credit Marketing Officer in Branch Offices.
Peningkatan portofolio produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan. Increasing portfolio of sustainable finance products and/or services.	Jumlah pembiayaan berkelanjutan pada akhir tahun 2024 yaitu sebesar 5% dari total portofolio. Amount of sustainable financing at the end of 2024 will be 5% of the total portfolio.	Triwulan IV 2024 Quarter IV 2024	Jumlah pembiayaan berkelanjutan pada akhir tahun 2024 yaitu sebesar 10,78% dari total portofolio. The amount of sustainable financing at the end of 2024 will be 10.78% of the total portfolio.
Pengembangan sistem pelaporan keuangan berkelanjutan. Development of sustainable finance reporting system.	Diluncurkannya sistem pengawasaan dan pelaporan penerapan keuangan berkelanjutan. Launched the supervision and reporting system on sustainable finance implementation.	Triwulan II 2024 Quarter II 2024	Perseroan telah memiliki sistem pengawasan dan pelaporan penerapan Keuangan Berkelanjutan serta menerapkan monitoring secara berkala. The Company has a system for monitoring and reporting on the implementation of Sustainable Finance and conducts regular monitoring.
Peningkatan Portofolio Keuangan Berkelanjutan : Increased Sustainable Finance Portfolio :			
a. Melakukan pengembangan produk terhadap pembiayaan untuk kategori Keuangan Berkelanjutan Developing products for financing in the Sustainable Finance category	a. Telah dilakukan pengembangan produk Portofolio Keuangan Berkelanjutan dan tercermin didalam Rencana Bisnis tahun 2026 Development of Sustainable Finance Portfolio products has been carried out and is reflected in the Business Plan for 2026.	Triwulan IV 2025 Quarter IV 2025	a. Pengembangan produk Portofolio Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan dan telah tercermin dalam Rencana Bisnis tahun 2026 The development of the Sustainable Finance Portfolio has been carried out and is reflected in the 2026 Business Plan
b. Peningkatan portfolio pembiayaan kategori Keuangan Berkelanjutan di akhir tahun 2025 increase in the financing portfolio of the Sustainable Finance category by the end of 2025	b. Portfolio Sustainable Finance di akhir tahun 2025 menjadi 11,10% The Sustainable Finance Portfolio at the end of 2025 will be 11.10%.	Sepanjang tahun 2025 Throughout the year 2025	b. Jumlah pembiayaan berkelanjutan pada akhir tahun 2025 yaitu sebesar 12,60% dari total portofolio. The amount of sustainable financing at the end of 2025 will be 12.60% of the total portfolio.
Melakukan pengembangan kapasitas internal melalui penyelenggaraan program : Carrying out internal capacity building through the implementation of programmes :			

Rencana Aktivitas Activity Plan	Indikator Pencapaian Achievement Indicator	Realisasi Waktu Pelaksanaan Actual Implementation Time	Pencapaian Actual Achievement
a. Pelaksanaan edukasi kepada karyawan kunci di Kantor Cabang terkait efisiensi listrik, air dan kertas. Education for key employees at the Branch regarding electricity, water, and paper efficiency.	a. Terlaksananya edukasi dengan jumlah kehadiran peserta minimal 80% Implementation of training with a minimum attendance of 80%	Triwulan I 2025 Quarter I 2025	a. Pelaksanaan edukasi kepada karyawan kunci di Kantor Cabang terkait efisiensi listrik, air, dan kertas telah terlaksana dengan tingkat kehadiran peserta mencapai 100%, sehingga melampaui indikator keberhasilan yang ditetapkan (minimal 80%) An awareness-raising session for key staff at the Branch Office on the efficient use of electricity, water and paper has been successfully conducted, with 100% of participants in attendance, thereby exceeding the set success target (a minimum of 80%)
b. Training refreshment kredit analis, kredit komite terkait peluang, analisa risiko,dan mitigasi risiko terkait Produk Keuangan Berkelanjutan Refresher training for credit analysts and credit committee on opportunities, risk analysis, and risk mitigation related to Sustainable Finance Products	b. Terlaksananya edukasi dengan jumlah kehadiran peserta minimal 80% Implementation of training with a minimum attendance of 80%	Triwulan II 2025 Quarter II 2025	b. Pelaksanaan training refreshment bagi kredit analis dan kredit komite terkait peluang, analisa risiko, dan mitigasi risiko Produk Keuangan Berkelanjutan telah terlaksana dengan tingkat kehadiran peserta mencapai 100%, sehingga melampaui indikator keberhasilan yang ditetapkan (minimal 80%). A refresher training session for credit analysts and the credit committee on opportunities, risk analysis and risk mitigation relating to Sustainable Financial Products has been successfully completed, with 100% participant attendance, thereby exceeding the set success indicator (a minimum of 80%).
Pemberian kesempatan yang sama (setara) bagi karyawan tanpa memandang gender untuk posisi manajerial di Perseroan Providing equal opportunities for employees regardless of gender for managerial positions in the Company	Komposisi karyawan wanita di level manajerial adalah > 0%. The composition of female employees at the managerial level is > 0%.		Komposisi karyawan wanita pada level manajerial di Perseroan telah mencapai 9%, sehingga melampaui indikator keberhasilan yang ditetapkan (>0%). The proportion of female employees at managerial level within the Company has reached 9%, thereby exceeding the set performance target (>0%).
Penghematan penggunaan listrik, air dan kertas dalam aktifitas operasional Perseroan Saving in the use of electricity, water, and paper in the Company's operational activities.	Penggunaan atas listrik, air dan kertas pada tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024 The use of electricity, water, and paper in 2025 will be lower than in 2024.		Penggunaan listrik pada tahun 2025 menurun sebesar 5,95% dibandingkan tahun 2024, sementara penggunaan air meningkat sebesar 21,44%. Adapun pengelolaan serta efisiensi penggunaan kertas pada tahun 2025 merupakan inisiatif baru yang diimplementasikan dalam kerangka program keberlanjutan Perseroan. Sepanjang tahun 2025, total penggunaan kertas tercatat sebanyak 215.500 lembar. Electricity consumption in 2025 fell by 5.95% compared with 2024, whilst water consumption rose by 21.44%. The management and efficient use of paper in 2025 constituted a new initiative implemented as part of the Company's sustainability programme. Throughout 2025, total paper usage was recorded at 215,500 sheets.



Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Objective of Sustainable Finance Action Plan

Perseroan telah melaksanakan komitmen terhadap Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Jangka Panjang pertama yang dimulai pada tahun 2020 hingga 2024, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Saat ini, Perseroan memasuki tahap pelaksanaan Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Jangka Panjang berikutnya untuk periode 2025 hingga 2029. Dalam merencanakan periode mendatang ini, Perseroan mempertimbangkan secara cermat berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, termasuk kondisi keuangan, kapasitas teknis, dan kapasitas organisasi.

Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perusahaan adalah sebagai berikut :

“Menjadi Perusahaan yang Menciptakan Dunia yang Berkelanjutan dengan Menyelaraskan Aspek Sosial dan Lingkungan”

Strategi yang diterapkan pada periode jangka panjang sebelumnya telah terbukti efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Perseroan memandang bahwa strategi tersebut akan

The Company has committed to the first Long-Term Sustainable Finance Action Plan Goal for the period 2020 to 2024, in alignment with its vision and mission. Currently, the Company is entering the implementation phase of the next Long-Term Sustainable Finance Action Plan Goal for the period 2025 to 2029. In planning for the upcoming period, the Company carefully considers various factors, both external and internal, including financial conditions, technical capacity, and organizational capability.

The objectives of the Company’s Sustainable Finance Action Plan are as follows :

“To Be A Company That Creates A Sustainable World by Harmonizing Social and Environmental Aspects”

The strategies implemented in the previous long-term period have proven effective in achieving the objectives set by the Company. Based on the evaluation results, the Company considers that the strategy will continue to be applied and used

terus diterapkan dan digunakan dalam periode berikutnya, yaitu:

- Dukungan penuh manajemen dalam penerapan keuangan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam kegiatan usaha Perseroan;
- Peran aktif karyawan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maupun kompetensi penerapan keuangan berkelanjutan sesuai jenjang tugasnya;
- Memperhatikan aspek sosial baik secara internal untuk mewujudkan misi Perseroan dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, maupun secara eksternal lingkungan sosial Kantor Pusat dan Kantor Cabang sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Perseroan dan menjaga risiko reputasi;
- Memperhatikan aspek ramah lingkungan di internal Perseroan dengan berbagai upaya untuk efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, kertas dan plastik.
- Berperan aktif terhadap pemenuhan/ pembuatan regulasi yang berlaku sehingga semakin sadar terkait isu Keuangan Berkelanjutan.

in the next period is :

- Strong management support for the implementation of sustainable finance by integrating economic, social, environmental, and governance aspects into the Company's business activities;
- The active role of employees who have the skills needed in carrying out their duties and responsibilities as well as competence in implementing sustainable finance according to their level of duty;
- Paying attention to social aspects both internally to realize the Company's mission in developing competent human resources, as well as externally the social environment of the Head Office and Branch Offices so as to increase public trust in the Company and maintain reputational risk;
- Paying attention to environmentally friendly aspects within the Company with various efforts for energy efficiency, efficient use of water, paper and plastic.
- The active role in complying/ composing regulations applied so that there is greater awareness of Sustainable Finance issues.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 1 (satu) Tahun
1 (one) Year Sustainable Finance Action Plan

Tahun Year	No	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Action Plan	Rencana Pelaksanaan Implementation Time	Indikator Keberhasilan Success Indicator
2026	1	Peningkatan portofolio keuangan berkelanjutan : Increased sustainable finance portfolio : a. Melakukan pengembangan produk terhadap pembiayaan untuk kategori Keuangan Berkelanjutan. Developing products for financing in the Sustainable Finance category.	Triwulan – IV Quarter – IV	Telah dilakukan pengembangan produk Portofolio Keuangan Berkelanjutan dan tercermin didalam Rencana Bisnis tahun 2027. Development of Sustainable Finance Portfolio products has been carried out and is reflected in the Business Plan for 2027.
		b. Peningkatan *portfolio* pembiayaan kategori Keuangan Berkelanjutan di akhir tahun 2026 Increase in the financing portfolio of the Sustainable Finance category by the end of 2026.	Sepanjang tahun 2026 Throughout the year 2026	Portfolio Keuangan Berkelanjutan di akhir tahun 2026 menjadi 11,55% The Sustainable Finance Portfolio at the end of 2026 will be 11.55%.
	2	Pelaksanaan *review* terhadap kebijakan Perseroan terkait Keuangan Berkelanjutan. Implementation of a review of the Company's policies related to Sustainable Finance.	Triwulan – I Quarter - I	Terlaksananya *review* terhadap kebijakan Perusahaan terkait Keuangan Berkelanjutan. Implementation of the review of the Company's policies related to Sustainable Finance.
	3	Melakukan pengembangan kapasitas internal melalui penyelenggaraan program *training refreshment* analis kredit, komite kredit terkait peluang, analisa risiko, dan mitigasi risiko terkait Produk Keuangan Berkelanjutan. Developing internal capacity through the implementation of refreshment training programs for credit analysts, the credit committee on opportunities, risk analysis, and risk mitigation related to Sustainable Finance Products.	Triwulan – II Quarter – II	Terlaksananya edukasi dengan jumlah kehadiran peserta minimal 80%. Implementation of training with a minimum attendance of 80% .
	4	Pemberian kesempatan yang sama (setara) bagi karyawan tanpa memandang gender untuk posisi manajerial di Perseroan. Providing equal opportunities for employees regardless of gender for managerial positions in the Company.		• Komposisi karyawan wanita di level manajerial adalah > 0%. The composition of female employees at the managerial level is > 0%. • Memberikan kesempatan pelatihan yang sama bagi karyawan pria dan wanita. Providing equal training opportunities for male and female employees.
	5	Penghematan penggunaan listrik, air dan kertas dalam kegiatan operasional Perseroan. Saving in the use of electricity, water, and paper in the Company's operational activities.		Penggunaan atas listrik, air dan kertas pada tahun 2026 lebih rendah dari tahun 2025. The use of electricity, water, and paper in 2026 will be lower than in 2025.

Tahun Year	No	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Action Plan	Rencana Pelaksanaan Implementation Time	Indikator Keberhasilan Success Indicator
	6	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Ensure healthy lives and promote well being for all ages.		Terlaksananya program olahraga secara rutin bagi karyawan. Implementation of sports program on a regular basis for employees.
	7	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all		Terlaksananya program edukatif yang ditujukan bagi pelajar atau masyarakat umum. Implementation of educational programs aimed at students and the general public.
	8	Mewujudkan infrastruktur dan kemajuan teknologi dalam kegiatan operasional Perseroan. Realise infrastructure and technological advancement in the Company operational activities.		Perseroan mengimplementasikan *Robotic Process Automation* (RPA) yang selaras dengan Rencana Bisnis Perseroan. The Company implement Robotic Process Automation (RPA) aligned with Company's Business Plan.
	9	Melaksanakan kegiatan pelatihan tanggap bencana kebakaran dan gempa bumi. Conducting training activities on responding to fire and earthquake disasters.		Perseroan berpartisipasi mengikuti berbagai pelatihan tanggap bencana alam yang dilakukan oleh internal maupun eksternal perseroan. The Company participates in various natural disaster response training programs conducted by both internal and external parties.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 5 (Lima) Tahun
5 (Five) Years Sustainable Finance Action Plan

Perseroan telah menyusun program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai pada tahun 2025 - 2029. Saat ini program tersebut masih berjalan dan dilakukan pemantauan perkembangan pada setiap program dengan berfokus pada pencapaian jangka panjang dan memastikan efektifitasnya. Berikut adalah penjabarannya :

The Company has prepared a Sustainable Finance Action Plan program for a period of 5 (five) years for the period 2025 to 2029. The program is currently ongoing and progress is being monitored for each program, focusing on long-term achievements and ensuring effectiveness. The following is the elaboration :

Tahun Year	No	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Action Plan	Rencana Pelaksanaan Implementation Time	Indikator Keberhasilan Success Indicator
2025	1	Peningkatan portofolio keuangan berkelanjutan : Increased sustainable finance portfolio :	Triwulan – IV Quarter – IV	Telah dilakukan pengembangan produk portofolio keuangan berkelanjutan dan tercermin didalam Rencana Bisnis tahun 2026. Development of sustainable finance portfolio products has been carried out and is reflected in the Business Plan for 2026.
		a. Melakukan pengembangan produk terhadap pembiayaan untuk kategori keuangan berkelanjutan. Developing products for financing in the sustainable finance category.		
		b. Peningkatan portofolio pembiayaan kategori keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2025. Increase in the financing portfolio of the sustainable finance category by the end of 2025.	Sepanjang tahun 2025 Throughout the year 2025	Portofolio keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2025 menjadi 11,10%. The sustainable finance portfolio at the end of 2025 will be 11.10%.
	2	Melakukan pengembangan kapasitas internal melalui penyelenggaraan program : Developing internal capacity through the implementation of the following programs:		
		a. Pelaksanaan edukasi kepada karyawan kunci di Kantor Cabang terkait efisiensi listrik, air dan kertas. Education for key employees at the Branch Offices regarding electricity, water, and paper efficiency.	Triwulan – I Quarter – I	Terlaksananya edukasi dengan jumlah kehadiran peserta minimal 80%. Implementation of training with a minimum attendance of 80%.
		b. *Training refreshment* kredit analis dan kredit komite terkait peluang, analisa risiko, dan mitigasi risiko terkait produk keuangan berkelanjutan. Refresher training for credit analysts and credit committee on opportunities, risk analysis, and risk mitigation related to sustainable finance products.	Triwulan – II Quarter – II	Terlaksananya edukasi dengan jumlah kehadiran peserta minimal 80%. Implementation of training with a minimum attendance of 80%.
	3	Pemberian kesempatan yang sama (setara) bagi karyawan tanpa memandang *gender* untuk posisi manajerial di Perseroan. Providing equal opportunities for employees regardless of gender for managerial positions in the Company.		Komposisi karyawan wanita di level manajerial adalah > 0%. The composition of female employees at the managerial level is > 0%.

Tahun Year	No	Target Kegiatan Prioritas Priority Activity Targets	Rencana Pelaksanaan Implementation Time	Indikator Keberhasilan Success Indicator
	4	Penghematan penggunaan listrik, air dan kertas dalam aktifitas operasional Perseroan. Saving in the use of electricity, water, and paper in the Company's operational activities.		Penggunaan atas listrik, air dan kertas pada tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024. The use of electricity, water, and paper in 2025 will be lower than in 2024.
2026	1	Peningkatan portofolio keuangan berkelanjutan : Increased sustainable finance portfolio : a. Melakukan pengembangan produk terhadap pembiayaan untuk kategori keuangan berkelanjutan. Developing products for financing in the sustainable finance category.	Triwulan – IV Quarter – IV	Telah dilakukan pengembangan produk portofolio keuangan berkelanjutan dan tercermin didalam Rencana Bisnis tahun 2027. Development of sustainable finance portfolio products has been carried out and is reflected in the Business Plan for 2027.
		b. Peningkatan portofolio pembiayaan kategori keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2026. Increase in the financing portfolio of the sustainable finance category by the end of 2026.	Sepanjang tahun 2026 Throughout the year 2026	Portfolio keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2026 menjadi 11,55%. The sustainable finance portfolio at the end of 2026 will be 11.55%.
	2	Pelaksanaan *review* terhadap kebijakan Perseroan terkait keuangan berkelanjutan. Implementation of a review of the Company's policies related to sustainable finance.	Triwulan – I Quarter - I	Terlaksananya *review* terhadap kebijakan Perusahaan terkait keuangan berkelanjutan. Implementation of the review of the Company's policies related to sustainable finance.
	3	Melakukan pengembangan kapasitas internal melalui penyelenggaraan program *training refreshment* analis kredit, komite kredit terkait peluang, analisa risiko,dan mitigasi risiko terkait produk keuangan berkelanjutan. Developing internal capacity through the implementation of refreshment training programs for credit analysts and the credit committee on opportunities, risk analysis, and risk mitigation related to sustainable finance products.	Triwulan – II Quarter – II	Terlaksananya *review* dengan jumlah kehadiran peserta minimal 80%. Implementation of training with a minimum attendance of 80%.
	4	Pemberian kesempatan yang sama (setara) bagi karyawan tanpa memandang *gender* untuk posisi manajerial di Perseroan. Providing equal opportunities for employees regardless of gender for managerial positions in the Company.		• Komposisi karyawan wanita di level manajerial adalah > 0%. The composition of female employees at the managerial level is > 0%. • Memberikan kesempatan pelatihan yang sama bagi karyawan pria dan wanita. Providing equal training opportunities for male and female employees.
	5	Penghematan penggunaan listrik, air dan kertas dalam aktifitas operasional Perseroan. Saving in the use of electricity, water, and paper in the Company's operational activities.		Penggunaan atas listrik, air dan kertas pada tahun 2026 lebih rendah dari tahun 2025. The use of electricity, water, and paper in 2026 will be lower than in 2025.
	6	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Ensure healthy lives and promote well-being for all ages.		Terlaksananya program olahraga secara rutin bagi karyawan. Implementation of sports program on a regular basis for employees.
	7	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.		Terlaksananya program edukatif yang ditunjukan bagi pelajar atau masyarakat umum. Implementation of educational programs aimed at students and the public.
	8	Mewujudkan infrastruktur dan kemajuan teknologi dalam kegiatan operasional Perseroan. Realise infrastructure and technological advancement in the Company operational activities.		Perseroan mengimplementasikan *Robotic Process Automation* (RPA) yang selaras dengan Rencana Bisnis Perseroan. The Company implements Robotic Process Automation (RPA) aligned with Company's Business Plan.
	9	Melaksanakan kegiatan pelatihan tanggap bencana kebakaran dan gempa bumi. Conducting training activities on responding to fire and earthquake disasters.		Perseroan berpartisipasi mengikuti berbagai pelatihan tanggap bencana alam yang dilakukan oleh internal maupun eksternal Perseroan. The Company participates in various natural disaster drill conducted by both internal and external parties.
2027	1	Peningkatan portofolio keuangan berkelanjutan : Increased sustainable finance portfolio: a. Melakukan pengembangan produk terhadap pembiayaan untuk kategori keuangan berkelanjutan.	Triwulan – IV Quarter – IV	Telah dilakukan pengembangan produk portofolio keuangan berkelanjutan dan tercermin didalam Rencana Bisnis tahun 2028.

Tahun Year	No	Target Kegiatan Prioritas Priority Activity Targets	Rencana Pelaksanaan Implementation Time	Indikator Keberhasilan Success Indicator
		Developing products for financing in the sustainable finance category.		Development of sustainable finance portfolio products has been carried out and is reflected in the Business Plan for 2028.
		b. Peningkatan portofolio pembiayaan kategori keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2027. increase in the financing portfolio of the sustainable finance category by the end of 2027.	Sepanjang tahun 2027 Throughout the year 2027	Portofolio keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2027 menjadi 12,70%. The sustainable finance portfolio at the end of 2027 will be 12.70%.
	2	Melakukan pengembangan kapasitas internal melalui penyelenggaraan program *training refreshment* kredit analis, kredit komite terkait peluang, analisa risiko, dan mitigasi risiko terkait produk keuangan berkelanjutan. Developing internal capacity through the implementation of refreshment training programs for credit analysts and the credit committee on opportunities, risk analysis, and risk mitigation related to sustainable finance products.	Triwulan – I Quarter – I	Terlaksananya edukasi dengan jumlah kehadiran peserta minimal 80%. Implementation of training with a minimum attendance of 80%.
	3	Pemberian kesempatan yang sama (setara) bagi karyawan tanpa memandang *gender* untuk posisi manajerial di Perseroan. Providing equal opportunities for employees regardless of gender for managerial positions in the Company.		• Komposisi karyawan wanita di level manajerial adalah > 0%. The composition of female employees at the managerial level is > 0%. • Memberikan kesempatan pelatihan yang sama bagi karyawan pria dan wanita. Providing equal training opportunities for male and female employees.
	4	Penghematan penggunaan listrik, air dan kertas dalam aktifitas operasional Perseroan. Saving in the use of electricity, water, and paper in the Company's operational activities.		Penggunaan atas listrik, air dan kertas pada tahun 2027 lebih rendah dari tahun 2026. The use of electricity, water, and paper in 2027 will be lower than in 2026.
	5	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Ensure healthy lives and promote well-being for all ages.		Terlaksananya program olahraga secara rutin bagi karyawan. Implementation of sports program on a regular basis for employees.
	6	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.		Terlaksananya program edukatif yang ditunjukan bagi pelajar atau masyarakat umum. Implementation of educational programs aimed at students and the general public.
	7	Mewujudkan infrastruktur dan kemajuan teknologi dalam kegiatan operasional Perseroan. Realise infrastructure and technological advancement in the Company operational activities.		Perseroan mengimplementasikan *Robotic Process Automation* (RPA) yang selaras dengan Rencana Bisnis Perseroan. The Company implements Robotic Process Automation (RPA) aligned with Company's Business Plan.
	8	Melaksanakan kegiatan pelatihan tanggap bencana kebakaran dan gempa bumi. Conducting training activities on responding to fire and earthquake disasters.		Perseroan berpartisipasi mengikuti berbagai pelatihan tanggap bencana alam yang dilakukan oleh internal maupun eksternal Perseroan. The Company participates in various natural disaster drill conducted by both internal and external parties.
2028	1	Peningkatan portofolio keuangan berkelanjutan: Increased sustainable finance portfolio: a. Melakukan pengembangan produk terhadap pembiayaan untuk kategori keuangan berkelanjutan. Developing products for financing in the sustainable finance category.	Triwulan – IV Quarter – IV	Telah dilakukan pengembangan produk portofolio keuangan berkelanjutan dan tercermin didalam Rencana Bisnis tahun 2029. Development of sustainable finance portfolio products has been carried out and is reflected in the Business Plan for 2029.
		b. Peningkatan portofolio pembiayaan kategori keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2028. increase in the financing portfolio of the sustainable finance category by the end of 2028.	Sepanjang tahun 2028 Throughout the year 2028	Portofolio keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2028 menjadi 13,85%. The sustainable finance portfolio at the end of 2028 will be 13.85%.
	2	Melakukan pengembangan kapasitas internal melalui penyelenggaraan program *training refreshment* kredit analis, kredit komite terkait peluang, analisa risiko, dan mitigasi risiko terkait produk keuangan berkelanjutan.	Triwulan – I Quarter - I	Terlaksananya edukasi dengan jumlah kehadiran peserta minimal 80%. Implementation of training with a minimum attendance of 80%.

Tahun Year	No	Target Kegiatan Prioritas Priority Activity Targets	Rencana Pelaksanaan Implementation Time	Indikator Keberhasilan Success Indicator
		Developing internal capacity through the implementation of refreshment training programs for credit analysts and the credit committee on opportunities, risk analysis, and risk mitigation related to sustainable finance products.		
	3	Pemberian kesempatan yang sama (setara) bagi karyawan tanpa memandang *gender* untuk posisi manajerial di Perseroan. Providing equal opportunities for employees regardless of gender for managerial positions in the Company.		• Komposisi karyawan wanita di level manajerial adalah > 0%. The composition of female employees at the managerial level is > 0%. • Memberikan kesempatan pelatihan yang sama bagi karyawan pria dan wanita Providing equal training opportunities for male and female employees.
	4	Penghematan penggunaan listrik, air dan kertas dalam aktifitas operasional Perseroan. Saving in the use of electricity, water, and paper in the Company's operational activities.		Penggunaan atas listrik, air dan kertas pada tahun 2028 lebih rendah dari tahun 2027. The use of electricity, water, and paper in 2028 will be lower than in 2027.
	5	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Ensure healthy lives and promote well being for all ages.		Terlaksananya program olahraga secara rutin bagi karyawan. Implementation of sports program on a regular basis for employees.
	6	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.		Terlaksananya program edukatif yang ditunjukan bagi pelajar atau masyarakat umum. Implementation of educational programs aimed at students and the general public.
	7	Mewujudkan infrastruktur dan kemajuan teknologi dalam kegiatan operasional Perseroan. Realise infrastructure and technological advancement in the Company operational activities.		Perseroan mengimplementasikan *Robotic Process Automation* (RPA) yang selaras dengan Rencana Bisnis Perseroan. The Company implements Robotic Process Automation (RPA) aligned with Company's Business Plan.
	8	Melaksanakan kegiatan pelatihan tanggap bencana kebakaran dan gempa bumi. Conducting training activities on responding to fire and earthquake disasters.		Perseroan berpartisipasi mengikuti berbagai pelatihan tanggap bencana alam yang dilakukan oleh internal maupun eksternal Perseroan. The Company participates in various natural drill conducted by both internal and external parties.
2029	1	Peningkatan portofolio keuangan berkelanjutan : Increased sustainable finance portfolio : a. Melakukan pengembangan produk terhadap pembiayaan untuk kategori keuangan berkelanjutan. Developing products for financing in the sustainable finance category.	Triwulan – IV Quarter – IV	Telah dilakukan pengembangan produk portofolio keuangan berkelanjutan dan tercermin didalam Rencana Bisnis tahun 2030. Development of sustainable finance portfolio products has been carried out and is reflected in the Business Plan for 2030.
		b. Peningkatan portofolio pembiayaan kategori keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2029. increase in the financing portfolio of the sustainable finance category by the end of 2029.	Sepanjang tahun 2029 Throughout the year 2029	Portofolio keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2029 menjadi 15%. The sustainable finance portfolio at the end of 2029 will be 15%.
	2	Pelaksanaan *review* terhadap kebijakan Perseroan terkait keuangan berkelanjutan. Implementation of a review of the Company's policies related to sustainable finance.	Triwulan – II Quarter – II	Terlaksananya *review* terhadap kebijakan Perusahaan terkait keuangan berkelanjutan. Implementation of the review of the Company's policies related to sustainable finance.
	3	Penyusunan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk 5 tahun kedepan (2030 – 2034). Development of the Sustainable Finance Action Plan for the next 5 Years (2030 – 2034).	Triwulan – IV Quarter – IV	Tersusunnya program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk 5 tahun berikutnya (2030 – 2034). The Sustainable Finance Action Plan for the next 5 years (2030 – 2034) has been developed.
	4	Melakukan pengembangan kapasitas internal melalui penyelenggaraan program *training refreshment* kredit analis, kredit komite terkait peluang, analisa risiko, dan mitigasi risiko terkait produk keuangan berkelanjutan. Developing internal capacity through the implementation of refreshment training programs for credit analysts and the credit committee on opportunities, risk analysis, and risk mitigation related to sustainable finance products.	Triwulan – I Quarter - I	Terlaksananya edukasi dengan jumlah kehadiran peserta minimal 80%. Implementation of training with a minimum attendance of 80%.

Tahun Year	No	Target Kegiatan Prioritas Priority Activity Targets	Rencana Pelaksanaan Implementation Time	Indikator Keberhasilan Success Indicator
	5	Pemberian kesempatan yang sama (setara) bagi karyawan tanpa memandang *gender* untuk posisi manajerial di Perseroan. Providing equal opportunities for employees regardless of gender for managerial positions in the Company.		• Komposisi karyawan wanita di level manajerial adalah > 0%. The composition of female employees at the managerial level is > 0%. • Memberikan kesempatan pelatihan yang sama bagi karyawan pria dan wanita. Providing equal training opportunities for male and female employees.
	6	Penghematan penggunaan listrik, air dan kertas dalam aktifitas operasional Perseroan. Saving in the use of electricity, water, and paper in the Company's operational activities.		Penggunaan atas listrik, air dan kertas pada tahun 2029 lebih rendah dari tahun 2028. The use of electricity, water, and paper in 2029 will be lower than in 2028.
	7	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Ensure healthy lives and promote well being for all ages.		Terlaksananya program olahraga secara rutin bagi karyawan. Implementation of sports program on a regular basis for employees.
	8	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.		Terlaksananya program edukatif yang ditunjukan bagi pelajar atau masyarakat umum. Implementation of educational programs aimed at students and the general public.
	9	Mewujudkan infrastruktur dan kemajuan teknologi dalam kegiatan operasional Perseroan. Realise infrastructure and technological advancement in the Company operational activities.		Perseroan mengimplementasikan *Robotic Process Automation* (RPA) yang selaras dengan Rencana Bisnis Perseroan. The Company implements Robotic Process Automation (RPA) aligned with Company's Business Plan.
	10	Melaksanakan kegiatan pelatihan tanggap bencana kebakaran dan gempa bumi. Conducting training activities on responding to fire and earthquake disasters.		Perseroan berpartisipasi mengikuti berbagai pelatihan tanggap bencana alam yang dilakukan oleh internal maupun eksternal Perseroan. The Company participates in various natural drill conducted by both internal and external parties.

Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Sustainable Finance Action Plan Preparation Process

Rujukan yang Digunakan Sebagai Acuan

Dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), Perseroan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang diundangkan pada tanggal 27 Juli 2017 beserta dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh OJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Peraturan tersebut mengatur penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan, mencakup berbagai ketentuan terkait kewajiban penyusunan Rencana dan Laporan Keberlanjutan. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong lembaga jasa keuangan dan perusahaan publik dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang mencakup faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam setiap aktivitas keuangan dan bisnis yang mereka jalankan. Dengan merujuk pada peraturan ini, Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam pengelolaan dan pelaporan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha yang dilakukan.

Reference Used as a Reference

In preparing the Sustainable Finance Action Plan (SFAP), the Company refers to the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, which was issued on July 27, 2017, along with the related technical guidelines issued by the OJK regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.

This regulation governs the implementation of sustainable finance, including provisions related to the obligation of preparing a Sustainable Finance Action Plan and Sustainability Reports. It aims to encourage financial services institutions and public companies to integrate sustainability principles, including environmental, social, and governance factors, into all financial and business activities. In line with this regulation, the Company is committed to implementing measures that promote sustainable economic development by managing and reporting the social and environmental impacts of its business.

Keterlibatan Pihak Dalam Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026, Perseroan memilih untuk melibatkan berbagai pihak internal tanpa menggunakan konsultan eksternal. Proses ini melibatkan Direksi, *Corporate Strategic Planning, Corporate Secretary, Business Development Corporate, Marketing Development, Branch Management, Compliance, Risk Management, Business Process, Finance & Accounting, Human Resources, General Affairs* dan Teknologi Informasi.

Penyusunan dimulai dengan diskusi yang melibatkan semua pihak terkait untuk membahas langkah-langkah strategis, risiko, dan peluang dalam mencapai keberlanjutan. Hasil dari diskusi tersebut kemudian digunakan untuk menyusun dan merumuskan Rencana Aksi Keuangan Berlanjutan, yang akhirnya difinalisasi dan disetujui oleh manajemen. Proses ini memastikan bahwa setiap aspek keberlanjutan terintegrasi dengan baik dalam operasional Perseroan serta dilakukannya sosialisasi guna untuk mengedukasi seluruh karyawan untuk memahami dan menerapkan Keuangan Berkelanjutan.

Engagement of Parties in the Development of Sustainable Finance Action Plan

In preparing the 2026 Sustainable Finance Action Plan (SFAP), the Company decided to engage various internal parties rather than external consultants. This process involved the Board of Directors, Corporate Strategic Planning, Corporate Secretary, Corporate Business Development, Marketing Development, Branch Management, Compliance, Risk Management, Business Process, Finance & Accounting, and Human Resources, General Affairs and Information Technology.

The preparation began with a discussion involving all relevant parties to review strategic steps, risks, and opportunities for achieving sustainability. The results of these discussions were then used to draft the Sustainable Finance Action Plan, which was finalized and approved by management. This process ensures that every aspect of sustainability is effectively integrated into the Company's operations and that socialization is carried out to educate all employees to understand and implement Sustainable Finance.

Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Determinative Factors of Sustainable Finance Action Plan

Rencana Strategi Bisnis

Rencana Strategis Bisnis memiliki pengaruh besar terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan portofolio Keuangan Berkelanjutan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi prioritas utama Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk memperluas pembiayaan kepada UMKM secara berkelanjutan dengan senantiasa memperhatikan peluang dan hambatan yang mungkin terjadi. Dengan mengintegrasikan keuangan berkelanjutan ke dalam strategi bisnis, Perseroan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang lebih hijau dan berkelanjutan, sekaligus berperan dalam menciptakan dampak positif bagi perekonomian dan lingkungan. Inisiatif ini juga sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), memperkuat komitmen Perseroan terhadap ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.

Selain itu Perseroan juga berkomitmen terhadap penerapan efisiensi energi, air dan pengurangan penggunaan kertas yang semuanya menjadi bagian integral dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang melibatkan seluruh lini organisasi.

Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Sebuah organisasi yang memiliki kapasitas yang kuat, baik dari segi sumber daya manusia, sistem, maupun infrastruktur, akan lebih mampu merancang dan menjalankan kebijakan yang mendukung tujuan keberlanjutan secara efektif. Kapasitas ini mencakup kemampuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ke dalam strategi dan operasional sehari-hari, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan standar keberlanjutan yang diharapkan.

Business Strategic Plan

The Business Strategic Plan has a major influence on the Sustainable Finance Action Plan, particularly in developing a green portfolio for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), which is the Company's top priority. The Company is committed to expanding financing to MSMEs in a sustainable manner while taking into account the opportunities and obstacles that may occur. By integrating sustainable finance into its business strategy, the Company aims to support greener and more sustainable growth of MSMEs, while playing a role in creating a positive impact on the economy and the environment. This initiative is also in line with the achievement of sustainable development goals (SDGs), strengthening the Company's commitment to a more inclusive and environmentally friendly economy.

In addition, the Company is also committed to the implementation of energy efficiency, water and paper reduction, all of which are an integral part of the Sustainable Finance Action Plan involving all lines of the organization

Organizational Capacity

Organizational capacity is a key factor in determining success in the implementation of the Sustainable Finance Action Plan (SFAP). An organization with strong capacity in human resources, systems, and infrastructure is better equipped to design and implement policies that support sustainability goals. This capacity includes the ability to integrate sustainable finance principles into strategy and day-to-day operations, ensuring alignment with sustainability standards at every step.

Peningkatan kapasitas organisasi juga berarti pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola risiko dan peluang yang muncul seiring dengan penerapan RAKB, seperti pemahaman tentang produk keuangan berkelanjutan, pengelolaan risiko lingkungan, serta pengukuran dan pelaporan dampak sosial dan lingkungan. Organisasi yang memiliki kapasitas yang baik dalam hal inovasi, kolaborasi antar unit, serta adaptasi terhadap perubahan pasar dan regulasi, akan lebih mampu menciptakan nilai jangka panjang melalui implementasi Keuangan Berkelanjutan.

Improving organizational capacity also involves developing the skills and knowledge needed to manage the risks and opportunities associated with SFAP implementation, such as understanding green financial products, environmental risk management, and the measurement and reporting of social and environmental impacts. Organizations with strong capacity for innovation, inter-unit collaboration, and adaptability to market and regulatory changes will be better positioned to create long-term value through the implementation of Sustainable Finance.

Perseroan dalam mensukseskan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan senantiasa meningkatkan kapasitas organisasi baik dalam konteks edukasi maupun struktur organisasi yang telah ada.

To ensure the success of the Sustainable Finance Action Plan, the Company continues to enhance its organizational capacity through both education and improvements to its organizational structure

Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

Faktor kondisi keuangan dan kapasitas teknis Perseroan memainkan peran yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Saat ini, kondisi keuangan Perseroan berada dalam kategori yang baik, dengan struktur keuangan yang sehat dan likuiditas yang memadai. Hal ini memberikan landasan yang kokoh untuk mendukung inisiatif keuangan berkelanjutan tanpa mengganggu kestabilan finansial Perseroan. Kemampuan keuangan yang solid memungkinkan Perseroan untuk berinvestasi dalam berbagai proyek dan program yang mendukung pencapaian tujuan RAKB, termasuk pengembangan portofolio Keuangan Berkelanjutan dan pembiayaan UMKM.

Financial Condition and Technical Capacity

The Company's financial condition and technical capacity play a crucial role in the successful implementation of the Sustainable Finance Action Plan (SFAP). Currently, the Company's financial condition is considered strong, with a sound financial structure and adequate liquidity. This establishes a strong foundation for supporting sustainable finance initiatives while maintaining the Company's financial stability. The Company's robust financial capacity allows for investment in various projects and programs aligned with the SFAP objectives, including the development of a green portfolio and sustainable MSMEs financing.

Di sisi lain, kapasitas teknis Perseroan juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi RAKB. Dengan tim yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan berkelanjutan, serta dukungan teknologi dan sistem yang memadai, Perusahaan dapat mengelola risiko dan peluang yang muncul dengan lebih efektif. Kapasitas teknis yang kuat memungkinkan Perseroan untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan keuangan, serta untuk memastikan bahwa pelaporan dan pengelolaan risiko dilakukan sesuai dengan standar keberlanjutan yang berlaku.

Furthermore, the Company's technical capacity is a key factor in the successful implementation of the Sustainable Finance Action Plan (SFAP). With a team possessing expertise in Sustainable Finance, as well as adequate technology and system support, the company can more effectively manage the risks and opportunities that arise. Strong technical capacity allows the Company to conduct thorough analyses of the social and environmental impacts of each financial decision and ensures that reporting and risk management comply with relevant sustainability standard.

Kerja Sama dengan Pihak Eksternal

Dalam mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, terutama dalam hal peningkatan kapasitas, kualitas, dan kompetensi, Perseroan senantiasa terbuka untuk menjajaki peluang kerjasama dan berkolaborasi dengan pihak eksternal yang memiliki keahlian profesional/ bersertifikasi, berbadan hukum dan dapat memberikan manfaat signifikan bagi kemajuan Perseroan. Meskipun demikian, pemanfaatan potensi dan sumber daya internal Perseroan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap upaya pengembangan, dengan mempertimbangkan bahwa kekuatan internal adalah fondasi yang tak ternilai dalam mewujudkan tujuan jangka panjang yang berkelanjutan.

Cooperation with External Parties

To support the implementation of the Sustainable Finance Action Plan, particularly in enhancing capacity, quality, and competency, the Company remains open to exploring collaboration opportunities with external parties that have professional/ certified expertise, are legally established, and can provide substantial benefits to the Company's development. However, leveraging the Company's internal potential and resources remains the top priority in every development effort, recognizing that internal strengths are a vital foundation for achieving long-term sustainability goals.

Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), karena komunikasi yang efektif dapat memastikan pemahaman dan dukungan yang luas dari semua pemangku kepentingan.

Communication Strategy

The communication strategy is a critical element in the implementation of the Sustainable Finance Action Plan (SFAP), as effective communication ensures broad understanding and support from all stakeholders. In the context of SFAP, the

Dalam konteks RAKB, strategi komunikasi difokuskan untuk membangun kesadaran, transparansi, dan kolaborasi antara pihak internal dan eksternal, termasuk karyawan, pelanggan, investor, regulator, serta masyarakat luas.

Langkah pertama dalam strategi komunikasi adalah penyusunan pesan yang jelas dan konsisten terkait tujuan dan inisiatif keberlanjutan yang ingin dicapai melalui RAKB. Pesan tersebut harus dapat menggambarkan dengan tepat komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan, serta manfaat yang diharapkan tidak hanya bagi Perseroan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan. Komunikasi ini juga perlu dilakukan secara transparan, dengan menyampaikan kemajuan yang dicapai, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan keberlanjutan.

Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi

Dalam mendukung kelancaran implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), Perseroan telah menetapkan sistem *monitoring*, evaluasi, dan mitigasi risiko yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perseroan mengadopsi pendekatan *three lines of model*, yang memisahkan fungsi-fungsi utama untuk menciptakan struktur pengawasan dan pengendalian yang jelas dan efektif. Evaluasi secara berkala dilakukan oleh Perseroan untuk memastikan berjalannya Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan program yang telah dicanangkan. Mitigasi yang dilakukan oleh Perseroan adalah secara konsisten melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur internal guna untuk meningkatkan kinerja berkelanjutan serta memastikan tata kelola sudah berjalan baik.

Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Isu Keuangan Berkelanjutan

Perseroan senantiasa memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam perencanaan dan penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan seperti :

a. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
b. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.

strategy focuses on building awareness, transparency, and collaboration between internal and external stakeholders, including employees, customers, investors, regulators, and the broader community.

The first step in the strategy is the development of clear and consistent messages about the sustainability goals and initiatives of the SFAP. The message should clearly convey the Company's commitment to sustainability and the expected benefits not only for the Company, but society, and the environment. The communication should also be transparent, outlining progress, challenges, and the steps to achieve sustainability goals.

Monitoring, Evaluation and Mitigation System

To facilitate the effective implementation of the Sustainable Finance Action Plan (SFAP), the Company has established a comprehensive system for monitoring, evaluation, and risk mitigation to ensure every step taken alignment with the sustainability goals. As part of this effort, the Company follows the three lines of model, which delineates key functions to establish a clear and effective monitoring and control structure. Periodic evaluations are conducted to ensure the Sustainable Finance Action Plan is executed as intended. The mitigation measures taken by the Company are to consistently adjust internal policies and procedures in order to improve sustainable performance and ensure that governance is performing well.

Government Policies Related to The Sustainable Finance Issues

The Company consistently follows government policies in the planning and implementation of the Sustainable Finance Action Plan, including the following :

a. Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 dated July 27, 2017 regarding the implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies.
b. Financial Services Authority Regulation Number 3 of 2023 dated February 24, 2023 concerning Improving Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Public.

Prioritas Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Priority of Detail of Sustainable Finance Action Plan

1. Program Pertama :

Peningkatan Portofolio Keuangan Berkelanjutan Perseroan

a. Dasar Pemikiran

- Perseroan menilai bahwa peningkatan portofolio Keuangan Berkelanjutan merupakan program pertama yang menjadi prioritas utama dalam implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Keputusan ini didasarkan pada kesadaran dan komitmen Perseroan

1. First Program :

Sustainable Finance Portfolio Enhancement of the Company

a. Rationale

- The Company considers that increasing its Sustainable Financing portfolio is the first program to be prioritized in the implementation of the Sustainable Finance Action Plan (SFAP). This decision is based on the Company's awareness and commitment to the importance of contributing

terhadap pentingnya berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

- Uraian sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan portofolio Keuangan Berkelanjutan, Perseroan akan fokus pada ekspansi kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan rencana bisnis jangka panjang (5 tahun) Perseroan, di mana pengembangan kemitraan strategis ini bertujuan untuk memperkuat kontribusi Perseroan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan mitra-mitra ini, Perseroan berharap dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar, baik dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, maupun dalam mendukung adopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan.

in supporting sustainable development.

- Description as part of the effort to increase the green portfolio, the Company will focus on expanding partnerships with micro, small and medium enterprises (MSMEs). This is in line with the Company's long-term (5-year) business plan, where the development of these strategic partnerships aims to strengthen the Company's contribution in supporting sustainable economic growth. Through collaboration with these partners, the Company hopes to create greater positive impact, both in terms of more efficient management of natural resources, as well as in supporting the adoption of environmentally friendly business practices.

b. Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

b. Sustainable Finance Action Plan Activities

No.	Uraian Kegiatan Description	Periode Awal Initial Period	Periode Akhir End Period	Sumber Daya Resources	Penanggung Jawab Division In Charge
1	Perseroan akan melakukan kegiatan pengembangan produk terhadap potensi pembiayaan Keuangan Berkelanjutan. The Company will conduct product development activities related to potential financing for Sustainable Finance product.	Jul - 2026	Sep - 2026	• Sumber daya manusia • Sumber dana • Sumber daya sistem informasi • Human resources • Funding sources • Information system resources	*Marketing Development & Business Development Corporate*
2	Penyaluran pembiayaan kepada kategori Keuangan Berkelanjutan. Disbursement of financing to Sustainable Finance Categories.	Jan - 2026	Dec - 2026	• Sumber daya manusia • Sumber dana • Sumber daya sistem informasi • Human resources • Funding sources • Information system resources	*Marketing Development & Business*

c. Sumber Daya

- Dalam rangka menyukseskan program pertama terkait *product development* & penyaluran pembiayaan keuangan berkelanjutan , Perseroan telah memiliki sumber daya berupa Unit Kerja *Marketing Development* untuk *Retail Business Unit* dan *Business Development Corporate* untuk *unit Corporate Business Unit*, serta Perseroan memiliki *Credit Marketing Officer* yang tersebar di seluruh Kantor Cabang Perseroan.
- Perseroan tentunya akan melakukan alokasi dana untuk aktifitas penunjang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mensukseskan RAKB.
- Dalam pelaksanaan program pertama, Perseroan menilai belum memerlukan mitra kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan produk

c. Resource

- In order to successfully implement the first program related to product development and the distribution of sustainable finance, the Company has resources in the form of a Marketing Development Unit for the Retail Business Unit and a Business Development Corporate Unit for the Corporate Business Unit, as well as Credit Marketing Officers who are distributed across all the Company's Branch Offices.
- The Company will certainly allocate funds for supporting activities in accordance with the needs required in order to succeed the SFAP.
- In the implementation of the first program, the Company considers that it does not yet need a cooperation partner in the implementation of product development.

- Perseroan juga memiliki sumber daya sistem informasi *(Management Information System)* sebagai alat pemantauan program Keuangan Berkelanjutan.

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Perseroan melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau pencapaian program penyaluran pembiayaan keuangan berkelanjutan yang dilakukan setiap bulannya.

e. Tantangan dan Rencana ke Depan

Kondisi ekonomi global yang saat ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat menjadi tantangan besar dalam kesuksesan program Keuangan Berkelanjutan di tahun 2026. Dalam menghadapi situasi ini, Perseroan terus berupaya untuk mempersiapkan berbagai skenario strategi yang adaptif dan efektif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran pembiayaan Keuangan Berkelanjutan tetap dapat mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat tantangan eksternal yang signifikan. Dengan kesiapan yang matang, Perseroan berkomitmen untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan program, mendukung keberlanjutan keuangan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

2. Program Kedua :

Peningkatan Kapasitas Internal Perseroan

a. Dasar Pemikiran

- Perseroan menilai bahwa peningkatan kapasitas internal Perseroan dalam konteks Keuangan Berkelanjutan sangat penting untuk keberhasilan program yang dicanangkan. Tanpa memiliki pengetahuan yang mencukupi baik terkait produk, pemahaman risiko dan peluang maka rencana yang disusun akan sulit dicapai.
- Perseroan akan melakukan *training refreshment* kepada karyawan yang berkaitan dengan proses penyaluran pembiayaan yaitu *Credit Analysts* dan Komite Kredit. Tujuannya agar pihak tersebut mendapatkan penyegaran tentang keuangan berkelanjutan beserta bagaimana menganalisa risiko dan memitigasinya.
- Selain itu Perseroan akan melakukan edukasi terhadap karyawan kunci di Kantor Cabang tentang pentingnya efisiensi energi listrik, air dan kertas dalam kegiatan operasional sehari-hari.

- The Company also has information system resources (Management Information System) as a tool for monitoring the Sustainable Finance program.

d. Program Evaluation Implementation System

The Company conducts periodic evaluations to monitor the progress of the sustainable finance distribution program, which is carried out on a monthly basis.

e. Challenges and Future Plans

The current global economic conditions, which have led to a decline in public purchasing power, pose a major challenge to the success of the Sustainable Finance program in 2026. In facing this situation, the company continues to make efforts to prepare various adaptive and effective strategic scenarios. This is done to ensure that the distribution of Sustainable Finance can still meet the set targets, despite significant external challenges. With thorough preparation, the Company is committed to optimizing the achievement of program goals, supporting financial sustainability, and contributing to more inclusive economic growth.

2. Second Program :

Enhancement of the Company's Internal Capacity

a. Thought Basis

- The Company believes that enhancing its internal capacity in the context of Sustainable Finance is crucial for the success of the planned program. Without sufficient knowledge related to products, understanding risks, and identifying opportunities, the planned goals will be difficult to achieve.
- The Company will conduct refreshment training for employees involved in the financing distribution process, namely Credit Analysts and the Credit Committee. The goal is to provide these individuals with an update on sustainable finance and how to analyze and mitigate risks.
- In addition, the Company will educate key employees at the Branches Office about the importance of energy, water, and paper efficiency in daily operational activities.

b. Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

b. Sustainable Finance Action Plan Activities

No.	Uraian Kegiatan Description	Periode Awal Initial Period	Periode Akhir End Period	Sumber Daya Resources	Penanggung Jawab Division In Charge
1	Pengembangan kapasitas internal Perseroan : Internal capacity building of the Company :				*Operation with support from Human Resource*
	a. Edukasi kepada karyawan kunci di Kantor Cabang terkait efisiensi listrik, air dan kertas. Education for key employees at the Branch Office regarding electricity, water and paper efficiency.	Jan – 2026	Mar – 2026	• Sumber daya manusia • Sumber dana • Sumber daya sistem informasi • Human resources • Funding sources • Information system resources	
	b. Training *refreshment* kredit analis dan kredit komite terkait peluang, analisa risiko, dan mitigasi risiko Keuangan Berkelanjutan. Refresher training for credit analysts and credit committee on opportunities, risk analyst and riskmitigation related to Sustainable Finance Product.	Apr - 2026	Jun - 2026		*Branch Management with support from Human Resources*

c. Sumber Daya

- Dalam rangka menyukseskan program kedua yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas internal mengenai keuangan berkelanjutan, Perseroan telah membentuk struktur organisasi yang berada di bawah kendali Direktorat Sumber Daya Manusia, yaitu Departemen *Learning & Development*. Departemen ini akan memberikan dukungan dalam pelaksanaan program edukasi serta pelatihan penyegaran, yang merupakan tanggung jawab fungsi Operasional dan Manajemen Cabang. Fungsi-fungsi tersebut memiliki tanggung jawab langsung atas keberhasilan pelaksanaan aktivitas peningkatan kapasitas internal ini.
- Perseroan tentunya akan melakukan alokasi dana untuk kegiatan penunjang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mensukseskan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- Dalam pelaksanaan program kedua, Perseroan akan mempertimbangkan penggunaan atau kerjasama dengan pihak professional jika dibutuhkan berdasarkan analisa kebutuhan yang dilakukan oleh Perseroan.

c. Resource

- In order to successfully implement the second program related to the development of internal capacity concerning sustainable finance, the Company has established an organizational structure under the control of the Human Resources Directorate, specifically the Learning & Development Department. This Department will support the implementation of education programs and refreshment training, which are the responsibility of the Operations and Branch Management functions. These functions have direct accountability for the successful execution of the internal capacity-building activities.
- The Company will certainly allocate funds for supporting activities in accordance with the needs required in order to succeed the Sustainable Finance Action Plan.
- In the implementation of the second program, the Company will consider the use of or collaboration with professional parties if needed, based on a needs analysis conducted by the Company.



d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Dalam melakukan evaluasi atas keberhasilan program peningkatan kapasitas internal, Perseroan akan melaksanakan *pre-test* dan *post-test* selama pelaksanaan pelatihan penyegaran. Langkah ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan peserta sebelum dan setelah mengikuti pelatihan, sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas internal karyawan. Hasil dari evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan program pelatihan di masa mendatang, serta memastikan pencapaian tujuan peningkatan kapasitas yang diinginkan.

e. Tantangan dan Rencana ke Depan

Perseroan menghadapi tantangan seperti perbedaan tingkat pemahaman karyawan dalam memahami Keuangan Berkelanjutan, lokasi Kantor Cabang Perseroan yang terletak di berbagai daerah tersebar di beberapa Pulau di Indonesia dan juga perkembangan teknologi yang pesat menjadi tantangan bagi Perusahaan saat ini.

Ke depan, Perseroan akan memperkuat program pelatihan dengan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti pemanfaatan teknologi sebagai langkah Perseroan mastikan pemerataan jangkauan peningkatan kapasitas internal bagi karyawan yang berada di Kantor Cabang. Evaluasi berkala melalui *pre-test* dan *post-test* juga akan dilakukan untuk memastikan efektivitas pelatihan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan langkah ini, Perseroan berharap dapat meningkatkan kompetensi karyawan dan mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan.

d. Program Evaluation Implementation System

In evaluating the success of the internal capacity-building program, the Company will conduct pre-tests and post-tests during the refresher training sessions. This step aims to measure participants' understanding and knowledge before and after the training, in order to assess the effectiveness of the program in enhancing employees' competencies and internal capacity. The results of this evaluation will be used as a basis for improving and developing future training programs, as well as ensuring the achievement of the desired capacity-building objectives.

e. Challenges and Future Plans

The Company faces challenges such as differing levels of employee understanding of Sustainable Finance, the location of Branches Office spread across several islands in Indonesia, and the rapid development of technology, which are current challenges for the Company.

Going forward, the Company will strengthen its training programs with a more flexible approach, such as leveraging technology to ensure equal access to internal capacity-building for employees across Branch Office. Periodic evaluations through pre-tests and post-tests will also be conducted to ensure the effectiveness of the training and identify areas that need improvement. With these steps, the Company aims to enhance employee competencies and achieve its long-term objectives.



Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan
Performance Overview of Sustainability Aspect

Kinerja Ekonomi	2023	2024	2025	Economy Performance
Pembiayaan Konsumen (Rp-miliar)	265.37	320.99	304.36	Consumer Financing (Rp-billion)
Sewa Pembiayaan (Rp-miliar)	55.54	64.71	70.17	Finance Leases (Rp-billion)
Administrasi dan Provisi (Rp-miliar)	45.41	53.01	41.32	Administration and Provision (Rp-billion)
Penalti (Rp-miliar)	20.75	19.73	17.58	Penalty (Rp-billion)
Bunga (Rp-miliar)	0.33	0.35	0.34	Interest (Rp-billion)
Pendapatan Lain-lain (Rp-miliar)	13.94	9.86	15.05	Other Income (Rp-billion)
Jumlah Pendapatan (Rp-miliar)	401.34	468.65	448.82	Total Income (Rp-billion)
Laba Bersih Tahun Berjalan (Rp-miliar)	61.15	(2.16)	2.89	Net Profit For The Year (Rp-billion)
Kinerja Lingkungan				**Environmental Performance**
Penggunaan Listrik (kWh)	548,080	704,684	662,777	Electricity Usage (kWh)
Penggunaan Air (m^3)	4,193	5,058	6,143	Water Usage (m^3)
Kinerja Sosial				**Social Performance**
Jumlah Karyawan (orang)	664	711	751	Total Employees (person)
Rasio Perputaran Karyawan (%)*	22.00	17.90	19.15	Employee Turn Over Ratio (%)*
Rasio Karyawan Perempuan (%)	21	19.95	20.77	Female Employee Ratio (%)

*) Penyajian angka tahun 2023 dan 2024 dinyatakan kembali karena adanya pengkinian data.
Figures for 2023 and 2024 have been restated due to data updates.

Pendapatan Pembiayaan Konsumen
Consumer Financing Income

Per 31 Desember 2025 / as of 31 December 2025



Rp
304.36
Miliar / Billion

Pendapatan Sewa Pembiayaan
Finance Lease Income

Per 31 Desember 2025 / as of 31 December 2025



Rp
70.17
Miliar / Billion

Administrasi dan Provisi
Administration and Provision

Per 31 Desember 2025 / as of 31 December 2025



Rp
41.32
Miliar / Billion

Penalti
Penalty

Per 31 Desember 2025 / as of 31 December 2025



Rp
17.58
Miliar / Billion

Bunga
Interest

Per 31 Desember 2025 / as of 31 December 2025



Rp
0.34
Miliar / Billion

Pendapatan Lain-lain
Other Income

Per 31 Desember 2025 / as of 31 December 2025



Rp
15.05
Miliar / Billion

Jumlah Pendapatan
Total Income

Per 31 Desember 2025 / as of 31 December 2025



Rp
448.82
Miliar / Billion

Laba Bersih Tahun Berjalan
Net Profit For The Year

Per 31 Desember 2025 / as of 31 December 2025



Rp
2.89
Miliar / Billion

Penggunaan Air
Water Usage

Per 31 Desember 2025 / as of 31 December 2025



6,143
m^3

Penggunaan Listrik
Electricity Usage

Per 31 Desember 2025 / as of 31 December 2025



662.777
kWh

Rasio Perputaran Karyawan
Employee Turnover Ratio

Per 31 Desember 2025 / as of 31 December 2025



19.15%

Jumlah Karyawan
Number of Employees

Per 31 Desember 2025 / as of 31 December 2025



751
Orang / Person

Penjelasan Direksi

The Board of Directors' Remarks



Takeshi Kurioka

Direktur Utama
President Director

"Aktivitas dunia bisnis dan industri yang kian berkembang secara kompleks serta kondisi ekonomi global dan Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan memberikan perhatian yang seimbang pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menyelaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Direksi berharap strategi yang disusun Perseroan terkait keuangan berkelanjutan dapat menghasilkan manfaat bagi Pemangku Kepentingan.

The increasingly complex development of business and industrial activities, along with the global and Indonesian economic conditions, pose unique challenges. The Company remains committed to conducting business activities with balanced attention to economic, social, and environmental aspects, in alignment with Indonesia's Sustainable Development Goals (SDGs). The Board of Directors hopes that the Company's strategy for sustainable finance will benefit stakeholders."

Krisis iklim global mencapai puncaknya pada tahun 2025, dimana *World Meteorological Organization* (WMO) menyatakan bahwa pada rentang tahun 2021–2025 merupakan periode suhu tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah. Dampak destruktifnya terlihat nyata melalui bencana alam, mulai dari kemarau panjang akibat El Niño yang menyebabkan kebakaran hutan di Amazon dan Kalimantan hingga hilangnya wilayah pesisir di utara Jawa akibat tenggelam secara permanen. Kondisi ini membawa dampak finansial, pangan, kesehatan, dan keamanan global. Bank Dunia memperkirakan kerugian ekonomi global akibat bencana alam yang disebabkan perubahan iklim dapat mencapai USD 500 miliar per tahun. Jika krisis terus berlanjut, maka akan terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) global sebesar 3,00% pada tahun 2030.

The global climate crisis will peak in 2025, with the World Meteorological Organization (WMO) declaring the 2021–2025 period was the period of the highest temperatures ever recorded in history. Its devastating impacts are evident through natural disasters, from prolonged droughts caused by El Niño that have caused forest fires in the Amazon and Kalimantan to the permanent loss of coastal areas in northern Java due to submergence. This situation has a significant financial, food, health and global security. The World Bank estimates that annual global economic losses from natural disasters caused by climate change could reach USD 500 billion. If the crisis continues, there will be a 3.00% decline in global Gross Domestic Product (GDP) by 2030.

Komitmen Indonesia terhadap dekarbonisasi diwujudkan melalui kebijakan yang komprehensif, mulai dari pembatasan ekspansi lahan sawit dan tambang lewat moratorium, hingga aksi nyata rehabilitasi lahan masif seluas 600 ribu hektar per tahun. Langkah ini diperkuat dengan ambisi meningkatkan porsi

Indonesia's commitment to decarbonization is realized through comprehensive policies, ranging from limiting the expansion of oil palm and mining plantations through a moratorium to concrete actions to massive land rehabilitation covering 600,000 hectares per year. These measures are reinforced by the ambition to increase

energi terbarukan menjadi 23% dan pengenalan instrumen pajak karbon sebagai upaya menekan emisi di sektor industri demi mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060.

Di tengah krisis iklim yang kian nyata, negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan ganda, antara lain bagaimana menghadapi perubahan iklim serta bagaimana untuk dapat tetap tumbuh sebagai negara berpenghasilan menengah. Melalui forum Indonesia *International Sustainability Forum* (ISF) 2025, Pemerintah memaparkan berbagai inisiatif yang telah dilakukan guna mendorong agenda berkelanjutan. Fokus utama dari forum ini terarah pada hilirisasi, dekarbonisasi, serta swasembada pangan, energi, dan air. Penguatan fondasi domestik menjadi langkah awal sebelum bicara ambisi besar global. Isu pangan, energi, dan air bukan hanya soal ketahanan, tapi juga soal keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan misi Pemerintah yaitu Asta Cita (8 misi yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membangun bangsa yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih makmur).

Pemerintah Indonesia juga telah memberikan berbagai stimulus untuk penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) hingga dukungan infrastruktur dengan memperbanyak Stasiun Pengisian Daya Listrik Umum (SPKLU) untuk kendaraan berbasis listrik.

Penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang tahun 2025 meningkat secara signifikan menembus angka 103.931 unit. Hasil ini membuat mobil listrik memberi kontribusi lebih dari 12% wholesales atau distribusi dari pabrik ke dealer secara nasional. Mengacu pada data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), kenaikan permintaan mobil listrik pada 2025 tercatat melonjak 141%, di mana pada 2024 wholesales hanya mencapai sebesar 43.188 unit.

Sementara itu, wholesales mobil elektrifikasi jenis *hybrid* hanya naik 10% pada 2025 menjadi 65.943 unit, sedangkan *Plug In Hybrid Electric Vehicle* (PHEV) tumbuh 3.775% menjadi 5.270 unit.

Untuk itu masih diperlukan kolaborasi antara Pemerintah, pemangku kepentingan dan pihak swasta agar dapat memajukan transisi energi menuju ketahanan energi yang mandiri dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan untuk Merespons Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan. Kebijakan dan prosedur tersebut terdiri dari kebijakan keuangan berkelanjutan, dan Standar Operasional Prosedur (“SOP”) keuangan berkelanjutan dalam proses pembiayaan. Perseroan juga telah menetapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”), yang secara khusus memandu berbagai langkah perlindungan lingkungan dan sosial serta memastikan bahwa para pemangku kepentingan dapat benar-benar merasakan manfaat berkelanjutan dari operasi dan bisnis Perseroan.

Seluruh kebijakan dan prosedur ini merupakan manifestasi nyata dari nilai keberlanjutan yang termaktub dalam visi Perseroan

the share of renewable energy to 23% and the introduction of a carbon tax instrument to reduce emissions in the industrial sector to achieve Net Zero Emissions by 2060.

Amid the increasingly apparent climate crisis, developing countries like Indonesia face dual challenges: how to address climate change and how to maintain growth as a middle-income country. Through Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, the Government outlined various initiatives it has undertaken to advance the sustainability agenda. The forum’s primary focus is on downstreaming, decarbonization, and self-sufficiency in food, energy, and water. Strengthening domestic foundations is the first step before addressing grand global ambitions. Food, energy, and water issues are not only about resilience, but also about social justice and the well-being of the people, in order to realize the Government’s mission, Asta Cita (8 missions established by President Prabowo Subianto to build a stronger, more just, and prosperous).

The Indonesian Government has also provided various incentives for the use of Battery-Based Electric Vehicles (KLBB) to infrastructure support through the expansion of Public Electric Charging Stations (SPKLU) for electric vehicles.

Electric car sales in Indonesia are projected to increase significantly throughout 2025, reaching 103,931 units. This figure allows electric cars to contribute more than 12% of the national wholesale market, or factory-to-dealer distribution.According to data from the Association of Indonesian Automotive Industries (Gaikindo), demand for electric cars is projected to surge 141% in 2025, compared to 43,188 units in 2024.

Meanwhile, wholesales of hybrid electrified vehicles only increased by 10% in 2025 to 65,943 units, while Plug-In Hybrid Electric Vehicles (PHEVs) grew by 3,775% to 5,270 units.

Therefore, collaboration between the Government, stakeholders, and the private sector is still needed to advance the energy transition towards independent energy security and sustainable economic growth.

Policies to Respond to Challenges in Fulfilling the Sustainability Strategy

The Company has established Sustainable Finance policies and procedures. These policies and procedures consist of sustainable finance policy and sustainable finance Standard Operating Procedures (“SOP”) in the financing process. The Company also has established Sustainable Finance Action Plan (“RAKB”), which specifically guides various environmental and social safeguards and ensures that stakeholders truly experience the sustainable benefits of the Company’s operations and business.

All of these policies and procedures are real manifestations of the sustainability values contained in the Company’s vision:

yaitu:
"Menciptakan Dunia yang Berkelanjutan"

Dalam mencapai visi tersebut, Perseroan mengimplementasikan strategi antara lain:

- Dukungan penuh manajemen dalam penerapan keuangan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam kegiatan usaha Perseroan;
- Mendorong peningkatan akses UMKM guna memperoleh pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecukupan penerapan manajemen risiko;
- Peran aktif karyawan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maupun kompetensi penerapan keuangan berkelanjutan sesuai jenjang tugasnya;
- Memperhatikan aspek sosial baik secara internal untuk mewujudkan misi Perseroan dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, maupun secara eksternal di lingkungan sosial Kantor Pusat dan Kantor Cabang sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Perseroan dan menjaga risiko reputasi;
- Memperhatikan aspek ramah lingkungan di internal Perseroan dengan berbagai upaya untuk efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, kertas & plastik.

Respon Terhadap Isu Terkait Keuangan Berkelanjutan

Perubahan iklim merupakan isu global yang memberikan dampak signifikan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, termasuk meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem, perubahan pola curah hujan, gangguan rantai pasok, serta risiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini mendorong dunia usaha untuk semakin memperhatikan pengelolaan risiko iklim melalui penerapan praktik operasional yang bertanggung jawab, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dukungan terhadap upaya mitigasi dan adaptasi. Dengan demikian, respons terhadap perubahan iklim menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan usaha dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan International Sustainability Forum (ISF) 2025 pada Oktober lalu sukses membuahkan hasil konkret melalui penandatanganan 13 nota kesepahaman (MoU) serta 3 deklarasi strategis. Dengan total nilai komitmen mencapai Rp278 triliun, kolaborasi ini mencakup berbagai sektor krusial seperti energi bersih, karbon, hingga infrastruktur hijau. Melibatkan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan internasional, dan sektor swasta, investasi ini menjadi bukti nyata transformasi industri nasional. Langkah ini tidak hanya bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengakselerasi pemberdayaan UMKM serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya dengan senantiasa mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan operasional kantor, Perseroan senantiasa berusaha melindungi dampak keuangan, lingkungan dan sosial dengan kebijakan dan prosedur yang relevan.

"Be a Creator of a Sustainable World"

To achieve this vision, the Company implements strategies including:

- Full management support in the implementation of sustainable finance by balancing economic, social, environmental, and governance aspects in the Company's business activities;
- Encouraging increased access for MSMEs to financing by applying prudent principles and adequate risk management;
- Active participation of employees who possess the necessary skills to carry out their duties and responsibilities, as well as competencies in implementing sustainable finance according to their respective levels of responsibility;
- Paying attention to social aspects both internally to realize the Company's mission of developing competent human resources, and externally within the social environment of the Head Office and Branch Offices to increase public trust in the Company and mitigate reputational risks;
- Paying attention to environmentally friendly aspects within the Company through various efforts to achieve energy efficiency, water efficiency, and paper and plastic use.

Responds to Issues Related to Sustainable Finance

Climate change is a global issue that has significant impacts on environmental, social, and economic aspects, including the increasing frequency of extreme weather events, changing rainfall patterns, supply chain disruptions, as well as risks to public health and well-being. This condition encourages businesses to place greater attention on managing climate-related risks through the implementation of responsible operational practices, efficient use of resources, and support for mitigation and adaptation efforts. Accordingly, responses to climate change have become an important part of maintaining business sustainability and creating long-term value for all stakeholders.

The International Sustainability Forum (ISF) 2025 held last October successfully yielded concrete results through the signing of 13 memorandums of understanding (MoUs) and 3 strategic declarations. With a total commitment value of IDR 278 trillion, this collaboration covers various crucial sectors such as clean energy, carbon, and green infrastructure. Involving synergy between the government, international financial institutions, and the private sector, this investment is a tangible demonstration of the transformation of the national industry. This step aims not only to strengthen economic growth but also to accelerate the empowerment of MSMEs and the creation of sustainable jobs.

In conducting its business, the Company is committed to consistently considering economic, social, and environmental aspects. Therefore, in carrying out its office operations, the Company consistently strives to mitigate financial, environmental, and social impacts through relevant policies and procedures.

Sebagai langkah proaktif dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, Perseroan secara adaptif menyesuaikan strategi bisnis serta tata kelola. Perseroan terus mengembangkan diri secara konsisten. Perseroan senantiasa mengedepankan kepentingan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai strategi bisnis yang berkelanjutan. Perseroan optimis akan dapat terus berkembang sehingga dapat berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ("TPB") di Indonesia.

As a proactive step in facing challenges and capitalizing on opportunities, the Company adaptively adjusts its business strategy and governance. The Company continues to develop consistently. The Company consistently prioritizes the interests of all stakeholders to achieve a sustainable business strategy. The Company is optimistic that it will continue to grow and contribute to achieving the Sustainable Development Goals ("SDGs") in Indonesia.

Perseroan juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam pengembangan sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Perseroan senantiasa mendorong peningkatan akses UMKM guna memperoleh pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecukupan penerapan manajemen risiko.

The Company is also committed to playing an active role in developing the MSME sector, which is the backbone of the Indonesian economy. The Company consistently encourages increased access for MSMEs to financing by implementing prudent principles and adequate risk management.

Selain itu, Direksi telah melakukan peninjauan yang komprehensif atas penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025 ini yang diharapkan menjadi acuan atas komitmen Perseroan terhadap Keberlanjutan. Direksi senantiasa optimis, bahwa ke depan Perseroan dapat mencapai kemajuan dan pertumbuhan terkait implementasi keberlanjutan.

Furthermore, the Board of Directors has conducted a comprehensive review of the preparation of this 2025 Sustainability Report, which is expected to serve as a benchmark for the Company's commitment to sustainability. The Board of Directors remains optimistic that the Company can achieve progress and growth in the future related to sustainability implementation.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sepanjang tahun 2025, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Implementation of Sustainable Finance

Throughout 2025, the Company continued its effort to improve its performance from an economic, social, and environmental perspective.

Perseroan mencatatkan Laba Bersih Tahun Berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp2,89 miliar. Peseroan juga mampu menekan Beban sebesar 7,05%. Meski Jumlah Aset dan Liabilitas mengalami sedikit penurunan masing-masing sebesar 1,78% dan 2,31%, struktur permodalan tetap solid dengan Jumlah Ekuitas Rp744,01 miliar. Perseroan juga terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, terbukti dengan rasio Piutang Bermasalah Neto ("NPF-neto") yang terkendali di level 1,59% sesuai standar ketentuan OJK.

The Company recorded a Net Profit For The Year in 2025 amounted IDR 2.89 billion. The Company was also able to reduce Expenses by 7.05%. Although Total Assets and Liabilities experienced a slight decrease of 1.78% and 2.31%, respectively, the capital structure remained solid with Total Equity of IDR 744.01 billion. The Company also continues to prioritize the principle of prudence in financing distribution, as evidenced by the Net Non-Performing Receivables ("NPF-net") ratio which is controlled at 1.59% in accordance with OJK provision standards.

Perseroan senantiasa mendukung perkembangan portofolio kredit berkelanjutan dengan menyalurkan pembiayaan pada sektor UMKM, transportasi ramah lingkungan, penyaluran pembiayaan atas mesin pengolahan limbah padat maupun cair, seperti minyak oli bekas pakai yang dapat digunakan kembali pada proses produksi serta pembiayaan pada perusahaan yang bergerak di bidang pencegahan dan pengendalian polusi. Pembiayaan dalam kategori keuangan berkelanjutan telah dilaporkan dalam laporan bulanan melalui sistem pelaporan OJK dan dilakukan pemantauan secara berkala.

The Company consistently supports the development of a sustainable credit portfolio, including by providing financing to MSMEs sector, environmentally friendly transportation, provide financing for solid and liquid waste processing machines, such as used oil that can be reused in the production process in companies engaged in energy efficiencyand financing to companies engaged in pollution prevention and control. Financing under the sustainable finance category has been reported in the monthly report through the OJK reporting system and is monitored periodically.

Pada tahun 2025, Perseroan merealisasikan penyaluran pembiayaan yang dikategorikan sebagai keuangan berkelanjutan sebesar Rp 384,36 miliar Rupiah, dimana penyaluran pembiayaan terbesar adalah kepada sektor UMKM yaitu sebesar Rp 206,72 miliar. Portofolio keuangan berkelanjutan ini berkontribusi 12,60% dari seluruh portofolio pembiayaan Perseroan. Angka ini melebihi target yang ditetapkan Perseroan sebelumnya yaitu sebesar 11,10%. Perseroan berharap, upaya yang dilakukan Perseroan ini dapat mendukung program pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan

By 2025, the Company has disbursed financing categorized as sustainable finance amounting to IDR 384.36 billion, with the largest distribution being to MSMEs sector, amounting to IDR 206.72 billion. This sustainable finance portfolio contributed 12.60% of the Company's total financing portfolio. This figure exceeded the Company's previously set target of 11.10%. The Company hopes that the efforts made by the Company can support the government's program to create job opportunity and encourage inclusive economic growth.

ekonomi yang inklusif.

Salah satu inisiatif Perseroan terkait pengelolaan lingkungan adalah penggunaan gedung yang bersertifikat green building untuk Kantor Pusat Perseroan, yaitu bangunan yang dirancang, dibangun, dan dikelola untuk meminimalkan penggunaan sumber daya alam, seperti energi, air, dan material, serta mengurangi limbah dan polusi yang dihasilkan selama masa operasinya dengan tetap memperhatikan kenyamanan dan kesehatan manusia yang beraktivitas di dalamnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan juga senantiasa memperhatikan aspek ramah lingkungan seperti efisiensi energi, penggunaan air, kertas dan plastik.

One of the Company's initiatives related to environmental management is the use of a green building certified building for the Company's Head Office, namely a building that is designed, constructed, and managed to minimize the use of natural resources, such as energy, water, and materials, as well as reduce waste and pollution generated during its operational period while still paying attention to the comfort and health of the people who work in it. In carrying out its operations, the Company consistently prioritizes environmentally friendly aspects such as energy efficiency, water use, paper, and plastic.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, Perseroan melakukan literasi keuangan melalui penyediaan materi edukasi keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat melalui microsite www.pinjamdana.co.id. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat dalam meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman literasi keuangan dalam penggunaan produk layanan jasa keuangan, yang merata melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

As a manifestation of its sustainable commitment, the Company promotes financial literacy by providing accessible financial education materials to consumers and/or the public through the microsite www.pinjamdana.co.id. This aims to facilitate and inform public, improving financial literacy and understanding financial literacy in the use of financial services products, equitably through the use of information and communication technology.

Pada tanggal 22 Oktober 2025, Perseroan menyelenggarakan program Literasi Keuangan bagi 135 siswa dan guru di SMK Negeri 54, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan bukan sekadar pemenuhan kewajiban terhadap POJK No. 3 Tahun 2023, melainkan inisiatif Perseroan dalam dukungan Perseroan dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

On October 22, 2025, the Company conducted Financial Literacy program for 135 students and teachers at SMK Negeri 54, Jakarta. This activity was not merely a fulfillment of obligations under POJK No. 3 of 2023, but also an initiative of the Company's support in increasing public understanding of financial products and services.

Dalam kegiatan ini, Perseroan juga merealisasikan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan memberikan bantuan sarana pendukung proses belajar-mengajar yang diserahkan langsung kepada Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 54, Jakarta, Ibu Titi Setyaningsih. Perseroan berharap kontribusi ini dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan potensi sumber daya manusia unggul di kalangan generasi muda Indonesia.

During this activity, the Company also realized Corporate Social and Environmental Responsibility activity by providing support facilities for the teaching and learning process, which were handed over directly to the Vice Principal of SMK Negeri 54, Jakarta, Mrs. Titi Setyaningsih. The Company hopes this contribution will be a catalyst in improving the quality of education and developing the potential of superior human resources among Indonesia's younger generation.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan juga telah secara konsisten melaksanakan inklusi keuangan dengan menambah jaringan pemasaran produk melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Throughout 2025, the Company has also consistently implemented financial inclusion by expanding its product marketing network through collaborations with third parties. This aims to increase access to institutions, financial products and/or services.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan risiko terkait keamanan data guna menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi seraya mewujudkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pada tahun 2025, Perseroan telah melakukan pembaruan sertifikasi ISO 27001:2013 dengan ISO 27001:2022.

In order to improve risk management related to data security in order to establish, implement, maintain, and continuously improve the information security management system while realizing Good Corporate Governance practices, in 2025, the Company has renewed its ISO 27001:2013 certification with ISO 27001:2022.

Perseroan senantiasa berkomitmen dalam mengimplementasikan strategi keberlanjutan yang diterapkan guna mendukung program Pemerintah, seraya menerapkan strategi yang dapat berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terstruktur dan inklusif.

The Company remains committed to implementing sustainability strategies to support government programs, while implementing strategies that can significantly contribute to sustainable, structured, and inclusive economic growth.

Strategi Pencapaian Target

Perseroan secara khusus telah berkontribusi untuk mengurangi emisi dengan meningkatkan portofolio yang dapat dikelompokkan dalam Keuangan Berkelanjutan.

Manajemen risiko dalam penerapan keuangan keberlanjutan menjadi semakin krusial bagi Perseroan, khususnya dalam mengelola rasio piutang bermasalah. Dalam konteks ini, penerapan prinsip keberlanjutan tidak hanya mencakup pertimbangan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST), tetapi juga berperan dalam memperkuat ketahanan portofolio pembiayaan terhadap potensi risiko kredit.

Melalui integrasi faktor keberlanjutan dalam proses penilaian dan seleksi debitur, Perseroan dapat memitigasi kemungkinan terjadinya gagal bayar yang diakibatkan oleh kegiatan usaha yang tidak berkelanjutan atau rentan terhadap perubahan regulasi serta dampak lingkungan yang ekstrem.

Lebih lanjut, manajemen risiko yang selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan tentunya mendorong Perseroan untuk membangun sistem pengendalian internal yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika risiko yang dihadapi Perseroan. Hal ini mencakup penerapan kebijakan pembiayaan yang mendukung sektor-sektor ramah lingkungan, penguatan proses pemantauan atas kualitas pembiayaan, serta peningkatan kapasitas SDM dalam mengenali risiko-risiko keberlanjutan serta pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang tepat sasaran. Dengan demikian, Perseroan tidak hanya mampu menjaga kualitas aset dan menekan rasio piutang bermasalah, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya sistem keuangan yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Perseroan juga berkomitmen untuk mendorong peningkatan akses UMKM guna memperoleh pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecukupan penerapan manajemen risiko. Selaras dengan komitmen penerapan keuangan berkelanjutan, Perseroan secara konsisten mengupayakan realisasi visi keuangan berkelanjutan dengan senantiasa menyelaraskan faktor eksternal serta kesiapan internal, yang mencakup aspek finansial, kapasitas teknis, dan kapasitas organisasi.

Pemanfaatan Peluang dan Prospek Usaha

Memasuki tahun 2026, prospek usaha Perseroan masih dipengaruhi oleh dinamika global berupa konflik geopolitik di Timur Tengah, kenaikan harga energi, tekanan inflasi, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik. Namun demikian, peluang pertumbuhan tetap terbuka seiring proyeksi peningkatan industri pembiayaan, kebutuhan kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik dan *hybrid*, serta dukungan stabilitas kebijakan fiskal dan moneter nasional. Dalam konteks implementasi keberlanjutan, Perseroan memanfaatkan prospek tersebut melalui penguatan kualitas portofolio pembiayaan berbasis prinsip kehati-hatian, pengembangan produk sesuai kebutuhan pasar, efisiensi operasional melalui digitalisasi dan otomatisasi proses, penguatan tata kelola risiko, serta pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, Perseroan juga menjaga struktur pendanaan yang sehat, meningkatkan kepatuhan regulasi, dan memperluas jaringan usaha guna menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, resilien, dan memberikan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Target Achievement Strategy

The Company has specifically contributed to reducing emissions by increasing its portfolio that can be categorized as Sustainable Finance.

Risk management in the implementation of sustainable finance is becoming increasingly crucial for the Company, particularly in managing non-performing ratio receivable. In this context, the application of sustainability principles not only encompasses consideration of Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects, but also plays a role in strengthening the resilience of the financing portfolio to potential credit risks.

By integrating sustainability factors into the borrower assessment and selection process, the Company can mitigate the possibility of default arising from unsustainable business activities or those vulnerable to regulatory changes and extreme environmental impacts.

Furthermore, risk management aligned with sustainable finance principles encourages the Company to build a more adaptive and responsive internal control system to address risk dynamics faced by the Company. This includes implementing financing policies that support environmentally friendly sectors, strengthening financing quality monitoring processes, and enhancing human resource capacity in identifying sustainability risks and implementing targeted financial literacy and inclusion activities. Thus, the Company is not only able to maintain asset quality and reduce the non-performing receivable ratio, but also contributes to the creation of a more stable, inclusive, and sustainable financial system in the long term.

The Company is also committed to encouraging increased access for MSMEs to financing by implementing prudent principles and adequate risk management. In line with the commitment to implementing sustainable finance, the Company consistently strives to realize the vision of sustainable finance by continuously aligning external factors and internal readiness, which includes financial aspects, technical capacity, and organizational capacity.

Utilization of Opportunities and Business Prospects

Entering 2026, the Company's business prospects continue to be influenced by global dynamics, including geopolitical conflicts in the Middle East, rising energy prices, inflationary pressures, and the slowdown of domestic economic growth. Nevertheless, growth opportunities remain open in line with the projected expansion of the financing industry, demand for motor vehicles including electric and hybrid vehicles, as well as support from stable national fiscal and monetary policies. In the context of sustainability implementation, the Company seeks to capitalize on these prospects through strengthening the quality of its financing portfolio based on prudential principles, developing products in accordance with market needs, improving operational efficiency through digitalization and process automation, enhancing risk governance, and developing human resources. In addition, the Company maintains a sound funding structure, improves regulatory compliance, and expands its business network in order to create sustainable and resilient growth while delivering long-term value to all stakeholders.

Penjelasan Situasi Eksternal Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Sosial yang Berpotensi Mempengaruhi Keberlanjutan

Keberlanjutan Perseroan dipengaruhi oleh berbagai dinamika eksternal pada aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang terus berkembang. Dari sisi ekonomi, tantangan dapat berasal dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, volatilitas pasar keuangan, perubahan suku bunga, tekanan inflasi, serta ketidakpastian geopolitik yang berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat dan kualitas portofolio pembiayaan. Dari aspek lingkungan hidup, perubahan iklim, meningkatnya frekuensi bencana alam, serta transisi menuju ekonomi rendah karbon dapat mempengaruhi aktivitas usaha, kebutuhan pembiayaan hijau, dan pengelolaan risiko jangka panjang. Sementara itu, dari sisi sosial, perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi digital, kebutuhan terhadap inklusi keuangan, perlindungan data pribadi, serta ekspektasi masyarakat terhadap praktik usaha yang bertanggung jawab menjadi faktor penting yang perlu direspons secara adaptif. Oleh karena itu, Perseroan terus memperkuat ketahanan usaha melalui tata kelola yang baik, manajemen risiko yang *prudent,* inovasi layanan, dan penerapan prinsip keberlanjutan secara berkesinambungan.

Apresiasi

Direksi memberikan penghargaan dan apresiasi bagi seluruh karyawan Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan atas dedikasi dan loyalitas dalam melaksanakan komitmen Perseroan dalam aspek keberlanjutan.

Bagi kami, keberlanjutan merupakan cara untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Perseroan di masa depan dalam mewujudkan visi Perseroan yaitu **"Menciptakan Dunia yang Berkelanjutan"** yang bertujuan menjaga keselarasan antara kinerja aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Jakarta, April 2025
Atas nama Direksi
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Explanation of External Economic, Environmental, and Social Conditions that May Affect Sustainability

The Company's sustainability is influenced by various evolving external dynamics in the economic, environmental, and social aspects. From an economic perspective, challenges may arise from slowing economic growth, financial market volatility, changes in interest rates, inflationary pressures, and geopolitical uncertainty, which may affect public purchasing power and the quality of the financing portfolio. From an environmental perspective, climate change, the increasing frequency of natural disasters, and the transition toward a low-carbon economy may affect business activities, demand for green financing, and long-term risk management. Meanwhile, from a social perspective, changes in consumer behavior, digital technology developments, the need for financial inclusion, personal data protection, and public expectations for responsible business practices are important factors that must be addressed adaptively. Therefore, the Company continues to strengthen its business resilience through good governance, prudent risk management, service innovation, and the consistent implementation of sustainability principles.

Appreciation

The Board of Directors extends its appreciation and gratitude to all Company employees and stakeholders for their sustainability aspects dedication and loyalty in implementing the Company's sustainability commitments.

For us, sustainability is a way to drive the Company's future growth and development, achieving its vision of **"Be a Creator of a Sustainable World"** which aims to maintain harmony between economic, social, and environmental performance.

Jakarta, April 2025
On behalf of the Board of Directors
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk



Takeshi Kurioka
Direktur Utama / President Director



Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainability Governance

Dalam Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, Perseroan tidak membentuk departemen khusus atau unit kerja khusus, melainkan seluruh pihak yang terkait bertanggung jawab terhadap penerapan keuangan berkelanjutan.

In Implementation of the Sustainable Finance, the Company does not establish a special department or special work unit, but all related parties will be responsible for implementation of sustainable finance.

Pejabat Official	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities
Direksi Board of Directors	• Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan secara keseluruhan. To be responsible for the overall implementation of sustainable finance action program. • Direksi wajib melaksanakan dan mengelola Program Aksi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan rencana program yang telah disetujui Perseroan. Board of Directors is obliged to implement and manage the Sustainable Finance Action Program in accordance with the planned and agreed program.
Corporate Strategic Planning & Corporate Secretary	• Mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan memastikan kolaborasi antar departemen berjalan dengan optimal dan melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Direksi. To support the implementation of Sustainable Finance Action Program by ensuring that any collaboration among departments will work optimally and conduct periodic evaluations and report it to the Board of Directors. • Mengkoordinasikan persiapan konsep dengan pengkajian garis besar Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. To coordinate concept preparation by assessing the outline of Sustainable Finance Action Plan. • Menyusun Laporan Keberlanjutan To prepare Sustainability Report. • Memastikan pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan ke OJK. To ensure the submission of Sustainable Financial Action Plan and Sustainability Report to OJK.
Business Development Corporate Corporate Business Unit	• Pengkajian produk dan/atau jasa Unit Bisnis Korporasi kategori keuangan berkelanjutan. Assessment of Corporate Business Unit products and/or services of sustainable finance category • Mempersiapkan dan membuat produk dan/atau jasa Unit Bisnis Korporasi kategori keuangan berkelanjutan. To prepare and create Corporate Business Unit products and/or services of sustainable finance category. • Penyaluran pembiayaan produk dan/atau jasa Unit Bisnis Korporasi kategori keuangan berkelanjutan. Distribution of financing to Corporate Business products and/or services of sustainable finance category.
Marketing Development Retail Business Unit	• Pengkajian produk dan/atau jasa Unit Bisnis Ritel kategori keuangan berkelanjutan. Assessment of Retail Business Unit products and/or services of sustainable finance category. • Mempersiapkan dan membuat produk dan/atau jasa Unit Bisnis Ritel kategori keuangan berkelanjutan. To prepare and create Retail Business Unit products and/or services of sustainable finance category. • Penyaluran pembiayaan produk dan/atau jasa Unit Bisnis Ritel kategori keuangan berkelanjutan.

Pejabat Official	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities
	Distribution of financing to Retail Business Unit products and/or services of sustainable finance category.
Branch Management	• Mengelola pelaksanaan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan di Kantor Cabang Perseroan. To manage the implementation of Sustainable Finance Action Program in Branch Office of The Company.
Compliance	• Mengkaji penyusunan Pedoman & *Standard Operating Procedure* (SOP) Program Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan. To assess the preparation of Guidelines and Standard Operating Procedures (SOP) for the Sustainable Finance Action Program of the Company. • Melakukan pembaharuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan melibatkan berbagai Departemen terkait untuk realisasi rencana yang berhubungan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. To conduct the updating of Sustainable Finance Action Plan by involving various relevant Departments for realization of the plan related to the Sustainable Finance Action Plan. • Melakukan penelaahan dan rekomendasi terkait aspek kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan. To conduct review and recommendation related to the compliance aspect with the Sustainable Finance Action Program.
Risk Management	• Mengkaji integrasi aspek risiko dalam kegiatan usaha dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan. To study the integration of risk aspects into business activities in term of sustainable finance implementation. • Melakukan pemantauan risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan keuangan berkelanjutan. To monitor the credit risk and other risks related to implementation of sustainable finance.
Business Process	• Menyusun *draft* dan penyesuaian pedoman terkait penerapan keuangan berkelanjutan. Prepare draft and adjustments to the guidelines related to the implementation of sustainable finance.
Finance and Accounting	• Pelaporan bulanan terkait realisasi penyaluran pembiayaan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan. Monthly report related to realization of distribution of financing for sustainable finance products and/or services.
Human Resources	• Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi terkait program penerapan keuangan berkelanjutan. To conduct competency improvement training related to sustainable finance implementation program.
General Affairs	• Melakukan identifikasi peluang penghematan dan pengelolaan konsumsi energi dalam penerapan program Keuangan Berkelanjutan. Identify opportunities for efficiency and manage energy consumption in the implementation of the Sustainable Finance program.
Internal Audit	• Melakukan pengendalian internal pada pelaksanaan program keuangan berkelanjutan. • To conduct internal control on the implementation of sustainable finance program.
Information Technology	• Melakukan pengembangan, pengawasan dan pelaporan dalam memelihara sistem teknologi informasi dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan. • Developing, supervising and reporting on the maintenance of information technology systems in the implementation of Sustainable Finance.

Pengembangan Kompetensi dan Sosialiasasi LST

Telah dilakukan Pengembangan Kompetensi dan Sosialiasasi LST kepada karyawan/ti tentang keuangan berkelanjutan dengan materi pelatihan antara lain:

Materi pelatihan antara lain:

1. *Training Effeciency Program For Branches* (RAKB).
2. *Training Refreshment Credit Analyst* & Kredit Komite Terkait Peluang, Analisa Risiko, dan Mitigasi Risiko Terkait Produk Keuangan Berkelanjutan.
3. *The Role of Taxonomy For Sustainable Finance (TKBI) In Promoting The Energy Transition Towards Net Zero Emissions In Indonesia*
4. *How To Prevent Greenwashing In Sustainable Finance*

Competency Development and ESG Socialization

Competency Development and ESG Socialization has been conducted to the employees about the sustainable finance with the training subjects such as:

Training materials include:

1. Training Effeciency Program For Branches (RAKB).
2. Training Refreshment Credit Analyst & Credit Committee Related to Opportunities, Risk Analysis, and Risk Mitigation Related to Sustainable Financial Products.
3. The Role of Taxonomy For Sustainable Finance (TKBI) In Promoting The Energy Transition Towards Net Zero Emissions In Indonesia
4. How To Prevent Greenwashing In Sustainable Financee

Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan yaitu :

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan melalui rapat-rapat berkala.
b. Penyusunan Pedoman dan SOP Keuangan Berkelanjutan.
c. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kompetensi karyawan pada unit kerja terkait.
d. Kecukupan pengendalian internal.

Risk Mitigation

Risk mitigation carried out by the Company are :

a. Active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors on the implementation of Sustainable Finance Actions through regular meetings.
b. Preparation of Sustainable Finance Guidelines and SOPs.
c. Improving the capacity, quality and competence of employees in related work units.
d. Internal control adequacy.

Pemangku Kepentingan

Perseroan senantiasa menerapkan strategi komunikasi yang tepat kepada seluruh pemangku kepentingan hal ini untuk mendukung terciptanya hubungan baik dan terjalinnya komunikasi yang berkesinambungan dengan menerapkan komunikasi dua arah yang efektif meliputi komunikasi dengan internal dan eksternal.

Stakeholders

The Company always implements proper communication strategy to all stakeholders, this is to support the creation of good relation and the establishment of continuous communication by implementing effective two-way communication including internal and external communication.

Kendala

Dalam menerapkan keuangan berkelanjutan Perseroan menghadapi permasalahan dan tantangan, antara lain :

1. Pemahaman terhadap integrasi LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) masih belum merata. Untuk itu Perseroan senantiasa berupaya terus meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan terkait keuangan berkelanjutan baik oleh pihak internal maupun eksternal.
2. Tantangan untuk Perseroan mememberikan pembiayaan berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek risiko dan kehati-hatian, terutama dalam hal risiko kredit, *cyber security* dan keamanan data debitur.

Obstacles

In implementing sustainable finance, the Company faces problems and challenges, including:

1. Understanding of ESG (Environmental, Social and Governance) integration is still uneven. For this reason, the Company always strives to increase internal capacity through training related to sustainable finance by both internal and external parties.
2. The challenge for the Company is to provide sustainable financing without ignoring risk and precautionary aspects, especially in terms of credit risk, cyber security and data debtor security.

Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Follow Up of Sustainable Finance Action Plan

Penanggung Jawab Terhadap *Monitoring* dan Evaluasi Aksi Keuangan Berkelanjutan

Penanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Aksi Keuangan Berkelanjutan di Perseroan akan diemban oleh Unit Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Unit ini akan bekerja sama secara erat dengan masing-masing penanggung jawab program yang relevan, guna memastikan bahwa seluruh program yang tercantum dalam Aksi Keuangan Berkelanjutan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Person in Charge for Monitoring and Evaluation of Sustainable Finance Action

The Risk Management and Compliance Unit will be responsible for monitoring and evaluating the implementation of the Sustainable Finance Action in the Company. This unit will work closely with each person in charge of the relevant program, to ensure that all programs listed in the Sustainable Finance Action are running according to plan and achieve the set objectives.

Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Pengukuran realisasi terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan akan dilaksanakan setiap semester. Proses pengukuran ini mencakup evaluasi terhadap sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan, dengan membandingkan antara hasil yang tercapai dan target yang direncanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Timing for Measuring the Realization of Sustainable Finance Action Plan

Measurement of the realization of the Sustainable Finance Action Plan will be carried out every semester. This measurement process includes an evaluation of the extent to which the targets have been achieved, by comparing the results achieved and the targets planned in the Sustainable Finance Action Plan.

Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Perseroan berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah disusun dengan memperhatikan berbagai aktivitas, jadwal, dan indikator yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, Perseroan menyadari adanya kemungkinan hambatan yang dapat muncul selama proses implementasi. Setiap hambatan tersebut akan dievaluasi dan tercermin dalam hasil evaluasi serta pengukuran kinerja. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perubahan terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Perseroan akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan kaji ulang terhadap aktivitas yang tidak sesuai dengan rencana awal, dengan disertai analisis mendalam mengenai penyebab hambatan serta solusi yang diusulkan untuk mengatasi kendala tersebut di masa mendatang.
b. Melakukan revisi terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan hasil kajian ulang dan solusi yang telah disepakati, guna memastikan keselarasan dan efektivitas pelaksanaan yang lebih optimal.

Follow Up To Sustainable Finance Action Plan

The Company is fully committed to the implementing the Sustainable Finance Action Plan, that has been prepared with consideration of the specified activities, schedules, and indicators that have been set. However, the Company recognizes the possibility of obstacles that may arise during the implementation process. Any such obstacles will be evaluated and reflected in the evaluation results and performance measurement. If there are any discrepancies or changes to the Sustainable Finance Action Plan, the Company will take the following steps:

a. Conduct a review of activities that are not in line with the original plan, with an in-depth analysis of the causes of obstacles and proposed solutions to overcome these obstacles in the future.
b. Revise the Sustainable Finance Action Plan based on the results of the review and agreed solutions, to ensure optimal alignment and effectiveness of implementation.

Kebijakan Mengenai Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham

Perseroan menerapkan kebijakan perlakuan yang adil terhadap seluruh Pemegang Saham, yang tercermin dalam prosedur komunikasi yang transparan melalui berbagai publikasi serta penggunaan berbagai platform, baik daring maupun luring.

Policy on Fair Treatment of Shareholders

The Company implements a policy of fair treatment for all Shareholders, as reflected in transparent communication procedures through various publications and the use of multiple platforms, both online and offline.

Kinerja Keberlanjutan
Sustainability Performance

Kegiatan Membangun Kinerja Keberlanjutan

Perseroan memahami bahwa setiap bisnis harus selalu menyesuaikan perkembangan zaman. Karena itu Perseroan selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Bagi Perseroan, hal ini adalah kunci kelangsungan bisnis sambil menjaga kontribusi positif kepada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Perseroan juga menyadari bahwa dukungan semua pihak, termasuk seluruh pemangku kepentingan, juga merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja yang optimal di era globalisasi ini. Berbagai capaian kinerja yang baik hanya dapat terwujud jika Perseroan bersama seluruh pemangku kepentingan mampu berkolaborasi dan bahu-membahu untuk mendorong keberlanjutan.

Activities to Build Sustainability Performance

The Company's understands that every business must always adapt to the times. Therefore, the Company always tries to adapt itself to the needs of the times. For the Company, this is the key to business continuity while maintaining a positive contribution to economic, social and environmental aspects. The Company also realizes that the support of all parties, including all stakeholders, is also an important factor to achieve optimal performance in this globalization era. Various good performance achievements can only be realized if the Company and all Stakeholders are able to collaborate and work together to encourage sustainability.

Selama tahun 2025, Perseroan melanjutkan inisiatif dan komitmen pada bisnis yang mengedepankan prinsip dan nilai berkelanjutan. Dalam praktiknya, Perseroan berpartisipasi dalam berbagai kolaborasi yang melibatkan Pemangku Kepentingan untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sesuai dengan TPB.

During 2025, the Company continues its initiatives and commitment to a business that promotes sustainable principles and values. In practice, the Company participates in various collaborations involving stakeholders to achieve a balance between economic, social and environmental aspects, in accordance with the SDG.

Perseroan juga melanjutkan beberapa langkah strategis untuk mempersiapkan tantangan bisnis dan kondisi pasar saat ini,

The Company also continues several strategic steps to prepare for business challenges and current market conditions, one of

yang salah satunya diwujudkan melalui inisiatif dan transisi bisnis menuju digitalisasi. Melalui transformasi *digital*, Perseroan akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

Perseroan juga menerapkan RAKB sesuai dengan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 untuk menerapkan pembiayaan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik.

Kinerja Ekonomi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Perseroan melakukan kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan OJK.

Izin usaha sebagai lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.994/ KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 yang kemudian telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 Jo. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.KEP-806/ NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Perseroan memiliki 2 pilar bisnis, sebagai berikut:
1. Unit Bisnis Ritel
2. Unit Bisnis Korporasi

Saat ini, tantangan persaingan di industri pembiayaan meningkat, seiring dengan kondisi pasar otomotif yang mengalami perlambatan karena pengaruh perekonomian nasional.

Di tengah kelesuan ekonomi yang melanda, Perseroan dapat membukukan Piutang Pembiayaan sebesar Rp3,050.23 miliar pada tahun 2025.

Jumlah piutang pembiayaan berdasarkan jenis pembiayaan pada tahun 2025, 2024 dan 2023 terlihat pada tabel di bawah ini.

which is realized through initiatives and business transitions towards digitalization. Through digital transformation, the Company will continue to provide the best service to customers.

The Company also implements a SFAP in accordance with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 to implement sustainable financing for financial service institutions, issuers and public companies.

Economic Performance

As previously explained, the Company carries out investment, working capital, multipurpose and other business activities based on the approval of OJK.

The business license as a financial institution owned by the Company is as stated in the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.994/KMK.017/1993 dated December 30, 1993 which has subsequently been amended by the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 dated 4 May 2004 and Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 dated December 9, 2010 in conjunction with the Copy of the Decision of the Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (“OJK”) No. KEP-806/NB.11/2022 dated December 12, 2022.

The Company has 2 business pillars, as follows:
1. Retail Business Unit
2. Corporate Business Unit

Currently, the challenge of competition in the finance company industry is increasing, in line with the condition of the automotive market which is experiencing a slowdown due to the influence of the national economy.

In the midst of the economic downturn, the Company was able to book Financing Receivables of Rp3,050.23 billion in 2025.

Total financing receivable based on the type of financing as of 2025, 2024 and 2023 is shown in the table below.

Total Piutang Pembiayaan / Total Financing Receivables

Keterangan	2023	2024	2025	Description
Piutang Pembiayaan (dalam miliar Rupiah)	2,615.29	3,094.02	3,050.23	Financing Receivables (in billion Rupiah)
Volume (dalam unit)	18,327	19,596	19,138	Volume (units)
Pendapatan Pembiayaan (dalam miliar Rupiah)	320.91	385.70	374.53	Financing Income (in billion Rupiah)

Pembiayaan Konsumen / Consumer Financing				
Keterangan	2023	2024	2025	Description
Piutang Pembiayaan Konsumen (dalam miliar Rupiah)	1,764.76	2,137.77	2,052.23	Consumer Financing Receivables (in billion Rupiah)
Volume (dalam unit)	18,069	19,245	18,740	Volume (units)
Pendapatan Pembiayaan Konsumen (dalam miliar Rupiah)	265.37	320.99	304.36	Consumer Financing Income (in billion Rupiah)

Sewa Pembiayaan / Finance Lease				
Keterangan	2023	2024	2025	Description
Piutang Sewa Pembiayaan (dalam miliar Rupiah)	850.53	956.25	998.00	Finance Lease Receivables (in billion Rupiah)
Volume (dalam unit)	258	351	398	Volume (units)
Pendapatan Sewa Pembiayaan (dalam miliar Rupiah)	55.54	64.71	70.17	Finance Lease Income (in billion Rupiah)

Rasio Keuangan yang Relevan Lainnya

Perseroan melakukan pemantauan secara ketat dan melaporkan ke manajemen secara berkala atas proyeksi rasio keuangan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap batas rasio sesuai ketentuan OJK.

Perbandingan kinerja rasio keuangan utama Perseroan dibandingkan dengan kinerja industri pembiayaan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Other Relevant Financial Ratios

The Company closely monitors and report it to the management of the financial ratio projection to ensure the compliance with the ratio limits stipulated by OJK regulation.

The comparison of the performance of the Company's main financial ratios compared to the performance of the industry in 2025 is as follows:

Rasio	Industri Industry	Perseroan The Company	Ratio
Financing Asset Ratio (FAR)	86.01%	91.21%	Financing Asset Ratio (FAR)
Rasio *Gearing*	2.18x	3.09x	Gearing Ratio
Rasio Modal Sendiri – Modal Disetor (MSMD)	320.23%	130.82%	Paid-up Capital - Equity Ratio
NPF- Net	0.77%	1.59%	NPF- Net
Rasio Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Terhadap Total Aset	4.17%	0.28%	Profit (Loss) Before Income Tax To Total Assets Ratio
Rasio Laba (Rugi) Bersih Terhadap Ekuitas	10.71%	0.39%	Net Profit (Loss) To Equity Ratio
Beban Operasional – Pendapatan Operasional (BOPO)	82.86%	98.55%	Operating Expense to Operating Income Ratio

Target dan Realisasi Tahun Buku

Di tengah perlambatan ekonomi global, meningkatnya tensi geopolitik, risiko inflasi, dan perubahan iklim, ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tumbuh 5,11%, lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2024 yang tumbuh 5,03%. Industri pembiayaan juga tumbuh lebih tinggi pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Pencapaian target dan proyeksi kinerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

Targeted and Realization for the Fiscal Year

Amid global economic slowdown, rising geopolitical tension, inflation risk, and climate change, Indonesia's economy in 2025 grew by 5.11%, higher than the achievement in 2024, which grew by 5.03%. The financing industry also experienced higher growth in 2025 compared to 2024. Target achievement and projections of the Company's performance are as follows:

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025 2025 Realization	Description
Piutang Pembiayaan - Bersih	3,019.72	2,876.23	Financing Receivables - Net
Jumlah Aset	3,254.19	3,153.53	Total Assets
Jumlah Liabilitas	2,509.66	2,409.52	Total Liabilities
Modal Ditempatkan & Disetor	568.74	568.74	Paid-Up Capital
Tambahan Modal Disetor	97.59	97.59	Additional Paid-Up Capital
Jumlah Ekuitas	744.54	744.01	Total Equity
Pendapatan	463.51	448.82	Income
Beban	461.03	440.28	Expenses
Laba Bersih Tahun Berjalan	1.88	2.89	Net Profit For The Year
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	1.88	0.01	Total Comprehensive Income For The Year

Target 2026

Manajemen Perseroan telah menyusun rencana untuk tahun 2026 dengan mempertimbangkan perkembangan industri otomotif, kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian baik dari segi makro maupun mikro.

2026 Targets

The Company's management has drawn up a plan for 2026 by considering the development of the automotive industry, current economic conditions and economic projections both in macro and micro terms.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Keterangan	Target 2026	Description
Piutang Pembiayaan - Bersih	3,039.28	Financing Receivables - Net
Jumlah Aset	3,182.31	Total Assets
Jumlah Liabilitas	2,436.01	Total Liabilities
Modal Ditempatkan & Disetor	568.74	Paid-Up Capital
Tambahan Modal Disetor	97.59	Additional Paid-Up Capital
Jumlah Ekuitas	746.29	Total Equity
Pendapatan	450.73	Income
Beban	447.50	Expenses
Laba Bersih Tahun Berjalan	2.07	Net Profit For The Year
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	2.07	Total Comprehensive Income For The Year

Kinerja Lingkungan Hidup

Perseroan senantiasa mengoptimalkan efisiensi penggunaan listrik dan air dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut disosialisasikan dalam berbagai kesempatan secara internal. Adapun paparan penggunaan listrik dan air sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Environmental Performance

The Company always optimizes the efficiency of using electricity and water in carrying out its business activities. This was socialized on various occasions internally. The disclosure to electricity and water usage throughout 2025 is as follows:

No	Jaringan Kantor Office Network	Air Water (m^3)	Listrik Electricity (kWh)
1.	Kantor Pusat / Head Office	-	69,551
2.	Jakarta Pusat	-	37,259
3.	Jakarta Utara	884	22,168
4.	Jakarta Selatan	-	18,708
5.	Surabaya	213	16,399
6.	Tangerang	176	17,687
7.	Bekasi	1.002	22,493
8.	Bandung	57	12,165
9.	Medan	258	32,331
10.	Palembang	293	21,800
11.	Bogor	157	18,892
12.	Pekanbaru	-	29,464
13.	Samarinda	-	22,038
14.	Makassar	-	16,867
15.	Malang	233	10,775
16.	Jakarta Timur	-	22,041
17.	Cikarang	576	19,568
18.	Depok	-	25,189
19.	Tangerang	430	22,106
20.	Jambi	-	17,517
21.	Kediri	-	16,894
22.	Lamongan	342	15,593
23.	Denpasar	432	16,022
24.	Lampung	-	17,256
25.	Pontianak	137	10,971
26.	Banjarmasin	154	18,005
27.	Jakarta Barat	-	16,054
28.	Cimahi	441	12,595
29.	Balikpapan	90	22,040
30.	Surakarta	158	13,996
31.	Yogyakarta	-	12,595
32.	Semarang	109	15,743

Mekanisme Pengolahan Limbah dan Efluen

Sebagai perusahaan pembiayaan, kegiatan usaha yang dikelola Perseroan sehari-hari tidak menghasilkan efluen atau limbah yang mencemari lingkungan.

Waste and Effluent Treatment Mechanism

As a financing company, the daily business activities managed by the Company do not produce effluent or waste that pollutes the environment.

Laporan Emisi Gas Rumah Kaca dan Intensitas Emisi GRK
Greenhouse Gas (GHG) Emissions Report and GHG Emission Intensity

Perseroan hingga saat ini masih berada pada tahap wacana untuk dapat menyajikan data yang dimintakan secara akuntabel.

The Company is still at the conceptual stage of being able to present the requested data in an accountable manner.

Komitmen Perusahaan untuk Mencapai Target *Net Zero Emission* dan Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca
The Company's Commitment to Achieving Net Zero Emission Targets and Reducing Greenhouse Gas (GHG) Emissions

Perseroan belum memiliki rencana yang spesifik terkait komitmen untuk mendukung upaya pencapaian target Net Zero Emission serta pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

The Company does not yet have a specific plan regarding its commitment to supporting efforts to achieve Net Zero Emission targets and reduce Greenhouse Gas (GHG) emissions.

Kinerja Sosial

Perseroan melihat Sumber Daya Manusia ("SDM") sebagai aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan operasi dan bisnis yang dijalankan. Sebagai Perusahaan di sektor pembiayaan, kualitas SDM yang baik senantiasa menjadi penentu dari kualitas produk dan layanan yang diberikan Perseroan. Terkait hubungan kerja dengan karyawan, Perseroan berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik terkait ketenagakerjaan, maupun kesehatan dan keselamatan kerja.

Social Performance

The Company believes that Human Resources ("HR") is an important aspect that cannot be separated from the growth of its operations and business. As a Company in the financing sector, the quality of good HR has always been the determinant of the quality of products and services provided by the Company. Regarding work relations with employees, the Company adheres to the prevailing laws and regulations, both related to employment, as well as occupational health and safety.

Perseroan juga memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada mereka yang kompeten dan memiliki integritas tinggi yang selalu menjunjung etos kerja dan kejujuran. Pada tahun 2025, Perseroan telah merekrut 133 orang karyawan baru untuk berbagai posisi. Dalam proses rekrutmen, Perseroan fokus pada kualifikasi berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan agar Perseroan memiliki SDM yang berkualitas serta dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara baik.

The Company also provides equal opportunities to work for those with competence and high integrity who always uphold the work ethic and honesty. In 2025, the Company has recruited 133 new employees for various positions. In the recruitment process, the Company focuses on competency- based qualifications that are tailored to the needs and plans that have been determined. This is done so that the Company has competent HR that could carry out its responsibilities properly.

Berikut disampaikan karyawan yang masuk dan keluar di sepanjang tahun 2025, serta tingkat perputaran karyawan dan perbandingannya dengan tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

The following presents the number of employees who joined and resigned during 2025, as well as the employee turnover rate and its comparison with 2024 and 2023, as follows:

Tingkat Perputaran Karyawan / Employee Turnover Rate

Keterangan	2023	2024	2025	Information
Jumlah Karyawan awal Tahun (Orang)	664	711	767	Total Employees at the beginning of Year (People)
Rekrutmen Karyawan Baru (Orang)	198	189	133	New Employees Recruitment (People)
Karyawan yang Berakhir Hubungan Kerjanya (Orang)	151	134	149	Employees Who Have Ended Their Employment Relationship (People)
Jumlah Karyawan Akhir Tahun (Orang)	711	767	751	Total Employees at the End of the year (People)
Tingkat Perputaran Karyawan (%)*	22.00	17.90	19.15	Employees Turnover Rate (%)

*) Penyajian angka tahun 2023 dan 2024 dinyatakan kembali karena adanya pengkinian data.
Figures for 2023 and 2024 have been restated due to data updates.

Kesetaraan Kesempatan Bekerja

Perseroan senantiasa memastikan kesetaraan kesempatan bekerja tanpa adanya diskriminasi atas *gender*, golongan, suku maupun ras tertentu. Perseroan menjalankan proses rekrutmen secara transparan, independen dan didasarkan pada kualifikasi serta kompetensi. Prinsip kesetaraan kesempatan bekerja merupakan pedoman utama Perseroan dalam memilih individu terbaik untuk bergabung menjadi karyawan Perseroan.

Equal Employment Opportunity

The Company always ensures equal opportunity in employment with no discrimination on gender, class, or ethnicity. The Company carries out the recruitment process in a transparent, independent manner and is solely based on qualifications and competence. The principle of equal employment opportunities is the main guideline for the Company in selecting the best individuals to join in as Company employees.

S-01 Kesetaraan Gender
S-01 Gender Diversity

Level Jabatan Job positions	Laki-Laki Male		Perempuan Female	
	Jumlah pegawai Number of employees	Persentase pegawai Percentage of employees	Jumlah pegawai Number of employees	Persentase pegawai Percentage of employees
Entry-level	384	64.54%	113	72.44%
Mid-level	148	24.87%	37	23.72%
Senior-level	52	8.74%	5	3.20%
Executive-level	11	1.85%	1	0.64%
Total Pegawai / Total Employee	**595**	**100.00%**	**156**	**100.00%**

S-02 Jumlah level pegawai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur
S-02 Employees Level by Gender and Age Group

Rentang Usia (tahun) Age Group (years)	Level Jabatan Job Levels								Jumlah Pegawai Number of employees
	Entry-level		*Mid-level*		*Senior-level*		*Executive-level*		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
18-25	21	15	1	1	-	-	-	-	38
25-35	158	76	45	23	9	1	-	-	312
35-45	147	21	57	9	18	3	-	-	255
45-55	49	5	43	3	32	1	2	-	135
>55	5	-	2	1	2	1	-	-	11

S-04 Jumlah Pegawai Sementara
S-04 Temporary Worker

Deskripsi Description	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan) Number of employees (in reporting year)	Persentase (dalam tahun pelaporan) Percentage (in reporting year)
Jumlah Pegawai perusahaan yang dipegang oleh kontraktor dan/atau konsultan Total company headcount held by contractors and/or consultants	7 Pegawai employees	0.93%

Kebijakan Mengenai Pekerja Anak dan/atau Pekerja Paksa

Policy on The Prevention of Child Labor and Forced Labor

Perseroan tidak mempekerjakan pekerja anak maupun pekerja paksa. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Perusahaan yang menetapkan batas usia minimum karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Company does not employ child labor or forced labor. This is stipulated in the Company Regulations, which establish the minimum employee age in accordance with applicable laws and regulations.

Perbandingan Gaji Pokok di Level Terendah dengan Upah Miminum Kabupaten/Kota (UMK)

Comparison of Basic Salary at the Lowest Level with The Regency/City Minimum Wages (UMK)

Besaran remunerasi yang diberikan Perseroan kepada pekerja telah memenuhi peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Selain itu, besaran gaji pokok dari pekerja tetap baik wanita maupun pria di level terendah masih lebih besar dari besaran UMK yang berlaku di seluruh wilayah Kantor Cabang di Indonesia.

The amount of remuneration given by the Company to employees had met the employment regulations in Indonesia. Furthermore, the amount of the basic salary of permanent workers, both women and men at the lowest level, was still greater than the UMK which applied in all Branch Offices in Indonesia.

Persentase gaji pokok pekerja tetap pada tingkat terendah terhadap UMK.

Percentage of basic salary for permanent workers at the lowest level against the UMK.

No	Lokasi Kantor Office Location	UMK 2025 (Rp)	Persentase Percentage
1	Bandung	4,482,914	106.16%
2	Bekasi	5,690,753	105.29%
3	Bogor	5,126,897	106.46%
4	Cikarang	5,599,593	107.69%
5	Jakarta Barat	5,396,761	102.58%
6	Jakarta Pusat	5,396,761	102.58%
7	Jakarta Selatan	5,396,761	102.58%
8	Jakarta Timur	5,396,761	104.34%
9	Jakarta Utara	5,396,761	102.58%
10	Kabupaten Lamongan	3,012,164	156.73%
11	Kota Balikpapan	3,701,509	100.20%
12	Kota Bandar Lampung	3,305,367	105.59%
13	Kota Banjarmasin	3,599,182	112.11%
14	Kota Cimahi	3,863,692	109.66%
15	Kota Denpasar	3,298,117	105.91%
16	Kota Depok	5,195,722	105.05%
17	Kota Jambi	3,607,223	108.81%
18	Kota Kediri	2,572,361	111.14%
19	Kota Pontianak	3,024,820	107.18%
20	Kota Samarinda	3,780,304	111.74%
21	Kota Semarang	3,454,827	116.79%
22	Kota Surakarta	2,416,560	118.31%
23	Kota Yogyakarta	2,655,042	107.68%
24	Makassar	3,880,137	110.54%
25	Malang	3,507,683	114.61%
26	Medan	4,014,072	106.85%
27	Palembang	3,916,635	109.51%
28	Pekanbaru	3,675,938	113.52%
29	Surabaya	4,961,753	104.52%
30	Tangerang	5,069,708	106.00%
31	Tangerang	4,974,392	108.03%
32	Kantor Pusat / Head Office	5,396,761	102.58%

Kebijakan Terkait Pelecehan Seksual dan/Atau Non-Diskriminasi
Policy on Sexual Harassment and/or Non-Discrimination

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pelecehan seksual dan/atau non-diskriminasi yang diatur dalam Peraturan Perusahaan.

The Company has established policies concerning sexual harassment and/or non-discrimination as stipulated in the Company Regulations.

Kebijakan Mengenai Hak Asasi Manusia
Human Rights Policy

Perseroan belum memiliki kebijakan yang secara khusus mengatur hak asasi manusia. Namun demikian, prinsip-prinsip terkait hal tersebut telah tercakup dalam Peraturan Perusahaan yang disosialisasikan secara berkala kepada karyawan.

The Company has not yet established a specific policy governing human rights. However, the relevant principles have been incorporated into the Company Regulations, which are regularly communicated to employees.

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Throughout 2025 there was no human rights violations.

Kebijakan Mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja Serta Lingkungan Kerja Yang Aman dan Layak
Policy on Occupational Health And Safety and A Safe and Decent Work Environment

Perseroan telah menerapkan kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan kerja dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penyediaan program Jaminan Sosial bagi seluruh karyawan. Selain itu, Perseroan juga memberikan perlindungan tambahan melalui program asuransi di luar jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara.

The Company has implemented policies on occupational health and safety in accordance with applicable laws and regulations, including the provision of Social Security programs for all employees. In addition, the Company provides supplementary protection through insurance programs beyond those administered by the state.

Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman

Perseroan percaya bahwa tempat kerja yang layak dan lingkungan yang kondusif akan mendorong iklim kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja (“K3”) didukung oleh manajemen dan seluruh karyawan mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Decent and Safe Work Environment

The Company believes that providing a decent workplace and conducive environment will foster a working climate that ultimately enhances employee productivity. The implementation of occupational health and safety (“K3”) programs is supported by management and all employees, in accordance with the prevailing Labor Laws.

Keselamatan kerja tercermin dari penataan ruang kantor yang mengacu pada beberapa hal, seperti kelengkapan dan kelayakan sarana seperti ruangan kerja, tempat ibadah, ruangan tunggu konsumen dan toilet, maupun lingkungan kerja yang nyaman seperti suhu ruangan kerja yang diatur serta ventilasi udara yang di jaga agar kesejukan dan kesegarannya dapat dinikmati oleh seluruh karyawan. Perseroan juga mengajak partisipasi seluruh karyawan didalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan cara menjalankan program 5R yang terdiri dari :

Work safety is reflected in the arrangement of office space which refers to several things, such as the completeness and appropriateness of facilities such as workspaces, prayer rooms, consumer waiting rooms and toilets, as well as a comfortable working environment such as regulated work room temperature and air ventilation that is kept cool and its freshness can be enjoyed by all employees. The Company also invites the participation of all employees in creating a safe and healthy work environment by running the 5R program, which consists of:

1. Ringkas : Selalu memilah dan memilih lalu membuang barang – barang yang telah tidak dipergunakan
2. Rapi : Selalu menetapkan tata letak barang – barang untuk tujuan mudah dijangkau apabila diperlukan
3. Resik : Selalu membersihkan tempat kerja
4. Rawat : Selalu merawat kebiasaan diri dan kondisi lingkungan kerja yang telah baik untuk menjadi semakin baik
5. Rajin : Selalu mematuhi seluruh aturan yang ada dan rajin menerapkan 4 komponen R yang lain

1. Simple : Always sort and choose then throw away items that are not used
2. Organized : Always set item layout - goods for easy-to-reach purposes if needed
3. Clean : Always clean the workspace
4. Maintain : Taking care of work environment and always focus for betterment
5. Diligent : Always comply with all existing rules and diligently apply the other 4R component

Untuk menghindari kecelakaan serta potensi kerugian maka Perseroan menyiapkan perangkat pemadam kebakaran yang sesuai standar dan dengan jumlah yang memadai di ruangan kantor. Perawatan peralatan pemadam secara berkala dilakukan sesuai standar dan pada masa waktu pakai peralatan tersebut.

To avoid accidents and potential losses, the Company prepares fire extinguisher equipment according to standards and with an adequate number office space. Periodic maintenance of extinguisher equipment is carried out according to standards and during the life of the equipment.

Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi sepanjang 2025 :

Number of work accidents that occurred throughout 2025:

S-06 Jumlah Kecelakaan Kerja
S-06 Injury Rate

Frekuensi kecelakaan kerja dari total pegawai Frequency of work-related accidents of total Employees (in reporting year)	Persentase kecelakaan kerja serius yang berakibat cedera serius dan fatal dari total pegawai Percentage of serious work-related accidents resulting in serious and fatal injuries from total employees
2	0.27%

Pengembangan Kompetensi Karyawan
Employee Competency Development

Perseroan senantiasa mengembangkan materi dan sarana pelatihan untuk semua karyawan. Beberapa metode yang digunakan dalam penyampaian materi-materi pelatihan, yaitu melalui *video learning, video conference* dan *e-learning.* Pengembangan SDM tidak hanya dilakukan melalui pelatihan tatap muka, baik secara langsung maupun *virtual*, namun juga melalui *on the job training, tutoring, rotasi, coaching, counseling dan mentoring*. Materi-materi yang disiapkan tidak hanya berorientasi pada industri pembiayaan saja, namun juga materi *soft skills* seperti kepemimpinan, pengembangan kepribadian, dan komunikasi. Media *e-learning* menjadi salah satu solusi dan strategi yang ditempuh untuk pembelajaran yang berkelanjutan.

The Company continues to develop training materials and tools for all employees. Several methods are used in the delivery of training materials, namely through video learning, video conferencing, e-learning. Human resource development is not only done through face-to-face training, both in person and virtual, but also through on-job training, tutoring, rotation, coaching, counseling, and mentoring. The materials prepared are not only oriented towards the financing industry, but also soft skills materials such as leadership, personality development, and communication. E-learning media is one of the solutions and strategies adopted for continuous learning.

Perseroan senantiasa menyelenggarakan kegiatan alih Pengetahuan tenaga kerja asing (“TKA”) kepada tenaga kerja lokal lainnya guna proses didalam alih pengetahuan (*transfer of knowledge*).

The Company always organizes knowledge transfer activities for foreign workers (“TKA”) to other local workers for the process of transfer of knowledge.

Program pelatihan sepanjang 2025 dapat ditemukan pada halaman 68. Berikut adalah rangkuman pelatihan dan pengembangan pegawai.

The training program throughout 2025 can be found on page 68. The Employee Training and Development Programs are summarized as follows.

S-05 Pelatihan dan Pengembangan Pegawai
S-05 Employee Training and Development

Rata-rata jam pelatihan per pegawai dalam tahun Pelaporan Average training hour per employee (in reporting year)	Jumlah pegawai yang ikut serta dalam program pelatihan Total employee attending company training program	Persentase jumlah pegawai yang ikut serta dalam pelatihan Percentage of employee attending company training program
36.2 jam/pegawai hours/employee	3.214	100%

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Corporate Social and Environmental Responsibility Activity

Pada tanggal 22 Oktober 2025, Perseroan menyelenggarakan program Literasi Keuangan bagi 135 siswa dan guru di SMK Negeri 54, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan bukan sekadar pemenuhan kewajiban terhadap POJK No. 3 Tahun 2023, melainkan inisiatif Perseroan dalam dukungan Perseroan dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

On October 22, 2025, the Company conducted Financial Literacy program for 135 students and teachers at SMK Negeri 54, Jakarta. This activity was not merely a fulfillment of obligations under POJK No. 3 of 2023, but also an initiative of the Company’s support in increasing public understanding of financial products and services.





Dalam kegiatan ini, Perseroan juga merealisasikan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan memberikan bantuan sarana pendukung proses belajar-mengajar yang diserahkan langsung kepada Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 54, Jakarta, Ibu Titi Setyaningsih. Perseroan merealisasikan anggaran biaya program kegiatan Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar Rp3.946.100. Perseroan berharap kontribusi ini dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan potensi sumber daya manusia unggul di kalangan generasi muda Indonesia.

During this activity, the Company also realized Corporate Social and Environmental Responsibility Program by providing support facilities for the teaching and learning process, which were handed over directly to the Vice Principal of SMK Negeri 54, Jakarta, Mrs. Titi Setyaningsih. The Company allocated a budget of Rp3,946,100 for this Environmental and Social Responsibility activity. The Company hopes this contribution will be a catalyst in improving the quality of education and developing the potential of superior human resources among Indonesia's younger generation.

Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan
Responsibility for Sustainable Finance Product Developments and/or Services

Sesuai dengan RAKB 5 (Lima) tahun yang telah disusun, maka Perseroan menargetkan untuk mulai melakukan beberapa kajian terkait permintaan pasar terhadap produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, kesesuaian produk dan/atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan, dan pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan di tahun 2025.

In accordance with the 5 (Five) year SFAP that has been prepared, the Company is targeting to start conducting several studies related to market demand for sustainable financial products and/or services, the suitability of existing products and/or services with the criteria for sustainable business activities, and development of sustainable financial products and/or services in 2025.

Perlakuan Setara untuk Konsumen

Konsumen merupakan salah satu pemangku kepentingan utama Perseroan. Kehadiran mereka sangat menentukan perkembangan dan keberlangsungan Perseroan.

Semakin banyak konsumen yang berhasil diraih dan kepercayaannya terjaga, apalagi dengan adanya konsumen setia yang telah menjadi pelanggan, maka akan semakin terjamin keberlangsungan usaha Perseroan dan demikian sebaliknya. Karena posisi konsumen yang strategis, Perseroan tetap berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan yang terbaik dan setara kepada seluruh konsumen tanpa terkecuali.

Equal Treatment for Customers

Customer are one of the main stakeholders of the Company. Their presence greatly determines the development and sustainability of the Company.

The more customer who are successfully achieved and their trust is maintained, especially with loyal customers who have become customers, the more the continuity of the Company's business will be guaranteed and vice versa. Due to the strategic position of customers and, the Company remains committed to providing the best and equal products and services to all costumer without exception.

Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan
Service and Complaint Resolution Report

Jenis Produk dan/atau Layanan Type of Products/Services	Kategori Permasalahan Issue Category	Jumlah Amount	Status Penyelesaian Resolution Status		
			Selesai Settled	Tidak Selesai Unsettled	Dalam Proses On Progress
Pembiayaan Investasi berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Investment financing in the form of purchase with installment payments.	Permasalahan Asuransi Objek Pembiayaan Issues Related to Insurance of Financed Assets	1	1	0	0
Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments	Kegagalan/ keterlambatan transaksi Transaction Failure/Delay	4	4	0	0
Pembiayaan Investasi berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Investment financing in the form of purchase with installment payments.	Jumlah Tagihan Bill Amount	4	4	0	0

Jenis Produk dan/atau Layanan Type of Products/Services	Kategori Permasalahan Issue Category	Jumlah Amount	Status Penyelesaian Resolution Status		
			Selesai Settled	Tidak Selesai Unsettled	Dalam Proses On Progress
Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments	Permasalahan Asuransi Objek Pembiayaan Issues Related to Insurance of Financed Assets	2	2	0	0
Pembiayaan Investasi berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Investment financing in the form of purchase with installment payments.	Permasalahan Agunan/Jaminan Collateral/Guarantee Issues	2	2	0	0
Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments	Permasalahan Agunan/Jaminan Collateral/Guarantee Issues	1	1	0	0
Pembiayaan Investasi berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Investment financing in the form of purchase with installment payments	Kegagalan/ keterlambatan transaksi Transaction Failure/ Delay	5	5	0	0
Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments	Denda/Penalti Fines/Penalties	2	2	0	0
Pembiayaan Investasi berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Investment financing in the form of purchase with installment payments	Perbedaan perhitungan bunga atau pokok Discrepancy in interest or principal calculation	1	1	0	0
Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments	Sistem Layanan Informasi Keuangan Financial Information Services System	1	1	0	0
Pembiayaan Investasi berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Investment financing in the form of purchase with installment payments	Lainnya (Buka Blokir Kendaraan) Others (Unblocking Vehicle)	2	2	0	0
Pembiayaan Modal Kerja berupa Jual dan Sewa-Balik *(Sale and Leaseback)* Working Capital Financing in the form of Sale and Leaseback	Lainnya (Proses Penarikan Kendaraan) Others (Vehicle Repossession Process)	1	1	0	0
Pembiayaan Investasi berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Investment financing in the form of purchase with installment payments	Lainnya (Terganggu sabagai kontak darurat) Others (Contacted as an emergency contact)	2	2	0	0

Jenis Kegiatan Activities	Jenis Produk dan/atau Layanan Type of Products/Services	Kategori Permasalahan Issue Category	Jumlah Amount	Status Penyelesaian Resolution Status		
				Selesai Settled	Tidak Selesai Unsettled	Dalam Proses On Progress
Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments		Lainnya (Kesalahan Pengiriman Pengaduan (Perbedaan Perusahaan) Others (Incorrect Complaint Submission – Different Company)	1	1	0	0
Pembiayaan Investasi berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Investment financing in the form of purchase with installment payments		Lainnya (Kelanjutan Pengajuan Kredit) Others (Continuation of Credit Application)	2	2	0	0
Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments		Lainnya (Proses Survey) Others (Survey Process)	1	1	0	0
Pembiayaan Investasi berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Investment financing in the form of purchase with installment payments		Lainnya (Keberatan Penjamin) Others (Guarantor Objection)	1	1	0	0
Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments		Lainnya (Deposit) Others (Deposit)	1	1	0	0
Pembiayaan Investasi berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Investment financing in the form of purchase with installment payments		Lainnya (Kesalahpahaman debitur) Others (Debtor Misunderstanding)	1	1	0	0
Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments		Lainnya (Penarikan Kendaraan) Others (Vehicle Repossession)	2	2	0	0
Pembiayaan Investasi berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Investment financing in the form of purchase with installment payments		Lainnya (Pemalsuan Identitas) Others (Identity Fraud)	2	2	0	0
Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments		Lainnya (Layanan) Others (Service)	1	1	0	0
Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments		Lainnya (Proses Penagihan) Others (Collection Process)	3	3	0	0

Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Customer Satisfaction Survey on Sustainable Finance Products and/or Services

Keterangan Description	2025
Jumlah Responden / Number of Respondents	50
Indeks Kepuasan Pelanggan / Customer Satisfaction Index	92,92%
Total Responden yang Menerima Survei Total Respondents Who Received The Survey	76





Referensi Kriteria POJK No. 51/POJK.03/2017

Criteria Reference pursuant to POJK No. 51/POJK.03/2017

No	Uraian Description		Halaman Page
1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	Explanation of Sustainability Strategy	199
2	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	Performance Overview of Sustainability Aspect	218
	a. Aspek ekonomi, paling sedikit meliputi: 1. Kuantitas produksi atau jasa yang dijual; 2. Pendapatan atau penjualan; 3. Laba atau rugi bersih; 4. Produk ramah lingkungan; dan 5. Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan.	a. Economic aspect, at least includes: 1. Quantity of products and services sold; 2. Revenue or sales; 3. Net profit or loss; 4. Environment-friendly products; and 5. Engangement of local party related to business process of Sustainable Finance.	218
	b. Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit meliputi: 1. Penggunaan energi (antara lain listrik dan air); 2. Pengurangan emisi yang dihasilkan Perseroan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup; 3. Pengurangan limbah dan efluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan Perseroan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup; atau 4. Pelestarian keanekaragaman hayati bagi Perseroan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup.	b. Environmental aspect, at least includes: 1. Energy consumption (including electricity and water); 2. Reduction of emission generated by a Company in which its business process directly related to environment; 3. Reduction of waste and effluent (waste entering environment) generated by a Company in which its business process directly related to environment; or 4. Biodiversity conservation for a Company in which its business process directly related to environment.	218
	c. Aspek sosial yang merupakan uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana).	c. Social aspect, which is a description of positive and negative impacts of implementing Sustainability Finance for community and environment (including people, area, and fund).	218
3	Profil Singkat Perseroan	Brief Company Profile	36,195
	a. Visi, misi, dan nilai keberlanjutan Perseroan;	a. Corporate vision, mission, and sustainable values;	195
	b. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik (*e-mail*), dan situs web, serta kantor cabang dan/ atau kantor perwakilan Perusahaan;	b. E-mail address, website, and addresses of branch offices and/or representative office of the Company;	37,95
	c. Skala usaha Perusahaan secara singkat, meliputi:	c. Brief Company's business scale includes:	
	1. Total aset atau kapitalisasi aset, dan total liabilitas (dalam jutaan rupiah);	1. Total assets or asset capitalization, and total liabilities (in million rupiah);	5,75,234
	2. Jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan;	2. Total employees classified by gender, position, age, education, and employment status;	66,67,218, 236,237
	3. Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah); dan	3. Percentage of shareholding (public and government); and	63
	4. Wilayah Operasional	4. Area of operations.	40,41
	d. Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;	d. Brief description of products, services, and business operations;	38,39
	e. Keanggotaan pada asosiasi;	e. Membership in associations;	71
	f. Perubahan Perusahaan yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.	f. Significant changes of the Company, including those related to closing or opening branch(es), and ownership structure.	40,41,61

No	Uraian Description		Halaman Page
4	Penjelasan Direksi	Board of Directors' Explanation	220-226
	a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi: 1. Penjelasan nilai keberlanjutan bagi Perusahaan; 2. Penjelasan respon Perusahaan terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan; 3. Penjelasan komitmen pimpinan Perusahaan dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan; 4. Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan 5. Tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.	a. Policy to respond challenges to comply with a sustainability strategy, at least includes: 1. Explanation of sustainability values for the Company; 2. Explanation of the Company's responses to issues related to Sustainable Finance implementation; 3. Explanation of commitment of the Company's leaders to achieve targets of Sustainable Finance implementation; 4. Performance achievements of Sustainable Finance implementation; 5. Challenges on performance achievement of Sustainable Finance implementation;	221
	b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi: 1. Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target; dan 2. Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi Perusahaan yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan).	b. Sustainable Finance implementation, at least includes: 1. Performance achievement of Sustainable Finance implementation (economic, social, and environmental aspects) compared with targets; and 2. Explanation of achievements and challenges, including important events during the reporting period (for a Company required to make an Sustainable Finance Action Plan).	223
	c. Strategi pencapaian target, paling sedikit meliputi: 1. Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup; 2. Pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan 3. Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan Perusahaan.	b. Strategy for achieving targets, at least includes: 1. Risk management of implementation Sustainable Finance related to economic, social, and environmental aspects; 2. Opportunities utilization and business prospect; and 3. Explanation of external economic, social, and environmental conditions potentially affecting the Company's sustainability.	225

No	Uraian Description		Halaman Page
5	Tata Kelola Keberlanjutan	Sustainability Governance	228, 229
	a. Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/ atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	a. Explanation of duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners, employee, executive, and/or work unit to be responsible for Sustainable Finance implementation.	228, 229
	b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/ atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	b. Explanation of competence development for members of Board of Directors and Board of Commissioners, employee, executive, and/or work unit to be responsible for Sustainable Finance implementation.	230
	c. Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko perusahaan.	c. Explanation of the Company's procedure in identifying, measuring, monitoring, and controlling risks of Sustainable Finance implementation related to economic, social, and environmental aspects, including roles of the Board of Directors and the Board of Commissioners in managing, reviewing periodically, and evaluating effectiveness of the Company's risk management process.	230
	d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi: 1. Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian *(assessment)* manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya; dan 2. Pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.	d. Explanation of stakeholders, includes: 1. Engagement of stakeholders based on result of assessment on the management, GMS, decree, or others; and 2. Approach with used by the Company to engage stakeholders in Sustainable Finance implementation, among others, in the form of dialog, survey, and seminar.	230
	e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.	e. Problems encountered, developments, and influence toward implementing Sustainable Finance.	230
6	Kinerja Keberlanjutan	Sustainability Performance	231
	a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal Perseroan.	a. Explanation of activities in building the culture of sustainability within the Company.	231
	b. Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 tahun terakhir meliputi: 1. Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan; dan 2. Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.	b. Explanation of economic performance in the last 3 years, includes: 1. Comparison between target and performance of production, portfolio, financing target, or investment, revenue and profit/loss in terms of the Sustainability Report are prepared separately from the Annual Report; and 2. Comparison between target and performance of portfolio, financing target, or investment of financial instruments or projects which are in line with the implementation of Sustainable Finance.	231

No	Uraian Description		Halaman Page
	c. Kinerja sosial dalam 3 tahun terakhir: 1. Komitmen Perusahaan untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen. 2. Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat: a. Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak; b. Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional; c. Lingkungan bekerja yang layak dan aman; dan d. Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai. 3. Masyarakat, paling sedikit memuat: a. Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan; b. Mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan c. TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat.	c. Social performance in the last 3 years: 1. Company's commitment to providing consumers with equal products and/or services. 2. Employment, at least contains: a. Statement on equality of job opportunity and existence of forced labor and child labor; b. Percentage of permanent employee's lowest remuneration to regional minimum wage; c. Decent, safe workplace; and d. Training and development on employees' capability. 3. Community, at least contains: a. Information of activities or area of operations making positive and negative impacts on surrounding communities, including financial literacy and inclusion; b. Public complaint mechanism as well as total public complaints received and followed up; and c. Social and environmental responsibility which can be associated with support to the sustainable development goals, i.e. types and achievements of community empowerment programs.	236
	d. Kinerja Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat: 1. Biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan; 2. Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; dan 3. Uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat: a. Jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan b. Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan.	d. Environmental performance, at least contains: 1. Environmental cost spent; 2. Explanation of use of environment-friendly material, e.g. use of recycled material; and 3. Explanation of energy consumption, at least contains: a. Total and intensity of energy consumed; and b. Effort and achievement of energy efficiency pmplemented, including use of renewable energy.	235

No	Uraian Description		Halaman Page
	e. Kinerja Lingkungan Hidup bagi Perusahaan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup paling sedikit memuat: 1. Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d; 2. Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem; 3. Keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat: a. Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; dan b. Usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna. 4. Emisi, paling sedikit memuat: a. Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan b. Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan. 5. Limbah dan efluen, paling sedikit memuat: a. Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis; b. Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; dan c. Tumpahan yang terjadi (jika ada). 6. Jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan.	e. Environmental performance for a company in which its business process directly related to environment, at least contains: 1. Performance as referred to in item d; 2. Information of activities or area of operations making positive and negative impacts on surrounding environment, especially of effort for improving ecosystem carrying capacity. 3. Biodiversity, at least contains: a. Impacts from area of operations which is close to or located within a conservation area or an area having biodiversity; and b. Biodiversity conservation efforts, include flora or fauna species protection. 4. Emission, at least contains: a. Total and intensity of emission generated by type; and b. Efforts and achievements of emission reduction. 5. Waste and effluent, at least contains: a. Total waste and effluent generated by type; b. Mechanism of waste and effluent treatment; and c. Spills (if any). 6. Total and subjects of environmental complaints received and settled.	-
	f. Tanggung jawab pengembangan Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat: 1. Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan; 2. Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan; 3. Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif; 4. Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya; atau 5. Survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.	f. Responsibility for developing Products and/ or Services of Sustainable Finance, at least contains: 1. Innovations and development of Products and/ or Services of Sustainable Finance; 2. Total and percentage of products and services valuated in terms of their safety to customers; 3. Positive and negative impacts as the result of Products and/or Services of Sustainable Finance and their distribution processs, as well as mitigation measures taken to control negative impact; 4. Number of products withdrawn along with the reason; or 5. Customer satisfaction survey of Products and/or Services of Sustainable Finance.	241
7	Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.	Written verification of independent party, if any.	-

Lembar Umpan Balik
Feedback Form

Laporan ini menyajikan informasi terkait kinerja Perseroan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perseroan sangat mengharapkan kritik, masukan, atau saran dari Bapak/Ibu/Saudara untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan berikutnya.

This report presents information related to performance of the Company in economic, social, and environmental aspects. The Company welcomes your criticisms, feedback or suggestions for improving quality of the subsequent sustainable reports.

Pertanyaan Questions	Setuju Agree	Tidak setuju Disagree
Laporan Keberlanjutan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan Perseroan. This Sustainability Report has provided useful information on economic, social, and environmental performance of the Company.		
Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang. Data and information disclosed are easy to understand, complete, transparent, and balanced.		
Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan. Data and information presented are useful for making decision.		
Laporan ini menarik dan mudah dibaca. This report is interesting and easy to read.		

Mohon berikan nilai mengenai aspek yang terdapat dalam Laporan ini. (1 = paling penting, 2 = penting, 3 = tidak penting, 4 = sangat tidak penting).

Please score on aspects presented in this Report. (1 = most important, 2 = important, 3 = not important, 4 = very important).

- ☐ Kinerja Ekonomi / Economic Performance
- ☐ Ketenagakerjaan / Employment
- ☐ Pengelolaan Limbah / Waste Treatment
- ☐ Portofolio Produk / Product Portfolio
- ☐ Penggunaan Energi / Energy Consumption
- ☐ Privasi Nasabah / Customer Privacy
- ☐ Pelatihan dan Pendidikan / Training and Education
- ☐ Kesetaraan *Gender* dan Kesempatan Kerja yang Adil / Gender Equality and Fair Job Opportunity
- ☐ Anti Korupsi dan Anti *Fraud* / Anti-Corruption and Anti-Fraud
- ☐ Teknologi Informasi / Information Technology
- ☐ Kesehatan dan Keselamatan Kerja / Work Health and Safety
- ☐ Pengurangan Emisi / Emission Reduction

Mohon berikan komentar/saran/usulan bagi laporan ini / Please give your comments/suggestions/proposals for this report

.....
.....
.....
.....

Profil Anda / Your Profile

Nama / Name :
Pekerjaan / Occupation :
Nama Lembaga/Perusahaan / Name of Institution/Company :
Kontak (telepon, email) / Contact (phone, e-mail) :

Kategori Pemangku Kepentingan / Category of Stakeholder

- ☐ Investor / Investor
- ☐ Nasabah / Customer
- ☐ Pegawai / Employee
- ☐ Distributor / Distributor
- ☐ Media / Media
- ☐ Masyarakat / Public
- ☐ Pemerintah / Government
- ☐ Lain-lain, sebutkan / Others, please specify

.....

Saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam Laporan ini mohon dikirimkan kepada:
Please send your suggestion and response to information presented in this Report to:

Kantor Pusat / Head Office
Menara Astra 32nd Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220
Telp: +62 21 5085.1848 Fax: +62 21 5085.1849

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2025
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK

STATEMENT LETTER OF
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE 2025 ANNUAL REPORT
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

We the undersign below hereby declare that all information in the 2025 Annual Report of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk has been provided completely and are fully responsible for the accuracy of the content of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, April 2026

The statement is made in truthfulness.
Jakarta, April 2026

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Yasuo Imaizumi
Komisaris Utama
President Commissioner

Bhindawati Gunawan
Komisaris
Commissioner

Dani Hamdani
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi
Board of Directors

Takeshi Kurioka
Direktur Utama
President Director

Kenjiro Sawada
Direktur
Director

Yudi Gustiawan
Direktur
Director

Andi Harjono
Direktur
Director

Fransisca Yuliana Gunawan
Direktur
Director

Ryuji Tarumi
Direktur
Director

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN YANG TELAH DIAUDIT /
AUDITED ANNUAL FINANCIAL STATEMENT

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk

LAPORAN KEUANGAN/FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025/
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

	Halaman/ Page	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		**DIRECTORS' STATEMENT LETTER**
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**
LAPORAN KEUANGAN - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024		**FINANCIAL STATEMENTS** - For the years ended December 31, 2025 and 2024
Laporan Posisi Keuangan	1	Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas	4	Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas	5	Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan	6	Notes to Financial Statements
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN - Rasio-Rasio Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (Tidak Diaudit)	95	**SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION** - Financial Ratio of Financial Services Authority (Unaudited)

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Menara Astra 32nd Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6
Jakarta - 10220
t: +62 21 5085.1848
f: +62 21 5085.1849

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2025
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/ We, the undersigned:

1. Nama/ Name : Takeshi Kurioka
   Alamat kantor/ Office address : Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ Domicile as stated in ID card : Plaza Senayan Apartment Tower C Unit #131 Jl. Tinju No. 1, Kel. Gelora Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
   Nomor telepon/ Phone number : (021) 50851848
   Jabatan/ Position : Direktur Utama / President Director

2. Nama/ Name : Kenjiro Sawada
   Alamat kantor/ Office address : Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ Domicile as stated in ID card : Apartemen Plaza Senayan Tower Unit B#041 Lt4 Jl. Tinju No. 1, Gelora Bung Karno, Tanah Abang, Jakarta Pusat
   Nomor telepon/ Phone number : (021) 50851848
   Jabatan/ Position : Direktur/ Director

Menyatakan bahwa/ State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk's financial statements for the period ended December 31, 2025;
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the financial statements is complete and correct;
   b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;
4. We are responsible for the Company's internal control system.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 16 Maret 2026 / March 16, 2026

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
METERAI TEMPEL
10000
8AANX264202648

Takeshi Kurioka
Direktur Utama/President Director

Kenjiro Sawada
Direktur/Director

Deloitte.

Liana Ramon Xenia & Rekan
Registered Public Accountants
License No. 432/KM.1/2024
The Plaza Office Tower 32nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350
Indonesia

Tel: +62 21 5081 8000
Fax: +62 21 2992 8300
Email: iddttl@deloitte.com
www.deloitte.com/id

Laporan Auditor Independen

No. 00061/2.1460/AU.1/09/1626-4/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

No. 00061/2.1460/AU.1/09/1626-4/1/III/2026

To the Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Opinion

We have audited the financial statements of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Liana Ramon Xenia & Rekan ("LRX") is a member (as such term is used in Regulation of the Ministry of Finance Number 186/PMK.01/2021 and Regulation of the Financial Services Authority Number 9 of 2023 (the "Relevant Law")) of Deloitte Southeast Asia Limited ("DSEAL"). DSEAL is the registered Foreign Audit Organisation ("Organisasi Audit Asing" or "OAA") to LRX for the purposes of the Relevant Law.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") pada piutang pembiayaan (piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen)

Mengacu pada Catatan 3e Informasi kebijakan akuntansi material - Instrumen keuangan; Catatan 6 Piutang pembiayaan konsumen; Catatan 7 Piutang sewa pembiayaan; dan Catatan 37 Manajemen risiko - risiko kredit.

Pada 31 Desember 2025, Perusahaan memiliki piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp 2.052 miliar dan Rp 998 miliar. Cadangan KKE terhadap piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp 100 miliar dan Rp 74 miliar. Perusahaan mengimplementasikan ketentuan PSAK 109 Instrumen Keuangan untuk menghitung estimasi KKE atas eksposur kredit piutang pembiayaan.

Kami berfokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat piutang pembiayaan setelah nilai KKE yang mewakili 91,21% dari total aset Perusahaan. Penentuan KKE didasarkan pada beberapa asumsi yang kompleks dan subjektif dan juga pertimbangan yang digunakan oleh Manajemen. Lebih jauh, kondisi ekonomi dan geopolitik saat ini turut meningkatkan tingginya ketidakpastian atas estimasi dan tingkat pertimbangan yang dibutuhkan untuk digunakan dalam mengestimasi KKE. Dengan melihat faktor-faktor ini, kami mengidentifikasi KKE sebagai hal audit utama.

Perusahaan menghitung KKE untuk piutang pembiayaan yang tidak mengalami penurunan nilai maupun untuk yang mengalami penurunan nilai. Untuk piutang pembiayaan yang tidak mengalami penurunan nilai dan yang mengalami penurunan nilai, yang tidak dianggap signifikan secara individual, Perusahaan menilai KKE secara kolektif. Untuk piutang pembiayaan yang mengalami penurunan nilai, yang nilainya signifikan secara individual, Perusahaan menilai KKE secara individual.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:

Expected credit losses ("ECL") on financing receivables (finance lease receivables and consumer financing receivables)

Refer to Note 3e Material accounting policy information - Financial instruments; Note 6 Consumer financing receivables; Note 7 Finance lease receivables; and Note 37 Risk management - credit risk.

As of December 31, 2025, the Company has financing receivables comprising of consumer financing receivables and finance lease receivables amounting to Rp 2,052 billion and Rp 998 billion, respectively. Allowance for ECL against these consumer financing receivables and finance lease receivables amounted to Rp 100 billion and Rp 74 billion, respectively. The Company applies PSAK 109 Financial Instrument requirements to calculate the ECL for its financing receivables exposures.

We focused on this area due to the significance of the carrying value of financing receivables after its ECL representing 91.21% of the total assets of the Company. The determination of ECL is based on a number of complex and subjective assumptions and judgments used by Management. Further, the current economic and geopolitical condition have increased the uncertainty of these estimates and degree of judgment required to be exercised in estimating the ECL. In view of these factors, we identified ECL as a key audit matter.

The Company calculates ECL for both non-impaired and impaired financing receivables. For non-impaired and impaired financing receivables, which are not considered individually significant, the Company assesses ECL on a collective basis. For impaired financing receivables, which are considered individually significant, the Company assesses ECL on an individual basis.

a. KKE kolektif atas piutang pembiayaan

KKE kolektif atas piutang pembiayaan dihitung dengan mempertimbangkan probability of *default ("PD"), loss given default ("LGD"), exposure at default ("EAD").* Perusahaan menggunakan model yang bergantung pada data internal dan eksternal. Perhitungan KKE kolektif menggunakan pertimbangan dan asumsi yang signifikan; termasuk di dalamnya:

- Penilaian atas peningkatan risiko kredit secara signifikan (SICR) dan kriteria *default;*
- Ekspektasi atas faktor makro ekonomi masa depan dan skenario, termasuk penentuan bobot pertimbangannya; dan
- Asumsi model yang digunakan.

b. KKE individual atas piutang pembiayaan

KKE individual atas piutang pembiayaan dihitung dengan estimasi arus kas yang akan diterima di masa depan, dengan mengombinasikan beberapa skenario dan asumsi probabilitas tertimbang. Perhitungan KKE individual menggunakan pertimbangan manajemen dan asumsi yang signifikan, termasuk di dalamnya:

- Perkiraan atas arus kas masa depan yang diterima;
- Penilaian aset yang dijaminkan; dan
- Estimasi atas skenario, waktu untuk menerima pembayaran di masa depan dan bobot pertimbangannya.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespon hal audit utama:

a. KKE kolektif atas piutang pembiayaan

Kami memperoleh pemahaman mengenai pengendalian yang berhubungan dengan audit kami dan menilai desain dan implementasi dari pengendalian yang relevan atas KKE kolektif atas piutang pembiayaan.

Kami melibatkan spesialis internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur berikut ini dengan dasar sampel:

- Mengevaluasi kelayakan penilaian Perusahaan atas kriteria peningkatan risiko kredit secara signifikan;

a. Collective ECL on financing receivables

Collective ECL on financing receivables is calculated by considering the probability of default ("PD"), loss given default ("LGD") and exposure at default ("EAD"). The Company utilizes modelling which are reliant on internal and external data. The measurement of collective ECL involves significant management judgments and assumptions, including, among others:

- Assessment of significant increase in credit risk (SICR) and default criteria;
- Expectations of forward-looking macroeconomic factors and scenarios, including in determining the probability weightings; and
- The model assumptions used.

b. Individual ECL on financing receivables

Individual ECL on financing receivables is assessed by the estimation of future cash flows, combining scenarios and probability weightings assumptions. The measurement of individual ECL involves significant management judgments and assumptions, including, among others:

- Expected amount of future cash flows;
- Collateral valuations; and
- Estimations of the scenarios, timing to collect the future cash flows and its weighting.

How our audit addressed the key audit matter

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

a. Collective ECL on financing receivables

We obtained an understanding of the controls relevant to our audit and assessed the design and implementation of such relevant controls over the collective ECL on financing receivables.

We involved our internal specialist to assist us in performing the following procedures on a sampling basis:

- Evaluated the appropriateness of the Company's assessment of its SICR criteria;

- Menguji pendekatan Perusahaan dalam pemilihan skenario ekonomi untuk menilai kewajaran atas skenario ekonomi dan bobot pertimbangan yang diaplikasikan oleh Perusahaan;
- Menilai kewajaran atas pertimbangan dan asumsi utama yang dibuat oleh Manajemen pada model dan parameter dalam *probabilities of default (PD)* dan *loss given default (LGD)*;
- Melakukan validasi independen atas model KKE dan penilaian hasil validasi model oleh Manajemen.

Kami juga melakukan prosedur substantif berikut ini:

- Mengevaluasi masukan dan asumsi relevan yang digunakan oleh Perusahaan dalam model KKE secara basis sampel;
- Menghitung ulang KKE secara independen.

Kami telah menilai ketepatan atas pengungkapan terkait yang dibuat di dalam laporan keuangan.

b. KKE individual atas piutang pembiayaan

Kami memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang relevan terhadap audit kami dan menilai desain dan implemetasi pengendalian yang relevan atas KKE atas piutang pembiayaan.

Untuk sampel kami atas piutang pembiayaan yang dinilai secara individual, kami melakukan prosedur berikut:

- Menguji asumsi utama manajemen yang diterapkan dalam ekspektasi arus kas masa depan termasuk jumlah, waktu, dan probabilitas tertimbang yang digunakan;
- Melakukan perhitungan ulang KKE individual.

Kami telah menilai ketepatan atas pengungkapan terkait yang dibuat di dalam laporan keuangan.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

- Challenged the Company's approach for the selection of economic scenario to assess the reasonableness of the economic scenarios and corresponding weightages applied by the Company;
- Assessed the reasonableness of key judgments and assumptions made by management in the probabilities of default (PD) and loss given default (LGD) models and parameters;
- Performed independent validation of the ECL models and assessment of model validation results by management.

We also performed the following substantive testing:

- Evaluated relevant inputs and assumptions used by the Company in the ECL models, on a sampling basis;
- Independently recalculated the ECL.

We have assessed appropriateness of the related disclosures made in the financial statements.

b. Individual ECL on financing receivables

We obtained an understanding of the controls relevant to our audit and assessed the design and implementation of the controls of such relevant controls over the individual ECL on financing receivables.

For our selected samples of financing receivables that are individually assessed, we performed the following procedures:

- Challenged management's key assumptions applied on the expected future cash flows of the debtor, including amounts, timing, and probability-weighted outcome used;
- Recalculated the individual ECL.

We have assessed appropriateness of the related disclosures made in the financial statements.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above, when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya manjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

LIANA RAMON XENIA & REKAN



Bayu M. Dayat, CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 1626

16 Maret 2026/*March 16, 2026*

00061

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
		Rp'000	Rp'000	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	5			Cash and cash equivalents
Pihak berelasi	33	24.451.933	5.687.837	Related parties
Pihak ketiga		48.593.324	34.969.863	Third parties
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp 99.545.805 pada 31 Desember 2025 (2024: Rp 56.000.586)	6	1.952.687.844	2.081.769.148	Consumer financing receivables - net of allowance for expected credit losses of Rp 99,545,805 at December 31, 2025 (2024: Rp 56,000,586)
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp 74.459.549 pada 31 Desember 2025 (2024: Rp 76.451.006)	7	923.538.164	879.800.794	Finance lease receivables - net of allowance for expected credit losses of Rp 74,459,549 at December 31, 2025 (2024: Rp 76,451,006)
Piutang lain-lain - bersih	8			Other receivables - net
Pihak berelasi	33	2.178.048	2.652.802	Related parties
Pihak ketiga		108.854.755	94.572.910	Third parties
Biaya dibayar di muka	9			Prepaid expenses
Pihak ketiga		3.074.871	2.949.220	Third parties
Aset pajak tangguhan	19	16.043.831	15.758.424	Deferred tax assets
Aset hak-guna - bersih	10	25.045.630	29.344.088	Right-of-use assets - net
Aset tetap - bersih	11	42.041.405	48.322.103	Property and equipment - net
Aset derivatif	12	1.749.376	3.767.652	Derivative assets
Aset lain-lain	13			Other assets
Pihak berelasi	33	71.175	73.175	Related parties
Pihak ketiga		5.195.335	10.855.060	Third parties
JUMLAH ASET		**3.153.525.691**	**3.210.523.076**	**TOTAL ASSETS**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of these financial statements.

	Catatan/ *Notes*	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang bank	14			Bank loans
Pihak berelasi	33	1.764.582.255	1.864.742.184	Related parties
Pihak ketiga		532.280.156	482.675.377	Third parties
Utang usaha	15			Trade payables
Pihak ketiga		239.490	4.490.658	Third parties
Utang lain-lain	16			Other payables
Pihak ketiga		53.991.026	58.225.524	Third parties
Biaya masih harus dibayar	17			Accrued expenses
Pihak berelasi	33	3.866.897	937.028	Related parties
Pihak ketiga		9.355.828	8.424.336	Third parties
Utang pajak	18	850.628	751.117	Taxes payables
Liabilitas sewa	20	21.466.871	24.620.644	Lease liabilities
Liabilitas imbalan pasca-kerja	21	22.880.826	21.660.141	Post-employment benefits liabilities
JUMLAH LIABILITAS		**2.409.513.977**	**2.466.527.009**	**TOTAL LIABILITIES**
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham Modal dasar - 10.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.687.353.997 saham	22	568.735.400	568.735.400	Share capital - par value Rp 100 (in full Rupiah) per share Authorized capital - 10,000,000,000 shares Issued and fully paid - 5,687,353,997 shares
Tambahan modal disetor	23	97.585.106	97.585.106	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lain		(6.744.504)	(3.867.512)	Other equity components
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		1.800.000	1.800.000	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		82.635.712	79.743.073	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS		**744.011.714**	**743.996.067**	**TOTAL EQUITY**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**3.153.525.691**	**3.210.523.076**	**TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of these financial statements.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

	Catatan/ *Notes*	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
PENDAPATAN				INCOME
Pembiayaan konsumen	24	304.362.168	320.987.712	Consumer financing
Sewa pembiayaan	25	70.174.838	64.713.504	Finance leases
Administrasi dan provisi	26	41.322.294	53.010.206	Administration and provision
Penalti	27	17.579.792	19.734.034	Penalty
Bunga		338.481	351.787	Interest
Pendapatan lain-lain	28	15.044.336	9.856.463	Other income
JUMLAH PENDAPATAN		**448.821.909**	**468.653.706**	**TOTAL INCOME**
BEBAN				EXPENSES
Bunga dan keuangan	29	(130.201.082)	(134.316.036)	Interest and financing charges
Kepegawaian	30	(126.895.753)	(126.182.821)	Personnel
Penyisihan kerugian penurunan nilai	6,7,8	(127.773.415)	(152.059.696)	Provision for impairment losses
Umum dan administrasi	31	(55.408.013)	(60.684.352)	General and administrative
Beban lain-lain		-	(447.074)	Other expenses
JUMLAH BEBAN		**(440.278.263)**	**(473.689.979)**	**TOTAL EXPENSES**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**8.543.646**	**(5.036.273)**	**PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX**
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN				**INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT**
Beban pajak kini	19d	(5.124.955)	-	Current tax expense
(Beban) manfaat pajak tangguhan	19	(526.052)	2.880.608	Deferred tax (expense) benefit
JUMLAH (BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		**(5.651.007)**	**2.880.608**	**TOTAL INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT**
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		**2.892.639**	**(2.155.665)**	**NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR**
(RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				**OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)**
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Kerugian aktuarial program imbalan pasti	21	(1.701.496)	(3.426.553)	Loss on defined benefit actuarial program
Pajak penghasilan terkait	19	374.329	753.842	Income tax related
Sub-jumlah		(1.327.167)	(2.672.711)	Sub-total
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified to profit or loss:
Rugi dari lindung nilai arus kas	12	(1.986.955)	(2.128.711)	Loss from cash flow hedge
Pajak penghasilan terkait	19	437.130	468.316	Income tax related
Sub-jumlah		(1.549.825)	(1.660.395)	Sub-total
Jumlah		(2.876.992)	(4.333.106)	Total
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		**15.647**	**(6.488.771)**	**TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR**
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	32	0,51	(0,38)	BASIC EARNING (LOSS) PER SHARE (in full Rupiah)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of these financial statemer

	Catatan/ *Notes*	Modal Saham/ *Share Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Komponen Ekuitas Lain/ *Other equity components*: (Kerugian) Keuntungan Aktuarial/ *(Loss) Gain on Actuarial*	Komponen Ekuitas Lain/ *Other equity components*: Lindung Nilai Arus Kas/ *Cash Flows Hedge*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*: Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*: Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
		Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo per 1 Januari 2024		568.735.400	97.585.106	(1.492.907)	1.958.501	1.500.000	82.198.738	750.484.838	Balance as of 1 January 2024
Pencadangan saldo laba	22	-	-	-	-	300.000	(300.000)	-	General reserve
Rugi tahun berjalan		-	-	-	-	-	(2.155.665)	(2.155.665)	Loss for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	(2.672.711)	(1.660.395)	-	-	(4.333.106)	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2024		568.735.400	97.585.106	(4.165.618)	298.106	1.800.000	79.743.073	743.996.067	Balance as of 31 December 2024
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	2.892.639	2.892.639	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	(1.327.167)	(1.549.825)	-	-	(2.876.992)	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2025		568.735.400	97.585.106	(5.492.785)	(1.251.719)	1.800.000	82.635.712	744.011.714	Balance as of 31 December 2025

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of these financial statements.

	Catatan/ *Notes*	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				**CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES**
Penerimaan kas dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan		2.098.729.984	2.188.748.492	Cash receipts from consumer financing and finance lease
Penerimaan kas sehubungan dengan pembiayaan bersama		4.442.296	1.034.281	Cash receipts in connection with joint financing
Penerimaan operasional lainnya		16.719.143	28.758.730	Other operating received
Penerimaan tagihan pajak		-	1.505.723	Claims for tax refund received
Penerimaan bunga		338.481	351.787	Interest received
Pembayaran kas untuk:				Cash paid for:
Pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan		(1.732.305.382)	(2.253.900.653)	Consumer financing and finance lease
Beban operasional		(165.458.782)	(169.411.464)	Operational expenses
Pembayaran kas sehubungan dengan pembiayaan bersama		-	(62.928.000)	Cash payment in connection with joint financing
Pembayaran operasional lainnya		(5.995.492)	(10.156.850)	Payment for other operating activities
Pembayaran bunga		(124.720.831)	(129.559.488)	Payment of interest
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		**91.749.417**	**(405.557.442)**	**Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				**CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES**
Perolehan aset tetap	11	(4.285.967)	(8.109.386)	Acquisition of property and equipments
Hasil penjualan aset tetap	11	441.523	1.055.392	Proceed from sale of property and equipments
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(3.844.444)**	**(7.053.994)**	**Net Cash Flows Used in Investing Activities**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				**CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES**
Penerimaan utang bank	14	680.509.902	1.068.345.947	Receipts of bank loans
Pembayaran utang bank	14	(731.065.052)	(660.734.648)	Payments for bank loans
Pembayaran liabilitas sewa		(4.962.266)	(4.703.365)	Payments of lease liabilities
Arus Kas Bersih yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		**(55.517.416)**	**402.907.934**	**Net Cash Flows (Used in) Provided by Financing Activities**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**32.387.557**	**(9.703.502)**	**NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**5**	**40.657.700**	**50.361.202**	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**5**	**73.045.257**	**40.657.700**	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements which are an integral part of these financial stateme

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance berdasarkan Akta No. 43 tanggal 21 Juli 1993 dari Sri Nanning, SH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 tanggal 29 Oktober 1993 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994, Tambahan No. 8832. Perusahaan telah melakukan perubahan nama beberapa kali, terakhir dari PT Verena Multi Finance Tbk menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 8 tanggal 19 September 2022 dari Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan, masing-masing dengan surat No AHU-0068946.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 24 September 2022 dan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir adalah sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 34 tanggal 23 Desember 2025 dari Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0049522 tanggal 21 Januari 2026 sebagaimana dicetak oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2026.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan meliputi usaha pembiayaan:

a. Pembiayaan investasi
b. Pembiayaan modal kerja
c. Pembiayaan multiguna
d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (the "Company") was established under the name of PT Maxima Perdana Finance based on Deed No. 43 dated July 21, 1993 from Sri Nanning, SH., Notary in Jakarta. The Deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 dated October 29, 1993, and was published in Supplement No. 8832 of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 88 dated November 4, 1994. The Company has changed its name several times, the latest from PT Verena Multi Finance Tbk to become PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution Deed PT Verena Multi Finance Tbk No. 8 dated September 19, 2022 from Fathiah Helmi, SH Notary in Jakarta. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as well as the Financial Services Authority, in letter No. AHU-0068946.AH.01.02 YEAR 2022 dated September 24, 2022 and Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 dated December 12, 2022, respectively.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment to the Company's Articles of Association is as stated on Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution Deed No. 34 dated December 23, 2025 from Fathiah Helmi, SH Notary in Jakarta which Receipt of Notification of Amendments to the Company's Articles of Association has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia with Number: AHU-AH.01.03-0049522 dated January 21, 2026 as printed by Fathiah Helmi, SH., Notary in Jakarta on February 19, 2026.

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company comprises of financing activities:

a. Investment financing
b. Working capital financing
c. Multipurpose financing
d. Other financing business activities based on approval from OJK.

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung:

a. sewa operasi
b. kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau
c. kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

In addition to the above main business activities, the Company can carry out supporting business activities:

a. operating leases
b. fee-based activities as long as the Company does not violate the laws and regulations in the financial services sector and/or.
c. other business activities with the Financial Services Authority approval.

Perusahaan, dengan nama sebelumnya, PT Maxima Perdana Finance, memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993. Perusahaan mulai beroperasi pada tanggal 21 Juni 2003, dengan izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 Jo. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

The Company, under its former name of PT Maxima Perdana Finance, obtained its license to operate as a financing company from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia based on Decision Letter No. 994/KMK.017/1993 dated December 30, 1993. The Company started operating on June 21, 2003 with operating license based on the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 dated May 4, 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 dated December 9, 2010 Jo. Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 dated December 12, 2022.

Saat ini, Perusahaan menjalankan usaha utamanya dibidang pembiayaan konsumen dan aktivitas sewa pembiayaan dan mempunyai 31 (tiga puluh satu) Kantor Cabang yang terletak di kota Bandar Lampung, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cikarang, Denpasar, Depok, Jakarta, Jambi, Kediri, Lamongan, Makassar, Malang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Surabaya, Surakarta, Tangerang dan Yogyakarta. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Menara Astra Lantai 32, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta Pusat 10220.

Currently, the Company is engaged in consumer financing and finance lease activities and has 31 (thirty-one) Branch Offices located in the city of Bandar Lampung, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cikarang, Denpasar, Depok, Jakarta, Jambi, Kediri, Lamongan, Makassar, Malang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Surabaya, Surakarta, Tangerang, and Yogyakarta. The Head Office is located at Menara Astra, 32nd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Central Jakarta 10220.

Perusahaan berada dalam pengendalian Mizuho Leasing Co., Ltd. Jepang.

The Company is under control of Mizuho Leasing Co., Ltd. Japan.

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 33 tanggal 23 Desember 2025 dari Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta dan dinyatakan kembali keputusan Rapat tersebut pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.34 Tanggal 23 Desember 2025 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09 0070535 tanggal 21 Januari 2026 sebagaimana dicetak oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2026.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 7 November 2024 dari Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-0276667 tanggal 18 November 2024 sebagaimana dicetak oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta pada tanggal 18 November 2024 adalah sebagai berikut:

b. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2025 based on Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution Deed No. 33 dated December 23, 2025 from Fathiah Helmi, SH., Notary in Jakarta, and restated the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution Deed No.34 dated December 23, 2025 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta which Receipt of Notification of Company Data Change has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, No.AHU-AH.01.09-0070535, dated January 21, 2026 as printed by Fathiah Helmi, SH., Notary in Jakarta on February 19, 2026.

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2024 based on Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution Deed No. 2 dated November 7, 2024, from Fathiah Helmi, SH., Notary in Jakarta which Receipt of Notification of Company Data Change has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, No. AHU-AH.01.09-0276667, dated November 18, 2024 as printed by Fathiah Helmi, SH., Notary in Jakarta on November 18, 2024 are as follows:

	2025	2024	
Dewan Komisaris			**Board of Commissioners**
Komisaris Utama	Yasuo Imaizumi	Yasuo Imaizumi	President Commissioner
Komisaris	Bhindawati Gunawan	Bhindawati Gunawan	Commissioner
Komisaris Independen	Dani Hamdani	Mohammad Syahrial	Independent Commissioner
Direksi			**Board of Directors**
Direktur Utama	Takeshi Kurioka*)	Konosuke Mizuta	President Director
Direktur	Andi Harjono	Andi Harjono	Director
Direktur	Kenjiro Sawada	Shunsuke Kojima	Director
Direktur	Yudi Gustiawan	Yudi Gustiawan	Director
Direktur	Fransisca Y Gunawan		Director
Direktur	Ryuji Tarumi		Director

*) Bahwa pengangkatan Tuan Takeshi Kurioka sebagai Direktur Utama berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang, yaitu pada tanggal 5 Maret 2026.
That the appointment of Mr. Takeshi Kurioka as President Director is effective from the date of issuance of the limited stay permit from the authorized institution, namely on March 5, 2026.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direktur Utama memastikan fungsi audit internal sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai, Anggaran Dasar Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Bersama dengan Direktur lain, Direktur Utama juga bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan berkelanjutan.

The scope of duties and responsibilities of the President Director ensuring the function of, internal audit in line with the Company's vision, mission, values, Articles of Association by adhering to applicable laws and regulations and implementing the principles of Good Corporate Governance. Along with the other Board of Directors, President Director also responsible of the implementation of sustainable finance.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direktur mencakup manajemen risiko, kepatuhan, penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal, pelindungan konsumen dan masyarakat, perlindungan data pribadi, legal korporasi, *corporate strategic planning*, *business process*, sekretaris perusahaan, hubungan investor, pengembangan bisnis dan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis, menjalankan fungsi pemasaran, pemberian pembiayaan, manajemen aset, analisa kredit, pencarian sumber dana, proses dan pelaporan keuangan dan akuntansi, teknologi informasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, legal litigasi, memastikan semua fungsi dan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan, membuat pelaporan kepada otoritas terkait secara lengkap dan tepat waktu dan menjalankan program literasi dan inklusi keuangan.

The scope of duties and responsibilities of the Director covers risk management, compliance, anti-money laundering, prevention of terrorism financing, prevention of financing proliferation of mass destruction weapon, customer and public protection, personal data protection, corporate legal, corporate strategic planning, business process, corporate secretary, investor relations, business development and achievement of targets set in the business plan, carrying out marketing functions, financing distribution, asset management, credit analysis, finding sources of funds, financial and accounting processes and reporting, information technology, human resources, procurement of goods and services, legal litigation, ensuring all functions and responsibilities to Stakeholders, making full and timely reporting to relevant authorities and carrying out financial inclusion and literacy.

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 015/BOC-MLI/XII/25 tertanggal 23 Desember 2025 dan susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 003/BOC-MLI/LEGAL/23 tertanggal 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2025, based on Board of Commissioners Decree No. 015/BOC-MLI/XII/25 dated December 23, 2025, and the composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2024, based on Board of Commissioners Decree No. 003/BOC-MLI/LEGAL/23 dated March 31, 2023, are as follows:

	2025	2024	
Komite Audit			**Audit Committee**
Ketua	Dani Hamdani	Mohammad Syahrial	Chairman
Anggota	Gregory O.K Ongko	Gregory O.K Ongko	Member
Anggota	Brantas	Brantas	Member

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Audit Internal Perusahaan masing-masing dijabat oleh Fransisca Y. Gunawan dan Nicholas Joshua Lawrence F.

The Corporate Secretary and Head of Internal Audit of the Company is held by Fransisca Y. Gunawan and Nicholas Joshua Lawrence F., respectively.

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah 751 dan 767 karyawan (tidak di audit).

As of December 31, 2025 and 2024, the Company had a total of 751 and 767 employees, respectively (unaudited).

c. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Penawaran Umum Saham Perdana

Pada tanggal 13 Juni 2008, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) berdasarkan surat BAPEPAM-LK No. S-3825/BL/2008 untuk melakukan penawaran umum atas 460.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 100 (dalam Rupiah penuh) dan harga penawaran per saham sebesar Rp 100 (dalam Rupiah penuh). Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 25 Juni 2008. Penawaran umum saham perdana ini disertai dengan penerbitan 46.000.000 Waran Seri I.

Penawaran Umum Saham Terbatas I

Pada tanggal 27 April 2017, Perusahaan telah memperoleh surat pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-204/D.04/2017 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") sebanyak 1.583.160.556 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) setiap lembar saham yang ditawarkan dengan harga Rp 112 (dalam Rupiah penuh) setiap lembar sahamnya atau sebesar Rp 177.313.982 ribu dan biaya emisi saham sebesar Rp 6.180.220 ribu.

Penawaran Umum Saham Terbatas II

Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan telah memperoleh surat pernyataan efektif dari Dewan Komisioner OJK Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-193/D.04/2018 untuk melakukan PUT II dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak 3.102.193.089 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) setiap lembar saham yang ditawarkan dengan harga Rp 140 (dalam Rupiah penuh) setiap lembar sahamnya atau sebesar Rp 434.307.033 ribu dengan biaya emisi saham sebesar Rp 3.945.083 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah saham Perusahaan yang tercatat di BEI sebanyak 5.687.353.997 lembar.

c. Public Offering of the Company's shares

Initial Public Offering of Shares

On June 13, 2008, the Company received the effective statement from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK") based on the BAPEPAM-LK's letter No. S 3825/BL/2008 to carry out an Initial Public Offering of 460,000,000 shares with par value and offering price of Rp 100 (in full Rupiah) and the offering price per share of Rp 100 (in full Rupiah). On June 25, 2008, the Company's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). Along with the Initial Public Offering, the Company also issued 46,000,000 Series I Warrants.

Limited Public Offering of Shares I

On April 27, 2017, the Company obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioners of Financial Service Authority Chief Executive of Capital Market Supervision No. S-204/D.04/2017 to conduct a Limited Public Offering ("PUT I") in accordance of issuing pre-emptive rights ("HMETD") of 1,583,160,556 common shares with par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share with an offering price of Rp 112 (in full Rupiah) per shares or equivalent to Rp 177,313,982 thousand and issuance cost of Rp 6,180,220 thousand.

Limited Public Offering of Shares II

On December 28, 2018, the Company obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioners of Financial Service Authority Chief Executive of Capital Market Supervision No. S-193/D.04/2018 to conduct PUT II in accordance of issuing HMETD of 3,102,193,089 common shares with par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share with an offering price of Rp 140 (in full Rupiah) per share or equivalent to Rp 434,307,033 thousand with issuance cost of Rp 3,945,083 thousand.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company's outstanding shares listed on the BEI were 5,687,353,997 shares.

Ikthisar penerbitan dan pencatatan saham Perusahaan di BEI adalah sebagai berikut:

Summary of the issuance and listing of the Company's shares in BEI are as follows:

Keterangan	Tahun/ *Year*	Jumlah Saham Ditempatkan dan Beredar/ *Number of Shares Issued and Outstanding*	Akumulasi Jumlah Saham Tercatat/ *Accumulated Number of Listed Shares*	Nilai Nominal/ *Par Value*	Descriptions
Sebelum Penawaran Umum Perdana	-	542.000.000	542.000.000	100	Before Initial Public Offering
Penawaran Umum Perdana	2008	460.000.000	1.002.000.000	100	Initial Public Offering
Konversi Waran	2009	20	1.002.000.020	100	Conversion of Warrant
Konversi Waran	2010	332	1.002.000.352	100	Conversion of Warrant
Penawaran Umum Terbatas I	2017	1.583.160.556	2.585.160.908	100	Limited Public Offering I
Penawaran Umum Terbatas II	2018	3.102.193.089	5.687.353.997	100	Limited Public Offering II

d. Transaksi Akuisisi dan Penggabungan Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan memiliki 20% saham pada PT IBJ Verena Finance (IBJV), entitas asosiasi, yang seperti halnya Perusahaan juga menjalankan usaha sebagai perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 25 Januari 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, SH., seluruh saham IBJV sebanyak 141.000 saham yang dimiliki oleh Mizuho Leasing, Co., Ltd., entitas induk Perusahaan (Catatan 23), telah dialihkan kepada Perusahaan. Sehubungan dengan pengalihan ini, maka kepemilikan Perusahaan atas saham IBJV meningkat dari semula sebesar 20% menjadi 100% dan dengan demikian Perusahaan memperoleh pengendalian penuh atas IBJV dan bagi Perusahaan IBJV merupakan entitas anak. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0085595 tanggal 12 Februari 2019.

Transaksi pengalihan saham di atas termasuk dalam lingkup kombinasi bisnis entitas sepengendali sebagaimana diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 338 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", mengingat bahwa baik sebelum ataupun setelah terjadinya transaksi, seluruh entitas yang bergabung pada akhirnya tetap dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu Mizuho Leasing Co., Ltd. (Catatan 1a), dan pengendalian tersebut tidak bersifat sementara. Efektif 25 Januari 2019, Mizuho Leasing Co., Ltd., adalah entitas yang mengendalikan Perusahaan, menggantikan PT Bank Pan Indonesia Tbk. Sesuai dengan PSAK No. 338, penggabungan tersebut dilakukan sejak awal periode di mana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian, yang dalam hal ini sejak awal bulan Januari 2019.

d. Acquisiton and Merger Transaction

As of December 31, 2018, the Company owned 20% shares in PT IBJ Verena Finance (IBJV), an associate, which like the Company also engaged business activities as financing company.

Based on Notarial Deed No. 24 dated January 25, 2019 from Notary Fathiah Helmi, SH., all of 141,000 IBJV's shares which owned by Mizuho Leasing, Co., Ltd., parent entity of the Company (Note 23), have been transferred to the Company. Pertinent to this transfer, the Company's share ownership in IBJV then increased from previously 20% to become 100% and therefore the Company obtained full control over IBJV and for the Company, IBJV then considered as a subsidiary. This Deed has been received and registered in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0085595 dated February 12, 2019.

Such transfer of shares are within the scope of business combination for entities under common control as prescribed in the Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 338 on "Business Combination of Entities Under Common Control", considering prior or post transaction occurred, all of combined entities ultimately still under the common control of the same party, which is Mizuho Leasing, Co., Ltd. (Note 1a), and such control is not temporarily. Efective January 25, 2019, Mizuho Leasing Co., Ltd,. is an entity which control over the Company, replacing PT Bank Pan Indonesia Tbk. In accordance with PSAK No. 338, such combination shall carried out since the beginning of period where combined entities are under common control, which since the beginning of January 2019.

Imbalan yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada Mizuho Leasing Co., Ltd atas 80% saham IBJV yang diambil alih tersebut, adalah sebesar Rp 214.307.032 ribu dan arus kas neto yang dibayarkan, setelah dikurangi kas IBJV yang diperoleh, adalah sebesar Rp 117.134.966 ribu. Adapun selisih yang timbul dari jumlah tercatat perolehan Perusahaan terhadap seluruh saham IBJV dengan porsi kepemilikan Perusahaan atas aset neto IBJV pada tanggal pengalihan tersebut adalah sebesar Rp 32.990.607 ribu yang seluruhnya dicatat pada ekuitas sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" (Catatan 23).

Consideration paid by the Company to Mizuho Leasing., Co., Ltd., for 80% of IBJV acquired shares amounted to Rp 214,307,032 thousand and net cash flow paid, net of IBJV's acquired cash, amounted to Rp 117,143,966 thousand. The difference arise from the total carrying amount of the Company's acquisition cost for the all IBJV shares with the Company's ownership portion over the net assets of IBJV on such transfer date amounted to Rp 32,990,607 thousand which entirely accounted for in equity as part of "Additional Paid-in Capital" account (Note 23).

Selanjutnya berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, SH., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama, seluruh pemegang saham, baik dari Perusahaan ataupun IBJV, telah menyetujui rencana penggabungan usaha antara Perusahaan dengan IBJV, entitas anak. Rancangan dan konsep penggabungan tersebut telah dinyatakan dalam Akta Penggabungan Usaha No. 25 pada tanggal dan dari Notaris yang sama. Dalam akta tersebut disepakati bahwa IBJV merupakan pihak yang menggabungkan diri, dan sebagai akibatnya keberadaan IBJV akan berakhir secara hukum tanpa melalui proses likuidasi, dan Perusahaan, sebagai entitas yang dipertahankan, akan menerima penggabungan tersebut terhitung sejak tanggal efektifnya penggabungan usaha. Pada tanggal efektif penggabungan usaha, secara hukum, seluruh aset dan liabilitas IBJV serta seluruh perjanjian dan kontrak antara IBJV dengan pihak ketiga akan beralih kepada Perusahaan. Oleh karena penggabungan usaha ini merupakan pengabungan secara vertikal, yang terjadi di antara Perusahaan sebagai entitas induk dan IBJV sebagai entitas anak (100%), maka tidak menimbulkan konversi saham ataupun mengakibatkan perubahan struktur permodalan pada Perusahaan. Setelah penggabungan usaha, seluruh kegiatan usaha pembiayaan yang dijalankan oleh IBJV tetap dilanjutkan oleh Perusahaan.

Moreover, based on Notarial Resolution Deed of Extraordinary Shareholders Meeting (RUPSLB) of the Company No. 23 dated July 17, 2019 from Notary Fathiah Helmi, SH., and Notarial Circular Resolution Deed of Shareholders of IBJV No. 24 on the same date and from the same Notary, all of the shareholders, both of the Company or IBJV, have approved the merger plan between the Company and IBJV, a subsidiary. The merger draft and concept have been notarized in the Merger Deed No. 25 on the same date and from the same Notary. In such deed, both parties have agreed that IBJV shall become the party who merged, and as a result, IBJV shall no longer legally exist without through liquidiation process, and the Company, as a surviving entity, shall accept such merger on the effective merger date. On the effective merger date, legally, all of the IBJV's assets and liabilities as well as the all agreements and contracts between IBJV and third parties shall be transferred to the Company. Since such merger is a vertical merger, occurred between the Company as parent entity and IBJV as a subsidary (100% owned), therefore neither rise a share conversion nor affect to the Company's capital structure. Post-merger, all of the financing business activities carried out by IBJV still continue by the Company.

Perusahaan telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan penggabungan usaha tersebut berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh Dewan Komisioner OJK Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-110/D.04/2019 tanggal 10 Juli 2019. Akta Penggabungan Usaha di atas juga telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019. Di samping itu, sesuai dengan Keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Komisioner OJK Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya No. 113/KD.05/2019 tanggal 20 November 2019, izin usaha IBJV sebagai perusahaan pembiayaan telah dicabut terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019.

Pada tanggal 5 Agustus 2019, Perusahaan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk mengumumkan hasil penggabungan usaha di atas melalui surat kabar.

The Company has obtained effective statement from Financial Services Authority (OJK) regarding with such merger based on Letter issued by OJK Board of Commissioners - Chief Executive of Capital Market Supervisor No. S-110/D.04/2019 dated July 10, 2019. The Merger Deed have also been received and registered in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-0008953 dated July 23, 2019. In addition, pursuant to Decision issued by OJK Board of Commissioners - Chief Executive of Insurance, Pension Fund, Financial Institution, and Other Financial Institution Supervisor No. 113/KD.05/2019 dated November 20, 2019, IBJV's business license as financing company has been cancelled effective July 23, 2019.

On August 5, 2019, the Company has complied with the statutory law provision to announce its merger result through a newspaper.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Standar, interpretasi dan amandemen-amandemen atas PSAK, yang telah diterbitkan dan berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2025 sebagai berikut:

- PSAK 221 (amendemen) Kekurangan Ketertukaran
- PSAK 117 (amendemen) Kontrak Asuransi

Penerapan tersebut tidak memiliki dampak material terhadap penyajian atau jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan Perusahaan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year

Standards, interpretation and amendments to PSAKs were issued and effective beginning on or after January 1, 2025 as follows:

- PSAK 221 (amendment) Lack of Exchangeability
- PSAK 117 (amendment) Insurance Contracts

The adoptions have not had any material impact on the disclosures or on the amounts reported in these financial statements.

b. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar, interpretasi dan amandemen-amandemen atas PSAK yang relevan bagi Perusahaan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

- Amandemen PSAK 109 Instrumen Keuangan dan Amandemen PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan
- Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027

- PSAK 118 Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Manajemen tidak memperkirakan bahwa penerapan amandemen dan standar baru yang tercantum di atas akan berdampak material pada laporan keuangan Perusahaan pada periode mendatang, kecuali seperti yang dijelaskan di bawah ini.

PSAK 118 Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

PSAK 118 menggantikan PSAK 201, dengan banyak persyaratan dalam PSAK 201 yang tidak berubah dan dilanjutkan serta melengkapinya dengan persyaratan-persyaratan baru. Selain itu, beberapa paragraf dari PSAK 201 telah dipindahkan ke PSAK 208 dan PSAK 107. Serta, terdapat perubahan minor pada PSAK 207 dan PSAK 233 Laba per Saham.

PSAK 118 memperkenalkan persyaratan baru untuk:

- menyajikan kategori-kategori tertentu dan subtotal yang ditentukan dalam laporan laba rugi
- memberikan pengungkapan tentang ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM) dalam catatan laporan keuangan
- perbaikan agregasi and disagregasi.

b. Standard and Amendments/Improvements to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAKs relevant to the Company were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2026

- Amendment to PSAK 109 Financial Instruments Keuangan dan Amendment to PSAK 107 Financial Instruments: Disclosures on Classification and Measurement of Financial Instruments
- Annual Improvement 2024 SAK Indonesia

Effective for periods beginning on or after January 1, 2027

- PSAK 118 Presentation and Disclosures in Financial Statements

Management does not expect that the adoption of the amendments and new standards listed above will have a material impact on the financial statements of the Company in future periods, except if indicated below.

PSAK 118 Presentation and Disclosures in Financial Statements

PSAK 118 replaces PSAK 201, carrying forward many of the requirements in PSAK 201 unchanged and complementing them with new requirements. In addition, some paragraphs from PSAK 201 have been moved to PSAK 208 and PSAK 107. Furthermore, there are minor amendments to PSAK 207 and PSAK 233 Earnings per Share.

PSAK 118 introduces new requirements to:

- present specified categories and defined subtotals in the statement of profit or loss
- provide disclosures on management-defined performance measures (MPMs) in the notes to the financial statements
- improve aggregation and disaggregation.

Entitas diwajibkan untuk menerapkan PSAK 118 untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diizinkan. Amandemen PSAK 207 dan PSAK 233, serta amandemen PSAK 208 dan PSAK 107, berlaku ketika entitas menerapkan PSAK 118. PSAK 118 memerlukan penerapan retrospektif dengan ketentuan transisi.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan masih dievaluasi oleh manajemen.

An entity is required to apply PSAK 118 for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2027, with earlier application permitted. The amendments to PSAK 207 and PSAK 233, as well as the revised PSAK 208 and PSAK 107, become effective when an entity applies PSAK 118. PSAK 118 requires retrospective application with specific transition provisions.

As of the issuance date of the financial statements, the effects of adoption these standards, amendments and interpretations on the financial statements are being evaluated by management.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (”BAPEPAM-LK”), yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) sejak tanggal 1 Januari 2013 No.VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 September 2012 tentang ”Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

b. Dasar Penyusunan

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Statement of Compliance

These financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI).

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (”BAPEPAM-LK”), whose function has been transferred to the Financial Services Authority (”OJK”) starting January 1, 2013, rule No.VIII.G.7, Appendix of the Decree of the Chairman of the BAPEPAM-LK No.KEP-347/BL/2012 dated September 25, 2012 regarding ”Financial Statements Presentation and Disclosure of the Issuer or Public Company”.

b. Basis of Preparation

The measurement basis used in the financial statements is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the related accounting policies.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas dari apakah harga tersebut dapat diamati secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar dari suatu aset atau liabilitias, Perusahaan memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan pada laporan keuangan ditentukan atas dasar tersebut kecuali untuk transaksi sewa yang merupakan ruang lingkup PSAK 116, dan pengukuran yang memiliki kemiripan dengan nilai wajar namun bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai pakai dalam PSAK 113.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these financial statements is determined on such a basis, except for leasing transactions that are within the scope of PSAK 116, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realizable value in PSAK 113.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The statement of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan.

The directors have, at the time of approving the financial statements, a reasonable expectation that the Company has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the financial statements.

c. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

c. Transactions and Foreign Currency Translation of Financial Statements

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional (Rupiah) dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Transactions in foreign currencies are translated into functional currency (Rupiah) using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. In the statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are presented in the functional currency using Bank Indonesia middle rate prevailing at that date. Any resulting gains or losses from foreign exchanges are credited or charged to current operations.

Nilai tukar kurs mata uang asing ke dalam Rupiah yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The foreign exchange rates into Rupiah as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
1 Dolar Amerika Serikat	16.782	16.162	United States Dollar 1
100 Yen Jepang	10.759	10.236	Japanese Yen 100

d. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

1) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

2) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

3) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

1) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).

2) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

3) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

4) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

5) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

6) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

7) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (reporting entity):

a) A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:

1) has control or joint control over the reporting entity;

2) has significant influence over the reporting entity; or

3) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

1) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).

2) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

3) both entities are joint ventures of the same third party.

4) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

5) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity.

6) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

7) a person identified in (a) (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

8) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

8) the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are dislosed in the financial statements.

e. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan pada saat Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

Semua pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya berdasarkan tanggal perdagangan. Pembelian atau penjualan reguler adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau konvensi di pasar.

Semua aset keuangan yang diakui selanjutnya diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut.

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

e. Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are recognized on the statement of financial position when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

All regular way purchases or sales of financial assets are recognized and derecognized on a trade date basis. Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulation or convention in the marketplace.

All recognized financial assets are measured subsequently in their entirety at either amortized cost or fair value, depending on the classification of the financial assets.

Classification of financial assets

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and

- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Instrumen utang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), jika memenuhi kedua kondisi berikut ini:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan lain selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Meskipun telah disebutkan sebelumnya, Perusahaan dapat menetapkan pilihan tak terbatalkan pada saat pengakuan awal aset keuangan sebagai berikut:

- menyajikan perubahan selanjutnya nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain jika kriteria tertentu dipenuhi; dan

- menetapkan aset keuangan yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI sebagai diukur pada FVTPL, jika penetapan itu mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan *(accounting mismatch)*.

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI"):

- the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and

- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

By default, all other financial assets are subsequently measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

Despite the foregoing, the Company may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment in other comprehensive income if certain criteria are met; and

- irrevocably designate a debt investment that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch.

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam pos “Penghasilan bunga”.

Interest income is recognized in profit or loss and is included in the "Interest income" line item.

Aset keuangan pada FVTPL

Financial assets at FVTPL

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI diukur pada FVTPL, khususnya:

Financial assets that do not meet the criteria for being measured at amortized cost or FVTOCI are measured at FVTPL, specifically:

- investasi dalam instrumen ekuitas diklasifikasi sebagai FVTPL, kecuali Perusahaan menetapkan investasi ekuitas yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan dan bukan merupakan imbalan kontinjen dari kombinasi bisnis, sebagai FVTOCI pada pengakuan awal.

- investments in equity instruments are classified as at FVTPL, unless the Company designates an equity investment that is neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination as at FVTOCI on initial recognition.

- instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI diklasifikasi sebagai FVTPL. Sebagai tambahan, instrumen utang yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi dan FVTOCI dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (yang disebut “inkonsistensi akuntansi”) pengukuran dan pengakuan yang timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian dengan basis berbeda. Perusahaan tidak menetapkan instrumen utang sebagai FVTPL.

- debt instruments that do not meet the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria are classified as at FVTPL. In addition, debt instruments that meet either the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria may be designated as at FVTPL upon initial recognition if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (so called ‘accounting mismatch’) that would arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on them on different bases. The Company has not designated any debt instruments as at FVTPL.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditetapkan (lihat kebijakan akuntansi terkait lindung nilai). Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh atas aset keuangan dan dimasukkan dalam pos “Keuntungan dan kerugian lain-lain”. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 35.

Financial assets at FVTPL are measured at fair value at the end of each reporting period, with any fair value gains or losses recognized in profit or loss to the extent they are not part of a designated hedging relationship (see hedge accounting policy). The net gain or loss recognized in profit or loss includes any dividend or interest earned on the financial asset and is included in the “Other gains and losses” line item (Note 48). Fair value is determined in the manner described in Note 35.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Jumlah tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang tersebut dan dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada setiap tanggal pelaporan.

- Untuk aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi pada pos "Pendapatan lain-lain" pada saat mengalami keuntungan dan diakui pada pos "Beban lain-lain" pada saat mengalami kerugian.

- Untuk aset keuangan diukur pada FVTPL yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi pada pos "Pendapatan lain-lain" pada saat mengalami keuntungan dan diakui pada pos "Beban Bunga dan Keuangan" pada saat mengalami kerugian.

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan piutang lainnya. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Perusahaan mengakui ECL 12 bulan dan/atau sepanjang umurnya untuk sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen, dan piutang lainnya. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mewakili porsi ECL sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Foreign exchange gains and losses

The carrying amount of financial assets that are denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the Bank Indonesia middle rate at the end of each reporting period.

- for financial assets measured at amortized cost that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "Other Income" line item when the Company incurred gains and recognized in "Other Expenses" when the Company incurred losses.

- for financial assets measured at FVTPL that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "Other Income" line item when the Company incurred gains and recognized in "Interest and Financing Charges" when the Company incurred losses.

Impairment of financial assets

The Company recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on finance lease receivables, consumer finance receivables, and other receivables. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

The Company recognizes 12 months and/or lifetime ECL for finance lease receivables, consumer finance receivables, and other receivables. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Company's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Perusahaan beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analis keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Perusahaan.

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal:

- memburuknya kondisi usaha, keuangan atau ekonomi yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan penurunan signifikan atas kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utangnya;
- terdapat penurunan yang signifikan terhadap hasil operasi debitur, baik secara aktual atau yang diperkirakan akan terjadi; dan
- aset keuangan yang telah mengajukan program restrukturisasi.

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Perusahaan membuat praduga risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Meskipun demikian, Perusahaan mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan bertekad memiliki risiko kredit rendah jika:

1. instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah;

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Company considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Company's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Company's core operations.

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition:

- existing or forecast adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations;
- an actual or expected significant deterioration in the operating results of the debtor; and
- financial assets that has been proposed restructured program.

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Company presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days past due, unless the Company has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

Despite the foregoing, the Company assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if:

1. the financial instrument has a low risk of default;

2. debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat; dan
3. memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Perusahaan menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal '*investment grade*' sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal '*performing*'. *Performing* berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang tertunggak.

Perusahaan secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Definisi gagal bayar

Perusahaan menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- Informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Perusahaan, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan).

Perusahaan menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam;

2. the debtor has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term; and
3. adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

The Company considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external credit rating of 'investment grade' in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of 'performing'. Performing means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.

The Company regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definition of default

The Company considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- when there is a breach of financial covenants by the debtor; or.
- Information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Company, in full (without taking into account any collateral held by the Company).

The Company considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Company has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower;

- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu akibat kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Kebijakan penghapusan

Perusahaan menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau ketika jumlahnya sudah lebih 180 hari tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Perusahaan, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan.

Untuk aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diestimasi sebagai selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Perusahaan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal. Untuk piutang sewa, arus kas yang digunakan untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian konsisten dengan arus kas yang digunakan dalam mengukur piutang sewa berdasarkan PSAK 116.

- a breach of contract, such as a default or past due event;
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

Write-off policy

The Company writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, when the amounts are over 180 days past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Company's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Measurement and recognition of expected credit losses

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date.

For financial assets, the expected credit loss is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the Company in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at the original effective interest rate. For a lease receivable, the cash flows used for determining the expected credit losses is consistent with the cash flows used in measuring the lease receivable in accordance with PSAK 116.

Apabila kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur diukur secara kolektif untuk kasus dimana bukti kenaikan signifikan risiko kredit pada level instrumen invidual tidak tersedia, instrumen keuangan dikelompokkan dengan dasar sebagai berikut:

- Status jatuh tempo; dan
- Jenis jaminan untuk piutang sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen, dan piutang jual dan sewa-balik.

Pengelompokan ditelaah secara teratur oleh manajemen untuk memastikan setiap kelompok mempunyai karakteristik risiko yang sama.

Jika Perusahaan telah mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan sebesar ECL sepanjang umurnya pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan kini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umurnya tidak lagi terpenuhi, Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan pada tanggal pelaporan kini.

Perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian terkait ke jumlah tercatat melalui akun cadangan kerugian.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan asset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi.

Where lifetime ECL is measured on a collective basis to cater for cases where evidence of significant increases in credit risk at the individual instrument level may not yet be available, the financial instruments are Companyed on the following basis:

- Past-due status; and
- Classification of collaterals for finance lease receivables, consumer financing receivables, and sale and leaseback receivables.

The Companying is regularly reviewed by management to ensure the constituents of each Company continue to share similar credit risk characteristics.

If the Company has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Company measures the loss allowance at an amount equal to 12-month ECL at the current reporting date.

The Company recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account.

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasuri) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dimana beban bunga diakui berdasarkan tingkat pengembalian yang efektif, kecuali untuk liabilitas jangka pendek dimana pengakuan bunganya tidak material.

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL

Liabilitas keuangan diklasifikasi FVTPL ketika liabilitas keuangan merupakan:

- imbalan kontinjen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan
- dimiliki untuk diperdagangkan; atau
- ditetapkan sebagai FVTPL.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Company are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company are recorded at the proceeds received net of direct issue costs.

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments.

Financial liabilities

The Company financial liabilities was classified as FVTPL or at amortized cost.

Financial liabilities at amortized cost

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost are recognized at fair value net of transaction costs which are directly attributable to the issuance of such, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, where interest expense is recognized based on the rate of effective return, except for short-term liabilities when the recognition of interest would be immaterial.

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is

- contingent consideration of an acquirer in a business combination to which PSAK 103 applies
- held for trading; or
- it is designated as at FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Perusahaan secara bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- liabilitas keuangan membentuk bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal.
- merupakan bagian kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 239 atau PSAK 109 mengizinkan seluruh kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

A financial liability is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the Company manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- the financial liability forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided internally on that basis.
- it forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and PSAK 239 or PSAK 109 permits the entire combined contract (asset or liability) to be designated as at FVTPL.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Untuk liabilitas keuangan dalam mata uang asing dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan, keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dari instrumen. Keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan. Untuk yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai untuk lindung nilai atas risiko mata uang asing, keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah.

Nilai wajar liabilitas keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan pada kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL, komponen nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari keuntungan atau kerugian nilai wajar dan diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

f. Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan poisisi keuangan jika Perusahaan tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

Foreign exchange gains and losses

For financial liabilities that are denominated in a foreign currency and are measured at amortized cost as at each reporting date, the foreign exchange gains and losses are determined based on the amortized cost of the instruments. These foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship. For those which are designated as a hedging instrument for a hedge of foreign currency risk, foreign exchange gains and losses are recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity.

The fair value of financial liabilities denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate at the end of the reporting period. For financial liabilities that are measured as at FVTPL, the foreign exchange component forms part of the fair value gains or losses and is recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

f. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Company has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

g. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

h. Piutang Pembiayaan Konsumen

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen mengacu pada Catatan 3e.

Pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat perjanjian pembiayaan pertama kali ditandatangani, dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan.

h. Consumer Financing Receivables

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, impairment and derecognition of consumer financing receivables are discussed in Note 3e.

Administration income earned from customers at the time the consumer financing is signed is recorded as income in the current year.

i. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

i. Property and Equipment

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/Years	
Bangunan	20	Building
Prasarana	4 - 8	Leasehold improvement
Kendaraan	4 - 8	Motor vehicles
Perabot dan peralatan kantor	4 - 8	Fixtures and office equipment
Komputer	4	Computer

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of Property and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

An item of Property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of Property and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

j. Sewa

j. Lease

Perusahaan sebagai penyewa

The Company as lessee

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal insepsi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Perusahaan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;

- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau

- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 237. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

The Company remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;

- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or

- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 237. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the statement of financial position.

Perusahaan menerapkan PSAK 236 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

The Company applies PSAK 236 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Perusahaan sebagai penyewa

The Company as lessor

Sewa dimana Perusahaan sebagai penyewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Leases for which the Company is a lessor are classified as finance leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease.

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh penyewa diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Perusahaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih penyewa.

Amounts due from lessees under finance leases are recognized as receivables at the amount of the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the Company's net investment outstanding in respect of the leases.

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Perusahaan menerapkan PSAK 115 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

When a contract includes lease and non-lease components, the Company applies PSAK 115 to allocate the consideration under the contract to each component.

k. Instrumen Keuangan Derivatif

k. Derivative Financial Instruments

Perusahaan melakukan berbagai transaksi instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing menggunakan kontrak nilai tukar mata uang asing (*cross currency*) dan *swap* suku bunga.

Company enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risks, using foreign exchange contracts (cross currency) and interest rate swaps.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak dilakukan dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajarnya pada setiap akhir periode pelaporan. Dampak keuntungan atau kerugian diakui segera di laba rugi kecuali jika derivatif ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai di mana saat pengakuan di laba rugi bergantung pada sifat dari hubungan lindung nilai.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contracts are entered into and are subsequently remeasured to their fair values at the end of each reporting period. The resulting gain or loss is recognized in profit or loss immediately unless the derivative is designated and effective as hedging instrument in which event the timing of the recognition in profit or loss depends on the nature of the hedge relationship.

Derivatif dengan nilai wajar positif diakui sebagai aset keuangan sedangkan derivatif dengan nilai wajar negatif diakui sebagai liabilitas keuangan. Derivatif tidak saling hapus dalam laporan keuangan kecuali Perusahaan memiliki hak yang memiliki kekuatan hukum dan intensi untuk saling hapus.

A derivative with a positive fair value is recognized as a financial asset whereas a derivative with a negative fair value is recognized as a financial liability. Derivatives are not offset in the financial statements unless the Company have both a legally enforceable right and intention to offset.

Akuntansi Lindung Nilai

Perusahaan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas. Pada penetapan awal lindung nilai, Perusahaan secara formal mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dengan item yang dilindung nilai, termasuk tujuan manajemen risiko dan strategi dalam melakukan transaksi lindung nilai, bersamaan dengan metode yang akan digunakan untuk menilai efektifitas dari hubungan lindung nilai tersebut. Perusahaan melakukan penilaian, baik pada awal hubungan lindung nilai maupun secara berkelanjutan, untuk menentukan apakah instrumen lindung nilai tersebut dapat secara sangat efektif menutupi perubahan arus kas dari item yang dilindung nilai.

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laba rugi tahun berjalan. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, perubahan nilai wajar yang berkaitan dengan lindung nilai diakui sebagai penyesuaian terhadap item yang dilindungi nilainya dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan atau disajikan dalam ekuitas, tergantung pada jenis transaksi dan efektifitas dari lindung nilai tersebut.

Pada saat derivatif dirancang sebagai instrumen lindung nilai untuk melindungi perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dari aset atau liabilitas yang diakui atau suatu prakiraan transaksi yang dapat mempengaruhi laba rugi, maka bagian efektif dari perubahan nilai wajar dari derivatif diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laporan laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tahun yang sama dimana arus kas yang dilindung nilai tersebut mempengaruhi laba rugi, dan pada baris item yang sama pada laporan laba rugi. Setiap bagian yang tidak efektif dalam perubahan nilai wajar derivatif diakui langsung pada laporan laba rugi.

Jika derivatif lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan, atau pada saat lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai arus kas atau pada saat transaksi lindung nilai dibatalkan maka secara prospektif akuntansi lindung nilai dihentikan. Pada saat lindung nilai atas suatu prakiraan transaksi dihentikan, maka jumlah kumulatif yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya sejak tahun dimana lindung nilai tersebut efektif, direklasifikasi dari penghasilan komprehensif lainnya ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada saat prakiraan transaksi tersebut terjadi dan mempengaruhi laba rugi. Jika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, maka saldo di penghasilan komprehensif lainnya langsung direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Hedge Accounting

Company applied cash flow hedge accounting. On initial designation of the hedge, the Company formally document the relationship between the hedging instruments and hedged items, including the risk management objective and strategy in undertaking the hedge transaction, together with the method that will be used to assess the effectiveness of the hedging relationship. Company make an assessment, both at the inception of the hedge relationship as well as on an ongoing basis, whether the hedging instruments are expected to be “highly effective” in offsetting the changes in the cash flows of the respective hedged items.

Changes in fair value of derivative instruments that do not qualify for hedge accounting are recognized to the current year profit or loss. If derivative instruments are designated and qualify for hedge accounting, changes in fair value of derivative instruments are recorded as adjustments to the hedged items in the current year other comprehensive income or in the equity, depending on the type of hedge transaction represented and the effectiveness of the hedge.

When a derivative is designated as the hedging instrument to hedge the variability in cash flows attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction that could affect profit or loss, the effective portion of changes in the fair value of the derivative is recognized in other comprehensive income. The amount recognized in other comprehensive income is reclassified to the profit or loss as a reclassification adjustment in the same year as the hedged cash flows affect profit or loss, and in the same line item in the statement of profit or loss. Any ineffective portion of changes in the fair value of the derivative is recognized immediately in the statement of profit or loss.

If the hedging derivative expires or is sold, terminated, or exercised, or when the hedge no longer meets the criteria for cash flow hedge accounting, or when the hedge designation is cancelled, then hedge accounting is discontinued prospectively. When the hedge of a forecast transaction is discounted, the cumulative amount recognized in other comprehensive income from the year when the hedge was effective, is reclassified from other comprehensive income to profit or loss as a reclassification adjustment when the forecast transaction occurs and affects profit or loss. If the forecast transaction is no longer expected to occur, then the balance in other comprehensive income is reclassified immediately to profit or loss as a reclassification adjustment.

l. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi kecuali aset relevan tersebut disajikan pada jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan disajikan pada jumlah revaluasian, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

l. Impairment of Non Financial Asset

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3e.

m. Jaminan yang Dikuasakan Kembali

Jaminan yang dikuasakan kembali dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih pada saat jaminan ditarik. Selisih nilai realisasi bersih jaminan yang dikuasakan kembali diatas nilai piutang yang tidak tertagih akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi. Beban yang berhubungan dengan aset yang dikuasakan kembali dan pemeliharaannya akan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pada saat akhir tahun, jaminan yang dikuasakan kembali akan direviu apabila terdapat penurunan nilai. Pada saat jaminan yang dikuasakan kembali dijual, nilai tercatatnya akan dikeluarkan dan hasil laba atau rugi akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi.

m. Foreclosed Collaterals

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value at the time of foreclosure. The excess of net realizable value of the foreclosed collateral over the balance of uncollectible receivables is credited or charged to profit or loss. Expense related to the foreclosed assets and its maintenance are charged to profit or loss as incurred. At the end of the year, foreclosed collateral are reviewed for any impairment in value. When the foreclosed collaterals are disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss.

n. Imbalan Kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang mengikuti Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 (“PP No. 35/2021”). Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuaria yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas imbalan pasti neto.

Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);
- beban atau pendapatan bunga neto;
- pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

n. Employee Benefits

The Company provides defined post-employment benefit plan for its employees in accordance with the Company’s Regulation which follow the Government Regulation No. 35 year 2021 (“PP No. 35/2021”). No funding has been made to this defined benefit plan.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognised in other comprehensive income as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognised in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability.

Defined benefit costs are categorised as follows:

- service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements);
- net interest expense or income;
- remeasurement.

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

o. Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor meliputi selisih antara agio saham (yaitu kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal) dengan biaya-biaya saham yang terkait langsung dengan penerbitan efek ekuitas Perusahaan dalam penawaran umum (Catatan 1c) serta selisih nilai transaksi restrukturisasi dengan entitas sepengendali.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah sebesar selisih antara harga pengalihan dengan proporsi jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi. Selisih ini terkait dengan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali yang merupakan kombinasi bisnis di mana seluruh entitas atau bisnis yang bergabung, pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama (baik sebelum maupun sesudah kombinasi bisnis) dan pengendalian tersebut tidak bersifat sementara. Transaksi ini tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan dan oleh karenanya dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

o. Additional Paid-in Capital

Additional paid-in capital includes the difference between the excess of paid-up share capital made by shareholders over its par value and the direct costs incurred in respect of the issuance of the Company's shares in the public offering (Note 1c) and the difference from restructuring transactions with entities under common control.

Difference from restructuring transactions with entities under common control are the difference betwen transfer price and the proportionate of the carrying amount of acquired entity's net assets. This difference pertinent to transaction of business combination under common control entities which is a business combination where all the entities or business that combines, eventually control by the same party (whether before or after business combination) and in nature, the control is permanent. This transaction do not result substantive change in economical ownership on the exchanged business and accordingly accounted for using pooling of interest method.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan pembiayaan konsumen, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan bunga dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 3e).

Pendapatan sewa pembiayaan dialokasi berdasarkan metode yang dijelaskan pada Catatan 3j.

Beban provisi sehubungan dengan pinjaman yang diterima diamortisasi dengan metode suku bunga efektif dan dibukukan sebagai bagian dari beban bunga dan beban pembiayaan lainnya.

Pendapatan dan beban lainnya

Pendapatan jasa administrasi yang tidak beratribusi secara langsung atas transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi dan diakui pada saat diterima.

Pendapatan denda keterlambatan dan keuntungan penghentian kontrak diakui pada saat diterima.

Beban lainnya diakui pada saat terjadinya.

p. Income and Expenses Recognition

Consumer financing income, finance lease income, interest income and interest expense are recognized under the accrual basis accounting using the effective interest method (Note 3e).

Finance lease income is allocated based on method described in Note 3j.

Loan fees related to the borrowings are amortized using the effective interest method and recorded as part of interest expense and other financial charges.

Income and other expenses

Administrative income that are not directly attributable to finance lease and consumer financing are recorded as income in profit or loss and recognized when incurred.

Income from late charges and early termination are recognized when received.

Other expenses are recognized when incurred.

q. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

q. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Pajak kini

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Perusahaan untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengangkibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Perusahaan yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi dan pada saat transaksi, tidak menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan dikenai pajak dalam jumlah yang sama. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Company's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgment of tax professionals within the Company supported by previous experience in respect of such activities and in certain cases based on specialist independent tax advice.

Deferred tax

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit and at the time of transaction, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi, atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

r. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

r. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

s. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a) Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b) Yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c) Dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada lokasi geografis.

s. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regulary reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

a) That engages in business activities from which it may earn income and incurred expense (including income and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);

b) Whose operating results are reviewed regulary by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and

c) For which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on geographic location.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai cadangan yang setara dengan ECL 12 bulan untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK 109 tidak menjelaskan apa yang merupakan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Perusahaan mempertimbangkan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Significant Increase in Credit Risk

As explained in Note 3, expected credit losses are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. PSAK 109 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Company takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward-looking information.

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below.

Perhitungan Cadangan Kerugian

KKE Kolektif atas Piutang Pembiayaan

KKE kolektif atas piutang pembiayaan dihitung dengan mempertimbangkan *probability of default* ("PD"), *loss given default* ("LGD"), *exposure at default* ("EAD"). Saat mengukur ECL, Perusahaan menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur ECL. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Calculation of Loss Allowance

Collective ECL on Financing Receivables

Collective ECL on financing receivables is calculated by considering the probability of default ("PD"), loss given default ("LGD") and exposure at default ("EAD"). When measuring ECL the Company uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

KKE Individual atas piutang pembiayaan

KKE individual atas piutang pembiayaan dihitung dengan estimasi arus kas yang akan diterima di masa depan, dengan mengombinasikan beberapa skenario dan asumsi probabilitas tertimbang. Dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, manajemen membuat pertimbangan mengenai kondisi keuangan dari pihak lawan dan nilai neto yang dapat direalisasi dari agunan yang diterima. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dievaluasi, dan strategi penyelesaiannya serta estimasi arus kas yang dinilai dapat diperoleh kembali disetujui secara independen oleh Manajemen.

Imbalan Kerja

Nilai kini atas kewajiban imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan dari basis aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi nilai tercatat atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga atas *Zero Coupon Bonds* yang mempunyai jatuh tempo yang mendekati jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Penilaian Instrumen Keuangan

Seperti dijelaskan dalam Catatan 35, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang meliputi input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi untuk mengestimasi nilai wajar dari beberapa jenis instrumen keuangan. Catatan 35 memberikan informasi yang rinci mengenai asumsi utama yang digunakan dalam menentukan nilai wajar instrumen keuangan.

Individual ECL on financing receivables

Individual ECL on financing receivables is assessed by the estimation of future cash flows, combining scenarios, and probability weightings assumptions. In calculating allowance for impairment losses, management makes judgments about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable are independently approved by the Management.

Employee Benefits

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for employee benefits include the discount rate. The Company determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to the required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of Zero Coupon Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

Valuation of Financial Instruments

As described in Note 35, the Company uses valuation techniques that include inputs that are not based on observable market data to estimate the fair value of certain types of financial instruments. Note 35 provides detailed information about the key assumptions used in the determination of the fair value of financial instruments.

5. KAS DAN SETARA KAS / 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Kas - Rupiah	313.951	463.408	Cash on hand - Rupiah
Bank			Bank
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	37.498.974	10.635.126	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.202.705	1.068.691	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.744.693	863.291	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	393.638	264.151	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Deutsche Bank AG	105.089	111.739	Deutsche Bank AG
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	22.175	66.473	PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Lainnya	13.603	59.901	Others
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
PT Bank Central Asia Tbk	5.833.931	1.735.275	PT Bank Central Asia Tbk
Deutsche Bank AG	459.638	442.657	Deutsche Bank AG
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	2.206	2.124	PT Bank SMBC Indonesia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	-	1.147.765	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	-	106.673	PT Bank DBS Indonesia
Yen Jepang			Japanese Yen
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	2.721	2.589	PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Sub-jumlah	48.279.373	16.506.455	Sub-total
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mizuho Indonesia	13.569.978	448.377	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	576.776	423.133	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
PT Bank Mizuho Indonesia	9.549.673	3.602.047	PT Bank Mizuho Indonesia
Yen Jepang			Japanese Yen
PT Bank Mizuho Indonesia	755.506	1.214.280	PT Bank Mizuho Indonesia
Sub-jumlah	24.451.933	5.687.837	Sub-total
Deposito Berjangka			Time Deposit
Pihak ketiga			Third Parties
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	-	18.000.000	PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Jumlah	73.045.257	40.657.700	Total

Tingkat bunga tahunan deposito berjangka sebesar 4,00% per tahun pada tahun 2024, dengan jatuh tempo antara 2 Januari 2025 - 3 Januari 2025.

Short-term time deposits earn interest rates of 4.00% per annum in 2024, with maturity date from January 2, 2025 - January 3, 2025.

Kas di bank memperoleh bunga dengan tingkat bunga mengambang berdasarkan tingkat bunga simpanan harian.

Cash in banks earn interest at floating rates based on daily bank deposits rate.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

As of December 31, 2025 and 2024, there are no cash and cash equivalents which restricted in use.

6. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN / 6. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Piutang pembiayaan konsumen	2.630.782.002	2.769.955.377	Consumer financing receivables
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(578.548.353)	(632.185.643)	Unearned income on consumer financing
Jumlah	2.052.233.649	2.137.769.734	Total
Cadangan kerugian kredit	(99.545.805)	(56.000.586)	Allowance for credit losses
Bersih	1.952.687.844	2.081.769.148	Net

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, rata-rata tingkat suku bunga efektif per tahun piutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, average effective interest rate per annum for consumer financing receivables are as follows:

	2025	2024	
Rupiah	21,38%	21,45%	Rupiah

Pada tanggal 31 Desember 2025, pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui termasuk biaya transaksi langsung yang belum diamortisasi yang terkait langsung sebesar Rp 80.771.748 ribu (2024: Rp 92.859.414 ribu).

As of December 31, 2025, unearned income on consumer financing receivables includes unamortized direct transaction costs amounting to Rp 80,771,748 thousand (2024: Rp 92,859,414 thousand).

Ringkasan piutang pembiayaan konsumen bruto berdasarkan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

Summary of gross consumer financing receivables based on business activities are as follows:

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Multiguna	2.296.580.812	2.461.615.628	Multipurpose
Modal Kerja	297.610.836	289.467.065	Working capital
Investasi	36.590.354	18.872.684	Investment
Jumlah	2.630.782.002	2.769.955.377	Total

Jumlah angsuran pembiayaan konsumen bruto sesuai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Total gross consumer financing installments based on maturity date are as follows:

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Telah jatuh tempo	323.832.299	190.766.680	Overdue
Belum jatuh tempo			Not yet due
Dalam satu tahun	276.945.587	252.266.775	Within one year
Dalam dua tahun	280.599.173	321.969.764	Within two years
Dalam tiga tahun atau lebih	1.749.404.943	2.004.952.158	Within three years or more
Jumlah	2.630.782.002	2.769.955.377	Total

Jangka waktu rata-rata pembiayaan konsumen berkisar antara 1 - 5 tahun.

The average period of consumer financing is ranging from 1 - 5 years.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, piutang pembiayaan konsumen tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

As of December 31, 2025 and 2024, consumer financing receivables are not used as collateral for bank loans.

Rincian saldo piutang pembiayaan konsumen berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Details of consumer financing receivables based on maturity date are as follows:

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Belum jatuh tempo	1.810.115.748	1.993.814.231	Not past due
Telah jatuh tempo			Past due
Kurang Dari 60 Hari	108.443.852	97.845.239	Less than 60 days
61 - 180 Hari	50.556.005	44.756.171	61 - 180 days
Lebih dari 180 Hari	83.118.044	1.354.093	More than 180 days
Jumlah	2.052.233.649	2.137.769.734	Total

Tabel berikut menunjukkan perubahan nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen:

The following tables show movement of the carrying amount of consumer financing receivables:

	2025				
	Tahap 1/ *Stage 1* Rp'000	Tahap 2/ *Stage 2* Rp'000	Tahap 3/ *Stage 3* Rp'000	Jumlah/ *Total* Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2025	2.093.213.480	27.707.894	16.848.360	2.137.769.734	Beginning balance - January 1, 2025
Transfer ke tahap 1	4.187.944	(4.140.940)	(47.004)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(56.306.367)	56.306.367	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(180.451.254)	(14.841.498)	195.292.752	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi, perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(934.574.365)	(18.040.894)	(24.385.994)	(977.001.253)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	967.738.227	-	-	967.738.227	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(76.273.059)	(76.273.059)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2025	1.893.807.665	46.990.929	111.435.055	2.052.233.649	Ending balance - December 31, 2025

	2024				
	Tahap 1/ *Stage 1* Rp'000	Tahap 2/ *Stage 2* Rp'000	Tahap 3/ *Stage 3* Rp'000	Jumlah/ *Total* Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2024	1.746.513.878	12.170.520	6.076.925	1.764.761.323	Beginning balance - January 1, 2024
Transfer ke tahap 1	1.215.488	(1.181.120)	(34.368)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(35.556.531)	35.556.531	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(107.273.989)	(273.489)	107.547.478	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi, perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(852.643.920)	(18.564.548)	(9.392.203)	(880.600.671)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accured interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	1.340.958.554	-	-	1.340.958.554	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(87.349.472)	(87.349.472)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2024	2.093.213.480	27.707.894	16.848.360	2.137.769.734	Ending balance - December 31, 2024

Tabel berikut menunjukkan perubahan cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang pembiayaan konsumen:

The following tables show movement of the allowance for expected credit losses of consumer financing receivables:

	2025				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2025	40.608.685	5.569.201	9.822.700	56.000.586	Beginning balance - January 1, 2025
Transfer ke tahap 1	753.143	(725.853)	(27.290)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(1.231.545)	1.231.545	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(2.320.025)	(3.594.356)	5.914.381	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi, perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(8.728.848)	(5.092.573)	(7.679.209)	(21.500.630)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accured interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	14.612.951	-	-	14.612.951	New financial assets originated
Pengukuran kembali penurunan nilai-bersih	(17.156.643)	10.714.543	133.148.057	126.705.957	Remeasurement of loss allowance-net
Penghapusan	-	-	(76.273.059)	(76.273.059)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2025	26.537.718	8.102.507	64.905.580	99.545.805	Ending balance - December 31, 2025

	2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2024	29.025.750	2.329.581	3.224.579	34.579.910	Beginning balance - January 1, 2024
Transfer ke tahap 1	246.735	(228.444)	(18.291)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(849.006)	849.006	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(379.886)	(51.472)	431.358	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi, perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(12.845.749)	(1.817.122)	(3.206.287)	(17.869.158)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accured interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	30.714.330	-	-	30.714.330	New financial assets originated
Pengukuran kembali penurunan nilai-bersih	(5.303.489)	4.487.652	96.740.813	95.924.976	Remeasurement of loss allowance-net
Penghapusan	-	-	(87.349.472)	(87.349.472)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2024	40.608.685	5.569.201	9.822.700	56.000.586	Ending balance - December 31, 2024

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian dan agunan yang diterima dari konsumen telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

The management believes that the amount of allowance for expected credit losses and the value of collateral received from consumers are adequate to cover the possible losses that might arise from uncollectible receivables.

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN / 7. FINANCE LEASE RECEIVABLES

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Piutang sewa pembiayaan	843.812.528	845.990.484	Finance lease receivables
Nilai sisa	59.238.705	53.664.182	Residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(93.708.867)	(100.543.559)	Unearned finance lease revenues
Simpanan jaminan	(59.238.705)	(53.664.182)	Security deposit
Sub-jumlah	750.103.661	745.446.925	Sub-total
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
Piutang sewa pembiayaan	202.839.168	221.994.528	Finance lease receivables
Nilai sisa	11.665.712	18.542.707	Residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(17.475.956)	(24.375.162)	Unearned finance lease revenues
Simpanan jaminan	(11.665.712)	(18.542.707)	Security deposit
Sub-jumlah	185.363.212	197.619.366	Sub-total
Dikurangi bagian yang dibiayai Perusahaan Pembiayaan lain sehubungan transaksi pembiayaan bersama - bersih (Catatan 36)	(27.953.042)	(39.953.165)	Less amounts financed by other finance company relating to the transactions Joint financing - net (Note 36)
Sub-jumlah	157.410.170	157.666.201	Sub-total
Yen Jepang			Japanese Yen
Piutang sewa pembiayaan	93.653.436	54.567.438	Finance lease receivables
Nilai sisa	1.533.320	1.458.829	Residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(3.169.554)	(1.428.764)	Unearned finance lease revenues
Simpanan jaminan	(1.533.320)	(1.458.829)	Security deposit
Sub-jumlah	90.483.882	53.138.674	Sub-total
Cadangan kerugian kredit ekpektasian	(74.459.549)	(76.451.006)	Allowance for expected credit losses
Jumlah	923.538.164	879.800.794	Total

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, rata-rata suku bunga efektif per tahun piutang sewa pembiayaan dalam masing-masing mata uang adalah sebagai berikut:

In December 31, 2025 and 2024, average effective interest rate per annum for finance lease in each currency are as follows:

	2025	2024	
Rupiah	10,48%	10,20%	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	5,70%	5,42%	United States Dollar
Yen Jepang	2,79%	2,37%	Japanese Yen

Pada tanggal 31 Desember 2025, pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui termasuk biaya transaksi langsung yang belum diamortisasi sebesar Rp 206.871 ribu (2024: Rp 431.386 ribu).

As of December 31, 2025, unearned finance lease revenue includes unamortized direct transaction costs amounting to Rp 206,871 thousand (2024: Rp 431,386 thousand).

Jumlah piutang sewa pembiayaan bruto berdasarkan jenis produk dan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

Total gross finance lease receivables based on type of products and business activities are as follows:

a. Berdasarkan jenis produk

a. Based on type of products

	2025	2024	
	Rp'000	Rp'000	
Alat berat	349.858.346	330.978.188	Heavy equipment
Mesin	522.636.156	537.192.657	Machinery
Kendaraan bermotor	267.810.630	254.381.605	Vehicles
Jumlah	1.140.305.132	1.122.552.450	Total

b. Berdasarkan kegiatan usaha

b. Based on business activities

	2025	2024	
	Rp'000	Rp'000	
Investasi	1.140.305.132	1.122.552.450	Investment
Jumlah	1.140.305.132	1.122.552.450	Total

Jumlah angsuran sewa pembiayaan bruto sesuai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Total gross finance lease installments based on maturity date are as follows:

	Pembayaran minimum sewa pembiayaan/ *Minimum lease payment*		Nilai kini dari pembayaran minimum sewa pembiayaan/ *Present value of minimum lease payment*		
	2025	2024	2025	2024	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Angsuran sewa pembiayaan					**Lease installments**
Jatuh tempo dan sampai dengan satu tahun	481.611.837	443.480.873	432.997.461	393.570.790	Due and within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	628.435.115	634.036.550	565.000.252	562.681.010	More than one year up to five years
Subjumlah	1.110.046.952	1.077.517.423	997.997.713	956.251.800	Sub-total
Pendapatan sewa pembiayaan					**Unearned Lease Income**
Belum diakui					
Jatuh tempo dan sampai dengan satu tahun	(48.614.376)	(49.910.083)	-	-	Due and within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	(63.434.863)	(71.355.540)	-	-	More than one year up to five years
Subjumlah	(112.049.239)	(121.265.623)	-	-	Sub-total
Jumlah	997.997.713	956.251.800	997.997.713	956.251.800	Total

Jangka waktu rata-rata pembiayaan adalah 2 sampai 5 tahun.

The average period of financing is 2 up to 5 years.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, piutang sewa pembiayaan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

As of December 31, 2025 and 2024, finance lease receivables are not used as collateral for bank loans.

Tabel berikut menunjukkan perubahan nilai tercatat bruto piutang sewa pembiayaan:

The following tables show movement of the gross carrying amount of finance lease receivables:

	2025				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2025	883.265.067	-	72.986.733	956.251.800	Beginning balance - January 1, 2025
Transfer ke tahap 1	-	-	-	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	-	-	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(3.691.764)	-	3.691.764	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi, perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(349.162.901)	-	(2.890.897)	(352.053.798)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accured interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	393.799.711	-	-	393.799.711	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	-	-	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2025	924.210.113	-	73.787.600	997.997.713	Ending balance - December 31, 2025

	2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2024	817.617.256	462.289	32.448.633	850.528.178	Beginning balance - January 1, 2025
Transfer ke tahap 1	3.071.593	-	(3.071.593)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	-	-	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(44.207.862)	-	44.207.862	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi, perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(350.814.893)	(462.289)	(521.555)	(351.798.737)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accured interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	457.598.973	-	-	457.598.973	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(76.614)	(76.614)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2025	883.265.067	-	72.986.733	956.251.800	Ending balance - December 31, 2025

Tabel berikut menunjukkan perubahan cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang sewa pembiayaan:

The following tables show movement of the allowance for expected credit losses of finance lease receivables:

	2025				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2025	3.464.273	-	72.986.733	76.451.006	Beginning balance - January 1, 2025
Transfer ke tahap 1	-	-	-	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	-	-	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(3.282.880)	-	3.282.880	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi, perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(18.247)	-	-	(18.247)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accured interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	122.093	-	-	122.093	New financial assets originated
Pengukuran kembali penurunan nilai-bersih	28.694	-	(2.123.997)	(2.095.303)	Remeasurement of loss allowance-net
Penghapusan	-	-	-	-	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2025	313.933	-	74.145.616	74.459.549	Ending balance - December 31, 2025

	2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2024	4.521.563	88.018	32.659.923	37.269.504	Beginning balance - January 1, 2024
Transfer ke tahap 1	3.282.880	-	(3.282.880)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	-	-	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(4.398.618)	-	4.398.618	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi, perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(41.342)	(88.018)	-	(129.360)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accured interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	126.461	-	-	126.461	New financial assets originated
Pengukuran kembali penurunan nilai-bersih	(26.671)	-	39.287.686	39.261.015	Remeasurement of loss allowance-net
Penghapusan	-	-	(76.614)	(76.614)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2024	3.464.273	-	72.986.733	76.451.006	Ending balance - December 31, 2024

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang sewa pembiayaan telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

The management believes that allowance for expected credit losses on finance lease receivables are adequate to cover the possible losses that might arise from uncollectible receivables.

Simpanan Jaminan

Pada saat perjanjian sewa pembiayaan dimulai, *lessee* memberikan simpanan jaminan yang akan digunakan sebagai pembayaran atas pembelian dari aset sewa pembiayaan pada akhir masa sewa, bila opsi dilaksanakan penyewa pembiayaan. Apabila opsi tidak dilaksanakan, simpanan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada *lessee* pada akhir masa sewa pembiayaan.

Security Deposits

At the inception of finance lease contract, the lessee rendered security deposits which will be used as payment of purchased leased assets at the end of the lease period, if the option is exercised. If the option is not exercised, such security deposits will be returned at the end of the lease period.

8. PIUTANG LAIN-LAIN / 8. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE

	2025	2024	
	Rp'000	Rp'000	
Pihak berelasi (Catatan 33)	2.178.048	2.652.802	Related parties (Note 33)
Pihak ketiga			Third parties
Piutang yang jaminannya dalam proses diambil alih	123.569.861	100.556.145	Receivables which collateral under take over process
Cadangan kerugian kredit	(27.438.691)	(17.492.097)	Allowance for credit losses
Bersih	96.131.170	83.064.048	Net
Lainnya	12.723.585	11.508.862	Others
Subjumlah	108.854.755	94.572.910	Sub-total
Jumlah	111.032.803	97.225.712	Total

Piutang yang Jaminannya Dalam Proses Diambil Alih

Akun ini merupakan piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan yang jaminannya sedang dalam proses pengambilalihan oleh Perusahaan.

Mutasi cadangan kerugian kredit adalah sebagai berikut:

Receivables which Collateral Under Take Over Process

This account represents consumer financing receivables, financing lease receivables whose collateral is in the process of being taken over by the Company.

The changes in the allowance for credit losses are as follows:

2025	2024	
Rp'000	Rp'000	
Saldo awal periode	17.492.097	13.460.665	Beginning balance
Penyisihan periode berjalan	9.946.594	4.031.432	Provision for the year
Saldo akhir periode	27.438.691	17.492.097	Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian kredit nilai piutang yang jaminannya dalam proses diambil alih adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas piutang tersebut.

Management believes that the allowance for credit losses of receivables which collateral under take over process is adequate to cover potential losses of the receivables.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini merupakan pembayaran atas sewa, asuransi dan lainnya. Pada 31 Desember 2025, jumlah tercatat biaya dibayar dimuka adalah sebesar Rp 3.074.871 ribu (2024: Rp 2.949.220 ribu).

9. PREPAID EXPENSES

This account represents payment of rent, insurances and others. As of December 31, 2025, the carrying amount of prepaid expenses amounted to Rp 3,074,871 thousand (2024: Rp 2,949,220 thousand).

10. ASET HAK-GUNA

10. RIGHT-OF-USE ASSETS

	1 Januari 2025/ *January 1, 2025*	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Biaya perolehan					**Cost**
Sewa bangunan	41.715.232	2.222.778	-	43.938.010	Rental building
Akumulasi penyusutan					**Accumulated depreciation**
Sewa bangunan	12.371.144	6.521.236	-	18.892.380	Rental building
Jumlah tercatat	29.344.088			25.045.630	**Carrying Value**

	1 Januari 2024/ *January 1, 2024*	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Biaya perolehan					**Cost**
Sewa bangunan	40.823.010	3.988.889	3.096.667	41.715.232	Rental building
Akumulasi penyusutan					**Accumulated depreciation**
Sewa bangunan	8.710.189	6.757.622	3.096.667	12.371.144	Rental building
Jumlah tercatat	32.112.821			29.344.088	**Carrying Value**

Beban penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.521.236 ribu (2024: Rp 6.757.622 ribu) dimana seluruhnya dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 31).

Depreciation expense charged to statement of profit or loss and other comprehensive income in December 31, 2025 amounted to Rp 6,521,236 thousand (2024: Rp 6,757,622 thousand), which entirely charged to general and administrative expenses (Note 31).

11. ASET TETAP / 11. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari 2025/ *January 1, 2025*	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Biaya perolehan					**Acquisition Cost**
Pemilikan langsung					
Tanah	13.069.791	-	-	13.069.791	Land
Bangunan	9.841.296	-	-	9.841.296	Building
Prasarana	17.556.139	991.658	3.395.697	15.152.100	Leasehold improvements
Kendaraan	15.281.185	966.232	763.337	15.484.080	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	7.577.016	337.744	1.561.713	6.353.047	Fixtures and office equipment
Komputer	39.025.711	1.990.333	25.797.847	15.218.197	Computer
Jumlah Biaya Perolehan	102.351.138	4.285.967	31.518.594	75.118.511	Total Acquisition Cost
Akumulasi penyusutan					**Accumulated Depreciation**
Bangunan	5.599.257	492.065	-	6.091.322	Building
Prasarana	7.792.069	2.819.288	3.395.697	7.215.660	Leasehold improvements
Kendaraan	5.646.042	1.791.427	614.743	6.822.726	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	3.925.710	1.240.066	1.561.598	3.604.178	Fixtures and office equipment
Komputer	31.065.957	4.075.108	25.797.845	9.343.220	Computer
Jumlah Akumulasi Penyusutan	54.029.035	10.417.954	31.369.883	33.077.106	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	48.322.103			42.041.405	**Book Value**

	1 Januari 2024/ *January 1, 2024*	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Biaya perolehan					**Acquisition Cost**
Pemilikan langsung					
Tanah	13.069.791	-	-	13.069.791	Land
Bangunan	9.841.296	-	-	9.841.296	Building
Prasarana	15.766.212	1.789.927	-	17.556.139	Leasehold improvements
Kendaraan	13.679.259	3.728.162	2.126.236	15.281.185	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	7.060.430	516.586	-	7.577.016	Fixtures and office equipment
Komputer	36.951.000	2.074.711	-	39.025.711	Computer
Jumlah Biaya Perolehan	96.367.988	8.109.386	2.126.236	102.351.138	Total Acquisition Cost
Akumulasi penyusutan					**Accumulated Depreciation**
Bangunan	5.107.192	492.065	-	5.599.257	Building
Prasarana	4.994.699	2.797.370	-	7.792.069	Leasehold improvements
Kendaraan	5.579.308	1.763.749	1.697.015	5.646.042	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	2.651.077	1.274.633	-	3.925.710	Fixtures and office equipment
Komputer	26.230.764	4.835.193	-	31.065.957	Computer
Jumlah Akumulasi Penyusutan	44.563.040	11.163.010	1.697.015	54.029.035	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	51.804.948			48.322.103	**Book Value**

Beban penyusutan aset tetap pada 31 Desember 2025 sebesar Rp 10.417.954 ribu (2024: Rp 11.163.010 ribu) dimana seluruhnya dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 31).

Depreciation expenses of property and equipment in December 31, 2025 amounted to Rp 10,417,954 thousand (2024: Rp 11,163,010 thousand), which entirely charged to general and administrative expenses (Note 31).

Perhitungan laba penjualan aset tetap selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The computations of gain on sale of property and equipment during the year are as follows:

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Hasil penerimaan dari penjualan	441.523	1.055.392	Proceeds from sales
Nilai buku	(148.711)	(429.221)	Book value
Laba penjualan aset tetap	292.812	626.171	Gain on sale of property and equipment

Perusahaan memiliki 3 bidang tanah di Jakarta dan Medan dengan hak legal berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2035, 2036 dan 2042. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

The Company owns 3 pieces of land in Jakarta and Medan with Building Use Right (HGB) for 20 (twenty) until 30 (thirty) years expiring in the year of 2035, 2036 and 2042. Management believes that there are no problem with the extension of land right because the land was acquired legally and is supported by sufficient evidence of ownership.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tanah dan bangunan tersebut tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

As of December 31, 2025 and 2024 , land and building are not used as collateral for bank loans.

Aset tetap selain tanah telah diasuransikan atas risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 46.821.259 ribu (2024: Rp 52.144.471 ribu). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang ditanggungkan.

Property and equipment except land are covered by insurance against losses by fire, theft and other risks with total coverage of Rp 46,821,259 thousand as of December 31, 2025 (2024: Rp 52,144,471 thousand). The management believes that the above insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat dari seluruh aset tetap tersebut dapat dipulihkan dan tidak terdapat adanya peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai, sehingga tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas aset tetap.

Management believes that the carrying amount of property and equipment are recoverable and also there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment, therefore no provision for impairment of property and equipment were provided.

12. ASET DERIVATIF

Perusahaan menggunakan instrumen derivatif, terutama kontrak *swap* suku bunga dan kontrak *swap cross currency*. Instrumen-instrumen ini meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam mengelola risiko, terutama risiko atas fluktuasi suku bunga dan nilai tukar yang timbul sebagai bagian dari kegiatan operasi Perusahaan.

12. DERIVATIVE ASSETS

The Company utilizes derivative instruments, principally interest rate swaps contracts, and cross currency swaps contracts. These instruments enhance the Company's ability to manage risks, primarily interest rates and exchange rates fluctuations, which exist as part of its ongoing business operations.

Estimasi nilai wajar dari instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The estimated fair values of the Company's derivative instruments as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025		2024		
	Nilai nasional/ *Outstanding national*	Nilai wajar disajikan sebagai aset (liabilitas) derivatif/*Fair value presented as derivative assets (liabilities)*	Nilai nasional/ *Outstanding national*	Nilai wajar disajikan sebagai aset (liabilitas) derivatif/*Fair value presented as derivative assets (liabilities)*	
	USD'000	Rp'000	USD'000	Rp'000	
Aset					Assets
Swap Suku Bunga	-	-	146	30.557	Interest rate swap
Swap Cross Currency	9.594	1.749.376	2.867	3.737.095	Cross currency swap
Sub-jumlah	9.594	1.749.376	3.013	3.767.652	Sub-total
Bersih	9.594	1.749.376	3.013	3.767.652	Net

Penurunan nilai wajar sebesar Rp 2.018.276 ribu pada 31 Desember 2025 (Penurunan nilai wajar pada 31 Desember 2024: Rp 3.954.544 ribu) adalah bagian dari cadangan lindung nilai bersih setelah efek pajak.

The corresponding decrease in fair value of Rp 2,018,276 thousand in December 31, 2025 (Decrease in fair value on December 31, 2024: Rp 3,954,544 thousand) are included as part of hedging reserve, net of the related tax effect.

Kontrak *swap* suku bunga mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, di mana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

The interest rate swap contracts exchange floating rate interest for fixed rate interest and are designated and effective as cash flow hedge instruments.

Kontrak *swap cross currency* mempertukarkan pinjaman yang diterima dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang spesifik pada tanggal dimulainya transaksi, di mana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

The cross currency swap contracts exchange loan received in United States Dollar to Rupiah with a specified exchange rate at initial date and are designated and effective as cash flow hedge.

Kisaran jangka waktu kontrak derivatif adalah 2 - 4 tahun pada tahun 2025 dan 2024.

The range of period for derivative are 2 - 4 years in 2025 and 2024.

Beban bunga kontrak *swap* suku bunga dan *swap cross currency* pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.481.658 ribu (2024: Rp 248.476 ribu) yang dicatat sebagai bagian dari "Beban Bunga dan Pembiayaan Lainnya" (Catatan 29).

Interest expenses for interest rate swap and cross currency swap in December 31, 2025 amounted to Rp 1,481,658 thousand (2024: Rp 248,476 thousand), which recorded as part of "Interest and Other Financing Charges" (Note 29).

Pendapatan bunga kontrak *swap* suku bunga dan *swap cross currency* pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 37.119 ribu (2024: Rp 1.147.994 ribu) yang dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan Lain-lain" (Catatan 28).

Interest income for interest rate swap and cross currency swap in December 31, 2025 amounted to Rp 37,119 thousand (2024: Rp 1,147,994 thousand) which recorded as part of "Other Income" (Note 28).

Estimasi nilai wajar dari kontrak *swap* suku bunga dan *swap cross currency* dihitung berdasarkan nilai pasar. Perjanjian atas *swap* suku bunga dan *swap cross currency* digunakan untuk mengelola eksposur suku bunga dan nilai tukar dari pinjaman (Catatan 14).

The estimated fair values of the interest rate swap and cross currency swap contracts are calculated based on market rates. An interest rate swap and cross currency swap agreements are used to manage interest rate exposure and exchange rate exposure on the borrowings (Note 14).

Eksposur terhadap risiko kredit pihak lawan *(counterparty)* dianggap rendah karena perjanjian ini dibuat dengan lembaga keuangan terpercaya dengan peringkat kredit yang baik yang diharapkan memenuhi ketentuan sesuai dengan perjanjian.

Exposure to counterparty credit risk is considered low because these agreements have been entered into with major creditworthy institutions with good credit ratings, and they are expected to perform fully under the terms of the agreements.

Mutasi cadangan lindung nilai yang dimiliki oleh Perusahaan pada 31 Desember 2025 dan 31 December 2024 adalah sebagai berikut:

The movement of the Company's cash flow hedging reserve in December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Saldo awal	298.106	1.958.501	Beginning balance
Laba (rugi) perubahan nilai wajar	(2.018.276)	(3.954.544)	Gain (loss) on changes in fair value
Reklasifikasi ke laba rugi	31.321	1.825.835	Reclassified to profit or loss
Pajak penghasilan terkait yang diakui pada penghasilan komprehensif lain (Catatan 19)	437.130	468.314	Income tax related recognized in other comprehensive income (Note 19)
Saldo Akhir	(1.251.719)	298.106	Ending balance

13. ASET LAIN-LAIN / 13. OTHER ASSETS

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
Rupiah			Rupiah
Beban ditangguhkan - bersih	50.000	50.000	Deferred charges
Uang jaminan	21.175	23.175	Security deposits
Sub-jumlah	71.175	73.175	Sub-total
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Jaminan yang dikuasakan kembali	784.159	920.619	Foreclosed collateral
Cadangan penurunan nilai	(345.159)	(262.619)	Allowance for impairment loss
Bersih	439.000	658.000	Net
Estimasi tagihan pajak (Catatan 19)	1.579.165	6.704.120	Estimated claims for tax refund (Note 19)
Uang jaminan	2.238.911	2.111.936	Security deposits
Uang muka	938.259	1.381.004	Advances
Sub-jumlah	4.756.335	10.197.060	Sub-total
Jumlah	5.266.510	10.928.235	Total

Beban amortisasi atas beban ditangguhkan atas biaya transaksi pinjaman bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 75.000 ribu.

Amortization expense of deferred charges of transaction cost for bank loan for the year ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 75,000 thousand, respectively.

Jaminan yang Dikuasakan Kembali

Jaminan yang dikuasakan kembali merupakan jaminan piutang pembiayaan berupa kendaraan, alat berat dan mesin yang telah diambil alih oleh Perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai jaminan yang dikuasakan kembali cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tersebut.

Atas jaminan yang dikuasakan kembali, Perusahaan terus melakukan upaya penyelesaian.

Foreclosed Collateral

Foreclosed collateral represents consumer financing collateral in the form of vehicles, heavy equipment and machineries that have been foreclosed by the Company.

Management believes that the allowance for impairment loss of foreclosed collateral is adequate to cover potential losses.

For the foreclosed collateral, the Company continues to make settlement efforts.

Lainnya

Lainnya terdiri dari uang jaminan sewa, uang jaminan lain-lain dan uang muka lain-lain.

Others

Others consist of rent refundable deposit, other refundable deposit and other advances.

14. UTANG BANK / 14. BANK LOANS

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Jangka pendek			**Short-term**
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mizuho Indonesia	1.550.000.000	1.798.000.000	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.000.000	5.000.000	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
PT Bank Mizuho Indonesia (USD 450 ribu, 2024 : USD 190 ribu)	7.551.900	3.070.780	PT Bank Mizuho Indonesia (USD 450 thousand, 2024 :USD 190 thousand)
Sub-jumlah	1.562.551.900	1.806.070.780	Sub-total
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	200.000.000	164.000.000	PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Deutsche Bank AG Jakarta	153.000.000	43.000.000	Deutsche Bank AG Jakarta
PT Bank Resona Perdania	-	100.000.000	PT Bank Resona Perdania
Yen Jepang			Japanese Yen
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., Singapore (JPY 200.000 ribu, 2024: JPY 275.000 ribu)	21.518.160	28.149.687	Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., Singapore (JPY 200,000 thousand, 2024: JPY 275,000 thousand)
Sub-jumlah	374.518.160	335.149.687	Sub-total
Jumlah jangka pendek	1.937.070.060	2.141.220.467	**Total short-term**

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Jangka panjang			**Long-term**
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
PT Bank Mizuho Indonesia (USD 10.875 ribu, 2024: USD 518 ribu)	182.504.314	8.372.208	PT Bank Mizuho Indonesia (USD 10,875 thousand, 2024: USD 518 thousand)
Sub-jumlah	182.504.314	8.372.208	Sub-total
Pihak ketiga			Third parties
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore (USD 2.018 ribu, 2024: USD 3.835 ribu)	33.867.006	61.976.779	The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore (USD 2,018 thousand, 2024: USD 3,835 thousand)
The Chugoku Bank, Ltd., Hong Kong (USD 750 ribu) 2024: USD 1.250 ribu)	12.586.500	20.202.500	The Chugoku Bank, Ltd., Hong Kong (USD 750 thousand) 2024: USD 1,250 thousand)
Yen Jepang			Japanese Yen
The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore (JPY 402.481 ribu, 2024: JPY 121.354 ribu)	43.303.248	12.422.114	The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore (JPY 402,481 thousand, 2024: JPY 121,354 thousand)
Sub-jumlah	89.756.754	94.601.393	Sub-total
Sub-jumlah jangka panjang	272.261.068	102.973.601	**Sub-total long-term**
Jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			**Current maturities of long-term**
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
PT Bank Mizuho Indonesia (USD 1.164 ribu, 2024: USD 3.112 ribu)	19.526.041	50.299.196	PT Bank Mizuho Indonesia (USD 1,164 thousand, 2024: USD 3,112 thousand)
Sub-jumlah	19.526.041	50.299.196	Sub-total
Pihak ketiga			Third parties
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore (USD 1.817 ribu, 2024: USD 1.817 ribu)	30.487.301	29.360.968	The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore (USD 1,817 thousand, 2024: USD 1,817 thousand)
The Chugoku Bank, Ltd., Hong Kong (USD 500 ribu, 2024: USD 500 ribu)	8.391.000	8.081.000	The Chugoku Bank, Ltd., Hong Kong (USD 500 thousand, 2024: USD 500 thousand)
Yen Jepang			Japenese Yen
The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore (JPY 270.720 ribu, 2024: JPY 151.250 ribu)	29.126.941	15.482.329	The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore (JPY 270,720 thousand, 2024: JPY 151,250 thousand)
Sub-jumlah	68.005.242	52.924.297	Sub-total
Jumlah jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	87.531.283	103.223.493	Total current maturities of long-term
Jumlah jangka panjang	359.792.351	206.197.094	**Total long-term**
Jumlah	**2.296.862.411**	**2.347.417.561**	**Total**

Berikut adalah fasilitas utang bank yang dimiliki Perusahaan:

The Company's bank loans facilities are as follows:

Bank	Fasilitas/ *Facilities*	Batas kredit/ *Credit limit* '000	Tanggal perjanjian awal/ *Initial agreement date*	Tanggal effektif pinjaman/ *Effective loan date*	Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date of the facility* 31 December/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pinjaman Cerukan/ *Overdraft Loan*	Rp 30.000.000	30/11/2010	10/09/2025	10/09/2026	10/09/2025
	Money Market Line / *Money Market Line*	Rp 100.000.000	31/10/2016	10/09/2025	10/09/2026	10/09/2025
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Singapore	Kredit Berulang/ *Revolving Loan* Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 30 September 2026/ *This agreement has term period until September 30, 2026*	JPY 1.500.000	31/03/2017	28/03/2025	31/03/2026	28/03/2025
PT Bank Resona Perdania	Pinjaman Modal Kerja Bergulir/ *Working Capital Revolving Facility*	Rp 100.000.000	27/06/2024	27/06/2025	27/06/2026	27/06/2025
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (D/h. PT Bank BTPN Tbk)	Pinjaman Revolving/ *Revolving Loan* Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 30 April 2030/ *This agreement has term period until April 30, 2030*	Rp 750.000.000 (atau nilai yang setara dalam USD)/ *(or its equivalent in USD)*	07/06/2012	30/04/2025	30/04/2026	30/04/2025
PT Bank Mizuho Indonesia	Pinjaman Revolving/ *Revolving Loan* Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 30 April 2030/ *This agreement has term period until April 30, 2030*	USD 120.000 (atau nilai yang setara dalam mata uang lain)/ *(or its equivalent in other currencies)*	07/02/2011	30/04/2025	30/04/2026	30/04/2025
			07/02/2011	30/10/2025	30/10/2029	-

Bank	Fasilitas/ *Facilities*	Batas kredit/ *Credit limit* '000	Tanggal perjanjian awal/ *Initial agreement date*	Tanggal effektif pinjaman/ *Effective loan date*	Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date of the facility* 31 December/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024
The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore	Pinjaman Berjangka/ *Term Loan* Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 20 Januari 2028/ *This agreement has term period until January 20, 2028*	USD 5.000	20/01/2022	20/01/2022	04/07/2026	04/07/2026
	Pinjaman Berjangka/ *Term Loan* Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 3 Februari 2029/ *This agreement has term period until February 3, 2029*	USD 6.000 (atau nilai yang setara dalam Yen)/ *(or its equivalent in Yen)*	03/02/2023	03/02/2023	27/09/2027	27/09/2027
	Pinjaman Berjangka/ *Term Loan* Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 03 Februari 2030 *This agreement has term period until February 3, 2030*	USD 6.000 (atau nilai yang setara dalam mata uang Yen *Jepang)/ (or its equivalent in JPY currencies)*	02/02/2024	02/02/2024	31/07/2028	31/07/2028
	Pinjaman Berjangka/ *Term Loan* Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 27 Februari 2031 *This agreement has term period until February 27, 2031*	USD 5.000 (atau nilai yang setara dalam mata uang Yen *Jepang)/ (or its equivalent in JPY currencies)*	28/02/2025	28/02/2025	27/02/2031	-
The Chugoku Bank, Ltd., Hong Kong	Pinjaman Jangka Panjang Mata Uang Tunggal/ *Single Currency Long-term Loan*	USD 10.000	20/06/2023	20/06/2023	28/04/2028	20/06/2024
Deutsche Bank AG Jakarta	Pinjaman cerukan dan Pinjaman Jangka Pendek/ *Overdraft and Short-term Loan*	USD 10.000	16/11/2018	16/11/2018	30/06/2026	30/06/2024

	Rata-rata tertimbang suku bunga efektif/ *Weighted average interest rate*		
	2025	2024	
Jangka panjang	5.67%	6.19%	Long term
Jangka pendek	5.03%	5.46%	Short term

Selama 2025, seluruh fasilitas di atas dijamin dengan jaminan Perusahaan dari Mizuho Leasing Co., Ltd.

Seluruh utang bank yang diterima Perusahaan digunakan untuk kebutuhan modal kerja.

During 2025, all facilities above are guaranteed by the corporate guarantee from Mizuho Leasing Co., Ltd.

All of the bank loans obtained by the Company are used for working capital purposes.

Terkait dengan seluruh utang-utang bank yang diperoleh, Perusahaan wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh Bank jika terdapat perubahan susunan pengurus, merger dan akuisisi, perubahan bentuk perusahaan, komposisi permodalan. Perjanjian ini juga mencakup persyaratan rasio keuangan sebagai berikut:

- Menjaga kepemilikan saham Mizuho Leasing Co., Ltd. lebih besar dari 50% atau sebagai pemegang saham utama
- Untuk Bank Panin dan Bank Resona Perdania, Perusahaan wajib menjaga gearing ratio sebesar 10x
- Untuk Bank Resona Perdania Perusahaan wajib menjaga rasio *non-performing financing* untuk tunggakan lebih dari 90 hari tidak lebih dari 5% serta current ratioo minimum 100%.

Perusahaan tidak memiliki tunggakan pembayaran pokok, bunga maupun pelanggaran lainnya berkaitan dengan utang bank selama tahun 2025 dan 2024.

In accordance with all bank loans obtained, the Company is obliged to provide written notification to all banks if there are any changes in management, mergers and acquisitions, changes in company structure, changes in composition of capital. The agreements also include the following financial ratio requirements as follows:

- Maintain share ownership of Mizuho Leasing Co., Ltd. more than 50% or as the main shareholder
- For Bank Panin and Bank Resona Perdania, The Company is required to maintain its gearing ratio at 10x
- For Bank Resona Perdania, the Company obliged to maintain non-performing financing ratio of overdue payment more than 90 days for no exceed than 5% also current ratio at minimum 100%.

The Company did not have any default in the principal or interest payment or breach any covenants with respect to the bank loans in 2025 and 2024.

15. UTANG USAHA / 15. TRADE PAYABLES

Akun ini merupakan utang kepada *dealer* kendaraan bermotor (pihak ketiga) serta *vendor* mesin dan alat berat sehubungan dengan kegiatan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan yang tidak dikenakan bunga dan jangka waktu.

This account represents payable to motor-vehicle dealer (third parties) along with machine and heavy equipment vendor in connection with the consumer financing and lease financing activities which do not bear interests and without any stated repayment terms.

16. UTANG LAIN-LAIN / 16. OTHER PAYABLES

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Pihak ketiga			Third parties
Uang muka pelanggan	44.901.741	48.193.571	Customers' deposits
Utang asuransi	2.346.671	1.706.153	Insurance payables
Pendapatan ditangguhkan	4.380.069	4.778.739	Deferred income
Lainnya	2.362.545	3.547.061	Others
Jumlah	53.991.026	58.225.524	Total

17. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR / 17. ACCRUED EXPENSES

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
Bunga atas utang bank	3.866.897	937.028	Interest of bank loans
Pihak ketiga			Third parties
Bonus dan tunjangan	5.916.966	4.867.583	Bonuses and allowances
Bunga atas utang bank	1.043.015	723.707	Interest of bank loans
Jasa profesional	1.801.795	2.494.840	Professional fee
Telepon, internet dan listrik	593.455	325.852	Telephone, internet and electricity
Lain-lain	597	12.354	Others
Sub-jumlah	9.355.828	8.424.336	Sub-total
Jumlah	13.222.725	9.361.364	Total

18. UTANG PAJAK / 18. TAXES PAYABLE

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Pajak yang dipungut			Withholding taxes
Pasal 23	121.107	77.080	Article 23
Pasal 26	308.805	298.283	Article 26
Pasal 4 (2)	245.650	164.363	Article 4 (2)
Pajak Pertambahan Nilai	175.066	211.391	Value Added Tax
Jumlah	850.628	751.117	Total

19. PAJAK PENGHASILAN

a. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) untuk tahun berjalan:

19. INCOME TAX

a. Corporate Income Tax

The reconciliation between profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income (fiscal loss) for the year are as follows:

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	8.543.646	(5.036.273)	Profit (loss) before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Beda temporer			**Temporary differences**
Kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan	(4.015.587)	8.019.171	Provision for expected credit losses on consumer financing and finance lease receivables
Penyisihan penurunan nilai jaminan yang dikuasakan kembali	82.540	(153.126)	Allowance for decline in value of foreclosed collateral
Bonus	1.049.382	(684.417)	Bonus
Imbalan pasca kerja	(480.811)	3.767.736	Post-employment benefits
Aset hak-guna	1.144.685	88.276	Right-of-use asset
Penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain	9.946.594	4.031.433	Provision for expected credit losses on other receivables
Penyusutan aset tetap	(1.352.624)	(1.290.060)	Depreciation of property and equipment
Amortisasi goodwill yang timbul atas transaksi penggabungan usaha	(1.770.469)	(685.343)	Amortization of goodwill arise from merger transaction
Jumlah beda temporer	4.603.710	13.093.670	Total temporary differences
Beda tetap			**Permanent differences**
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal	922.611	2.630.202	Non-deductible expenses for fiscal purposes
Pendapatan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(338.481)	(351.787)	Income already subjected to final tax
Jumlah beda tetap	584.130	2.278.415	Total permanent differences
Taksiran Penghasilan Kena Pajak Tahun Berjalan	13.731.486	10.335.812	**Estimated Taxable Income for Current Year**
Estimasi kompensasi rugi fiskal Tahun 2021	(11.221.047)	(21.556.859)	Estimated fiscal loss carryforward Year 2021
Koreksi sesuai hasil pemeriksaan pajak Tahun 2019	51.715	-	Adjustment according to tax assessment Year 2019
Koreksi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT)	(2.595.685)	-	Adjustment of Annual Tax Report (SPT)
Akumulasi Rugi Fiskal	(33.531)	(11.221.047)	**Accumulated Fiscal Loss**

Jumlah taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) di atas menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan ke kantor pajak.

The annual tax return (SPT) which submitted to the tax office are prepared based on the above estimated taxable income (fiscal loss).

Pada tahun 2025, Perusahaan telah melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2024 yang merubah taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal).

In 2025, an amendment was made to the Company's 2024 Annual Corporate Income Tax Return (SPT) resulted in a revision to the estimated taxable income (fiscal loss).

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku terhadap laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income tax benefit (expense) included in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the amount computed by applying the applicable tax rates to profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2025	2024	
	Rp'000	Rp'000	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	8.543.646	(5.036.273)	Profit (loss) before tax per statement of profit or loss comprehensif
Beban (manfaat) pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku efektif	1.879.602	(1.107.980)	Income tax (benefit) expense calculated using effective rate
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal	202.974	578.644	Non-deductible expenses for fiscal purposes
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(74.466)	(77.393)	Income already subjected to final tax
Penyesuaian beban pajak kini berdasarkan hasil pemeriksaan pajak Tahun 2014	5.124.955	-	Adjustment of current tax expense in accordance with tax assessment Year 2014
Penyesuaian pajak tangguhan	1.538.869	-	Deferred tax adjustment
Utilisasi aset pajak tangguhan yang tidak diakui dari rugi fiskal	(3.020.927)	(2.273.879)	Utilization of unrecognized deferred tax assets from fiscal losses
Beban (manfaat) pajak penghasilan - bersih	5.651.007	(2.880.608)	Income tax expense (benefit) - net

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak *(self-assessment)*. Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam jangka waktu lima tahun sejak pajak terutang.

The determination of the tax liabilities is based on self-assessment. The tax office can perform examination of income taxes within five years after the tax becomes due.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On October 29, 2021, the Government issue Law of the Republic of Indonesia No.7 Year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards.

Berdasarkan kriteria di atas, tarif pajak penghasilan Perusahaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar 22%.

Based on criteria above, the Company's tax rate for December 31, 2025 and 2024 is 22%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global ("Pilar Dua") telah diundangkan dan ditetapkan di Indonesia yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Perusahaan menerapkan pengecualian PSAK 212 untuk mengakui dan mengungkapkan informasi tentang aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan pilar dua. Perusahaan masih menilai dampak dari penerapan peraturan tersebut.

On December 31, 2024, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia's Regulation No. 136 Year 2024 concerning the Imposition of Global Minimum Tax ("Pillar Two") has been enacted and established in Indonesia with effective date starting January 1, 2025. The Company applies the SFAS 212 exception to recognise and disclose information on deferred tax assets and liabilities related to the Pillar Two income taxes. The Company is still assessing the impact on the implementation of such regulation.

b. Pajak Tangguhan

b. Deferred Tax

Rincian aset pajak tangguhan-bersih Perusahaan adalah sebagai berikut:

The details of the Company's deferred tax assets-net are as follows:

	1 Januari 2025/ *January 1, 2025*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Cadangan kerugian kredit atas piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan	5.669.841	(883.429)	-	4.786.412	Allowance for credit losses on consumer financing receivables and finance lease receivables
Liabilitas imbalan pasca kerja	4.765.231	(105.778)	374.329	5.033.782	Post-employment benefit liabilities
Cadangan kerugian kredit atas piutang lain-lain	3.848.262	2.188.251	-	6.036.513	Allowance for credit losses on other receivables
Cadangan penurunan nilai jaminan yang dikuasakan kembali	57.775	18.159	-	75.934	Allowance for credit losses on foreclosed collateral
Bonus	1.070.868	230.864	-	1.301.732	Bonus
Lindung nilai arus kas	(84.081)	-	437.130	353.049	Cash flow hedges
Goodwill atas transaksi penggabungan usaha	389.505	(389.505)	-	-	Goodwill from merger transaction
Penyusutan aset tetap	(458.687)	(297.577)	-	(756.264)	Depreciation of fixed assets
Aset hak-guna	499.710	(1.287.037)	-	(787.327)	Right-of-use assets
Jumlah aset pajak tangguhan	15.758.424	(526.052)	811.459	16.043.831	Total deferred tax assets

	1 Januari 2024/ *January 1, 2024*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Cadangan kerugian kredit atas piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan	3.905.623	1.764.218	-	5.669.841	Allowance for credit losses on consumer financing receivables and finance lease receivables
Liabilitas imbalan pasca kerja	3.182.487	828.902	753.842	4.765.231	Post-employment benefit liabilities
Cadangan kerugian kredit atas piutang lain-lain	2.961.347	886.915	-	3.848.262	Allowance for credit losses on other receivables
Cadangan penurunan nilai jaminan yang dikuasakan kembali	91.463	(33.688)	-	57.775	Allowance for credit losses on foreclosed collateral
Appreciation Employee	1.221.440	(150.572)	-	1.070.868	Appreciation Employee
Lindung nilai arus kas	(552.397)	-	468.316	(84.081)	Cash flow hedges
Goodwill atas transaksi penggabungan usaha	540.280	(150.775)	-	389.505	Goodwill from merger transaction
Penyusutan aset tetap	(174.874)	(283.813)	-	(458.687)	Depreciation of fixed assets
Aset hak-guna	480.289	19.421	-	499.710	Right-of-use assets
Jumlah aset pajak tangguhan	11.655.658	2.880.608	1.222.158	15.758.424	Total deferred tax assets

Perusahaan mencatat akumulasi rugi fiskal sebesar Rp 33.531 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 (2024: Rp 11.221.047 ribu). Rugi fiskal ini telah dicatat namun manajemen yakin diperlukan penyisihan sehubungan dengan sifat ketidakpastian estimasinya terutama berkaitan dengan peraturan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah perpajakan dalam 5 (lima) tahun sejak pajak tersebut terhutang. Secara konservatif, manajemen menghindari pengakuan pendapatan pajak tangguhan yang berasal dari rugi fiskal lebih awal sehingga aset pajak tangguhan belum diakui.

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan di atas dapat dipulihkan dengan penghasilan kena pajak Perusahaan di masa mendatang.

The Company has accumulated tax loss carry forward amounting to Rp 33,531 thousand for the year ended December 31, 2025 (2024: Rp 11,221,047 thousand. These tax losses have been carried forward however management believes valuation allowance should be provided considering its nature of estimate uncertainty especially under the prevailing regulation, the Directorate General of Tax may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due. Conservatively, the management avoid to recognize deferred tax income from carry forward tax loss earlier and hence deferred tax assets have not been recognized.

Management believes that deferred tax assets are recoverable against the Company's future taxable income.

c. Estimasi tagihan pajak

c. Estimated claims for tax refund

	2025	2024	
	Rp'000	Rp'000	
Pajak Penghasilan Badan			Corporate Income Tax
Tahun 2014	-	5.124.955	Year 2014
Pajak Pertambahan Nilai			Value Added Tax
Tahun 2019	1.579.165	1.579.165	Year 2019
Jumlah	1.579.165	6.704.120	Total

d. Surat Ketetapan Pajak

Pajak Penghasilan 2014

Pada tanggal 28 Februari 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dari Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) sebesar Rp 8.949.531 ribu. Perusahaan telah membayar kurang bayar PPh Badan tersebut pada tanggal 8 Mei 2019. Perusahaan menerima hasil ketetapan atas kurang bayar sebesar Rp 237.584 ribu, sedangkan Perusahaan mengajukan keberatan sebesar Rp 8.711.947 ribu kepada DJP pada tanggal 27 Mei 2019

Pada tanggal 16 Maret 2020, DJP menolak keberatan Perusahaan tersebut dan pada tanggal 15 Juni 2020, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas jumlah kurang bayar sebesar Rp 8.711.947 ribu.

Pada tanggal 1 November 2023, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding Perusahaan sebesar Rp 3.586.992 ribu dan telah menerima pengembalian tersebut pada tanggal 6 Desember 2023.

d. Tax Assessment Letters

Income Tax 2014

On February 28, 2019, the Company received the Tax Assessment Letter Underpayments ("SKPKB") from the Directorate General of Taxation ("DJP") for the underpayment of Corporate Income Tax ("CIT") amounting to Rp 8,949,531 thousand. The Company has paid the CIT underpayment on May 8, 2019. The Company accepted the tax assessment of underpayment amounting to Rp 237,584 thousand, while for the underpayment of Rp 8,711,947 thousand the Company filed an objection to the DJP on May 27, 2019.

On March 16, 2020, DJP rejected the objection of the Company and on June 15, 2020, the Company filed an appeal to the Tax Court against the underpayment of Rp 8,711,947 thousand.

On November 1, 2023, the Tax Court partially granted the Company's appeal amounting to Rp 3,586,992 thousand and has received the refunds on December 6, 2023.

Pada tanggal 24 Januari 2024, Perusahaan mengajukan surat Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk sisa pengembalian SKPKB tersebut.

On January 24, 2024, the Company submitted a request for Judicial Review and Memory of Judicial Review to the Supreme Court for the remaining claim of the SKPKB.

Pada tanggal 12 November 2025, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali Perusahaan. Perusahaan membebankan SKPKB tersebut pada "Beban Pajak Kini" tahun berjalan.

On November 12, 2025, the Supreme Court rejected the Company's judicial review application. The Company charged the SKPKB to the current year "Current Income Tax Expenses".

Pajak Pertambahan Nilai 2019

Value Added Tax 2019

Pada bulan Oktober 2024, Perusahaan menerima SKPKB PPN dan STP PPN dari DJP untuk periode September 2019 sampai Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 1.476.407 ribu dan Rp 102.758 ribu. Pada bulan Oktober 2024, Perusahaan melakukan pembayaran atas kurang bayar tersebut dan membebankan SKPKB dan STP PPN tersebut.

In October 2024, the Company received SKPKB VAT and STP PPN from DGT for the period of September 2019 to December 2019 amounting to Rp 1,476,407 thousand and Rp 102,758 thousand, respectively. In October 2024, the Company has paid the underpayment in October 2024 and charged those SKPKB and STP VAT.

Pada bulan Desember 2024, Perusahaan mengajukan keberatan kepada DJP atas SKPKB dan STP PPN tersebut sebesar Rp 1.579.165 ribu.

In December 2024, the Company submitted an objection to DGT for those SKPKB and STP VAT amounting to Rp 1,579,165 thousand.

Pada tanggal 10 November 2025, DJP menolak keberatan Perusahaan tersebut dan pada tanggal 5 Februari 2026, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas penolakan keberatan tersebut.

On November 10, 2025, DJP rejected the objection of the Company and on 5 February 2026, the Company filed an appeal to the tax court against the rejection of the objection.

20. LIABILITAS SEWA / 20. LEASE LIABILITIES

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Analisa jatuh tempo			Maturity analysis
1 tahun	2.326.280	1.880.844	1 year
Lebih dari 1 tahun	19.140.591	22.739.800	More than 1 year
Jumlah	21.466.871	24.620.644	Total

Jumlah biaya bunga yang dibebankan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.808.493 ribu (2024: Rp 2.022.908 ribu) (Catatan 29).

Interest expense charged for the year ended December 31, 2025 amounted to Rp 1,808,493 thousand (2024: Rp 2,022,908 thousand) (Note 29).

21. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA / 21. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

Perusahaan menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang mengikuti Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 ("PP No. 35/2021"). Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 627 karyawan (2024: 624 karyawan).

The Company calculates defined post-employment benefits for its employees in accordance with the Company's Regulation which follow the Government Regulation No. 35 year 2021 ("PP No. 35/2021"). The number of employees entitled to the benefits are 627 employees as of December 31, 2025 (2024: 624 employees).

Liabilitas imbalan pasca kerja imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

The defined employment benefit liabilities plan typically expose the Company to actuarial risks such as interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Risiko harapan hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Longevity risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Risiko gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir dari liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Reconciliation between beginning and ending balance of post-employment benefits liabilities are as follows:

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Saldo awal tahun	21.660.141	14.465.851	Beginning balance
Biaya jasa lalu	(1.238.117)	62.486	Past services cost
Beban jasa kini	4.860.325	4.216.007	Current service cost
Beban bunga	1.544.368	998.144	Interest cost
Kerugian aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain:			Actuarial loss recognized in other comprehensive income:
Dampak perubahan asumsi keuangan	1.701.496	3.426.553	Effect on change in financial assumption
Pembayaran manfaat	(5.647.387)	(1.508.900)	Benefits paid
Saldo akhir	22.880.826	21.660.141	Ending balance

Rincian beban imbalan pasca-kerja yang diakui di dalam laba rugi selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits expenses recognized in profit or loss for the year are as follows:

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Beban jasa kini	4.860.325	4.216.007	Current service cost
Biaya jasa lalu	(1.238.117)	62.486	Past services cost
Beban bunga	1.544.368	998.144	Interest cost
Subjumlah	5.166.576	5.276.637	Sub-total
Kerugian aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	1.701.496	3.426.553	Actuarial loss recognized in other comprehensive income
Jumlah	6.868.072	8.703.190	Total

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, analisis sensitivitas dari perubahan tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diasumsikan, dimana variabel lain dianggap konstan akan memiliki dampak terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti menjadi sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, the sensitivity analysis of change in the assumed discount and salary rate, which other variables held constant would have the following effects to the present value of defined benefit obligations:

	2025			
	Perubahan Asumsi/ *Change in Assumption*	Kenaikan Asumsi/ *Increase in Assumption*	Penurunan Asumsi/ *Decrease in Assumption*	
		Rp'000	Rp'000	
Tingkat diskonto	1%	(21.146.944)	24.835.830	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	24.874.230	(21.085.235)	Salary increase rate

	2024			
	Perubahan Asumsi/ *Change in Assumption*	Kenaikan Asumsi/ *Increase in Assumption*	Penurunan Asumsi/ *Decrease in Assumption*	
		Rp'000	Rp'000	
Tingkat diskonto	1%	(20.039.422)	23.496.097	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	23.446.384	(20.056.069)	Salary increase rate

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the statement of financial position.

Analisis umur estimasi pembayaran liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Aging analysis of estimated payment of post-employment benefits as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
	Rp'000	Rp'000	
Kurang dari 1 tahun	2.074.969	2.144.735	Less than a year
1 - 3 tahun	1.304.603	2.935.730	1 - 3 years
3 - 5 tahun	1.831.245	2.578.492	3 - 5 years
5 - 10 tahun	23.357.572	21.059.529	5 - 10 years
Lebih dari 10 tahun	107.040.300	125.200.152	Over 10 years
Jumlah	135.608.689	153.918.638	Total

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 14,21 tahun (31 Desember 2024: 15,73 tahun).

The average duration of the benefits obligation at December 31, 2025 is 14.21 years (December 31, 2024: 15.73 years).

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan mencatat liabilitas imbalan pasca-kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Nandi Kusnadi, aktuaris independen, dalam laporannya tanggal 9 Maret 2026, dengan menggunakan metode aktuarial "*Projected Unit Credit*" dan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the Company accrued post-employment benefits liabilities based on the actuarial calculation prepared by Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Nandi Kusnadi, an independent actuary, based on its report dated March 9, 2026, which using actuarial "Projected Unit Credit" method and the following main assumptions:

	2025	2024	
Umur pensiun	57 tahun/*57 years*	57 tahun/*57 years*	Normal pension age
Tingkat diskonto	6,56% per tahun/*6.56% per year*	7,13% per tahun/*7.13% per year*	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	3,0% per tahun/*3.0% per year*	3,0% per tahun/*3.0% per year*	Salary increase rate
Tingkat kematian	Tabel Mortalitas Indonesia IV/ *Indonesian Mortality Table IV*	Tabel Mortalitas Indonesia IV/ *Indonesian Mortality Table IV*	Mortality rate
Tingkat peluang cacat	5% dari TM IV 2019	1% dari TMI 2011	
Tingkat pengunduran diri	2,5% hingga usia 40 tahun dengan degradasi linear menurun hingga 0,5% pada usia 50 tahun dan asumsi tidak ada pengunduran diri bagi peserta berusia diatas 51 tahun *2,5% up to age 40, then linearly decrease down by 0,5% up to age 50 and assuming no voluntary resignation occur beyond age 51*	2,5% hingga usia 40 tahun dengan degradasi linear menurun hingga 0,5% pada usia 50 tahun dan asumsi tidak ada pengunduran diri bagi peserta berusia diatas 51 tahun *2,5% up to age 40, then linearly decrease down by 0,5% up to age 50 and assuming no voluntary resignation occur beyond age 51*	Resignation rate

22. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan laporan yang di susun oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

22. CAPITAL STOCK

The details of the Company's shareholders as of December 31, 2025 and 2024 based on the report prepared by PT Raya Saham Registra, Share Registrar, are as follows:

Nama pemegang saham	2025 dan 2024/*2025 and 2024* Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah modal/ *Total paid-up capital stock*	Name of stockholders
			Rp'000	
Mizuho Leasing Co., Ltd	3.835.346.804	67,44	383.534.680	Mizuho Leasing Co., Ltd
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.425.455.604	25,06	142.545.560	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	426.551.589	7,50	42.655.160	Public (each below 5% ownership)
Jumlah	5.687.353.997	100,00	568.735.400	Total

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) No. 11 tanggal 20 Juni 2024 dari Notaris R.M. Dendy Soebangil, SH., M.Kn., bahwa Pemegang Saham menyetujui, Perusahaan membentuk dana cadangan umum sejumlah Rp 300.000 ribu. Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah cadangan umum Perusahaan sebesar Rp 1.800.000 ribu.

Based on the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) No. 11 dated June 20, 2024 from Notary R.M. Dendy Soebangil, SH., M.Kn., that the Shareholders approved, the Company to establish a general reserve fund of Rp 300,000 thousand. As of December 31, 2025, the Company's total general reserves amounted to Rp 1,800,000 thousand.

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR / 23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

The details of this account are as follows:

	Rp'000	
Biaya emisi saham sehubungan dengan penawaran umum perdana saham pada tahun 2008	(2.384.634)	Share issuance cost in connection with initial public offering in 2008
Penawaran Umum Terbatas I pada tahun 2017		Limited Public Offering I in 2017
Agio saham	18.997.926	Share premium
Biaya emisi saham	(6.180.220)	Share issuance cost
Sub-jumlah	12.817.706	Sub-total
Penawaran Umum Terbatas II pada tahun 2019		Limited Public Offering II in 2019
Agio saham	124.087.724	Share premium
Biaya emisi saham	(3.945.083)	Share issuance cost
Sub-jumlah	120.142.641	Sub-total
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 1d)	(32.990.607)	Difference in value of transactions among entities under common control (Note 1d)
Neto	97.585.106	Total

Sehubungan dengan transaksi pengalihan (akuisisi) seluruh saham IBJV (Catatan 1d), Perusahaan telah mencatat selisih nilai restrukturisasi entitas sepengendali dengan rincian sebagai berikut:

In accordance with acquisition of the all shares of IBJV (Note 1d), the Company recognized difference in value of transactions among entities under common control with the detail as follows:

Investasi pada IBJV dengan kepemilikan sebelumnya setara 20%	45.329.107	Investment on IBJV with previous ownership equivalent to 20%
Imbalan tunai yang dialihkan untuk memperoleh 80% kepemilikan IBJV	214.307.032	Cash consideration that transferred to obtain 80% ownership on IBJV
Jumlah	259.636.139	Total
Jumlah tercatat aset neto IBJV pada tanggal akuisisi	(226.645.532)	The carrying amount of net assets of IBJV on acquisition date
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	32.990.607	Difference in value of transaction among entities under common control

Ikhtisar dari jumlah tercatat aset neto IBJV pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

The summary of carrying amount of IBJV net assets on acquisition date are as follows:

Aset		Assets
Kas dan setara kas	97.172.065	Cash and cash equivalents
Piutang sewa pembiayaan	1.250.524.595	Finance lease receivable
Aset keuangan lainnya	8.597.506	Other financial assets
Liabilitas	(1.129.648.634)	Liabilities
Bersih	226.645.532	Net

Selisih di atas mencerminkan manfaat sinergi, perluasan pasar dan pencapaian skala ekonomis yang lebih baik sebagaimana diharapkan timbul dari transaksi pengalihan saham tersebut.

The above difference reflects the benefit of synergy, market extention and enhanced of economic scale as expected shall be arise from such shares transfer transaction.

24. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN / 24. CONSUMER FINANCING INCOME

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Pembiayaan sendiri	304.362.168	320.987.712	Self financing
Jumlah	304.362.168	320.987.712	Total

Pada 31 Desember 2025, jumlah amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai pengurang dari pendapatan pembiayaan konsumen adalah sebesar Rp 71.779.482 ribu (2024: Rp 67.386.574 ribu).

In December 31, 2025, total amortization of transaction costs which are recognized as a deduction of consumer financing income amounted to Rp 71,779,482 thousand (2024: Rp 67,386,574 thousand).

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat transaksi kepada satu pihak yang jumlahnya melebihi 10% dari pendapatan pembiayaan konsumen.

In December 31, 2025 and 2024, there were no transactions made to any single party whose the amount exceeding 10% of the consumer financing income.

25. PENDAPATAN SEWA PEMBIAYAAN / 25. FINANCE LEASES INCOME

Pendapatan sewa pembiayaan merupakan pendapatan yang diperoleh dari transaksi sewa pembiayaan atas alat-alat berat, peralatan dan mesin-mesin produksi. Pendapatan sewa pembiayaan diperoleh dari piutang sewa pembiayaan yang berasal dari pihak ketiga.

Finance leases income represent income earned from finance lease transactions from heavy equipment, equipment and production machines. Finance leases income arises from third parties.

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada transaksi kepada satu pihak yang jumlah pendapatannya melebihi 10% dari pendapatan sewa pembiayaan.

In December 31, 2025 and 2024, there were no transactions made to any single party with related income exceeding 10% of finance lease income.

26. PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PROVISI / 26. ADMINISTRATION AND PROVISION INCOME

Akun ini merupakan pendapatan yang diterima Perusahaan dari pihak ketiga atas jasa administrasi kepada pelanggan dan pengurusan dokumen-dokumen pelanggan.

Administration income represents income earned by the Company from third parties for administration services to the customers and handling of the customers' documents.

27. PENDAPATAN PENALTI / 27. PENALTY INCOME

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Pihak ketiga			Third parties
Penalti pelunasan dipercepat	8.755.756	10.781.224	Late charges
Keterlambatan penerimaan angsuran	8.824.036	8.952.810	Early termination
Jumlah	17.579.792	19.734.034	Total

28. PENDAPATAN LAIN-LAIN / 28. OTHER INCOME

Merupakan pendapatan yang berasal dari piutang yang tertagih kembali, pendapatan bunga lainnya, pendapatan bunga pinjaman karyawan, pendapatan bunga kontrak *swap* suku bunga dan *swap cross currency,* keuntungan penjualan aset tetap dan lainnya.

Represents income from recovered receivables, other interest income, interest income from employee loan, interest rate swaps and cross currency swaps contracts, gain on sales of Property and equipment and others.

29. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN / 29. INTEREST AND FINANCING CHARGES

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Pihak berelasi (catatan 33)			Related Parties (Notes 33)
Beban bunga atas utang bank	97.615.067	97.154.296	Interest expenses on bank loans
Beban bunga transaksi swap	1.481.658	248.476	Interest expenses on swap transaction
Provisi dan administrasi bank	3.113.667	3.004.283	Provision fees and bank charges
Sub Jumlah	102.210.392	100.407.055	Sub Total
Pihak ketiga			Third parties
Beban bunga atas utang bank	25.937.481	31.565.806	Interest expenses on bank loans
Provisi dan administrasi bank	244.716	320.267	Provision fees and bank charges
Beban bunga atas liabilitas sewa	1.808.493	2.022.908	Interest expenses on lease liabilities
Sub Jumlah	27.990.690	33.908.981	Sub Total
Jumlah	130.201.082	134.316.036	Total

30. BEBAN KEPEGAWAIAN / 30. PERSONNEL EXPENSES

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Gaji, Bonus dan Tunjangan	121.729.177	120.906.184	Salaries, bonuses and allowances
Imbalan pasca Kerja (Catatan 21)	5.166.576	5.276.637	Post-employment benefits (Note 21)
Jumlah	126.895.753	126.182.821	Total

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / 31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Penyusutan (Catatan 10 dan 11)	16.939.190	17.920.632	Depreciation (Notes 10 and 11)
Pajak dan perijinan	5.947.228	7.857.739	Taxes and license
Honorarium	7.530.354	7.315.107	Honorarium
Perbaikan dan pemeliharaan	5.136.132	4.141.980	Repairs and maintenance
Komunikasi	3.801.653	3.769.858	Communication
Pendidikan dan pelatihan	2.999.190	836.011	Education and trainning
Sewa	2.513.206	2.683.819	Rental
Perjalanan dinas	2.232.290	2.718.810	Business travelling
Keamanan	1.826.206	1.726.874	Security
Jasa pekerjaan alih daya	1.783.231	1.908.641	Outsourcing services
Prasarana	1.098.198	1.084.451	Utilities
Biaya Marketing	985.773	5.686.825	Marketing expenses
Peralatan dan perlengkapan kantor	687.270	860.961	Office supplies and stationaries
Representasi	465.280	669.475	Representation
Lain-lain	1.462.812	1.503.169	Others
Jumlah	55.408.013	60.684.352	Total

32. LABA PER SAHAM

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar/dilusian:

32. EARNINGS PER SHARE

The computation of basic/diluted earnings per share is based on the following information:

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	2.892.639	(2.155.665)	Net profit (loss) for the year
Jumlah saham (dalam angka penuh)	Lembar/*Share*	Lembar/*Share*	**Number of shares (in full amount)**
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan	5.687.353.997	5.687.353.997	Outstanding weighted average number of shares during the year
Laba (rugi) per saham (dalam Rupiah penuh)	0,51	(0,38)	Earnings (loss) per shares (in full Rupiah)

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

In December 31, 2025 and 2024, the Company does not have any dilutive ordinary shares.

33. SIFAT DAN TRANSAKSI MATERIAL KEPADA PIHAK BERELASI

Ringkasan transaksi material dan sifat hubungan antara Perusahaan dan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

33. NATURE OF RELATIONSHIP AND MATERIAL TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Summary of material transactions and nature of relationships between the Company and related parties were as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat transaksi/ Nature of transactions	Sifat hubungan/ Nature of relationships
Mizuho Leasing Co., Ltd	Piutang lain-lain atas beban operasional yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (Catatan 8) dan beban atas penjaminan utang / *Other receivables for the operational expenses (Note 8) paid by the Company and fees for loan guarantee*	Pemegang saham pengendali/ *Controlling shareholder*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Penempatan dana dalam bentuk giro (Catatan 5), fasilitas kredit utang bank (Catatan 14), biaya masih harus dibayar atas beban bunga bank (Catatan 17), beban umum dan administrasi (Catatan 31)/ *Placement of fund in the form of current accounts (Note 5), credit facilities of bank loan (Note 14), accrued expenses of bank interest charges (Note 17), general and administrative expenses (Note 31)*	Pemegang saham/*Shareholder*
PT Bank Mizuho Indonesia	Penempatan dana dalam bentuk giro (Catatan 5), fasilitas kredit utang bank (Catatan 14), biaya masih harus dibayar atas beban bunga bank (Catatan 17)/ *Placement of fund in the form of current accounts (Note 5), credit facilities of bank loan (Note 14), accrued expenses of bank interest charges (Note 17)*	Pihak berelasi lainnya/ *Other related party*

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The detail of balance arise from transactions with related parties are as follows:

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	Persentase terhadap jumlah aset (liabilitas) atau akun terkait/ *Percentage to total assets (liabilities) or related account* 2025 %	2024 %	
Aset					**Assets**
Bank	24.451.933	5.687.837	0,78%	0,18%	Bank
Piutang lain-lain	2.178.048	2.652.802	0,07%	0,08%	Other receiveable
Aset lain-lain-bersih	71.175	73.175	0,00%	0,00%	Other assets
Jumlah	26.701.156	8.413.814	0,85%	0,26%	Total
Liabilitas					**Liabilities**
Utang bank	1.764.582.255	1.864.742.184	73,23%	75,63%	Bank loan
Biaya masih harus dibayar	3.866.897	937.028	0,16%	0,04%	Accrued expenses
Jumlah	1.768.449.152	1.865.679.212	73,39%	75,67%	Total

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	Persentase terhadap jumlah pendapatan (beban) atau akun terkait/ *Percentage to total income (liabilities) or related account* 2025 %	2024 %	
Pendapatan Bunga					**Interest Income**
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.283	3.386	0,00%	0,00%	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia	97.852	59.830	0,02%	0,01%	PT Bank Mizuho Indonesia
Jumlah	103.135	63.216	0,02%	0,01%	Total

	2025 Rp'000	2024 Rp'000	Persentase terhadap jumlah pendapatan (beban) atau akun terkait/ *Percentage to total income (liabilities) or related account* 2025 %	2024 %	
Beban					**Expenses**
Beban bunga dan keuangan					Interest and financing charge
PT Bank Pan Indonesia Tbk	351.875	362.396	0,08%	0,08%	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia	98.744.850	97.040.376	22,43%	20,49%	PT Bank Mizuho Indonesia
Sub-jumlah	99.096.725	97.402.772	22,51%	20,57%	Sub-total
Provisi dan administrasi bank					Provision fees and bank charges
Mizuho Leasing Co., Ltd.	2.861.432	2.727.963	0,65%	0,58%	Mizuho Leasing Co., Ltd.
PT Bank Pan Indonesia Tbk	88.130	89.816	0,02%	0,02%	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia	164.105	186.504	0,04%	0,04%	PT Bank Mizuho Indonesia
Sub-jumlah	3.113.667	3.004.283	0,71%	0,64%	Sub-total
Beban umum dan administrasi					General and administrative expense
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	919	0,00%	0,00%	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Sub-jumlah	-	919	0,00%	0,00%	Sub-total
Jumlah	102.210.392	100.407.974	23,22%	21,21%	Total

Transaksi dengan Mizuho Leasing Co., Ltd.

- Mizuho Leasing Co., Ltd. (“MLC”) memberikan jaminan atas utang yang dimiliki Perusahaan saat ini dan di masa depan kepada kreditur. Perjanjian pemberian jaminan utang ditandatangani pada tanggal 30 April 2020. yang telah mengalami beberapakali perubahan, terakhir dengan amandemen tanggal 30 April 2024. Sesuai ketentuan perjanjian pemberian jaminan, jika tanpa ada keberatan dari salah satu pihak, jangka waktu pemberian jaminan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu tambahan setiap satu tahun. Perusahaan akan membayar komisi penjaminan kepada MLC berdasarkan tarif komisi masing-masing yang berbeda atas Guarantee (LoG); Komitmen untuk Menjamin (LoU); dan Stand-by Letter of Credit ("SBLC"), dengan tarif berbeda yang dibayarkan setahun sekali.

  Pada 31 Desember 2025 dan 2024, beban komisi atas penjaminan tersebut dicatat sebagai bagian dari “Beban Bunga dan Keuangan” (Catatan 29) pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada 31 Desember 2025 jumlah kompensasi kepada manajemen kunci yang seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek adalah sebesar Rp 8.722.169 ribu (2024: 10.085.712 ribu).

Transactions with Mizuho Leasing Co., Ltd.

- Mizuho Leasing Co., Ltd. (“MLC”) provided guarantee against present and future loans of Company to creditors. The loan guarantee agreement was signed on April 30, 2020. which has been amended several times, most recently with amendment dated April 30, 2024. In accordance with loan guarantee agreement, without any objection from either party, the term guarantee period will be automatically extended for additional period of one year. The Company will pay guarantee commissions to MLC based on respective commission fees with different tariff for Guarantee (LoG); Commitment to Guarantee (LoU); and Stand-by Letter of Credits ("SBLC") that will be paid once a year.

  In December 31, 2025 and 2024, the commission fee expenses arising from this guarantee agreement recorded as part of “Interest and Financing Charges” (Note 29) in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

In December 31, 2025 total compensation to the key management which entirely represent short-term employee benefits amounted to Rp 8,722,169 thousand (2024: Rp 10,085,712 thousand).

34. SEGMEN OPERASI

Perusahaan bergerak dalam bidang usaha pembiayaan dengan aktivitas utama pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna.

34. OPERATING SEGMENT

The Company is engaged in the business of financial institution with main activities are investment financing, working capital financing and multifunction financing.

Organisasi Perusahaan tidak dikelompokkan per masing-masing segmen usaha, informasi segmen yang tersedia untuk pendapatan, beban, aset dan liabilitas Perusahaan dibagi berdasarkan segmen geografis. Perusahaan tidak mempunyai dasar memadai untuk mengalokasikan pendapatan, beban, aset dan liabilitas ke masing-masing segmen usaha. Berikut adalah segmen geografis Perusahaan:

The Company's organization is not separately classified into business segments, therefore the available segment information of income, expenses, assets and liabilities are divided by geographical segment. The Company has no adequate basis for allocating income, expenses, assets and liabilities to the respective business segments. The geographical segment information of the Company are as follows:

	2025			
	Jabodetabek	Luar Jabodetabek	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
PENDAPATAN				**INCOME**
Pendapatan segmen				Segment income
Pendapatan pembiayaan konsumen	123.498.945	180.863.223	304.362.168	Consumer financing
Sewa pembiayaan	69.826.078	348.760	70.174.838	Finance lease
Pendapatan administrasi	16.534.296	24.787.998	41.322.294	Administration income
Jumlah pendapatan segmen	209.859.319	205.999.981	415.859.300	Total segment revenues
Beban segmen				Segment expenses
Beban bunga dan keuangan	(130.158.426)	(42.656)	(130.201.082)	Interest and financing charges
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(47.640.728)	(80.132.687)	(127.773.415)	Provision for impairment losses
Jumlah beban segmen	(177.799.154)	(80.175.343)	(257.974.497)	Total segment expenses
Hasil segmen	32.060.165	125.824.638	157.884.803	Segment income
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			32.962.609	Unallocated income
Beban tidak dapat dialokasikan			(182.303.766)	Unallocated expenses
Laba sebelum pajak			8.543.646	Income before tax
Manfaat (beban) pajak penghasilan			(5.651.007)	Income tax (expense) benefit
Laba bersih			2.892.639	Net Income
ASET				**ASSETS**
Aset segmen	1.749.294.472	1.232.773.536	2.982.068.008	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan			171.457.683	Unallocated assets
Jumlah aset			3.153.525.691	Total assets
LIABILITAS				**LIABILITIES**
Liabilitas segmen	2.322.024.326	27.235.899	2.349.260.225	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			60.253.752	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			2.409.513.977	Total liabilities

	2024			
	Jabodetabek	Luar Jabodetabek	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
PENDAPATAN				**INCOME**
Pendapatan segmen				Segment income
Pendapatan pembiayaan konsumen	142.868.578	178.119.134	320.987.712	Consumer financing
Sewa pembiayaan	63.692.213	1.021.291	64.713.504	Finance lease
Pendapatan administrasi	22.793.398	30.216.808	53.010.206	Administration income
Jumlah pendapatan segmen	229.354.189	209.357.233	438.711.422	Total segment revenues
Beban segmen				Segment expenses
Beban bunga dan keuangan	(134.281.971)	(34.065)	(134.316.036)	Interest and financing charges
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(85.033.027)	(67.026.669)	(152.059.696)	Provision for impairment losses
Jumlah beban segmen	(219.314.998)	(67.060.734)	(286.375.732)	Total segment expenses
Hasil segmen	10.039.191	142.296.499	152.335.690	Segment income
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			29.942.284	Unallocated income
Beban tidak dapat dialokasikan			(187.314.247)	Unallocated expenses
Laba sebelum pajak			(5.036.273)	Income before tax
Manfaat (beban) pajak penghasilan			2.880.608	Income tax (expense) benefit
Laba Bersih			(2.155.665)	Net Income
ASET				**ASSETS**
Aset segmen	1.797.704.305	1.252.388.754	3.050.093.059	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan			160.430.017	Unallocated assets
Jumlah aset			3.210.523.076	Total assets
LIABILITAS				**LIABILITIES**
Liabilitas segmen	2.382.063.012	25.853.106	2.407.916.118	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			58.610.891	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			2.466.527.009	Total liabilities

35. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Kecuali untuk yang disebutkan dalam tabel di bawah ini, manajemen menilai bahwa nilai tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan mendekati dengan nilai wajarnya:

35. FAIR VALUE MEASUREMENTS

Except as detailed in the following table, the management considers that the carrying amount of financial assets and financial liabilities approximate their fair values:

	2025		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	
	Rp'000	Rp'000	
Aset Keuangan			**Financial Assets**
Biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	1.952.687.844	2.196.552.520	Consumer financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	923.538.164	1.003.862.379	Finance lease receivables - net
Piutang Lain - lain - bersih	111.032.803	126.808.047	Other accounts receivable - net
Jumlah	2.987.258.811	3.327.222.946	Total
Liabilitas Keuangan			**Financial Liabilities**
Biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
Utang bank	2.296.862.411	2.288.026.299	Bank loans
Jumlah	2.296.862.411	2.288.026.299	Total

	2024		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	
	Rp'000	Rp'000	
Aset Keuangan			**Financial Assets**
Biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	2.081.769.148	2.292.434.914	Consumer financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	879.800.794	964.146.411	Finance lease receivables - net
Piutang lain-lain - bersih	97.225.712	108.767.057	Other accounts receivable - net
Jumlah	3.058.795.654	3.365.348.382	Total
Liabilitas Keuangan			**Financial Liabilities**
Biaya perolehan diamortisasi lainnya			Amortized cost
Utang bank	2.347.417.561	2.336.407.606	Bank loans
Jumlah	2.347.417.561	2.336.407.606	Total

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

- Manajemen menganggap bahwa nilai tercatat kas dan setara kas, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain dan biaya masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena memiliki sifat jangka pendek dan atau sering dilaksanakan *re-pricing*.

- Estimasi nilai wajar piutang pembiayaan konsumen - bersih dan piutang sewa pembiayaan - bersih dengan suku bunga tetap tanpa kuotasi. Nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan menggunakan suku bunga untuk piutang baru dengan jangka waktu yang serupa.

- Estimasi nilai wajar dari utang bank dengan bunga tetap tanpa kuotasi. Nilai wajar didasarkan pada diskonto arus kas menggunakan suku bunga untuk utang baru dengan jangka waktu yang serupa.

- Nilai wajar dari aset dan liabilitas derivatif diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dengan menggunakan metode diskonto arus kas dengan nilai *input* pasar yang dapat diobservasi.

Hirarki pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas Perusahaan

Tabel berikut ini merangkum nilai wajar aset dan liabilitas, yang dianalisis nilai wajarnya berdasarkan pada:

Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

- Management considers that the carrying amount of cash and cash equivalents, other receivables, trade payables, other payables and accrued expenses approximate their carrying value because of short term maturities, and/or related instrument are repriced frequently.

- The estimated fair value of consumer financing receivables - net and finance lease receivables - net with fixed interest rate where quoted market prices are not available. The fair value is determined by discounting the estimated future cash flows using a current yield curve appropriate for similar term of the receivables.

- The estimated fair value of bank loans with fixed interest rate where quoted market prices are not available. The fair value is determined by discounting the estimated future cash flows using a current yield curve appropriate for similar term of bank loans.

- Fair value of these derivative assets and liabilities are measured at fair value at the end of each reporting period using discounted cash flow method with market observable inputs.

Fair value measurement hierarchy of the Company's assets and liabilities

The following tables summarize the fair values of the assets and liabilities, analyzed among those whose fair value is based on:

Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;

Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan

Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and

Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

	2025				
	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					**Assets for which fair value are disclosed**
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	2.196.552.520	-	2.196.552.520	Consumer financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	1.003.862.379	-	1.003.862.379	Finance lease receivables - net
Piutang lain-lain - bersih	-	126.808.047	-	126.808.047	Other accounts receivable - net
Jumlah Aset	-	3.327.222.946	-	3.327.222.946	Total Assets
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					**Liabilities for which fair values are disclosed**
Utang bank	-	2.288.026.299	-	2.288.026.299	Bank loans
Aset/Liabiltas keuangan yang diukur pada nilai wajar					**Financial asset/liability measured at fair value**
Aset derivatif	-	1.749.376	-	1.749.376	Derivative assets

	2024				
	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					**Assets for which fair value are disclosed**
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	2.292.434.914	-	2.292.434.914	Consumer financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	964.146.411	-	964.146.411	Finance lease receivables - net
Piutang lain-lain - bersih	-	108.767.057	-	108.767.057	Other accounts receivable - net
Jumlah Aset	-	3.365.348.382	-	3.365.348.382	Total Assets
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					**Liabilities for which fair values are disclosed**
Utang bank	-	2.336.407.606	-	2.336.407.606	Bank loans
Aset/Liabiltas keuangan yang diukur pada nilai wajar					**Financial asset/liability measured at fair value**
Aset derivatif	-	3.767.652	-	3.767.652	Derivative assets

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perpindahan metode pengukuran nilai wajar dari Level 1 menjadi Level 2, dan sebaliknya.

In December 31, 2025 and 2024, there is no transfer in the measurement method of fair value from Level 1 to Level 2, and vice versa.

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Pada tangal 16 Oktober 2024, Perusahaan dan PT BOT Finance Indonesia telah menandatangani perjanjian pembiayaan bersama untuk membiayai piutang sewa pembiayaan dengan porsi masing-masing sebesar 60,6% dan 39,4% dari jumlah pembiayaan dengan jangka waktu 36 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah piutang pembiayaan tersebut sebesar Rp 27.953.042 and Rp 39.953.165 ribu (Catatan 7).

36. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND AGREEMENTS

On October 16, 2024, the Company and PT BOT Finance Indonesia have entered into a joint finance agreement to finance lease receivables with a portion for each 60.6% and 39.4% of the total financing with a term of 36 months. As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding finance receivables arising from this agreement amounted to Rp 27,953,042 and Rp 39,953,165 thousand (Note 7).

37. MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko:

- Risiko operasional
- Risiko pasar
- Risiko likuiditas
- Risiko kredit

Kerangka Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko Perusahaan disusun untuk memenuhi perkembangan yang pesat dalam industri jasa pembiayaan.

Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kegiatan pembiayaan yang sehat dan berlandaskan tata kelola yang baik membutuhkan penerapan manajemen risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam penerapannya Perusahaan menyadari bahwa peran aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Senior Manajemen sangat menentukan efektivitas penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja dari perusahaan pembiayaan, maka manajemen risiko menjadi elemen pendukung penting bagi Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya manajemen risiko di Perusahaan adalah untuk menjaga dan melindungi Perusahaan melalui pengelolaan risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul dari aktivitas Perusahaan serta menjaga tingkat risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Kebijakan manajemen risiko merupakan salah satu upaya manajemen Perusahaan untuk menjamin adanya landasan yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dalam batas risiko yang terukur untuk mencapai target peningkatan *shareholder value*.

Tujuan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah:

- Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis dan kegiatan pendukung Perusahaan telah memperhitungkan seluruh potensi risiko yang mungkin timbul;
- Untuk melakukan fungsi kontrol dan pengelolaan terhadap seluruh risiko yang melekat pada aktivitas bisnis dalam batas-batas toleransi risiko Perusahaan yang telah ditetapkan;
- Untuk mengoptimalkan penggunaan modal Perusahaan;

37. RISK MANAGEMENT

The Company has exposure to the following risks:

- Operational risk
- Market risk
- Liquidity risk
- Credit risk

Risk Management Framework

The Company's risk management policy designed to address the rapid growth in the financing services industry.

The Company realizes that the sound management of financial activities and sound corporate governance grounded in efficient management principles requires the application of risk management including the process of identification, measurement, monitoring and control of risk. In applying this risk management, the Company recognizes that the active role of the Board of Commissioners, Directors and Senior Management strongly determines the effectiveness of implementation the risk management. The implementation of good risk management can support the performance of the financing company, thus risk management is an important supporting element for the Company to operate the business. The target and main purpose of the implementation of the risk management in the Company is to guard and protect the Company through the risk management of possible losses that might arise from Company activities and to maintain the level of risk to comply with Company's policies.

The risk management policy is one of the Company's management efforts to ensure a strong foundation for the implementation of operational activities so that operations can be conducted within measurable limits of risk to achieve the target of increasing shareholder value.

The objectives of the risk management are:

- To ensure that all business and support activities in the Company's operations have taken into consideration all potential risks that may arise;
- To perform the function of supervision and management of all risks inherent in the Company's business activities within the specified risk tolerance limits;
- To optimize the use of the Company's capital;

- Untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang relevan, dari Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan otoritas lain;

- Untuk meningkatkan *shareholder value* dalam jangka panjang.

Strategi untuk mendukung sasaran dan tujuan dari manajemen risiko diwujudkan dengan pembentukan dan pengembangan budaya risiko yang kuat, penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik, pelestarian nilai-nilai kepatuhan terhadap regulasi, infrastruktur yang memadai, serta proses kerja yang terstruktur dan sehat. Budaya risiko yang kuat ini diciptakan dengan membangun kesadaran risiko yang kuat dimulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai kepada seluruh karyawan Perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik disosialisasikan dan dikembangkan secara menyeluruh pada semua komponen dan aktivitas Perusahaan untuk memastikan bahwa dilaksanakan dengan tanpa kompromi.

Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, manajemen Perusahaan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan Perusahaan. Departemen Manajemen Risiko yang berperan secara aktif dalam mengkoordinasikan tindakan-tindakan pencegahan, proaktif dan responsive dengan seluruh karyawan dari berbagai tingkatan yang ada di dalam Perusahaan untuk mendukung penerapan manajemen risiko ini, karena semua bagian di dalam Perusahaan masing-masing akan memainkan peranan penting.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Perusahaan memiliki mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;

- Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Direksi;

- To ensure compliance with all relevant regulations, including regulations of Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, the Ministry of Finance and other authorities;

- To increase shareholder value over in the long run.

Strategies to support the goals and objectives of risk management is developed through the formation and development of a strong risk culture, the implementation of good corporate governance practices, preserving the values of compliance with regulations, adequate infrastructure, as well as structured and healthy working processes. This strong risk culture is created by building a strong awareness of risk starting from the Board of Commissioners, Board of Directors and to the entire employees of the Company. Good corporate governance is socialized and developed thoroughly in all components and activities within the Company to ensure that they are being implemented without compromise.

As the Company engages in financing activities, the Company's Management is fully committed to implement comprehensive risk management, which essentially covers the adequacy of policies, procedures and methodology of risks management; hence, the Company's business activities could remain to be directed and controlled at an acceptable risk limit, at the same time the Company can still be profitable. Risk Management Department is playing an active role in coordinating preventive, proactive and responsive actions with all employees from various levels within the Company in order to support the implementation of risk management, because all divisions of the Company will play their respective important roles.

In the application of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that rests on four (4) risk management pillars, which can be described as follows:

Pillar 1: Active Supervision by Board of Commissioners and Board of Directors

Active supervision is reflected starting from the annual business planning, which includes:

- Approving and evaluating risk management policies periodically;

- Evaluating and approving actions that require the approval of the Board of Commissioners or Board of Directors;

- Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala;

- Terdapatnya Komite Audit dan Pemantau Risiko sebagai organ Dewan Komisaris dan Komite Manajemen Risiko serta Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagai organ Direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasannya;

- Memastikan kecukupan sistem pengendalian internal, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, kebijakan, prosedur, serta sumber daya manusia yang memadai dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko secara menyeluruh;

- Memastikan tindak lanjut atas temuan audit internal, audit eksternal, dan pemeriksaan regulator yang berkaitan dengan Manajemen Risiko, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan Manajemen Risiko secara berkelanjutan.

Pilar 2: Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Batasan

Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Standar Operasional Prosedur dan Surat Edaran yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi pembiayaan maupun yang bukan transaksi pembiayaan.

Pilar 3: Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko di Perusahaan yang digunakan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Departemen Manajemen Risiko adalah pihak yang berfungsi memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko.

- Establishing risk management policies and strategies, including establishment of authority in setting limits and evaluation of the quality of the portfolio on a regular basis;

- The existence of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee as an organ of the Board of Commissioners and Risk Management Committee and Information Technology Steering Committee as organ of the Board of Directors in carrying out its oversight responsibilities;

- Ensuring the adequacy of the internal control system, including the utilization of information technology, policies, procedures, and sufficient human resources in supporting the comprehensive implementation of Risk Management;

- Ensuring follow-up actions on findings from internal audit, external audit, and regulatory examinations related to Risk Management, as part of efforts to continuously improve the quality of Risk Management implementation

Pillar 2: Adequacy of Policy, Procedure and Application of Limits Determination

The Company formulates policies related to risk management which are checked regularly and continually adapted to current business conditions. The policies are translated into the Standard Operating Procedures and Circular Letter which are distributed to all employees. The Company also has policies regarding restrictions approval/authorization limits for financing transactions and non-financing transactions.

Pillar 3: Adequacy of Identification Process, Assessment, Monitoring and Risks Control

The processes of identification, assessment, monitoring and risks control are the main components of the process of risks management implementation in the company which is used to analyze resources and potential risks along with the impacts. Risk Management Department is a division responsible to analyze the level, trend, and course of the risk.

Perusahaan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko terutama risiko kredit dan risiko operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen yang ada serta melalui pertemuan berkala Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Selain itu, sistem teknologi informasi utama Perusahaan mampu menyediakan data/informasi secara cepat, akurat dan *real time online* kepada pihak Manajemen.

The Company has tools to identify, assess and monitor risks, particularly credit risk and operational risk through the existing reporting mechanism and the management information systems also through regular meetings of Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Committee, and IT Steering Committee. In addition, the Company's main information technology system is able to provide, quick, accurate and in real time online data/information for Management.

Pilar 4: Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Pillar 4: Comprehensive Internal Control

Perusahaan memiliki Divisi Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Akuntabilitas dari Divisi Audit Internal mencakup:

The Company has an Internal Audit Division, which independently reports the process and results of its investigations to the Board of Commissioners and the President Director. The accountability of the Internal Audit Division includes:

- Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektifitas dari semua proses yang ada di dalam Perusahaan;
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian aktivitas-aktivitas di dalam Perusahaan termasuk perbaikan yang potensial terhadap proses-proses tersebut;
- Koordinasi dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan audit eksternal).

- Providing an assessment of the adequacy and effectiveness of all existing processes within the Company;
- Reporting on key issues related to the process of monitoring activities within the Company, including potential improvements to these processes;
- Coordinating with other control and oversight functions (risk management, compliance, legal and external audit).

Risiko Operasional

Operational Risk

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena kekurangan dan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada operasi Perusahaan. Penanganan risiko operasional dalam Perusahaan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:

Operational risk is the risk caused by shortcomings and failures of internal processes, human errors, system failures or problems that could bring impact to the Company's operations. The operational risks in the Company are handled through 3 (three) steps as follows:

- Pengidentifikasian risiko
- Pengukuran risiko
- Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko

- Risk identification
- Risk measurement
- Risk management, supervision and control

Ketiga langkah tersebut merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan dalam rangka memastikan pengelolaan risiko operasional dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

The three steps constitute an integrated and inseparable process aimed at ensuring that operational risk management is carried out effectively and sustainably.

Risiko Pasar

Market Risk

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administrative termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko Pasar antara lain meliputi Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko ekuitas. Manajemen Risiko pada Risiko Pasar dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Perusahaan.

Market Risk is Risk in the position of assets, liabilities, equity, and/or administrative accounts including derivative transactions due to overall changes in market conditions. Market Risk includes, among others, interest rate risk, exchange rate risk and equity risk. Market Risk Management is carried out to minimize the possibility of negative impacts due to changes in market conditions on the Company's assets and capital.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko kerugian pada akun aset ataupun liabilitas Perusahaan Pembiayaan akibat perubahan suku bunga. Perusahaan mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap* suku bunga. Melalui *swap* suku bunga, Perusahaan setuju untuk mempertukarkan selisih antara suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang yang dihitung sesuai dengan nilai nosional yang telah disepakati. Nilai wajar dari *swap* suku bunga pada akhir periode pelaporan ditentukan dengan mendiskonto nilai arus kas di masa yang akan datang dengan menggunakan kurva pada akhir periode pelaporan dan risiko kredit yang melekat pada kontrak. Nilai rata-rata suku bunga ditentukan dari nilai saldo pada akhir periode pelaporan. Kontrak *swap* suku bunga mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, dimana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrument lindung nilai arus kas.

Interest Risk

Interest risk is the risk of loss in the Company's financial assets or liabilities due to changes in interest rates. The Company manages interest rate risk using derivative instruments, which is interest rate swaps. Through an interest rate swap, the Company agrees to exchange the difference between a fixed interest rate and a floating interest rate calculated according to the agreed notional value. The fair value of interest rate swaps at the end of the reporting period is determined by discounting the value of future cash flows using a curve at the end of the reporting period and credit risk attached to the contract. The average value of the interest rate is determined from the balance value at the end of the reporting period. An interest rate swap contract exchanges a floating interest rate with a fixed rate, which is designated and effective as a cash flow hedge instrument.

Tabel berikut menggambarkan rincian berdasarkan suku bunga atas aset bruto dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal *repricing* atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

The following table summarizes the breakdown based on interest rates on gross assets and financial liabilities of the Company which are grouped according to which is earlier between the repricing date or contractual due date to see the impact of changes in interest rates:

	2025							
	Suku bunga variabel/*Variable interest*			Suku bunga tetap/*Fixed interest*				
	Sampai dengan 1 bulan/ *Until 1 month*	>1-12 bulan/ *>1-12 months*	>1-5 tahun/ *>1-5 year*	Sampai dengan 1 bulan/ *Until 1 month*	>1-12 bulan/ *>1-12 months*	>1-5 tahun/ *>1-5 year*	Jumlah/ *Total*	
	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	
Aset keuangan								Financial assets
Kas dan setara kas	72.731.306	-	-	-	-	-	72.731.306	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	122.565.894	759.887.989	1.169.779.766	2.052.233.649	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	-	-	62.468.743	385.243.065	578.238.947	1.025.950.755	Finance lease receivables
Piutang lain-lain	-		-	66.002.702	11.828.276	60.640.516	138.471.494	Other accounts receivable
Aset Derivatif	-	1.749.376	-	-	-	-	1.749.376	Derivative assets
Jumlah	72.731.306	1.749.376	-	251.037.339	1.156.959.330	1.808.659.229	3.291.136.580	Total
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Utang bank	(1.943.464.728)	(30.752.472)	(211.243.489)	(6.031.123)	(44.353.020)	(61.017.579)	(2.296.862.411)	Bank loans
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	(4.909.912)	-	-	(4.909.912)	Accrued expense
Jumlah	(1.943.464.729)	(30.752.472)	(211.243.489)	(10.941.035)	(44.353.019)	(61.017.579)	(2.301.772.323)	Total
Bersih	(1.870.733.423)	(29.003.096)	(211.243.489)	240.096.304	1.112.606.311	1.747.641.650	989.364.257	Net

	2024							
	Suku bunga variabel/*Variable interest*			Suku bunga tetap/*Fixed interest*				
	Sampai dengan 1 bulan/ *Until 1 month*	>1-12 bulan/ *>1-12 months*	>1-5 tahun/ *>1-5 year*	Sampai dengan 1 bulan/ *Until 1 month*	>1-12 bulan/ *>1-12 months*	>1-5 tahun/ *>1-5 year*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Aset keuangan								Financial assets
Kas dan setara kas	22.194.292	-	-	18.000.000	-	-	40.194.292	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	95.579.215	761.392.721	1.280.797.798	2.137.769.734	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	-	-	50.929.459	342.641.331	602.634.175	996.204.965	Finance lease receivables
Piutang lain-lain	-	-	-	67.215.536	4.495.985	43.006.288	114.717.809	Other accounts receivable
Aset Derivatif	-	3.767.652	-	-	-	-	3.767.652	Derivative assets
Jumlah	22.194.292	3.767.652	-	231.724.210	1.108.530.037	1.926.438.261	3.292.654.452	Total
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Utang bank	(1.716.330.226)	(55.669.774)	(120.289.028)	(336.113.260)	(33.107.207)	(85.908.066)	(2.347.417.561)	Bank loans
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	(1.660.735)	-	-	(1.660.735)	Accrued expense
Jumlah	(1.716.330.226)	(55.669.774)	(120.289.028)	(337.773.995)	(33.107.207)	(85.908.066)	(2.349.078.296)	Total
Bersih	(1.694.135.934)	(51.902.122)	(120.289.028)	(106.049.785)	1.075.422.830	1.840.530.195	943.576.156	Net

Perusahaan terpapar risiko suku bunga terutama karena utang bank memiliki suku bunga tetap dan mengambang.

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar dan risiko suku bunga atas arus kas dijelaskan dalam Catatan 5, 6, 7, 8, 12 dan 14.

Risiko Mata Uang

Perusahaan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing seperti penyaluran piutang pembiayaan dan penerimaan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Perusahaan mengelola eksposur mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin, penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing individu mata uang.

Risiko nilai tukar terhadap mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas di masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi dikarenakan adanya perubahan nilai tukar terhadap mata yang asing. Eksposur risiko Perusahaan terhadap nilai tukar berasal dari kas di bank, piutang sewa pembiayaan, aset lain lain, utang bank dan biaya yang masih harus dibayar.

Pada risiko ini, Perusahaan mengelola risiko dengan menyesuaikan kondisi mata uang piutang sewa pembiayaan dengan mata uang pendanaan pinjaman yang ditetapkan oleh bank. Perusahaan mengelola risiko nilai tukar dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap cross currency*. Melalui *swap cross currency*, Perusahaan setuju untuk mempertukarkan pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dengan pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang spesifik pada tanggal dimulainya transaksi, di mana kontrak tersebut memenuhi kriteria dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

Companies are exposed to interest rate risk mainly because of bank loans have fixed and floating interest rates.

The Company's financial assets and liabilities that are exposed to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk are detailed in Notes 5, 6, 7, 8, 12 and 14.

Currency Risk

The Company is exposed to the effects of fluctuations in foreign exchange rates mainly due to transactions of denominated foreign currencies such as distribution of finance lease receivables and receipt of loans denominated in foreign currencies. The Company manages foreign currency exposure by matching receipts and payments in each individual currency, as much as possible.

Exchange rate risk against foreign currencies is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in the exchange rate of foreign currencies. The Company's risk exposure to the exchange rate comes from cash in banks, finance lease receivables, other assets, bank loans, and accrued expenses.

At this risk, the Company manages risk by adjusting the condition of the finance lease receivables with the loan funding currency specified by the bank. The Company manages exchange rate risk by using a derivative instrument, namely cross currency swap. Through cross currency swaps, the Company agrees to exchange loans received in foreign currencies for loans in Rupiah using a specific exchange rate at the date of commencement of the transaction, where the contract meets the criteria and is effective as a cash flow hedge instrument.

Mata uang asing	2025 Rp'000 Kenaikan (penurunan)/ *Increase (Decrease)*	Sensitivitas laba rugi/ *Profit (Loss) Sensitivity*	Foreign Currency
Dollar Amerika Serikat	0,49%	(590.071)	United States Dollar
Yen	1,14%	(38.298)	Yen

Mata uang asing	2024 Rp'000 Kenaikan (penurunan)/ *Increase (Decrease)*	Sensitivitas laba rugi/ *Profit (Loss) Sensitivity*	Foreign Currency
Dollar Amerika Serikat	0,91%	(34.775)	United States Dollar
Yen	0,80%	(15.304)	Yen

Aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company's assets and liabilities denominated in foreign currency are as follows:

		2025 Mata uang asing/ *Foreign currency*	2025 Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah* Rp'000	2024 Mata uang asing/ *Foreign currency*	2024 Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah* Rp'000		
Kas dan setara kas	USD	944.193	15.845.448	435.376	7.036.541	USD	Cash and cash equivalents
	Yen	7.047	758.227	11.888	1.216.870	Yen	
Piutang sewa pembiayaan	USD	9.379.703	157.410.170	9.755.364	157.666.201	USD	Finance lease receivables
	Yen	841.000	90.483.882	519.122	53.138.674	Yen	
Jumlah			264.497.727		219.058.286	Total	
Utang bank	USD	17.573.237	294.914.062	11.221.596	181.363.431	USD	Bank loan
	Yen	873.201	93.948.349	547.604	56.054.130	Yen	
Jumlah			388.862.411		237.417.561	Total	

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabillitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

Manajemen risiko pada risiko likuiditas dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is the risk due to the inability of the Company to meet maturing liabilities from cash flow funding sources and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting the Company's activities and financial condition.

Risk management on liquidity risk is carried out to minimize the possibility of the Company's inability to obtain cash flow funding sources.

Pada awal bulan Perusahaan menetapkan tingkat suku bunga dan juga *spread* yang akan diterapkan pada bulan tersebut. Penetapan dilakukan setelah melakukan analisa pasar. *Funding cost* ditetapkan dengan memperhatikan *spread* dan suku bunga pinjaman kreditur serta suku bunga pasar yang diperoleh dari Bloomberg. Dengan demikian, pergerakan suku bunga pinjaman tetap dapat tertutup oleh suku bunga piutang sewa pembiayaan. Perusahaan juga berusaha menetapkan suku bunga tetap atau mengambang dalam kegiatan pendanaan disesuaikan dengan suku bunga tetap atau mengambang pada piutang sewa pembiayaan. Pada akhir bulan akan dibuat laporan yang melaporkan jumlah pinjaman selama bulan tersebut. Laporan tersebut berisi total jumlah pinjaman, bunga, dan *spread*.

At the beginning of the month, the Company sets the interest rate and spread that will be applied for the month. The determination is made after conducting a market analysis. Funding costs are determined by taking into account the spread and interest rates on creditors' loans as well as market interest rates obtained from Bloomberg. Thus, the movement in loan interest rates can still be covered by the interest rates on finance lease receivables. The Company also seeks to set a fixed or floating interest rate in its financing activities at a fixed or floating rate on finance lease receivables. At the end of the month, a report will be generated that reports the loan amount during the month. The report contains the total loan amount, interest, and spread.

Analisis Sensitivitas

Untuk utang bank suku bunga mengambang, analisis sensitivitas disusun dengan asumsi jumlah utang bank terutang pada tanggal laporan posisi keuangan adalah yang terutang untuk sepanjang tahun. Perubahan dari 100 basis poin suku bunga pada tanggal laporan keuangan akan meningkatkan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2025 sebesar Rp 21.854.607 ribu (2024: Rp 22.615.095 ribu). Analisis ini mengasumsikan bahwa semua variabel lainnya tetap konstan. Perubahan terutama disebabkan oleh tingkat suku bunga pinjaman variabel.

Sensitivity Analysis

For floating rate bank loans, the sensitivity analysis is prepared assuming the amount of bank loans outstanding at the statement of financial position date was outstanding for the whole year. A change of 100 basis points in interest rates at the reporting dates would have increased or decreased profit before income tax for the year then ended December 31, 2025 by Rp 21,854,607 thousand (2024: Rp 22,615,095 thousand). This analysis assumes that all other variables remain constant. The movement is mainly attributable to interest rates on its variable rate borrowings.

Untuk modal kerja, utang dan pinjaman investasi, Perusahaan berusaha dengan mengurangi risiko tingkat suku bunganya dengan cara mendapatkan struktur pinjaman dengan suku bunga kompetitif.

For working capital, investment loans and borrowings, the Company may seek to mitigate its interest rate risk by obtaining loans structure with competitive interest rate.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaannya, selain menggunakan dana sendiri, Perusahaan juga membina kerjasama dengan beberapa bank nasional dan bank pemerintah maupun bank asing dalam bentuk *demand loan* dan *term loan*.

In its financing activities the Company does not only rely on their own funds, the Company is also able to use other sources of funds from several banks by agreement in the forms of demand loan and term loan.

Saldo kas setiap hari cukup untuk minimal menutupi kebutuhan dana pembiayaan satu hari. Perusahaan juga mempunyai fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang dapat ditarik setiap waktu dengan limit minimal menutup kebutuhan dana 5 hari kerja.

An adequate cash balance is maintained every day to cover financing needs for one day. The Company also has a current account loan facility that may be withdrawn at any time with a minimum limit to cover financing needs for 5 business days.

Perbandingan liabilitas terhadap ekuitas Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar 323,85% (2024: 331,52%). Dalam hal perbandingan liabilitas terhadap jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar 76,41% (2024: 76,83%).

The comparison of the Company's liabilities to equity is 323.85% as of December 31, 2025 (2024: 331.52%). Meanwhile, the ratio of liabilities to total assets is 76.41% as of December 31, 2025 (2024: 76.83%).

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following table shows the differences in the maturity profile of the Company's financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024:

	2025					
	Sampai dengan 1 bulan/ *Until 1 month*	> 1 bulan s.d 3 bulan/ *> 1 month until 3 months*	> 3 bulan s.d 12 bulan/ *> 3 months until 12 months*	> 1 tahun s.d 5 tahun/ *> 1 year until 5 years*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Aset keuangan						**Financial assets**
Tanpa suku bunga:						Non bearing interest:
Kas dan setara kas	313.951	-	-	-	313.951	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain kepada pihak berelasi	-	-	2.178.048	-	2.178.048	Other accounts receivable to related parties
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	66.002.702	432.531	9.217.697	60.640.516	136.293.446	Other accounts receivable to third parties
Suku bunga variabel						Variable interest
Kas dan setara kas	72.731.306	-	-	-	72.731.306	Cash and cash equivalents
Aset derivatif	-	1.749.376	-	-	1.749.376	Derivative assets
Suku bunga tetap						Fixed interest
Piutang pembiayaan konsumen	122.565.894	154.735.057	605.152.932	1.169.779.766	2.052.233.649	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	62.468.743	83.453.717	301.789.348	578.238.947	1.025.950.755	Finance lease receivables
Jumlah	324.082.596	240.370.681	918.338.025	1.808.659.229	3.291.450.531	Total
Liabilitas keuangan						**Financial liabilities**
Tanpa suku bunga:						Without interest:
Utang usaha	239.490	-	-	-	239.490	Trade accounts payable
Utang lain-lain	2.362.545	44.901.741	2.346.671	4.380.069	53.991.026	Other accounts payable
Suku bunga variabel:						Variable interest:
Utang bank	1.943.464.728	3.978.788	26.773.684	211.243.489	2.185.460.689	Bank loans
Suku bunga tetap:						Fixed interest:
Utang bank	6.031.123	7.338.220	37.014.800	61.017.579	111.401.722	Bank loans
Liabilitas Sewa	563.614	582.315	1.180.352	19.140.590	21.466.871	Lease Liability
Jumlah	1.952.661.500	56.801.064	67.315.507	295.781.727	2.372.559.798	Total
Bersih	(1.628.578.904)	183.569.617	851.022.518	1.512.877.502	918.890.733	Net

	2024					
	Sampai dengan 1 bulan/ *Until 1 month*	> 1 bulan s.d 3 bulan/ *> 1 month until 3 months*	> 3 bulan s.d 12 bulan/ *> 3 months until 12 months*	> 1 tahun s.d 5 tahun/ *> 1 year until 5 years*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Aset keuangan						**Financial assets**
Tanpa suku bunga:						Non bearing interest:
Kas dan setara kas	463.408	-	-	-	463.408	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain kepada pihak berelasi	-	-	2.652.802	-	2.652.802	Other accounts receivable to related parties
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	67.215.536	499.104	1.344.079	43.006.288	112.065.007	Other accounts receivable to third parties
Suku bunga variabel						Variable interest
Kas dan setara kas	22.194.292	-	-	-	22.194.292	Cash and cash equivalents
Aset derivatif	-	3.767.652	-	-	3.767.652	Derivative assets
Suku bunga tetap						Fixed interest
Kas dan setara kas	18.000.000	-	-	-	18.000.000	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	95.579.215	153.041.498	608.351.223	1.280.797.798	2.137.769.734	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	50.929.459	67.773.118	274.868.213	602.634.175	996.204.965	Finance lease receivables
Jumlah	254.381.910	225.081.372	887.216.317	1.926.438.261	3.293.117.860	Total
Liabilitas keuangan						**Financial liabilities**
Tanpa suku bunga:						Without interest:
Utang usaha	4.490.658	-	-	-	4.490.658	Trade accounts payable
Utang lain-lain	3.065.312	47.695.078	805.550	6.659.584	58.225.524	Other accounts payable
Suku bunga variabel:						Variable interest:
Utang bank	1.716.330.226	13.576.190	42.093.584	120.289.028	1.892.289.028	Bank loans
Suku bunga tetap:						Fixed interest:
Utang bank	336.113.260	3.070.780	30.036.427	85.908.066	455.128.533	Bank loans
Liabilitas Sewa	481.748	498.493	900.603	22.739.800	24.620.644	Lease liability
Jumlah	2.060.481.204	64.840.541	73.836.164	235.596.478	2.434.754.387	Total
Bersih	(1.806.099.294)	160.240.831	813.380.153	1.690.841.783	858.363.473	Net

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur antara lain risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan settlement risk.

Risiko kredit merupakan risiko utama karena Perusahaan bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Secara langsung, Perusahaan menghadapi risiko seandainya konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan. Oleh karenanya Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip "Benar dari Awal" yang diterapkan oleh Perusahaan merupakan pencerminan dari sikap kehati-hatian ini. Perusahaan menerapkan proses pemberian kredit yang ketat, antara lain survei calon konsumen, verifikasi data konsumen, dan persyaratan uang muka yang berlaku. Prinsip 5C dan 1P *(Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral dan Purpose)* sudah merupakan standar dalam setiap analisa kelayakan konsumen. Juga pemilihan dan analisa *Dealer*/*Showroom* atau vendor merupakan kesatuan dari analisa persetujuan proses pembiayaan.

Analisis calon konsumen dan pemantauan Konsumen secara menyeluruh, Perusahaan menggunakan survei internal untuk validasi informasi calon konsumen dan survei yang telah dilakukan oleh *Credit Marketing Officer* (CMO) tanpa mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan persetujuan pembiayaan. Perusahaan pun melakukan pemantauan karakteristik pembayaran angsuran dari konsumen, status jaminan dan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan konsumen sehingga konsumen yang akan bermasalah dapat diantisipasi lebih awal.

Untuk pembiayaan korporasi, Perusahaan menerapkan kebijakan hanya akan bertransaksi dengan rekanan yang memiliki kelayakan kredit dan mendapatkan jaminan yang memadai, bila sesuai, sebagai sarana mengurangi risiko kerugian atau tunggakan. Selain itu, Perusahaan meminimalkan risiko kredit melalui optimalisasi struktur manajemen kredit, antara lain dengan menggunakan sistem pemeringkatan (rating) dalam menilai kelayakan nasabah korporasi.

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit dan analisa konsentrasi risiko kredit Perusahaan.

I. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat dengan menggunakan nilai gross

Credit Risk

Credit risk is the risk due to failure of other parties to fulfill obligations to the Company, including credit risk due to debtor failure, including credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk.

Credit risk is a major risk because the Company is engaged in consumer financing and finance lease. The Company faces risks directly when consumers are not able to fulfill their obligations in paying off loans already agreed upon in the contract between consumers and the Company. Therefore the Company applies the precautionary principle. The "Right from the Beginning" principle adopted by the Company is a reflection of this attitude of prudence. The Company applies a rigorous credit process, including surveys of potential customers, verification of customer data, and applicable requirements for down payments. The 5C and 1P (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral dan Purpose) principles have become standard in every consumer feasibility analysis. Selection and analysis Dealer/Showroom or vendor is also an integral part of the financing process analysis.

In its analysis of prospective consumers and monitoring of consumers as a whole, the Company uses an internal survey service to validate information on prospective consumers and a survey conducted by Credit Marketing Officer (CMO) without reducing the speed of financing approval decisions. The Company also monitors the characteristics of consumer installment payments, insurance status, and other conditions that may affect the consumer's income sources so that consumers who might pose problems can be recognized early.

For corporate financing, the Company implements a policy of only transacting with partners who are creditworthy and receive adequate collateral, if appropriate, as a means of reducing the risk of loss or arrears. In addition, the Company minimizes credit risk by optimizing the credit management structure, including by using a rating system to assess the creditworthiness of corporate customers.

The following are the Company's maximum exposure to credit risk and credit risk concentration analysis.

I. Maximum exposure to credit risk

The Company's credit risk exposure is almost entirely derived from consumer financing and finance lease receivables, where the maximum credit risk exposure is equal to the carrying amount with gross amount.

II. Analisis konsentrasi risiko kredit

Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah konsumen bergerak dalam aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Perusahaan bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen yang pelanggannya mayoritas adalah individu dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu, kecuali untuk sewa pembiayaan. Untuk usaha pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, proses pemberian kredit dijalankan sangat ketat, mulai dari survei calon konsumen, verifikasi data konsumen serta pemberian uang muka sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga risiko yang mungkin timbul dapat dikendalikan dengan baik.

Perusahaan juga menerapkan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko atas piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang dimiliki Perusahaan:

II. Credit risk concentration analysis

Concentration of credit risk arises when a number of consumers operate in the same business activity or in activities within the same geographic area, or when they have similar characteristics that would cause the ability to meet contractual obligations to be equally affected by changes in economic or other conditions.

The Company is engaged in the consumer financing business the majority of whose clients are individuals and not concentrated in any certain geographic areas, except for finance lease. For consumer finance and finance lease business, the process for extending credit is very strict, with the survey of prospective customers, verification of customer data, and down payments based on conditions applied, so the risks that might arise can be controlled properly.

The Company is also implementing Anti-Money-Laundering, Terrorism-Funding-Prevention Programs and Prevention of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in respect to the regulation based on Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Art. 8 year 2023 regarding on the Implementation of Anti-Money Laundering Program, Prevention of Financing of Terrorism, and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction by Financial Service Providers in the Non-Bank Financial Industry Sector.

The following table illustrates the amount of credit risk and concentration risk on consumer financing receivables and finance lease receivables held by the Company:

	2025	2024	
	Rp'000	Rp'000	
Piutang pembiayaan konsumen			Consumer financing receivables
Korporasi	113.276.605	118.090.434	Corporate
Individu	2.517.505.397	2.651.864.943	Individual
Sub-jumlah	2.630.782.002	2.769.955.377	Sub-total
Piutang sewa Pembiayaan			Finance lease receivables
Korporasi	1.139.848.185	1.121.249.477	Corporate
Individu	456.947	1.302.973	Individual
Sub-jumlah	1.140.305.132	1.122.552.450	Sub-total
Jumlah	3.771.087.134	3.892.507.827	Total

Berdasarkan laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan BMPP.

Based on the maximum financing limit (BMPP) reports as of December 31, 2025 and 2024, there is no financing receivables exceeding the BMPP regulation.

Tabel berikut merupakan rincian nilai dari agunan yang dimiliki oleh Perusahaan pada tanggal tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following tables detail the Company's collateral held as security as of December 31, 2025 and 2024:

	2025					
	Pembiayaan konsumen/ *Consumer finance*	Sewa pembiayaan/ *Finance lease*	Piutang lain-lain/ *Other receivable*	Kredit karyawan/ *Employee loan*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Eksposur kredit	2.052.233.649	997.997.713	123.569.861	573.200	3.174.374.423	Credit exposure
Nilai jaminan	2.512.809.613	1.135.967.650	143.261.894	-	3.792.039.157	Collateral value
Total eksposur tanpa jaminan kredit	-	-	-	573.200	573.200	Total Unsecured credit exposure
Porsi eksposur kredit tanpa jaminan kredit	-	-	-	100%	0,02%	Unsecured portion of credit exposure
Tanah dan bangunan	600.000	-	75.172.481	-	75.772.481	Land and building
Kendaraan	2.510.456.647	291.296.499	68.089.413	-	2.869.842.559	Vehicle
Mesin dan alat berat	1.752.966	670.335.310	-	-	672.088.276	Machine and heavy equipment
Lainnya	-	174.335.841	-	-	174.335.841	Others
Jumlah	2.512.809.613	1.135.967.650	143.261.894	-	3.792.039.157	Total

	2024					
	Pembiayaan konsumen/ *Consumer finance*	Sewa pembiayaan/ *Finance lease*	Piutang lain-lain/ *Other receivable*	Kredit karyawan/ *Employee loan*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Eksposur kredit	2.137.769.734	956.251.800	100.556.145	1.147.292	3.195.724.971	Credit exposure
Nilai jaminan	2.517.844.426	1.095.253.937	114.924.143	-	3.728.022.506	Collateral value
Total eksposur tanpa jaminan kredit	-	-	-	1.147.292	1.147.292	Total Unsecured credit exposure
Porsi eksposur kredit tanpa jaminan kredit	-	-	-	100%	0,04%	Unsecured portion of credit exposure
Tanah dan bangunan	5.578.015	-	69.395.716	-	74.973.731	Land and building
Kendaraan	2.510.513.445	327.273.013	45.528.427	-	2.883.314.885	Vehicle
Mesin dan alat berat	1.752.966	592.201.737	-	-	593.954.703	Machine and heavy equipment
Lainnya	-	175.779.187	-	-	175.779.187	Others
Jumlah	2.517.844.426	1.095.253.937	114.924.143	-	3.728.022.506	Total

38. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

38. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Company's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	2025				
	1 Januari/ *Januari 1,* 2025	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Financing cash flows*	Lain-lain/ *Others*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025* 2025	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Utang bank	2.347.417.561	(50.555.150)	-	2.296.862.411	Bank loans
Liabilitas sewa	24.620.644	(4.962.266)	1.808.493	21.466.871	Lease liabilities
	2.372.038.205	(55.517.416)	1.808.493	2.318.329.282	

	2024				
	1 Januari/ *Januari 1,* 2024	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Financing cash flows*	Lain-lain/ *Others*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024* 2024	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Utang bank	1.939.806.262	407.611.299	-	2.347.417.561	Bank loans
Liabilitas sewa	27.301.101	(4.703.365)	2.022.908	24.620.644	Lease liabilities
	1.967.107.363	402.907.934	2.022.908	2.372.038.205	

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN

- Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/BOC-MLI/I/26 tanggal 19 Januari 2026 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Audit, susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

  - Ketua : Dani Hamdani
  - Anggota : Adi Vithara Purba
  - Anggota : Brantas

- Pada tanggal 2 Maret 2026, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman baru dari Hachijuni Nagano Bank Ltd, Singapore Branch sebesar JPY550.000 ribu yang akan tersedia sampai dengan tanggal 2 Maret 2027.

39. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- Based on the Resolution of the Board of Commissioners No. 001/BOC-MLI/I/26 dated January 19, 2026 concerning the Determination of the Composition of the Members of the Audit Committee, the composition of the members of the Audit Committee are as follows:
  - Chairman : Dani Hamdani
  - Member : Adi Vithara Purba
  - Member : Brantas

- On March 2, 2026, the Company received a new loan facility from Hachijuni Nagano Bank Ltd, Singapore Branch amounting to JPY550,000 thousand which has term period up to March 2, 2027.

40. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan pada halaman 1 sampai dengan 91 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2026.

40. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements on pages 1 to 91 are the responsibilities of the management and are approved and authorized for issue by the Company's Directors on March 16, 2026.

LAMPIRAN 1 - PENGUNGKAPAN RASIO BERDASARKAN PERATURAN OJK NO.35/POJK.05/2018

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK No. 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura. Perseroan diharuskan untuk memenuhi sejumlah rasio keuangan tertentu. Rasio-rasio ini dibuat oleh Perusahaan berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan, dimana rasio tersebut dapat berbeda jika rasio tersebut dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia.

Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Peraturan OJK:

APPENDIX 1 – RATIOS DISCLOSURES PURSUANT TO OJK REGULATION NO. 35/POJK.05/2018

Based on POJK No. 35/POJK.05/2018 dated December 28, 2018 regarding Business Operations of Financing Company, as lastly amended by POJK No. 35 Year 2025 regarding the changes of POJK No. 46 Year 2024 regarding the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies, the Company is required to comply with several financial ratios. These ratios have been prepared by the Company based on the formula as prescribed in the OJK regulation for regulatory compliance purposes, where such ratios might differ had the ratios been computed based on Indonesian financing accounting standards.

The following are the financial ratios based on OJK Regulations:

	2025	2024	
Rasio piutang pembiayaan neto terhadap total aset	91,21%	92,25%	Financing to asset ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pendanaan yang diterima	125,22%	126,16%	Net financing receivables to funding ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan neto untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	42,26%	38,58%	Net financing receivables for investment and working capital Financing to total financing receivables ratio
Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF)	1,59%	0,42%	Non-performing financing (NPF) ratio
Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) termasuk Repo *)	4,00%	2,54%	Non-performing financing (NPF) ratio including Repo *)
Rasio permodalan	72,18%	69,15%	Capital ratio
Gearing ratio	3,09	3,14	Gearing ratio
Rasio ekuitas terhadap modal disetor	130,82%	131,50%	Equity to paid up capital ratio
*) Termasuk piutang yang jaminannya dalam proses diambil alih.			*) Including receivables which collateral under take over process.

MIZUHO **Mizuho Leasing Indonesia**

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Menara Astra 32nd Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220
Telp: +62 21 5085.1848
Fax: +62 21 5085.1849
www.mizuho-ls.co.id

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan